BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 100.3.3.2/ 175 /Kpts/433.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 32 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai Semester 1 Tahun Berjalan;
c. BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Penutup.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 14 AUG 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN,

ARIEF MOELIA EDIE

Tembusan :

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Bangkalan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Perubahan RENJA Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan merupakan dokumen perencanaan yang berisi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2024.

Perubahan RENJA Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 pada dasarnya merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan yang berisi rumusan Visi, Misi dan Tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang dijadikan acuan Perubahan RENJA bersumber pada RENSTRA Dinas Pendidikan, sehingga perwujudan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 juga merupakan gambaran implementasi kegiatan yang dirumuskan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang khususnya pada pencapaian di tahun 2024.

Semoga Perubahan RENJA ini dapat dijadikan pedoman bagi aparatur pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut agar mampu mencapai target yang diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan selama satu tahun periode Tahun 2024.

Akhirnya kami bersama Fasilitator dan Tim Penyusun Perubahan RENJA menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kepentingan dengan harapan kritik dan saran demi kesempurnaan perencanaan dan dalam hal perwujudan program dan kegiatan. Semoga Perubahan RENJA ini bermanfaat bagi pembaca, pelaksana, dan pengambil kebijakan yang budiman. Amin.

'KUB S.Pdi. M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121 006

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah kabupaten/kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kaitannya dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun dan memiliki Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, akuntabel dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*.

Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal.

Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Perubahan RENJA Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

1.1. LATAR BELAKANG

Tujuan utama pendidikan di Kabupaten Bangkalan adalah mempercepat pencapaian target kebijakan nasional mengenai Pendidikan untuk semua (*education for all*) dan dalam rangka pelaksanaan Konsep Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap.

Pembangunan pendidikan, pada hakekatnya, merupakan proses pembangunan sosial-ekonomi dan budaya untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera lahir maupun batin. Program pembangunan pendidikan, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, merupakan upaya untuk

meningkatkan pendidikan rata-rata penduduk, yang selanjutnya dengan program ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih dan menerapkan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitasnya. Begitu pula meningkatnya mutu pendidikan akan memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pembangunan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan.

Meningkatnya kemampuan murid menguasai berbagai mata pelajaran, meningkatnya kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, dan meningkatnya kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah sebagai unit terdepan pelaksana pendidikan, diyakini akan meningkatkan proses kemajuan sosial, ekonomi dan budaya bangsa, bahkan politik dan keamanan. Kesemuanya itu membutuhkan suatu perencanaan yang berkelanjutan, terarah dan terintegrasi (terpadu).

Sejalan dengan pentingnya peran perencanaan pembangunan pendidikan yang terencana dan sistematis, serta atas dasar pemikiran bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang berjangka panjang, maka perencanaan pembangunan di bidang pendidikan disusun dalam bentuk perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas pembangunan. Demikian pula kerangka pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program disusun secara sistematis dan terarah, yang meliputi pendanaan terkait dengan APBN, APBD propinsi, APBD Kabupaten maupun dari kerja sama pihak-pihak lain.

Seiring dengan penerbitan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas membantu Bupati Bangkalan dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja ini merupakan suatu

program yang disusun dan harus dilaksanakan melalui mekanisme dan proses yang nantinya dapat berdaya guna dalam jangka satu tahun dengan berorientasi pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan selama kurun waktu lima tahunan dari 2024-2026.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud disusun oleh Pemerintah Daerah yang merupakan tanggung jawab Bappeda dengan melibatkan SKPD sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Berdasarkan pertimbangan di atas guna memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan perencanaan dan pembanguan khususnya bidang Pendidikan, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Ada 6 (enam) tahapan utama proses penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah, **tahapan pertama** yaitu tahap persiapan penyusunan, **selanjutnya** tahap penyusunan rancangan awal, **tahap ketiga** adalah penyusunan rancangan, **dilanjutkan** dengan tahap pelaksanaan forum PD, **tahap kelima** adalah tahap perumusan rancangan akhir dan yang terakhir adalah tahap penetapan Perubahan RENJA PD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Pendidikan disusun berdasarkan landasan hukum yang memberikan aspek legal dan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan untuk dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku.

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 1004, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standatr pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lemvaran Negara Republik Indosenia tahun 2019 nomor 24, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
8. Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan Ekonomi di kawasan Gresik Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamonagan kawasan Bromo Tangger Semeru, serta kawasan selingkar wilis dan lintas selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 202l Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berta Negara Republik Indonesian Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
21. Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 tentang SPM Pendidikan mengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
27. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);

28. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

1. Menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dengan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Bangkalan dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan.
2. Memberi arah pedoman dan strategi dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan tahunan pendidikan Kabupaten Bangkalan sehingga mampu mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan yang merupakan penjabaran dari Renstra dalam mengoperasionalkan program/kegiatan yang lebih menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi;
4. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun yang berjalan dan dibiayai dari APBD Kabupaten Bangkalan;
5. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahun yang berjalan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;
6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD;
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Tujuan

a. Mendiskripsikan tentang program - program serta kegiatan - kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sehingga program - program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
b. Sebagai pedoman semua institusi yang bergerak dalam dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan;
c. Menata Pendidikan di Kabupaten Bangkalan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan Global;
d. Sebagai Evaluasi pelaksanaan pendidikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga dapat di jadikan pertimbangan akan penyusunan Rencana Program berikutnya;
e. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;
f. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam melaksanakan kerja Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;
g. Membangun partisipasi stakeholder Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dalam perencanaan pembangunan;
h. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan disusun berdasarkan landasan kebijakan pendidikan di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Analisis Situasi Strategis, baik eksternal maupun internal tentang berbagai aspek yang terkait dengan perkembangan pendidikan ke depan. Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai landasan pengembangan pendidikan lebih diarahkan untuk merintis percepatan sesuai kondisi dan karakteristik pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan, berisikan:

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Semester Tahun Berjalan, berisikan:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai Semester I Tahun 2024

III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1. Tujuan dan Sasaran P-Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah

3.2. Matrik Rancangan P-Renja Tahun 2024

IV. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 sampai Triwulan II tahun berjalan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkiraan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi Anggaran untuk PD.

Perubahan RENJA Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA. Perubahan RENJA ditetapkan pada awal/pertengahan tahun 2024, Perubahan RENJA tahun 2024 memuat target kinerja tahun 2024 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2024
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	DINAS PENDIDIKAN			**749.694.006.218**		**670.560.563.707**				**709.409.493.073**				**813.710.316.124**				
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**95**	**542.764.479.718**									**85**	**528.103.829.130**	**46,42**	**240.355.848.597**	**48,86%**	**44,28%**
		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan			**90**	**452.970.919.006**	**95**	**482.205.826.670**	**95**	**445.325.257.157**	**100%**	**92,35%**						
1.01.01 .2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesui dengan aturan**	**100%**	**540.056.500**	**100%**	**9.649.410.000**	**100%**	**221.315.650**	**100%**	**220.252.650**	**100%**	**99,52%**	**90%**	**-**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, IKI, Ranwal Renja, Ranhir Renja, Perubahan IKU, Perubahan IKI)	4	30.000.000	4	9.315.750	4	26.960.000	4	26.860.000	100%	99,63%	0	-	0	-	0%	0%
1.01.01 .2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10.000.000	1	2.250.000							0	-	0	-	0%	0%
1.01.01 .2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	10.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01 .2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01 .2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	10.000.000									0	-	0	-	0%	0%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD																
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	5.000.000	1	3.025.000	3	2.500.000	3	2.500.000	100%	100,00 %	0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Profil Pendidikan, Laporan Individu, LAKIP, Evaluasi Internal, Pengukuran Kinerja, Pengukuran Rencana Aksi, SPM, LKPJ, LPPD, Peta Mutu Pendidikan, BPPDGS, Beasiswa, PSP)	13	470.056.500	6	9.634.819.250	6	191.855.650	6	190.892.650	100%	99,50%	0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**533.967.779.718**	**100%**	**434.450.346.215**	**100%**	**478.499.286.070**	**100%**	**441.698.714.233**	**100%**	**92,31%**	**100%**	**527.505.130.547**	**50%**	**239.953.110.225**	**50,00%**	**44,94%**
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5368	533.960.779.718	4380	434.446.209.365	4568	478.495.735.370	4568	441.695.165.233	100%	92,31%	5111	527.505.130.547	5111	239.953.110.225	95%	45%
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	2.500.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2.500.000	3	1.251.000	3	2.500.000	3	2.499.500	100%	99,98%	0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	1.000.000	2	2.885.850	12	1.050.700	12	1.049.500	100%	99,89%	0	-	0	-	0%	0%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun**	**100%**	**7.000.000**	**100%**	**14.400.000**	**100%**	**49.970.900**	**100%**	**49.602.500**	**100%**	**99,26%**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	1.000.000	1	14.400.000	1	49.970.900	1	49.602.500	100%	99,26%	0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi kepegawaian PD yang terlaksana**	**100%**	**20.000.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**0,00%**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	695	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	5.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.05.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	10.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	695	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**18.000.000**	**100%**	**156.091.200**	**100%**	**202.308.800**	**100%**	**198.566.600**	**100%**	**98,15%**	**100%**	**4.938.300**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	1.000.000	2	10.620.000	2	12.390.100	2	12.390.100	100%	100,00 %	2	4.938.300,00	0	-	0%	0%
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1.000.000	38	102.213.700	38	151.679.200	38	147.937.000	100%	97,53%	0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	1.000.000	2	30.257.500	2	37.509.500	2	37.509.500	100%	100,00 %	0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	10.000.000	86	13.000.000	2	730.000	2	730.000	100%	100,00 %	0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**85%**	**265.000.000**	**100%**	**313.636.000**	**100%**	**332.300.000**	**100%**	**332.144.000**	**100%**	**99,95%**	**75%**	**-**	**0%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	230.000.000	3	313.636.000	3	332.300.000	3	332.144.000	100%	99,95%	0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	20.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	10.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3	5.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**	**7.905.943.500**	**100%**	**8.241.950.985**	**100%**	**2.637.633.250**	**100%**	**2.580.906.281**	**100%**	**97,85%**	**80%**	**546.778.583**	**57,14 %**	**381.833.372**	**63,49%**	**4,83%**
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500	4.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	179.100.000	3	173.412.130	3	245.801.000	3	195.687.181	100%	79,61%	3	192.948.583,00	2	93.343.372	67%	52%
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	98.243.500	38	124.502.300	6	112.787.250	6	111.388.900	100%	98,76%	0	-	0	-	0%	0%
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	7.624.600.000	7	7.944.036.555	9	2.279.045.000	9	2.273.830.200	100%	99,77%	4	353.830.000,00	2	288.490.000	29%	4%
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang**	**90%**	**40.700.000**	**100%**	**145.084.606**	**100%**	**263.012.000**	**100%**	**245.070.893**	**100%**	**93,18%**	**80%**	**46.981.700**	**32,11 %**	**20.905.000**	**35,68%**	**51,36%**

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**																
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	15.700.000	32	66.104.606	1	196.482.000	1	179.280.893	100%	91,25%	46	23.080.700,00	8	3.685.000	17%	23%
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	5.000.000									25	550.000,00	0	-	0%	0%
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	14.120.000	57	60.680.000	1	29.290.000	1	29.290.000	100%	100,00 %	35	18.255.000,00	24	12.170.000	69%	86%
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	5.880.000	1	18.300.000	1	37.240.000	1	36.500.000	100%	98,01%	3	5.096.000,00	3	5.050.000	100%	86%
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A**	**50%**	**206.917.526.500**									**30%**	**285.032.971.094**	**125%**	**766.378.101.711**	**250,00%**	**370,38%**
		Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A	**55,33%**										**25,33%**					
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	**94,50%**										**88,50%**					
		Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	**13%**										**7%**					
		Persentase capaian SPM pendidikan di Kabupaten Bangkalan			**45%**	**217.412.094.701**	**50%**	**285.508.393.305**	**50%**	**263.933.035.916**	**100%**	**92,44%**						
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**	**99%**	**116.088.099.300,0**									**99%**	**153.635.164.064,0**	**1,54%**	**56.527.482.693,0**	**1,56%**	**48,69%**
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	**90%**										**90%**					
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	**100%**										**100%**					
		Angka Putus Sekolah (SD/MI)	**0,07%**										**0,09%**					
		Persentase sekolah	**100%**										**100%**					

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		jenjang SD yang memiliki sarpras sesuai standard																
		Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun dalam pendidikan dasar jenjang SD			**103,99 %**	**119.356.191.841**	**100%**	**155.924.069.184**	**103,99 %**	**141.403.671.603**	**104%**	**90,69%**						
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3	500.000.000	6	1.558.496.850	10	7.427.911.000	5	3.925.553.150	50%	52,85%	3	2.545.000.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			7	1.900.567.050	100	6.140.670.000	56	3.434.631.100	56%	55,93%						
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3	600.000.000			100	1.076.387.500	93	1.000.691.300	93%	92,97%	0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	350.000.000			100	365.200.000	100	365.200.000	100%	100,00 %	2	640.560.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	500.000.000			100	980.730.000	90	880.363.600	90%	89,77%	2	326.510.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	730.000.000	26	903.332.050	100	2.099.528.000	95	1.995.265.850	95%	95,03%	12	2.605.226.000,00	0	11.843.000	0%	2%
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2	1.310.401.100									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			10	796.138.200	100	22.267.453.485	77	17.265.528.725	77%	77,54%						
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	300.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	200.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	200.000.000			100	334.862.600	57	189.444.450	57%	56,57%	0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas			34	786.728.300	100	1.160.010.000	94	1.096.763.000	94%	94,55%						

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
012	Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sekolah yang Telah Direhabilitasi																
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2	200.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3	700.000.000	2	189.067.500	100	3.313.667.400	82	2.702.904.000	82%	81,57%	2	2.785.399.961,00	0	918.365.000	0%	131%
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50000	1.000.000									50000	100.000.350,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	150	500.000.000	6	15.587.500.000	100	625.000.000	55	344.600.000	55%	55,14%	5	2.301.155.453,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0023	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			0	127.132.800	678	125.000.000	585	107.900.000	86%	86,32%						
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	1.000.000	100	43.250.000	100	299.975.100	70	209.426.900	70%	69,81%	500	511.305.900,00	68	80.542.500	14%	8054%
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4980	1.000.000			434	5.149.275.000	365	4.324.794.003	84%	83,99%	347	5.079.500.300,00	170	2.677.354.943	3%	267735%
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500	4.500.000	0	-	9350	714.908.300	9038	691.122.850	97%	96,67%	914	652.562.500,00	37	25.838.700	7%	574%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	3	368.716.600									1	650.000.000,00	1	500.000.000	33%	136%
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	679	102.233.725.600	649	97.211.845.091,00	649	100.686.539.184	647	100.330.109.050	100%	99,65%	679	100.360.395.000,00	347	51.158.835.000,00	51%	50%
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	679	10.000.000	649	252.134.000							679	695.497.200,00	236	346.239.000	35%	3462%
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Sedang/Berat	2	2.000.000.000			5	1.159.200.000	5	1.155.600.000	100%	99,69%	2	1.313.915.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1	1.697.751.615	1	1.093.773.625	100%	64,42%	13	738.607.600,00	0	-		
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40	1.000.000			1	300.000.000	1	290.000.000	100%	96,67%	40	200.000.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02	Perlengkapan Dasar	Jumlah Buku Teks dan	0	-									2000	52.500.000,00	0	-		

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
.2.01.0045	Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Non Teks yang Diterima Peserta Didik																
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	200.000.000									4	10.911.085.900,00	1	211.052.450	25%	106%
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	2.544.756.000									7	102.489.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	679	125.000.000									679	196.975.700,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	2.500.000.000									6	20.866.478.200,00	1	597.412.100	17%	24%
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**	**115,25 %**	**55.086.847.600**									**115,25 %**	**80.823.561.080**	**305%**	**25.573.963.675**	**264,51%**	**46,42%**
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	**100%**										**98,33%**					
		3. Angka Melanjutkan SD ke SMP	**100%**										**100%**					
		Angka Putus Sekolah (SMP/MTs)	**0,05%**										**0,15%**					
		Persentase sekolah jenjang SMP yang memiliki sarpras sesuai standard	**100%**										**60%**					
		Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun dalam pendidikan dasar jenjang SMP			**94,80%**	**53.590.244.700**	**100%**	**79.265.730.416**	**94,80%**	**72.848.910.486**	**95%**	**91,90%**						
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	1.000.000	1	17.652.441	1	1.379.245.000	0	-	0%	0,00%	2	1.420.000.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			5	1.399.396.250	9	2.303.579.500	8	2.004.224.400	89%	87,00%						

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
002																		
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	378.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	378.000.000									6	1.862.400.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	378.000.000									4	785.000.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	378.000.000									4	1.666.000.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5	378.000.000	13	2.579.556.000							0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	7	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	7	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	378.000.000	3	777.811.500	4	9.457.080.746	3	7.466.312.970	75%	78,95%	9	3.059.194.771,00	1	80.277.875	25%	21%
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	23	1.378.000.000	7	99.738.300	23	3.155.517.904	23	3.155.120.650	100%	99,99%	46	8.006.821.600,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0015	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	241.600.000	1	241.600.000	100%	100,00%						
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	378.000.000			1	54.800.000	1	54.800.000	100%	100,00%	1	45.000.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	378.000.000									3	558.100.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02	Rehabilitasi	Jumlah Laboratorium	8	378.000.000									3	736.700.000,00	0	-	0%	0%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
.2.02.0 018	Sedang/Berat Laboratorium	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat																
1.01.02 .2.02.0 019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02 .2.02.0 021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02 .2.02.0 022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02 .2.02.0 023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	10	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02 .2.02.0 024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	378.000.000			17	12.481.465.900	15	10.440.316.500	88%	83,65%	11	4.639.141.618,00	1	591.765.600	25%	157%
1.01.02 .2.02.0 025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	1.000.000									63	2.235.000.005,00	0	-	0%	0%
1.01.02 .2.02.0 032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (PIP dan Beasiswa)	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17550	110.000.000			1000	1.861.559.800	923	1.717.717.050	92%	92,27%	1200	1.089.894.135,00	0	-	0%	0%
1.01.02 .2.02.0 035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	378.000.000	3	2.765.358.600							61	4.233.303.051,00	0	-	0%	0%
1.01.02 .2.02.0 036	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			250	71.800.000	250	75.000.000	246	74.186.300	98%	98,92%						
1.01.02 .2.02.0 037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi					84	32.637.100	81	31.354.700	96%	96,07%						
1.01.02 .2.02.0 038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	450	1.000.000									375	512.900.600,00	20	27.796.200	4%	2780%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Akademik dan Non Akademik																
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8597	691.200.000									25	107.845.700,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2084	20.000.000	6	48.000.000	5	270.951.700	5	260.606.950	100%	96,18%	805	336.500.000,00	603	246.012.100	29%	1230%
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	258	1.000.000			1	689.001.500	1	165.765.000	100%	24,06%	258	303.400.000,00	82	95.750.000	32%	9575%
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	255	47.061.640.000	55	45.828.931.609	250	46.499.940.816	250	46.499.940.816	100%	100,00 %	255	46.234.685.000,00	135	24.387.590.000	53%	52%
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	245	1.000.000	250	2.000.000							245	442.845.000,00	10	16.611.500	4%	1661%
1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	378.000.000			2	488.200.000	2	488.200.000	100%	100,00 %	3	405.400.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	378.000.000			2	109.700.000	2	109.700.000	100%	100,00 %	4	565.200.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	55	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80	1.000.000			16	9.376.600	4	2.378.700	25%	25,37%	80	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang	55	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Pendidikan yang dilaksanakan																
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan					309	156.073.850	271	136.686.450	88%	87,58%						
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	345	75.000.000									345	341.772.800,00	155	128.160.400	45%	171%
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	443.007.600									1	202.756.800,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	55	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0	-									2	52.500.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	378.000.000									4	981.200.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini**	**72%**	**19.541.956.800**									**57%**	**24.321.407.150**	**257%**	**9.730.004.250**	**356,94%**	**49,79%**
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	**77,50%**										**72,35%**					
		Persentase sekolah jenjang PAUD yang memiliki sarpras sesuai standard	**40%**										**37%**					
		Partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun dalam pendidikan usia dini			**100%**	**18.775.533.160**	**100%**	**20.845.930.750**	**100%**	**20.644.185.777**	**100%**	**99,03%**						
1.01.02.2.03.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun			2	473.830.000	3	425.210.000	3	424.138.565	100%	99,75%						
1.01.02.2.03.0	Pembangunan Sarana, Prasarana	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	4	-			1	453.025.000	1	452.992.450	100%	99,99%					0%	0%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
002	dan Utilitas PAUD	PAUD yang Telah Dibangun																
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	417.503.910			1	600.000.000	1	596.063.012	100%	99,34%	3	600.501.000,00	0	3.299.750	0%	1%
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	500.000.000	7	597.053.160	3	220.000.000	3	219.288.950	100%	99,68%	2	1.187.458.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4	100.000.000			1	200.000.000	1	198.372.000	100%	99,19%	13	894.534.000,00	3	291.288.000	75%	291%
1.01.02.2.03.0010	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia					4	100.000.000	4	99.200.000	100%	99,20%						
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik																
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4	250.000.000	11	273.900.000	3	50.000.000	3	49.000.000	100%	98,00%	60	954.600.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	364	50.000.000			50	50.000.000	43	43.334.250	86%	86,67%	330	50.000.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.03.0014	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi					400	98.405.000	400	98.356.800	100%	99,95%						
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2678	1.000.000									180	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	356	121.600.000	136	259.200.000	136	410.956.750	131	396.915.750	96%	96,58%	4302	1.424.600.150,00	330	186.402.000	93%	153%
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	350	50.000.000			150	38.834.000	150	38.834.000	100%	100,00 %	300	265.880.000,00	116	102.435.000	33%	205%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	(SRA, UKS)	Manajemen																
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	920	17.814.063.400	18	17.171.550.000	800	18.199.500.000	792	18.027.690.000	99%	99,06%	857	17.508.250.000,00	436	8.908.100.000	47%	50%
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	-									240	75.000.000,00	144	44.880.000	60%	60%
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	230	1.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	125	1.000.000									1	300.000.000,00	1	193.599.500	1%	19360%
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	235.789.490									1	1.060.584.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Angka Kelulusan Paket A/B/C**	**95%**	**16.200.622.800**									**90%**	**26.252.838.800**	**290%**	**80.979.231.850**	**305,26%**	**499,85%**
		Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi	**83%**										**78%**					
		Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas	**62%**										**54%**					
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	**72101**										**71910**					
		Angka Melek Huruf	**72101**										**71910**					
		Partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan			**100%**	**25.690.125.000**	**100%**	**29.472.662.955**	**100%**	**29.036.268.050**	**100%**	**98,52%**						
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50	1.000.000			20	454.545.455	20	454.500.000	100%	99,99%	450	454.500.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1	8.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.02	Penyelenggaraan	Jumlah Peserta Didik			0	21.625.000	100	25.000.000	54	13.534.250	54%	54,14%						

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
.2.04.12	Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	yang Mengikuti Proses Belajar																
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2678	-			1000	8.161.498.150	1000	8.161.156.250	100%	100,00 %					0%	0%
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9342	5.824.800.000	9342	23.383.100.000	9342	17.650.879.350	9315	17.600.717.550	100%	99,72%	9342	13.393.458.800,00	127	181.987.150	1%	3%
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1656	8.114.000.000									1500	9.458.000.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25	2.219.822.800	1778	2.285.400.000	25	3.180.740.000	22	2.806.360.000	88%	88,23%	22	2.757.120.000,00	12	1.423.560.000	48%	64%
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	-									200	50.198.000,00	43	10.781.900	22%	21%
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	-									10	114.562.000,00	4	35.408.033	40%	31%
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	685	25.000.000									672	25.000.000,00	0	-	0%	0%
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	8.000.000									0	-	0	-	0%	0%
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP)**	**73,75%**	**7.000.000,00**									**62,75%**	**8.078.400,00**	**63%**	**8.078.400**	**85,08%**	**115,41%**
		Persentase capaian pengembangan	**80%**										**60%**					

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SD																
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SMP	**60%**										**50%**					
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang PAUD	**80%**										**76%**					
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang Kesetaraan	**75%**										**65%**					
1.01.03 .2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang Pendidikan Dasar**	**70%**	**4.000.000,00**									**55%**	**-**	**55%**	**-**	**78,57%**	**0,00%**
		Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal SD dan SMP yang tersusun	**2**										**2**					
1.01.03 .2.01.0 002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2	1.000.000,00									0	-	0	-	0%	0%
1.01.03 .2.01.0 003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2	1.000.000,00									0	-	0	-	0%	0%
1.01.03 .2.01.0 004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	257	1.000.000,00									0	-	0	-	0%	0%
1.01.03 .2.01.0 007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2	1.000.000,00									0	-	0	-	0%	0%
1.01.03	**Penetapan**	**Persentase capaian**	**77,50%**	**3.000.000,00**									**70,5%**	**8.078.400,00**	**71%**	**8.078.400**	**90,97%**	**269,28%**

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
.2.02	**Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal**																
		Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	**1**										**1**					
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	8	1.000.000,00									1	8.078.400,00	0	4.665.000	0%	467%
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	2	1.000.000,00									0	-	0	-	0%	0%
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2	1.000.000,00									0	-	0	-	0%	0%
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Tenaga Pendidik yang telah lulus Sertifikasi Pendidik**	**55%**	**2.000.000,00**									**45%**	**565.437.500,00**	**235%**	**894.187.500**	**427,27%**	**44709,38%**
		Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	**90%**										**80%**					
		Persentase capaian standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan			**95%**	**177.550.000,00**	**95%**	**177.642.000,00**	**95%**	**151.200.000,00**	**100%**	**85,12%**						
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi**	**Rasio guru / rombel SD**	**1:12**	**2.000.000,00**									**1:13**	**565.437.500,00**	**205%**	**894.187.500**	**4101,39 %**	**44709,38%**

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan																	
		Rasio Guru / rombel SMP	**1:11**										**1:12**					
		Rasio Guru / rombel PAUD	**1:13**										**1:20**					
		Rasio Pengawas / lembaga	**1:18**										**1:24**					
		Persentase capaian standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan			**100%**	**177.550.000,00**	**90%**	**177.642.000,00**	**100%**	**151.200.000,00**	**111%**	**85,12%**						
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	1.000.000,00	66	177.550.000,00	7	177.642.000	6	151.200.000	86%	85,12%	14	565.437.500,00	86	894.187.500	8600%	89419%
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1.000.000,00									0	-	0	-	0%	0%
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, PAUD dan Nonformal yang terfasilitasi perizinannya**	**98%**	**3.000.000,00**		**-**		**-**		**-**		**-**	**95%**	**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.05.2.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**83**	**2.000.000,00**		**-**		**-**		**-**		**-**	**83**	**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2014-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	83	1.000.000,00									0	-	0	-	0%	0%
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	83	1.000.000,00														
1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**980**	**1.000.000,00**		**-**		**-**		**-**		**-**	**960**	**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	960	1.000.000,00									0	-	0	-	0%	0%

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai Semester I Tahun 2024

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan didasarkan pada pencapaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM	IKK	Realisasi		Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika ada perubahan target)
					2022	2023			
1	**1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**					**85**	**85**	
		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan			**90%**	**95%**			
1	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesui dengan aturan			100%	100%	90%	90%	
2	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			100%	100%	100%	100%	
3	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun			100%	100%	100%	100%	
4	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian PD yang terlaksana			0%	0%	100%	100%	
5	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	
6	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			100%	100%	75%	75%	
7	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	80%	80%	
8	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			100%	100%	80%	80%	
2	**1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A**		**v**			30%	30%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM	IKK	Realisasi		Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika ada perubahan target)
					2022	2023			
		Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A		**v**			25,33%	25,33%	
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B		**v**			88,50%	88,50%	
		Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi		**v**			7%	7%	
		Persentase capaian SPM pendidikan di Kabupaten Bangkalan	**v**		45%	50%			
1	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI					99%	99%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI					90%	90%	
		Angka Melanjutkan SD ke SMP					100%	100%	
		Angka Putus Sekolah (SD/MI)					0,09%	0,09%	
		Persentase sekolah jenjang SD yang memiliki sarpras sesuai standard					100%	100%	
		Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun dalam pendidikan dasar jenjang SD		v	103,99%	103,99%			
2	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs					115,25%	115,25%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs					98,33%	98,33%	
		3. Angka Melanjutkan SD ke SMP					100%	100%	
		Angka Putus Sekolah (SMP/MTs)					0,15%	0,15%	
		Persentase sekolah jenjang SMP yang memiliki sarpras sesuai standard					60%	60%	
		Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun dalam pendidikan dasar jenjang SMP		v	95%	95%			
3	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini					57%	57%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini					72,35%	72,35%	
		Persentase sekolah jenjang PAUD yang memiliki sarpras sesuai standard					37%	37%	
		Partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun dalam pendidikan usia dini		v	100%	100%	90%	90%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM	IKK	Realisasi		Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika ada perubahan target)
					2022	2023			
4	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Kelulusan Paket A/B/C					78%	78%	
		Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi					54%	54%	
		Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas					71910	71910	
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)					71910	71910	
		Angka Melek Huruf							
		Partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan		v	100%	100%			
3	**1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP)**					**62,75%**	**62,75%**	
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SD					**60%**	**60%**	
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SMP					**50%**	**50%**	
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang PAUD					**76%**	**76%**	
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang Kesetaraan					**65%**	**65%**	
1	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang Pendidikan Dasar					55%	55%	
		Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal SD dan SMP yang tersusun					2	2	
2	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal					70,50%	70,50%	
		Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal Anak					1	1	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	SPM	IKK	Realisasi		Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika ada perubahan target)
					2022	2023			
		Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun							
4	**1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Tenaga Pendidik yang telah lulus Sertifikasi Pendidik**		**v**			**45%**	**45%**	
		Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		**v**			**80%**	**80%**	
		Persentase capaian standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan			**95%**	**95%**			
1	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rasio guru / rombel SD					1:13	1:13	
		Rasio Guru / rombel SMP					1:12	1:12	
		Rasio Guru / rombel PAUD					1:20	1:20	
		Rasio Pengawas / lembaga					1:24	1:24	
		Persentase capaian standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan			100%	100%			
5	**1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, PAUD dan Nonformal yang terfasilitasi perizinannya**					**95%**	**95%**	
1	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					83	83	
2	1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					960	960	

Berdasarkan pada tabel 2.2 tersebut, terdapat 2 periode RENSTRA yaitu Perubahan RENSTRA Tahun 2018-2023 dan RENSTRA Tahun 2024-2026 dimana ada perbedaan pada indikator kinerja Program dan Kegiatan yang digunakan sehingga tidak bisa disandingkan antara realisasi tahun 2022 dan 2023 dengan Realisasi 2024 sampai dengan semester I.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN DAN SASARAN

VISI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal"

MISI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

1. Meningkatkan kehidupan keagamaan;
2. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi;
3. Meningkatkan tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah;
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat;
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi

B. TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

1. TUJUAN

2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
5. Mengoptimalkan fasilitasi aktivitas ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;
6. Merevitalisasi potensi sosial dan budaya lokal yang mampu bersaing dengan meningkatkan branding produk daerah;
7. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan;
9. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerah.

2. SASARAN

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan kerukunan hidup beragama;
2. Meningkatnya kualitas sistem/kelembagaan, SDM dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan
5. Meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan
6. Meningkatnya penanggulagan kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan resiko bencana
7. Meningkatnya kinerja koperasi, UMKM, industri dan perdagangan
8. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan
9. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan
10. Meningkatnya trantibum, penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusiai (HAM)
11. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman
12. Terjaganya kualitas lingkungan melalui penataan ruang yang berwawasan lingkungan
13. Meningkatnya realisasi investasi daerah yang berkontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah

Dari data tersebut diatas, maka Tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan

Sedangkan Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pengelolaan pendidikan
2. Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan bidang pendidikan

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023 Dinas Pendidikan

Tujuan Perangkat Daerah				Sasaran Perangkat Daerah				
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		Keterangan
		Renstra	Perubahan Renja Tahun 2024			Renstra	Perubahan Renja Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	9,16	9,16	Meningkatnya akses dan kualitas pengelolaan pendidikan	Partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun dalam pendidikan usia dini	55%	55%	
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	6,19	6,19		Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun dalam pendidikan dasar jenjang SD	100%	100%	
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,13	12,13		Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun dalam pendidikan dasar jenjang SMP	98.60%	98.60%	
					Partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	84	84	
					Rerata kemampuan literasi SD	20%	20%	
					Rerata kemampuan literasi SMP	20%	20%	
					Rerata kemampuan Numerasi SD	20%	20%	
					Rerata kemampuan Numerasi SMP	20%	20%	
				Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan bidang pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	
					Nilai SAKIP PD	70	70	

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**709.303.903.517**					**813.710.316.124**		**104.406.412.607**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Dinas Pendidikan**	**85%**	**501.257.451.817**	**DAUM, DAK Non Fisik-TPG, DAK Non Fisik-Tamsil Guru**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Dinas Pendidikan**	**85%**	**528.103.829.130**	**DAUM, DAK Non Fisik-TPG, DAK Non Fisik-Tamsil Guru**	**26.846.377.313**	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesui dengan aturan	Dinas Pendidikan	90%	883.206.600	DAUM	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesui dengan aturan	Dinas Pendidikan	90%	-	DAUM	-883.206.600	Efisiensi anggaran
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinas Pendidikan	100%	492.958.852.191	DAUM, DAK Non Fisik-TPG, DAK Non Fisik-Tamsil Guru	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinas Pendidikan	100%	527.505.130.547	DAUM, DAK Non Fisik-TPG, DAK Non Fisik-Tamsil Guru	34.546.278.356	Kenaikan Gaji dan Tunjangan
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun	Dinas Pendidikan	100%	4.000.000	DAUM	Persentase Administrasi Barang milik daerah PD yang tersusun	Dinas Pendidikan	100%	-	DAUM	-4.000.000	Efisiensi anggaran
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian PD yang terlaksana	Dinas Pendidikan	100%	14.500.000	DAUM	Persentase Administrasi kepegawaian PD yang terlaksana	Dinas Pendidikan	100%	-	DAUM	-14.500.000	Efisiensi anggaran
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	100%	16.756.500	DAUM	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	100%	4.938.300	DAUM	-11.818.200	Efisiensi anggaran
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Dinas Pendidikan	75%	232.000.000	DAUM	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Dinas Pendidikan	75%	-	DAUM	-232.000.000	Efisiensi anggaran
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan	80%	7.111.436.526	DAUM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan	80%	546.778.583	DAUM	-6.564.657.943	Efisiensi anggaran
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Dinas Pendidikan	80%	36.700.000	DAUM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Dinas Pendidikan	80%	46.981.700	DAUM	10.281.700	Pemeliharaan bertambah
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A**	**Satuan pendidikan**	**30%**	**208.035.126.700**	**DAUM, DAK Fisik, DAK Non Fisik-BOS, DAK Non Fisik-BOP, DBKP**	**Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A**	**Satuan pendidikan**	**30%**	**285.032.971.094**	**DAUM, DAK Fisik, DAK Non Fisik-BOS, DAK Non Fisik-BOP**	**76.997.844.394**	
		Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A		**25,33%**			**Persentase satuan pendidikan SMP**		**25,33%**				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
							terakreditasi A						
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B		**88,50%**			**Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B**		**88,50%**				
		Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi		**7%**			**Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi**		**7%**				
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Satuan pendidikan	99%	115.619.774.800	DAUM, DAK Fisik, DAK Non Fisik-BOS, DBKP	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Satuan pendidikan	99%	153.635.164.064	DAUM, DAK Fisik, DAK Non Fisik-BOS, DBKP	38.015.389.264	Pembebasan lahan/Rehab & Silpa bertambah
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		90%			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		90%				
		Angka Melanjutkan SD ke SMP		100%			Angka Melanjutkan SD ke SMP		100%				
		Angka Putus Sekolah (SD/MI)		0,09%			Angka Putus Sekolah (SD/MI)		0,09%				
		Persentase sekolah jenjang SD yang memiliki sarpras sesuai standard		100%			Persentase sekolah jenjang SD yang memiliki sarpras sesuai standard		100%				
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Satuan pendidikan	115,25 %	56.294.713.900	DAUM, DAK Fisik, DAK Non Fisik-BOS, DBKP	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Satuan pendidikan	115,25 %	80.823.561.080	DAUM, DAK Fisik, DAK Non Fisik-BOS, DBKP	24.528.847.180	DAK Fisik, Rehab & Silpa bertambah
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		98,33%			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		98,33%				
		3. Angka Melanjutkan SD ke SMP		100%			3. Angka Melanjutkan SD ke SMP		100%				
		Angka Putus Sekolah (SMP/MTs)		0,15%			Angka Putus Sekolah (SMP/MTs)		0,15%				
		Persentase sekolah jenjang SMP yang memiliki sarpras sesuai standard		60%			Persentase sekolah jenjang SMP yang memiliki sarpras sesuai standard		60%				
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Satuan pendidikan	57%	18.960.148.000	DAUM, DAK Fisik, DAK Non Fisik-BOP, DBKP	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Satuan pendidikan	57%	24.321.407.150	DAUM, DAK Fisik, DAK Non Fisik-BOP, DBKP	5.361.259.150	DAK Fisik dan Silpa bertambah
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini		72,35%			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini		72,35%				
		Persentase sekolah jenjang PAUD yang memiliki sarpras sesuai standard		37%			Persentase sekolah jenjang PAUD yang memiliki sarpras sesuai standard		37%				
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Kelulusan Paket A/B/C	Satuan pendidikan	90%	17.160.490.000	DAUM, DAK Fisik, DAK Non Fisik-BOP, DBKP	Angka Kelulusan Paket A/B/C	Satuan pendidikan	90%	26.252.838.800	DAUM, DAK Fisik, DAK Non Fisik-BOP, DBKP	9.092.348.800	Pergeseran anggaran
		Persentase Lembaga PKBM		78%			Persentase Lembaga PKBM		78%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
		yang difasilitasi					yang difasilitasi						
		Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas		54%			Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas		54%				
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		71910			Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		71910				
		Angka Melek Huruf		71910			Angka Melek Huruf		71910				
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP)**		**62,75%**	**6.325.000**	**DAUM**	**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP)**		**62,75%**	**8.078.400**	**DAUM**	**1.753.400**	
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SD		**60%**			**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SD**		**60%**				
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SMP		**50%**			**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang SMP**		**50%**				
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang PAUD		**76%**			**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang PAUD**		**76%**				
		Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang Kesetaraan		**65%**			**Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) Jenjang Kesetaraan**		**65%**				
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang Pendidikan Dasar		55%	4.000.000	DAUM	Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang Pendidikan Dasar		55%	-	DAUM	(4.000.000)	Efisiensi anggaran
		Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal SD dan SMP yang tersusun		2			Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal SD dan SMP yang tersusun		2				
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal		70,50%	2.325.000	DAUM	Persentase capaian pengembangan kurikulum pendidikan sesuai ketentuan (SNP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal		70,50%	8.078.400	DAUM	5.753.400	Pergeseran anggaran
		Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal Anak Usia Dini dan		1			Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal Anak Usia		1				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4 ~~Dana/ Pagu~~	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
		Pendidikan Nonformal yang tersusun					Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun						
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Tenaga Pendidik yang telah lulus Sertifikasi Pendidik**	**Dinas Pendidikan**	**45%**	**2.000.000**	**DAUM**	**Persentase Tenaga Pendidik yang telah lulus Sertifikasi Pendidik**	**Dinas Pendidikan**	**45%**	**565.437.500**	**DAUM**	**563.437.500**	
		Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		**80%**			**Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**		**80%**				
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rasio guru / rombel SD	Dinas Pendidikan	1:13	2.000.000	DAUM	Rasio guru / rombel SD	Dinas Pendidikan	1:13	565.437.500	DAUM	563.437.500	Pergeseran anggaran
		Rasio Guru / rombel SMP		1:12			Rasio Guru / rombel SMP		1:12				
		Rasio Guru / rombel PAUD		1:20			Rasio Guru / rombel PAUD		1:20				
		Rasio Pengawas / lembaga		1:24			Rasio Pengawas / lembaga		1:24				
												-	
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, PAUD dan Nonformal yang terfasilitasi perizinannya**	**Dinas Pendidikan**	**95%**	**3.000.000**	**DAUM**	**Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, PAUD dan Nonformal yang terfasilitasi perizinannya**	**Dinas Pendidikan**	**95%**	**-**	**DAUM**	**(3.000.000)**	
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan penerbitan izin pada pendidikan dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	83	2.000.000	DAUM	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan penerbitan izin pada pendidikan dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	83	-	DAUM	(2.000.000)	Efisiensi anggaran
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang terfasiltasi pemenuhan penerbitan izin pada PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	960	1.000.000	DAUM	Jumlah lembaga yang terfasiltasi pemenuhan penerbitan izin pada PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	960	-	DAUM	(1.000.000)	Efisiensi anggaran

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan 2024-2026. Oleh karena itu, Perubahan RENJA ini dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu 2024-2026 bersifat holistik dan integratif. Artinya pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan antara satu aspek dengan aspek pembangunan lainnya, baik fisik maupun nonfisik dilakukan secara terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan itu, diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah.

Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai hasil pendidikan akan dimanfaatkan atau akan berdampak pada kepentingan kehidupan masyarakat. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan 1 (satu) tahunan, oleh karenanya harus menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 mendatang terlaksana dengan baik, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RENJA Dinas Pendidikan tahun 2024 memuat Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan yang merupakan turunan dari arah kebijakan Kabupaten Bangkalan, agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di tahun 2024 khususnya dalam dunia Pendidikan;
2. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan;
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bangkalan, keberadaan Perubahan RENJA Dinas Pendidikan harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan (RKA-Dinas Pendidikan);
4. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tahun 2024 akan dipertanggungjawaban secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

4.1. KESIMPULAN

Bertolak dari rencana kerja yang telah ditetapkan tentunya Dinas Pendidikan masih memiliki kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kinerja dalam hal pencapaian hasil kinerja yang lebih optimal lagi, dan masih banyaknya kegiatan-kegiatan yang belum mampu dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Terbatasnya personil pelaksana tugas kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;
2. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan;
4. Terbatasnya anggaran/dana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
5. Masih rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di daerah.

Berdasarkan rumusan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan diatas, maka upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk memperlencar rencana kerja tahun 2024 dan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan akan melakukan langkah-langkah sebagai tindak lanjut seperti berikut ini:

1. Koordinasi harus dilakukan lebih intensif dengan Pemerintah daerah Kabupaten dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Pengkajian harus dilakukan lebih lanjut terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan, sehingga bisa dibuat keputusan lebih lanjut secara teknis akan kebutuhan SDM guna menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;
3. Mengirim staf untuk melakukan tugas belajar atau magang pada setiap pelatihan/bimtek yang ada dan berhubungan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan Kerjasama pengawasan pendidikan dengan pemerintah daerah;
5. Meningkatkan alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mobilitas kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Melalui Rencana Kerja tahun 2024 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan tugas kepemerintahan yang mengarah kepada terwujudnya good governance dan lebih melibatkan stakeholder, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang lebih dapat dipertanggungjawabkan sesuai yang telah direncanakan.

Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ini.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Proses penyusunan Renja PD terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap pelaksanaan forum PD, tahap perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan renja PD. Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penctapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ini kemudian dijabarkan menjadi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk untuk dijadikan pedoman dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap Perangkat Daerah (PD) yang merupakan bagian terintegrasi dari pemerintah daerah juga wajib untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis rencana pembangunan daerah (RPD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan. Renja PD digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Sedangkan RKPD

dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

Proses penetapan program, kegiatan dan indikator kinerja pada Rencana kinerja Dinas Kesehatan tahun 2024 berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan serta Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2024-2026. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2024, merupakan dokumen resmi yang dipergunakan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

Perumusan rancangan dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dimulai dengan mengumpulkan data, pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 nomor 1/D)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)
13. Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan No Tahun tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

15. Peraturan Bupati No 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
16. Peraturan Bupati No 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja - Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman terhadap penyesuaian perubahan kebijakan dan kebutuhan Kabupaten Bangkalan bagi aparatur Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjadi sinergitas sasaran dan integrasi target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat berjalan dengan baik.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja pada tahun berjalan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja - Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam pelaksanan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan di bidang Kesehatan.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2024.
3. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan, UPT-nya (Puskesmas) dan RSUD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah 2024

3.3. Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dinas kesehatan memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang masing-masing memiliki indikator serta target masing-masing per tahunnya.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Pada Bab II ini berisi tentang evaluasi hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2024. Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target yang direncanakan.

Berikut ini kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja sampai dengan Tahun 2024 pada masing-masing sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
DINAS KESEHATAN																	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**80 indeks**	**445.836.430.169**									**80**	**Rp143.479.901.929**	**80**	**Rp143.479.901.929**	**100%**
1.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	506.681.500									**100**	**Rp47.273.400**	**100**	**Rp47.273.400**	**10000%**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	155.036.900									2	Rp18.762.200	**2**	**Rp18.762.200**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3 dok	60.000.000									1	Rp14.274.200	**1**	**Rp14.274.200**	**33%**
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan R KA-SKPD	3 dok	74.106.000									1	Rp19.702.000	**1**	**Rp19.702.000**	**33%**
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3 dok	34.000.000									1	Rp4.732.000	**1**	**Rp4.732.000**	**33%**
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	3 dok	52.464.000									1	Rp17.488.000	**1**	**Rp17.488.000**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	131.074.600									2	Rp9.505.000	**2**	**Rp9.505.000**	**67%**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	219.255.181.695									**100**	**Rp80.031.907.617**	**100**	**Rp80.031.907.617**	**10000%**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2994 org	219.242.841.495									1221	Rp80.024.407.617	**1221**	**Rp80.024.407.617**	**41%**
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/seme steran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/seme steran SKPD	284 laporan	12.340.200									20	Rp7.500.000	**20**	**Rp7.500.000**	**7%**
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada dinas kesehatan**	**100%**	**165.000.000**									**100**	**Rp5.000.000**	**100**	**Rp5.000.000**	**10000%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.03.04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	30 laporan	60.000.000											**0**	**Rp0**	**0%**
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	138 laporan	45.000.000									46	Rp5.000.000	**46**	**Rp5.000.000**	**33%**
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	30 laporan	60.000.000											**0**	**Rp0**	**0%**
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan**	**100%**	**121404950.00**									**100**	**Rp5.000.000**	**100**	**Rp5.000.000**	**10000%**
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	81 unit	45.000.000											**0**	**Rp0**	**0%**
1.02.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	81 dokumen	45.000.000									27	Rp5.000.000	**27**	**Rp5.000.000**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	105 orang	31.404.950											**0**	**Rp0**	**0%**
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**438.247.850**									**100**	**Rp31.372.875**	**100**	**Rp31.372.875**	**10000%**
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	65.000.000									1	Rp5.500.000	**1**	**Rp5.500.000**	**33%**
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	373.247.850									1	Rp25.872.875	**1**	**Rp25.872.875**	**33%**
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	-	-									**100**	**Rp232.276.150**	**100**	**Rp232.276.150**	**0%**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		-	-									1	Rp59.000.000	**1**	**Rp59.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-									1	Rp173.276.150	**1**	**Rp173.276.150**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**25.355.604.500**									**100**	**Rp773.763.235**	**100**	**Rp773.763.235**	**10000%**
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan	45 laporan	2128404500.00									15	Rp542.801.500	**15**	**Rp542.801.500**	**33%**
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	23.227.200									12	Rp230.961.735	**12**	**Rp230.961.735**	**33%**
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**275.000.000**									**100**	**Rp1.005.078.400**	**100**	**Rp1.005.078.400**	**10000%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 unit	135.000.000									1	Rp90.528.300	**1**	**Rp90.528.300**	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 unit	140.000.000									1	Rp914.550.100	**1**	**Rp914.550.100**	**33%**
1.02.01.2.10.01	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana**	**100%**	**199.719.309.674**									**100**	**Rp61.348.230.252**	**100**	**Rp61.348.230.252**	**10000%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Arosbaya	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	7.084.453.953									1	Rp2.123.990.425	**1**	**Rp2.123.990.425**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Bangkalan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	11.326.548.882									1	Rp3.538.022.068	**1**	**Rp3.538.022.068**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Banjar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	5.143.198.902									1	Rp1.476.905.408	**1**	**Rp1.476.905.408**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Blega	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	14.312.654.805									1	Rp4.533.390.709	**1**	**Rp4.533.390.709**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Burneh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	8.314.532.262									1	Rp2.534.016.528	**1**	**Rp2.534.016.528**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Galis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	5.820.052.503									1	Rp1.702.523.275	**1**	**Rp1.702.523.275**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Geger	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	16.511.981.265									1	Rp5.266.499.529	**1**	**Rp5.266.499.529**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Jaddih	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	4.128.872.286									1	Rp1.138.796.536	**1**	**Rp1.138.796.536**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kamal	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	9.595.160.277									1	Rp2.960.892.533	**1**	**Rp2.960.892.533**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kedundung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	8.716.972.119									1	Rp2.668.163.147	**1**	**Rp2.668.163.147**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Klampis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	9.496.429.512									1	Rp2.927.982.278	**1**	**Rp2.927.982.278**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kokop	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	18.329.681.463									1	Rp5.872.399.597	**1**	**Rp5.872.399.597**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Konang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	10.205.208.405									1	Rp3.164.241.909	**1**	**Rp3.164.241.909**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kwanyar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	11.470.692.531									1	Rp3.586.069.951	**1**	**Rp3.586.069.951**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Modung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	4.946.264.817									1	Rp1.411.260.713	**1**	**Rp1.411.260.713**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sepulu	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	10.728.513.174									1	Rp3.338.676.832	**1**	**Rp3.338.676.832**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Socah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	6.016.585.212									1	Rp1.768.034.178	**1**	**Rp1.768.034.178**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sukolilo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	5.956.526.181									1	Rp1.748.014.501	**1**	**Rp1.748.014.501**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanah Merah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	12.665.888.850									1	Rp3.984.468.724	**1**	**Rp3.984.468.724**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanjung Bumi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	9.565.790.202									1	Rp2.951.102.508	**1**	**Rp2.951.102.508**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tongguh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	3.585.372.405									1	Rp957.629.909	**1**	**Rp957.629.909**	**33%**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tragah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas	3 unit	5.797.929.660									1	Rp1.695.148.994	**1**	**Rp1.695.148.994**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.2.01	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna**	**100%**	**59.501.378.732**									**100%**		**100%**		
		Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat Vaksin dan BMHP) sesuai Standart	**100%**	**51.096.025.349**									**70.00**		**70.00**		
		Angka Kematian Ibu (AKI)	**4**	**1.498.632.344**									**4.4**	**Rp100.911.876.026**	**4.4**	**Rp100.911.876.026**	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	**31**	**1.376.902.488**									**32.33**		**32.33**		
		Prevalensi Stunting	**11%**	**14.414.687.361**									**14.00**		**14.00**		
		Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan Lansia	**100%**	**958.754.823**									**100.00**		**100.00**		
		Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	**100%**	**11.657.338.502**									**100.00**		**100.00**		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
		Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan	**100%**	**669.879.976**									**100**		**100**		
		Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	**16%**	**154.936.969**									**14**		**14**		
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah**	**100%**	**58.638.425.849**										**Rp20.347.523.440**	**0**	**Rp20.347.523.440**	**0%**
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibangun	-	-									1.00	Rp11.859.900.000	**1.00**	**Rp11.859.900.000**	**0%**
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0										1	Rp1.000.000.000	**1**	**Rp1.000.000.000**	**0%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	2385 unit	23.078.999.000									795	Rp1.427.829.700	**795**	**Rp1.427.829.700**	**33%**
1.02.02.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	10 unit	900.000.000									10	Rp433.757.000	**10**	**Rp433.757.000**	**10000%**
1.02.02.01.16	Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	251 paket	27.117.026.349									258	Rp5.345.638.307	**258**	**Rp5.345.638.307**	**10000%**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	18 unit	7.542.400.500									5040	Rp122.356.933	**5040**	**Rp122.356.933**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
	Distribusi alat kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan ke Fasilitas Kesehatan	0										2	Rp158.041.500	**2**	**Rp158.041.500**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	7.542.400.500									**100**	**Rp77.615.370.346**	**100**	**Rp77.615.370.346**	**10000%**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50599 orang	1.298.632.344									16799	Rp50.000.000	**16799**	**Rp50.000.000**	**33%**
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28392 orang	200.000.000									9464	Rp50.000.000	**9464**	**Rp50.000.000**	**33%**
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	44478 orang	425.951.244									14826	Rp262.150.629	**14826**	**Rp262.150.629**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan PelayananKesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	229890 orang	950.951.244									76630	Rp50.000.000	**76630**	**Rp50.000.000**	**33%**
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelyanankesehatan sesuai standar	312546 orang	1.322.385.615									104182	Rp50.000.000	**104182**	**Rp50.000.000**	**33%**
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar	11925 orang	3.673.904.144									3975	Rp50.000.000	**3975**	**Rp50.000.000**	**33%**
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar	989253 orang	958.754.823									329751	Rp50.000.000	**329751**	**Rp50.000.000**	**33%**
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56808 orang	305.951.244									18936	Rp50.000.000	**18936**	**Rp50.000.000**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96471 orang	200.000.000									32157	Rp1.774.238.446	**32157**	**Rp1.774.238.446**	**33%**
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	48879 orang	380.199.744									16293	Rp100.000.000	**16293**	**Rp100.000.000**	**33%**
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkolosis yang mendapat pelayanan sesuai standar	30738 orang	5.673.821.455									10246	Rp1.512.282.200	**10246**	**Rp1.512.282.200**	**33%**
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar	55332 orang	1.272.510.658									18444	Rp257.720.100	**18444**	**Rp257.720.100**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3 dokumen	45.951.244									1	Rp220.343.000	**1**	**Rp220.343.000**	**33%**
1.02.02.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	3 dokumen	11.932.768.014									1	Rp131.700.000	**1**	**Rp131.700.000**	**33%**
1.02.02.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	15 dokumen	922.731.244									5	Rp2.333.387.500	**5**	**Rp2.333.387.500**	**33%**
1.02.02.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3 dokumen	160.851.244									1	Rp290.634.000	**1**	**Rp290.634.000**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	66 dokumen	70.000.000									22	Rp20.000.000	**22**	**Rp20.000.000**	**33%**
	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-									1	Rp168.700.000	**1**	**Rp168.700.000**	
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-									70	Rp86.716.000	**70**	**Rp86.716.000**	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	6 dokumen	150.951.257									2	Rp1.608.448.382	**2**	**Rp1.608.448.382**	**33%**
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	2 dokumen	154.936.969									2	Rp51.798.269.043	**2**	**Rp51.798.269.043**	**100%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	3 paket	16.626.444									1	Rp31.240.000	**1**	**Rp31.240.000**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Arosbaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.377.412.591									1	Rp788.800.955	**1**	**Rp788.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Bangkalan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.752.412.591									1	Rp913.800.955	**1**	**Rp913.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Banjar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.077.412.591									1	Rp748.800.955	**1**	**Rp748.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Blega	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.752.421.591									1	Rp688.800.955	**1**	**Rp688.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Burneh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.257.412.591									1	Rp913.803.955	**1**	**Rp913.803.955**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Galis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.227.412.591									1	Rp738.800.955	**1**	**Rp738.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Geger	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	1.927.412.591									1	Rp638.800.955	**1**	**Rp638.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Jaddih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	1.807.412.591									1	Rp598.800.955	**1**	**Rp598.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kamal	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.197.412.591									1	Rp728.800.955	**1**	**Rp728.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kedundung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.077.412.591									1	Rp688.800.955	**1**	**Rp688.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Klampis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.379.260.291									1	Rp789.416.855	**1**	**Rp789.416.855**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kokop	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	1.777.412.591									1	Rp588.800.955	**1**	**Rp588.800.955**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Konang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.077.412.591									1	Rp745.301.055	**1**	**Rp745.301.055**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kwanyar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.246.912.891									1	Rp688.800.955	**1**	**Rp688.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Modung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.077.412.590									1	Rp688.800.955	**1**	**Rp688.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sepulu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.077.412.590									1	Rp688.800.955	**1**	**Rp688.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Socah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.077.412.590									1	Rp738.800.955	**1**	**Rp738.800.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukolilo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.227.412.590									1	Rp913.799.955	**1**	**Rp913.799.955**	**33%**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanah Merah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.752.409.590									1	Rp713.799.955	**1**	**Rp713.799.955**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Bumi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.152.409.590									1	Rp738.800.955	**1**	**Rp738.800.955**	**33%**
1.02.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tongguh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.227.412.590									1	Rp688.800.955	**1**	**Rp688.800.955**	**33%**
1.02.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tragah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 dokumen	2.077.412.596									1	Rp688.800.955	**1**	**Rp688.800.955**	**33%**
	operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-									22	Rp15.450.000	**22**	**Rp15.450.000**	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/kota	17 unit	549.351.244											**0**	**Rp0**	**0%**
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 laporan	150.951.244									1	Rp35.000.000	**1**	**Rp35.000.000**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	3 dokumen	456.351.244									1	Rp26.110.000	**1**	**Rp26.110.000**	**33%**
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	12 dokumen	410951244.00									1	Rp268.734.700	**1**	**Rp268.734.700**	**8%**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	-									400	Rp6.468.336	**400**	**Rp6.468.336**	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-									1	Rp197.040.000	**1**	**Rp197.040.000**	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	**399.363.500**									**100**	**Rp15.600.000**	**100**	**Rp15.600.000**	**100%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	3 dokumen	84.203.000											**0**	**Rp0**	**0%**
1.02.02.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	3 dokumen	171.713.500									3	Rp15.600.000	**3**	**Rp15.600.000**	**100%**
1.02.02.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	6 dokumen	143.447.000											**0**	**Rp0**	**0%**
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	**1.924.884.244**									**100**	**Rp191.807.250**	**100**	**Rp191.807.250**	**100%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	53 unit	960.000.000									53	Rp10.000.000	**53**	**Rp10.000.000**	**100%**
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	108 unit	964.884.244									36	Rp61.807.250	**36**	**Rp61.807.250**	**33%**
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	3 dokumen	960.000.000									1	Rp120.000.000	**1**	**Rp120.000.000**	**33%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**	**90%**	**80.000.000**									**90**	**Rp8.734.841.082**	**90**	**Rp8.734.841.082**	**100%**
1.02.03.2.02.01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	100%	**106.000.000**									**100**	**Rp7.531.474.182**	**100**	**Rp7.531.474.182**	**100%**
1.02.03.2.02.02	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-									4	Rp10.000.000	**4**	**Rp10.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	75 orang	80.000.000									447	Rp7.410.485.182	**447**	**Rp7.410.485.182**	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	26.000.000									2	Rp110.989.000	**2**	**Rp110.989.000**	**100%**
1.02.03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina**	-	-									**100.00**	**Rp1.203.366.900**	**100.00**	**Rp1.203.366.900**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dankompetensinya	-	-									-	Rp1.203.366.900	-	**Rp1.203.366.900**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Tercapainya Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**98%**	**1.405.386.764**										**Rp490.631.000**		**Rp490.631.000**	
1.02.042.01	**Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Terlaksananya Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	100%	**216.081.520**										**Rp81.000.000**		**Rp81.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut pengawasan Perizinanan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 dokumen	216.081.520										Rp81.000.000		**Rp81.000.000**	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi. Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RT	100%	**735.951.244**									**100**	**Rp212.282.500**	**100**	**Rp212.282.500**	**100%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6 dokumen	735.951.244									3	Rp212.282.500	**3**	**Rp212.282.500**	**50%**
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangg	**Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	100%	**453.354.000**									**100**	**Rp197.348.500**	**100**	**Rp197.348.500**	**100%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	210 produk	453.354.000									70	Rp197.348.500	**70**	**Rp197.348.500**	**33%**
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diBina**	**100%**	**1.427.592.244**									**100**	**Rp608.128.100**	**100**	**Rp608.128.100**	**100%**
	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75%	**976.641.000**									**100**	**Rp548.128.100**	**100**	**Rp548.128.100**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyaraka	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 dokumen	976.641.000									1	Rp548.128.100	**1**	**Rp548.128.100**	**33%**
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80%	**450.951.244**									**100**	**Rp60.000.000**	**100**	**Rp60.000.000**	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3 dokumen	450.951.244									1	Rp60.000.000	**1**	**Rp60.000.000**	**33%**
	Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**persentase terlaksananya paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-									**100.00**	**Rp92.000.000**	**100.00**	**Rp92.000.000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
	Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-									5	Rp92.000.000	**5**	**Rp92.000.000**	
	RSUD																
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan (Dinas Kesehatan)**					100%	280.623.733.385	100%	227.523.599.138	100 %	81,08 %	100%	260.568.288.355,00			
1.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD)**					100%	3.196.800,00	100%	3.133.800,00	100 %	98,03 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun					2 Dok	2.948.400,00	2 Dok	2.907.850,00	100 %	98,62 %					
		Jumlah Dokumen Rancangan Renstra					1 Dok		1 Dok								
1.02.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Lap	248.400,00	1 Lap	225.950,00	100 %	90,96 %					
		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah					1 Dok		1 Dok								
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RSUD)**					100%	26.711.454.585,00	100%	26.614.048.659,00	100 %	99,64 %	100%	32.258.894.511,00			
1.02.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					436 Org/bln	26.708.336.185,00	436 Org/bln	26.611.086.859,00	100 %	99,64 %	508 org/bln	32.258.894.511,00			
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bln		12 Bln								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD yang tersusun					1 Lap	1.824.700,00	1 Lap	1.668.100,00	100 %	91,42 %					
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Lap		1 Lap								
1.02.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan					66 Lap	1.293.700,00	66 Lap	1.293.700,00	100 %	100%					
		Laporan keuangan bulanan/triwulan/semester PD yang tersusun					66 Lap		66 Lap								
1.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan**					100%	636.835.000,00	1	628.074.939,00	100 %	98,62 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Lap	636.835.000,00	1 Lap	628.074.939,00	100 %	98,62 %					
		Tersediannya Jasa Umum Pelayanan kantor					12 Bln		12 Bln								
1.02.01.2.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD RSUD yang Terlaksana**					100%	253.272.247.000,00	100%	200.278.341.740,00	100 %	79,08 %	100%	228.309.393.844,00			
1.02.01.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	253.272.247.000,00	1 Unit Kerja	200.278.341.740,00	100 %	79,08 %	1 Unit Kerja	228.309.393.844,00			
		Tersediannya Barang dan Jasa BLUD RSUD					1 Thn		1 Thn								
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					100%	22.598.519.850,00	82,70%	21.754.880.500,00	82,70 %	96,27 %	100%	10.500.000.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit (RSUD)**					100%	22.564.635.500,00	98,11%	21.744.962.000,00	98,11%	96,37%	100%	10.500.000.000,00			
1.02.02.2.14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit					53 Unit	22.564.635.500,00	52 Unit	21.744.962.000,00	98,11%	96,37%	63 Unit	10.500.000.000,00			
		Jumlah Sarana dan Prasarana untuk pelayan kesehatan Rumah sakit					26 Paket		25 Paket								
1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase capaian layanan kesehatan bagi masyarakat (RSUD)**					100%	30.921.750,00	50,00%	7.175.350,00	50,00%	23,20%					
1.02.02.2.02.17	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan	Dokumen Laporan dan Kajian Wasdal Lingkungan Rumah Sakit					1 Dok	8.823.350,00	1 Dok	7.175.350,00	100%	81,32%					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
	Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dok		1 Dok								
1.02.02.2.02.35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					1 Unit	22.098.400,00	0	-	0%	0%					
		Terselenggaranya akreditasi rumah sakit					1 Keg		0								
1.02.02.2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi pada RSUD**					100%	2.962.600,00	1	2.743.150,00	100%	92,59%					
1.02.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					1 Dok	2.962.600,00	1 Dok	2.743.150,00	100%	92,59%					
		Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					1 Dok		1 Dok								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**					100%	1.506.560.850,00	100%	1.433.543.000,00	100 %	95,15 %	100%	1.822.800.000,00			
1.02.03.2.02	**Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tercapainya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK (RSUD)**					100%	1.500.972.350,00	100%	1.428.680.000,00	100 %	95,18 %	100%	1.822.800.000,00			
1.02.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					135 Org	1.495.725.000,00	135 Org	1.424.675.000,00	100 %	95,25 %	124 Org	1.822.800.000,00			
1.02.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					1 Dok	5.247.350,00	1 Dok	4.005.000,00	100 %	76,32 %					
		Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan					50 Org		50 Org								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	11=(10/4)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		
1.02.03.2.03	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina (RSUD)**					100%	5.588.500,00	1	4.863.000,00	100 %	87,02 %					
1.02.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesehatan yang menjadi sasaran pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis					50 Org	5.588.500,00	50 Org	4.863.000,00	100 %	87,02 %					
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					50 Org		50 Org								

Dari tabel 2.1. diatas menunjukkan bahwa evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun 2024 yang merupakan tahun awal dari Renstra 2024-2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan tahun 2024 masih rendah dikarenakan hal ini masih dalam tahap awal dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

Tabel 2.2 Evaluasi pelaksanaan Indikator SPM Sampai dengan Tahun 2024 TW 1

No.	Indikator SPM	Realisasi			Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan
		2022	2023	2024 (TW1)			
1	Pelayanan Kesehat an Ibu Hamil	97%	100%	18,62%	100%	100%	
2	Pelayanan Kesehat an Ibu Bersalin	96%	100%	19,41%	100%	100%	
3	Pelayanan Kesehat an Bayi Baru Lahir	102%	100%	19,77%	100%	100%	
4	Pelayanan Kesehat an Balita	80%	100%	13,50%	100%	100%	
5	Pelayanan Kesehat an pada Usia Pendidik an Dasar	82%	100%	54,51%	100%	100%	
6	Pelayanan Kesehat an pada Usia Produkti f	55%	100%	17,26%	100%	100%	
7	Pelayanan Kesehat an pada Usia Lanjut	81%	100%	18,77%	100%	100%	
8	Pelayanan Kesehat an Penderit a Hiperten si	47%	100%	32,33%	100%	100%	
9	Pelayanan Kesehat an Penderit a Diabetes Melitus (DM)	92%	100%	19,65%	100%	100%	
10	Pelayanan Kesehat an Orang dengan Ganggu an Jiwa (ODGJ) Berat	96%	100%	28,17%	100%	100%	
11	Pelayanan Kesehat an Orang dengan Tuberkul osis (TB)	80%	112,4%	15,47%	100%	100%	
12	Pelayanan Kesehat an Orang dengan Risiko Terinfek si HIV	82%	100%	17,82%	100%	100%	

Indikator SPM sudah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Untuk menjaga ketercapaian indicator tersebut maka diperlukan dukungan dana yang memadai sehingga dapat tercapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan pada Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Kesehatan

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja Th 2024			Renstra 2024	Peruabahan Renja Th 2024	
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	70.60	73.47+	Meningkatnya mutu pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	100%	
					Persentase meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	80%	80%	
					Survey kepuasan masyarakat	85	85	
				Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Kesehatan	Indeks kepuasaan masyarakat	75	75	
					Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	70	70	
					Nilai SAKIP RSUD	70	70	
					Cost Recovery Rate (CRR)	100%	100%	

3.2. Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Adapun Matrik program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan pada Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
DINAS KESEHATAN					249.768.094.021					272.666.664.265			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)		80 indeks	139.965.652.995		Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes)		80 indeks	166.720.085.867		26.754.432.872	
1.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Pada Dinas Kesehatan		100%	156.649.000		Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Pada Dinas Kesehatan		100%	45.603.950		(111.045.050)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dok	48.112.500		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dok	18.762.200		**(29.350.300)**	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		1 dok	18.753.000		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		2 dok	12.604.750		**(6.148.250)**	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		1 dok	19.702.000		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		0 dok	-		**(19.702.000)**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		1 dok	12.235.000,00		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		2 dok	4.732.000		**(7.503.000)**	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		1 dok	17.488.000		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		0	-		**(17.488.000)**	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 laporan	40.358.500		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	9.505.000		**(30.853.500)**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**77.788.335.243**		**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**79.930.034.666**		**2.141.699.423**	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		998 org/bulan	77.784.215.243		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		1275 org/bulan	79.925.029.416		**2.140.814.173**	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		20 laporan	4.120.000		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		18 laporan	5.005.250		**885.250**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada dinas kesehatan**		**100%**	17.000.000		**Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada dinas kesehatan**		**100%**	5.000.000		**(12.000.000)**	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD		10 laporan	5.000.000		Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD		0 laporan	-		**(5.000.000)**	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		46 laporan	7.000.000		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		1 laporan	5.000.000		**(2.000.000)**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		10 laporan	5.000.000		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		0 laporan	-		**(5.000.000)**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai pada Dinas Kesehatan**		**100%**	15.000.000		**Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai pada Dinas Kesehatan**		**100%**	5.000.000		**(10.000.000)**	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		27 unit	5.000.000		Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		0 unit	-		**(5.000.000)**	
1.02.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		27 dokumen	5.000.000		Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	5.000.000		**-**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan		35 orang	5.000.000		Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan		0 orang	-		**(5.000.000)**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	34.637.000		**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	2.500.000		**(32.137.000)**	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		1 paket	10.000.000		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		1 paket	2.500.000		**(7.500.000)**	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	24.637.000		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	-		**(24.637.000)**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	5.000.000		**Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	972.276.150		**967.276.150**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			**0 unit**	**-**				**1 unit**	799.000.000		**799.000.000**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		**1 unit**	5.000.000		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		**1 unit**	**173.276.150**		**168.276.150**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100%**	587.801.500		**Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100%**	518.126.509		**(69.674.991)**	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan		15 laporan	542.801.500		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan		36 laporan	300.779.774		**(242.021.726)**	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	45.000.000		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	217.346.735		**172.346.735**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**100%**	13.000.000		**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	984.078.400		**971.078.400**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Pemerintahan Daerah	**Urusan Pemerintahan Daerah**											
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30 unit	8.000.000		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 unit	90.528.300		**82.528.300**	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 unit	5.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 unit	893.550.100		**888.550.100**	
1.02.01	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana		**100%**	61.348.230.252		Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana pada 22 Puskesmas		**100%**	84.257.466.192		**22.909.235.940**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
.2.10 .0 1		pada 22 Puskesmas											
1.02. 01. 2.10. 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Arosbaya	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	2.123.990.425,00		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	2.948.102.880,00		**824.112.455**	
1.02. 01. 2.10. 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Bangkalan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	3.538.022.068,00		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	4.073.374.058,00		**535.351.990**	
1.02. 01. 2.10. 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Banjar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	1.476.905.408		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	1.990.813.166		**513.907.758**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Blega	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	4.533.390.709		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	6.250.743.028		**1.717.352.319**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Burneh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	2.534.016.528		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	3.681.971.711		**1.147.955.183**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Galis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	1.702.523.275		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	4.504.985.124		**2.802.461.849**	
1.02.01.	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang		1 unit	5.266.499.529		Jumlah BLUD yang menyediakan		1 unit	6.143.441.865		**876.942.336**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
2.10.01	Pelayanan BLUD pada Puskesmas Geger	menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas					pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas						
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Jaddih	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	1.138.796.536		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	2.117.302.714		**978.506.178**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kamal	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	2.960.892.533		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	4.174.944.307		**1.214.051.774**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan		1 unit	2.668.163.147		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan		1 unit	3.002.415.923		**334.252.776**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Puskesmas Kedundung	penunjang pelayanan pada Puskesmas					penunjang pelayanan pada Puskesmas						
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Klampis	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	2.927.982.278		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	3.985.582.813		**1.057.600.535**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kokop	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	5.872.399.597		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	5.969.236.083		**96.836.486**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Konang	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang		1 unit	3.164.241.909		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	5.709.982.503		**2.545.740.594**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
		pelayanan pada Puskesmas											
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kwanyar	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	3.586.069.951		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	4.859.345.241		**1.273.275.290**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Modung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	1.411.260.713		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	2.172.196.482		**760.935.769**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sepulu	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	3.338.676.832		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	3.852.159.810		**513.482.978**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Socah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	1.768.034.178		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	2.429.662.921		**661.628.743**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sukolilo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	1.748.014.501		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	3.234.188.219		**1.486.173.718**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanah Merah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	3.984.468.724		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	5.671.434.387		**1.686.965.663**	
1.02.01.	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang		1 unit	2.951.102.508		Jumlah BLUD yang menyediakan		1 unit	3.436.895.100		**485.792.592**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
2.10.01	Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanjung Bumi	menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas					pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas						
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tongguh	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	957.629.909		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	1.729.846.935		**772.217.026**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tragah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	1.695.148.994		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan pada Puskesmas		1 unit	2.318.840.922		**623.691.928**	
1.02.02.2.01	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	**Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi**		**100%**	**100.911.876.026**	**7500**	**Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna**		**100%**	**97.001.462.816**	**7500**	**(3.910.413.210)**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Utama-Paripurna											
		Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat Vaksin dan BMHP) sesuai Standart		70%			Persentase puskesmas yang tersedia Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik dan farmasi (Obat Vaksin dan BMHP) sesuai Standart		70%				
		Angka Kematian Ibu (AKI)		32,33 / 100.000 KH			Angka Kematian Ibu (AKI)		32,33 / 100.000 KH				
		Angka Kematian Bayi (AKB)		4,4 / 1000 KH			Angka Kematian Bayi (AKB)		4,4 / 1000 KH				
		Prevalensi Stunting		14%			Prevalensi Stunting		14%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
		Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna		100%			Prosentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi Utama-Paripurna		100%				
		Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		100%			Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		100%				
		Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan		100%			Terlaksananya Upaya peningkatan Kesehatan		100%				
		Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan		100%			Prosentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		100%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
		Kesehatan Nasional (JKN)											
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada Dinas Kesehatan**		**100%**	20.506.975.526		**Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada Dinas Kesehatan**		**100%**	21.901.831.655		**1.394.856.129**	
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		-	-		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		2 unit	11.859.900.000		11.859.900.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan		7 unit	702.187.526		Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh		5 unit	1.000.000.000		297.812.474	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
		Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya					Fasilitas Kesehatan Lainnya						
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan		795 unit	11.039.860.700	100	jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan		51 unit	2.871.167.465	100	(8.168.693.235)	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar		10 unit	300.000.000	100%	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar		507 unit	433.757.000	100%	133.757.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis	Jumlah Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis		258 paket	8.334.927.300	5850	Jumlah Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan		258 paket	5.490.638.307	5850	(2.844.288.993)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		5040 keluarga	130.000.000		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		1464 keluarga	88.327.383		(41.672.617)	
	Distribusi alat kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan ke		-	-		Jumlah distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan ke Fasilitas Kesehatan		1 paket	158.041.500		158.041.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Minuman di Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan											
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan		**100%**	79.539.649.500		Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota pada Dinas Kesehatan		**100%**	74.910.123.761		(4.629.525.739)	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		16799 orang	300.000.000	5600	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		19305 orang	9.915.000	5600	(290.085.000)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan		9464 orang	50.000.000		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		19265 orang	16.650.000		(33.350.000)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
		kesehatan sesuai standar											
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		14826 orang	125.000.000	6300	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		18848 orang	262.150.629	6300	137.150.629	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan PelayananKesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		76630 orang	300.000.000	6800	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		84840 orang	11.375.500	6800	(288.624.500)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelyanankesehatan sesuai standar		104182 orang	423.811.457		jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelyanankesehatan sesuai standar		146163 orang	19.015.000		(404.796.457)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar		3975 orang	1.196.522.000		jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar		728938 orang	22.195.000		(1.174.327.000)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar		329751 orang	302.601.193		jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar		130956 orang	18.750.000		(283.851.193)	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		18936 orang	85.000.000	100	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		56410 orang	23.305.000	100	(61.695.000)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		32157 orang	50.000.000		Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		14958 orang	1.752.333.446		1.702.333.446	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		16293 orang	109.749.500		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		2095 orang	36.405.000		(73.344.500)	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkolosis yang mendapat pelayanan		10246 orang	1.869.079.300	100	Jumlah orang terduga menderita tuberkolosis yang mendapat pelayanan sesuai standar		16542 orang	1.496.832.200	100	(372.247.100)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
		sesuai standar											
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar		18444 orang	401.975.700	100	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar		17280 orang	223.170.100	100	(178.805.600)	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		1 dokumen	15.000.000	100	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		1 dokumen	220.343.000	100	205.343.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan		1 dokumen	602.464.340	8500	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1 dokumen	131.700.000	8500	(470.764.340)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
		kesehatan gizi masyarakat											
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 dokumen	25.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0	-		(25.000.000)	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		5 dokumen	307.260.000	5300	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		3 dokumen	2.328.387.500	5300	2.021.127.500	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan		1 dokumen	53.300.000	100	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan		6 dokumen	290.634.000,00	100	237.334.000	
1.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan		22 dokumen	10.000.000	100	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional.		20 dokumen	7.140.000	100	(2.860.000)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
2.02.19	Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya					Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya						
	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-	-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		2 dokumen	168.700.000		168.700.000	
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		-	-		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		70 orang	86.716.000		86.716.000	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya		1 Dokumen	25.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko		-	-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		2 dokumen	50.000.000		Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		2 dokumen	1.711.548.382		1.661.548.382	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat		2 dokumen	56.772.323.000		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat		2 dokumen	47.269.144.968		(9.503.178.032)	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium		1 paket	5.225.000		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		1 paket	31.240.000		26.015.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rujukan/Nasional yang didistribusikan											
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Arosbaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	788.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	823.372.000		34.571.045	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Bangkalan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	913.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	820.704.000		(93.096.955)	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Banjar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	688.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	800.217.000		111.416.045	
1.02.02.	Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional		1 dokumen	913.803.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	893.670.000		(20.133.955)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
2.02.33	Puskesmas Blega	Pelayanan Puskesmas											
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Burneh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	748.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	899.782.000		150.981.045	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Galis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	738.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	908.106.000		169.305.045	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Geger	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	638.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	903.319.000		264.518.045	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Jaddih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	598.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	700.823.000		102.022.045	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kamal	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	728.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	802.492.000		73.691.045	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kedundung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	688.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	803.152.000		114.351.045	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Klampis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	789.416.855		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	903.706.000		114.289.145	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kokop	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	588.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	763.023.000		174.222.045	
1.02.02.	Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional		1 dokumen	688.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	834.949.000		146.148.045	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
2.02.33	Puskesmas Konang	Pelayanan Puskesmas											
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kwanyar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	745.301.055		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	930.101.000		184.799.945	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Modung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	688.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	711.532.000		22.731.045	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sepulu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	688.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	907.831.000		219.030.045	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Socah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	688.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	600.415.000		(88.385.955)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukolilo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	738.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	754.031.000		15.230.045	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanah Merah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	913.799.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	908.592.000		(5.207.955)	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Bumi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	713.799.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	875.482.000		161.682.045	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tongguh	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	738.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	786.680.000		47.879.045	
1.02.02.	Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional		1 dokumen	688.800.955		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	785.431.000		96.630.045	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
2.02.33	Puskesmas Tragah	Pelayanan Puskesmas											
	operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		-	-		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		2 dokumen	15.450.000,00		0	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/kota		17 unit	182.800.000		Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/kota		0	-		(182.800.000)	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi		0	-		Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 dokumen	141.260.000		141.260.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Pemberian Obat Massal)	dan Pemberian Obat Massal)											
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah		1 dokumen	151.800.000		jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah		1 dokumen	26.110.000		(125.690.000)	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		1 unit	5.000.000		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		1 unit	268.734.700		263.734.700	
	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah orang yang		0	-		Jumlah orang yang mendapatkan		100 Orang	6.468.336		6.468.336	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Kesehatan Malaria	mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					pelayanan kesehatan malaria						
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		0	-		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 dokumen	197.040.000		197.040.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		100%	**93.940.000**		Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		100%	**29.950.650**		(63.989.350)	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem		3 dokumen	93.940.000		Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan		1 dokumen	29.950.650		(63.989.350)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
		informasi kesehatan											
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	**771.311.000**		Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	**159.556.750**		(611.754.250)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas	Jumlah Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan Diawasi dan		53 unit	25.000.000	-	Jumlah Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		19 unit	10.000.000	-	(15.000.000)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Ditindaklanjuti Perizinannya											
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan		36 unit	326.311.000	100%	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan		36 unit	29.556.750	100%	(296.754.250)	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan		1 dokumen	420.000.000	93%	Jumlah Dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan		2 dokumen	120.000.000	93%	(300.000.000)	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATA**	**Persentase Tenaga**		**70%**	**7.948.900.000**	**100%**	**Persentase Tercapainya**		**70%**	**8.160.241.082**	**100%**	**211.341.082**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	N KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	**Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek (SIP)**					**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**						
1.02.03.2.02.01	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM pada Dinas Kesehatan**		**100%**	**7.948.900.000**	**-**	**Persentase kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota**		**100%**	**6.847.674.182**	**-**	**(1.101.225.818)**	
1.02.03.2.02.02	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan		-	-	-	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		2 dokumen	10.000.000	-	10.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Daya Manusia Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan											
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)		447 orang	7.948.900.000	-	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)		347 orang	6.676.685.182	-	(1.272.214.818)	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0	-		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		2 dokumen	160.989.000		160.989.000	
1.02.03 2.03	**Pengembangan Mutu dan**	**Persentase Terlaksananya Pengembangan**		**0**	-	100%	**Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina**		**100%**	**1.312.566.900**	100%	1.312.566.900	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**											
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dankompetensinya		-	-	100%	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dankompetensinya		400 orang	1.312.566.900	100%	1.312.566.900	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN**	**Persentase Pengawasan**		**92%**	**466.118.000**	**95%**	**Persentase Tercapainya Sediaan**		**92%**	**490.631.000**	**95%**	24.513.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**dan Pengendalian Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) serta Industri Rumah Tangga (IRT) yang telah Tervalidasi Perijinan**					**Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**						
1.02.042.01	**Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat**	**Persentase Terlaksananya Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha**		100%	**70.000.000**	-	**Persentase Terlaksananya Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**		100%	**81.000.000**	-	11.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Tradisional (UMOT)	**Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut pengawasan Perizinanan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		100 dokumen	70.000.000	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		2 dokumen	81.000.000	-	11.000.000	
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan**	**Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat**		**100%**	**245.000.000**	91%	Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan		100%	**212.282.500**	91%	(32.717.500)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi. Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RT**					Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi. Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RT						
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut		3 dokumen	245.000.000	99%	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		3 dokumen	212.282.500	99%	(32.717.500)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk	**Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market**		100%	**151.118.000**		**Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan**		100%	**197.348.500**		46.230.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Makanan Minuman Industri Rumah Tangg	**pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**					**Minuman Industri Rumah Tangga**						
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut pengawasan		70 unit	151.118.000	100	Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut pengawasan		70 unit	197.348.500	100	46.230.500	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase Unit Kesehatan Berbasis**		**85%**	**475.547.000**	**8400**	**Persentase Unit Kesehatan Berbasis**		**85%**	**294.243.500**	**8400**	(181.303.500)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Masyarakat (UKBM) yang diBina**					**Masyarakat (UKBM) yang diBina**						
	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		75%	**325.547.000**	9300	Prosentase Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		75%	**182.243.500**	9300	(143.303.500)	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan		1 dokumen	325.547.000	100	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		3 dokumen	**182.243.500**	100	(143.303.500)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	Pemberdayaan Masyaraka	dan Pemberdayaan Masyarakat											
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Kesehatan dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**80%**	**150.000.000**	**100**	**Prosentase pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**80%**	**60.000.000**	**100**	**(90.000.000)**	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1 dokumen	150.000.000	100	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		2 dokumen	60.000.000	100	(90.000.000)	
	Pengembangan dan	**Persentase Pengembangan**		-	-		**persentase terlaksananya paya**		100%	52.000.000		52.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**					**Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						
	Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-	-		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3 dokumen	52.000.000		52.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	RSUD									**375.374.665.271**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang RSUD**		**80 Indeks**	**206.120.546.596**		**Indeks Kepuasaan Layanan Penunjang RSUD**		**80 Indeks**	**361.415.565.271**			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RSUD)**		**100%**	**206.120.546.596**		**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RSUD)**		**100%**	**361.415.565.271**			
	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		436 org/bulan	30.301.481.636	Dana Transfer Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		501 org/bulan	32.237.401.787	Dana Transfer Umum	1.935.920.151	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan		1 Unit Kerja	175.819.064.960	Pendapatan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	329.178.163.484	Pendapatan BLUD	153.359.098.524	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
		Penunjang Pelayanan											
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)**		**100%**	**9.380.100.000**		**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)**		**100%**	**12.200.000.000**			
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RSUD) Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada Dinas**		**100%**	**9.380.100.000**		**Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RSUD) Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada Dinas Kesehatan Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**		**100%**	**12.200.000.000**			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
		Kesehatan Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota					**untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota**						
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		15 Unit	9.380.100.000	Dana Transfer Umum	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		101 Unit	12.200.000.000	Dana Transfer Umum	2.819.900.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	**Persentase Tercapainya Peningkatan**		**100%**	**1.881.600.000**		**Persentase Tercapainya Peningkatan Kapasitas**		**100%**	**1.759.100.000**			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
	SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Kapasitas Sumber Daya Manusia (RSUD)**					**Sumber Daya Manusia (RSUD)**						
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Prosentase Tercapainya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK (RSUD)**		**100%**	**1.881.600.000**		**Prosentase Tercapainya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK (RSUD)**		**100%**	**1.759.100.000**			
	Sub Bagian Pemenuhan Kebutuhan SDM sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas		135 Orang	1.881.600.000	Dana Transfer Umum	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		116 Orang	1.759.100.000	Dana Transfer Umum	(122.500.000)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024 (Penetapan P-RKPD 2024)					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output kegiatan)/ Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-6	14
		Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)											

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 mengacu kepada Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024– 2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD dan APBN Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Bangkalan di bidang kesehatan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan, dengan unit dibawahnya (UOBK RSUD, UPT 22 Puskesmas dan Jaringannya).

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencenaan, pelaksanaan dan pengendalian kinerja dalam kurun waktu tahun 2024 sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan, partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penyusunan dokumen Perubahan Renja tahun 2024 ini.

Bangkalan, Agustus 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangkalan

Hj. NUR HOTIBAH, S.ST., Bd., M.MKes
NIP. 19700709 199102 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Allah Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perumahan Rakat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan. Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian rencana kerja perubahan Dinas Perumahan Rakat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, dan RPD dan Renstra 2024-2026. Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024. Renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024. Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 31 Juli 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGKLAN

MOHAMMAD HASAN FAISOL,S.STP,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19830714200112100

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah, Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bidang Pembangunan.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum dituangkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun–tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman . Penyusunan Rencana Kinerja ini dimulai dengan merumuskan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahun), yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tahunan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan RKA dan DPA Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Bangkalan.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis RPJMD dan Rencana SKPD ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dikelola SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan.

Proses penyusunan Renja ini dimulai dengan persiapan penyusunan RENJA SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rencana awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tahunan.

Adapun prinsip – prinsip dalam penyusunan rancangan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
b. Rumusan program / kegiatan didalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing SKPD
c. Penyusunan Renja SKPD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
d. Program dan Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun - n dan tahun n + 1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti, RPJMD,RENSTRA SKPD dan RPKD.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar. 1.1.

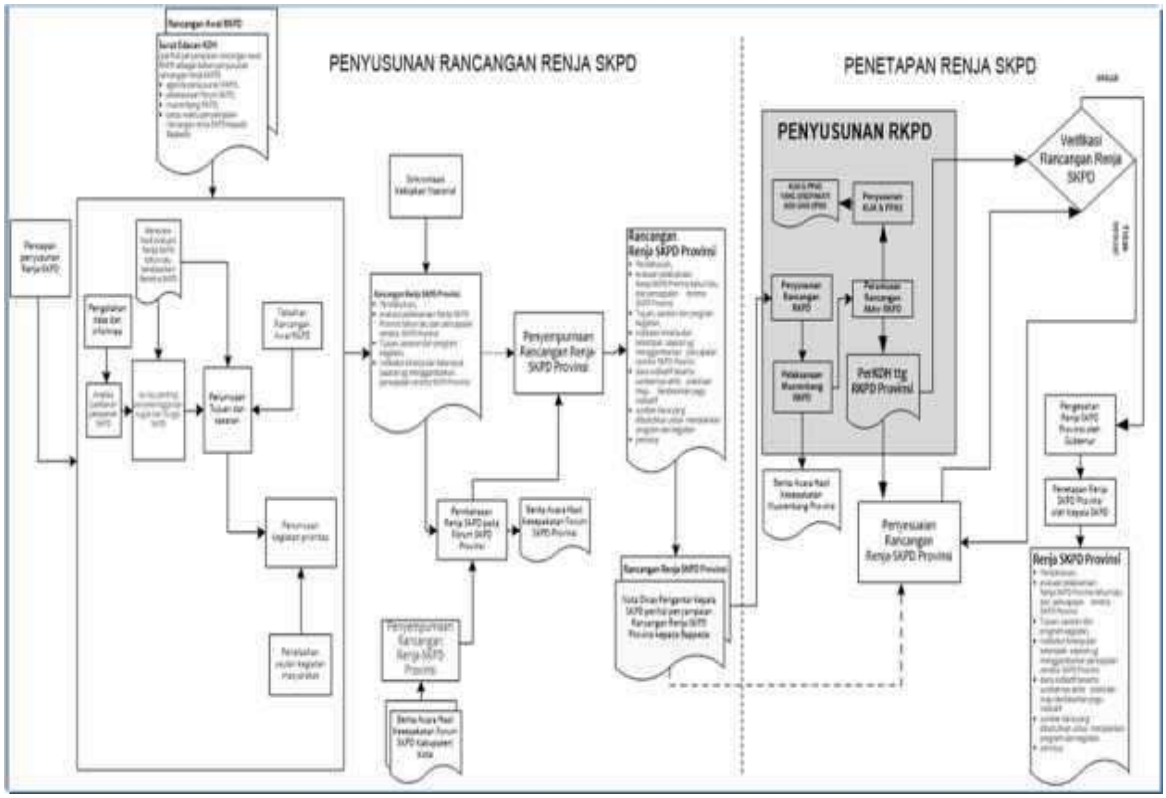

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI No. 13.I/PRT/M/2015 tentang Renstra K/L (sesuai Kementrian masing – masing Perangkat Daerah)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkala Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Bangkalan No. 40 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi . Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E).

15. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27/E)

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN**
   a. Latar belakang
   b. Landasan Hukum
   c. Maksud Tujuan
   d. Sistemarika Penulisan
2. **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN**
   a. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
3. **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**
4. **BAB IV PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN LALU (Tahun 2023) n-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan. Namun demikan, melalui program / kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan sebagimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2023 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s/d Tahun 2023 (tahun Berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dibawah :

Adapun Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rekapitulasi Belanja Tahun 2023 Sampai Bulan Maret

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik
1	Sekretariat	6.950.245.144	1.303.910.156	18.76%	18.76%
2	Bid. Penyehatan Lingkungan & Air Minum	31.158.388.000	-	-	-
3	Bid. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28.190.877.798	-	-	-
4	Bid. Tata Bangunan & Tata Gedung	3.595.000.000	-	-	-

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat berjalan dengan baik. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah merupakan program dan kegiatan utama yang bukan diperuntukkan untuk membiayai sifatnya rutin dalam rencana kinerja tahun 2023 sebagaimana berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub.Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Keg.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub.Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub.Keg. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub.Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub.Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub.Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub.Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Sub.Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub.Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub.Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD

Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub.Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub.Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub.Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub. Pemeliharaan Mebel
- Sub. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Keg. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- Sub.Keg. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
-

Keg. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- Sub.Keg. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
- Sub.Keg. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Keg. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Sub.Keg. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Sub.Keg. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
-

4. **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINU**M

Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Sub.Keg. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Sub.Keg. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub.Keg. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub.Keg. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- Sub.Keg. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Keg. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- Sub.Keg. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- Sub.Keg. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- Sub.Keg. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
- Sub.Keg. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Keg. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- Sub.Keg. Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Sub.Keg. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

► **Adapun Penyebab terpenuhinya target maupun tidak terpenuhinya target kegiatan di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu :**

a. ***Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan disebabkan antara lain karena :*** adanya kebijakan penguatan program/kegiatan melalui pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksananan Standar pelayanan minimal (SPM) yang ada di dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Bangkalan dari pemerintah pusat, seluruh program/kegiatan mengacu kepada DPA tahun berjalan, dalam implementasinya mengacu kepada Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dengan menggunakan indikator capaian program dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kab. Bangkalan 2024 – 2026. Dengan terpenuhinya target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan maka menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai mekanisme Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Bangkalan.

b. Secara umum beberapa faktor penyebab Belum tercapainya target adalah :
   1. karena terdapat program/kegiatan yang masih belum terserap secara maksimal dikarenakan masih triwulan I (Tahun 2023).
   2. Karena adanya Efisiensi Anggaran APBD yang disebabkan oleh adanya pengurangan pagu anggaran.

   ► Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara langsung terwujud dalam meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar masayarakat yang memadai yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap dampak Meningkatnya derajat kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat, selain itu adanya keterlambatan pengelolaan kegiatan, keterlambatan pencairan anggaran karena dalam pelaksanaan anggaran memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian – penyesuaian termasuk revisi dokumen anggaran dan perencanaan kegiatan.

   ►Adapun Program utama yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan hasil PEMUTAHIRAN PMDN 90 / 2019 adalah seabagai berikut :
   1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
   3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Delapan program utama diatas tersebut berjalan berdasarkan pada Permendagri 90 tahun 2019 dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Untuk program – program utama, karena sifatnya sebagai program utama,kinerja internal instansi dalam menjalankan tupoksinya masih akan berlanjut dalam periode RPJMD / Renstra berikutnya

► Kebijakan / tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/ kegiatan tersebut antara lain :

1. dengan melakukan Perubahan APBD jika terjadi kesalahan usulan program/kegiatan, atau dengan pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program, selain itu untuk meningkatkan realisasi target program di tahun berjalan.
2. Kebijakan lain dalam optimalisasi pencapaian target Renstra yaitu melakukan percepatan penerapan pencapaian target SPM bidang bidang Perumahan rakyat, bidang pemerintahan dalam negeri,bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
3. Perubahan target capaian kinerja akhir periode RENSTRA.
4. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan
5. Efisiensi alokasi belanja
6. Penambahan alokasi pagu anggaran

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tugas Pelayanan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melalui pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran – kewajaran kemanusiaan, termasuk sarana dan prasarana lingkungan perumahan permukiman.

Sebagai institusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk – bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa :

1. Penyediaan Jalan Lingkungan dan Drainase baik dilingkungan permukiman perkotaan maupun perdesaan, melalui pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru.
2. Penyediaan PSU (Prasarana dan Sarana Umum) dilingkungan permukiman perkotaan maupun perdesaan.
3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembagunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu melalui pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
4. Penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) khususnya didaerah permukiman perdesaan / daerah rawan air.
5. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang baik khususnya dilingkungan permukiman perdesaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, Pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang

merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standart Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dan perkiraan maju di tahun 2024.

A. Penetapan Indikator Kinerja :

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan . Indikator Kinerja Kegiatan meliputi Indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2022 total anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 121.557.387.157,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 120.377.908.526,91. Sedangkan Pagu di tahun 2023 sebesar Rp. 69.894.510.942 dengan realisasi sampai bulan maret tahun 2023 sebesar Rp. 1.303.910.156 (18,76)

Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 40 tahun 2016. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bangkalan, merupakan unsur pendukung dalam melaksanakan tugas

tertentu. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dan Sebagai SKPD yang mengemban Visi / Misi dengan perumusan tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil,maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Keberhasilan kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dari sejauh mana realisasi program dan kegiatan SKPD dapat dicapai. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pada tabel 2.2 berikut ini :

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN

Alokasi Anggaran untuk Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut :

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan perangkat untuk periode 1 (satu) tahun, Renja – SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2024 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian diharapkan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Bangkalan yang lebih baik.

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kabupaten Bangkalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,Kabupaten Bangkalan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kabupaten Bangkalan ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan secara Bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan anggaran

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024

5.3 Rencana Tindak Lanjut :

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024,selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bangkalan, 31 juli 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGKLAN

MOHAMMAD HASAN FAISOL,S.STP,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19830714200112100

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD s/d Semester I Tahun 2024

NO.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daeral			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisi
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak	V	-	64,20%	64,45%	64.70%	48,16%	64.67%	64,20%	64,45%	
2	Persentase Penyediaan Sarpras Air Bersih	V	-	62%	64%	67%	46,39%	37.05%	62%	64%	
3	Prosentase Penyediaan Sarpras sa	V	-	32%	35%	38%			32%	35%	

TABEL 3.2

Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Bangkalan

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (RENJA PERUBAHAN)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) / (Pagu RENJA PERUBAHAN)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					6	7	8	9	10	11	12
1.03.03.2.01.01	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)**		**62%**	**12,446,802,000**			**64%**	**6,615,851,610**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Rumah Tangga yang terlayani SPAM**		**62%**	12,446,802,000			**64%**	**6,615,851,610**
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab Bangkalan						
1.03.03.2.01.0026			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kab Bangkalan	410 ltr/dtk	3,282,732,000			4500 SR	1,000,000,000
1.03.03.2.01.0028			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kab Bangkalan	610 ltr/dtk	9,164,070,000			600 SR	4,615,851,610
1.03.03.2.01.07			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan								1,000,000,000
1.03.05.2.01.01	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak**		**32%**	**16,846,248,000**			**35%**	**11,908,299,117**

		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Rumah Tangga yang terlayani Sistem Air Limbah Domestik**		**32%**	16,846,248,000			**35%**	**11,908,299,117**
			penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab Bangkalan						
1.03.05.2.01.0022			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kab Bangkalan	210 M3/hari	2,637,860,000			59 Rumah tangga	11,908,299,117
1.03.05.2.01.0039			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		950 / RT	14,208,388,000				
1.03.06.2.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**									**35%**	**5,993,550,154**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kab Bangkalan					**35%**	**5,993,550,154**
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap drainase permukiman	Kab Bangkalan						

1.03.06.2.01.12			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab Bangkalan					8000 M	5,993,550,154
1.03.06.2.01.16			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Kab Bangkalan						
1.03.08.2.01.01	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**Persentase Bangunan Gedung yang dibangun**		**20%**	**270,000,000**			**22%**	**70,000,000**
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Persentase Bangunan Gedung terbangun yg layak serta bangunan yg ber- IMB & berSlf	Kab Bangkalan	20%	270,000,000			**22%**	**70,000,000**
1.03.08.2.01.0018			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	umlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kab Bangkalan	2 bangunan gedung	200,000,000				

1.03.08.2.01.0023			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab Bangkalan	300 doc	70,000,000			1 doc	10,000,000
1.03.08.2.01.02			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bangkalan						10,000,000
			Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab Bangkalan						5,000,000
1.03.08.2.01.04			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota								5,000,000
1.03.08.2.01.05			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bangkalan						10,000,000

1.03.08.2.01.09			Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	Kab Bangkalan						5,000,000
1.03.08.2.01.11			Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan rumah Tinggal deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan rumah Tinggal deret yang telah dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Kab Bangkalan						10,000,000
1.03.08.2.01.12			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Kab Bangkalan					1 unit	10,000,000
1.03.08.2.01.13			Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota								5,000,000
1.03.09.2.01.03	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**Persentase Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan dan lingkungannya**						**22%**	**30,000,000**
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Sarana dan Prasarana Penataan bangunan dan lingkungannya yang tertangani**	Kab Bangkalan					**22%**	**30,000,000**

1.03.09.2.01.01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota								5,000,000.00
1.03.09.2.01.02			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan								5,000,000.00
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab Bangkalan					1 kawasan	10,000,000
1.03.09.2.01.04			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab Bangkalan					1 kawasan	10,000,000
1.04.01.2.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**		**100%**	**6,828,203,918**			**100%**	**7,343,710,470**

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab Bangkalan	**100%**	**1,833,000**			**100%**	**14,353,200**
1.04.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bangkalan	6 dokumen	904,000			6 doc	4,512,200
1.04.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Bangkalan	3 dokumen	421,000			3 doc	1,769,300
1.04.01.2.01.0003			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Bangkalan					12 doc	1,771,600
1.04.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab Bangkalan	3 dokumen	508,000			3 doc	1,771,600
1.04.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab Bangkalan					6doc	1,771,600

1.04.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Bangkalan					3 doc	1,344,800
1.04.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bangkalan					9 Laporan	1,412,100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**100%**	5,589,866,718			**100%**	**5,111,895,370**
1.04.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bangkalan	64 orang	5,589,433,718			64 orang/bln	5,109,115,670
1.04.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Bangkalan	3 Laporan	433,000			3 Laporan	1,310,600
1.04.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Bangkalan					3 Laporan	1,469,100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	Kab Bangkalan	**100%**	**482,000**			**100%**	**6,039,200**

1.04.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Bangkalan					6 Dokumen	1,509,800
1.04.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Bangkalan	9 Laporan	482,000			9 Laporan	1,509,800
1.04.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Bangkalan					31 Laporan	1,509,800
1.04.01.2.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Bangkalan					8 Dokumen	1,509,800
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	Kab Bangkalan		-			**100%**	**3,000,000**
1.04.01.2.05.01			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab Bangkalan						
1.04.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Bangkalan						
1.04.01.2.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	umlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Bangkalan					1 orang	3,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab Bangkalan	**100%**	48,187,250			**100%**	**145,212,600**
1.04.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Bangkalan	3 Paket	550,500			14 Paket	2,858,000

1.04.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Bangkalan	48 Paket	22,327,950			84 paket	39,147,600
1.04.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Bangkalan	10 Paket	954,800			14 Paket	1,738,000
1.04.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Bangkalan	7 Paket	17,240,000			14 Paket	25,250,000
1.04.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Bangkalan	3 Paket	3,694,000			12 Paket	8,051,000
1.04.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Bangkalan	1 dokumen	1,620,000			3 dokumen	8,100,000
1.04.01.2.06.0007			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab Bangkalan						
1.04.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bangkalan	4 Laporan	1,800,000			100 Laporan	60,068,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	Kab Bangkalan	**100%**	11,690,000			**100%**	**105,606,000**
1.04.01.2.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Bangkalan						
1.04.01.2.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Bangkalan	1 Unit	11,690,000			20 unit	105,606,000

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Bangkalan	**100%**	**1,145,890,600**			**100%**	**1,760,653,800**
1.04.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Bangkalan	9 Laporan	8,300,000			9 Laporan	10,054,000
1.04.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Bangkalan	12 laporan	131,684,600			12 Laporan	262,694,800
1.04.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Bangkalan	70 lap	1,005,906,000			70 Laporan	1,487,905,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	Kab Bangkalan	**100%**	**30,254,350**			**100%**	**196,950,300**
1.04.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Bangkalan	34 unit	21,749,350			34 unit	82,582,100
1.04.01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Bangkalan					34 unit	86,938,200
1.04.01.2.09.0005			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab Bangkalan					4 unit	1,180,000

1.04.01.2.09.0004			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Bangkalan						
1.04.01.2.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Bangkalan	34 unit	8,505,000			103 unit	26,250,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									**64,45%**	**150,000,000**
1.04.02.2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**64,45%**	**150,000,000**
1.04.02.2.03.0001			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab Bangkalan					7 unit rumah	150,000,000
1.04.03.2.01.02	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik**		**64,20%**	**16,501,889,922**			**22%**	**45,181,262,500**
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		**Jumlah Dokumen Pengembangan Kawasan Permukiman**	Kab Bangkalan	**64,20%**					

			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Kab Bangkalan						
1.04.03.2.03.02		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani**	Kab Bangkalan	**64,20%**	16,501,889,922			**22%**	**45,181,262,500**
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab Bangkalan						
1.04.03.2.03.0013			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Kab Bangkalan	9 Ha	16,501,889,922			9 ha	45,181,262,500
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					**64.20%**	**199,370,078**			**22%**	**3,906,449,846**
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota				**64.20%**	199,370,078			**22%**	**3,906,449,846**

1.04.04.2.01.0001			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab Bangkalan	6 Unit Rumah	199,370,078			195 unit rumah	3,906,449,846
1.04.05.2.01.01	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU**	**Kab Bangkalan**					**64,45%**	**10,000,000**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		**Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan**	Kab Bangkalan					**64,45%**	**10,000,000**
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab Bangkalan						
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab Bangkalan						
1.04.05.2.01.0010			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab Bangkalan					5 Laporan	10,000,000

	bidang		*bidang*	
	PLAM	**29,293,050,000**	**PLAM**	**24,517,700,881**
	TBG	**270,000,000**	**TBG**	**100,000,000**
	Sekret	**6,828,203,918**	**Sekret**	**7,343,710,470**
	PKP	**16,701,260,000**	**PKP**	**49,247,712,346**
	TOT	**53,092,513,918**	**TOT**	**81,209,123,697**

Pagu Renja Perubahan

data dr tabel ranhir renstra Th. 2025

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran (Perubahan Renja Tahun 2024)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGKALAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH				SASARAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2024	2024			2024	2024	
		(RENSTRA)	(P-RENJA)			(RENSTRA)	(P-RENJA)	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	39,84 %	39,84 %	1.Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	1. Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	64.20%	64.20%	
					2. Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	21%	21%	
					2. Prosentase Penyediaan Sarpras air bersih	62%	62%	
					3. Prosentase Penyediaan Sarpras sanitasi	32%	32%	
				2. Meningkatnya kwalitas tata bangunan dan gedung pemerintah	3. Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif	20%	20%	
				3.Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan permukiman	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	
					5. Nilai Sakip Perangkat Daerah	65.60%	65.60%	

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Perangkat Daerah*)

NO	program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program , Kegiatan & Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)	67%	37.05%	62%	62%	100%	64%		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah Tangga yang terlayani SPAM	67%	37.05%	62%	62%	100%	64%		
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	600SR	600 SR	600 SR	600 SR	100%	4500 SR	9600 SR	213%
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	4500SR	4500 SR	4500 SR	4500 SR	100%	600 SR	9600 SR	213%
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				600 SR	600 SR	100%		610SR	

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			**Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak**	**38%**	**37.05%**	**32%**	**32%**	**100%**	**35%**	**126%**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Rumah Tangga yang terlayani Sistem Air Limbah Domestik setempat**	**38%**	**37.05%**	**32%**	**32%**	**100%**			
			Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan air limbah domestik (SPALD)Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tangki septik	950 RT				**100%**	59 Rumah tangga	59 RT	100%
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	59 RT	59 Rumah tangga	59 Rumah tangga	59 Rumah tangga	**100%**	50 Rumah tangga	1023 RT	112%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				**38%**	**37.05%**	**32%**	**32%**	**100%**			
		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota			**38%**	**37.05%**	**32%**	**32%**	**100%**			
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap drainase permukiman					**100%**			
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		8000 M2	8000 M2	8000 M	8000 M	100%		9000M	900%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			**Persentase Bangunan Gedung yang dibangun**	**24%**	**10%**	**20%**	**20%**	**100%**	**22%**		0%

		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		**Persentase Bangunan Gedung terbangun yg layak serta bangunan yg ber-IMB & berSlf**	**24%**	**10%**	**20%**	**20%**	**100%**	**22%**		
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 DOC	1 doc	1 doc	1 doc	**100%**		301 doc	100%
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan,Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						**100%**			
			Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota						**100%**			
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota						**100%**			
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota						**100%**			

			Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan						**100%**			
			Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi						**100%**			
			Rehabilitas, Renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk Kepentingan strategis daerah kabupaten/kota		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	**100%**		4 unit	
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan					**100%**			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				24%	**10%**	**20%**	**20%**	**100%**			
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			24%	**10%**	**20%**	**20%**	**100%**			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota						**100%**			
			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan						**100%**			
			Penataan Bangunan dan Lingkungan		1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	**100%**		4 Kawasan	
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	**100%**		4 Kawasan	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 doc	6 doc	6 doc	6 doc	**100%**	6 doc	18 doc	300%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	3 doc	3 doc	3 doc	3 doc	**100%**	3 doc	9 doc	300%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		12 doc	12 doc	12 doc	12 doc	**100%**		24 doc	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3 doc	3 doc	3 doc	3 doc	**100%**	3 doc	9 doc	300%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	6doc	6doc	6doc	6doc	**100%**	6doc	15 doc	250%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 doc	3 doc	3 doc	3 doc	**100%**	3 doc	9 doc	300%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	**100%**		18 Lap	200%
									100%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bln	64 orang/bln	64 orang/bln	64 orang/bln	**100%**	64 orang/bln	164 Orang/bln	256%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**100%**	3 Laporan	9 Lap	300%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**100%**	3 Laporan	13 Lap	433%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**100%**		12 doc	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	**100%**	9 Laporan	27 lap	300%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	**100%**	31 Laporan	93 Lap	300%
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**100%**		16 Doc	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	**100%**	1 orang	105 Org	105

			Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya					**100%**		109 paket	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	**100%**	14 Paket	47 paket	336%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 PAKET	84 paket	84 paket	84 paket	**100%**	84 PAKET	272 paket	324%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	**100%**	14 Paket	47 paket	336%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	**100%**	14 Paket	55 paket	393%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	**100%**	12 Paket	23 paket	192%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**100%**	3 dokumen	23 paket	767%
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					**100%**			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	**100%**	100 Laporan	490 lap	490%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	**100%**	20 unit	82 unit	410%

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	**100%**	9 Laporan	27 lap	300%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**100%**	12 Laporan	36 lap	300%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	**100%**	70 Laporan	178 lap	254%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	**100%**	34 unit	84 unit	247%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	**100%**	103 unit	156 unit	151%
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	**100%**		28 unit	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		103 unit	103 unit	103 unit	**100%**		104 unit	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	103 unit				**100%**		103 unit	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			**Persentase Korban Bencana**	**64.70%**	**64.67%**	**64,20%**	**64,20%**	**100%**	**64.45%**		
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		**Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana**	**64.70%**	**64.67%**	**64,20%**	**64,20%**	**100%**			
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah korban bencana kabupaten / kota yang terehabilitasi	7 unit rumah	7 unit rumah	7 unit rumah	7 unit rumah	**100%**	7 unit rumah	23 Unit Rumah	329%
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			**Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik**	**64.70%**	64,20%	64,20%	64,20%	100%	**64.45%**		
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani**	**64.70%**	**64.67%**	**64,20%**	**64,20%**	**100%**			
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki					**100%**		45 unit rumah	
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	9 ha	9 ha	9 ha	9 ha	**100%**	9 ha	27 ha	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			Persentase Perumahan dan kawasan permukiman Kumuh yang tertata dengan baik	23%	**64.67%**	**21%**	**21%**	**100%**	22%		
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Dicegah tumbuh dan berkembang	23%	**64.67%**	**21%**	**21%**	**100%**			

			Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh)Ha	Jumlah Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)Ha yang diperbaiki	195 unit rumah	90 unit rumah	90 unit rumah	90 unit rumah	**100%**	195 unit rumah	285 unit rumah	**146%**
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			**Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan**	**64.70%**	**64.67%**			**100%**	**64.45%**		
				Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU			**64.20%**	**64.20%**	**100%**			
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		**Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan**	**64.70%**	**64.67%**	**64.20%**	**64.20%**	**100%**			
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	**100%**	5 Laporan		
				Jumlah Perumahan Yang diserahterimakan PSU nya Kepada Pemerintah Daerah								

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah, Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bidang Pembangunan.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum dituangkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun–tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman . Penyusunan Rencana Kinerja ini dimulai dengan merumuskan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahun), yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tahunan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan RKA dan DPA Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Bangkalan.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis RPJMD dan Rencana SKPD ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dikelola SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan.

Proses penyusunan Renja ini dimulai dengan persiapan penyusunan RENJA SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rencana awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tahunan.

Adapun prinsip – prinsip dalam penyusunan rancangan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
b. Rumusan program / kegiatan didalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing SKPD
c. Penyusunan Renja SKPD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
d. Program dan Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun - n dan tahun n + 1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti, RPJMD,RENSTRA SKPD dan RPKD.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar. 1.1.

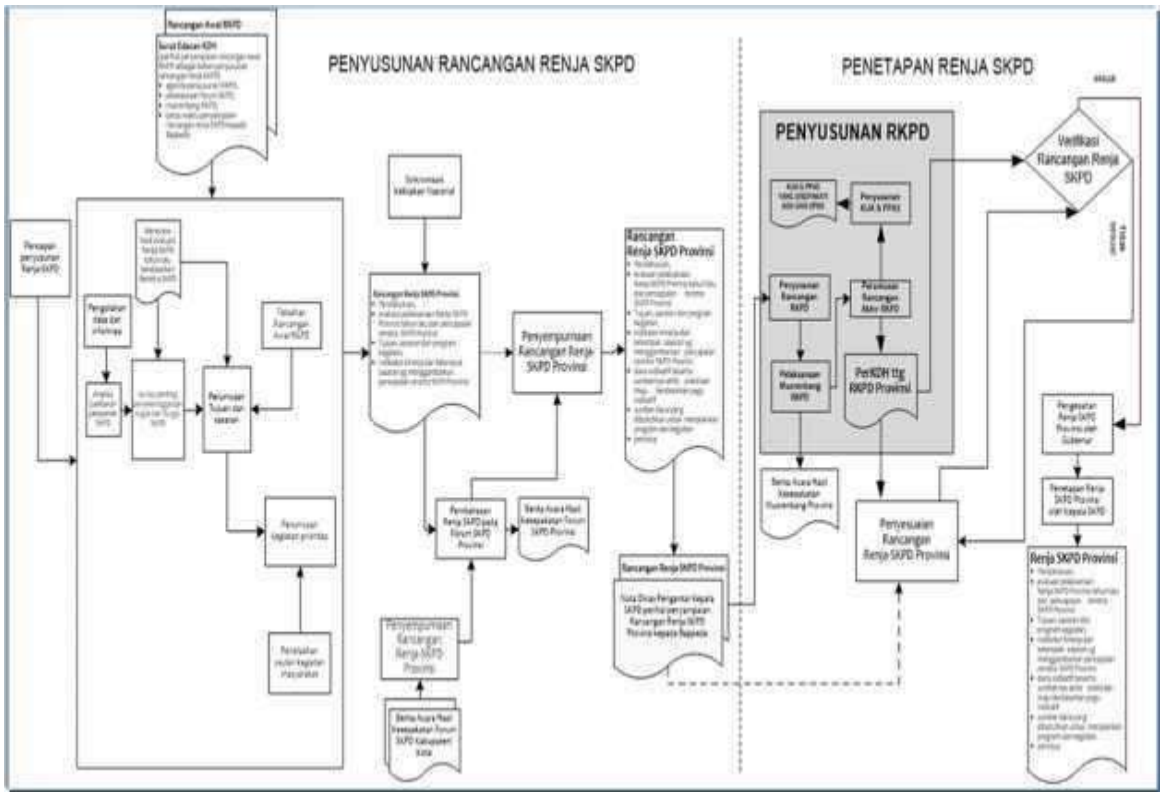

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI No. 13.I/PRT/M/2015 tentang Renstra K/L (sesuai Kementrian masing – masing Perangkat Daerah)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkala Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Bangkalan No. 40 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi . Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E).

15. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27/E)

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN**
   a. Latar belakang
   b. Landasan Hukum
   c. Maksud Tujuan
   d. Sistemarika Penulisan
2. **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN**
   a. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
3. **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**
4. **BAB IV PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN LALU (Tahun 2023) n-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan. Namun demikan, melalui program / kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan sebagimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2023 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s/d Tahun 2023 (tahun Berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dibawah :

Adapun Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rekapitulasi Belanja Tahun 2023 Sampai Bulan Maret

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik
1	Sekretariat	6.950.245.144	1.303.910.156	18.76%	18.76%
2	Bid. Penyehatan Lingkungan & Air Minum	31.158.388.000	-	-	-
3	Bid. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28.190.877.798	-	-	-
4	Bid. Tata Bangunan & Tata Gedung	3.595.000.000	-	-	-

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat berjalan dengan baik. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah merupakan program dan kegiatan utama yang bukan diperuntukkan untuk membiayai sifatnya rutin dalam rencana kinerja tahun 2023 sebagaimana berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub.Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub.Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Keg.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub.Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub.Keg. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub.Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub.Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub.Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub.Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Sub.Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub.Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub.Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD

Keg.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub.Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub.Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub.Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub. Pemeliharaan Mebel
- Sub. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Keg.Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- Sub.Keg. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
-

Keg.Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- Sub.Keg. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
- Sub.Keg. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Keg.Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Sub.Keg. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Sub.Keg. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
-

4. **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINU**M

Keg.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Sub.Keg. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Sub.Keg. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Keg.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub.Keg. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Keg.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub.Keg. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- Sub.Keg. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Keg.Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- Sub.Keg. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- Sub.Keg. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- Sub.Keg. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
- Sub.Keg. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Keg.Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- Sub.Keg. Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Sub.Keg. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

► **Adapun Penyebab terpenuhinya target maupun tidak terpenuhinya target kegiatan di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu :**

a. ***Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan disebabkan antara lain karena :*** adanya kebijakan penguatan program/kegiatan melalui pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksananan Standar pelayanan minimal (SPM) yang ada di dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Bangkalan dari pemerintah pusat, seluruh program/kegiatan mengacu kepada DPA tahun berjalan, dalam implementasinya mengacu kepada Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) dengan menggunakan indikator capaian program dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kab. Bangkalan 2024 – 2026. Dengan terpenuhinya target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan maka menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai mekanisme Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Bangkalan.

b. Secara umum beberapa faktor penyebab Belum tercapainya target adalah :
   1. karena terdapat program/kegiatan yang masih belum terserap secara maksimal dikarenakan masih triwulan I (Tahun 2023).
   2. Karena adanya Efisiensi Anggaran APBD yang disebabkan oleh adanya pengurangan pagu anggaran.

   ▶ Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara langsung terwujud dalam meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar masayarakat yang memadai yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap dampak Meningkatnya derajat kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat, selain itu adanya keterlambatan pengelolaan kegiatan, keterlambatan pencairan anggaran karena dalam pelaksanaan anggaran memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian – penyesuaian termasuk revisi dokumen anggaran dan perencanaan kegiatan.

   ▶ Adapun Program utama yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan hasil PEMUTAHIRAN PMDN 90 / 2019 adalah seabagai berikut :
      1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
      2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
      3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Delapan program utama diatas tersebut berjalan berdasarkan pada Permendagri 90 tahun 2019 dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Untuk program – program utama, karena sifatnya sebagai program utama,kinerja internal instansi dalam menjalankan tupoksinya masih akan berlanjut dalam periode RPJMD / Renstra berikutnya

► Kebijakan / tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/ kegiatan tersebut antara lain :

1. dengan melakukan Perubahan APBD jika terjadi kesalahan usulan program/kegiatan, atau dengan pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program, selain itu untuk meningkatkan realisasi target program di tahun berjalan.
2. Kebijakan lain dalam optimalisasi pencapaian target Renstra yaitu melakukan percepatan penerapan pencapaian target SPM bidang bidang Perumahan rakyat, bidang pemerintahan dalam negeri,bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
3. Perubahan target capaian kinerja akhir periode RENSTRA.
4. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan
5. Efisiensi alokasi belanja
6. Penambahan alokasi pagu anggaran

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tugas Pelayanan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melalui pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran – kewajaran kemanusiaan, termasuk sarana dan prasarana lingkungan perumahan permukiman.

Sebagai institusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk – bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa :

1. Penyediaan Jalan Lingkungan dan Drainase baik dilingkungan permukiman perkotaan maupun perdesaan, melalui pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru.
2. Penyediaan PSU (Prasarana dan Sarana Umum) dilingkungan permukiman perkotaan maupun perdesaan.
3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembagunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu melalui pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
4. Penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) khususnya didaerah permukiman perdesaan / daerah rawan air.
5. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang baik khususnya dilingkungan permukiman perdesaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, Pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang

merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standart Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dan perkiraan maju di tahun 2024.

A. Penetapan Indikator Kinerja :

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan . Indikator Kinerja Kegiatan meliputi Indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2022 total anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 121.557.387.157,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 120.377.908.526,91. Sedangkan Pagu di tahun 2023 sebesar Rp. 69.894.510.942 dengan realisasi sampai bulan maret tahun 2023 sebesar Rp. 1.303.910.156 (18,76)

Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 40 tahun 2016. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bangkalan, merupakan unsur pendukung dalam melaksanakan tugas

tertentu. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dan Sebagai SKPD yang mengemban Visi / Misi dengan perumusan tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil,maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Keberhasilan kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dari sejauh mana realisasi program dan kegiatan SKPD dapat dicapai. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pada tabel 2.2 berikut ini :

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN

Alokasi Anggaran untuk Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut :

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan perangkat untuk periode 1 (satu) tahun, Renja – SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2024 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian diharapkan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Bangkalan yang lebih baik.

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kabupaten Bangkalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,Kabupaten Bangkalan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kabupaten Bangkalan ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan secara Bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan anggaran

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024

5.3 Rencana Tindak Lanjut :

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024,selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bangkalan, 31 juli 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGKLAN

MOHAMMAD HASAN FAISOL,S.STP,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19830714200112100

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD s/d Semester I Tahun 2024

NO.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	arget Renstra Perangkat Daera			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan anali
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak	V	-	64,20%	64,45%	64.70%	48,16%	64.67%	64,20%	64,45%	
2	Persentase Penyediaan Sarpras Air Bersih	V	-	62%	64%	67%	46,39%	37.05%	62%	64%	
3	Prosentase Penyediaan Sarpras s	V	-	32%	35%	38%			32%	35%	

TABEL 3.2

Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Bangkalan

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (RENJA PERUBAHAN)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) / (Pagu RENJA PERUBAHAN)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					6	7	8	9	10	11	12
1.03.03.2.01.01	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)**		**62%**	**12,446,802,000**			**64%**	**6,615,851,610**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Rumah Tangga yang terlayani SPAM**		**62%**	12,446,802,000			**64%**	**6,615,851,610**
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab Bangkalan						
1.03.03.2.01.0026			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kab Bangkalan	410 ltr/dtk	3,282,732,000			4500 SR	1,000,000,000
1.03.03.2.01.0028			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kab Bangkalan	610 ltr/dtk	9,164,070,000			600 SR	4,615,851,610
1.03.03.2.01.07			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan								1,000,000,000
1.03.05.2.01.01	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak**		**32%**	**16,846,248,000**			**35%**	**11,908,299,117**

		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Rumah Tangga yang terlayani Sistem Air Limbah Domestik**		**32%**	16,846,248,000			**35%**	**11,908,299,117**
			penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab Bangkalan						
1.03.05.2.01.0022			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kab Bangkalan	210 M3/hari	2,637,860,000			59 Rumah tangga	11,908,299,117
1.03.05.2.01.0039			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		950 / RT	14,208,388,000				
1.03.06.2.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**									**35%**	**5,993,550,154**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kab Bangkalan					**35%**	**5,993,550,154**
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap drainase permukiman	Kab Bangkalan						

1.03.06.2.01.12			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab Bangkalan					8000 M	5,993,550,154
1.03.06.2.01.16			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Kab Bangkalan						
1.03.08.2.01.01	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**Persentase Bangunan Gedung yang dibangun**		**20%**	**270,000,000**			**22%**	**70,000,000**
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Persentase Bangunan Gedung terbangun yg layak serta bangunan yg ber- IMB & berSlf	Kab Bangkalan	20%	270,000,000			**22%**	**70,000,000**
1.03.08.2.01.0018			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	umlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kab Bangkalan	2 bangunan gedung	200,000,000				

1.03.08.2.01.0023			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab Bangkalan	300 doc	70,000,000			1 doc	10,000,000
1.03.08.2.01.02			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bangkalan						10,000,000
			Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab Bangkalan						5,000,000
1.03.08.2.01.04			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota								5,000,000
1.03.08.2.01.05			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bangkalan						10,000,000

1.03.08.2.01.09			Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	Kab Bangkalan						5,000,000
1.03.08.2.01.11			Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan rumah Tinggal deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan rumah Tinggal deret yang telah dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Kab Bangkalan						10,000,000
1.03.08.2.01.12			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Kab Bangkalan					1 unit	10,000,000
1.03.08.2.01.13			Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota								5,000,000
1.03.09.2.01.03	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**Persentase Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan dan lingkungannya**						**22%**	**30,000,000**
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Sarana dan Prasarana Penataan bangunan dan lingkungannya yang tertangani**	Kab Bangkalan					**22%**	**30,000,000**

1.03.09.2.01.01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota								5,000,000.00
1.03.09.2.01.02			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan								5,000,000.00
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab Bangkalan					1 kawasan	10,000,000
1.03.09.2.01.04			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kab Bangkalan					1 kawasan	10,000,000
1.04.01.2.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**		**100%**	**6,828,203,918**			**100%**	**7,343,710,470**

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab Bangkalan	**100%**	**1,833,000**			**100%**	**14,353,200**
1.04.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bangkalan	6 dokumen	904,000			6 doc	4,512,200
1.04.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Bangkalan	3 dokumen	421,000			3 doc	1,769,300
1.04.01.2.01.0003			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Bangkalan					12 doc	1,771,600
1.04.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab Bangkalan	3 dokumen	508,000			3 doc	1,771,600
1.04.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab Bangkalan					6doc	1,771,600

1.04.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Bangkalan					3 doc	1,344,800
1.04.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bangkalan					9 Laporan	1,412,100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**100%**	5,589,866,718			**100%**	**5,111,895,370**
1.04.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bangkalan	64 orang	5,589,433,718			64 orang/bln	5,109,115,670
1.04.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Bangkalan	3 Laporan	433,000			3 Laporan	1,310,600
1.04.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Bangkalan					3 Laporan	1,469,100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	Kab Bangkalan	**100%**	**482,000**			**100%**	**6,039,200**

1.04.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Bangkalan					6 Dokumen	1,509,800
1.04.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Bangkalan	9 Laporan	482,000			9 Laporan	1,509,800
1.04.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Bangkalan					31 Laporan	1,509,800
1.04.01.2.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Bangkalan					8 Dokumen	1,509,800
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	Kab Bangkalan		-			**100%**	**3,000,000**
1.04.01.2.05.01			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab Bangkalan						
1.04.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Bangkalan						
1.04.01.2.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	umlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Bangkalan					1 orang	3,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab Bangkalan	**100%**	48,187,250			**100%**	**145,212,600**
1.04.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Bangkalan	3 Paket	550,500			14 Paket	2,858,000

1.04.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Bangkalan	48 Paket	22,327,950			84 paket	39,147,600
1.04.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Bangkalan	10 Paket	954,800			14 Paket	1,738,000
1.04.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Bangkalan	7 Paket	17,240,000			14 Paket	25,250,000
1.04.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Bangkalan	3 Paket	3,694,000			12 Paket	8,051,000
1.04.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Bangkalan	1 dokumen	1,620,000			3 dokumen	8,100,000
1.04.01.2.06.0007			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab Bangkalan						
1.04.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bangkalan	4 Laporan	1,800,000			100 Laporan	60,068,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	Kab Bangkalan	**100%**	11,690,000			**100%**	**105,606,000**
1.04.01.2.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Bangkalan						
1.04.01.2.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Bangkalan	1 Unit	11,690,000			20 unit	105,606,000

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab Bangkalan	**100%**	**1,145,890,600**			**100%**	**1,760,653,800**
1.04.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Bangkalan	9 Laporan	8,300,000			9 Laporan	10,054,000
1.04.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Bangkalan	12 laporan	131,684,600			12 Laporan	262,694,800
1.04.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Bangkalan	70 lap	1,005,906,000			70 Laporan	1,487,905,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	Kab Bangkalan	**100%**	**30,254,350**			**100%**	**196,950,300**
1.04.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Bangkalan	34 unit	21,749,350			34 unit	82,582,100
1.04.01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Bangkalan					34 unit	86,938,200
1.04.01.2.09.0005			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab Bangkalan					4 unit	1,180,000

1.04.01.2.09.0004			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Bangkalan						
1.04.01.2.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Bangkalan	34 unit	8,505,000			103 unit	26,250,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									**64,45%**	**150,000,000**
1.04.02.2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**64,45%**	**150,000,000**
1.04.02.2.03.0001			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab Bangkalan					7 unit rumah	150,000,000
1.04.03.2.01.02	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik**		**64,20%**	**16,501,889,922**			**22%**	**45,181,262,500**
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		**Jumlah Dokumen Pengembangan Kawasan Permukiman**	Kab Bangkalan	**64,20%**					

			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Kab Bangkalan						
1.04.03.2.03.02		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani**	Kab Bangkalan	**64,20%**	16,501,889,922			**22%**	**45,181,262,500**
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab Bangkalan						
1.04.03.2.03.0013			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Kab Bangkalan	9 Ha	16,501,889,922			9 ha	45,181,262,500
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					**64.20%**	**199,370,078**			**22%**	**3,906,449,846**
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota				**64.20%**	199,370,078			**22%**	**3,906,449,846**

1.04.04.2.01.0001			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab Bangkalan	6 Unit Rumah	199,370,078			195 unit rumah	3,906,449,846
1.04.05.2.01.01	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU**	**Kab Bangkalan**					**64,45%**	**10,000,000**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		**Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan**	Kab Bangkalan					**64,45%**	**10,000,000**
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab Bangkalan						
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab Bangkalan						
1.04.05.2.01.0010			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab Bangkalan					5 Laporan	10,000,000

	bidang		***bidang***
	PLAM	**29,293,050,000**	**PLAM** **24,517,700,881**
	TBG	**270,000,000**	**TBG** **100,000,000**
	Sekret	**6,828,203,918**	**Sekret** **7,343,710,470**
	PKP	**16,701,260,000**	**PKP** **49,247,712,346**
	TOT	**53,092,513,918**	**TOT** **81,209,123,697**

Pagu Renja Perubahan

data dr tabel ranhir renstra Th. 2025

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran (Perubahan Renja Tahun 2024)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGKALAN

TUJUAN PERANGKAT DAERAH				SASARAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2024	2024			2024	2024	
		(RENSTRA)	(P-RENJA)			(RENSTRA)	(P-RENJA)	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	39,84 %	39,84 %	1.Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	1. Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	64.20%	64.20%	
					2. Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	21%	21%	
					2. Prosentase Penyediaan Sarpras air bersih	62%	62%	
					3. Prosentase Penyediaan Sarpras sanitasi	32%	32%	
				2. Meningkatnya kwalitas tata bangunan dan gedung pemerintah	3. Prosentase bangunan dalam kondisi baik dan representatif	20%	20%	
				3.Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan permukiman	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	
					5. Nilai Sakip Perangkat Daerah	65.60%	65.60%	

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Perangkat Daerah*)

NO	program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program , Kegiatan & Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Persentase Desa yang terlayani Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)	67%	37.05%	62%	62%	100%	64%		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah Tangga yang terlayani SPAM	67%	37.05%	62%	62%	100%	64%		
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	600SR	600 SR	600 SR	600 SR	100%	4500 SR	9600 SR	213%
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	4500SR	4500 SR	4500 SR	4500 SR	100%	600 SR	9600 SR	213%
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				600 SR	600 SR	100%		610SR	

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			**Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak**	**38%**	**37.05%**	**32%**	**32%**	**100%**	**35%**	**126%**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Rumah Tangga yang terlayani Sistem Air Limbah Domestik setempat**	**38%**	**37.05%**	**32%**	**32%**	**100%**			
			Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan air limbah domestik (SPALD)Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tangki septik	950 RT				**100%**	59 Rumah tangga	59 RT	100%
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	59 RT	59 Rumah tangga	59 Rumah tangga	59 Rumah tangga	**100%**	50 Rumah tangga	1023 RT	112%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				**38%**	**37.05%**	**32%**	**32%**	**100%**			
		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota			**38%**	**37.05%**	**32%**	**32%**	**100%**			
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap drainase permukiman					**100%**			
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		8000 M2	8000 M2	8000 M	8000 M	100%		9000M	900%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			**Persentase Bangunan Gedung yang dibangun**	**24%**	**10%**	**20%**	**20%**	**100%**	**22%**		0%

		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		**Persentase Bangunan Gedung terbangun yg layak serta bangunan yg ber-IMB & berSlf**	**24%**	**10%**	**20%**	**20%**	**100%**	**22%**		
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 DOC	1 doc	1 doc	1 doc	**100%**		301 doc	100%
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan,Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						**100%**			
			Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota						**100%**			
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota						**100%**			
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota						**100%**			

			Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan						**100%**			
			Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi						**100%**			
			Rehabilitas, Renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk Kepentingan strategis daerah kabupaten/kota		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	**100%**		4 unit	
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan					**100%**			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				24%	**10%**	**20%**	**20%**	**100%**			
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			24%	**10%**	**20%**	**20%**	**100%**			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota						**100%**			
			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan						**100%**			
			Penataan Bangunan dan Lingkungan		1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	**100%**		4 Kawasan	
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	**100%**		4 Kawasan	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 doc	6 doc	6 doc	6 doc	**100%**	6 doc	18 doc	300%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	3 doc	3 doc	3 doc	3 doc	**100%**	3 doc	9 doc	300%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		12 doc	12 doc	12 doc	12 doc	**100%**		24 doc	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3 doc	3 doc	3 doc	3 doc	**100%**	3 doc	9 doc	300%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	6doc	6doc	6doc	6doc	**100%**	6doc	15 doc	250%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 doc	3 doc	3 doc	3 doc	**100%**	3 doc	9 doc	300%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	**100%**		18 Lap	200%
									100%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bln	64 orang/bln	64 orang/bln	64 orang/bln	**100%**	64 orang/bln	164 Orang/bln	256%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**100%**	3 Laporan	9 Lap	300%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**100%**	3 Laporan	13 Lap	433%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**100%**		12 doc	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	**100%**	9 Laporan	27 lap	300%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	**100%**	31 Laporan	93 Lap	300%
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**100%**		16 Doc	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	**100%**	1 orang	105 Org	105

			Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya					**100%**		109 paket	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	**100%**	14 Paket	47 paket	336%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 PAKET	84 paket	84 paket	84 paket	**100%**	84 PAKET	272 paket	324%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	**100%**	14 Paket	47 paket	336%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	**100%**	14 Paket	55 paket	393%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	**100%**	12 Paket	23 paket	192%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**100%**	3 dokumen	23 paket	767%
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					**100%**			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	**100%**	100 Laporan	490 lap	490%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	**100%**	20 unit	82 unit	410%

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	**100%**	9 Laporan	27 lap	300%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**100%**	12 Laporan	36 lap	300%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	**100%**	70 Laporan	178 lap	254%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	**100%**	34 unit	84 unit	247%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	**100%**	103 unit	156 unit	151%
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	**100%**		28 unit	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		103 unit	103 unit	103 unit	**100%**		104 unit	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	103 unit				**100%**		103 unit	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			**Persentase Korban Bencana**	**64.70%**	**64.67%**	**64,20%**	**64,20%**	**100%**	**64.45%**		
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		**Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana**	**64.70%**	**64.67%**	**64,20%**	**64,20%**	**100%**			
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah korban bencana kabupaten / kota yang terehabilitasi	7 unit rumah	7 unit rumah	7 unit rumah	7 unit rumah	**100%**	7 unit rumah	23 Unit Rumah	329%
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			**Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik**	**64.70%**	64,20%	64,20%	64,20%	100%	**64.45%**		
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani**	**64.70%**	**64.67%**	**64,20%**	**64,20%**	**100%**			
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki					**100%**		45 unit rumah	
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	9 ha	9 ha	9 ha	9 ha	**100%**	9 ha	27 ha	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			Persentase Perumahan dan kawasan permukiman Kumuh yang tertata dengan baik	23%	**64.67%**	**21%**	**21%**	**100%**	22%		
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Dicegah tumbuh dan berkembang	23%	**64.67%**	**21%**	**21%**	**100%**			

			Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh)Ha	Jumlah Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10(sepuluh)Ha yang diperbaiki	195 unit rumah	90 unit rumah	90 unit rumah	90 unit rumah	**100%**	195 unit rumah	285 unit rumah	**146%**
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			**Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan**	**64.70%**	**64.67%**			**100%**	**64.45%**		
				Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU			**64.20%**	**64.20%**	**100%**			
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		**Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan**	**64.70%**	**64.67%**	**64.20%**	**64.20%**	**100%**			
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	**100%**	5 Laporan		
				Jumlah Perumahan Yang diserahterimakan PSU nya Kepada Pemerintah Daerah								

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program kepala daerah.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ini kemudian dijabarkan menjadi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk dijadikan pedoman dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap Perangkat Daerah (PD) yang merupakan bagian terintegrasi dari Pemerintah Daerah juga wajib untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam sebuah Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, P-Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten. Perubahan Renja PD digunakan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) PD.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Dalam proses penyusunannya, Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dituangkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang kemudian juga akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Tahun Anggaran 2024mendatang.

1.2.Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Perubahan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 / E);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah:

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan adanya perubahan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang disebabkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan selama pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan yang mencakup adanya pergeseran pagu kegiatan penghapusan dan penambahan kegiatan baru.

b. Tujuan

1) Sebagai acuan dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024;

2) Memasukkan program dan kegiatan pada perubahan renja ini ke dalam KUA-PPAS tahun 2024;

3) Sebagai panduan mengevaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu pada proses penyusunan perubahan rencana kerja (P-Renja) Tahun 2024, maka harus terlebih dahulu melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis (P-Renstra) PD s/d Semester 1 Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 SATPOL PP

SATPOL PP KAB. BANGKALAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks kepuasaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12,672,433,167	100%	11,732,673,162	100%	11,864,398,489	100%	11,732,673,162	100%	98,89%	100%	14,487,497,123	50%	6,801,361,556	50%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan	100%	31,657,800	100%	24,297,500	100%	25,203,000	100%	24,297,500	100%	96%	100%	14,436,900	50%	4,028,000	50%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	6,164,500	3 dokumen	5,995,000	3 Dokumen	6,649,700	3 Dokumen	5,995,000	100%	90.15	3 Dokumen	3,206,500	0 dokumen	1,762,500	50%

5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8,868,150	1 dokumen	12,459,500	1 Dokumen	12,520,350	1 Dokumen	12,459,500	100%	99.51	1 Dokumen	4,620,050	0 dokumen	0	50%
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,791,750	1 dokumen	0	1 Dokumen	181,550	1 Dokumen	0	100%	0.00	1 Dokumen	1,110,050	0 dokumen	0	50%
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	850,000	0 dokumen	0	1 Dokumen	0					1 Dokumen	580,000	1 dokumen	517,500	100%
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	850,000	0 dokumen	0	1 Dokumen	0					1 Dokumen	580,000	0 dokumen	0	0%
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	7,012,650	1 Laporan	1,793,000	1 Laporan	1,801,400	1 Laporan	1,793,000	100%	99.53	1 laporan	2,475,250	1 laporan	1,298,000	100%

5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 laporan	6,120,750	6 Laporan	4,050,000	6 Laporan	4,050,000	6 Laporan	4,050,000	100%	100.00	6 Laporan	1,865,050	4 laporan	450,000	50%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	100%	6,612,752,667	100%	6,073,729,295	100%	6,186,901,270	100%	6,073,729,295	100%	98%	100%	8,860,795,423	50%	3,920,564,327	50%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/ bulan	6,599,776,167	76 orang/ bulan	6,063,452,795	80 Orang/ bulan	6,176,624,770	76 orang/ bulan	6,063,452,795	100%	98.17	80 org/ bulan	8,854,581,273	76 orang/ bulan	3,918,964,227	96%
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	7,141,850	1 Laporan	4,441,850	1 Laporan	4,441,850	1 Laporan	4,441,850	100%	100.00	1 Laporan	3,714,050	1 laporan	0	100%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	5,834,650	18 Laporan	5,834,650	18 Laporan	5,834,650	18 Laporan	5,834,650	100%	100.00	18 Laporan	2,500,100	9 laporan	1,600,100	50%
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir	100%	3,222,700	100%	1,611,350	100%	1,611,350	100%	1,611,350	100%	100%	100%	1,430,100	50%	1,430,100	100%

5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1,611,350			0 Dokumen	0					1 Dokumen	615,050	1 dokumen	615,050	100%
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	1,611,350	7 Laporan	1,611,350	7 Laporan	1,611,350	7 Laporan	1,611,350	100%	100.00	7 Laporan	815,050	7 laporan	815,050	100%
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	25,000,000	100%		100%		100%		0%	0%	100%	79,470,000	100%	78,355,000	100%
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0			0 paket	0					322 paket	79,470,000	322 paket	78,355,000	100%
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	25,000,000			0 orang	0									
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi	100%	84,535,550	100%	77,843,716	100%	83,324,801	100%	77,843,716	100%	93%	100%	34,510,250	50%	11,987,000	50%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	2,500,000	4 paket	2,530,800	4 paket	2,531,900	4 paket	2,530,800	100%	99.96	4 paket	797,000	4 paket	797,000	100%

5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	18,240,650	6 paket	22,439,500	12 paket	23,730,200	12 paket	22,439,500	100%	94.56	12 paket	15,526,450	6 paket	6,991,750	50%
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	1,586,500													
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 paket	11,750,400	8 paket	9,000,000	8 paket	9,000,000	8 paket	9,000,000	100%	100.00	8 paket	5,250,000	0 paket	0	0%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	2,000,000	8 paket	2,578,500	12 paket	2,578,701	12 paket	2,578,500	100%	99.99	12 paket	2,496,800	8 paket	1,138,250	67%
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	3,500,000			4 dokumen	0					4 dokumen	0	0 dokumen	0	0%
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4,958,000	6 Laporan	2,814,000	12 Laporan	2,958,000	6 Laporan	2,814,000	100%	95.13	12 laporan	2,760,000	6 laporan	1,380,000	50%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	40,000,000	1 Laporan	38,480,916	59 Laporan	42,526,000	40 Laporan	38,480,916	68%	90.49	59 laporan	7,680,000	1 laporan	1,680,000	17%

5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100%		100%		100%		100%		0%	0%	100%		0%	0	0%
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0	0		0 unit				0%		0	0			
1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	0		1 unit				0%		0	0			
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100%	5,650,681,850	100%	5,373,419,718	100%	5,380,954,518	100%	5,373,419,718	100%	100%	100%	5,340,435,800	50%	2,687,771,979	50%
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	3,000,000	4 Laporan	1,462,950	4 Laporan	1,462,950	4 Laporan	1,462,950	100%	100.00	4 laporan	905,800	4 laporan	905,800	100%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	201,281,850	12 Laporan	52,104,418	12 bulan	53,844,068	12 Laporan	52,104,418	100%	96.77	12 laporan	54,000,000	6 laporan	19,743,596	50%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	5,446,400,000	12 Laporan	5,319,852,350	12 bulan	5,325,647,500	12 Laporan	5,319,852,350	100%	99.89	12 laporan	5,285,530,000	6 laporan	2,667,122,583	50%

5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	264,582,600	100	181,771,583	100%	186,403,550	100%	181,771,583	100%	98%	100%	156,418,650	50%	97,225,150	50%
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	30,240,000									1 unit	22,604,400	1 unit	15,319,700	100%
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 unit	222,542,600	19 unit	169,985,583	19 unit	174,603,550	19 unit	169,985,583	100%	97.36	19 unit	128,144,250	19 unit	76,835,450	100%
5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 unit	4,470,000	15 unit	4,470,000	15 unit	4,470,000	15 unit	4,470,000	100%	100.00	15 unit	4,470,000	6 unit	3,870,000	100%
5.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	1,450,000	12 unit	1,450,000	15 unit	1,450,000	12 unit	1,450,000	100%	100.00	6 unit	1,200,000	6 unit	1,200,000	100%

5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	5,880,000	1 unit	5,866,000	1 unit	5,880,000	1 unit	5,866,000	100%	99.76					
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum	100%	1,979,060,250	100%	2,193,960,500	100%	2,310,460,966	100%	2,197,425,100	100%	95,11%	100%		50%	1,052,291,000	50%
5.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	100%	98,270,000	100%	94,698,500	100%	98,995,500	100%	94,698,500	100%	96%	100%	1,353,382,700	50%	752,053,600	50%
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	48 kasus	7,250,000	98 kasus	18,935,500	98 kasus	19,750,000	98 kasus	18,935,500	100%	95.88	16 kasus	2,500,000	16 kasus	2,500,000	100%

1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3 kasus	2,500,000	5 kasus	2,431,000	5 kasus	2,431,000	5 kasus	2,431,000	100%	100.00	3 kasus	1,500,000	0 kasus	0	0%
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 dokumen	60,000,000	1 dokumen	27,400,000	1 Dokumen	27,400,000	1 dokumen	27,400,000	100%	100.00	1 Dokumen	1,500,000	0 dokumen	0	0%
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	24,977,500	1 Dokumen	25,000,000	1 dokumen	24,977,500	100%	99.91	2 Dokumen	674,620,000	1 dokumen	524,620,000	50%

1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	20 orang	4,000,000	20 orang	3,950,000	20 Orang	4,000,000	20 orang	3,950,000	100%	99.00	20 org	2,500,000	20 orang	2,050,000	100%
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	8,020,000	2 dokumen	12,534,500	1 Dokumen	15,444,500	2 dokumen	12,534,500	100%	81.16	1 Dokumen	668,262,700	1 dokumen	222,883,600	40%
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia															
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	2,500,000			1 Dokumen	500,000									

1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	10,000,000	1 Laporan	4,470,000	1 Laporan	4,470,000	1 Laporan	4,470,000	100%	100.00	1 laporan	2,500,000	0 laporan	0	0%
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup	100%	1,876,790,250	100%	2,099,262,000	100%	2,207,465,466	100%	2,099,262,000	100%	95%	100%		50%	300,237,400	50%
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	30 laporan	1,621,985,400	31 Laporan	1,657,511,800	31 Laporan	1,707,062,200	31 Laporan	1,657,511,800	100%	97.10	30 laporan	406,832,200	32 laporan	300,237,400	100%
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 laporan	4,804,850	6 Laporan	2,592,050	6 Laporan	2,804,850	6 Laporan	2,592,050	100%	92.41	6 laporan	1,500,000	0 laporan	0	0%

1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	59 laporan	250,000,000	57 Laporan	439,158,150	57 Laporan	497,598,416	57 Laporan	439,158,150	100%	88.26					
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase aparatur yang ikut pelatihan	100%	4,000,000	100%		100%	4,000,000	100%	3,464,600	100%		100%		0%	0	0%
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 laporan	4,000,000			1 Laporan	4,000,000	1 Laporan	3,464,600	100%	86.62					
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100%	30,000,000	100%	4,845,150	100%	4,845,150	100%	4,845,150	100%		100%		50%		50%
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	20,000,000	100%	4,845,150	100%	4,845,150	100%	4,845,150	100%		100%		50%		50%

1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 orang	20,000,000	30 orang	4,845,150	30 orang	4,845,150	30 orang	4,845,150	100%	100.00					
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan apatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana											150 orang	100,000,000	0 orang	0	0%
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	10,000,000	100%		100%		100%		100%		100%		0%		0%
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit wabah zoonosis	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas															
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 orang	10,000,000			orang										
1:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100%	175,000,000	100%	164,934,927	100%	227,810,000	100%	219,672,027	100%	96,43%	100%		50%	60,649,043	50%

	KEBAKARAN																
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran**	**86.67 %**	**104,835,200**	**100%**	**64,671,677**	**100%**	**126,610,000**	**100%**	**119,408,777**	**100%**	**94%**	**100%**	**139,302,000**	**50%**	**53,478,443**	**50%**
1.05.04.2.01.01	**Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya**	**10 dokumen**	**24,435,000**	**14 Dokumen**	**5,799,677**	**14 Dokumen**	**57,997,600**	**14 Dokumen**	**57,996,777**	**100%**	**100.00**	**10 dokumen**	**70,263,232**	**5 dokumen**	**35,977,675**	**50%**
1.05.04.2.01.02	**Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**20 laporan**	**25,200,000**	**34 laporan**	**40,950,000**	**34 Laporan**	**47,250,000**	**34 Laporan**	**40,950,000**	**100%**	**86.67**	**20 laporan**	**45,200,000**	**7 laporan**	**4,640,000**	**40%**

1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 dokumen	46,000,000	20 dokumen	10,500,000	20 Dokumen	10,500,000	20 Dokumen	10,500,000	100%	100.00	20 dokumen	14,300,000	11 dokumen	5,250,000	70%
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8 unit	5,820,200	11 unit	6,582,000	13 Unit	7,482,400	11 unit	6,582,000	85%	87.97	8 unit	6,520,768	8 unit	5,920,768	100%
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	18 orang	3,380,000	39 orang	840,000	39 orang	3,380,000	39 orang	3,380,000	100%	100.00	30 orang	3,018,000	30 orang	1,690,000	100%
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	2,400,000	100%	1,200,000	100%	1,200,000	100%	1,200,000	100%	100%	100%	1,990,000		0	0%

1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2 dokumen	1,200,000	2 dokumen	1,200,000	2 Dokumen	1,200,000	2 dokumen	1,200,000	100%	100.00	2 dokumen	1,310,000	0 dokumen	0	0%
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 dokumen	1,200,000			0 Dokumen	0	0 dokumen	0	0%	0%	1 dokumen	680,000	0 dokumen	0	0%
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	5,220,000	100%	99,063,250	100%	100,000,000	100%	99,063,250	100%	100%	100%	150,000,000		0	50%
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	15 orang	5,220,000	150 orang	99,063,250	150 orang	100,000,000	150 orang	99,063,250	100%	99.06	150 orang	150,000,000	0	0	0%

1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan**	**100%**	**62,544,800**	**0%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	**8,708,000**		**7,170,600**	**100%**
1.05.04.2.05.03	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi**	**Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis**	**15 unit**	**62,544,800**			**2 unit**	**0**					**8 unit**	**8,708,000**	**8 unit**	**7,170,600**	**100%**

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

No	Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika Ada Perubahan Target)
		2020	2021	2022	2023			
1	**Indikator Tujuan :** Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada			2.13%	2.17%	2.22%	2.22%	
1	**Indikator Sasaran :** Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan			100%	100%	100%	100%	
	Indikator Kinerja Kunci : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			90%	80%	100%	100%	
	1.Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani			188 pelanggaran dan pengaduan	184 pelanggaran dan pengaduan	176 pelanggaran dan pengaduan	176 pelanggaran dan pengaduan	

	2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan			60 Satlinmas	60 Satlinmas	60 Satlinmas	60 Satlinmas	
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			7 perda	7 perda	7 perda	7 perda	
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			1 polisi pamong praja	1 polisi pamong praja	1 polisi pamong praja	1 polisi pamong praja	
	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	
	Indikator Kinerja Kunci : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			71%	71%	71%	71%	
2	**Indikator Sasaran :** Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time			75%	80%	75%	75%	
	Indikator Kinerja Kunci : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100%	100%	100%	100%	

	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			40 layanan penyelamatan dan evakuasi	43 layanan penyelamatan dan evakuasi	40 layanan penyelamatan dan evakuasi	35 layanan penyelamatan dan evakuasi	
	2.Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			0	0	0	0	
	3.Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan			0	0	0	0	
	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa			0	0	0	0	

	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			235 sarana prasarana	240 sarana prasarana	235 sarana prasarana	235 sarana prasarana	
	6.Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			2 aparatur	2 aparatur	2 aparatur	2 aparatur	
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			20 relawan	25 relawan	20 relawan	20 relawan	
	8.Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran			2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	

	Indikator Kinerja Kunci : Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran			90%	88.3%	90.0%	80%	
3	**Indikator Sasaran :** Nilai SAKIP PD			60.85	61.25	60.85	60.85	
4	**Indikator Sasaran :** Indeks Kepuasan Masyarakat			85.25	85.30	85.25	85.25	
	Indikator Tujuan :							
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah			100%	100%			
	Indikator Sasaran :							
	persentase terselenggaranya ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat			100%	100%			
	Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat			100%	100%			
	persentase penyelenggaraan kebencanaan			100%	100%			
	cakupan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non			100%	100%			

	kebakaran							
	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan			100%	100%			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

Adapun tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan pada Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan				Sasaran				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat atau Perda yang terselesaikan	2.17%	2.22%	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	

				Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	70%	75%	
				Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60.39	60.85	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	85.14	85.25	

3.2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana KERJA (Renja) Tahun 2024

SATPOL PP KAB. BANGKALAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja 2024					Selisih	Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13=11-6*	*14*
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**		**Indeks kepuasaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks**	**13,266,252,033**	**DAUM**		**Indeks kepuasaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Indeks**	**13,286,241,232**	**DAUM**	19,989,199	

5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100 %**	**31,657,800**	**DAUM**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100 %**	**10,026,900**	**DAUM**	-21,630,900	

5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	3 Dokumen	6,164,500	DAUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	2 Dokumen	Rp 3,206,500	DAUM	-2,958,000	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	1 Dokumen	8,868,150	DAUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	1 Dokumen	Rp 210,050	DAUM	-8,658,100	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked

5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	1 Dokumen	1,791,750	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	1 Dokumen	Rp 1,110,050	DAUM	-681,700	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Satpol PP	1 Dokumen	850,000	DAUM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Satpol PP	1 Dokumen	Rp 580,000	DAUM	-270,000	

5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	850,000	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	Rp 580,000	DAUM	-270,000	

5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	1	Laporan	7,012,650	DAUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	3	Laporan	Rp 2,475,250	DAUM	- 4,537,400	

5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	6	Laporan	6,120,750	DAUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	4	Laporan	Rp 1,865,050	DAUM	-4,255,700	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu**		**100**	**%**	**7,254,671,533**	DAUM	**Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu**		**100**	**%**	**7,810,445,174**	DAUM	555,773,641	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	80	Orang/bulan	7,241,695,033	DAUM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	80	Orang/bulan	Rp 7,807,255,024	DAUM	565,559,991	

5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	1	Laporan	7,141,850	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	1	Laporan	Rp 690,050	DAUM	-6,451,800	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked

5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Satpol PP	18	Laporan	5,834,650	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Satpol PP	18	Laporan	Rp 2,500,100	DAUM	-3,334,550	
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir**		**100**	**%**	**3,222,700**	**DAUM**			**100**	**%**	**1,430,100**	**DAUM**	-1,792,600	

5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	1 Dokumen	1,611,350	DAUM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	1 Dokumen	Rp 615,050	DAUM	-996,300	
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	7 Laporan	1,611,350	DAUM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	7 Laporan	Rp 815,050	DAUM	-796,300	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian**		**100 %**	**20,000,000**	**DAUM**			**100 %**	**78,355,000**	**DAUM**	58,355,000	

5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Satpol PP	322 Paket	20,000,000	DAUM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Satpol PP	322 Paket	Rp 78,355,000	DAUM	58,355,000	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Satpol PP	0 Orang	-	DAUM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Satpol PP	0 Orang	Rp -	DAUM	-	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi**		**100 %**	**105,462,600**	**DAUM**			**100 %**	**32,654,608**	**DAUM**	-72,807,992	

5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	4 Paket	5,000,000	DAUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	4 Paket	Rp 797,000	DAUM	-4,203,000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	Satpol PP	12 Paket	18,240,650	DAUM	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	Satpol PP	4 Paket	Rp 13,705,450	DAUM	-4,535,200	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked

5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Satpol PP	4 Paket	1,586,500	DAUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Satpol PP	0 Paket	Rp -	DAUM	-1,586,500	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Satpol PP	8 Paket	10,000,000	DAUM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Satpol PP	8 Paket	Rp 5,250,000	DAUM	-4,750,000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Satpol PP	12 Paket	2,177,450	DAUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Satpol PP	12 Paket	Rp 2,462,158	DAUM	284,708	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked

5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Satpol PP	4 Dokumen	3,500,000	DAUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Satpol PP	0 Dokumen	Rp -	DAUM	-3,500,000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	12 Laporan	4,958,000	DAUM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	4 Laporan	Rp 2,760,000	DAUM	-2,198,000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	59 Laporan	60,000,000	DAUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	59 Laporan	Rp 7,680,000	DAUM	-52,320,000	

5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti**		**100 %**	**5,580,734,800**	**DAUM**			**100 %**	**5,199,910,800**	**DAUM**	-380,824,000	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	4 Laporan	1,462,950	DAUM		Satpol PP	4 Laporan	Rp 905,800	DAUM	-557,150	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Satpol PP	12 Laporan	201,281,850	DAUM		Satpol PP	12 Laporan	Rp 54,000,000	DAUM	-147,281,850	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Satpol PP	12 Laporan	5,377,990,000	DAUM		Satpol PP	12 Laporan	Rp 5,145,005,000	DAUM	-232,985,000	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked

5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**		**100 %**	**270,502,600**	**DAUM**			**100 %**	**153,418,650**	**DAUM**	-117,083,950	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Satpol PP	1 Unit	30,240,000	DAUM		Satpol PP	1 Unit	Rp 22,604,400	DAUM	-7,635,600	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizina	Satpol PP	19 Unit	228,462,600	DAUM		Satpol PP	19 Unit	Rp 125,144,250	DAUM	-103,318,350	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked

		nnya											
5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Satpol PP	15 Unit	4,470,000	DAUM		Satpol PP	15 Unit	Rp 4,470,000	DAUM	-	
5.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Satpol PP	6 Unit	1,450,000	DAUM		Satpol PP	6 Unit	Rp 1,200,000	DAUM	-250,000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Satpol PP	1 Unit	5,880,000	DAUM		Satpol PP	0 Unit	Rp -	DAUM	-5,880,000	

1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum**		**100 %**	**2,525,060,250**	**DAUM/ DBHCHT**			**100 %**	**1,947,414,900**	**DAUM / DBHCHT**	-577,645,350	
5.01.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)**		**100 %**	**894,270,000**	**DAUM**			**100 %**	**1,436,477,000**	**DAUM**	542,207,000	

1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP	48	Kasus	7,250,000	DAUM		Satpol PP	48	Kasus	Rp 2,500,000	DAUM	- 4,750,000	

1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satpol PP	3 Kasus	2,500,000	DAUM		Satpol PP	7 Kasus	Rp 1,500,000	DAUM	-1,000,000	

1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	3	Dokumen	60,000,000	DAUM		Satpol PP	1	Dokumen	Rp 850,000	DAUM	-59,150,000	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban	Satpol PP	2	Dokumen	550,000,000	DAUM		Satpol PP	1	Dokumen	Rp 661,420,000	DAUM	111,420,000	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked

		Umum											
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Satpol PP	20 Orang	4,000,000	DAUM		Satpol PP	17 Orang	Rp 2,050,000	DAUM	-1,950,000	Refocusing untuk memenuhi Dau Earmarked

1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Satpol PP	1 Dokumen	258,020,000	DBHCHT		Satpol PP	13 Dokumen	Rp 765,657,000	DBHCHT	507,637,000	Silpa DBHCHT
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Satpol PP	1 Dokumen	2,500,000	DAUM		Satpol PP	0 Dokumen	Rp -	DAUM	-2,500,000	

1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Satpol PP	1 Laporan	10,000,000	DAUM		Satpol PP	1 Laporan	Rp 2,500,000	DAUM	-7,500,000	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup**		**100 %**	**1,626,790,250**	**DAUM/ DBHCHT**			**100 %**	**510,937,900**	**DAUM / DBHCHT**	-1,115,852,350	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi	Satpol PP	30 Laporan	1,621,985,400	DBHCHT		Satpol PP	8 Laporan	Rp 509,437,900	DBHCHT	-1,112,547,500	Silpa DBHCHT
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah penyelenggaraan pengawasan	Satpol PP	6 Laporan	4,804,850	DAUM		Satpol PP	6 Laporan	Rp 1,500,000	DAUM	-3,304,850	

1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah penanganan pelanggaran Perda	Satpol PP	59	Laporan	-	DBHCHT		Satpol PP	59	Laporan	Rp -	DBHCHT	-	
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase aparatur yang ikut pelatihan**		**100**	**%**	**4,000,000**	**DAUM**			**100**	**%**	**-**	**DAUM**	- 4,000,000	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegak	Satpol PP	1	Laporan	4,000,000	DAUM		Satpol PP	0	Laporan	Rp -	DAUM	- 4,000,000	

		an Perda dan Perkada											
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase pelayanan penanggulangan bencana**		**100 %**	**30,000,000**	**DAUM**			**100 %**	**100,000,000**	**DAUM**	70,000,000	

1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana**		**100 %**	**30,000,000**	**DAUM**			**100 %**	**100,000,000**	**DAUM**	70,000,000	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Satpol PP	30 Orang	20,000,000	DAUM		Satpol PP	0 Orang	Rp -	DAUM	-20,000,000	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				-				150 orang	Rp 100,000,000	Daum Earmarked	100,000,000	Muncul setelah APBD karena DAU Earmarked

1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**		**100 %**	**10,000,000**	**DAUM**			**100 %**	**-**	**DAUM**	-10,000,000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Satpol PP	10 Orang	10,000,000	DAUM		Satpol PP	0 Orang	Rp -	DAUM	-10,000,000	
1:05:04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase kejadian kebakaran yang ditangani**		**100 %**	**175,000,000**	**DAUM**			**100 %**	**300,000,000**	**DAUM**	125,000,000	

1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran**		**90 %**	**104,835,200**	**DAUM**			**88.3 %**	**139,302,000**	**DAUM**	34,466,800	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Satpol PP	10 Dokumen	24,435,000	DAUM		Satpol PP	3 Dokumen	Rp 70,263,232	DAUM	45,828,232	

1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	20 Laporan	25,200,000	DAUM		Satpol PP	50 Laporan	Rp 45,200,000	DAUM	20,000,000	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP	20 Dokumen	46,000,000	DAUM		Satpol PP	20 Dokumen	Rp 14,300,000	DAUM	-31,700,000	

1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Satpol PP	8 Unit	5,820,200	DAUM		Satpol PP	12 Unit	Rp 6,520,768	DAUM	700,568	

1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Satpol PP	18 Orang	3,380,000	DAUM		Satpol PP	4 Orang	Rp 3,018,000	DAUM	-362,000	
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**100 %**	**2,400,000**	**DAUM**			**100 %**	**1,990,000**	**DAUM**	-410,000	

1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Satpol PP	2 Dokumen	1,200,000	DAUM		Satpol PP	2 Dokumen	Rp 1,310,000	DAUM	110,000	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	2 Dokumen	1,200,000	DAUM		Satpol PP	1 Dokumen	Rp 680,000	DAUM	-520,000	

1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran**		**100 %**	**5,220,000**	**DAUM**			**100 %**	**150,000,000**	**DAUM**	144,780,000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Satpol PP	15 Orang	5,220,000	DAUM		Satpol PP	150 Orang	Rp 150,000,000	DAUM Earmerked	144,780,000	

1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan**		**100 %**	**62,544,800**	**DAUM**			**100 %**	**8,708,000**	**DAUM**	-53,836,800	
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Satpol PP	15 Unit	62,544,800	DAUM		Satpol PP	8 Unit	Rp 8,708,000	DAUM	-53,836,800	

TOTAL	**15,996,312,283**		**15,633,656,132**		-362,656,151

BAB IV
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yang disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintahan Daerah yang optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 penyusunannya dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan P-RKPD 2024 dan serta mengacu pada keselarasan program dan kegiatan yang direncanakan bersama secara matang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran.

Dengan diterbitkannya Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 diharapkan menjadi bahan acuan dan koreksi bagi semua pihak guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten bangkalan khususnya Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini dapat memberi manfaat bagi khalayak umum demi tercapainya Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN

RUDIYANTO, S. Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740513 199302 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2024 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Sampai Dengan Triwulan II, Rencana Program dan Kegiatan yang Mengalami Perubahan dalam Renja OPD.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II. Melalui Rencana Kerja Perubahan pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Bangkalan, 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

GEGER HERI SUSIANTO, SP, MMP
Pembina Tk. I
NIP. 19660807 199311 1 002

B A B I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan - OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang mengalami perubahan. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS Perubahan dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) tahun 2024.
3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD Perubahan melalui tahap sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan sampai dengan triwulan II dan mengacu OPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (outcome), indicator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023

(Lembaran Daerah kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 23/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 1 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain,
17. Peraturan Bupati Bangkalan No. 1 tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan.
18. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
19. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27/E);
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 7 Tahun 2021 tentang RDTKR WP Akses Suramadu
22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2021 tentang RDTR Burneh
23. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 23 Tahun 2023 tentang RDTR Labang dan sekitarnya

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Perubahan OPD dimaksudkan sebagai panduan dan evaluasi dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 yang mengalami perubahan perencanaan dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Perubahan tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah menyusun rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan dan lokasi kegiatan BPBD tahun 2024 kedalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PAS Perubahan) Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4. BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II

Capaian kinerja pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II dengan yang sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2024 sampai dengan Triwulan II belum memenuhi target yang ditetapkan, secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Tahun 2024
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	
		TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya manajemen Penanggulangan Bencana aparat dan masyarakat	100%	50%
2.	Terwujudnya penanganan bencana sesuai dengan prosedur	100%	0%
3.	Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	100%	0%
4.	Indeks kepuasan internal pelayanan kesekretariatan	100%	50%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk melaksanakan pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangkalan agar mampu mencapai daya guna dan berhasil guna, khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan penanggulangan bencana yaitu penanggulangan bencana dari tahap pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana, maka diperlukan adanya tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan dituangkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Sasaran Renja 2024

Tujuan Perangkat Daerah				Sasaran				KET
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2022	2023			2023	2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Optimalisasi penanganan bencana dalam rangka penurunan kemiskinan	Persentase penanganan bencana	100	100	Meningkatnya manajemen Penanggulangan Bencana aparat dan masyarakat	Jumlah destana di kawasan rawan bencana	2 desa	2 desa	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana	50 org	50 org	
				Terwujudnya penanganan bencana sesuai dengan prosedur	% bencana yang tertangani sesuai standar (SOP)	80%	80%	
				Meingkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	Jumlah Kegiatan pemulihan sosial ekonomi, budaya dan Psikologi	1 keg	1 keg	
				Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan internal pelayanan kesekretariatan	88	90	

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2023 ini banyak mengalami perubahan. Pada perubahan tahun ini hanya ada pengurangan pagu pada beberapa kegiatan.

Adapun untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pada tabel 3.2.

Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Urusan
Bidang Urusan
Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	APBD 2024 (DPA PD Tahun 2024)						Perubahan Renja Tahun 2024						Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)**))
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12 - 6	15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**			**1.949.885.548**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**			**2.015.143.212**			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	**Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**Bangkalan**		**3.700.150**	**APBD**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan**	**Bangkalan**		**3.700.150**	**APBD**	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Bangkalan	3 dok	1.700.150		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Bangkalan	3 dok	1.700.150		-	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Bangkalan	2 dok	1.000.000		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Bangkalan	2 dok	1.000.000		-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD yang disusun	Bangkalan	1 dok	1.000.000		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD yang disusun	Bangkalan	1 dok	1.000.000		-	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**		**100%**	**1.642.707.548**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**		**100%**	**1.717.165.212**		**74.457.664**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bangkalan	18 org/bln	1.642.707.548		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bangkalan	18 org/bln	1.717.165.212		74.457.664	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**85.497.850**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**82.697.850**		**(2.800.000)**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Bangkalan	7 jenis	10.784.500		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Bangkalan	7 jenis	9.584.500		(1.200.000)	EFISINESI ANGGARAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bangkalan	2 jenis	2.733.350		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bangkalan	2 jenis	2.733.350		-	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bangkalan	2 jenis	71.980.000		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bangkalan	2 jenis	70.380.000		(1.600.000)	EFISINESI ANGGARAN
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**202.980.000**	**APBD**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**196.580.000**	**APBD**	**(6.400.000)**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	1 jenis	4.800.000		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	1 jenis	2.400.000		(2.400.000)	EFISINESI ANGGARAN
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bangkalan	3 jenis	198.180.000	APBD	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bangkalan	3 jenis	194.180.000	APBD	(4.000.000)	HONOR PEJABAT PENGURUS BARANG YANG TIDAK DI BAYAR
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana**	**Bangkalan**	**100%**	**15.000.000**	**APBD**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana**	**Bangkalan**	**100%**	**15.000.000**		-	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Bangkalan	5 unit	15.000.000		Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Bangkalan	5 unit	15.000.000		-	

	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pengurangan resiko bencana	Bangkalan	80%	79.533.000	APBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pengurangan resiko bencana	Bangkalan	80%	79.533.000	APBD	-	
		% bencana yang tertangani		80%	40.000.000	APBD		% bencana yang tertangani		80%	40.000.000	APBD	-	
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		80%	53.150.000	APBD		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		80%	51.750.000	APBD	(1.400.000)	
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan masyarakat yang sadar bencana (desa)	Bangkalan	4%	79.533.000	APBD	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan masyarakat yang sadar bencana (desa)	Bangkalan	4%	79.533.000	APBD	-	
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Bangkalan	50 org	150.000.000		Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Bangkalan	50 org	150.000.000		0	
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan cepat darurat	Bangkalan	100%	40.000.000		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan cepat darurat	Bangkalan	100%	40.000.000			
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Bangkalan	1 dok	40.000.000		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Bangkalan	1 dok	40.000.000			
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang disajikan		100%	53.150.000		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang disajikan		100%	51.750.000			PENGURANGAN KARENA HONOR KEPALA DAERAH TIDAK TER REALISASI
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten dan lintas perangkat daerah kabupaten yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bangkalan	30 orang	53.150.000		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten dan lintas perangkat daerah kabupaten yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bangkalan	30 orang	51.750.000			

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan 2024– 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkanakan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesame OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan dalam hal penanggulangan bencana tahun 2024.

Bangkalan, 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

GEGER HERI SUSIANTO, SP, MMP
Pembina Tk.I
NIP. 19660807 199311 1 002

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja PD Sampai Semester 1 Tahun Berjalan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan semester 1 Tahun berjalan. Melalui Perubahan Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, ... Agustus 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN

WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

PARAF KOORDINASI		
NAMA	JABATAN	PARAF
IWAN SETYAWAN, AP, MM	SEKRETARIS	
AGUS HARYONO, SE. M.Si	Plt. KABID REHABILITASI SOSIAL	
MOHAMMAD AMINULLAH, S.Psi	KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
DIDIK YANUARDI, SP	KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL	
ENDANG RETNO SOERJANI, SAP	KABID PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan evaluasi kinerja sampai dengan semester 1 tahun berjalan dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/ Kota;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/D);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2016 Nomor 1/D);
l. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 / E);
m. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 / E);
n. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);
o. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2024 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah

program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja 2024 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta evaluasi kinerja sampai dengan semester 1 tahun berjalan.
2. Memberikan arah pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun berjalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2024 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belalang

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

Menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja Semester 1 Tahun Berjalan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Semester 1 Tahun Berjalan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

3.2. Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja PD Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan sampai dengan semester 1 tahun berjalan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester 1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)*100
1.06.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan dareah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00**	**100 %**	**100 %**	**100**
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00**	**100 %**	**100 %**	**100**
1.06.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	2 dokumen	7 dokumen	117

| | | |

| | | |

| | | |

1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	100,00	24	Dokumen	72	Dokumen	100
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	90	Laporan	0	Laporan	25	Laporan	25	Laporan	100,00	40	Laporan	65	Laporan	72
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123	Laporan	1	Laporan	218	Laporan	218	Laporan	100,00	20	Laporan	239	Laporan	194
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	0	Dokumen	1	Dokumen	33
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**95,45**	**%**	**95,45**	**100**	**%**	**98,48**	**%**	**98**
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	26	unit	66	unit	63	unit	95,45	0	unit	89	unit	#DIV/0!
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	36	Laporan	100
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	#DIV/0!	0	Laporan	2	Laporan	33

1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	36	Laporan	100
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**66**	**%**	**66,00**	**100**	**%**	**88,67**	**%**	**89**
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	15	Unit	18	Unit	129
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	17	Unit	19	Unit	19	Unit	100,00	5	Unit	41	Unit	410
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	Unit	0	Unit	4	Unit	2	Unit	50,00	0	Unit	2	Unit	50
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	1	Unit	2	Unit	#DIV/0!
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	23	Unit	10	Unit	63	Unit	26	Unit	41,27	32	Unit	68	Unit	296
1.06.02	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**29**	**%**	**7,69**	**%**	**19**	**%**	**11,46**	**%**	**60,32**	**13**	**%**	**32,15**	**%**	**111**

1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina**	**29**	**%**	**7,69**	**%**	**19**	**%**	**11,46**	**%**	**60,32**	**13**	**%**	**32,15**	**%**	**111**
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18	Orang	18	Orang	18	Orang	18	Orang	100,00	18	Orang	18	orang	100
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Keluarga	0	Keluarga	2635	Keluarga	2635	Keluarga	100,00	50	Keluarga	2685	laporan	1.790
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	31	Lembaga	6	Lembaga	14	Lembaga	13	Lembaga	92,86	13	Lembaga	32	lembaga	103
1.06.04	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**100**	**%**	**0,16**	**%**	**100**	**%**	**90,33**	**%**	**90,33**	**100**	**%**	**63,497**	**%**	**63**

1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**1850**	**orang**	**104**	**orang**	**746**	**orang**	**684**	**orang**	**91,69**	**550**	**orang**	**1338**	**orang**	**72**
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.850	orang	64	orang	1311	orang	1274	orang	97,18	1260	Orang	2598	orang	140
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**1890**	**orang**	**40**	**orang**	**2082**	**orang**	**2082**	**orang**	**100,00**	**1040**	**orang**	**3162**	**orang**	**167**
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1800	Orang	1000	Orang	2000	Orang	2000	Orang	100,00	1000	Orang	4000	Orang	222

1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	40	Orang	82	Orang	82	Orang	100,00	40	orang	162	orang	180
1.06.05	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial**	**100**	**%**	**91,37**	**%**	**100**	**%**	**99,97**	**%**	**99,97**	**100**	**%**	**97,113**	**%**	**97**
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi**	**100**	**%**	**91,37**	**%**	**100**	**%**	**99,97**	**%**	**99,97**	**100**	**%**	**97,113**	**%**	**97**
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150.000	orang	0	orang	38.283	orang	38.283	orang	100,00	10.000	Orang	48283	orang	32
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5.580	Keluarga	0	Keluarga	2159	Keluarga	2159	Keluarga	100,00	1780	Keluarga	3939	Keluarga	71
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Keluarga	0	Keluarga	1953	Keluarga	1297	Keluarga	66,41	40	Keluarga	1337	Keluarga	2.228
1.06.06	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**85,04**	**%**	**85,04**	**100**	**%**	**95,013**	**%**	**95**
1.06.06.2.01	**Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**85,04**	**%**	**85,04**	**100**	**%**	**95,013**	**%**	**95**

1.06.06.2.01.0001	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	Orang	0	Orang	425	Orang	425	Orang	100,00	1000	Orang	1425	Orang	48
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**80**		**80,00**	**100**	**%**	**93,3**	**%**	**93**
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24	orang	25	orang	30	orang	24	orang	80,00	24	Orang	73	orang	304
1.06.07	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50	Makam	50	Makam	50	Makam	50	Makam	100,00	50	Makam	150	Makam	300
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengaman Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	2	Laporan	6	Laporan	100

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan semester 1 Tahun 2024

No.	Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase (%)penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**100%**	**100%**	**96%**	**97%**	**100%**	**100%**	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	**100%**	**100%**	**85%**	**100%**	**100%**	**100%**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

NO.	TUJUAN				SASARAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR	TARGET		
			2024	Perubahan			2024	Perubahan	
1	Meningkatkan PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani	6,22 %	6,22%	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	100 %	100%	
2					Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	13%	13%	
3					Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78	
						Nilai SAKIP	61	61	

Tabel 3.2

Matriks Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA 2024					Selisih	CATATAN PENTING (Alasan Perubahan)
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13 = 11 - 6	14
1.06.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Dinsos**	**100**	**Indeks**	**5.745.879.549**	**DAUM**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Dinsos**	**100**	**Indeks**	**5.153.680.611**	**DAUM**	**-592.198.938**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu**	**Dinsos**	**100**	**%**	**12.500.000**	**DAUM**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu**	**Dinsos**	**100**	**%**	**1.554.600**	**DAUM**	**-10.945.400**	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	2	Dokumen	4.500.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	2	Dokumen	1.074.500	DAUM	-3.425.500	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Dinsos	1	Laporan	2.500.000	DAUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Dinsos	1	Laporan	480.100	DAUM	-2.019.900	

		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	**Dinsos**	**100**	**%**	**4.112.520.569**	**DAUM**	**Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	**Dinsos**	**100**	**%**	**4.033.625.941**	**DAUM**	**-78.894.628**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinsos	43	orang/bulan	4.102.520.569	DAUM	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinsos	39	orang/bulan	4.031.904.441	DAUM	-70.616.128	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	1	Laporan	2.500.000	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	1	Laporan	608.700	DAUM	-1.891.300	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Dinsos	18	Laporan	2.500.000	DAUM	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Dinsos	18	Laporan	1.112.800	DAUM	-1.387.200	
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Dinsos**	**100**	**%**	**5.000.000**	**DAUM**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Dinsos**	**100**	**%**	**496.500**	**DAUM**	**-4.503.500**	
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dinsos	1	Dokumen	2.500.000	DAUM	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dinsos	1	Dokumen	283.700	DAUM	-2.216.300	

1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dinsos	14	Laporan	2.500.000	DAUM	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dinsos	14	Laporan	212.800	DAUM	-2.287.200	
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Dinsos**	**100**	**%**	**5.000.000**	**DAUM**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Dinsos**	**100**	**%**	**472.100**	**DAUM**	**-4.527.900**	
1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinsos	12	Dokumen	5.000.000	DAUM	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinsos	12	Dokumen	472.100	DAUM	-4.527.900	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinsos**	**100**	**%**	**188.760.000**	**DAUM**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinsos**	**100**	**%**	**104.300.090**	**DAUM**	**-84.459.910**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	3.500.000	DAUM	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinsos	2	Paket	1.105.976	DAUM	-2.394.024	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	41.500.000	DAUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	34.928.554	DAUM	-6.571.446	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinsos	12	Paket	5.000.000	DAUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinsos	12	Paket	2.832.300	DAUM	-2.167.700	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	24.740.000	DAUM	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinsos	12	Paket	12.951.000	DAUM	-11.789.000	

1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinsos	12	Paket	12.000.000	DAUM	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinsos	12	Paket	5.343.260	DAUM	-6.656.740	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinsos	12	Dokumen	15.520.000	DAUM	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinsos	12	Dokumen	8.020.000	DAUM	-7.500.000	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinsos	40	Laporan	6.500.000	DAUM	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinsos	40	Laporan	8.925.000	DAUM	2.425.000	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Daerah	41	Laporan	50.000.000	DAUM	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Daerah	20	Laporan	30.194.000	DAUM	-19.806.000	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinsos**	**100**	**%**	**1.230.524.380**	**DAUM**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinsos**	**100**	**%**	**970.364.380**	**DAUM**	**-260.160.000**	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinsos	12	Laporan	97.714.380	DAUM	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinsos	12	Laporan	97.714.380	DAUM	0	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinsos	12	Laporan	962.810.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinsos	12	Laporan	872.650.000	DAUM	-90.160.000	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinsos**	**100**	**%**	**191.574.600**	**DAUM**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinsos**	**100**	**%**	**42.867.000**	**DAUM**	**-148.707.600**	

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinsos	14	Unit	170.574.600	DAUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinsos	15	Unit	23.852.000	DAUM	-146.722.600	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinsos	10	Unit	9.000.000	DAUM	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinsos	10	Unit	8.040.000	DAUM	-960.000	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinsos	23	Unit	12.000.000	DAUM	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinsos	32	Unit	10.975.000	DAUM	-1.025.000	
1.06.04	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**1.145.160.000**		**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**1.126.099.100**		**-19.060.900**	

1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**Kab. Bangkalan**	**550**	**Orang**	**295.160.000**	**DAUM**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**Kab. Bangkalan**	**1260**	**Orang**	**288.859.750**	**DAUM**	**-6.300.250**	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	550	orang	295.160.000	DAU Earmarked	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1260	orang	288.859.750	DAU Earmarked	-6.300.250	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PMKS/PPKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terlayani**	**Kab. Bangkalan**	**1030**	**orang**	**850.000.000**	**DAUM**	**Jumlah PMKS/PPKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terlayani**	**Kab. Bangkalan**	**1030**	**orang**	**837.239.350**	**DAUM**	**-12.760.650**	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	orang	730.000.000	DAUM	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	orang	746.099.100	DAUM	16.099.100	

1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	30	orang	120.000.000	DAU Earmarked	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	30	orang	91.140.250	DAU Earmarked	-28.859.750	
1.06.05	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**722.814.000**	**DAUM**	**Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**635.560.000**	**DAUM**	**-87.254.000**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**722.814.000**	**DAUM**	**Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**635.560.000**	**DAUM**	**-87.254.000**	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Kab. Bangkalan	50.000	orang	300.000.000	DAUM	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Kab. Bangkalan	10.000	orang	200.000.000	DAUM	-100.000.000	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1850	Keluarga	400.000.000	DAUM	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1398	Keluarga	355.560.000	DAUM	-44.440.000	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	20	Keluarga	22.814.000	DBHCHT	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	39	Keluarga	80.000.000	DBHCHT	57.186.000	

1.06.06	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**550.000.000**	**DAUM**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**600.000.000**	**DAUM**	**50.000.000**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**500.000.000**	**DAUM**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**550.000.000**	**DAUM**	**50.000.000**	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Bangkalan**	1000	orang	500.000.000	DAU Earmarked	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Bangkalan**	709	orang	550.000.000	DAU Earmarked	50.000.000	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**50.000.000**	**DAUM**	**Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**%**	**50.000.000**	**DAUM**	**0**	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	24	orang	50.000.000	**DAUM**	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	29	orang	50.000.000	**DAUM**	**0**	
1.06.02	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**Kab. Bangkalan**	**13**	**%**	**375.000.000**	**DAUM**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**Kab. Bangkalan**	**13**	**%**	**248.580.400**	**DAUM**	**-126.419.600**	

1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina**	**Kab. Bangkalan**	**29**	**PSKS**	**375.000.000**	**DAUM**	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina**	**Kab. Bangkalan**	**29**	**PSKS**	**248.580.400**	**DAUM**	**-126.419.600**	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnyakewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	18	orang	150.000.000	DAUM	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnyakewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	18	orang	130.783.000	DAUM	-19.217.000	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	Keluarga	100.000.000	DAUM	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1000	Keluarga	60.297.400	DAUM	-39.702.600	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	11	Lembaga	125.000.000	DAUM	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	12	Lembaga	57.500.000	DAUM	-67.500.000	
1.06.07	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola**	**TMP Bangkalan**	**100**	**%**	**128.000.000**	**DAUM**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola**	**TMP Bangkalan**	**100**	**%**	**61.976.150**	**DAUM**	**-66.023.850**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**TMP Bangkalan**	**1**	**Unit**	**128.000.000**	**DAUM**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**TMP Bangkalan**	**1**	**Unit**	**61.976.150**	**DAUM**	**-66.023.850**	

1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	TMP Bangkalan	50	Makam	38.000.000	DAUM	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	TMP Bangkalan	50	Makam	25.800.000	DAUM	-12.200.000	
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP Bangkalan	2	Laporan	90.000.000	DAUM	Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP Bangkalan	2	Laporan	36.176.150	DAUM	-53.823.850	
						8.666.853.549						**7.825.896.261**		-840.957.288	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2024 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, maka pada perubahan renja tahun 2024 lebih diprioritaskan pada program sebagai berikut :

a. Program Rehabilitasi Sosial
b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2024, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PPKS sesungguhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta optimalisasi pelayanan publik dasar. Oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk pelayanan sosial untuk PPKS menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Program-program penanganan PPKS pada hakekatnya merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Oleh karenanya Program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersedian anggaran yang memadai.

3. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana alam dan bencana sosial perlu disiapkan sebuah sistem pengelolaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu. Oleh karenanya sistem pencegahan dini melalui pengembangan manajemen pengelolan bencana berbasis masyarakat yang salah satunya adalah pembinaan terhadap TAGANA (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pelopor Perdamaian serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan bencana harus dilakukan.
4. Dalam rangka peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan yang profesional dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasana yang memadai.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2024.

Bangkalan, ... Agustus 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN

WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 bahwa Renja Perubahan Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu Instansi Teknis yang menangani urusan Ketahanan Pangan sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada Tugas dan Fungsi Organisasi (TUSI) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 80 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi BKP Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 199 tahun 2008 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BKP Provinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan. Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun sampai triwulan II tahun 2024, dan kebijakan pemerintah pusat seperti; Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, PMK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Selain itu memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan APBD kabupaten Bangkalan Tahun 2023, adanya perubahan asumsi pendapatan, serta pemanfaatan SILPA, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian skema pembangunan Tahun 2024.

Percepatan Perubahan RKPD 2024 dilaksanakan karena adanya kebutuhan daerah sesuai dengan kondisi daerah. Beberapa catatan atas Perubahan RKPD 2024 Kabupaten Bangkalan adalah terjadinya defisit anggaran dari RKPD 2024 karena terjadi perubahan defisit penurunan Dana bagi Hasil Provinsi dan dari penurunan Pendapatan Asli Daerah Murni di luar BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Kabupaten Bangkalan. Kemudian, beberapa kegiatan yang potensial untuk diefisensi harus memenuhi syarat bahwa kegiatan tersebut tidak menyentuh earmark, DBHCHT dan DBHPR, kegiatan tidak untuk belanja bypass TAPD, kegiatan bukan Belanja Wajib dan Rutin (Eksekusi Tim P-RKPD), serta bukan kegiatan Pokir.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024. Dalam proses penyusunan Renja Perubahan ini telah melalui mekanisme sidang perumusan rencana kerja dan penyajian rancangan renja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bngkalan serta melalui forum PD dalam hal ini yang dikomandani Bappeda Kabupaten Bangkalan dengan melibatkan instansi terkait, oleh karena itu, penyusunan renja Perubahan ini memperhatikan hasil kinerja Program/Kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antar sektor pembangunan, koordinasi antar PD baik di tingkat Kabupaten serta Instansi terkait lainnya. Oleh karenanya ada beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan terhadap penyusunan anggaran dan kinerja kabupaten dan Dinas Ketahanan Pangan khususnya, yaitu :

Pertama, pandemi covid-19 yang meskipun sudah mereda namun masih berdampak cukup besar bagi perekonomian untuk bisa pulih seperti sedia kala. Kedua, beberapa kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Timur yang mengharuskan adanya perubahan program/kegiatan/subkegiatan, keuangan daerah, maupun kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Bangkalan, termasuk penyesuaian dana earmarked. Ketiga, hasil evaluasi terhadap persyaratan penyusunan RAPBD melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar. 1.1.

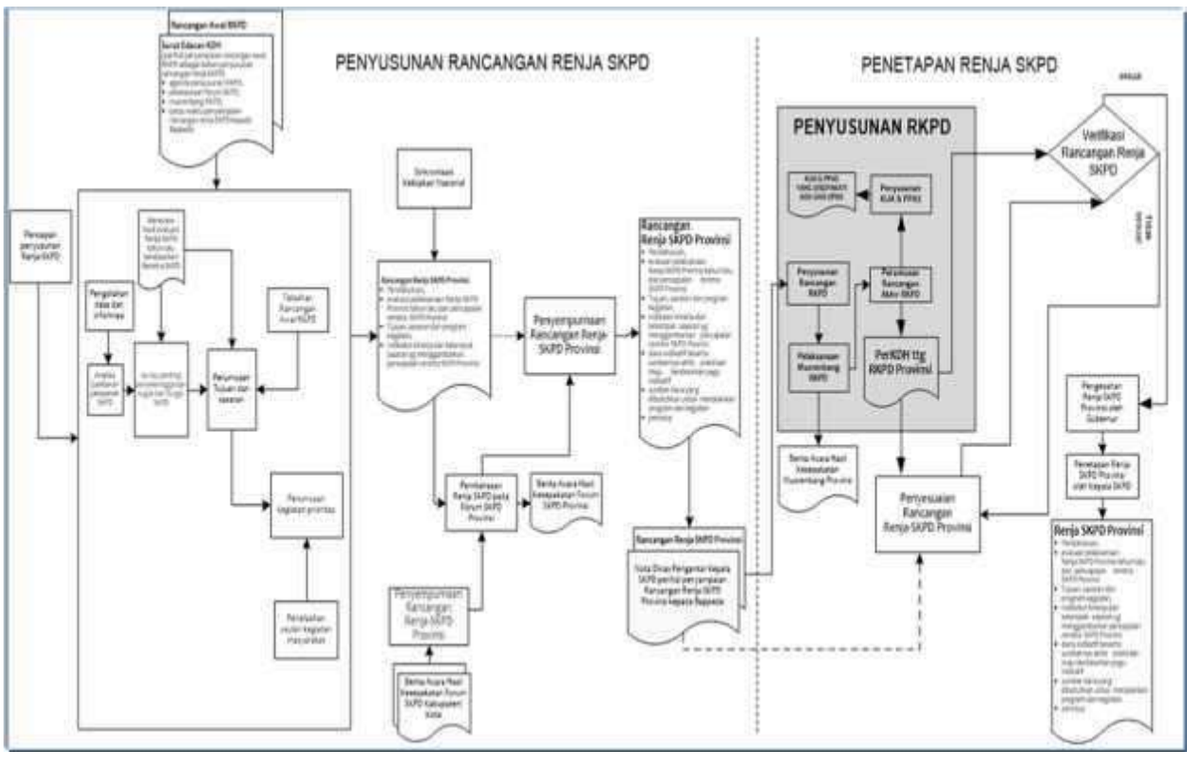

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (bagi Perangkat Daerah yang memilki target SPM)
e. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
f. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor : 21 tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor : 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
g. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten
l. Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor : 4/ E);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor: 1/D);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor I/D);
o. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)
p. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)
q. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)
r. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-

2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 7 Seri E);

s. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 19/E);
t. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan;
u. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
v. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
w. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27/E);
x. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);
y. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/34/Kpts/433.013/ 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja lanjutan dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif untuk tahap selanjutnya. Sedang tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagi berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin. Tugas-tugas umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyempurnaan, sehingga capain kinerja yang dapat dilaporkan cendrung lebih menitikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri yang meliputi indikator mikro, indikator strategis pemerintah daerah.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme penghitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan dan keluaran. Hal ini mengingat sistem pengukuran kinerja dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan belum sepenuhnya terbangun.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan dalam merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis, dengan cara mempertimbangkan nilai indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), maka nilai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024 sampai semester I sebesar 22,83%. Menurut skala pengukuran ordinal, maka nilai capaian kinerja tersebut dapat dikategorikan “kurang”. Diharapkan pada

semester berikutnya yaitu semester II, III dan IV capaian kinerjanya bisa meningkat dan lebih maksimal sesuai target yang ada.

Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja yang meliputi indikator makro, indikator strategis, dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisasi sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 menitik beratkan pada program yang meliputi:

a. Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan
b. Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
c. Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
d. Program Pelayanan Kesekretariatan

Dari program-program di atas, Realisasi anggaran di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 sampai dengan semester I sebesar Rp. 875.890.120,- dengan capaian kinerja anggaran yang relatif masih belum maksimal di pertengahan tahun. Dalam nilai pagu (PAK) Penetapan Renja mengalami perubahan sebesar Rp. 4.131.467.959,- di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan. Rincian program dan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
        1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
        2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
        3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
        4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
        5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
        6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
        7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
        2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   5. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

   a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      1. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

3. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
    a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
        1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
        2. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten / kota
        3. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
    b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
        1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
    c. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
        1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
    d. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
        1. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun
        2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
    a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
        1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
    a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
        1. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja pelaksanaan tugas program Dinas Ketahanan Pangan pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan

penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak, karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program tersebut. Terlebih lagi peran penyediaan dana APBN masih sangat besar dalam menunjang program-program dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan sesuai yang tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2024-2026. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran DKP Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dapat disajikan berdasarkan sasaran berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan s/d Tahun 2024 Kabupaten Bangkalan

Nama perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program / Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026		Realisasai Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)*100		9		10 =(5+7+9)		11 =(10/4)*100
TA. 2023																	
2.09.02	**Pengelolaan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**	**Prosentase Desa Yang Memiliki Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan Dan Kemakmuran Pangan Yang Terkelola Dengan Baik**	**100%**	**780.934.050**	**100%**	**208.112.350**	**100%**	**209.068.458**	**100%**	**208.112.350**	**100,00%**	**99,54%**			**100 %**	**416.224.700**	**53,30%**
2.09.02.2.01	***Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota***	***Persentase Desa Yang Memiliki Lumbung Pangan Dan Lantai Jemur***	***100%***	***780.934.050***	***100%***	***208.112.350***	***100%***	***209.068.458***	***100%***	***208.112.350***	***100,00%***	***99,54%***			***100 %***	***416.224.700***	***53,30%***
2.09.02.2.01.01	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang Tersedia	2 Unit	716.298.050	1 Unit	208.112.350	1 Unit	209.068.458	1 Unit	208.112.350	100,00%	99,54 %			8 Unit	416.224.700	58,11%
2.09.02.2.01.02	Penyediaan infrastruktur lantai jemur	Jumlah Lantai Jemur Yang Tersedia	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6 Unit	-	-

2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 Unit	-	-
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	Prosentase/jumlah koordinasi dan sosialisasi B2SA ditingkat SD	-	64.636.000	-	-	-	-	-	-	-	-			2 SD	-	0,00%
2.09.03	**Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	**Persentase Gapoktan Yang Berfungsi Dengan Baik Diversifikasi Dan Ketahanan Pangannya**	**100%**	**3.126.379.595**	**94,87%**	**93.689.100**	**100%**	**137.750.000**	**94,87%**	**93.689.100**	**94,87%**	**68,01%**			**97,44%**	**187.378.200**	**5,99%**
2.09.03.2.01	***Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan***	***Persentase Gapoktan Yang Difasilitasi Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya***	***100%***	***196.631.400***	***84,62%***	***73.542.900***	***100%***	***89.250.000***	***84,62%***	***73.542.900***	***84,62%***	***82,40%***			***92,31%***	***147.085.800***	***74,80%***
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan		1 Laporan	17.200.000	1 Laporan	17.250.000	1 Laporan	17.200.000	100,00%	99,71%			1 Laporan	34.400.000	-
2.09.03.2.01.02	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	4 Laporan	86.325.600	2 Laporan	6.472.900	4 Laporan	17.000.000	2 Laporan	6.472.900	50,00%	38,08%			3 Laporan	12.945.800	15,00%
2.09.03.2.01.05	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan Yang Dikembangkan	8 Unit	110.305.800	8 Unit	49.870.000	8 Unit	55.000.000	8 Unit	49.870.000	100,00%	90,67%			18 Unit	99.740.000	90,42%
2.09.03.2.02	***Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota***	Prosentase cadangan pangan yang dikelola	-	***57.899.150***	-	-	-	-	-	-	-	-			***100%***	-	0,00%
2.09.03.2.02.02	Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pangan lokal	-	57.899.150	-	-	-	-	-	-	-	-			1 desa	-	0,00%
2.09.03.2.03	***Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi***	***Prosentase Pasar Yang Dipantau Harga Pangan Pokok Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Provinsi***	***100%***	***65.250.900***	***100%***	***8.996.200***	***100%***	***11.000.000***	***100%***	***8.996.200***	***100,00%***	***81,78%***			***100%***	***17.992.400***	***27,57%***
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penentuan Harga	1 Laporan	65.250.900	1 Laporan	8.996.200	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	8.996.200	100,00%	81,78%			2 Laporan	17.992.400	27,57%

	minimum pangan pokok lokal	Minimum Pangan Pokok Lokal															
2.09.03.2.04	***Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi***	***Prosentase SD Yang Diberdayakan Konsumsi Pangannya***	***100%***	***2.806.598.145***	***100%***	***11.150.000***	***100%***	***37.500.000***	***100%***	***11.150.000***	***100,00%***	***29,73%***			***100%***	***22.300.000***	***0,79%***
2.09.03.2.04.01	Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	25.000.000	-	-	-	0,00%			-	-	-
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	2.806.598.145	2 Laporan	11.150.000	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	11.150.000	100,00%	89,20%			4 Laporan	22.300.000	0,79%
2.09.04	**Penanganan kerawanan pangan**	**Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani Menuju Tahan Pangan**	**100%**	**159.873.100**	**100%**	**16.000.000**	**100%**	**16.000.000**	**100%**	**16.000.000**	**100,00%**	**100,00%**			**100%**	**32.000.000**	**20,02%**
2.09.04.2.02	***Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota***	***Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani***	***100%***	***159.873.100***	***100%***	***16.000.000***	***100%***	***16.000.000***	***100%***	***16.000.000***	***100,00%***	***100,00%***			***100%***	***32.000.000***	***20,02%***
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	159.873.100	1 Laporan	16.000.000	1 Laporan	16.000.000	1 Laporan	16.000.000	100,00%	100,00%			2 Laporan	32.000.000	20,02%
2.09.05	**Pengawasan keamanan pangan**	**Persentase Sekolah Dasar Yang Terjamin Keamanan Pangannya**	**100%**	**43.596.210**	**-**	**-**	**100%**	**12.500.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**			**100%**	**-**	**0,00%**
2.09.05.2.01	***Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota***	***Persentase SD Yang Diawasi Keamanan Pangannya***	***100%***	***43.596.210***	-	-	***100%***	***12.500.000***	-	-	-	***0,00%***			***100%***	-	***0,00%***
2.09.05.2.01.01	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina	1 Dokumen	43.596.210	-	-	1 Dokumen	12.500.000	-	-	-	0,00%			1 Dokumen	-	0,00%
2.09.01	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**12.124.948.462**	**96,64%**	**3.587.013.679**	**100%**	**3.982.509.866**	**96,64%**	**3.587.013.679**	**96,64%**	**90,07%**			**98,32%**	**7.174.027.358**	**59,17%**
2.09.01.2.01	***Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***100%***	***46.548.000***	***100%***	***2.462.000***	***100%***	***14.351.500***	***100%***	***2.462.000***	***100,00%***	***17,16%***			***100%***	***4.924.000***	***10,58%***

2.09.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.049.000	2 dok	783.000	2 dok	5.472.000	2 dok	783.000	100,00%	14,31%			4 dok	1.566.000	11,15%
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.785.000	1 dok	280.000	1 dok	1.180.000	1 dok	280.000	100,00%	23,73%			2 dok	560.000	9,68%
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.785.000	1 dok	280.000	1 dok	1.180.000	1 dok	280.000	100,00%	23,73%			2 dok	560.000	9,68%
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.845.000	1 dok	280.000	1 dok	1.180.000	1 dok	280.000	100,00%	23,73%			2 dok	560.000	9,58%
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.785.000	1 dok	280.000	1 dok	1.180.000	1 dok	280.000	100,00%	23,73%			2 dok	560.000	9,68%
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.892.000	1 Lap	386.000	1 Lap	2.186.000	1 Lap	386.000	100,00%	17,66%			2 Lap	772.000	15,78%
2.09.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.407.000	2 Lap	173.000	2 Lap	1.973.500	2 Lap	173.000	100,00%	8,77%			4 Lap	346.000	7,85%
2.09.01.2.02	***Administrasi keuangan perangkat daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi***	***100%***	***9.298.602.867***	***100%***	***3.038.058.741***	***100%***	***3.263.855.066***	***100%***	***3.038.058.741***	***100,00%***	***93,08%***			***100%***	***6.076.117.482***	***65,34%***
2.09.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	37 org/bulan	9.285.431.867	35 org	3.035.855.741	35 org	3.259.627.066	35 org	3.035.855.741	100,00%	93,14%			71 org	6.071.711.482	65,39%
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.171.000	1 Lap	1.106.000	1 Lap	2.456.000	1 Lap	1.106.000	100,00%	45,03%			2 Lap	2.212.000	27,07%
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi	3 Laporan	5.000.000	3 Lap	1.097.000	3 Lap	1.772.000	3 Lap	1.097.000	100,00%	61,91%			6 Lap	2.194.000	43,88%

	an/semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD															
2.09. 01.2. 03	***Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun***	***100%***	***8.900.000***	-	-	***100%***	***5.000.000***	-	-	-	0,00 %			-	-	***0,00%***
2.09. 01.2. 03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%
2.09. 01.2. 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	4.000.000	-	-	2 Lap	5.000.000	-	-	-	0,00 %			-	-	0,00%
2.09. 01.2. 05	***Aministrasi kepegawaian perangkat daerah***	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana***	***100%***	***52.520.000***	-	-	***100%***	***5.000.000***	-	-	-	0,00 %			-	-	***0,00%***
2.09. 01.2. 05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%
2.09. 01.2. 05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%
2.09. 01.2. 05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%
2.09. 01.2. 05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%
2.09. 01.2. 05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%
2.09. 01.2. 05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	2 Orang	14.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%
2.09. 01.2. 05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
2.09. 01.2. 05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	5.000.000	-	-	2 Orang	5.000.000	-	-	-	0,00 %			-	-	0,00%
2.09. 01.2. 06	***Administrasi umum perangkat daerah***	***Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***118.202.100***	***90%***	***32.523.650***	***100%***	***121.438.300***	***90%***	***32.523.650***	***90,00%***	***26,78%***			***95,00%***	***65.047.300***	***55,03%***

2.09.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	6.211.150	1 Paket	1.179.200	1 Paket	1.179.200	1 Paket	1.179.200	-	100,00%			1 Paket	2.358.400	37,97%
2.09.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	43.616.960	1 Paket	13.753.950	1 Paket	17.858.750	1 Paket	13.753.950	100,00%	77,02%			2 Paket	27.507.900	63,07%
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	1 Paket	2.467.400	-	-	-	0,00%			-	-	-
2.09.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	20.250.000	1 Paket	3.150.000	1 Paket	9.450.000	1 Paket	3.150.000	100,00%	33,33%			1 Paket	6.300.000	31,11%
2.09.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	19.253.990	2 Paket	3.500.000	2 Paket	12.572.950	2 Paket	3.500.000	100,00%	27,84%			4 Paket	7.000.000	36,36%
2.09.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	2 Dokumen	12.750.000	2 Dokumen	1.560.000	2 Dokumen	3.240.000	2 Dokumen	1.560.000	100,00%	48,15%			4 Dokumen	3.120.000	24,47%
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	-	-	1 Paket	15.000.000	-	-	-	0,00%			-	-	0,00%
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	330.500	1 Laporan	7.930.000	1 Laporan	330.500	100,00%	4,17%			2 Laporan	661.000	33,05%
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	11.120.000	1 Laporan	9.050.000	1 Laporan	51.740.000	1 Laporan	9.050.000	100,00%	17,49%			2 Laporan	18.100.000	162,77%
2.09.01.2.07	***Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana***	***100%***	***312.640.000***	-	-	***100%***		-	-	-	-			-	-	***0,00%***
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1 Unit	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%
2.09.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	1 Unit	273.690.000	-	-	-	-	-	-	-	-			1 Unit	-	0,00%
2.09.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
2.09.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	21.450.000	-	-	2 Unit		-	-	-	-			1 Unit	-	0,00%

2.09.01.2.08	***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***1.808.385.495***	***100%***	***422.285.998***	***100%***	***466.515.000***	***100%***	***422.285.998***	***100,00%***	***90,52%***			***100%***	***844.571.996***	***46,70%***
2.09.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.875.000	1 Laporan	3.800.000	1 Laporan	6.675.000	1 Laporan	3.800.000	100,00%	56,93%			2 Laporan	7.600.000	51,09%
2.09.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	148.060.495	1 Laporan	36.453.616	1 Laporan	53.740.000	1 Laporan	36.453.616	100,00%	67,83%			2 Laporan	72.907.232	49,24%
2.09.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	5.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00%
2.09.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	1.639.850.000	1 Laporan	382.032.382	1 Laporan	406.100.000	1 Laporan	382.032.382	100,00%	94,07%			2 Laporan	764.064.764	46,59%
2.09.01.2.09	***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana***	***100%***	***479.150.000***	***93,22%***	***91.683.290***	***100%***	***106.350.000***	***93,22%***	***91.683.290***	***93,22%***	***86,21%***			***96,61%***	***183.366.580***	***38,27%***
2.09.01.2.09.01	penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	448.050.000	15 Unit	79.154.190	15 Unit	92.000.000	15 Unit	79.154.190	100,00%	86,04%			33 Unit	158.308.380	35,33%
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perijinannya	19 Unit	8.000.000	16 Unit	6.129.100	19 Unit	7.700.000	16 Unit	6.129.100	84,21%	79,60%			16 Unit	12.258.200	153,23%
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	15 Unit	1.000.000	14 Unit	4.300.000	15 Unit	4.500.000	14 Unit	4.300.000	93,33%	95,56%			14 Unit	8.600.000	860,00%
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	11.000.000	-	-	1 Unit		-	-	-	-			-	-	0,00%
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang	10 Unit	11.100.000	10 Unit	2.100.000	10 Unit	2.150.000	10 Unit	2.100.000	100,00%	97,67%			10 Unit	4.200.000	37,84%

		Dipelihara/Direhabilitasi															
TA. 2024																	
2.09.02	**Pengelolaan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**	**Prosentase Desa Yang Memiliki Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan Dan Kemakmuran Pangan Yang Terkelola Dengan Baik**	**100%**	**1.827.000.000**									**100%**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**0,55%**
2.09.02.2.01	***Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota***	***Persentase Desa Yang Memiliki Lumbung Pangan Dan Lantai Jemur***	***100%***	**1.827.000.000**									***100%***	**10.000.000**	***100 %***	**10.000.000**	***0,55%***
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6 Unit	1.827.000.000									2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	0,55%
2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Unit	-										-		-	-
2.09.03	**Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	**Persentase Gapoktan Yang Berfungsi Dengan Baik Diversifikasi Dan Ketahanan Pangannya**	**100%**	**2.971.465.787**									**100%**	**70.200.000**	**100 %**	**70.200.000**	**2,36%**
2.09.03.2.01	***Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan***	***Persentase Gapoktan Yang Difasilitasi Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya***	***100%***	**242.000.000**									***100%***	**40.200.000**	***100 %***	**40.200.000**	***16,61%***
2.09.03.2.01.0016	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	12 Laporan	101.000.000									1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	9,90%
2.09.03.2.01.0002	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	24 Unit	51.000.000									2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	19,61%
2.09.03.2.01.0010	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	3 Dokumen	90.000.000									1 Dokumen	20.200.000	1 Dokumen	20.200.000	22,44%

2.09.03.2.03	***Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi***	***Prosentase Pasar Yang Dipantau Harga Pangan Pokok Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Provinsi***	***100%***	**108.000.000**									***100%***	**10.000.000**	***100 %***	**10.000.000**	***9,26%***
2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	3 Laporan	108.000.000									1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	9,26%
2.09.03.2.04	***Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi***	***Prosentase SD Yang Diberdayakan Konsumsi Pangannya***	***100%***	**2.621.465.787**									***100%***	**20.000.000**	***100 %***	**20.000.000**	***0,76%***
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	6 Dokumen	75.000.000									1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	13,33%
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	9 Laporan	2.546.465.787									1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	0,39%
2.09.04	**Penanganan kerawanan pangan**	**Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani Menuju Tahan Pangan**	**100%**	**48.000.000**									**100%**	**35.000.000**	**100 %**	**35.000.000**	**72,92%**
2.09.04.2.02	***Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota***	***Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani***	***100%***	**48.000.000**									***100%***	**35.000.000**	***100 %***	**35.000.000**	***72,92%***
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	3 Laporan	48.000.000									2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	35.000.000	72,92%
2.09.05	**Pengawasan keamanan pangan**	**Persentase Sekolah Dasar Yang Terjamin Keamanan Pangannya**	**100%**	**37.500.000**									**100%**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**26,67%**
2.09.05.2.01	***Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota***	***Persentase SD Yang Diawasi Keamanan Pangannya***	***100%***	**37.500.000**									***100%***	**10.000.000**	***100 %***	**10.000.000**	***26,67%***

2.09.05.2.01.00 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	37.500.000									1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	26,67%
2.09.01	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**11.514.187.140**									**100%**	**3.749.277.199**	**100%**	**3.749.277.199**	**32,56%**
2.09.01.2.01	***Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***100%***	**43.054.500**									***100%***	**3.118.000**	***100%***	**3.118.000**	***7,24%***
2.09.01.2.01.00 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	16.416.000									2 Dokumen	950.000	2 Dokumen	950.000	5,79%
2.09.01.2.01.00 02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3.540.000									1 Dokumen	280.000	1 Dokumen	280.000	7,91%
2.09.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3.540.000									1 Dokumen	280.000	1 Dokumen	280.000	7,91%
2.09.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	3.540.000									1 dokumen	280.000	1 dokumen	280.000	7,91%
2.09.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3.540.000									1 Dokumen	280.000	1 Dokumen	280.000	7,91%
2.09.01.2.01.00 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6.558.000									1 Laporan	386.000	1 Laporan	386.000	5,89%
2.09.01.2.01.00 07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.920.500									2 Laporan	662.000	2 Laporan	662.000	11,18%
2.09.01.2.02	***Administrasi keuangan perangkat daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan***	***100%***	**10.865.864.940**									***100%***	**3.716.339.259**	***100%***	**3.716.339.259**	***34,20%***

		Perangkat Daerah Yang Terpenuhi															
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	41 org/bulan	10.853.180.940									37 org/bulan	3.714.136.259	37 org/bulan	3.714.136.259	34,22%
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	7.368.000									3 Laporan	1.403.000	3 Laporan	1.403.000	19,04%
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	9 Laporan	5.316.000									3 Laporan	800.000	3 Laporan	800.000	15,05%
2.09.01.2.03	***Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun***	***100%***	**15.000.000**									***100%***	**1.800.000**	***100 %***	**1.800.000**	***12,00%***
2.09.01.2.03.0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen											-		-	-
2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	6 Laporan	15.000.000									1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	1.800.000	12,00%
2.09.01.2.05	***Aministrasi kepegawaian perangkat daerah***	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana***	***100%***														-
2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit														-
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket														-
2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen														-
2.09.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen														-

2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen														-
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	6 Orang														-
2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang														-
2.09.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang														-
2.09.01.2.06	***Administrasi umum perangkat daerah***	***Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	**522.865.500**									***100%***	**26.219.940**	***100%***	**26.219.940**	***5,01%***
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	3.537.600									1 Paket	1.179.500	1 Paket	1.179.500	33,34%
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	51.346.500									1 Paket	11.441.200	1 Paket	11.441.200	22,28%
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	3 Paket	7.402.200												-	0,00%
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	28.350.000									1 Paket	4.725.000	1 Paket	4.725.000	16,67%
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	6 Paket	37.360.200									1 Paket	2.374.240	1 Paket	2.374.240	6,35%
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	6 Dokumen	9.720.000									1 Dokumen	1.620.000	1 Dokumen	1.620.000	16,67%
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	3 Paket	45.000.000												-	0,00%
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	23.790.000									1 Laporan	2.420.000	1 Laporan	2.420.000	10,17%
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	316.359.000									1 Laporan	2.460.000	1 Laporan	2.460.000	0,78%
2.09.01.2.07	***Pengadaan barang milik daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah***	***100%***	**364.308.000**													0,00%

	penunjang urusan pemerintah daerah	***Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana***															
2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	3 Unit	272.040.000													0,00%
2.09.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	3 Unit	-													-
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	3 Unit	-													-
2.09.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	6 Unit	92.268.000													0,00%
2.09.01.2.08	***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	**1.456.470.000**									***100%***	**482.252.500**	***100 %***	**482.252.500**	***33,11%***
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	20.025.000									1 Laporan	4.405.000	1 Laporan	4.405.000	22,00%
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	161.220.000									1 Laporan	53.740.000	1 Laporan	53.740.000	33,33%
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Laporan	-										-		-	-
2.09.01.2.08.0004	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	3 Laporan	1.275.225.000									1 Laporan	424.107.500	1 Laporan	424.107.500	33,26%
2.09.01.2.09	***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana***	***100%***	**470.200.000**									***100%***	**22.350.000**	***100 %***	**22.350.000**	***4,75%***
2.09.01.2.09.0001	penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	297.150.000												-	0,00%

2.09.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perijinannya	19 Unit	83.100.000									19 Unit	7.700.000	19 Unit	7.700.000	9,27%
2.09.01.2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	2 Unit	-												-	-
2.09.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	15 Unit	13.500.000									30 Unit	7.500.000	30 Unit	7.500.000	55,56%
2.09.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	45.000.000									1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	11,11%
2.09.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	31.450.000									10 Unit	2.150.000	10 Unit	2.150.000	6,84%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bangkalan agar mampu mencapai daya guna dan berhasil guna, khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Ketahanan Pangan yaitu melalui ketersediaan, konsumsi, dan keamanan pangan.

1) Tujuan

Untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui pengkajian, pengembangan dan penyusunan kebijakan yang menyangkut aspek ketersediaan, konsumsi dan keamanan pangan;
2. Meningkatkan kewaspadaan pangan melalui kemandirian masyarakat dalam penganekaragaman pangan yang berbasis budaya pangan lokal;
3. Meningkatkan SDM aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab.

Maka sasaran renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan dapat dirumuskan sebagai berikut (tabel dibawah ini) :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja Th 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja Th 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	**75**	**75**	**Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan**	Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani	**2,2%**	**2,2%**	
				Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Strategis Serta Kecukupan Pangan dan Gizi Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	**80**	**80**	
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	**79,4**	**79,4**	
				Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	**86,00**	**86,00**	
					Nilai Sakip PD	**62,86**	**62,86**	

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tetap mengacu pada Renstra DKP periode 2024 - 2026 dan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024. Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 ini disusun melalui proses perubahan Pagu Anggaran mengikuti Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan (Perbub 1), Perbub 2 dan pagu Rancangan Akhir. Pagu awal 2024 yang diberikan sebesar Rp. 5.464.728.057,- dan diberikan pagu Perubahan Penetapan tahun anggaran 2024 sebasar 4.131.467.959,- Dengan adanya perubahan Pagu Penetapan yang diberikan mengalami penurunan pagu menyesuaikan pagu penetapan yang telah diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini dilakukan karena adanya efisiensi dan efektifitas Anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Daerah Kabupaten Bangkalan. Adapun Program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, sebagaimana tabel 3.2 (Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024), sebagai berikut :

Tabel 3.2

Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Dinas Ketahanan Pangan – Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
	Pemerintahan Bidang Pangan				**5.464.728.057**					**4.131.467.659**		**-1.333.260.398**	
	Dinas Ketahanan Pangan				**5.464.728.057**					**4.131.467.659**		**-1.333.260.398**	
2.09.02	**Pengelolaan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**	**Prosentase Desa Yang Memiliki Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan Dan Kemakmuran Pangan Yang Terkelola Dengan Baik**	**DKP**	**100%**	**9.000.000**	**DAUM**	**Prosentase Desa Yang Memiliki Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan Dan Kemakmuran Pangan Yang Terkelola Dengan Baik**	**DKP**	**100%**	**13.000.000**	**DAUM**	**4.000.000**	
2.09.02.2.01	***Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota***	***Persentase Desa Yang Memiliki Lumbung Pangan Dan Lantai Jemur***	***DKP***	***100%***	***9.000.000***	***DAUM***	***Persentase Desa Yang Memiliki Lumbung Pangan Dan Lantai Jemur***	***DKP***	***100%***	***13.000.000***	***DAUM***	***4.000.000***	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	DKP	2 Unit	9.000.000	DAUM	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	DKP	2 Unit	13.000.000	DAUM	4.000.000	
2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	DKP	2 Unit	0	DAUM	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	DKP	0 Unit	0	DAUM	0	
2.09.03	**Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	**Persentase Gapoktan Yang Berfungsi Dengan Baik Diversifikasi Dan Ketahanan Pangannya**	**DKP**	**100%**	**976.337.500**	**DAUM, DAK NON FISIK**	**Persentase Gapoktan Yang Berfungsi Dengan Baik Diversifikasi Dan Ketahanan Pangannya**	**DKP**	**100%**	**72.226.000**	**DAUM**	**-904.111.500**	**Penurunan Kebijakan Pagu OPD**
2.09.03.2.01	***Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan***	***Persentase Gapoktan Yang Difasilitasi Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya***	***DKP***	***100%***	***74.000.000***	***DAUM***	***Persentase Gapoktan Yang Difasilitasi Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya***	***DKP***	***100%***	***52.226.000***	***DAUM***	***-21.774.000***	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	DKP	1 Dokumen	27.000.000	DAUM	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	DKP	1 Dokumen	20.200.000	DAUM	-6.800.000	

2.09.03.2.01.0002	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	DKP	4 Laporan	17.000.000	DAUM	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	DKP	1 Laporan	10.000.000	DAUM	-7.000.000	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	DKP	8 Unit	30.000.000	DAUM	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	DKP	2 Unit	22.026.000	DAUM	-7.974.000	
2.09.03.2.03	***Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi***	***Prosentase Pasar Yang Dipantau Harga Pangan Pokok Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Provinsi***	***DKP***	***100%***	***36.000.000***	***DAUM***	***Prosentase Pasar Yang Dipantau Harga Pangan Pokok Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Provinsi***	***DKP***	***100%***	***10.000.000***	***DAUM***	***-26.000.000***	
2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	DKP	1 Laporan	36.000.000	DAUM	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	DKP	1 Laporan	10.000.000	DAUM	-26.000.000	Anggaran Stunting dialihkan ke Kegiatan Kerawanan Pangan
2.09.03.2.04	***Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi***	***Prosentase SD Yang Diberdayakan Konsumsi Pangannya***	***DKP***	***100%***	***866.337.500***	***DAUM, DAK NON FISIK***	***Prosentase SD Yang Diberdayakan Konsumsi Pangannya***	***DKP***	***100%***	***10.000.000***	***DAUM***	***-856.337.500***	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan Dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	DKP	2 Dokumen	25.000.000	DAUM	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	DKP	1 Dokumen	10.000.000	DAUM	-15.000.000	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKP	3 Laporan	841.337.500	DAUM, DAK NON FISIK	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKP	0 Laporan	0	DAUM	-841.337.500	- Anggaran DAK Non Fisik beralih ke Dinas Pertanian - Efisiensi Anggaran / Refocusing
2.09.04	**Penanganan kerawanan pangan**	**Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani Menuju Tahan Pangan**	**DKP**	**100%**	**16.000.000**	**DAUM**	**Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani Menuju Tahan Pangan**	**DKP**	**100%**	**32.920.000**	**DAUM**	**16.920.000**	
2.09.04.2.02	***Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota***	***Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani***	***DKP***	***100%***	***16.000.000***	***DAUM***	***Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani***	***DKP***	***100%***	***32.920.000***	***DAUM***	***16.920.000***	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	DKP	1 Laporan	16.000.000	DAUM	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	DKP	2 Laporan	32.920.000	DAUM	16.920.000	Menerima Anggaran Stunting
2.09.05	**Pengawasan keamanan pangan**	**Persentase Sekolah Dasar Yang Terjamin Keamanan Pangannya**	**DKP**	**100%**	**12.500.000**	**DAUM**	**Persentase Sekolah Dasar Yang Terjamin Keamanan Pangannya**	**DKP**	**100%**	**10.000.000**	**DAUM**	**-2.500.000**	**Penurunan Kebijakan Pagu OPD**
2.09.05.2.01	***Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota***	***Persentase SD Yang Diawasi Keamanan Pangannya***	***DKP***	***100%***	***12.500.000***	***DAUM***	***Persentase SD Yang Diawasi Keamanan Pangannya***	***DKP***	***100%***	***10.000.000***	***DAUM***	***-2.500.000***	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DKP	1 Dokumen	12.500.000	DAUM	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DKP	1 Dokumen	10.000.000	DAUM	-2.500.000	
2.09.01	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DKP**	**100%**	**4.450.890.557**	**DAUM**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DKP**	**100%**	**4.003.321.659**	**DAUM**	**-447.568.898**	**Penurunan Kebijakan Pagu OPD**
2.09.01.2.01	***Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, Dan***	***DKP***	***100%***	***14.351.500***	***DAUM***	***Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***DKP***	***100%***	***3.118.000***	***DAUM***	***-11.233.500***	

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP	2 Dokumen	5.472.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP	2 Dokumen	950.000	DAUM	-4.522.000	
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKP	1 Dokumen	1.180.000	DAUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKP	1 Dokumen	280.000	DAUM	-900.000	
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKP	1 Dokumen	1.180.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKP	1 Dokumen	280.000	DAUM	-900.000	
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	DKP	1 dokumen	1.180.000	DAUM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	DKP	1 dokumen	280.000	DAUM	-900.000	
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DKP	1 Dokumen	1.180.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DKP	1 Dokumen	280.000	DAUM	-900.000	
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKP	1 Laporan	2.186.000	DAUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKP	1 Laporan	386.000	DAUM	-1.800.000	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP	2 Laporan	1.973.500	DAUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP	2 Laporan	662.000	DAUM	-1.311.500	
2.09.01.2.02	***Administrasi keuangan perangkat daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi***	***DKP***	***100%***	***3.532.624.557***	***DAUM***	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi***	***DKP***	***100%***	***3.505.403.519***	***DAUM***	***-27.221.038***	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	DKP	37 org/bulan	3.528.396.557	DAUM	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	DKP	35 org/bulan	3.503.200.519	DAUM	-25.196.038	Penurunan Kebijakan Pagu OPD
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP	1 Laporan	2.456.000	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP	3 Laporan	1.403.000	DAUM	-1.053.000	
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DKP	3 Laporan	1.772.000	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DKP	3 Laporan	800.000	DAUM	-972.000	
2.09.01.2.03	***Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun***	***DKP***	***100%***	***5.000.000***	***DAUM***	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun***	***DKP***	***100%***	***1.800.000***	***DAUM***	***-3.200.000***	
2.09.01.2.03.0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DKP	1 Dokumen	0	DAUM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DKP	0 Dokumen	0	DAUM	0	

2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP	2 Laporan	5.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP	1 Laporan	1.800.000	DAUM	-3.200.000	
2.09.01.2.05	***Aministrasi kepegawaian perangkat daerah***	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana***	***DKP***	***100%***	***0***	***DAUM***	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana***	***DKP***	***0%***	***0***	***DAUM***	***0***	***Tidak Dianggarkan***
2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	DKP	1 Unit	0	DAUM	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	DKP	0 Unit	0	DAUM	0	
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	DKP	37 Paket	0	DAUM	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	DKP	0 Paket	0	DAUM	0	
2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DKP	2 Dokumen	0	DAUM	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DKP	0 Dokumen	0	DAUM	0	
2.09.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DKP	1 Dokumen	0	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DKP	0 Dokumen	0	DAUM	0	
2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	DKP	1 Dokumen	0	DAUM	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	DKP	0 Dokumen	0	DAUM	0	
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	DKP	2 Orang	0	DAUM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	DKP	0 Orang	0	DAUM	0	
2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DKP	2 Orang	0	DAUM	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DKP	0 Orang	0	DAUM	0	
2.09.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKP	1 Orang	0	DAUM	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKP	0 Orang	0	DAUM	0	
2.09.01.2.06	***Administrasi umum perangkat daerah***	***Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***DKP***	***100%***	***174.288.500***	***DAUM***	***Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***DKP***	***100%***	***20.193.640***	***DAUM***	***-154.094.860***	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	DKP	1 Paket	1.179.200	DAUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	DKP	1 Paket	1.179.200	DAUM	0	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	DKP	1 Paket	17.115.500	DAUM	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	DKP	1 Paket	10.140.200	DAUM	-6.975.300	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	DKP	1 Paket	2.467.400	DAUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	DKP	0 Paket	0	DAUM	-2.467.400	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	DKP	1 Paket	9.450.000	DAUM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	DKP	0 Paket	0	DAUM	-9.450.000	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	DKP	2 Paket	12.453.400	DAUM	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	DKP	1 Paket	2.374.240	DAUM	-10.079.160	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	DKP	2 Dokumen	3.240.000	DAUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	DKP	1 Dokumen	1.620.000	DAUM	-1.620.000	

2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	DKP	1 Paket	15.000.000	DAUM	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	DKP	0 Paket	0	DAUM	-15.000.000	
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKP	1 Laporan	7.930.000	DAUM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKP	1 Laporan	2.420.000	DAUM	-5.510.000	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	DKP	1 Laporan	105.453.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	DKP	1 Laporan	2.460.000	DAUM	-102.993.000	
2.09.01.2.07	***Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana***	***DKP***	***100%***	***100.736.000***	***DAUM***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana***	***DKP***	***0%***	***0***	***DAUM***	***-100.736.000***	***Efisiensi Anggaran / Refocusing***
2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	DKP	1 Unit	69.980.000	DAUM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	DKP	0 Unit	0	DAUM	-69.980.000	
2.09.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	DKP	1 Unit	0	DAUM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	DKP	0 Unit	0	DAUM	0	
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	DKP	1 Unit	0	DAUM	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	DKP	0 Unit	0	DAUM	0	
2.09.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	DKP	2 Unit	30.756.000	DAUM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	DKP	0 Unit	0	DAUM	-30.756.000	
2.09.01.2.08	***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***DKP***	***100%***	***485.490.000***	***DAUM***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***DKP***	***100%***	***457.376.500***	***DAUM***	***-28.113.500***	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	1 Laporan	6.675.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	1 Laporan	4.405.000	DAUM	-2.270.000	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP	1 Laporan	53.740.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP	1 Laporan	39.214.000	DAUM	-14.526.000	Penurunan Kebijakan Pagu OPD
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	DKP	1 Laporan	0	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	DKP	0 Laporan	0	DAUM	0	
2.09.01.2.08.0004	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	DKP	1 Laporan	425.075.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	DKP	1 Laporan	413.757.500	DAUM	-11.317.500	Penurunan Kebijakan Pagu OPD
2.09.01.2.09	***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana***	***DKP***	***100%***	***138.400.000***	***DAUM***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana***	***DKP***	***100%***	***15.430.000***	***DAUM***	***-122.970.000***	
2.09.01.2.09.0001	penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	DKP	15 Unit	99.050.000	DAUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	DKP	0 Unit	0	DAUM	-99.050.000	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perijinannya	DKP	19 Unit	22.700.000	DAUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perijinannya	DKP	19 Unit	9.780.000	DAUM	-12.920.000	

	Dinas Operasional atau Lapangan												
2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	DKP	2 Unit	0	DAUM	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	DKP	0 Unit	0	DAUM	0	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	DKP	15 Unit	4.500.000	DAUM	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	DKP	30 Unit	3.500.000	DAUM	-1.000.000	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DKP	1 Unit	10.000.000	DAUM	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DKP	0 Unit	0	DAUM	-10.000.000	
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKP	10 Unit	2.150.000	DAUM	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKP	10 Unit	2.150.000	DAUM	0	

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan 2024 -2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan PD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja PD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Bupati Bangkalan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan ketahanan Pangan, maka pada tahun 2024 lebih difokuskan pada 3 (tiga) program sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan
b. Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
c. Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan tahun 2024, dengan memperhatikan isu strategis dan ditindaklanjuti oleh program-program yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 - 2026 yang bermuara pada peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan ketersediaan dan kerawanan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Adapun upaya mewujudkan pemantapan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama dengan masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 mengenai Ketahanan Pangan. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap ketersediaan pangan yang cukup dalam hal Jumlah dan Mutunya, Aman, Beragam, Bergizi, Merata dan Terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan, masyarakat berperan serta menyelenggarakan produksi, perdagangan, distribusi dan cadangan pangan masyarakat, serta pencegahan maupun penanggulangan masalah pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan diperlukan koordinasi lintas instansi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah kebijakan yang ditempuh agar dapat mewujudkan pemantapan ketahanan pangan. Kebijakan pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran agar dapat menjawab semua isu-isu yang terjadi dibidang pangan.

Demikian Rencan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2024.

Bangkalan, Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bangkalan

M. AINUL GHUFRON, S.Sos, M.M
NIP. 197104161993021001

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dokumen Rencana Kerja ini disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan dari beberapa Bidang dan Stakeholder yang terkait dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup serta sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangkalan No.28 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan unit kerja Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang memuat berbagai kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini disamping sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perubahan tahun 2024 juga memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja awal tahun dan tahun sebelumnya dan perkiraan capaian pada tahun berjalan juga sebagai dasar perencanaan awal tahun depan.

Akhirnya kami menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renja ini, saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan dalam penyusunan dokumen selanjutnya.

Bangkalan, Juli 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGKALAN

ANANG YULIANTO HARI PURNOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.197607141994121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Renja perubahan OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Dalam konteks tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana strategis (Renstra) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Rencana kerja (RENJA) perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 ini di susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1312) dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja perubahan Dinas Lingkungan Hidup di dasarkan kepada Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam dokumen rancangan awal rencana kerja pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Perubahan tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan adalah:

1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 9679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor : 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009–2029 (lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005–2025 (lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2011 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah no 76;
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47 Seri E ;
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27 E .

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah menyediakan acuhan arah kebijakan pembangunan secara umum akan di laksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pelaksanaan oleh Aparatur Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bangkalan, sehingga terwujud senergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perubahan PD, proses penyusunan RENJA Perubahan PD, Keterkaitan antara Renja perubahan PD dengan dokumen RKPD Perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Menguraiakan apa yang menjadi landasan hukum didalam penyusunan RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi Dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

- Tabel 2.1 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil.....)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

-Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah.

-Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Tahun 2023 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan Program/Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dengan target yang ditetapkan pada dalam Renstra. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Secara kuantitatif berhasil memenuhi target kinerja 100 %.dari2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis 2024 – 2026, telah dapat dicapai seluruhnya yang dititik beratkan pada program utama Dinas Lingkungan Hidup akan diuraikan dalam bagian ini meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/ Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH)
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan

Dari Beberapa Program diatas Alokasi belanja langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan total Anggaran sebesar ***Rp. 21.958.766.946,- (Dua puluh Satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).***Dalam hal ini tercermin dalam beberapa kegiatan pembangunan pada belanja langsung tahun 2024, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,- kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan antara lain ;

- ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.294.950,00 dengan keluaran berupa Penyusunan Dok Perencanaan PD;
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp.1.225.000,00
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.700.200,00,- dengan keluaran Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00,- dengan keluaran berupa penyusunan lap triwulan,semesteran PD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain ;

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13,519,838,446.00,- dengan keluaran berupa penyediaan gaji ASN dan Tunjangan ASN.
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900,000.00,- dengan keluaran berupa penyusunan dok. Keuangan akhir tahun.
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900,000.00,- dengan keluaran laporan keuangan PD.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ,- Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan antara lain :

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 965,000.00,- dengan keluaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan;

- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,844,350.00,- dengan keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan;
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,860,000.00,- dengan keluaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan;
- ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12,348,000.00,- dengan keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan;
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.240.000,- dengan pengadaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan;
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8,048,000.00,- dengan keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,050,000.00,- dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39,943,000.00,- dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan;
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 140,497,500.00,- dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,-Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain :

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 94,077,000.00,- dengan keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya;

- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 7,550,000.00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
- ✓ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,000,000.00,- dengan keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan /Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota :

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan / Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   - ✓ Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air,udara dan Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp 74,034,500.00,-dengan keluaran Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota ,-kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
   - ✓ Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp 829,500,000.00,- dengan keluaran Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan

c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota,-kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
   - ✓ Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8,000,000.00,-dengan keluaran jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) .

a. kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota , Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan antara lain :

- ✓ Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,550,000,000.00,- dengan keluaran berupa Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola.

5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) :
   a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, Kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu :
      - ✓ Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20,000,000.00,- keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan atau kegiatan yang lzin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan antara lain :
      - ✓ Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17,000,000.00,- dengan keluaran berupa Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
7) Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup
   a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)Kab/Kota, kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
      - ✓ Pengelolaan Pengaduan Mayarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,000,000.00,-dengan keluaran kegiatan berupa Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani

8) Program Pengelolaan Persampahan

a. Kegiatan Pengelolaan Sampah,kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain :

- ✓ Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,975,000.00,- dengan keluaran Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan.
- ✓ Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,384,424,000.00,- dengan keluaran kegiatan berupa, ,Pengadaan alat Pengolah sampah
- ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 144,167,000.00,- dengan keluaran berupa Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
- ✓ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10,025,000.00 dengan keluaran berupa Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

b. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta,kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan antara lain :

- ✓ Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48,600,000.00 dengan keluaran berupa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	**100**							
2	11	01	2.001		**Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun tepat waktu**	100							
2	11	01	2.001	0001	Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7		2	1	0.5	2	3	0.42
2	11	01	2.001	0002	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3		**1**	0	0	**1**	1	0.33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
					Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3							
					Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3							
					. Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	01	2.001	0006	Sub. Keg **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	3		1	1	1	1	2	0.66
2	11	01	2.001	0007	Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24		8	0	0	0	0	0
2	11	01	2.002	0007	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang terlaksana	100		100					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	01	2.002	0001	Sub. Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195		195	195	100	195	195	33
2	11	01	2.002	0005	Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3		1	1	100	1	3	33
2	11	01	2.002	0007	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54		18	0	0	0	0	0
					Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah padaPerngkat	100							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Daerah yang Tersusun								
					Sub. Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42							
					Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100							
					Sub. Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	3							
					Sub. Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	01	2.06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100							
2	11	01	2.06	0001	Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5		**2**	2	100	**2**	4	40
2	11	01	2.06	0002	Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15		5	3	60	5	8	53
2	11	01	2.06	0004	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3		**1**	0.59	59	**1**	1.59	53
2	11	01	2.06	0005	Sub Keg. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	6		2	1.7	85	2	4.7	78
					Sub Keg Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	01	2.06	0009	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36		12	6	50	12	18	50
					Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100							
					Sub. Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6							
2	11	01	2.08		Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100		100					
2	11	01	2.08	0001	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6		**2**	0.4	20	**2**	2.4	40
2	11	01	2.08	0002	Sub Keg **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang**	9		3	0.39	13	3	3.39	37

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Disediakan								
2	11	01	2.08	0004	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21		7	3	43	7	14	66
2	11	01	2.09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100		100					
2	11	01	2.09	0001	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12		***12***	7	58	***12***	19	58
					Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	51							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya								
					Sub Keg. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3							
2	11	01	2.09	0006	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18		**6**	2	33	**6**	8	44
2	11	01	2.09	0009	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3		1	0	0	1	1	33
2	11	03			**Prog. Perencanaan Lingkungan Hidup**	Persentase kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup	100							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Keg. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab / Kota	Persentase dok lingkungan yang telah dilaksnakan	100							
					Sub Keg Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang di susun	3							
					Keg. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Persentase dok lingkungan yang telah dilaksnakan	100							
					Sub Keg Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1							
					Sub Keg Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	3							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	03			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Unit Lingkungan Hidup yang terkendali pencemarannya**	100		13					
2	11	03	2.01		**'Keg. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencemaran yang diidentifikasi dan ditindaklanjuti**	100		85					
2	11	03	2.01	0001	Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	9		3	0.92	31	3	6	66
2	11	03	2.01	0001	Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas	9							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan								
2	11	03	2.02		'Keg. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Pencemar dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang di tanggulangi	100		80					
2	11	03	2.02	0003	Sub. Keg. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4		4	2	50	4	6	25
2	11	03	2.03		**'Keg Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Unit Lingkungan Hidup yang berhasil dipulihkan dari unsur pencemar**	60		20					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	03	2.03	00	'Sub. Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	9							
2	11	03	2.03	0013	'Sub. Keg Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	9		3	0	0	3	3	33
2	11	03	2.03	00	'Sub. Keg Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	9		3	0	0	3	3	33
2	11	04			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH yang dikelola sesuai ketentuan**	30		14					
2	11	04	2.01		Keg. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH yang dikelola	100		14					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	04	2.01	000	Sub. Keg. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	266037							
2	11	04	2.01	0007	Sub. Keg. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	30		10	4	40	10	14	46
2	11	05			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Unit Penyimpanan sementara Limbah B3 yang terkendali**	100		100					
2	11	05	2.01		Keg. Penyimpanan sementara Limbah B3	Prosentase dokumen monitoring dan evaluasi limbah B3	100		100					
2	11	05	2.01	0001	Sub. Keg. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan	3		1	0.06	6	1-	1.06	35

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
2	11	06	2		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase pelaku usaha dan kegiatan yg telah melaksanakan ketentuan perundang undangan bidang lingkungan hidup dgn tepat**	100		100					
2	11	06	2.01		Keg. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan rekomendasi ijin lingkungan	100		100					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kabupaten/Kota									
2	11	06	2.01		Sub Keg. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30							
2	11	06	2.01	0009	Sub Keg. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	21		6	3	50	6	9	43

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	10			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang di selesaikan	100		100					
2	11	10	2.01		Keg. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bid Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH) Kab/Kota	Persentase pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang di tindaklanjuti	100		100					
2	11	10	2.01	0004	Sub Keg Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	24		7	0	0	7	7	30

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	11			**Program Pengelolaan Persampahan**	Persentase Persampahan yang dikelola sesuai dengan ketentuan	60		20					
2	11	11	2.01		Keg. Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola	100		100					
2	11	11	2.01	0004	Sub Keg. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6		8	8	100	8	16	100
2	11	11	2.01	0007	Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	29		14	8	57	14	22	76

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir								
2	11	11	2.01		Sub Keg. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	3		1	0.28	28	1	1.28	43
2	11	11	2.01	0021	Sub Keg. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	3							
2	11	11	2.01	0017	Sub Keg. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi	109500		36500	18000	49	36500	54500	49

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan								
2	11	11	2.03		Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase unit/usaha/swasta /kelompok masyarakat/lembaga pengelola sampah swasta yang dibina dan diawasi	100		100					
2	11	11	2.03	0002	Sub Keg. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan(Tahun 2024)Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	11	11	2.03	0003	Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	3		1	0	0	1	1	33

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Rencana program kegiatan dalam perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup memuat kegiatan lanjutan tahun berjalan 2024, pergeseran pagu kegiatan, penambahan /pengurangan target kinerja ,pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah perubahan 2024, maka langkah operasionalnya dituangkan kedalam program kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis.Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi sesuai dengan dokumen Renstra maupun RKPD Perubahan 2024 Kabupaten Bangkalan.

Untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka telah disusun 25 (dua puluh lima) program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi program prioritas, arah kebijakan Perangkat Daerah, program/kegiatan Perangkat Daerah serta Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Dari 25 (dua puluh lima) program prioritas Bupati tersebut , Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam 2 program prioritas, yang meliputi yaitu :

1. Program Prioritas: Pelayanan informasi, perijinan usaha dan urusan umum yang memastikan semua warga mendapat hak pelayanan berkualitas mudah dan cepat.

   Arah Kebijakan PD : Memberikan pelayanan kebersihan dan keindahan Kota serta memberikan rekomendasi lingkungan

   Program / Kegiatan PD :

   a. Program pengelolaan Persampahan
      - Kegiatan Pengelolaan Sampah
   b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
      - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota
2. Program Prioritas : Memberikan insentif penjaga makam

   Arah Kebijakan PD : Meningkatkan kesejahteraan penjaga makam

   Program/Kegiatan PD :

   a. Program Pelayanan Tata Lingkungan,
      - Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan maka telah disusun rencana Program dan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 yang terdiridari 8 Program 18 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
   a. Keg. Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, - kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan antara lain :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .

b. Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan antara laian:
   - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD.
   - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ,Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:
   - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah , Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan antara lain:
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya .
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan.

e. Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah ,- Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan antara lain :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan ;
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD .

f. Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

g. Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor .

h. Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya .

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

a. Keg. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab / Kota,kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota.

b. Keg. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten / Kota ,Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
- Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/ Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Keg. Pencegahan Pencemaran dan / Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air,udara dan Laut.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

b. Keg. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota ,-kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. Keg. Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab / Kota , kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar ;
- Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi ;
- Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

a. Keg. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota , Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain :

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati .

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun.

c. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, Kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu :

- ✓ Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,- keluaran kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi Limbah B3.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain :

- ✓ Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH .
- ✓ Pengawasan Usaha dan atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup,Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)Kab/Kota, kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   - Pengelolaan Pengaduan Mayarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota .

8. Program Pengelolaan Persampahan
   a. Keg. Pengelolaan Sampah,kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain :
      - ✓ Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota ;
      - ✓ Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah;
      - ✓ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
      - ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota
      - ✓ Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan.
   b. Keg.Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain :
      - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah;
      - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

Tujuan				Sasaran				
Uraian	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	**Uraian**	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56.90		**Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup**	Indeks Kualitas Air	50.42		
					Indeks Kualitas Udara	72.80		
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32.43		
				Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	85		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62		

Tabel 3.2
Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11-6	14
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar												
	Bidang Urusan Lingkungan Hidup												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**		**100 %**	**14.127.723.158**	**DAUM**			**100 %**	**13844921296**	DAUM	**(2828018602)**	
	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100 %**	12.220.150	DAUM	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100 %**	12.220.150	DAUM		
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dok	6294950	DAUM			2 dok	6294950	DAUM		

	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokume RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	1225000	DAUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	1225000	DAUM		
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
	Sub. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan		1 Lap	2700200	DAUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan		1 Lap	2700200	DAUM		

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
	Sub. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Lap	2000000	DAUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Lap	2000000	DAUM		
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi		**100 %**	13791320158	DAUM	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi		**100 %**	13520738446	DAUM	(269681712)	
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		**195 / org bln**	13789520158	DAUM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		**195 / org bln**	13519838446	DAUM	(269681712)	
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyediaan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lap	900000	DAUM	Jumlah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		1 Lap	900000	DAUM		

							Keuangan Akhir Tahun SKPD						
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Lap	900000	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Lap	900000	DAUM		
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah padaPerngkat Daerah yang Tersusun					Persentase Administrasi Barang Milik Daerah padaPerngkat Daerah yang Tersusun						
	Sub. Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana					Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana						
	Sub. Keg. Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas					Jumlah Pengadaan Pakaian						

	Beserta Atribut Kelengkapannya	Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya					Dinas Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya						
	Sub. Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	32065350	DAUM	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	32065350	DAUM		
	Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	965000	DAUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	965000	DAUM		
	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	6844350	DAUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	6844350	DAUM		
	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	3860000	DAUM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	3860000	DAUM		
	Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		2 Paket	12348000	DAUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		2 Paket	12348000	DAUM		

	Sub. Keg. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Lap	8048000	DAUM	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Lap	8048000	DAUM		
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana					Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana						
	Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan						
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	184490500	DAUM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	184490500	DAUM		
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Lap	4050000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Lap	4050000	DAUM		

	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Lap	39943000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Lap	39943000	DAUM		
	Sub. Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		7 Lap	140497500	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		7 Lap	140497500	DAUM		
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana		100 %	107627000	DAUM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana		100 %	107627000	DAUM		
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	94077000	DAUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	94077000	DAUM		
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau						

	Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
	Sub. Keg. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					Jumlah Mebel yang Dipelihara						
	Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	7550000	DAUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	7550000	DAUM		
	Sub. Keg. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	6000000	DAUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	6000000	DAUM		
	Prog. Perencanaan Lingkungan Hidup	**Persentase kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup**					**Persentase kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup**						
	Keg. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab / Kota	Persentase dok lingkungan yang telah dilaksnakan					Persentase dok lingkungan yang telah dilaksnakan						

	Sub. Keg. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang di susun					Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang di susun						
	Keg. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Persentase dok lingkungan yang telah dilaksnakan					Persentase dok lingkungan yang telah dilaksnakan						
	Sub. Keg. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun						
	Sub. Keg. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun						
	Prog. Pengendalian Pencemaran dan / Kerusakan Lingkungan Hidup	**Prosentase peningkatan kelembagaan kelompok peduli lingkungan hidup**		**13 %**	**949000000**	DAUM	**Prosentase peningkatan kelembagaan kelompok peduli lingkungan hidup**		**13 %**	**911534500**	**DAUM**	**37465500**	
	keg. Pencegahan Pencemaran	Persentase kasus Lingkungan dlm pencegahan dan		**85 %**	74034500	DAUM	Persentase kasus Lingkungan		**85 %**	74034500	DAUM		

	dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan					dlm pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan						
	Sub. Keg. Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air,Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		3 dok	74034500	DAUM	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		3 dok	74034500	DAUM		
	Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan						
	Keg. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /	Persentase Kasus Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		**80 %**	864000000	DAUM	Persentase Kasus Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran		80%	829500000	DAUM	**(34500000)**	

	Ko						dan Kerusakan Lingkungan						
	Sub Keg. Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		**4 Titk**	864000000	DAUM	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		**4 Titk**	829500000	DAUM	**(34500000)**	
	Keg. Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota	Persentase peningkatan kelembagaan kelompok masy peduli lingk		20 %	10965500	DAUM	Persentase peningkatan kelembagaan kelompok masy peduli lingk		20 %	8000000	DAUM	(2965500)	
	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar						
	Sub Keg. Koordinasi Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		3 dok	8000000	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		3 dok	8000000	DAUM		
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		3 dok	2965500	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		0	0		(2965500)	

	Prog. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	**presentase luas Ruang Terbuka Hujau yang harus ada**		**14 %**	**1550000000**	DAUM	**presentase luas Ruang Terbuka Hujau yang harus ada**		**14 %**	**1550000000**	DAUM		
	Keg. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan TPU yg dikelola		14 %	1550000000	DAUM	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan TPU yg dikelola		14 %	1550000000	DAUM		
	Sub Keg. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kotal ingkungan hidup					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/K otaundangan bidang lingkungan hidup						
	Sub Keg. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		10 unit	1550000000	DAUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		10 unit	1550000000	DAUM		
	Prog. pengenndalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	**Prosentase jumlah penghasil Limbah B3 Yg telah melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan**		100%	20000000	DAUM	**Prosentase jumlah penghasil Limbah B3 Yg telah melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan**		100%	20000000	DAUM		
	Keg. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan		100 %	20000000	DAUM	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan		100 %	20000000	DAUM		

		RPPLH Kabupaten/Kota yang di susun					Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang di susun						
	Sub. Keg. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 dok	20000000	DAUM	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 dok	20000000	DAUM		
	Prog. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**Persentase pelaku usaha dan kegiatan yg telah melaksanakan ketentuan perundang undangan bidang lingkungan hidup dgn tepat**		**100 %**	**17000000**	DAUM	**Persentase pelaku usaha dan kegiatan yg telah melaksanakan ketentuan perundang undangan bidang lingkungan hidup dgn tepat**		**100 %**	**17000000**	DAUM		
	keg. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yg telah melaksanakan ketentuan perundang undangan bidang lingkungan		100 %	17000000	DAUM	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yg telah melaksanakan ketentuan perundang undangan bidang lingkungan		100 %	17000000	DAUM		

	dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	hidup dgn tepat					hidup dgn tepat						
	Sub. Keg. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yan**g Diberikan**					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan						
	Sub. Keg. Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		6 Lap	17000000	DAUM	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		6 Lap	17000000	DAUM		
	Prog. Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	**persentase penanganan pengaduaan tentang kasus lingkungan yg diselesaikan**		**100%**	5000000	DAUM	**persentase penanganan pengaduaan tentang kasus lingkungan yg diselesaikan**		**100%**	5000000	DAUM		

	Keg. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kota	Persentase penanganan pengaduan ttg kasus ling yg diselesaikan		100%	5000000	DAUM	Persentase penanganan pengaduan ttg kasus ling yg diselesaikan		100%	5000000	DAUM		
	Sub. Keg. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang tindaklanjuti/Ditangani		7 dok	5000000	DAUM	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang tindaklanjuti/Ditangani		7 dok	5000000	DAUM		
	Prog. Pengelolaan Persampahan	**Terlaksananya pengelolaan sampah**		**20%**	**5510997500**	**DAUM**	**Terlaksanaanya pengelolaan sampah**		**20%**	**559719100 0**	**DAUM**	**86193500**	
	Keg. Pengelolaan Sampah	persentase pengelolaan sampah yang dikelola TPA		100%	5462397500	DAUM	persentase pengelolaan sampah yang dikelola TPA			5548591000			
	Sub. Keg. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		1 dok	9975000	DAUM	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		1 dok	9975000	DAUM		
	Sub. Keg. Penanganan sampah melalui	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut,		36500 Ton	5298230500	DAUM	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan		36500 Ton	5384424000	DAUM	86193500	

	pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah	Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						
	Sub. Keg. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		8 kel	10025000	DAUM	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		8 kel	10025000	DAUM		
	'Sub. Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		14 unit	144167000	DAUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan		14 unit	144167000	DAUM		

							Akhir						
	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetap					Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetap						
	Keg.Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Persampahan yang dikelola sesuai dengan ketentuan		100%	48600000	DAUM	Persentase Persampahan yang dikelola sesuai dengan ketentuan		100%	48600000	DAUM		
	'Sub. Keg. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja					Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja						
	'Sub. Keg. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah		1 lap	48600000	DAUM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan		1 lap	48600000	DAUM		

		Kabupaten/Kota					Sampah Kabupaten/Kota						

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah dokumen rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026 juga untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati terpilih serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai dasar dan acuan OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 dan juga mengevaluasi hasil Rencana kerja OPD sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2024 yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN. Dengan disusunnya Dokumen Rencana Kerja ini maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Oleh karena arah kebijakan yang ditempuh dalam mewujudkan kualitas fungsi lingkungan yang lestari dan berkelanjutan, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah, sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara bijaksana ;
3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten ;
4. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
5. Peningkatan kinerja Petugas dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada ;
6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan ;
7. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah ;
8. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyangga paru-paru kota;
9. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk memenuhi proporsi 30 % dari luas wilayah perkotaan (Publik 20% dan Privat 10%).

10. Harapan kami dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja OPD dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bangkalan, Juli 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGKALAN

ANANG YULIANTO HARI PURNOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.197607141994121001

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan acuan perencanaan PD selama satu Tahun dan merupakan penjabaran per Tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan factor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Bangkalan, 05 Agustus 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ZAKARIYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199303 1 012

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD), RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Proses Penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan 2024 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja 2024 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta evaluasi kinerja di tahun 2023 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2024-2026 dan RKPD.
4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi aplikasi SIAK dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan

penerbitan dokumen kependudukan yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai bagi masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2024 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daaerah dan Pencapaian Renstra PS s/d Tahun 2024

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2024.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester 1 Tahun 2024,

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.3. Matrik Rancangan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2024,

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daaerah dan Pencapaian Renstra PS s/d Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1 Berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020										
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penyususnan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	9 Dok	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	3 Dok	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	36 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100	12 Dok	36 Dok	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap							

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	145 Org	50 Org	50 Org	50 Org	100	50 Org	145 Org	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Org							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	3 Lap	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	198 Lap	66 Lap	66 Lap	66 Lap	100	66 Lap	198 Lap	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	66 Lap							
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	14 Lap	6 Lap	7 Lap	7 Lap	100	7 Lap	14 Lap	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Lap							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	177 Org	135 Org	21 Org	21 Org	61	135 Org	156 Org	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	6 Unit	
		Jumlah Blanko Pelayanan administrasi Akta Kelahiran yang diadakan	172.700 Lbr/Set/ Buku	172.700 Lbr/Set/ Buku				172.700 Lbr/Set/ Buku	172.700 Lbr/Set/ Buku	
		Jumlah jenis dokumen Kependudukan selain	3 Jenis	3 Jenis				3 Jenis	3 Jenis	

		blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang diadakan								
		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Bahan/Material Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	4 Jenis	4 Jenis				4 Jenis	4 Jenis	
		Jumlah Peralatan Penunjang Perekaman dan Pencetakan Dokumen Kependudukan	2 Jenis	2 Jenis				2 Jenis	2 Jenis	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Unit	3 Unit	-			3 Unit	6 Unit	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16 Unit	2 Unit	7 Unit	7 Unit	100	2 Unit	11 Unit	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket							
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	3 Jenis	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	33	1 Jenis	1 Jenis	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324 Kali	94 Kali	120 Kali	98 Kali	82	94 Kali	286 Kali	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%			100%	100%	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebel yang diadakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	100	-	5 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Unit	5 Unit	8 Unit	-	100	-	5 Unit	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit							
	Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	3 Jenis	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap							
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	9 Jenis	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap							

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	15 Jenis	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	39 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	39 Unit	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	57 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	95	19 Unit	57 Unit	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit							
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	
	Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	3 Lap	
	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	85%	85%	87%	87%		85%	85%	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	95%	95%	96%	96%		95%	95%	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pendataan Penduduk		40 Org				40 Org		
		Jumlah jenis Data Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	100		1 Jenis	
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dok							
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Bahan/Material Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	4 Jenis	4 Jenis				4 Jenis	4 Jenis	
		Jumlah jenis dokumen pendaftaraan penduduk yang diterbitkan	5 Jenis		5 Jenis				5 Jenis	
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dok							

	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pendafataran penduduk yang tercetak	95%	95%				95%	95%	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah jenis dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang diadakan	6 Jenis	3 Jenis			100	3 Jenis	6 Jenis	
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dok							
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaraan penduduk yang diselenggarakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis			1 Jenis	1 Jenis	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Pindah Datang Kependudukan	135 Org	60 Org				60 Org	120 Org	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	30 Kali		12 Kali	12 Kali	100		24 Kali	
		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	161 Org							
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akte	70%	70%	73%			70%	70%	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	95%	95%	96%			95%	95%	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Blanko Pelayanan administrasi Akta Kelahiran yang diadakan	172.700 Lbr/Set/ Buku	172.700 Lbr/Set/ Buku				172.700 Lbr/Set/ Buku	172.700 Lbr/Set/ Buku	
		Jumlah jenis dokumen pencatatan sipil yang tercatat			1 Jenis	1 Jenis	100			
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis kegiatan pencataan sipil yang diselenggarakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis			1 Jenis	1 Jenis	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil	120 Org	60 Org				60 Org	120 Org	
		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	150 Org							
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Jumlah lokasi yang didatangi terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	10 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	100		4 Lokasi	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Lap							

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali	1 Kali	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Pencatatan Sipil	72 Org	24 Org	24 Org	24 Org	100	24 Org	72 Org	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	95%	95%	96%	96%		95%	95%	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga pengguna pemanfaatan data kependudukan yang melakukan kerjasama	20 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	100		10 Lembaga	
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependuduka	1 Dokumen							
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Data yang Diinventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	2 Jenis	
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan							
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100		1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen							
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi dan Perangkat Pendukung SIAK	95%	95%	95%			95%	95%	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peralatan SIAK yang diadakan	25 Jenis	1 Jenis	12 Jenis	11 Jenis	73.33	1 Jenis	25 Jenis	
		Jumlah Paket Fitur Aplikasi Pelayanan Publik yang diadakan			1 Paket Fitur Aplikasi					
		Jumlah Jasa Pemeliharaan SIAK yang dilaksanakan	37 Unit	2 Unit	15 Unit			2 Unit	2 Unit	

		Jumlah laporan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan				1 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Laporan							
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Laporan							
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali	1 Kali	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Tenaga Pengelola SIAK yang dilatih	103 Org	33 Org	30 Org	30 Org	100	33 Org	96 Org	
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 Laporan							
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan yang diadakan	15 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	10 Jenis	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil yang diadakan	927 Buku	281 Buku	323 Buku	323 Buku	100	281 Buku	885 Buku	
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	320 Dok							

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester 1 Tahun 2024

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini Tabel mengenai Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester 1 Tahun 2024 :

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I tahun 2024

No	IKK Outcome	Realisasi					Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Ket
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	Perekaman KTP elektronik	83,18%	84,88%	92,41%	95,58%	99,60%			
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	10,84%	34,49%	33,63%	34,82%	35,63%			
3	Kepemilikan akta kelahiran	67,47%	96,56%	91,07%	92,09%	93,01%			
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%			
5	Penerbitan akta perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%			
6	Penerbitan akta perceraian	100%	100%	100%	100%	100%			
7	Penerbitan akta kematian	100%	100%	100%	100%	100%			
8	Penyajian data kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja tahun 2024 Perangkat Daerah

Sesuai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan Tahun 2024 adalah :

a. Tujuan :

"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil "

b. Sasaran :

"Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil "

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah

TUJUAN				SASARAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2024	2024			2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	91.50	91.50	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	74.8	74.8	
					Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99.6	99.6	
					Persentase pengelolaan dan pemanfaatan data Kependudukan	100	100	
				Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	Indeks kepuasan Masyarakat	85	85	
					Nilai SAKIP	61	61	

3.2 Matrik Rancangan Perubahan Renja Kerja (Renja) Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah	Kab. Bangkalan				Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah	Kab. Bangkalan					
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan				Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan					
2.12.01.2.01.01	Penyususunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	3 Dok	1.897.300	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	3 Dok	1.897.300	DAU	-	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kab. Bangkalan				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dok	392.550	DAU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dok	392.550	DAU	-	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dok	339.600	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dok	339.600	DAU	-	

2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	2 Dok	1.162.250	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	2 Dok	1.162.250	DAU	-	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	12 Dok	1.278.050	DAU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	12 Dok	1.278.050	DAU	-	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Bangkalan	100%		DAU	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Bangkalan	100%		DAU	-	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	50 Org	4.255.603.464	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	50 Org	4.244.509.991	DAU	- 11.093.473	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	1 Lap	2.630.700	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	1 Lap	2.630.700	DAU	-	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	66 Lap	1.143.800	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	66 Lap	1.143.800	DAU	-	
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Bangkalan	100%		DAU	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Bangkalan	100%		DAU	-	
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	7 lap	467.714	DAU	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	7 lap	467.714	DAU	-	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan	100%			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan	100%			-	

2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas besrta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangkalan				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	499.121	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	499.121	DAU	-	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	257.963.250	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	257.963.250	DAU	-	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	554.950	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	554.950	DAU	-	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	3.575.000	DAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	3.575.000	DAU	-	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	3.712.404	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	3.712.404	DAU	-	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Dok	1.620.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Dok	1.620.000	DAU	-	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	48 Lap	75.940.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	48 Lap	75.940.000	DAU	-	
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangkalan				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan				-	

2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bangkalan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bangkalan				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan	3 Unit	25.719.800	DAU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan	3 Unit	25.719.800	DAU	-	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangkalan				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	2 Lap	3.800.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	2 Lap	3.800.000	DAU	-	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Lap	121.320.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Lap	121.320.000	DAU	-	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Lap	1.103.720.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Lap	1.103.720.000	DAU	-	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan	100			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan	100			-	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan	20 Unit	46.315.410	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan	20 Unit	46.315.410	DAU	-	

2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangkalan	50 Unit	13.365.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangkalan	50 Unit	13.365.000	DAU	-	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.013	Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun	Kab. Bangkalan				Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun	Kab. Bangkalan				-	
2.12.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bangkalan				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bangkalan				-	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Kab. Bangkalan				Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Kab. Bangkalan				-	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Kab. Bangkalan				Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Kab. Bangkalan				-	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan AdministrasiKependudukan	Kab. Bangkalan	1 Dok	14.221.700	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan AdministrasiKependudukan	Kab. Bangkalan	1 Dok	14.221.700	DAU	-	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	5 Dok	671.578.600	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	5 Dok	671.578.600	DAU	-	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pendafataran penduduk yang tercetak	Kab. Bangkalan				Persentase jumlah dokumen pendafataran penduduk yang tercetak	Kab. Bangkalan				-	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Bangkalan	4 Dok	63.990.000	DAU	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Bangkalan	4 Dok	63.990.000	DAU	-	

2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaraan penduduk yang diselenggarakan	Kab. Bangkalan				Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaraan penduduk yang diselenggarakan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi PendaftaranPenduduk	Kab. Bangkalan				Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi PendaftaranPenduduk	Kab. Bangkalan				-	
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	161,000 Orang	45.000.000	DAU	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	161,000 Orang	45.000.000	DAU	-	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan				Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan				-	
2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis TerkaitPendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan				Jumlah Laporan bimbingan Teknis TerkaitPendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan				-	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akte	Kab. Bangkalan				Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akte	Kab. Bangkalan				-	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	Kab. Bangkalan				Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bangkalan	1 Dok	106.467.901	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bangkalan	1 Dok	106.467.901	DAU	-	
2.12.03.2.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait Pencatatan Sipil.	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Kab. Bangkalan				Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Kab. Bangkalan				-	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis kegiatan pencataan sipil yang diselenggarakan	Kab. Bangkalan				Jumlah jenis kegiatan pencataan sipil yang diselenggarakan	Kab. Bangkalan				-	

2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	150 Orang	6.831.100	DAU	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	150 Orang	6.831.100	DAU	-	
2.12.03.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan				-	
2.12.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan yang Telah Dilakukan	Kab. Bangkalan	1 Lap	2.038.500	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan yang Telah Dilakukan	Kab. Bangkalan	1 Lap	2.038.500	DAU	-	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan				Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	Kab. Bangkalan				Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan DataKependudukan	Kab. Bangkalan	1 Dok	17.625.500	DAU	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan DataKependudukan	Kab. Bangkalan	1 Dok	17.625.500	DAU	-	
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untukKepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bangkalan	1 Lap	15.487.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untukKepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bangkalan	1 Lap	15.487.000	DAU	-	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	Kab. Bangkalan				Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	Kab. Bangkalan				-	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Kab. Bangkalan	1 dok	9.613.000	DAU	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Kab. Bangkalan	1 dok	9.613.000	DAU	-	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Perangkat & Sarana Pendukung	Kab. Bangkalan				Persentase Pengelolaan Perangkat & Sarana Pendukung	Kab. Bangkalan				-	

2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	18 Lap	7.301.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	18 Lap	7.301.000	DAU	-	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	18 Lap	15.000.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	18 Lap	15.000.000	DAU	-	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan DataKependudukan	Kab. Bangkalan	4 Lap	7.000.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan DataKependudukan	Kab. Bangkalan	4 Lap	7.000.000	DAU	-	
2.12.05	Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	Kab. Bangkalan				Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	Kab. Bangkalan				-	
2.12.05.2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	Kab. Bangkalan				Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	Kab. Bangkalan				-	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan				Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan				-	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan danProyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Bangkalan	320 Buku	13.490.000	DAU	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan danProyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Bangkalan	320 Buku	13.490.000	DAU	-	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance.

Rencana program dan kegiatan serta lokasi pada rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dan selaras dengan RKPD Tahun 2024. Begitu pula dengan total pagu program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dan selaras dengan RKPD Tahun 2023.

Pencantuman Indikator serta Target Kinerja pada Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah konsisten dengan RKPD Tahun 2024.

Program dan Kegiatan yang ada telah selaras dengan tujuan pada Dinas Kependudukan dan Pencapil yaitu meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dalam pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sasaran yang dimiliki Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan diharapkan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja sehingga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT. atas karunia, taufik, hidayah dan inayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Renja (Rencana Kerja) Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Dokumen Renja Perubahan ini merupakan salah satu mata rantai dari mekanisme perencanaan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai bagian dari penyelenggaraan Kepemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Tentu saja dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di tahun 2024.

Mudah – mudahan Allah SWT. Selalu memberikan bimbingan dan petunjuk yang benar sehingga Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini menjadikan manfaat bagi kita dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai aparatur penyelenggaraan kegiatan pembangunan pada Pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, perlu disampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyusun dokumen ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, disampaikan ucapan "Wabillahi Taufik Walhidayah' , Wassalammualaikum Wr. Wb.

Bangkalan, 30 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ISMET EFFENDI, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681220 198809 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Renja Perubahan PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD. Dalam konteks Rencana Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat , DINAS PMD Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024. Rencana kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas PMD didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam dokumen rencana kerja pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja PD tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten BANGKALAN adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 seri E);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 seri E);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 25 seri D)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah menyediakan acuhan arah kebijakan pembangunan secara umum akan di laksanakan di Dinas PMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pelaksanaan oleh Aparatur Dinas PMD Kabupaten Bangkalan, sehingga terwujud senergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas PMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas PMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja, proses penyusunan RENJA, Keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraiakan apa yang menjadi landasan hukum didalam penyusunan RENJA DINAS PMD Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguaraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi Dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.

3.2 Matrik Rancanga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

DPMD

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Capaian Kinerja Dinas PMD Tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan Program/Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dengan target yang ditetapkan pada dalam Renstra. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja awal tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan. Secara kuantitatif berhasil memenuhi target kinerja 80,56% .dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 sesuai dengan rencana strategis 2013 – 2018, telah dapat dicapai seluruhnya yang dititikberatkan pada program utama Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa akan diuraikan dalam bagian ini meliputi :

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Ada dan Masyarakat Hukum Adat
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja pada akhir Renstra 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 dimana pada tabel tersebut telah dijabarkan nilai yang telah dicapai. Secara umum diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 37.64% dari akumulasi 5 Program dikarenakan 3 tahun terakhir telah terjadi refocusing karena Covid. Dan pada tahun 2024 capaian kinerja sampai pada semester I ialah sebesar 20,70% dari 5 Program yang sedang berjalan dikarenakan masih tahap awal dan kegiatan banyak dilaksakan pada triwulan ke 4.

Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas PMD tahun 2022 (n-2) dapat disimak dalam penjelasan dibawah ini:

a. Dari 4 Program 23 Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada publik (Urusan pemberdayaan) terdapat capaian kinerja yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan:
b. Realisasi program yang telah memenuhi target hasil/kinerja yang direncanakan rata-rata mencapai angka 80,56 % Meliputi 4 sasaran.

No.	*Uraian Sasaran*	*Juml Keg.*	*Target Rp..*	*Realisasi Rp.*	*% Capaian Target*
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	663.038.897	554.289.217	84%
2	Program Penataan Desa	1	164.680.000	164.680.000	100%
3	Program Kerjasama Desa	1	57.592.400	57.592.400	100%
4	Program Administrasi Pemerintahan	1	2,690,256,950	1.301.980.400	48%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7	5.299.136.849	5.070.653.076	96%
Jumlah		11	*8.874.705.096*	*7.149.195.093*	*80,56%*

c. Faktor-faktor terpenuhinya target hasil/kinerja yang direncanakan rata-rata mencapai angka 80.56% Meliputi 5 sasaran didasarkan pada realisasi program dan kegiatan dimana pelaksanaan sesuai mekanisme alur tahapan rencana kerja SKPD serta kebijakan-kebijakan pengambilan keputusan tentang pemberdayaan masyarakat.
d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas PMD secara langsung terwujud dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat peran kelompok masyarakat maupun peningkatan wawasan aparatur desa yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan , kemandirian masyarakat desa dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan serta pengelolaan pemerintahan desa.
e. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan APBD jika terjadi kesalahan usulan program/kegiatan atau dengan pergeseran anggaran antar

kode rekening maupun antar kegiatan sesuai dengan program. Selain itu untuk meningkatkan realisasi target program ditahun berjalan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas PMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 (n-2) disesuaikan dengan Renstra baik dari program/kegiatan sasaran, target, indikator serta anggaran yang masih bertumpu pada indikator tahun sebelumnya. Selanjutnya prioritas kegiatan ditahun 2022 yang sudah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis 2018-2023antara lain :

1. Keg. Pelatihan Pengembangan BUMDes.
2. Keg. Pembinaan Pokmas UEM.
3. Keg. Fasilitasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Keg. Fasilitasi Partisipatif Perencanaan Pembangunan Desa.

Upaya ini diwujudkan untuk membangun kemandirian masyarakat Desa Secara Ekonomi serta peningkatan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Hasil prakiraan evaluasi capaian pada Renja tahun 2022 Dinas PMD capaian berkisar 80-90% meliputi :

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
2. Program Penataan Desa.
3. Program Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Selain program-program teknis tersebut, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa maka juga ditetapkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan yang merupakan program pendukung yang di dalamnya berisi kegiatan pelayan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023				Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1	Urusan																
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**%**	**85**	**%**	**100**	**%**	**72**	**%**	**72**	**%**	**100**	**%**	**86**	**%**	**86%**
		I ndeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	**100**										**100**		**35**		**35**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**99**	**%**	**100**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100**	**%**	**99**	**%**	**99%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun															

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	%	3	Dokumen	7	Dokumen	350
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun															
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	%	1	Dokumen	2	dokumen	200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun															
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	%	1	Dokumen	2	dokumen	200
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun															

		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	0	Dokumen	1	dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun															
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	0	Dokumen	0	dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	laporan	0	laporan	0	%	1	Laporan	2	laporan	200
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun															
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	8	laporan	8	laporan	8	laporan	100	%	8	Laporan	24	laporan	300

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**97**	**%**	**100**	**%**	**93**	**%**	**93**	**%**	**100**	**%**	97	**%**	**97%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	orang/bln	43	orang/bulan	47	orang/bulan	43	orang/bulan	91,489	%	44	Orang/Bln	130	Orang/Bln	295
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	Laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	0	%	0	Laporan	0	laporan	0
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun															
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	Laporan	0	Laporan	0	laporan	0	laporan	0	%	0	Laporan	0	Laporan	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun															

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	%	1	Laporan	3	Laporan	300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun															
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	18	laporan	18	laporan	18	laporan	100	%	18	Laporan	54	Laporan	300
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Desa	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun															
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Laporan	1	laporan	1	dokumen	1	laporan	100	%	0	Dokumen	2	dokumen	0
	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD yang tersusun															

		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	0	Laporan	0	laporan	0	laporan	0	%	0	Laporan	0	Laporan	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	Laporan	14	Laporan	14	laporan	0	laporan	0	%	14	Laporan	28	Laporan	200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**50**	**%**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**100**	**%**	**50**	**%**	**50%**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya															
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	0	paket	0	paket	0	paket	0	%	1	Paket	1	Paket	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Dokumen	1	Dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	%	0	Dokumen	1	dokumen	0

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun															
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	1	Dokumen	2	orang	200
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	orang	0	orang	3	orang	0	orang	0	%	2	Orang	2	orang	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	%	0	Orang	0	orang	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**93**	**%**	**100**	**%**	**97**	**%**	**97**	**%**	**100**	**%**	**97**	**%**	**97%**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	20	Paket	20	paket	20	Unit	100	%	2	Paket	42	Paket	2100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	5	Paket	5	paket	5	paket	100	%	5	Paket	15	Paket	300
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	4	Paket	4	paket	4	paket	100	%	1	Paket	9	Paket	900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	6	Paket	6	paket	6	paket	100	%	1	Paket	13	Paket	1300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	12	Paket	12	paket	12	paket	100	%	6	Paket	30	Paket	500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	0	Dokumen	0	dokumen	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu															
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	2	Laporan	2	laporan	2	laporan	100	%	4	Laporan	8	Laporan	200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	36	laporan	36	laporan	36	laporan	100	%	12	Laporan	84	Laporan	700
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun															

		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	0	Dokumen	0	dokumen	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**98**	**%**	**100**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100**	**%**	**99**	**%**	**99%**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan															
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	unit	2	Unit	2	unit	2	unit	100	%	2	Unit	6	Unit	300
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan															
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	paket	0	Paket	0	paket	0	paket	0	%	0	Paket	0	Paket	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan															
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	0	Unit	0	unit	0	unit	0	%	0	Unit	0	unit	0

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan															
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	0	Unit	0	unit	0	unit	0	%	0	Unit	0	unit	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**%**	**94**	**%**	**100**	**%**	**98**	**%**	**98**	**%**	**100**	**%**	**97**	**%**	**97%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	7	laporan	7	laporan	7	laporan	100	%	2	Laporan	16	Laporan	800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	4	Laporan	4	laporan	4	laporan	100	%	4	Laporan	12	Laporan	300

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	4	Laporan	4	laporan	4	laporan	100	%	1	Laporan	9	Laporan	900
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	Laporan	7	laporan	7	laporan	7	laporan	100	%	7	Laporan	21	Laporan	300
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**84**	**%**	**100**	**%**	**84**	**%**	**84**	**%**	**100**	**%**	**89**	**%**	**89%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan															

		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	21	Unit	14	unit	21	unit	150	%	21	Unit	63	Unit	300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan															
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	unit	0	Unit	0	unit	0	unit	0	%	0	unit	0	unit	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara															
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	unit	0	Unit	0	unit	0	unit	0	%	2	unit	2	unit	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi															

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	1	Unit	1	unit	1	unit	100	%	2	Unit	4	unit	200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi															
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	Unit	0	unit	0	unit	0	%	1	unit	1	unit	100
2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan**	**25**	**%**	**10**	**%**	**5**	**%**	**5**	**%**	**100**	**%**	**17**	**%**	**11**	**%**	**44%**

2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Lembaga Kemasyarakatan, yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan**	**24**	**lembaga**	**10**	**%**	**5**	**%**	**5**	**%**	**100**	**%**	**17**	**%**	**11**	**%**	**46%**
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang teridentifikasi dan terinventarisir															
		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1	Dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	1	dokumen	1	dokumen	100
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Pos Yandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM danKarang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan															

		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Dokumen	1	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	Dokumen	3	dokumen	300
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pelatihan pengurus Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan															
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	lembaga	6	Lembaga	6	lembaga	6	lembaga	100	%	6	Lembaga	18	lembaga	300

2.13.05.2.01.04	Fasilitasi penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan															
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	0	dokumen	2	dokumen	0
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pokmas yang di Inventarisasi dan di Fasilitasi Pengembangan UEMnya															
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3	Dokumen	1	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	3	Dokumen	4	dokumen	133

2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah pemberdayaan bagi pemerintah desa dlm pemanfaatan TTG															
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	1	Laporan	1	laporan	1	laporan	100	%	1	Laporan	3	Laporan	300
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pembinaan bagi pemerintahan desa dan LKDesa serta LADesa															
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan	0	Laporan	0	laporan	0	laporan	0	%	1	laporan	1	Laporan	100
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat desa	Jumlah Desa yg Linmasnya diidentifikasi, diinventarisasi dan difasilitasi															
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	Dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	1	dokumen	1	dokumen	100

2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pemberdayaan PKK Desa															
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	18	Dokumen	1	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	18	Dokumen	20	dokumen	111
2.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Jumlah Kawasan Pedesaan Hasil Kerjasama antar Desa yang di Bina**	**1**	**kawasan**	**1**	**%**	**1**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**1**	**kawasan**	**1**	**%**	**100%**
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**	**Persentase desa yang difasilitasi**	**1**	**kawasan**	**1**	**%**	**1**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**1**	**kawasan**	**1**	**%**	**100%**
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan															
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2	Dokumen	**0**	dokumen	0	dokumen	0	%	1	Dokumen	3	dokumen	300
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga															

		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2	Dokumen	**0**	dokumen	0	dokumen	0	%	1	dokumen	3	dokumen	300
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk															
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	%	1	dokumen	2	dokumen	200
2.13.02	**Program Penataan Desa**	**Persentase desa yang ditata**	**0.37**	**%**	**5**	**%**	**5**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**0.37**	**%**	**5**	**%**	**14%**
2.13.02.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase desa yang ditata penyelenggaraan pemerintahannya**	**1**	**Desa**	**5**	**%**	**5**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**1**	**%**	**5**	**%**	**500%**
2.13.02.01.01	Pembentukan , Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pembentukan , Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desanya															
		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0	desa	0	Desa	0	desa	0	desa	0	%	0	Desa	0	desa	0
2.13.02.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa Yang difasilitasi tata wilayahnya															
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0	Desa	0	Desa	0	desa	0	desa	0	%	0	Desa	0	desa	0

2.13.02.01 .03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah dokumen penataan kewenangan desa Yang tersusun															
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	1	Desa	0	Desa	1	desa	0	desa	0	%	1	Desa	1	desa	100
2.13.02.01 .04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah dokumen penamaan dan kode desa Yang tersusun															
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0	desa	0	Desa	0	desa	0	desa	0	%	0	Desa	0	desa	0
2.13.02.01 .05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang di identifikasi															
		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	unit	0	Unit	0	unit	0	unit	0	%	0	unit	0	unit	0
2.13.02.01 .06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi															

		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1	Unit	10	Unit	0	unit	0	unit	0	%	1	unit	11	unit	1100
2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**20.14 %**	**%**	**12**	**%**	**5**	**%**	**5**	**%**	**100**	**%**	**18.68**	**%**	**17**	**%**	**84%**
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**	**55**	**Desa**	**12**	**%**	**5**	**%**	**5**	**%**	**100**	**%**	**51**	**desa**	**17**	**%**	**31%**
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Pemerintahan Desanya															
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Dokumen	0	Douumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	1	dokumen	1	dokumen	100
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi Produk Hukumnya															
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	0	dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	dokumen	0

2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunannya															
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0	Dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	dokumen	0
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Di fasilitasi pPengelolaan Keuangan Desanya															
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	273	Dokumen	273	Dokumen	273	dokumen	273	dokumen	100	%	273	Dokumen	819	Dokumen	300
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina															
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	273	orang	136	orang	136	orang	136	orang	100	%	273	Orang	545	orang	200
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desanya															
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0	Laporan	0	Laporan	0	laporan	0	laporan	0	%	0	laporan	0	laporan	0

2.13.04.2.01.07	Evaluasi Dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa yang dilaksanakan															
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi danPengawasan Peraturan Desa	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	dokumen	0
2.13.04.2.01.08	Pembinaan Dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang dibina dan diberdayakan															
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	3	dokumen	300
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desanya															
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	Dokumen	3	Dokumen	3	laporan	3	desa	100	%	0	laporan	6	Laporan	0

2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desanya															
		Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	Laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	0	%	0	laporan	0	Laporan	0
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa dan kelurahan yang difasilitasi update profilnya															
		Jumlah Dokumen Profil Desa	281	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	%	281	dokumen	281	dokumen	100
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi Manajemen Pemerintahannya															
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	0	Dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	dokumen	0
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi pengelolaan asetnya															
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1	Dokumen	0	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	%	1	dokumen	1	dokumen	100
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah desa yang Anggota BPD dibina Peningkatan Kapasitasnya															

		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	273	orang	273	Orang	0	orang	0	orang	0	%	273	Orang	546	orang	200
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang diFasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desanya															
		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	1	Desa	0	Desa	0	desa	0	desa	0	%	1	desa	1	desa	100
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pembinaan Laporan Kepala desanya															
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	0	Desa	0	Desa	0	desa	0	desa	0	%	0	Desa	0	desa	0
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang difasiltasi Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa															
		Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	0	desa	0	Desa	0	desa	0	desa	0	%	0	Desa	0	desa	0

2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Di evaluasi Perkembangannya															
		Jumlah Desa dan kelurahan yang di fasilitasi keikutsertaan lombanya															
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	%	1	Dokumen	5	Dokumen	500

DPMD

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan semester 1 Tahun 2024

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika Ada Perubahan Target)
				2020	2021	2022	2023			
	Persentase Desa yang meningkat statusnya			6.96	9.89	20.15	21.98	24.18	26.01	Target Perubahan Renja Tahun 2024 berubah dikarenakan realisasi Target Renstra 2024 sudah tercapai
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dan Berkontribusi dalam pembangunan Desa									
	Jumlah Kawasan Ekonomi Desa Yang Produktif									
	Indeks Kepuasan Masyarakat									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah						61.40			

DPMD

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas PMD

Menghadapi tantangan era digital sekarang ini, banyak muncul isu-isu tentang tidak meratanya proses pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan yang diakibatkan oleh timpangnya pertumbuhan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan serta masih tingginya angka kemiskinan maka pemerintah daerah diharapkan lebih mengutamakan prioritas pembangunan dari desa sesuai cita-cita pemerintah pusat yang mengedepankan pembangunan dari pinggiran dalam hal ini desa.

Dampak dari hal-hal tersebut diatas maka pemerintah daerah wajib mengentaskan desa-desa yang masih masuk kategori sangat tertinggal dan tertinggal di wilayahnya masing-masing guna mendukung penurunan angka kemiskinan. Sesuai amanah undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa dan berbagai peraturan penjabarannya, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi desa guna mencapai kemandirian baik secara ekonomi, pelaksanaan pemerintahan maupun fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan desa.

Guna mencapai tujuan tersebut diatas, maka harus ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang mencakup peningkatan ekonomi desa baik secara kelembagaan maupun kelompok ekonomi kreatif, pelaksanaan fungsi pemerintahan desa secara optimal dan peningkatan keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dalam proses pembangunan desa.

Dari uraian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan menetapkan Tujuan dan Sasaran seperti yang tercantum pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah				Sasaran Perangkat Daerah				Ket
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja Th. 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja Th. 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Status Kemandirian Desa	Persentase Desa yang meningkat statusnya	24,18%	24,18%	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Peningkatan Pengelolaan Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan desa yang Aktif dan Berkontribusi dalam Pembangunan Desa	84,33%	84,33%	
				Meningkatnya Ekonomi Desa melelui Pembangunan Kawasan	Jumlah Kawasan Ekonomi Desa yang produktif	1 Kawasan	1 Kawasan	
				Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61	61	

Tabel 3.2 Matrik Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Tahun 2024					Perubahan Renja 2024						Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12	13 = 11- 6	14
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**4.888.931.202**	**APBD**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**4.771.076.772**	**APBD**	**(117.854.430)**	Pengurangan Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun tepat waktu**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**6.974.250**	**APBD**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun tepat waktu**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**720.000**	**APBD**	**(6.254.250)**	Pengurangan Anggaran
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	3 Dokumen	2.497.050	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	3 Dokumen	720.000	APBD	(1.777.050)	Pengurangan Anggaran

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	1.119.300	APBD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	-	APBD	(1.119.300)	Pengurangan Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	1.119.300	APBD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	-	APBD	(1.119.300)	Pengurangan Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	1 laporan	1.119.300	APBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	1 laporan	-	APBD	(1.119.300)	Pengurangan Anggaran
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	8 Laporan	1.119.300	APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	8 Laporan	-	APBD	(1.119.300)	Pengurangan Anggaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**3.653.401.852**	APBD	**Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**3.996.550.553**	APBD	**343.148.701**	**Penambahan Anggaran**

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	44 Orang/Bln	3.649.230.902	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	44 Orang/Bln	3.995.830.553	APBD	346.599.651	Penambahan Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	1 Laporan	1.284.600	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	1 Laporan	-	APBD	(1.284.600)	Pengurangan Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	18 Laporan	2.886.350	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	18 Laporan	720.000	APBD	(2.166.350)	Pengurangan Anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**1.154.500**	APBD	**Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**192.100**	APBD	**(962.400)**	**Pengurangan Anggaran**

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	14 Laporan	1.154.500	APBD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	14 Laporan	192.100	APBD	(962.400)	Pengurangan Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**33.415.000**	APBD	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**900.000**	APBD	**(32.515.000)**	**Pengurangan Anggaran**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangkalan	1 paket	29.700.000	APBD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangkalan	1 paket	-	APBD	(29.700.000)	Pengurangan Anggaran
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	1.215.000	APBD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	900.000	APBD	(315.000)	Pengurangan Anggaran
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bangkalan	2 orang	2.500.000	APBD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bangkalan	2 orang	-	APBD	(2.500.000)	Pengurangan Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bangkalan	**100%**	**102.575.950**	APBD	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bangkalan	**100%**	**61.058.150**	APBD	**(41.517.800)**	**Pengurangan Anggaran**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	1.999.000	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	330.500	APBD	(1.668.500)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	5 Paket	21.718.250	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	5 Paket	11.703.250	APBD	(10.015.000)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	1.589.700	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	691.800	APBD	(897.900)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	7.128.000	APBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	1.584.000	APBD	(5.544.000)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	6 Paket	11.880.000	APBD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	6 Paket	5.722.600	APBD	(6.157.400)	Pengurangan Anggaran
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bangkalan	4 Laporan	4.025.000	APBD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bangkalan	4 Laporan	1.750.000	APBD	(2.275.000)	Pengurangan Anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	12 Laporan	54.236.000	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	12 Laporan	39.276.000	APBD	(14.960.000)	Pengurangan Anggaran

2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Di evaluasi Perkembangannya															
		Jumlah Desa dan kelurahan yang di fasilitasi keikutsertaan lombanya															
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	%	1	Dokumen	5	Dokumen	500

DPMD

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan semester 1 Tahun 2024

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika Ada Perubahan Target)
				2020	2021	2022	2023			
	Persentase Desa yang meningkat statusnya			6.96	9.89	20.15	21.98	24.18	26.01	Target Perubahan Renja Tahun 2024 berubah dikarenakan realisasi Target Renstra 2024 sudah tercapai
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dan Berkontribusi dalam pembangunan Desa									
	Jumlah Kawasan Ekonomi Desa Yang Produktif									
	Indeks Kepuasan Masyarakat									
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah						61.40			

DPMD

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas PMD

Menghadapi tantangan era digital sekarang ini, banyak muncul isu-isu tentang tidak meratanya proses pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan yang diakibatkan oleh timpangnya pertumbuhan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan serta masih tingginya angka kemiskinan maka pemerintah daerah diharapkan lebih mengutamakan prioritas pembangunan dari desa sesuai cita-cita pemerintah pusat yang mengedepankan pembangunan dari pinggiran dalam hal ini desa.

Dampak dari hal-hal tersebut diatas maka pemerintah daerah wajib mengentaskan desa-desa yang masih masuk kategori sangat tertinggal dan tertinggal di wilayahnya masing-masing guna mendukung penurunan angka kemiskinan. Sesuai amanah undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa dan berbagai peraturan penjabarannya, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi desa guna mencapai kemandirian baik secara ekonomi, pelaksanaan pemerintahan maupun fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan desa.

Guna mencapai tujuan tersebut diatas, maka harus ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang mencakup peningkatan ekonomi desa baik secara kelembagaan maupun kelompok ekonomi kreatif, pelaksanaan fungsi pemerintahan desa secara optimal dan peningkatan keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dalam proses pembangunan desa.

Dari uraian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan menetapkan Tujuan dan Sasaran seperti yang tercantum pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah				Sasaran Perangkat Daerah				Ket
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja Th. 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja Th. 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Status Kemandirian Desa	Persentase Desa yang meningkat statusnya	24,18%	24,18%	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Peningkatan Pengelolaan Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan desa yang Aktif dan Berkontribusi dalam Pembangunan Desa	84,33%	84,33%	
				Meningkatnya Ekonomi Desa melelui Pembangunan Kawasan	Jumlah Kawasan Ekonomi Desa yang produktif	1 Kawasan	1 Kawasan	
				Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61	61	

Tabel 3.2 Matrik Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Tahun 2024					Perubahan Renja 2024						Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12	13 = 11- 6	14
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**4.888.931.202**	**APBD**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Bangkalan**	**100**	**4.771.076.772**	**APBD**	**(117.854.430)**	Pengurangan Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun tepat waktu**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**6.974.250**	**APBD**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun tepat waktu**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**720.000**	**APBD**	**(6.254.250)**	Pengurangan Anggaran
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	3 Dokumen	2.497.050	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	3 Dokumen	720.000	APBD	(1.777.050)	Pengurangan Anggaran

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	1.119.300	APBD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	-	APBD	(1.119.300)	Pengurangan Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	1.119.300	APBD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	-	APBD	(1.119.300)	Pengurangan Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	1 laporan	1.119.300	APBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	1 laporan	-	APBD	(1.119.300)	Pengurangan Anggaran
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	8 Laporan	1.119.300	APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	8 Laporan	-	APBD	(1.119.300)	Pengurangan Anggaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**3.653.401.852**	APBD	**Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**3.996.550.553**	APBD	**343.148.701**	**Penambahan Anggaran**

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	44 Orang/Bln	3.649.230.902	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	44 Orang/Bln	3.995.830.553	APBD	346.599.651	Penambahan Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	1 Laporan	1.284.600	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	1 Laporan	-	APBD	(1.284.600)	Pengurangan Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	18 Laporan	2.886.350	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	18 Laporan	720.000	APBD	(2.166.350)	Pengurangan Anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**1.154.500**	APBD	**Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**192.100**	APBD	**(962.400)**	**Pengurangan Anggaran**

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	14 Laporan	1.154.500	APBD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	14 Laporan	192.100	APBD	(962.400)	Pengurangan Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**33.415.000**	APBD	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**900.000**	APBD	**(32.515.000)**	**Pengurangan Anggaran**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangkalan	1 paket	29.700.000	APBD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangkalan	1 paket	-	APBD	(29.700.000)	Pengurangan Anggaran
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	1.215.000	APBD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	900.000	APBD	(315.000)	Pengurangan Anggaran
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bangkalan	2 orang	2.500.000	APBD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bangkalan	2 orang	-	APBD	(2.500.000)	Pengurangan Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bangkalan	**100%**	**102.575.950**	APBD	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bangkalan	**100%**	**61.058.150**	APBD	**(41.517.800)**	**Pengurangan Anggaran**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	1.999.000	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	330.500	APBD	(1.668.500)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	5 Paket	21.718.250	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	5 Paket	11.703.250	APBD	(10.015.000)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	1.589.700	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	691.800	APBD	(897.900)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	7.128.000	APBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	1.584.000	APBD	(5.544.000)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	6 Paket	11.880.000	APBD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	6 Paket	5.722.600	APBD	(6.157.400)	Pengurangan Anggaran
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bangkalan	4 Laporan	4.025.000	APBD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bangkalan	4 Laporan	1.750.000	APBD	(2.275.000)	Pengurangan Anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	12 Laporan	54.236.000	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	12 Laporan	39.276.000	APBD	(14.960.000)	Pengurangan Anggaran

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**1.970.050**	APBD	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**145.000**	APBD	**(1.825.050)**	**Pengurangan Anggaran**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Unit	1.970.050	APBD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Unit	145.000	APBD	(1.825.050)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	Kab. Bangkalan	**100%**	**915.130.000**	APBD	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	Kab. Bangkalan	**100%**	**607.583.319**	APBD	**(307.546.681)**	**Pengurangan Anggaran**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	2 Laporan	12.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	2 Laporan	3.900.000	APBD	(8.100.000)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan	4 Laporan	62.488.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan	4 Laporan	50.793.319	APBD	(11.694.681)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Laporan	1.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Laporan	-	APBD	(1.000.000)	Pengurangan Anggaran
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Bangkalan	7 Laporan	839.642.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Bangkalan	7 Laporan	552.890.000	APBD	(286.752.000)	Pengurangan Anggaran

		Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**174.309.600**	APBD	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	Kab. Bangkalan	**100%**	**103.927.650**	APBD	**(70.381.950)**	**Pengurangan Anggaran**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan	21 Unit	168.309.600	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan	21 Unit	103.927.650	APBD	(64.381.950)	Pengurangan Anggaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan	2 Unit	5.000.000	APBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan	2 Unit	-	APBD	(5.000.000)	Pengurangan Anggaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan	1 Unit	1.000.000	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan	1 Unit	-	APBD	(1.000.000)	Pengurangan Anggaran

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pembeerdayaan yang dibina dan aktif**	Kab. Bangkalan	**17,00%**	**189.741.800**	APBD	**Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pembeerdayaan yang dibina dan aktif**	Kab. Bangkalan	**17,00%**	**151.290.000**	APBD	**(38.451.800)**	**Pengurangan Anggaran**

DPMD

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas yang dibina**	Kab. Bangkalan	**12 Lembaga**	**189.741.800**	APBD	**Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas yang dibina**	Kab. Bangkalan	**12 Lembaga**	**151.290.000**	APBD	**(38.451.800)**	**Pengurangan Anggaran**

DPMD

	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bangkalan	1 dokumen	3.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bangkalan	1 dokumen	-	APBD	(3.000.000)	Pengurangan Anggaran

DPMD

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Pos Yandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bangkalan	1 dokumen	1.180.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bangkalan	1 dokumen	4.360.000	APBD	3.180.000	Penambahan Anggaran

DPMD

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bangkalan	6 Lembaga	2.111.800	APBD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bangkalan	6 Lembaga	4.080.000	APBD	1.968.200	Penambahan Anggaran
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Bangkalan	3 Dokumen	75.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Bangkalan	3 Dokumen	40.000.000	APBD	(35.000.000)	Pengurangan Anggaran
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bangkalan	1 Laporan	5.000.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bangkalan	1 Laporan	2.850.000	APBD	(2.150.000)	Pengurangan Anggaran
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Bangkalan	1 Laporan	3.000.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Bangkalan	1 Laporan	-	APBD	(3.000.000)	Pengurangan Anggaran

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	450.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	-	APBD	(450.000)	Pengurangan Anggaran
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bangkalan	18 Dokumen	100.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bangkalan	18 Dokumen	100.000.000	APBD	-	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	**Jumlah Kawasan Pedesaan Hasil Kerjasama antar Desa yang di Bina**	Kab. Bangkalan	**1 Kawasan**	**26.000.000**	APBD	**Jumlah Kawasan Pedesaan Hasil Kerjasama antar Desa yang di Bina**	Kab. Bangkalan	**1 Kawasan**	**4.200.000**	APBD	**(21.800.000)**	**Pengurangan Anggaran**
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	**Jumlah Kerjasama Antar Desa melalui Kawasan Perdesaan yang difasilitasi pembentukannya**	Kab. Bangkalan	**1 Kawasan**	**26.000.000**	APBD	**Jumlah Kerjasama Antar Desa melalui Kawasan Perdesaan yang difasilitasi pembentukannya**	Kab. Bangkalan	**1 Kawasan**	**4.200.000**	APBD	**(21.800.000)**	**Pengurangan Anggaran**
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	3.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	2.700.000	APBD	(300.000)	Pengurangan Anggaran

	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	3.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	-	APBD	(3.000.000)	Pengurangan Anggaran
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	20.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	APBD	(18.500.000)	Pengurangan Anggaran
	Program Penataan Desa	**Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa**	Kab. Bangkalan	**0.37%**	**1.900.000**	APBD	**Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa**	Kab. Bangkalan	**0.37%**	-	APBD	**(1.900.000)**	**Pengurangan Anggaran**
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penataan desa**	Kab. Bangkalan	**1 Desa**	**1.900.000**	APBD	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penataan desa**	Kab. Bangkalan	**1 Desa**	-	APBD	**(1.900.000)**	**Pengurangan Anggaran**
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kab. Bangkalan	1 Desa	1.450.000	APBD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kab. Bangkalan	1 Desa	-	APBD	(1.450.000)	Pengurangan Anggaran
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Bangkalan	1 unit	450.000	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Bangkalan	1 unit	-	APBD	(450.000)	Pengurangan Anggaran
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Desa yang dibina dan aktif dalam pengelolaan lembaga pemerintahannya**	Kab. Bangkalan	**18,68%**	**284.845.900**	APBD	**Persentase Desa yang dibina dan aktif dalam pengelolaan lembaga pemerintahannya**	Kab. Bangkalan	**18,68%**	**2.005.255.000**	APBD	**1.720.409.100**	**Penambahan Anggaran**

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang dibina dalam pengelolaan lembaga pemerintahan desanya**	Kab. Bangkalan	**51 Desa**	**284.845.900**	APBD	**Jumlah Desa yang dibina dalam pengelolaan lembaga pemerintahan desanya**	Kab. Bangkalan	**51 Desa**	**2.005.255.000**	APBD	**1.720.409.100**	**Penambahan Anggaran**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	1.225.050	APBD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	-	APBD	(1.225.050)	Pengurangan Anggaran
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bangkalan	273 Dokumen	125.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bangkalan	273 Dokumen	1.999.650.000	APBD	1.874.650.000	Penambahan Anggaran
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Bangkalan	273 Orang	125.000.000	APBD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Bangkalan	273 Orang	-	APBD	(125.000.000)	Pengurangan Anggaran
	Pembinaan Dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	7.100.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	2.700.000	APBD	(4.400.000)	Pengurangan Anggaran
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Bangkalan		-	APBD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Bangkalan		-	APBD	-	

	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Bangkalan	281 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Bangkalan	281 Dokumen	2.905.000	APBD	1.405.000	Penambahan Anggaran
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	2.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	-	APBD	(2.000.000)	Pengurangan Anggaran
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Bangkalan	273 Orang	1.750.000	APBD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Bangkalan	273 Orang	-	APBD	(1.750.000)	Pengurangan Anggaran
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Bangkalan	1 Desa	16.488.000	APBD	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Bangkalan	1 Desa	-	APBD	(16.488.000)	Pengurangan Anggaran
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	4.782.850	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	-	APBD	(4.782.850)	Pengurangan Anggaran
					5.391.418.902					6.931.821.772			

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan rencana kerja tahunan yang berfungsi sebagai bahan pedoman dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2024 serta untuk mengevaluasi Rencana Kerja tahun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas PMD tahun 2024 maka penetapan prioritas kegiatan yang merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Dinas PMD, diharapkan dapat terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan tahunan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 dapat disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pada APBD tahun 2024.

Bangkalan, 30 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ISMET EFFENDI, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681220 198809 1 001

KATA
PENGANTAR

*Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Kami dapat menyusun "**Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun***

***2024" Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebupaten Bangkalan** dengan baik berlandaskan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. dan RPD Kabupaten Bangkalan 2024-2026. Renja Perubahan Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan pencapaian sisa target kinerja dalam tahun berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan.*

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan semester I tahun

2024, dan Rancangan perubahan rencana kerja tahun 2024 dan pendanaanya. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perubahan pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BANGKALAN

SUDIYO, S.Kep, Ns.
MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660910198703 1008

BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perubahan perencanaan PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 harus memiliki kesesuaian dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dan juga harus memiliki keselarasan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DKBP3A 2024-2026 yang berpedoman pada Perubahan RPD Kabupaten Bangkalan 2024-2026.

Selanjutnya Perubahan Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) OPD dan

kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. **Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja **Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan Tahun 2023** adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan

sstem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana

Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 nomor 4/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 nomor 1/D);
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
14. Peraturan Bupati Bangkalan No. 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupatan Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 nomor 14 Seri E);
15. Peraturan Bupati Bangkalan No. 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupatan Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 nomor 18 Seri E);
16. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 nomor 35 Seri E).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan DKBP3A Kabupaten Bangkalan Tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
3. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis PD berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai semester I tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah meliputi capaian realisasi tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat matrik tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 DKBP3A Kabupaten Bangkalan meliputi review program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja semester 1 Tahun 2024 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Bangkalan dilakukan untuk melihat apakah capaian realisasi target indikator kinerja sudah sesuai atau tidak dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DKBP3A untuk Tahun 2024-2026.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan semester 1 menyajikan pengukuran terhadap kinerja kegiatan dan target yang telah ditetapkan dan telah direalisasi Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun (n-2) dan perkiraan target tahun berjalan (n-1). Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan dan realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan s/d Semester 1 Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program / Kegiatan pada Akhir Periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
(1)				(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			8 = (7/6)*100			(9)			10 = (5+7+9)		11 = (10/4)*100	
2	0 8			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																							
2	0 8	0 2		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Tingkat Capaian PUG	7 2	%	20.000.000	7 5	%	129.722.500	7 1	%	171.304.750	7 1	%	171.104.750	100,00	99,88	72	%	244.022.040	218	544.849.290	302,777778	2.724,25

2	08	02	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan	32	Lembaga	20.000.000	-		-	22	orwan	150.000.000	3	orwan	150.000.000	13,64	100,00	32	lembaga	50.000.000	35	200.000.000	109,375	1.000,00
2	08	02	2.02.03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	32	Lembaga	20.000.000	-		-	5	Orwan	150.000.000	3	org	150.000.000	60,00	100,00	32	lembaga	50.000.000	35	200.000.000	109,375	1.000,00
2	08	02	2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Wanita yang dibina	-		-	1	orwan	75.000.000	-		-	-		-	-	-	22	Orwan	194.022.040	23	269.022.040	0	-

2	08	02	2.03.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	40	lembaga	59.022.040	40	59.022.040	0	-
2	08	02	2.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-		-	1	org	75.000.000	-		-	-		-	-	-	75	Orang	60.000.000	76	135.000.000	0	-
2	08	02	2.03.03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	1	Dokumen	75.000.000	1	75.000.000	0	-
2	08	03		Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perlindungan perempuan yang terlayani	50,22	%	30.000.000	55,7	%	31.781.500	50,7	%	4.000.000	50	%	4.000.000	98,62	100,00	50,22	%	152.500.000	155,92	188.281.500	310,473915	627,61

2	08	03	2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	18	Laporan	15.000.000	-		-	-		-	-		-	-	-	18	Laporan	150.000.000	18	150.000.000	100	1.000,00
2	08	03	2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	18	Orang	15.000.000	-		-	-		-	-		-	-	-	10	kasus	150.000.000	10	150.000.000	55,555556	1.000,00
2	08	03	2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100	%	15.000.000	15	%	31.781.500	50,7	%	4.000.000	10	%	4.000.000	19,72	100,00	100	%	2.500.000	125	38.281.500	125	255,21
2	08	03	2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	18	Orang	15.000.000	15	kasus	31.781.500	10	kasus	4.000.000	10	kasus	4.000.000	100,00	100,00	2	Orang	2.500.000	27	38.281.500	150	255,21
2	08	03	2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	7	Lembaga	59.022.040	7	59.022.040	0	-

2	08	03	2.03.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	40	kasus	59.022.040	40	59.022.040	0	-
2	08	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase Keluarga yang Dibina	2,5	%	20.000.000	34	%	56.492.500	10	%	225.000.000	10	%	224.775.000	100,00	99,90	2,5	%	100.000.000	46,5	381.267.500	1860	1.906,34
2	08	04	2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina	48	Lembaga	20.000.000	25	orwan	31.520.000	8	%	225.000.000	12	%	224.775.000	150,00	99,90	40	Lembaga	100.000.000	77	356.295.000	160,416667	1.781,48
2	08	04	2.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Orang	20.000.000	25	orwan	31.520.000	12	laporan	225.000.000	4	Laporan	224.775.000	33,33	99,90	100	Orang	100.000.000	129	356.295.000	368,571429	1.781,48

2	08	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase Lembaga Pelaksana Pembangunan yang Responsif Anak	60	%	25.000.000	102	%	62.684.000	40	%	87.000.000	38	%	86.585.000	95,00	99,52	50	%	125.000.000	190	274.269.000	316,666667	1.097,08
2	08	06	2.01	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Capaian Tingkat KLA	90	%	25.000.000	80	%	62.684.000	62	%	72.000.000	9	%	71.585.000	14,52	99,42	80	%	125.000.000	169	259.269.000	187,777778	1.037,08
2	08	06	2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	60	Organisasi	25.000.000	260	nilai	62.684.000	35	organisasi	72.000.000	35	organisasi	71.585.000	100,00	99,42	60	Organisasi	125.000.000	355	259.269.000	591,666667	1.037,08
2	08	07		Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase perlindungan anak yang terlayani	95	%	10.000.000	50	%	12.500.000	95	%	3.000.000	75	%	3.000.000	78,95	100,00	93	%	62.500.000	218	78.000.000	229,473684	780,00

2	08	07	2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	18	Laporan	-	50	Org	12.500.000	-		-	-		-	-	-	18	Laporan	60.000.000	68	72.500.000	377,777778	-
2	08	07	2.01.04	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	100	Orang	60.000.000	100	60.000.000	0	-
2	08	07	2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	18	Layanan	10.000.000	-		-	6	Layanan	3.000.000	6	Layanan	3.000.000	100,00	100,00	17	Layanan	2.500.000	23	5.500.000	127,777778	55,00
2	08	07	2.02.05	Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	5	Dokumen	10.000.000	-		-	6	Anak	3.000.000	6	Anak	3.000.000	100,00	100,00	2	Orang	2.500.000	8	5.500.000	160	55,00
2	14			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																					0	-

2	14	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	90,5	Indeks	6.212.317.132	110	%	11.863.148.350	85	%	5.881.833.216	84	%	5.713.838.038	98,82	97,14	90	%	5.842.439.467	284	23.419.425.855	313,812155	376,98
2	14	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun	20	Dokumen	35.910.000	11	Dokumen	26.427.750	7	Dokumen	29.295.000	6	Dokumen	29.217.000	85,71	99,73	20	Dokumen	19.500.000	37	75.144.750	185	209,26
2	14	01	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	15.000.000	4	dok	12.042.750	3	Dokumen	14.010.000	1	dok	13.932.000	33,33	99,44	3	Dokumen	5.000.000	8	30.974.750	266,666667	206,50
2	14	01	2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.900.000	1	dok	1.715.000	1	Dokumen	650.000	1	dok	650.000	100,00	100,00	1	Dokumen	1.760.000	3	4.125.000	300	142,24
2	14	01	2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.900.000	1	dok	1.215.000	1	Dokumen	1.775.000	1	dok	1.775.000	100,00	100,00	1	Dokumen	1.760.000	3	4.750.000	300	163,79

2	14	01	2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA PD yang disusun	1	Dokumen	2.900.000	1	dok	1.715.000	1	Dokumen	1.775.000	0	dok	1.775.000	-	100,00	1	Dokumen	1.760.000	2	5.250.000	200	181,03
2	14	01	2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.900.000	1	dok	1.215.000	1	Dokumen	1.775.000	0	dok	1.775.000	-	100,00	1	Dokumen	1.760.000	2	4.750.000	200	163,79
2	14	01	2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	6.410.000	3	lap	6.410.000	3	Dokumen	6.410.000	3	dok	6.410.000	100,00	100,00	3	Dokumen	4.800.000	9	17.620.000	450	274,88
2	14	01	2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	2.900.000	14	dok	2.115.000	12	Laporan	2.900.000	6	lap	2.900.000	50,00	100,00	12	Laporan	2.660.000	32	7.675.000	266,666667	264,66
2	14	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	100	%	5.185.084.232	111	%	9.702.143.684	100	%	5.082.039.222	88	%	4.940.011.489	88,00	97,21	100	%	5.468.609.351	299	20.110.764.524	299	387,86

2	14	01	2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	Orang/ Bulan	5.180.084.232	24	bln	9.694.445.034	12	Bulan	5.078.429.722	12	bln	4.936.409.489	100,00	97,20	58	Orang/ Bulan	5.465.609.351	94	20.096.463.874	162,068966	387,96
2	14	01	2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2.500.000	2	dok	5.842.450	2	Laporan	1.500.250	1	lap	1.494.000	50,00	99,58	3	Laporan	1.600.000	6	8.936.450	300	357,46
2	14	01	2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	66	Laporan	2.500.000	36	lap	1.856.200	66	Laporan	2.109.250	66	lap	2.108.000	100,00	99,94	66	Laporan	1.400.000	168	5.364.200	254,545455	214,57
2	14	01	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada PD yang tersusun	14	Laporan	1.000.000	11	dok	1.568.750	7	lap	414.350	4	lap	414.250	57,14	99,98	14	Laporan	212.816	29	2.195.816	207,142857	219,58
2	14	01	2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	14	Laporan	1.000.000	11	dok	1.568.750	14	lap	414.350	14	lap	414.250	100,00	99,98	14	Laporan	212.816	39	2.195.816	278,571429	219,58

				pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
2	1 4	0 1	2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum PD yang disediakan	3	Jenis	75.336. 500	8 1	Jenis	92.977.9 50	7	jenis	19.219.8 18	6	jenis	18.581 .250	85,7 1	96,6 8	3	Jenis	21.020. 000	90	132.579. 200	3000	175,98
2	1 4	0 1	2.0 6.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Pake t	20.000. 000	4	jenis	30.426.5 50	2	pake t	8.209.45 0	2	pake t	8.179. 250	100, 00	99,6 3	1	Pake t	3.000.0 00	7	41.605.8 00	700	208,03
2	1 4	0 1	2.0 6.0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Pake t	8.716.5 00	2	jenis	3.164.40 0	2	pake t	570.368	2	pake t	500.00 0	100, 00	87,6 6	1	Pake t	2.500.0 00	5	6.164.40 0	500	70,72
2	1 4	0 1	2.0 6.0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 5	Lapo ran	46.620. 000	7 1	kali	54.599.0 00	4 0	lap	10.440.0 00	4 0	lap	9.902. 000	100, 00	94,8 5	65	Lapo ran	15.520. 000	176	80.021.0 00	270, 7692 31	171,65
2	1 4	0 1	2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang yang disediakan	2	Jenis	30.000. 000	4	jenis	121.304. 700	2	jenis	5.085.00 0	2	jenis	5.000. 000	100, 00	98,3 3	2	Jenis	20.000. 000	8	146.304. 700	400	487,68

2	14	01	2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	30.000.000	2	unit	29.700.000	2	unit	5.085.000	2	unit	5.000.000	100,00	98,33	1	Unit	20.000.000	5	54.700.000	100	182,33
2	14	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	24	Jenis	767.782.500	24	jenis	721.520.057	24	jenis	690.985.276	17	jenis	667.662.013	70,83	96,62	24	Jenis	244.597.300	65	1.633.779.370	270,833333	212,79
2	14	01	2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	10.000.000	4	jenis	9.594.000	2	lap	7.460.000	2	lap	7.430.000	100,00	99,60	1	Laporan	5.000.000	7	22.024.000	700	220,24
2	14	01	2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	60.597.300	8	jenis	107.288.721	4	lap	53.222.776	3	lap	52.762.213	75,00	99,13	3	Laporan	60.597.300	14	220.648.234	466,666667	364,12
2	14	01	2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	697.185.200	36	jenis	1.640.026.792	18	lap	630.302.500	12	lap	607.469.800	66,67	96,38	48	Laporan	179.000.000	96	2.426.496.592	200	348,04
2	14	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang diperlihara	5	Jenis	117.203.900	15	jenis	156.816.003	10	jenis	54.794.550	12	jenis	52.952.036	120,00	96,64	5	Jenis	68.500.000	32	278.268.039	640	237,42

2	14	01	2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	11.538.600	4	jenis	15.614.800	1	unit	11.538.600	3	unit	11.213.276	300,00	97,18	1	Unit	20.000.000	8	46.828.076	400	405,84
2	14	01	2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49	Unit	46.168.000	5	jenis	49.084.503	6	unit	19.538.000	6	unit	18.150.760	100,00	92,90	7	Unit	27.000.000	18	94.235.263	36,73469 39	204,11
2	14	01	2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	10.000.000	4	jenis	8.715.000	2	unit	2.500.000	2	unit	2.420.000	100,00	96,80	10	Unit	4.000.000	16	15.135.000	106,666667	151,35
2	14	01	2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	49.497.300	2	unit	83.401.700	1	unit	21.217.950	1	unit	21.168.000	100,00	99,76	1	Unit	17.500.000	4	122.069.700	400	246,62

2	14	02		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pengendalian Kuantitas Penduduk pada Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	2,15	%	1.351.200.000	1,18	%	116.150.970	1,17	%	1.462.377.000	1,2	%	1.094.827.775	102,56	74,87	1,17	%	684.200.000	3,55	1.895.178.745	165,116279	140,26
2	14	02	2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Median Usia Kawin Pertama	-		-	-		-	2,7	%	107.577.000	0	%	107.415.350	-	99,85	20	Tahun	200.000.000	20	307.415.350	0	-
2	14	02	2.01.09	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	36	Kegiatan	200.000.000	36	200.000.000	0	-
2	14	02	2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,6	Jumlah	1.351.200.000	1,18	%	116.150.970	2,15	%	1.354.800.000	0,15	%	987.412.425	6,98	72,88	1,8	Jumlah	484.200.000	3,13	1.587.763.395	195,625	117,51
2	14	02	2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	18	Laporan	64.200.000	-		-	3	lap	154.700.000	3	lap	142.507.500	100,00	92,12	18	Laporan	60.000.000	21	202.507.500	116,666667	315,43

2	14	02	2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	18	Laporan	207.000.000	-		-	18	lap	210.600.000	8		210.600.000	44,44	100,00	18	Laporan	208.200.000	26	418.800.000	144,444444	202,32
2	14	02	2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	Dokumen	1.080.000.000	352	kali	74.841.970	18	dok	989.500.000	18	Dok	634.304.925	100,00	64,10	1	Dokumen	216.000.000	371	925.146.895	37100	85,66
2	14	03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase Capaian Peserta KB Aktif	67,5	%	4.858.811.000	123	%	9.366.674.177	67,5	%	6.995.204.000	66	%	6.124.199.790	97,78	87,55	67,5	%	5.298.071.000	256,5	20.788.944.967	380	427,86
2	14	03	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang tersusun	4	Dokumen	1.551.611.000	125	%	2.908.544.750	17	%	1.910.310.000	64	%	1.855.008.850	376,47	97,11	4	Dokumen	1.722.800.000	193	6.486.353.600	4825	418,04
2	14	03	2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8	Laporan	90.911.000	4	lap	398.370.000	2	lap	349.610.000	2	lap	347.079.000	100,00	99,28	8	Laporan	80.000.000	14	825.449.000	175	907,97

2	14	03	2.01.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18	Laporan	866.700.000	36	kec	1.719.413.500	18	lap	866.700.000	18	lap	814.129.850	100,00	93,93	18	Laporan	892.800.000	72	3.426.343.350	400	395,33
2	14	03	2.01.11	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	Laporan	306.900.000	36	kec	608.250.000	54	lap	306.900.000	54	lap	306.900.000	100,00	100,00	12	Laporan	270.000.000	102	1.185.150.000	850	386,17

2	14	03	2.01.12	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	Dokumen	150.000.000	8	jenis	91.275.000	4	dok	150.000.000	4	dok	150.000.000	100,00	100,00	1	Dokumen	150.000.000	13	391.275.000	1300	260,85
2	14	03	2.01.13	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1	Dokumen	-	125		25.000.000	-		-	-		-	-	-	20	Organisasi	80.000.000	145	105.000.000	14500	-

2	14	03	2.01.14	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20	Organisasi	137.100.000	25	kec	4.375.000	18	organisasi	237.100.000	12	organisasi	236.900.000	66,67	99,92	20	Organisasi	250.000.000	57	491.275.000	285	358,33
2	14	03	2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang di dayagunakan	73	Orang	562.000.000	191	org	2.924.400.000	73	org	754.000.000	73	org	754.000.000	100,00	100,00	73	Orang	843.000.000	337	4.521.400.000	461,643836	804,52
2	14	03	2.02.04	Sub Kegiatan Pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	843	Orang	562.000.000	893	org	2.697.030.000	562	org	562.000.000	560	org	562.000.000	99,64	100,00	834	Orang	843.000.000	2287	4.102.030.000	271,293001	729,90
2	14	03	2.03	Kegiatan Pengendalian dan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Faskes yang mendapatkan Pembinaan dan Distribusi Alokon	93	%	2.181.200.000	1736		2.326.991.027	72	%	2.768.174.000	221	%	2.493.640.940	306,94	90,08	91	%	2.031.521.000	2048	6.852.152.967	2202,15054	314,15

2	14	03	2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	180	Laporan	28.800.000	45	faskes	45.945.000	31	faskes	30.600.000	21	faskes	30.420.000	67,74	99,41	168	Laporan	29.700.000	234	106.065.000	130	368,28
2	14	03	2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19000	Orang	792.494.000	1142	akspt r	835.755.000	336	akspt r	798.935.000	303	akspt r	675.109.400	90,18	84,50	1718	Orang	809.568.000	3163	2.320.432.400	166,473684	292,80
2	14	03	2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20	Unit	1.336.806.000	3	jenis	1.427.767.327	6	unit	1.914.839.000	6		1.766.981.540	100,00	92,28	4	Unit	837.153.000	13	4.031.901.867	65	301,61
2	14	03	2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	100	Laporan	23.100.000	545		15.707.700	12	lap	21.300.000	12	lap	21.130.000	100,00	99,20	18	Laporan	23.900.000	575	60.737.700	575	262,93

					Jaringan dan Jejaringnya																				
2	14	03	2.03.10	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Orang yang Mengikuti Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	20	Orang	331.200.000	20	331.200.000	0	-
2	14	03	2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	129	Ormas	564.000.000	140		1.206.738.400	100	%	1.562.720.000	48	%	1.021.550.000	48,00	65,37	100,00	%	700.750.000	288	2.929.038.400	223,255814	519,33
2	14	03	2.04.02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	Dokumen	162.000.000	-		-	2	dok	548.220.000	1	org	9.000.000	50,00	1,64	2	Dokumen	3.750.000	3	12.750.000	300	7,87

2	14	03	2.04.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	129	Kampung	402.000.000	99	akspt r	1.190.930.500	125	org	1.014.500.000	87	lok	1.012.550.000	69,60	99,81	125	Kampung	697.000.000	311	2.900.480.500	241,085271	721,51
2	14	04		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Anggota Keluarga Tribina, UPPKS dan PIK R yang Aktif	80	%	4.600.593.958	40	%	3.425.053.200	51,13	%	4.627.470.000	49,4	%	4.190.600.000	96,62	90,56	51,13	%	5.466.300.000	140,53	13.081.953.200	175,6625	284,35
2	14	04	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pengelola dan Pelaksana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina	90	Kelompok	4.600.593.958	522	klp	3.425.053.200	150	klp	4.627.470.000	142	klp	4.190.600.000	94,67	90,56	90	Kelompok	5.466.300.000	754	13.081.953.200	837,777778	284,35
2	14	04	2.01.18	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa	60	Unit	270.000.000	30	klp	718.912.800	15	unit	270.000.000	15	unit	267.950.000	100,00	99,24	25	Unit	300.000.000	70	1.286.862.800	116,666667	476,62

					n Ekonomi Keluarga /UPPKS)																				
2	14	04	2.01.24	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2451	Orang	252.279.958	438	klp	2.625.527.900	15	klp	4.338.270.000	15	klp	3.903.450.000	100,00	89,98	2451	Orang	5.147.100.000	2904	11.676.077.900	118,482252	4.628,22
2	14	04	2.01.26	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	90	Kelompok	4.078.314.000	-		-	2	klp	19.200.000	2	klp	19.200.000	100,00	100,00	90	Kelompok	19.200.000	92	38.400.000	102,222222	0,94

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan sebagaimana tugas dan wewenangnya mengampu urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.. Indikator Kinerja Kunci urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan diuraikan pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kunci
Sampai dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Realisasi				Target Renja Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023			
1	PREVALENSI PESERTA KB AKTIF	69,95	66,77	48,92	63,29%	67,5%	67,5%	
2	PROSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)	NA	NA	19,12	10,15%	10%	10%	
3	PROSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	NA	NA	1,02	4,93%	5%	5%	
4	PROSENTASE JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ORANG DEWASA DAN ANAK YANG TERLAYANI	100 % dari 26 Kasus	100 % dari 32 Kasus	100 % dari 37 Kasus	100 % dari 35 Kasus	100%	100%	
5	TFR	1,86	2,14	2, 25	2,23	2,23	2,23	
6	ASFR	6,2	3	2,2	2,22	2	2	
7	Median Usia Kawin Pertama	NA	36,67	36,32	36,59	20	30	

Sampai dengan semester 2 Tahun 2024 Realisasi Anggaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak baru mencapai Rp. 5.719.705.648,- dari total Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 17.975.032.507,- atau sebesar 31,82%. Rendahnya realisasi anggaran belanja langsung tersebut disebabkan beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja selama pelaksanaan Renja 2024.

Faktor penghambat pencapaian kinerja selama pelaksanaan Rencana kerja perangkat daerah sampai dengan semester 2 tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renja 2024 merupakan tahun Pertama pelaksanaan Renstra DKBP3A yang disesuaikan dengan RPD 2024-2026, permasalahan yang muncul adalah penyesuaian pagu anggaran dengan indikator kinerja yang ingin dicapai sesuai Renstra. Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan masih belum bisa memenuhi target indikator kinerja yang harus dipenuhi sehingga masih perlu ada penyesuaian atau review kembali terhadap target Renstra yang lebih berbasis anggaran;
2. Tidak semua program dan kegiatan dijadwalkan terealisasi dalam periode semester 2 sehingga beberapa program dan kegiatan belum tercatat memenuhi target;
3. Terbatasnya persediaan dana anggaran menyebabkan banyak kegiatan yang belum terlaksana;
4. Perubahan numenklatur Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi dan nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berimbas pada pergeseran program kegiatan dan sub kegiatan.

5. Adanya perubahan kebijakan yaitu Sehubungan dengan PMK nomor 211/PMK.07/2022 dan PMK nomor 212/PMK.07/2022, Dana Alokasi Umum pada TA 2023 dibagi menjadi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya. Untuk Alokasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya, disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu pada Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Layanan Umum sehingga banyak program kegiatan yang harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui Pertama, peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan serta melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kedua, Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh OPD sesuai dengan peraturan sehingga tercipta koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan up to date dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Ketiga, melakukan perubahan atau review rencana kerja berdasarkan hasil evaluasi dan isu-isu strategis yang dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan uraian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun anggaran 2024 yang diambil dari rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra) seperti tercantum pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas KB PP dan PA

Tujuan Perangkat Daerah				Sasaran Perangkat Daerah				Keterangan
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator	Target		
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024			Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1. Meningkatkan Pengendalian Penduduk yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,9	0,9	1. Meningkatnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera	Prosentase Keluarga Sejahtera	57%	57%	
					Total Fertility Rate (TFR)	2,23	2,23	
					Cakupan Peserta KB Aktif terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	65	65	
				2. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	90%	90%	
2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	65	65	1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prosentase Program Perangkat Daerah yang Responsif Gender	87,16%	87,16%	
					Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	6,40%	6,40%	
					Prosentase Keluarga Berkualitas	0,02%	0,02%	
					Prosentase Capaian 4 Cluster Pemenuhan Hak Anak	50,25%	50,25%	
					Prosentase Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan	45%	45%	

3.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024

Program dan Kegiatan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Dalam bab ini berisi matrik rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perl;indungan Anak Kabupaten Bangkalan serta catatan penting tentang alasan yang disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.2
Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA 2024					SELISIH	CATATAN PENTING
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2024	ANGGARAN RKPD 2024	SUMBER DANA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN	SUMBER DANA		
2	3	4		8	10					12		13	
	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**17.672.942.132,00**					**17.725.796.897,00**		**52.854.765,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**17.672.942.132,00**					**17.725.796.897,00**		52.854.765,00	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**6.367.317.132,00**					**524.022.040,00**		-5843295092	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Prosentase Tingkat Capaian PUG**		**72 %**	**50.000.000,00**				**72 %**	**169.022.040,00**		**119.022.040,00**	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga yang menerapkan PUG*		35 Lembaga	30.000.000,00				35 Lembaga	0,00		**-30.000.000,00**	Efisiensi

2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Perangkat Daerah	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Perangkat Daerah	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-30.000.000,00**	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan*		32 Lembaga	20.000.000,00				32 Lembaga	0,00		**-20.000.000,00**	
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Lembaga	20.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Lembaga	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	**-20.000.000,00**	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	0,00				-	169.022.040,00		**169.022.040,00**	Mendapatkan Alokasi Dana DAU Earmark Bidang Pendidikan

2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Lembaga	59.022.040,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	**59.022.040,00**	
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**60.000.000,00**	
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	**50.000.000,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Prosentase perlindungan perempuan yang terlayani**		**-**	**15.000.000,00**				**50,22 %**	**152.500.000,00**		**137.500.000,00**	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan*		-	0,00				18 Laporan	150.000.000,00		**150.000.000,00**	Mendapatkan Alokasi Dana DAU Earmark Bidang Pendidikan
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Perangkat Daerah	150.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG	**150.000.000,00**	

		Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				N YA BIDANG PENDIDIKAN				PENDIDIKAN		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Prosentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan*		100 %	15.000.000,00				100 %	2.500.000,00		**-12.500.000,00**	Efisiensi
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan*	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-12.500.000,00**	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Prosentase Keluarga yang Dibina**		**2,5 %**	**20.000.000,00**				**2,5 %**	**100.000.000,00**		**80.000.000,00**	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina*		40 Lembaga	20.000.000,00				40 Lembaga	100.000.000,00		**80.000.000,00**	Mendapatkan Alokasi Dana DAU Earmark Bidang Pendidikan
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	20.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	100.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	**80.000.000,00**	

2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Prosentase Lembaga Pelaksana Pembangunan yang Responsif Anak**		**50 %**	**50.000.000,00**				**50 %**	**100.000.000,00**		**50.000.000,00**	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Prosentase Capaian Tingkat KLA*		80 %	25.000.000,00				80 %	100.000.000,00		**75.000.000,00**	Mendapatkan Alokasi Dana DAU Earmark Bidang Pendidikan
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Organisasi	25.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAAN N YA BIDANG PENDIDIKAN		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Organisasi	100.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	**75.000.000,00**	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang di bina*		347 Lembaga	25.000.000,00				347 Lembaga	0,00		**-25.000.000,00**	Efisiensi
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-25.000.000,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Prosentase perlindungan anak yang terlayani**		**-**	**70.000.000,00**				**93 %**	**2.500.000,00**		**-67.500.000,00**	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak*		-	60000000,00				18 laporan	0,00		**-60.000.000,00**	Efisiensi

2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	60000000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	0,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	**-60.000.000,00**	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*		17 Layanan	10.000.000,00				17 Layanan	2.500.000,00		**-7.500.000,00**	Efisiensi
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan*	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-7.500.000,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**11.305.625.000,00**					**17.201.774.857,00**		5896149857	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**		**-**	**6.222.317.132,00**				**90 80 Indeks %**	**5.813.903.857,00**		**-408.413.275,00**	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun*		-	35.910.000,00				20 dokumen	19.500.000,00		**-16.410.000,00**	Efisiensi

2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-10.000.000,00**	
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2900000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.760.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-1.140.000,00**	
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2900000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.760.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-1.140.000,00**	
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2900000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.760.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-1.140.000,00**	
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2900000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.760.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-1.140.000,00**	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	6410000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-1.610.000,00**	

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2900000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-240.000,00**	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi*		-	5.185.084.232,00				100 %	5.465.570.980,00		**280.486.748,00**	Kenaikan Gaji Berkalan
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59 Orang/bulan	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59 Orang/bulan	5.463.608.480,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**5.463.608.480,00**	
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	1.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-900.000,00**	Efisiensi
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66 Laporan	362.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-2.137.500,00**	

2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun*		-	1.000.000,00				14 Laporan	212.000,00		**-788.000,00**	Efisiensi
2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	212.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-788.000,00**	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum PD yang disediakan*		-	75.336.500,00				3 Jenis	9.820.000,00		**-65.516.500,00**	Efisiensi
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-17.000.000,00**	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	8.716.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-7.716.500,00**	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 Laporan	46.620.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	5.820.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-40.800.000,00**	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Jenis Barang yang disediakan*		-	30.000.000,00				2 Jenis	19.500.000,00		**-10.500.000,00**	Efisiensi

2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	19.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-10.500.000,00**	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Jasa Penunjang Perkantoran yang disediakan*		-	767.782.500,00				24 Jenis	231.027.877,00		**-536.754.623,00**	Efisiensi
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-5.000.000,00**	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	60.597.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	49.240.061,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-11.357.239,00**	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	697.185.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	176.787.816,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-520.397.384,00**	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Barang yang dipelihara*		-	117.203.900,00				5 Jenis	68.273.000,00		**-48.930.900,00**	Efisiensi
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	11.538.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**8.461.400,00**	

2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49 Unit	46.168.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	27.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-19.168.000,00**	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-6.000.000,00**	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	49.497.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	17.273.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-32.224.300,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Pengendalian Kuantitas Penduduk pada Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR) Laju Pertumbuhan Penduduk**		**-**	**1.351.200.000,00**				**2,17 0.9 % Indeks**	**644.200.000,00**		**-707.000.000,00**	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Pengendalian Kuantitas Penduduk pada Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR) Median Usia Kawin Pertama*		-	200.000.000,00				20 Tahun 3.00 %	160.000.000,00		**-40.000.000,00**	

2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal*	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	200.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Satuan Pendidikan	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	**-200.000.000,00**	Dialihkan ke Sub Keg. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	*Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Kegiatan	160.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	**160.000.000,00**	Mendapatkan Alokasasi Anggaran DAU Earmark Bidang Pendidikan
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga*		1.8 Jumlah	1.351.200.000,00				1.8 Jumlah	484.200.000,00		**-867.000.000,00**	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	64.200.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**-4.200.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	207.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	208.200.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON	**1.200.000,00**	

						KHUSUS NON FISIK					FISIK		
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	1.080.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	216.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**-864.000.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Prosentase capaian peserta kb aktif**		**67.50 %**	**5.423.311.000,00**				**67.50 %**	**5.277.371.000,00**		**-145.940.000,00**	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang tersusun*		4 Dokumen	1.551.611.000,00				4 Dokumen	1.722.800.000,00		**171.189.000,00**	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	90.911.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	80.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**-10.911.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	866.700.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	892.800.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**26.100.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB

2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	306.900.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	270.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**-36.900.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**0,00**	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	**80.000.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB

2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Organisasi	137.100.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Organisasi	250.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**112.900.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang di dayagunakan*		73 Orang	1.124.000.000,00				73 Orang	843.000.000,00		**-281.000.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	843 Orang	562.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	843 Orang	843.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**281.000.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Organisasi	562.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Organisasi	0,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**-562.000.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase Faskes yang mendapatkan Pembinaan dan Distribusi Alokon*		91 %	2.183.700.000,00				91 %	2.010.821.000,00		**-172.879.000,00**	

2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168 Laporan	28.800.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168 Laporan	29.700.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**900.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1718 Orang	792.494.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1718 Orang	809.568.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**17.074.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	*Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-2.500.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	1.336.806.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	837153000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	**-499.653.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Fisik
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	23.100.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	23900000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**800.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB

		Jejaringnya											
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	310.500.000,00	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	**310.500.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat*		-	564.000.000,00				2 organisasi masyarakat	700.750.000,00		**136.750.000,00**	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	162.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.750.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**-158.250.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Prosentase peningkatan Keluarga Sejahtera Prosentase Anggota Keluarga Tribina, UPPKS dan PIK R yang Aktif**		**-**	**4.531.114.000,00**				**51,1170 %%**	**5.466.300.000,00**		**935.186.000,00**	

2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Pengelola dan Pelaksana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina*		-	4.531.114.000,00				90 Kelompok	5.466.300.000,00		**935.186.000,00**	
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**-10.000.000,00**	Efisiensi
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	270.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**30.000.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan*	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2451 Orang	172.800.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2451 Orang	5.147.100.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**4.974.300.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB

2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan*	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Kelompok	4.078.314.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	2 Kelompok	19200000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**-4.059.114.000,00**	Menyesuaikan Alokasi Pagu DAK Non Fisik BOKB

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Bangkalan merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Bangkalan. Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DKBP3A tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai DKBP3A Kabupaten Bangkalan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Perubahan Renja ini diharapkan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja perangkat daerah sehingga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KATA

PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini atas dasar penyesuaian dari Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yang berisi penyesuaian usulan program dan kegiatan tarnbahan dari setiap bagian dan bidang serta usulan dari berbagai pihak. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan pemerintah daerah

Dengan tersusunnya Penetapan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tahun 2024, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam Penetapan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2024 berjalan ini serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap selanjutnya.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Bangkalan, Juli 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANGKALAN

MOAWI ARIFIN,S.STP,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19800212 199810 1 00 1

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD), RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari PD dan Renstra PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen PD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Penetapan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lmbaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran republik indonesia negara nomor 6322);
4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor: 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor : 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (l Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penrencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka mengengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah tahun 2011 nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1/E,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan;
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47/E);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangkalan

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2022 nomor 23/E);

17. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
18. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27/E)

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan Rencana Kerja (Penetapan Perubahan Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah untuk memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang untuk kemudian dilakukan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya sehingga dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang;
2. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan;
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA, dan P-RKPD;
4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (PENETAPAN PERUBAHAN RENJA), maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Penetapan Perubahan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan (tahun 2024) semester I, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun- tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.2. Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, Berisi rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP,menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Perhubungan sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Penetapan Perubahan Renja) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama 1 semester tahun berjalan

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 menitik beratkan pada program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Dari program-program di atas belanja langsung di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan pada tahun anggaran 2024 sebesar **Rp. 30.427.347.069** dan pada triwulan II (Juni 2024) telah terealisasi sebesar **Rp. 15.376.550.229** atau sebesar **50,54%.** Rincian program dan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

1) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
   a) Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp. 15.602.150**
      Sub kegiatan terdiri dari :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
      - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD
      - Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
      - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD
      - Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
      - Evaluasi kinerja PD
   b) Kegiatan Administrasi Keuangan PD dengan alokasi dana sebesar **Rp. 8.246.244.183**
      Sub Kegiatan terdiri dari :
      - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
   c) Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp 1.439.000**
      Sub kegiatan terdiri dari ;
      - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
   d) Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp. 390.276.550**
      Sub kegiatan terdiri dari :
      - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
      - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
      - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
      - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

e) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp. 4.211.335.150**

Sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp. 51.864.500**

Sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

B. BIDANG-BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

2) Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

a) Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dengan alokasi dana sebesar **Rp. 15.286.773.536**

Sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
- Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan

b) Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dengan alokasi dana sebesar **Rp. 2.150.000.000**

Sub kegiatan terdiri dari :

- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelengaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/ kota

c) Kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota dengan alokasi dana sebesar **Rp.70.312.000**

Sub kegiatan terdiri dari :

- Penataan manajemen dan rekayasa lalin untuk jaringan jalan kabupaten/kota
- Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalin

- Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota

e) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupaten/kota dengan alokasi dana sebesar **Rp. 3.500.000**

Sub kegiatan terdiri dari :

- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di bawah ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD s/d SEMESTER 1 TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Akhir periode RENSTRA PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan RENJA PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan		
								Target Renja PD Tahun 2023			Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
			K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6			7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**83**	**indeks**	**39,453,715,011**	**80**	**12,343,036,494**	**78.33**		**17,910,575,666**	**80**	**12,343,036,494**	**102**	**69**	**82.25**	**12,797,046,771**	**242**	**37,483,119,759**	**292**
2 15 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu**	**300**	**%**	**120,605,370**	**290**	**117,506,750**	**100**	**%**	**23,967,653**	**90**	**20,709,950**	**90**	**86**	**100**	**40,201,790**	**480**	**178,418,490**	**160**
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dok	24,929,370	8	22,579,400	2	dok	2,485,300	2	2,447,050	100	98	3	8,309,790	13	33,336,240	144
2 15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dok	4,006,500	3	3,240,250	1	dok	1,746,500	1	1,746,500	100	100	1	1,335,500	5	6,322,250	167
2 15 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dok	4,152,750	2	1,458,000	1	dok	237,500			-	-	1	1,384,250	3	2,842,250	100
2 15 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dok	3,220,500	3	5,552,550	1	dok	3,806,353	1	3,806,150	100	100	1	1,073,500	5	10,432,200	167
2 15 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dok	4,011,750	3	2,413,800	1	dok	1,112,250	1	1,112,250	100	100	1	1,337,250	5	4,863,300	167
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	dok	27,899,250	6	6,550,900	3	Lap	1,725,750	3	1,725,750	100	100	3	9,299,750	12	17,576,400	133

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Akhir periode RENSTRA PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan RENJA PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan		
								Target Renja PD Tahun 2023			Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
			K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6			7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
2 15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan	52,385,250	6	75,711,850	2	Lap	12,854,000	2	9,872,250	100	77	2	17,461,750	10	103,045,850	167
2 15 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN**	**300**	**%**	**24,098,605,121**	**277**	**22,259,390,596**	**100**	**%**	**7,602,668,875**	**100**	**7,471,041,406**	**100**	**98**	**100**	**7,836,545,202**	**477**	**37,566,977,204**	**159**
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	orang	24,093,025,121	326	22,256,145,846	105	orang/bln	7,600,808,875	105	7,469,181,406	100	98	112	7,834,685,202	543	37,560,012,454	162
2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	5,580,000	3	3,244,750	1	Lap	1,860,000	1	1,860,000	100	100	1	1,860,000	5	6,964,750	167
2 15 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun**	**300**	**%**	**11,187,750**	**260**	**6,158,450**	**80**	**%**	**1,481,000**	**80**	**1,121,000**	**100**	**76**	**100**	**3,729,250**	**440**	**11,008,700**	**147**
2 15 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	laporan	11,187,750	22	6,158,450	4	Lap	1,481,000	4	1,121,000	100	76	12	3,729,250	38	11,008,700	106
2 15 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pakaian Aparatur yang Diadakan**	**300**	**%**	**13,000,000**	**1**	**298,068,150**	**0**	**%**	**-**			**-**	**-**			**1**	**298,068,150**	**0**
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	paket	3,000,000	168	155,478,750	0	buah	-			-	-			168	155,478,750	5,600
2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	orang	10,000,000	50	142,589,400	0	orang	-			-	-			50	142,589,400	2,500
2 15 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD**	**300**	**%**	**923,886,124**	**230**	**1,563,011,555**	**80**	**%**	**466,495,607**	**80**	**459,092,877**	**100**	**98**	**100**	**145,628,708**	**410**	**2,167,733,140**	**137**
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	5,000,000	3	1,462,650	0	-	-			-	-			3	1,462,650	300
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	paket	26,313,390	11	60,195,650	5	paket	11,771,650	5	11,771,650	100	100	5	8,771,130	21	80,738,430	140
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	9,000,000	3	37,934,850	1	paket	10,846,850	1	10,846,850	100	100	1	3,000,000	5	51,781,700	167
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	paket	762,497,734	16	1,306,915,323	6	paket	417,894,250	6	412,220,077	100	99	6	91,832,578	28	1,810,967,978	156
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	51,075,000	11	64,130,000	4	dok	14,750,000	4	13,240,000	100	90	4	17,025,000	19	94,395,000	158

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Akhir periode RENSTRA PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan RENJA PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan		
								Target Renja PD Tahun 2023			Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
			K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6			7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	laporan	75,000,000	59	92,373,082	25	Lap	11,232,857	25	11,014,300	100	98	25	25,000,000	109	128,387,382	145
2 15 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan selama 1 tahun**	**300**	**%**	**30,000,000**	**230**	**209956100**	**80**	**%**	**14,835,678**	**80**	**12,080,000**	**100**	**81**	**100**	**10,000,000**	**410**	**232,036,100**	**137**
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	30,000,000	14	183,666,100	5	paket	14,835,678	5	12,080,000	100	81	1	10,000,000	20	205,746,100	667
2 15 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD**	**100**	**%**	**13,961,943,150**	**260**	**14,600,172,889**	**80**	**%**	**4,297,701,385**	**80**	**4,282,407,441**	**100**	**100**	**100**	**4,395,579,150**	**440**	**23,278,159,480**	**440**
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	Lap	1,142,397,150	9	671,999,589	3	Lap	188,168,385	3	186,682,441	100	99	3	205,197,150	15	1,063,879,180	167
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	Lap	12,819,546,000	20	13,928,173,300	6	Lap	4,109,533,000	6	4,095,725,000	100	100	6	4,190,382,000	32	22,214,280,300	178
2 15 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**294,487,496**	**223**	**531077585**	**80**	**%**	**103,779,500**	**80**	**96,583,820**	**100**	**93**	**100**	**101,495,832**	**403**	**729,157,237**	**403**
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	unit	112,717,296	29	238,570,760.00	8	unit	37,066,500	8	35,101,510	100	95	8	37,572,432	45	311,244,702	188
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	unit	78,934,200	10	110,707,875.00	3	unit	50,183,000	5	44,952,310	167	90	3	26,311,400	18	181,971,585	200
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	45,000,000	2.00	87,798,950.00	0	unit	-			-	-	1	15,000,000	3	102,798,950	100
2 15 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	5,000,000			0	unit	-			-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	100
2 15 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69	unit	52,836,000	69.00	94,000,000.00	23	unit	16,530,000	23	16,530,000	100	100	23	17,612,000	115	128,142,000	167

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Akhir periode RENSTRA PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan RENJA PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan		
								Target Renja PD Tahun 2023			Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
			K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6			7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Prosentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ & Keselamatan**	**85**	**%**	**133,059,050**								**200**	**185**			**-**	**-**	**-**
		Prosentase Capaian Operasional dan ketertiban LLAJ	**95**	**%**	**8,566,851,500**								**330**	**393**			**-**	**-**	**-**
		Prosentase pemanfaatan Perlengkapan Jalan	**95**	**%**	**52,168,734,380**								**89**	**100**			**-**	**-**	**-**
2 15 02 2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun**	**100**	**%**	**20,000,000**	**0**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**100**	**10,000,000**	**100**	**10,000,000**	**100**
2 15 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2	dok	20,000,000								-	-	1	10,000,000	1	10,000,000	50
2 15 02 2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan**	**240**	**%**	**52,058,734,380**	**255**	**15,516,661,146**	**90**	**%**	**15,581,478,957**	**80.34**	**15,516,661,146**	**89**	**100**	**80**	**16,600,875,374**	**415**	**47,634,197,666**	**173**
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	240	unit	52,021,952,670	39	44,371,390,232	41	unit	15,559,815,787	35	15,495,538,396	85	100	80	16,588,614,804	154	76,455,543,432	64
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15	unit	15,000,000	6	23,949,800	0	unit	-			-	-	5	5,000,000	11	28,949,800	73
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3	unit	21,781,710	47	157,659,050	11	unit	21,663,170	11	21,122,750	100	98	1	7,260,570	59	186,042,370	1,967
2 15 2 2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang Tersusun**	**300**	**%**	**110,000,000**	**180**	**288,408,750**	**0**	**%**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**100**	**5,000,000**	**280**	**293,408,750**	**93**
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3	unit	110,000,000	1	220,111,750	0	unit	-			-	-	1	5,000,000	2	225,111,750	67
2 15 02 2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Titik Parkir yang yang dikelola**	**300**	**%**	**7,800,000,000**	**280**	**2,099,201,600**	**95**	**%**	**2,124,311,334**	**100**	**2,099,201,600**	**105**	**99**	**100**	**2,600,000,000**	**480**	**6,798,403,200**	**160**
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	36	Lap	7,800,000,000	16	5,274,332,100	12	Lap	2,124,311,334	12	2,099,201,600	100	99	12	2,600,000,000	40	9,973,533,700	111

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Akhir periode RENSTRA PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan RENJA PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d tahun berjalan		
								Target Renja PD Tahun 2023			Realisasi Renja PD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
			K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5		6			7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100	
2 15 2 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala**	**300**	**%**	**168,000,000**	**200**	**168,744,100**	**98**	**%**	**55,999,500**	**100**	**54,550,000**	**102**	**97**	**100**	**56,000,000**	**400**	**279,294,100**	**133**
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	30	unit	168,000,000	31	183,905,000	10	unit	55,999,500	10	54,550,000	100	97	10	56,000,000	51	294,455,000	170
2 15 02 2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**368,210,550**	**250**	**1,261,032,600**	**90**	**%**	**139,785,875**	**90**	**134,799,500**	**100**	**96**	**100**	**372,736,850**	**440**	**1,768,568,950**	**440**
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	Lap	7,537,875	5	47,949,250	1	Lap	5,025,250	1	4,382,500	100	87	13	335,050,500	19	387,382,250	633
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	18	unit	105,521,175	5	427,385,000	2	unit	22,331,125	2	21,864,000	100	98	6	35,173,725	13	484,422,725	72
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	39	Lap	255,151,500	24	785,698,350	13	Lap	112,429,500	13	108,553,000	100	97	1	2,512,625	38	896,763,975	97
2 15 2 2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Angkutan Umum (bus) yang beroperasi**	**300**	**%**	**336,200,000**	**200**	**222,496,700**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**100**	**102,200,000**	**300**	**324,696,700**	**100**
2 15 2 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Angkutan Umum (bus) yang diselenggarakan	3	Keg	336,200,000	2	222,496,700	0	0	-	0	-	-	-	10	102,200,000	12	324,696,700	400
2 15 02 2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase angkutan umum yang layak fungsi**	**300**	**%**	**7,500,000**	**200**	**21,760,000**	**78.3**	**%**	**9,000,000**	**17.67**	**9,000,000**	**23**	**100**	**100**	**2,500,000**	**318**	**33,260,000**	**106**
2 15 2 2.14 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Lap	7,500,000	2	21,760,000	1	Lap	9,000,000	1	9,000,000	100	100	1	2,500,000	4	33,260,000	133

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah digambarkan sebagaimana terlihat pada tabeL 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

DINAS PERHUBUNGAN KAB.BANGKALAN

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target NSPK	Target IKK	Target IKD	Target Indikator Lainnya (RENSTRA)	Realisasi				Target RENSTRA Tahun 2024	Target Perubahan RENJA Tahun 2024	Keterangan
							2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan**					**Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik**	**75%**	**76.76%**	**0%**	**0%**			
I.	**Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan Kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik**					Prosentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Lainnya (Terminal) berfungsi					**100%**	**100%**	
						Prosentase Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) berfungsi dengan					**90.48%**	**90.48%**	
						Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan berfungsi dengan baik					**66.60%**	**66.60%**	
2	**Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan**					**Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan**	**79,50%**	**79.87%**	**0%**	**0%**			
II.	**Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan**					Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan					**65**	**65**	
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan					**81.85 indeks**	**81.85 indeks**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Penetapan Perubahan Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah untuk membangun sebuah Rencana sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang dilimpahkan, tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Untuk mewujudkan Visi dan misi Bupati Bangkalan dimana Dinas Perhubungan masuk pada misi ke lima (5) yaitu : Akselerasi Pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA Tahun 2024 Perangkat Daerah

TUJUAN				SASARAN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		RENSTRA 2024	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024				RENSTRA 2024	PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur Perhubungan dalamkondisi baik	**85.69 %**	**85.69 %**	**Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan Kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik**	1	Prosentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Lainnya (Terminal) berfungsi dengan baik	**100 %**	**100 %**	
					2	Prosentase Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) berfungsi dengan baik	**90.48 %**	**90.48 %**	
					3	Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan berfungsi dengan baik	**66.60 %**	**66.60 %**	
				Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	1	Nilai Evaluasi SAKIPDinas Perhubungan	**65**	**65**	
					2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	**81.85 indeks**	**81.85 indeks**	

3.2 Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini. Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Perhubungan sebagaimana tabel 3.2 berikut:

TABEL 3.2

MATRIK RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA 2024					SELISIH	CATATAN PENTING (alasan perubahan)
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	14	15
		DINAS PERHUBUNGAN				**32,282,492,156**					**30,307,632,307**		**- 1,974,859,849**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**32,282,492,156**					**30,307,632,307**		- 1,974,859,849	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**32,282,492,156**					**30,307,632,307**		**- 1,974,859,849**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**82.25 indeks**	**12,533,179,932**		**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**82.25 indeks**	**12,797,046,771**		**263,866,839**	
1	**2.15.01 .2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu**		**100 %**	**40,201,790**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu**		**100 %**	**8,382,150**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**- 31,819,640**	**efisiensi anggaran**
1	2.15.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Dokumen	8,309,790		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Dokumen	2,613,000		- 5,696,790	efisiensi anggaran
2	2.15.01 .2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	1,335,500		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	305,000		- 1,030,500	efisiensi anggaran
3	2.15.01 .2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	1,384,250		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	333,150		- 1,051,100	efisiensi anggaran
4	2.15.01 .2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	1,073,500		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	125,000		- 948,500	efisiensi anggaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA 2024					SELISIH	CATATAN PENTING (alasan perubahan)
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	1,337,250		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	620,000		- 717,250	efisiensi anggaran
6	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Laporan	9,299,750		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Laporan	2,010,000		- 7,289,750	efisiensi anggaran
7	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 Laporan	17,461,750		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 Laporan	2,376,000		- 15,085,750	efisiensi anggaran
2	**2.15.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN**		**100 %**	**7,836,545,202**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA**	**Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN**		**100 %**	**8,177,411,021**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA**	**340,865,819**	**penyesuaian tunjangan dan gaji pokok**
8	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	112 Orang/bulan	7,834,685,202		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	112 Orang/bulan	8,177,241,021		342,555,819	penyesuaian tunjangan dan gaji pokok
9	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	1,860,000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	170,000		- 1,690,000	efisiensi anggaran
3	**2.15.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun**		**100 %**	**3,729,250**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun**		**100 %**	**695,000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**- 3,034,250**	**efisiensi anggaran**
10	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3,729,250		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	695,000		- 3,034,250	efisiensi anggaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA 2024					SELISIH	CATATAN PENTING (alasan perubahan)
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**2.15.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase sarana aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD**		**100 %**	**145,628,708**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**Persentase sarana aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD**		**100 %**	**390,276,550**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**244,647,842**	**efisiensi anggaran dan penyesuaian cetakan**
11	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	5 Paket	8,771,130		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	5 Paket	9,423,500		652,370	Penambahan belanja ATK
12	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Paket	3,000,000				0 paket			- 3,000,000	efisiensi anggaran
13	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	6 Paket	91,832,578		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	6 Paket	367,713,050		275,880,472	untuk cetak stiker parkir berlangganan,karcis, cetak kebutuhan administrasi kantor
14	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	17,025,000		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	4 Dokumen	5,860,000		- 11,165,000	efisiensi anggaran
15	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	25 Laporan	25,000,000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Semua Kel/Desa	25 Laporan	7,280,000		- 17,720,000	efisiensi anggaran
5	**2.15.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan selama 1 tahun**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100 %**	**10,000,000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**			**0%**	**0**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**- 10,000,000**	**efisiensi anggaran**
16	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Unit	10,000,000				0 unit	-		- 10,000,000	efisiensi anggaran
6	**2.15.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD**		**100 %**	**4,395,579,150**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD**		**100 %**	**4,168,417,550**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**4,158,417,550**	**efisiensi anggaran dan penyesuaian jumlah THL**
17	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Laporan	205,197,150		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Laporan	194,004,550		- 11,192,600	efisiensi anggaran
18	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	6 Laporan	4,190,382,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	6 Laporan	3,974,413,000		- 215,969,000	efisiensi dan penyesuaian jumlah THL dan honor pengelola keuangan dan pengurus barang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA 2024					SELISIH	CATATAN PENTING (alasan perubahan)
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	**2.15.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**101,495,832**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**51,864,500**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**- 49,631,332**	**efisiensi anggaran**
19	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	8 Unit	37,572,432		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	8 Unit	23,712,000		- 13,860,432	efisiensi anggaran
20	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Unit	26,311,400		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Unit	21,662,500		- 4,648,900	efisiensi anggaran
21	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	15,000,000				0 unit			- 15,000,000	efisiensi anggaran
22	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5,000,000				0 unit			- 5,000,000	efisiensi anggaran
23	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	23 Unit	17,612,000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	23 Unit	6,490,000		- 11,122,000	efisiensi anggaran
2	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ & Keselamatan Persentase pemanfaatan Perlengkapan Jalan**		**50 % 60 %**	**19,749,312,224**		**Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ & Keselamatan Persentase pemanfaatan Perlengkapan Jalan**		**50 % 60 %**	**17,510,585,536**		**- 2,238,726,688**	
8	**2.15.02.2.01**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun**	**Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100 %**	**10,000,000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**			**0%**	**0**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	- 10,000,000	**efisiensi anggaran**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA 2024					SELISIH	CATATAN PENTING (alasan perubahan)
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	10,000,000				0 dokumen	0		- 10,000,000	efisiensi anggaran
9	**2.15.02.2.02**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan**		**80 %**	**16,600,875,374**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan**		**80 %**	**15,286,773,536**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**- 1,314,101,838**	**efisiensi anggaran**
25	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	80 Unit	16,588,614,804		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Unit	15,267,773,536		- 1,320,841,268	efisiensi anggaran
26	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5,000,000				0 unit	-		- 5,000,000	efisiensi anggaran
27	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	7,260,570		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Semua Kel/Desa	11 Unit	19,000,000		11,739,430	penambahan unit pemeliharaan
10	**2.15.02.2.03**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang Tersusun**		**100 %**	**5,000,000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**			**0%**	**0**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	- 5,000,000	**efisiensi anggaran**
28	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		1 Unit	5,000,000				0 unit	0		- 5,000,000	efisiensi anggaran
11	**2.15.02.2.04**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase Titik Parkir yang yang dikelola**		**100 %**	**2,600,000,000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**Persentase Titik Parkir yang yang dikelola**		**100 %**	**2,150,000,000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**- 450,000,000**	**efisiensi anggaran**
29	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2,600,000,000		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Laporan	2,150,000,000		- 450,000,000	Penurunan bagi hasil karena pendapatan retribusi berkurang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA 2024					SELISIH	CATATAN PENTING (alasan perubahan)
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	**2.15.02.2.05**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala**		**100 %**	**56,000,000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**			**0%**	**0**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**- 56,000,000**	**efisiensi anggaran**
30	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	10 Unit	56,000,000				0 unit	0		- 56,000,000	efisiensi anggaran
13	**2.15.02.2.06**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan**		**100 %**	**372,736,850**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan**		**100 %**	**70,312,000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**- 302,424,850**	**efisiensi anggaran**
31	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	13 Laporan	335,050,500		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	46,250,000		- 288,800,500	efisiensi anggaran
32	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	6 Dokumen	35,173,725		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	6 Dokumen	3,492,000		- 31,681,725	efisiensi anggaran
33	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	2,512,625		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	20,570,000		18,057,375	penambahan kegiatan (pemeliharaan CCTV,survey terkait manajemen
14	**2.15.02.2.09**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Angkutan Umum (bus sekolah) yang beroperasi**		**100 %**	**102,200,000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**			**0%**	**0**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**- 102,200,000**	**efisiensi anggaran**
34	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	10 Unit	102,200,000				0 unit	0		- 102,200,000	efisiensi anggaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA 2024					SELISIH	CATATAN PENTING (alasan perubahan)
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	**2.15.02.2.14**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase angkutan umum yang layak fungsi**		**100 %**	**2,500,000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**Persentase angkutan umum yang layak fungsi**		**100 %**	**3,500,000**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**1,000,000**	**efisiensi anggaran**
35	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	2,500,000		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3,500,000		1,000,000	dibutuhkan sosialisasi terkait Trans Jatim
JUMLAH =						**32,282,492,156**					**30,307,632,307**		**- 1,974,859,849**	

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Dengan telah disusunnya Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif.

Mengingat sangat kompleknya visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai, maka kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan mencapai sasaran dengan baik jika ada dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Dukungan dalam bentuk kebijakan dan penganggaran sangat diharapkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran. Dukungan penganggaran terhadap Program Prioritas dan pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sangat diharapkan dapat konsisten dipertahankan, sehingga target dapat tercapai.

Dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat secara luas, maka diharapkan pelayanan jasa perhubungan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, teratur, aman, nyaman dan menjangkau keseluruh wilayah sehingga mampu menunjang pembangunan Bali secara keseluruhan dan berkelanjutan.

4.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 mengacu pada Tata cara yang tertuang dalam Pemendagri nomor 90 Tahun 2019. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 sesuai dengan prioritas sasaran.

4.3 Rencana Tindak lanjut

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Penetapan Perubahan Renja) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan,

diharapkan mendapatkan gambaran untuk dijadikan salah satu referensi dalam penentuan pagu indikatif Dinas Perhubungan yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran untuk kemudian apabila ada kekurangan pagu anggaran dapat diakomodir di Penyusunan Dokumen Rencana Kerja berikutnya yaitu Penetapan Perubahan Renja Tahun 2024.

Penetapan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja sehingga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, Juli 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANGKALAN

MOAWI ARIFIN, S.STP,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19800212 199810 1 00 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Sebagai dokumen perencanaan tahunan dokumen ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Dokumen Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dalam perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renja yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renja PD
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD
c. Penyusunan Rancangan Renja PD
d. Perumusan Rancangan Akhir
e. Penetapan

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini:

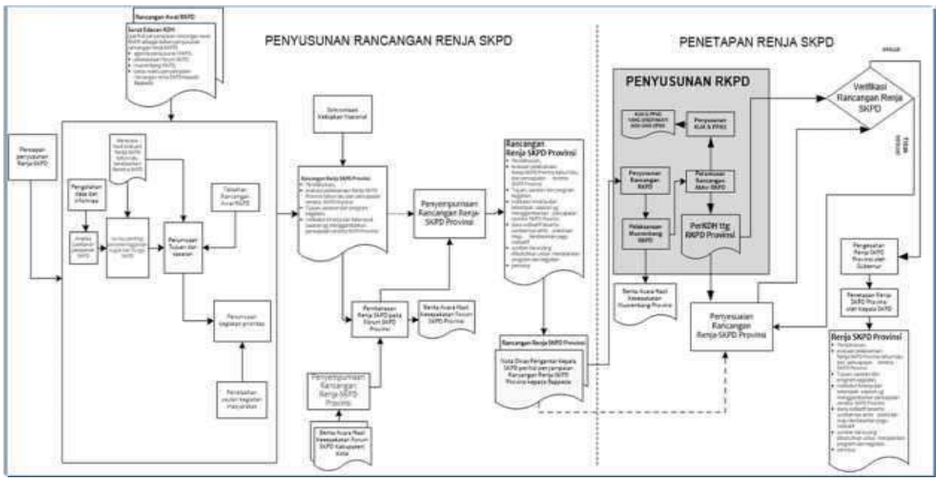

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Dokumen Renja

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahn serta tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Renca

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);

13. Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan yang sudah dilaksanakan pada perencanaan tahun 2024.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
   - 1.1 Latar belakang
   - 1.2 Landasan Hukum
   - 1.3 Maksud Tujuan
   - 1.4 Sistematika Penulisan
2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
   - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
4. BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika																		
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	90	Indeks	19.988.551.206	-	-	-	-	-	-			85	6.705.133.541	85	6.705.133.541	94	34

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	73.075.347	-	-	-	-	-	-			100	2.547.500	100	2.547.500	100	3
2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	15.051.000	-	-	-	-	-	-			3	315.000	3	315.000	43	2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah dokumen rka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka - skpd	3	dokumen	9.880.500	-	-	-	-	-	-			1	342.500	1	342.500	33	3
2.16.01.2.01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dokumen	11.076.000	-	-	-	-	-	-			1	375.000	1	375.000	33	3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen dpa - skpd	3	dokumen	10.111.347	-	-	-	-	-	-			1	400.000	1	400.000	33	4
2.16.01.2.01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa - skpd	3	dokumen	10.068.000	-	-	-	-	-	-			1	375.000	1	375.000	33	4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtyisar realisasi kinerja skpd	3	dokumen	11.076.000	-	-	-	-	-	-			1	340.000	1	340.000	33	3
2.16.01.2.01.0007	EVALUASI KINERJA PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	laporan	5.812.500	-	-	-	-	-	-			1	400.000	1	400.000	33	7

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PD	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	%	14.739.436.206	-	-	-	-	-	-			100	5.255.510.941	100	5.255.510.941	100	36
2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189	orang/bulan	14.725.108.206	-	-	-	-	-	-			63	5.254.710.941	63	5.254.710.941	33	36
2.16.01.2.02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	11.328.000	-	-	-	-	-	-			1	400.000	1	400.000	33	4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.02.0007	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	198	laporan	3.000.000	-	-	-	-	-	-			66	400.000	66	400.000	33	13

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100	%	2.400.000	-	-	-	-	-	-			100	350.000	100	350.000	100	15
2.16.01.2.03.0005	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik derah pada SKPD	42	laporan	2.400.000	-	-	-	-	-	-			14	350.000	14	350.000	33	15
2.16.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Aadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	80	%	18.000.000	-	-	-	-	-	-			80	-	80	-	100	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelngkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	384	paket	3.000.000	-	-	-	-	-	-			128	-	128	-	33	0
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	7.500.000	-	-	-	-	-	-			1	-	1	-	33	0
2.16.01.2.05.0011	Bimbinga Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	3	orang	7.500.000	-	-	-	-	-	-			1	-	1	-	33	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PD	Persentase penyediaan administrasi umum PD	100	%	191.115.150	-	-	-	-	-	-			100	17.686.850	100	17.686.850	100	9
2.16.01.2.06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	paket	18.344.400	-	-	-	-	-	-			12	-	12	-	33	0
2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	paket	44.910.750	-	-	-	-	-	-			12	11.086.850	12	11.086.850	33	25
2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	paket	19.725.000	-	-	-	-	-	-			12	-	12	-	33	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	31.605.000	-	-	-	-	-	-			1	1.500.000	1	1.500.000	33	5
2.16.01.2.06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	dokumen	14.580.000	-	-	-	-	-	-			12	-	12	-	33	0
2.16.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	laporan	61.950.000	-	-	-	-	-	-			1	5.100.000	1	5.100.000	1	8

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	80	%	8.730.156	-	-	-	-	-	-			80	-	80	-	100	0
2.16.01.2.07.0005	PENGADAAN MEBEL	Jumlah mebel yang diadakan	3	unit	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-			1	-	1	-	33	0
2.16.01.2.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	unit	5.730.156	-	-	-	-	-	-			2	-	2	-	33	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan PD	80	%	4.593.138.000	-	-	-	-	-	-			80	1.411.445.000	80	1.411.445.000	100	31
2.16.01.2.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	laporan	19.500.000	-	-	-	-	-	-			1	11.500.000	1	11.500.000	33	59
2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	laporan	936.000.000	-	-	-	-	-	-			3	290.000.000	3	290.000.000	33	31

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	laporan	3.637.638.000	-	-	-	-	-	-			5	1.109.945.000	5	1.109.945.000	33	31
2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	80	%	362.656.347	-	-	-	-	-	-			80	17.593.250	80	17.593.250	100	5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.09.0002	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / LAP.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63	unit	302.956.347	-	-	-	-	-	-			21	14.993.250	21	14.993.250	33	5
2.16.01.2.09.0009	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	unit	25.500.000	-	-	-	-	-	-			3	-	3	-	33	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.01.2.09.0011	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75	unit	34.200.000	-	-	-	-	-	-			25	2.600.000	25	2.600.000	33	8

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100	%	4.442.442.000	-	-	-	-	-	-			**100**	**1.211.940.000**	**100**	**1.211.940.000**	100	**27**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PD KAB/KOTA	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	100	%	4.442.442.000	-	-	-	-	-	-			1	**1.211.940.000**	**1**	**1.211.940.000**	1	**27**
2.16.02.2.01.0003	MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA PRIORITAS KOMUNIKASI PD	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	3	dokumen	2.650.000.000	-	-	-	-	-	-			12	962.000.000	**12**	**962.000.000**	400	**36**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.02.2.01.0005	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	36	dokumen	723.992.000	-	-	-	-	-	-			12	149.940.000	**12**	**149.940.000**	33,3333	**21**
2.16.02.2.01.0006	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	36	dokumen	18.450.000	-	-	-	-	-	-			12	100.000.000	**12**	**100.000.000**	33,3333	**542**
2.16.02.2.01.0011	PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	36	dokumen	1.050.000.000	-	-	-	-	-	-				-	**0**	**-**	0	**0**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	22	%	6.150.000.000	-	-	-	-	-	-			**18**	**1.000.000.000**	18	1.000.000.000	0,82	16,26
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	22	%		-	-	-	-	-	-			**18**	**-**	18	-	0,82	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.03.2.01	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YG TELAH DITETAPKAN OLEH PPUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PD KAB/KOTA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	22	%	5.400.000.000	-	-	-	-	-	-			**18**	**1.000.000.000**	18	1.000.000.000	0,82	18,52
2.16.03.2.01.0003	PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	9	%	5.400.000.000	-	-	-	-	-	-			3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	0,33	18,52

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOV DI LINGKUP PD KAB/KOTA	Persentase layanan publik dan layanan adminitrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	22	unit	750.000.000	-	-	-	-	-	-			**18**	**-**	18	-	0,82	0,00
2.16.03.2.02.0007	PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	6	unit	750.000.000	-	-	-	-	-	-			2	-	2	-	0,33	0,00
2.20	Urusan Pemerintah Bidang Statistik							-	-	-	-								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	75	%	45.900.000	-	-	-	-	-	-			**22**	**50.000.000**	22	50.000.000	0,29	108,932
2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KAB/KOTA	Persentase kegiatan statistik di lingkup PD	75	%	45.900.000	-	-	-	-	-	-			**22**	**50.000.000**	22	50.000.000	0,29	108,932

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.20.02.2.01.0001	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	dokumen	15.750.000	-	-	-	-	-	-			1	32.510.200	1	32.510.200	0,33	206,414

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.20.02.2.01.0002	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PD DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YG TERINTEGRASI	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	183	Orang	14.400.000	-	-	-	-	-	-			61	10.489.800	61	10.489.800	0,33	72,8458
2.20.02.2.01.0004	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	183	Orang	15.750.000	-	-	-	-	-	-			61	7.000.000	61	7.000.000	0,33	44,4444

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.21	Urusan Pemerintah Bidang Persandian							-	-	-	-								
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	88	%	121.170.000	-	-	-	-	-	-			**22**	**3.000.000**	22	3.000.000	25	2,47586
2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PD KAB/KOTA	Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD	88	%	121.170.000	-	-	-	-	-	-			**22**	**3.000.000**	22	3.000.000	25	2,47586

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=5+7+9		11=(10/4)*100	
2.21.02.2.01.0004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PD KAB/KOTA	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	183	PD	121.170.000	-	-	-	-	-	-			61	3.000.000	61	3.000.000	33	2,47586

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan				Sasaran				
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		Ket
		Renstra 2024	Perubahan Renja Th 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja Th 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.5 B	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%	-	
				Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	-	
					Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	22%	-	

Tujuan				Sasaran				
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		Ket
		Renstra 2024	Perubahan Renja Th 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja Th 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22%	-	
				Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Indeks kepuasan masyarakat	85	-	

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangkalan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.405.368.487					8.848.531.809		-1.556.836.678	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Komunikasi dan Informatika		85%	6.624.554.487		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Komunikasi dan Informatika		85%	6.636.591.809		12.037.322	
2	16	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	24.358.449		Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	2.159.000		-22.199.449	
2	16	01	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Dokumen	5.017.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Dokumen	299.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-4.717.750	Refocusing anggaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
2	16	01	2	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	3.293.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-3.133.500	Refocusing anggaran
2	16	01	2	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	3.692.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	362.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-3.330.000	Refocusing anggaran
2	16	01	2	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	3.370.449	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	233.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-3.136.699	Refocusing anggaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
2	16	01	2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	3.356.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-2.981.000	Refocusing anggaran
2	16	01	2	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	3.692.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	329.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-3.363.000	Refocusing anggaran
2	16	01	2	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	1.937.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-1.537.500	Refocusing anggaran
2	16	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase administrai keuangan		100%	4.930.549.487		Persentase administrai keuangan perangkat		100%	5.255.668.896		325.119.409	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
					Daerah	perangkat daerah yang terpenuhi					daerah yang terpenuhi						
2	16	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	62 Orang/ bulan	4.925.773.487	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	62 Orang/ bulan	5.255.071.896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	329.298.409	
2	16	01	2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	3.776.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-3.376.000	Refocusing anggaran
2	16	01	2	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	66 Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	66 Laporan	197.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-803.000	Refocusing anggaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
2	16	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun		100%	800.000		Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun		100%	350.000		-450.000	
2	16	01	2	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	14 Laporan	800.000		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	15 Laporan	350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-450.000	Refocusing anggaran
2	16	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana		80%	6.000.000		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana		80%	0		-6.000.000	
2	16	01	2,1	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	128 paket	1.000.000		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-1.000.000	Refocusing anggaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
2	16	01	2,1	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 orang	2.500.000		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-2.500.000	Refocusing anggaran
2	16	01	2,1	0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 orang	2.500.000		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-2.500.000	Refocusing anggaran
2	16	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah		80%	63.705.050		Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah		80%	20.905.321		-42.799.729	
2	16	01	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Paket	6.114.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu	-6.114.800	Refocusing anggaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
										m					m		
2	16	01	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Paket	14.970.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Paket	11.086.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-3.883.400	Refocusing anggaran
2	16	01	2,1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Paket	6.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-6.575.000	Refocusing anggaran
2	16	01	2,1	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Paket	10.535.000	Dana Transfer Umum-Dana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Paket	4.770.000	Dana Transfer Umum-Dana	-5.765.000	Refocusing anggaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
										Alokasi Umum					Alokasi Umum		
2	16	01	2,1	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Dokumen	4.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-4.860.000	Refocusing anggaran
2	16	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	50 Laporan	20.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	5.048.471	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-15.601.529	Refocusing anggaran
2	16	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana		80%	2.910.052		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana		80%	0		-2.910.052	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
2	16	1	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 Unit	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah mebel yang diadakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0 jenis	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-1.000.000	Refocusing anggaran
2	16	1	2,1	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	5 Unit	1.910.052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-1.910.052	Refocusing anggaran
2	16	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		80%	1.475.346.000		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		80%	1.336.715.342		-138.630.658	
2	16	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	11.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	5.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
										Umum					Umum		
2	16	1	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Laporan	312.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Laporan	240.715.342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-71.284.658	Refocusing anggaran
2	16	1	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	5 Laporan	1.156.846.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	5 Laporan	1.084.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-72.346.000	Refocusing anggaran
2	16	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana		80%	120.885.449		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana		80%	20.793.250		-100.092.199	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
2	16	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	21 Unit	100.985.449	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	19 Unit	18.193.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-82.792.199	Refocusing anggaran
2	16	01	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Unit	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-8.500.000	Refocusing anggaran
2	16	01	2,1	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	25 Unit	11.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	13 unit	2.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-8.800.000	Refocusing anggaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi		100%	1.730.814.000		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi		100%	1.211.940.000		-518.874.000	
2	16	02	2		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi		100%	1.730.814.000		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi		100%	1.211.940.000		-518.874.000	
2	16	02	2	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	962.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-38.000.000	Refocusing anggaran
2	16	02	2	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Dokumen	374.664.000	Dana Transfer Umum-Dana Alok	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Dokumen	149.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alok	-224.724.000	Refocusing anggaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
										asi Umum					asi Umum		
2	16	02	2	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 dokumen	6.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	93.850.000	
2	16	2	2	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 bulan	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-350.000.000	Refocusing anggaran
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		18%	2.050.000.000		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		18%	1.000.000.000		-1.050.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
						Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		18%			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		18%				
2	16	03	2		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunkana akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		18%	1.800.000.000		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunkana akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		18%	1.000.000.000		-800.000.000	
2	16	03	2	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 unit	1.800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3 unit	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-800.000.000	Refocusing anggaran
2	16	3	2		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		18%	250.000.000		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		18%	0		-250.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
2	16	3	2	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 unit	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-250.000.000	Refocusing anggaran
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				15.300.000					25.000.000		9.700.000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		22%	15.300.000		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		22%	25.000.000		9.700.000	
2	20	02	2		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Statistik Di Lingkup Pd		22%	15.300.000		Persentase Kegiatan Statistik Di Lingkup Pd		22%	25.000.000		9.700.000	
2	20	02	2	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dokumen	1.910.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu	-3.339.800	Refocusing anggaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
										m					m		
2	20	02	2	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	61 Orang	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	44 Orang	16.089.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11.289.800	
2	20	02	2	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	61 Orang	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	20 orang	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.750.000	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				40.390.000					3.000.000		-37.390.000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Tingkat keamanan informasi pemerintah		22%	40.390.000		Tingkat keamanan informasi pemerintah		22%	3.000.000		-37.390.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan perubahan)
						Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 - 6	14
					PENGAMANAN INFORMASI												
2	21	02	2		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD		22%	40.390.000		Persentase pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi di lingkup PD		22%	3.000.000		-37.390.000	
2	21	02	2	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	61 Perangkat Daerah	40.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	61 Perangkat Daerah	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-37.390.000	Refocusing anggaran

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance. Output* Rencana Kerja adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program. Selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja perubahan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana selanjutnya. Semoga dokumen rencana kerja perubahan Dinas ini mampu mengantarkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Bangkalan.

Bangkalan, 6 Agustus 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640814 198703 1 012

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kinerja yang lebih efektif, optimal untuk mencapai sasaran. Rencana Kerja Tahunan (RKT) bertujuan sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran.

Keberhasilan pembangunan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat di ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplentasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, kami berharap agar rencana kerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 30 Agustus 2024
Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Bangkalan

Moawi Arifin, S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 19800212 199810 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah ini.

Gambar. 1.1.

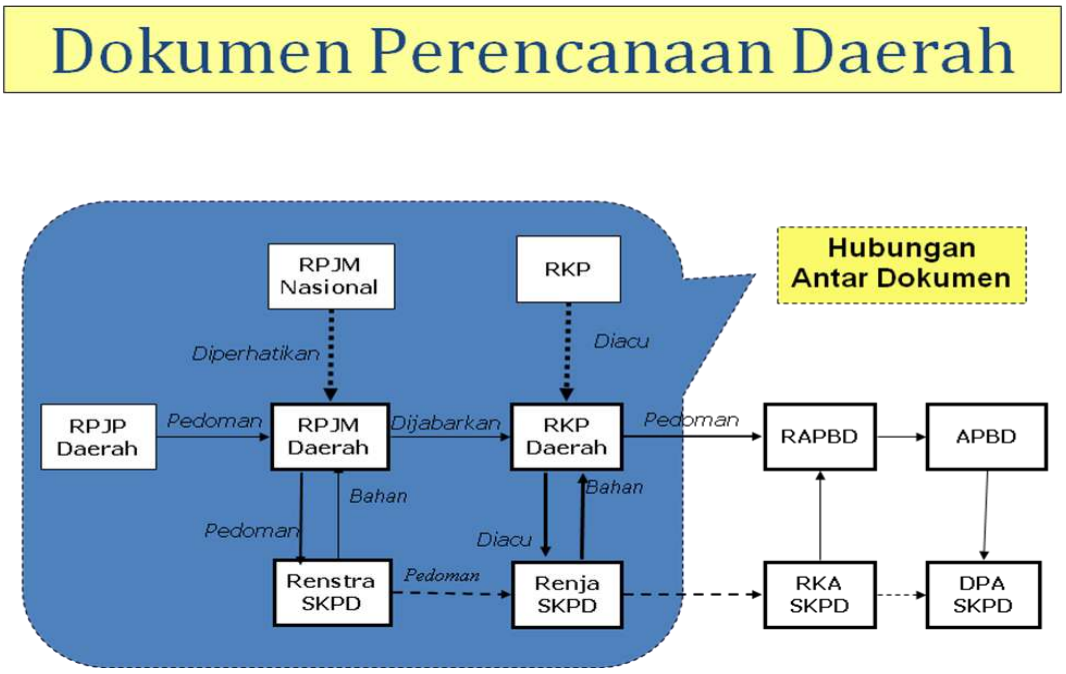

Sumber : Diadopsi dari Bahan Sosialisasi SPPN (Bappenas)

I.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standart Pelayanan Minimal (**bagi Perangkat Daerah yang memiliki target SPM**);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) (**bagi Perangkat Daerah yang memiliki target SPM**);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 2016 Nomor 1/D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan GTahun 2025-2045;
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025;

I.3. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Rancangan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN**

   Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

   Pada bab ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022, selain itu dengan memperhatikan dokumen RPJMD sebagai bahan acuan. Capaian kinerja menguraikan tentang kondisi geografi, demografi pencapaian kinerja dan permasalahan pembangunan

3. **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

   Bab ini menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pelaksanaan Renja tahun 2022 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra SKPD, identifikasi isu strategis.

   Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, berdasarkan prakiraan maju pada Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024.

4. **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
5. **BAB V PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran tahun 2024.

Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2024 dititikberatkan pada program prioritas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang meliputi :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari program utama di atas, maka perlu dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan pembangunan koperasi dan UM antara lain :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
11	**01**	**16**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
2	17	01	2	01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	1	1	1	100%	3	5	5,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8	8	8	8	100%	4	20	2,50
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	2	7	7	100%	4	13	1,86
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	1	0	0	0%	0	1	1,00
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	1	0	0	0%	0	1	1
2	**17**	**01**	**2**	**02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yag digaji/diberi tunjuangan	12	12	12	12	100%	12	36	3
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	3	3
2	**17**	**01**	**2**	**03**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	2	2	2	2	100%	2	6	3
2	**17**	**01**	**2**	**05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti keikutsertaan peserta bimtek	20	300	550	550	100%	300	1150	57,5
2	**17**	**01**	**2**	**06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	16	32	32	100%	32	80	2,5

					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	3	3
2	**17**	**01**	**2**	**08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	3	3	3	100%	3	9	4,5
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14	14	14	14	100%	14	42	3
2	**17**	**01**	**2**	**09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	2	2	2	100%	2	6	3
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	3	0	4	4	100%	4	8	2,666666667
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	0	1	1	100%	1	2	2
2	**17**	**01**	**2**	**07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	2	0	2	2	100%	2	4	2
2	**17**	**02**			**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi**	**14%**	**13%**	**14%**	**14%**	**100%**	**14%**	**41%**	**293%**
2	**17**	**02**	**2**	**01**	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan KSP/USP yang mendapatkan ijin usaha**	**20**	**20**	**20**	**20**	**100%**	**20**	**60**	**3**
					Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang difasilitasi ijin usahanya	20	20	20	20	100%	20	60	3
2	**17**	**03**			**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas**	**69%**	**0**	**69%**	**69%**	100%	**69%**	**138%**	**200%**
2	**17**	**03**	**2**	**01**	**Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**20**	**0**	**35**	**35**	**100%**	**69**	**104**	**5,2**
					Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	10	0	30	30	100%	46	76	7,6

					Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi non simpan pinjam yang mematuhi perundang-undangan	10	0	5	5	100%	23	28	2,8
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi**	**40%**	**0**	**40%**	**40%**	**100%**	**40%**	**80%**	**200%**
2	**17**	**04**	**2**	**01**	**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan koperasi yang dinilai kesehatannya**	**20**	**0**	**40**	**40**	**100%**	**40**	**80**	**4**
					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	10	0	25	25	100%	25	50	5
					Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan	10	0	15	15	100%	15	30	3
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi (orang)**	**94%**	**60%**	**94%**	**93,70%**	**100%**	**94%**	**248%**	**264%**
2	**17**	**05**	**2**	**01**	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan SDM Koperasi yang Dilatih**	**20**	**172**	**13**	**13**	**100%**	**27**	**212**	**10,6**
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang Dilatih	20	22	13	13	100%	27	62	3,10
2	**17**	**05**	**2**	**02**	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih**	**160**	**150**	**160**	**150**	**94%**	**160**	**460**	**2,875**
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih	160	150	160	150	94%	160	460	2,875
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi**	**55%**	**40%**	**55%**	**55%**	**100%**	**55%**	**150%**	**273%**
2	**17**	**06**	**2**	**01**	**Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan koperasi yang diberdayakan/dilindungi/dibina**	**20**	**0**	**55**	**55**	**100%**	**55**	**110**	**5,5**
					Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan restrukturisasi usaha/difasilitasi/dibina/diperluas akses pasar dan pembiayaannya	20	0	55	55	100%	55	110	5,5
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase Usaha mikro yang diberdayakan**	**35%**	**30%**	**35%**	**35%**	**100%**	**35%**	**100%**	**286%**

2	**17**	**07**	**2**	**01**	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Peningkatan UM yang diberdayakan**	**25**	**30**	**35**	**35**	**100%**	**35**	**100**	**4**
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang diberdayakan	25	30	35	35	100%	35	100	4
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase UM yang dikembangkan**	**5%**	**5%**	**7%**	**2800%**	**40000%**	**7%**	**2812%**	**56240%**
2	**17**	**08**	**2**	**01**	**Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Peningkatan UM yang dikembangkan**	**5**	**5**	**7**	**2800**	**40000%**	**7**	**2812**	**562,4**
					Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UM yang dikembangkan	50	5	7	2800	40000%	7	2812	56,24

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Bangkalan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu penyangga utama birokrasi telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud birokrasi yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat. Hampir seluruh upaya tersebut mencapai hasil yang sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar dan diantaranya hasil kegiatan di tahun 2022 yang telah dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan.

Dinas koperasi UMKM Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, merupakan SKPD yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat dengan mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi dan UKM beserta jajarannya berperan menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar tumbuh dan berkembang dengan baik (pasal 12 ayat 1). Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan dan pemberdayaan koperasi bagi kepentingan anggota (pasal 112 ayat 2). Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk sebagai berikut :

a. Pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian koperasi
b. Bimbingan usaha koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota
c. Memperkokoh permodalan dan pembiayaan koperasi
d. Bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lainnya
e. Bantuan konsultasi, informasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi

Capaian kinerja pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam arti luas tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan, sebagaimana tabel 2.2 :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pertumbuhan Omset Koperasi dan Usaha Mikro			5.814.417.826.260	5.818.772.705.400	0.10%	0.11%	4.573.784.507.487	-	0.10%	0.11%	
2	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas			93,7%	98,87%	98,00%	98.10%	78,66%	-	98,00%	98.10%	
3	Indeks Kepuasaan Masyarakat			100%	100%	100%	100%	96,8%	-	100%	100%	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	-	61	61,68	60,68	-	61	61,68	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi dan usaha mikro. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro
2. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang koperasi dan usaha mikro
4. Pelaksanaan administrasi bidang koperasi dan usaha mikro
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

1. Mengembangkan koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri
2. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha koperasi dan usaha mikro terhadap persaingan ekonomi global
3. Peningkatan kualitas penyajian data dan informasi dalam penyusunan kebijakan koperasi dan usaha mikro
4. Mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

5. Meningkatkan peran koperasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Review adalah kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Melalui dokumen renja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan denga kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan.

Selanjutnya data mengenai review terhadap rancangan pada Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Bangkalan yang didasarkan pada indikator kinerja kegiatan sebagaimana tabel 2.3 :

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi**	**14%**	**45.000.000**	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi**	**14%**	**15.000.000**	
	A. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan KSP/USP yang mendapatkan ijin usaha**	**20 kop**	**30.000.000**	**A. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan KSP/USP yang mendapatkan ijin usaha**	**-**	**-**	
	a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah KSP/USP yang difasilitasi ijin usahanya	20 kop	30.000.000	a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah KSP/USP yang difasilitasi ijin usahanya	-	-	
	A. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan Kantor Cabang yang diterbitkan ijinnya**	**10 kop**	**15.000.000**	**A. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan Kantor Cabang yang diterbitkan ijinnya**	**10 kop**	**15.000.000**	
	a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah kantor cabang yang difasilitasi ijinnya	10 kop	15.000.000	a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah kantor cabang yang difasilitasi ijinnya	10 kop	15.000.000	
2	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas**	**69%**	**20.000.000**	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas**	**69%**	**3.190.150**	
	A. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**20 kop**	**20.000.000**	**A. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**20 kop**	**3.190.150**	
	a. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah koperasi yang diawasi	10 kop	10.000.000	a. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah koperasi yang diawasi	10 kop	1.611.300	
	b. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah kabupaten/Kota	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Koperasi non simpan pinjam yang mematuhi perundang-undangan	10 kop	10.000.000	b. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah kabupaten/Kota	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Koperasi non simpan pinjam yang mematuhi perundang-undangan	10 kop	1.578.850	
3	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi**	**40%**	**20.000.000**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi**	**40%**	**1.809.850**	
	A. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan koperasi yang dinilai kesehatannya**	**20 kop**	**20.000.000**	**A. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan koperasi yang dinilai kesehatannya**	**10 kop**	**1.809.850**	

	a. Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	10 kop	10.000.000	a. Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	10 kop	1.809.850	
	b. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan	10 kop	10.000.000	b. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan	-	-	
4	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi (orang)**	**94%**	**427.285.000**	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi (orang)**	**94%**	**2.000.000**	
	A. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan SDM Koperasi yang Dilatih**	**20 org**	**15.000.000**	**A. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan SDM Koperasi yang Dilatih**	**20 org**	**2.000.000**	
	a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah SDM Koperasi yang Dilatih	20 org	15.000.000	a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah SDM Koperasi yang Dilatih	20 org	2.000.000	
	B. Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih**	**160 org**	**412.285.000**	**B. Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih**	**-**	**-**	
	a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih	160 org	412.285.000	a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih	-	-	
5	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi**	**55%**	**25.000.000**	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi**	**55%**	**3.000.000**	
	A. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan koperasi yang diberdayakan/dilindungi/dibina**	**40 kop**	**25.000.000**	**A. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan koperasi yang diberdayakan/dilindungi/dibina**	**20 kop**	**3.000.000**	
	a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah koperasi yang mendapatkan restrukturisasi usaha/difasilitasi/dibina/diperluas akses pasar dan pembiayaannya	20 kop	15.000.000	a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah koperasi yang mendapatkan restrukturisasi usaha/difasilitasi/dibina/diperluas akses pasar dan pembiayaannya	-	-	
	b. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah koperasi yang Melaksanakan Pengembangan Ekonomi	20 kop	10.000.000	b. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah koperasi yang Melaksanakan Pengembangan Ekonomi	20 kop	3.000.000	
6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan**	**35%**	**90.000.000**	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan**	**-**	**-**	
	A. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan UM yang diberdayakan**	**150 UM**	**90.000.000**	**A. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan UM yang diberdayakan**	**-**	**-**	
	a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro Produktif	25 UM	15.000.000	a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro Produktif	-	-	
	b. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Melaksanakan Kemitraan	25 UM	15.000.000	b. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Melaksanakan Kemitraan	-	-	
	c. Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Perizinan	25 UM	15.000.000	c. Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Perizinan	-	-	

	d. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah UM yang diberdayakan	25 UM	15.000.000	d. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah UM yang diberdayakan	-	-	
	e. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Koordinasi yang Telah Dilaksanakan	25 UM	15.000.000	e. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Koordinasi yang Telah Dilaksanakan	-	-	
	f. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah SDM Usaha Mikro yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	25 UM	15.000.000	f. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah SDM Usaha Mikro yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	-	-	
7	**Program Pengembangan UMKM**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan**	**5%**	**125.000.000**	**Program Pengembangan UMKM**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan**	**5%**	**5.000.000**	
	A. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan UM yang dikembangkan**	**10 UM**	**125.000.000**	**A. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Peningkatan UM yang dikembangkan**	**10 UM**	**5.000.000**	
	a. Pengembangan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah UM yang dikembangkan	50 UM	125.000.000	a. Pengembangan Usaha Mikro	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah UM yang dikembangkan	50 UM	5.000.000	
8	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**5.921.700.540**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**6.313.366.092**	
	A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100%**	**7.000.000**	**A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100%**	**3.000.000**	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7 dok	1.000.000	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7 dok	1.000.000	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dok	1.000.000	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	-	-	
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dok	1.000.000	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	-	-	
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dok	1.000.000	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	-	-	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dok	1.000.000	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	-	-	

	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dok	1.000.000	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dok	1.000.000	
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 lap	1.000.000	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 lap	1.000.000	
	B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi**	**100%**	**4.689.912.540**	**B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi**	**100%**	**5.397.898.962**	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	4.687.912.540	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	5.394.121.612	
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Administrasi ASN	-	-	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Administrasi ASN	-	-	
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	
	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	-	-	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	-	-	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang	1 dok	2.000.000	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang	1 dok	3.777.350	
	f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah bahan tanggapan SKPD yang tersusun	-	-	f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah bahan tanggapan SKPD yang tersusun	-	-	
	g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	-	-	g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	-	-	
	h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah laporan realisasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	-	-	h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah laporan realisasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	-	-	
	C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**1.000.000**	**C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**-**	**-**	
	a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	-	-	a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	-	-	
	b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	-	-	b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	-	-	
	c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	-	-	c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	-	-	

	d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	-	-	d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	-	-	
	e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	
	f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	2 dok	1.000.000	f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	-	-	
	g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	
	D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**2.432.576.000**	**D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**-**	**-**	
	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	
	b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
	c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun	-	-	c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun	-	-	
	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	-	-	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	-	-	
	e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	-	-	e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	-	-	

	f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	
	g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	h. Pemindahan Tugas ASN	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	h. Pemindahan Tugas ASN	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	5.000.000	i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	
	j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	20 Org	10.000.000	j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	
	k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**45.768.000**	**E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**29.839.680**	
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	

	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	
	e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Jenis	3.768.000	e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	
	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	
	g. Penyediaan Bahan/Material	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	-	-	g. Penyediaan Bahan/Material	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	-	-	
	h. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	h. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	
	i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 kali	40.000.000	i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 kali	29.839.680	
	j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	1 Dok	1.000.000	j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	-	-	
	k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	1 Dok	1.000.000	k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	-	-	

	F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**	**209.300.000**	**F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**-**	**-**	
	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	4 Jenis	135.200.000	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	-	-	
	b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	-	-	b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	-	-	
	c. Pengadaan Alat Besar	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Alat Besar yang diadakan	-	-	c. Pengadaan Alat Besar	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Alat Besar yang diadakan	-	-	
	d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan	-	-	d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan	-	-	
	e. Pengadaan Mebel	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Mebel yang diadakan	-	-	e. Pengadaan Mebel	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Mebel yang diadakan	-	-	
	f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4 Unit	24.100.000	f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	-	-	
	g. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	2 Unit	25.000.000	g. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	-	-	

	h. Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	-	-	h. Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	-	-	
	i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	-	i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	-	
	j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	-	j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	-	
	k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	25.000.000	k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	
	G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100%**	**803.720.000**	**G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100%**	**797.907.450**	
	a. Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	a. Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis	64.320.000	b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis	74.320.000	
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	

	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 jenis	739.400.000	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 jenis	723.587.450	
	H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana**	**1**	**150.000.000**	**H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana**	**1**	**84.720.000**	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 jenis	120.000.000	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 jenis	69.400.000	
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar yang disediakan	-	-	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar yang disediakan	-	-	
	d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	-	-	d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	-	-	
	e. Pemeliharaan Mebel	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Mebel yang dipelihara	-	-	e. Pemeliharaan Mebel	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Mebel yang dipelihara	-	-	
	f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	

	g. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	3 jenis	10.000.000	g. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	3 jenis	7.820.000	
	h. Pemeliharaan aset Tak Berwujud	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	-	-	h. Pemeliharaan aset Tak Berwujud	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	-	-	
	i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Jenis	20.000.000	i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Jenis	7.500.000	
	j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	
	k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	
	l. Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Tanah yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	l. Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Dinas koperasi & usaha mikro	Jumlah Tanah yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	
JUMLAH					**6.673.985.540**	**JUMLAH**				**6.343.366.092**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Data mengenai Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan pada Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Bangkalan tidak ada Data untuk disajikan, sebagaimana tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro adalah amanat UU Nomor 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025, UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 20/2008 Tentang UMKM. RPJPN menenkankan bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro diarahkan untuk mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Identifikasi kebijakan nasional dan propinsi :

A. Nasional
   1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
   2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
   3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
   4. Penguatan kelembagaan usaha
   5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha

B. Propinsi
   1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM
   2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif
   3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
   4. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM
   5. Penguatan kelembagaan koperasi

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Prioritas Pembangunan tahun 2024 ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis dan ditindaklanjuti oleh program-program yang bertujuan untuk mewujudkan amanat visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPD

Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 serta RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024-2026.

Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas merupakan tanggung jawab pemerintah bersama dengan anggota dan pengelola koperasi dan Usaha Mikro. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban menyelenggarakan peraturan dan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro. Sedangkan anggota dan pengelola koperasi serta UMKM berperan serta sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas, maka diperlukan koordinasi lintas instansi.

Prioritas pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu ditindaklanjuti dalam kurun waktu tiga tahun kedepan dalam kerangka pikir yang mempunyai keterkaitan adalah :

1. Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro sebagai upaya peningkatan pendapatan Usaha Mikro selaku anggota koperasi dengan memanfaatkan peluang pasar dan investasi baik regional, nasional maupun internasional pasca jembatan SURAMADU.
2. Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro agar dapat mengelola usahanya secara profesional dan mandiri.
3. Peningkatan penerapan IPTEK dalam pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
4. Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro sebagai upaya peningkatan pendapatan Usaha Mikro selaku anggota koperasi dengan memanfaatkan peluang kemitraan usaha dengan BUMN dan pengusaha besar.
5. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri.
6. Peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan Koperasi dan Usaha Mikro untuk memanfaatkan peluang pasar regional, nasional dan internasional.

7. Memperkuat struktur permodalan Koperasi dan Usaha Mikro untuk pengembangan usahanya.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2023	2024			2023	2024	
(2)	(3)			(2)	(3)			(5)
Meningkatkan produktifitas koperasi dan usaha mikro	Jumlah omset koperasi dan usaha mikro	5.818.772.705.400	6.400.649.975.940	Meningkatnya koperasi dan usaha mikro yang berkualitas	Persentase koperasi dan usaha mikro yang berkualitas	98,87%	98%	
				Terpenuhinya layanan internal kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	100%	100%	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan

   Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah 8 Program dengan 16 Kegiatan.

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

   Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan sifat penyebarannya adalah Kabupaten Bangkalan dan melingkupi di beberapa kecamatan.

Dalam mewujudkan pembangunan Koperasi dan UM yang berkualitas dibutuhkan adanya suatu kebijakan Koperasi dan UM yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro.

Sasaran tersebut ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 serta RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

Adapun sasaran strategis program pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah.
2. Peningkatan jumlah koperasi dan Usaha Mikro yang memiliki jaringan infrastruktur
3. Pengembangan promosi produk koperasi dan Usaha Mikro
4. Peningkatan kemitraan usaha antara LKM/KSP dengan lembaga keuangan
5. Pemasyarakatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi koperasi dan Usaha Mikro
6. Peningkatan SDM pengelola koperasi dan Usaha Mikro
7. Pemanfaatan fasilitas pemerintah bagi koperasi dan Usaha Mikro
8. Pembentukan dan pengembangan klinik Usaha Mikro
9. Kebijakan dan program pembangunan koperasi
10. Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
11. Revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi
12. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

Secara rinci rencana program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Koperasi dan usaha mikro Kabupaten Bangkalan dapat diuraikan pada tabel 4.1 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025) :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**17**					**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
2	**17**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**100%**	**6.313.366.092**	**DAU**		**100%**	**6.006.700.540**
2	**17**	**01**	**2**	**01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**	**Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**100%**	**3.000.000**	**DAU**		**100%**	**7.000.000**
2	17	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran Yang Disediakan	Dinas koperasi & usaha mikro	7 Dok	1.000.000	DAU		7 Dok	1.000.000
2	17	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		1 Dok	1.000.000
2	17	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Disusun	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		1 Dok	1.000.000
2	17	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		1 Dok	1.000.000
2	17	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		1 Dok	1.000.000
2	17	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	Dinas koperasi & usaha mikro	1 Dok	1.000.000	DAU		1 Dok	1.000.000
2	17	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun	Dinas koperasi & usaha mikro	8 Laporan	1.000.000	DAU		8 Laporan	1.000.000
2	**17**	**01**	**2**	**02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan PD**	**Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**100%**	**5.397.898.962**	**DAU**		**100%**	**4.724.912.540**
2	17	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas koperasi & usaha mikro	12 Bln	5.394.121.612	DAU		12 Bln	4.722.912.540
2	17	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Dinas koperasi & usaha mikro	1 Dok	3.777.350	DAU		1 Dok	2.000.000
2	**17**	**01**	**2**	**03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD**	**Persentase Adninistrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Tersusun**	Dinas koperasi & usaha mikro	**-**	**-**	**DAU**		**100%**	**1.000.000**
2	17	01	2	03	6	Penatausahaan Barang Milik Derah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		2 Dok	1.000.000
2	**17**	**01**	**2**	**05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD**	**Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang Terlaksana**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**-**	**-**	**DAU**		**100%**	**35.000.000**

2	17	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Diklat	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		2 Orang	5.000.000
2	17	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		20 Orang	30.000.000
2	**17**	**01**	**2**	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum PD**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum PD**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**100%**	**29.839.680**	**DAU**		**100%**	**45.768.000**
2	17	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		1 Jenis	3.768.000
2	17	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	23 Kali	29.839.680	DAU		32 Kali	40.000.000
2	17	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip pada SKPD	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		1 Dok	1.000.000
2	17	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahn Berbasis Elekstronik	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		1 Dok	1.000.000
2	**17**	**01**	**2**	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah**	**Pesentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**-**	**-**	**DAU**		**100%**	**209.300.000**
2	17	01	2	7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		4 Jenis	135.200.000
2	17	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		4 Unit	24.100.000
2	17	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		2 Unit	25.000.000
2	17	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		2 Unit	25.000.000
2	**17**	**01**	**2**	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**100%**	**797.907.450**	**DAU**		**100%**	**803.720.000**
2	17	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas koperasi & usaha mikro	2 Jenis	74.320.000	DAU		2 Jenis	64.320.000
2	17	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas koperasi & usaha mikro	14 Jenis	723.587.450	DAU		14 Jenis	739.400.000
2	**17**	**01**	**2**	**09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlalsana**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**100%**	**84.720.000**	**DAU**		**100%**	**180.000.000**
2	17	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas koperasi & usaha mikro	2 Jenis	69.400.000	DAU		2 Jenis	120.000.000
2	17	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dinas koperasi & usaha mikro	3 Jenis	7.820.000	DAU		3 Jenis	10.000.000
2	17	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Dinas koperasi & usaha mikro	1 Jenis	7.500.000	DAU		1 Jenis	50.000.000
2	**17**	**02**				**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**14%**	**15.000.000**	**DAU**		**14%**	**45.000.000**

2	**17**	**02**	**2**	**01**		**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota**	**Peningkatan KSP/USP yang Mendapatkan Izin Usaha**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**-**	**-**	**DAU**		**20 Kop**	**30.000.000**
2	17	02	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah KSP/USP yang Difasilitasi Ijin Usahanya	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		20 Kop	30.000.000
2	**17**	**02**	**2**	**02**		**Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota**	**Peningkatan Kantor Cabang yang Diterbitkan Izinnya**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**10 Kop**	**15.000.000**	**DAU**		**10 Kop**	**15.000.000**
2	17	02	2	02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Kantor Cabang yang Difasilitasi Izinnya	Dinas koperasi & usaha mikro	10 Kop	15.000.000	DAU		10 Kop	15.000.000
2	**17**	**03**				**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**69%**	**3.190.150**	**DAU**		**69%**	**20.000.000**
2	**17**	**03**	**2**	**01**		**Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota**	**Peningkatan Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**20 Kop**	**3.190.150**	**DAU**		**20 Kop**	**20.000.000**
2	17	03	2	01	01	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	Dinas koperasi & usaha mikro	10 Kop	1.611.300	DAU		10 Kop	10.000.000
2	17	03	2	01	02	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Non Simpan Pinjam yang Mematuhi Perundang-undangan	Dinas koperasi & usaha mikro	10 Kop	1.578.850	DAU		10 Kop	10.000.000
2	**17**	**04**				**Program Penilaian Kesehatn KSP/USP Koperasi**	**Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**40%**	**1.809.850**	**DAU**		**40%**	**20.000.000**
2	**17**	**04**	**2**	**01**		**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota**	**Peningkatan Koperasi yang Dinilai Kesehatannya**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**10 Kop**	**1.809.850**	**DAU**		**20 Kop**	**20.000.000**
2	17	04	2	01	01	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	Dinas koperasi & usaha mikro	10 Kop	1.809.850	DAU		10 Kop	10.000.000
2	17	04	2	01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		10 Kop	10.000.000

2	**17**	**05**				**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**94%**	**2.000.000**	**DAU & DAK Non**		**94%**	**429.346.425**
2	**17**	**05**	**2**	**01**		**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota**	**Peningkatan SDM Koperasi yang Dilatih**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**20 Org**	**2.000.000**	**DAU**		**20 Kop**	**15.000.000**
2	17	05	2	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang Dilatih	Dinas koperasi & usaha mikro	20 Org	2.000.000	DAU		20 Kop	15.000.000
2	**17**	**05**	**2**	**02**		**Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kab/Kota**	**Peningkatan SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**-**	**-**	**DAK Non Fisik**		**160 Orang**	**414.346.425**
2	17	05	2	02	01	a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAK Non Fisik		160 Orang	414.346.425
2	**17**	**06**				**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**55%**	**3.000.000**	**DAU**		**55%**	**25.000.000**
2	**17**	**06**	**2**	**01**		**Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota**	**Peningkatan Koperasi yang Diberdayakan/Dilindungi/Dibina**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**20 Kop**	**-**	**DAU**		**40 Kop**	**15.000.000**
2	17	06	2	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pembeiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Restrukturisasi Usaha/Difasilitasi/Dibina/Diperluas Akses Pasar dan Pembiayaannya	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		20 Kop	15.000.000
2	17	06	2	02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Koperasi yang melaksanakan pengembangan ekonomi	Dinas koperasi & usaha mikro	20 Kop	3.000.000	DAU		20 Kop	10.000.000
2	**17**	**07**				**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**-**	**-**	**DAU**		**35%**	**90.000.000**
2	**17**	**07**	**2**	**01**		**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Peningkatan Usaha Mikro Yang diberdayakan**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**-**	**-**	**DAU**		**35 Usaha Mikro**	**90.000.000**
2	17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro produktif	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		25 UM	15.000.000

2	17	07	2	02	02	Pemberdayaan melalui kemitraan	Jumlah usaha mikro yang melaksanakan kemitraan	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		25 UM	15.000.000
2	17	07	2	03	03	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan perizinan	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		25 UM	15.000.000
2	17	07	2	04	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		25 UM	15.000.000
2	17	07	2	05	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah koordinasi yang telah dilaksanakan	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		25 UM	15.000.000
2	17	07	2	06	06	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM Usaha Mikro yang mengikuti peningkatan kapasitas	Dinas koperasi & usaha mikro	-	-	DAU		25 UM	15.000.000
2	**17**	**08**				**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Dikembangkan**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**5%**	**5.000.000**	**DAU**		**5%**	**20.000.000**
2	**17**	**08**	**2**	**01**		**Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Peningkatan Usaha Mikro yang Dikembangkan**	**Dinas koperasi & usaha mikro**	**10 UM**	**5.000.000**	**DAU**		**10 UM**	**20.000.000**
2	17	**08**	2	01	01	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Dikembangkan	Dinas koperasi & usaha mikro	50 UM	5.000.000	DAU		50 UM	20.000.000
JUMLAH										**6.343.366.092**				**6.656.046.965**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2022 telah disusun dengan mengacu kepada RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap urusan perkoperasian, perdagangan serta perekonomian daerah.

Dokumen Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntablitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, jika ketersediaan anggaran tidak cukup memadai, maka perlu dilakukan skala prioritas untuk pelaksanaannya, sehingga program dan kegiatan tersebut tetap berjalan se-optimal mungkin.

Demikian Rencana Kegiatan yang kami rancang melalui beberapa proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung oleh kondisi yang lebih kondusif diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara sistemik, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan Good Governance.

Bangkalan, 30 Agustus 2024
Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Bangkalan

Moawi Arifin, S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 19800212 199810 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Kami dapat menyusun **"PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024"** dengan tepat waktu.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan berdasarkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Semoga dengan tersusunnya Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, dapat memberikan pedoman dan tolak ukur dalam penyusunan rencana kerja tahunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan dan petunjuk yang benar , sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

RIZAL MORRIS, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740924 199311 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/ kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu Kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penetapan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarkan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2024 ini menyusun Penetapan Perubahan Renja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024. Rancangan Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan Tahun 2024. Akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan adalah:

a) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b) Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4817)

e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Bagi Perangkat Daerah yang memiliki target SPM)

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguanan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nonor 21 tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):

j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan;

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan RPJMD;

l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tehapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

n) Peraturan Menteri Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2020-2024

o) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

p) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);

q) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor.....Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor .....

r) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D) ;

s) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 50 Tahun 2016 tetang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

t) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2023 Nomor 14 Seri E)

u) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026(Berita Daerah kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)

v) Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisaasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD dengan Renstra OPD.

c) Mewujudkan Keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan Penanaman Modal, dalam rangka kelanjutan pemabngunan Jangka Panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bangkalan.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan dari Penyusunan Penetapan Perubahan Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah
2. Meningkatnya Kinerja Urusan Penanaman Modal

1.4SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini, disusun atas beberapa pokok bahasan yang diklasifikasikan menjadi beberapa bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai semester I tahun berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Penetapan Perubahan RKPD
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan teradap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan adalah Penjabaran perencanan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut penetapan perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan selama tahun 2024 dan perkiraan target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan tahun 2024. Sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BANGKALAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
					Urusan Penanaman Modal									

2	1 8	0 1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**									
2	1 8	0 1	2.0 1		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
2	1 8	0 1	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	1 dok				3 dok	3 dok	43
2	1 8	0 1	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dok	1 dok				1 dok	1 dok	33,3
2	1 8	0 1	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dok	1 dok				1 dok	1 dok	33,3

						Perubahan RKA-SKPD							
2	1 8	0 1	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1 dok				1 dok	1 dok	33,3
2	1 8	0 1	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok				1 dok	1 dok	33,3
2	1 8	0 1	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dok	1 Dok				1 dok	1 dok	33,3

					Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi								
2	1 8	0 1	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan					12 laporan	12 laporan	33,3
2	**1 8**	**0 1**	**2.0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
2	1 8	0 1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/ bulan	45 orang/ bulan				43 orang/b ulan	43orang/ bulan	33,3
2	1 8	0 1	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lapora n	2 Lapora n				2 Laporan	2 Laporan	33,3

2	1 8	0 1	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				18 Laporan	18 Laporan	33,3
2	1 8	0 1	2.0 3		**Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									
2	1 8	0 1	2.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 laporan	2 Laporan				2 laporan	2 laporan	33,3

2	1 8	0 1	2.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	6 Laporan				6 laporan	6 laporan	33,3
2	1 8	0 1	2.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	12 laporan				12 Laporan	12 Laporan	33,3
2	1 8	0 1	2.0 5		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
2	1 8	0 1	2.0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	1 Unit				1 unit	1 unit	100
2	1 8	0 1	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	53 Buah	53 Buah				53 Buah	53 Buah	33,3

2	1 8	0 1	2.0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan				12 Laporan	12 Laporan	33,3
2	1 8	0 1	2.0 5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Haisl Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen						0
2	1 8	0 1	2.0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Laporan	2 Laporan				2 Laporan	2 Laporan	33,3
2	1 8	0 1	2.0 6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
2	1 8	0 1	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penenranagan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Peneranagan Bangunan Kantor	3 Paket	3 Paket				3 Paket	3 Paket	33,3

						yang disediakan							
2	1 8	0 1	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket				5 Paket	5 Paket	33,3
2	1 8	0 1	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100
2	1 8	0 1	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Barang Logistik Kantor	4 Paket	4 paket				4 Paket	4 Paket	33,3
2	1 8	0 1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	5 Paket				5 Paket	5 Paket	100
2	1 8	0 1	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	5 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	100

					undangan	undangan yang disediakan							
2	1 8	0 1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan				25 Laporan	25 Laporan	33,3
2	1 8	0 1	2.0 7		**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
2	1 8	0 1	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	20 unit	20 Unit				20 unit	20 unit	28,5
2	1 8	0 1	2.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	Unit				1 unit	1 unit	33,3

2	1 8	0 1	2.0 8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
2	1 8	0 1	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	2 Jenis				2 Jenis	Jenis	100
2	1 8	0 1	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	4 Jenis				4 jenis	4 jenis	100
2	1 8	0 1	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis				1 Jenis	1 Jenis	100
2	1 8	0 1	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3 Laporan				3 Laporan	3 Laporan	100

2	1 8	0 1	2.0 9		**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
2	1 8	0 1	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	16 Unit				16 unit	16 unit	100
2	1 8	0 1	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Knedaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang disediakan	16 unit	Unit				16 unit	16 unit	100

2	1 8	0 1	2.0 9	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabiltasi	3 unit	3 Unit				3 unit	3 unit	100
2	**1 8**	**0 2**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**									
2	1 8	0 2	2.0 1	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Mosdal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok				1 Doumen	1 Dokumen	33,3
2	1 8	0 2	2.0 1	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok				1 Dokume n	1 Dokumen	33,3

2	1 8	0 2	2.0 2		**Penetapan Pemberian Fasilitasi / Insentif dibidng Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**								
2	1 8	0 2	2.0 2	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dok	1 Dok				1 Dok	1 Dok	33,3
2	1 8	0 2	2.0 2	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dan Kemudahan Berusaha di	1 Dok	1 Dok				1 Dok	1 Dok	33,3

					Daerah								
2	1 8	0 3			**Program Promosi Penanaman Modal**								
2	1 8	0 3	2.0 1		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**								
2	1 8	0 3	2.0 1	01	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah PeraturanDaerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok				2 Dokumen	2 Dokumen	33,3
2	1 8	0 3	2.0 1	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	5 Dok	5 Dok				5 Dokumen	5 Dokumen	33,3

					Modal Daerah Kabupaten / Kota	Penanaman Modal Kabupaten/Kota							
2	1 8	0 4			**Program Pelayanan Penanaman Modal**								
2	1 8	0 4	2.0 1	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elekronik	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha				500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	33,3
2	1 8	0 4	2.0 1	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap	12 Pengad uan	12 pengad uan				4 Orang	4 Orang	33,3

					Terpadu Perijinan dan Non Perijinan	Pelayann Terpadu Perizinan dan Non Perizinan							
2	18	05			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**		4,80%					4,80%	4,80%	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha				20 kegiatan Usaha	20 kegiatan Usaha	33,3
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	140 Keg Usaha	140 kegiatan Usaha				140 Kegiatan Usaha	140 Kegiatan Usaha	33,3

2	1 8	0 5	2.0 1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaa Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 Keg Usaha	20 Kegiatan Usaha				20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	33,3
2	1 8	0 6			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**									
2	1 8	0 6	2.0 1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		2 DOk	2 Dok						

2	1 8	0 6	2.0 1	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Bernasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektonik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 Dok					1 Doumen	1 Dokumen	50

2.2 . Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Nilai investasi PMDN, PMA, dan investasi daerah			Rp 309.604.466.324	Rp 355.000.000.000	Rp 128.805.000.000	Rp 393.251.250.000	Rp 416.846.325.000	Rp 113.336.011.619	Rp 212.405.244.000	Rp 393.251.250.000	Rp 416.846.325.000	
2	Persentase Dokumen Perijinan dan Non Perijinan yang diselesaikan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	2050 SK / 410 %	1169 SK / 234%	100%	100%	

Sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2 target tingkat proyeksi pertumbuhan terhadap rencana target Renstra tahun 2025 sebesar 5,50%, Tahun 2026 ditargetkan sebesar 6,00%.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk mendukung peningkatan investasi dalam bidang Penanaman Modal
2. Masih Rendahnya penilaian masyarakat terutama pelaku usaha terhadap terhadap pentingnya legalitas dokumen perijinan
3. Belum tersedianya lahan parkir pegawai yang memadahi
4. Minimnya Informasi Kepada Pelaku Usaha tentang tata cara pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
5. Minimnya Kesadaran Perusahaan Untuk Melaporkan Kegiatannya melalui system OSS Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

2.4 Review Terhadap Penetapan Perubahan RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap Penetapan Perubahan RKPD tahun 2024 diperoleh perbandingan hasil analisis antara Rancangan RKPD Tahun 2024 dengan Kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bangkalan sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP PENETAPAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan DPMPTSP**	100%	**4.692.661.295**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan DPMPTSP**	100 %	**4.692.661.295**	
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja PD**	100%	**1.000.000**	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bkl	**Persentase erpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja PD**	100 %	**1.000.000**	

		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bkl	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bkl	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bkl	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	250.000		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bkl	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	250.000	

		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bkl	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	250.000		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bkl	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	250.000	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bkl	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dok	250.000		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bkl	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Lapora	1 dok	250.000	

					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							n Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bkl	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	250.000		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bkl	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	250.000	

											DPA-SKPD			
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bkl	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi	-	-		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bkl	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaia	-	-	

												n Kinerja Realisasi			
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bkl	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bkl	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Bkl**	**Persentase Administrasi Keuangan Peerangkat Daerah yang terlaksana**		**4.199.971.795**	**2**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Bkl**			**4.199.971.795**	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bkl	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	4.199.411.795		1	Penyediaan Gaji dan Tunjan	Bkl	Jumlah Penyediaan Gaji dan	44 orang/bulan	4.199.411.795	

									gan ASN		Tunjangan ASN				
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	560.000		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	560.000	

		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes	-	-	

												teran SKPD			
	3	**Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Bkl**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disusun**		**250.000**	**3**	**Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Bkl**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disusun**		**250.000**	
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bkl	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bkl	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			

											SKPD			
		2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bkl	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-		2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bkl	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	
		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Bkl	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	12 Laporan	250.000		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bkl	Jumlah Laporan Penatausahaa	12 Laporan	250.000	

			SKPD		Milik Daerah Pada SKPD					pada SKPD		n Barang Milik Daerah Pada SKPD			
	4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**250.000**	**4**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**250.000**	
		1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bkl	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-		1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bkl	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	-	-	

												Pegawai		
		2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bkl	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-		2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bkl	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
		3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bkl	Jumlah Dokumen Haisl Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dok	250.000		3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bkl	Jumlah Dokumen Haisl Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	12 Dok	250.000	

											Kepegawaian			
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Haisl Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Haisl Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	
		5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bkl	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	-	-	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa	Bkl	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan	-	-	

					Pegawai				i		Penilaian Kinerja Pegawai			
		6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bkl	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-		6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bkl	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	
		7	Sosialisasi Peraturan Perundan	Bkl	Jumlah Orang yang mengikuti	-	-		7	Sosialisasi Peraturan Perund	Bkl	Jumlah Orang yang mengik	-	-	

			g-undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					ang-undangan		uti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
		8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bkl	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-		8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bkl	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	

	5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Bkl**	**Persentase Penyediaan Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**14.555.000**	**5**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Bkl**		**100 %**	**14.555.000**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penenranagan Bangunan Kantor	Bkl	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Peneranagan Bangunan Kantor yang disediakan				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penenranagan Bangunan Kantor	Bkl	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Peneranagan Bangunan Kantor yang disediakan			
		2	Penyediaan Peralatan dan	Bkl	Jumlah Paket Peralatan	20 Paket	8.055.000		2	Penyediaan Peralatan dan	Bkl	Jumlah Paket Peralat	8 Paket	8.055.000	

			Perlengkapan Kantor		dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				Perlengkapan Kantor		an dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bkl	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bkl	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	
		4	Penyediaan Bahan Logistik	Bkl	Jumlah Penyediaan Barang Logistik Kantor	4 Paket	1.000.000		4	Penyediaan Bahan Logistik	Bkl	Jumlah Penyediaan Barang Logistik Kantor	4 Paket	1.000.000	
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bkl	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan				5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bkl	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan			

					Perundang-undangan yang disediakan							Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bkl	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bkl	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
		7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bkl	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-		7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bkl	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjun	-	-	

												gan Tamu		
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Bkl	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	5.500.000		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Bkl	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	85.500.000	
	6	**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Bkl**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta**	**100 %**	**-**	**6**	**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Bkl**		**100 %**	**-**	

					h Daerah yang terlaksana										
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bkl	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bkl	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disedia			

											kan			
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bkl	Jumlah Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	-	-		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan n	Bkl	Jumlah Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan			
		2	Pengadaan Mebel	Bkl	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	-	-		2	Pengadaan Mebel	Bkl	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	-	-	

		3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-		3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	-	-		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang diadak	-	-	

												an			
	7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Bkl**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**449.834.500**	**7**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Bkl**		**100 %**	**449.834.500**	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bkl	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bkl	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	

		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bkl	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	59.254.500		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bkl	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	59.254.500	
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bkl	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 Jenis	89.680.000		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bkl	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 Jenis	89.680.000	

		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bkl	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Jenis	300.900.000		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bkl	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Jenis	300.900.000	
	8	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Bkl**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**26.800.000**	**8**	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Bkl**		**100 %**	**26.800.000**	

		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bkl	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	22.800.000		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bkl	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	22.800.000	

		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Knedaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang disediakan	16 unit	3.000.000		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Niaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Knedaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang disediakan	16 unit	3.000.000	
		3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Bkl	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/				3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Bkl	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainny			

			Lainnya		direhabiltasi					Bangunan Lainnya		a yang dipelihara/ direhabiltasi			
		4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bkl	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	1.000.000		4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bkl	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	1.000.000	
2	**Pengembangan Iklim Penanaman**			Bkl	**Nilai Investasi**	**100 %**	**3.000.000**	**Pengembangan Iklim Penanaman Modal**			Bkl		**100 %**	**3.000.000**	

	Modal				**PMA, PMDN**										
	1	Penetapan Pemberian Fasilitasi / Insentif dibidng Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota			**Jumlah Rekomendasi**		**1.500.000**	1	Penetapan Pemberian Fasilitasi / Insentif dibidng Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota				**1.500.000**	
		1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal		Jumlah peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Rekom	1.500.000		1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi / Insentif dan kemudahan		Jumlah peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemud	1 Rekom	1.500.000	

										Penanaman Modal		ahan Penanaman Modal			
		2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Bkl	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Bkl	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			
	2	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota**		**Bkl**	**Jumlah Rekomendasi**	**100 %**	**1.500.000**	**2**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota**		**Bkl**		**100 %**	**1.500.000**	

		1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah kabupaten / Kota	Bkl	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Mosdal Daerah Kabupaten /Kota	1 Rekom	1.500.000		1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah kabupaten / Kota	Bkl	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Mosdal Daerah Kabupaten/Kota	1 Rekom	1.500.000	
		2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Bkl	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	-	-		2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Bkl	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kot	-	-	

												a			
3	**Promosi Penanaman Modal**			**Bkl**	**Nilai Investasi PMA, PMDN**	**100 %**	**1.500.000**	**Promosi Penanaman Modal**			**Bkl**			**1.500.000**	
	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		**Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal**		**1.500.000**	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota					**1.500.000**	
		1	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan				1	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal		Jumlah PeraturanDaerah yang Mengatur Promosi Penana			

					Kabupaten /Kota							man Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			
		2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Bkl	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota	1 Dokumen	1.500.000		2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Bkl	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.500.000	
4	**Program Pelayanan Penanaman Modal**			**Bkl**	**Persentase Dokumen**	**100 %**	**183.265.000**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**			**Bkl**		**100 %**	**183.265.000**	

			Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu									
	1	**Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu**		**183.265.000**	1	Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota				**183.265.000**	

		1	Penyediaan Pelayanan Perijinan Berusaha melalui sistem Perijinan berusaha berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Bkl	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elekronik	500 Pelaku Usaha	183.265.000		1	Penyediaan Pelayanan Perijinan Berusaha melalui sistem Perijinan berusaha berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Bkl	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elekron	500 SK	183.265.000	

											ik				
		2	Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko		Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayann Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				2	Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko		Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayan			

											n Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
		3	Pemantauan,analisa,Evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Bkl	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif				3	Pemantauan, analisa,Evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Bkl	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian			

												Fasilitas/Insentif			
5	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**			**Bkl**	**Persentase Penanaman Modal ynag dibina**	**4,80 %**	**397.530.000**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**			**Bkl**		**4,80 %**	**397.530.000**	
	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		**Jumlah Penanaman Modal yang dipantau, diawasi dan dibina**		**397.530.000**	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota					**397.530.000**	

		1	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegitan Usaha		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	140 Keg Usaha	59.809.000		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Keg Usaha	59.809.000	
		2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku	Bkl	Jumlah Pelaku Usaha yang	20 Keg Usaha	218.642.000		2	Bimbingan Teknis kepada	Bkl	Jumlah Pelaku Usaha yang	20 Keg Usah	218.642.000	

			Usaha		Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					Pelaku Usaha		Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis	a		

											Risiko				
			Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan serta DIlakukan Evaluasi Penilaian	20 Keg usaha	119.079.000		3	Pengawasan Penanaman Modal	Bkl	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari	20 Keg Usaha	119.079.000	

					Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha						Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
6	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**	**Bkl**	**Jumlah Data PM yang**		**1.000.000**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**			**Bkl**			**1.000.000**	

	Penanaman Modal			**terupdate**									
	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		**Jumlah Data PM yang terupdate**		1.000.000	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				1.000.000	
		1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Bernasis Sistem Pelayanan		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara	1 Data	1.000.000		1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem	1 Data	1.000.000	

			Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Elektonik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan					Bernasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektonik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan				
JUMLAH TOTAL							**5.278.986.295**			**JUMLAH TOTAL**					**5.278.986.295**	

Dari Hasil Review Penetapan Perubahan RKPD tahun 2024 dapat dilihat bahwa ada perubahan Pada anggaran yang di berikan Oleh TAPD,

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk tahun 2024 belum ada program dan kegiatan yang berasal dari usulan Program dan kegiatan Masyarakat. Seluruh program dan kegiatan pada tahun 2024 ini bersumber dari usulan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapdu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Kabupaten Bangkalan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

A. Arah kebijakan Pembangunan Nasional

1. Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam Untuk meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

1. Peyelenggaraan Pemerintahan Yang bersih,Efektif, dan anti korupsi

C. Prioritas Pembangunan kabupaten Bangkalan Nasional

1. tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani

3.2 Tujuan dan Sasaran Penetapan Perubahan Renja OPD

Sesuai Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam Penetapan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan tahun 2024 sebagai berikut :

Tujuan :

1. **Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah**
2. **Meningkatnya Kinerja Urusan Penanaman Modal**

Sasaran :

a. **Meningkatnya Nilai Investasi Daerah PMA, PMDN**
b. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan**
c. **Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

3.3 Program dan Kegiatan

A**.** Program kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional

1) Program Promosi Penanaman Modal

2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

B. Program Kegiatan yang mendukung Prioritas Priovinsi

1) Program Promosi Penanaman Modal

2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

4) Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal

5) Program Pelayanan Penanaman Modal

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

C. Program kegiatan yang mendukung Prioritas daerah

1) Program Pelayanan Penanaman Modal

2) Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

D.Program Kegiatan yang mendukung Isu strategis daerah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah kabupaten/kota

2) Program Pelayanan Penanaman Modal

3) Program Promosi Penanaman Modal

Jika di Tinjau dari Perkembagan realisasi investasi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1.294.152.727.502, tingginya Nilai realisasi Investasi pada tahun 2022 tersebut merupakan hasil akumulasi dari proyeksi investasi (Data Dashboard Jumlah Nomor Induk Berusaha) kabupaten Bangkalan, yang bukan berasal dari hasil Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2025	2026			2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA, PMDN	Rp 372.750.000.000	Rp 393.251.250.000	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah PMA, PMDN	Nilai Investasi PMA, PMDN	Rp 372.750.000.000	Rp 393.251.250.000	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	Jumlah SK ijin yang terbit tepat waktu	100%	100%	
Meningkatnya Kinerja urusan Penanaman Modal	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Penanaman Modal	100%	100%	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indek Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	
					Nilai Sakip	82	82	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan Sasaran sebagaimaan tersebut diatas, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 terdiri dari 6 (Enam) Program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan total kebutuhan dana sebesar Rp. 5.278.956.295,- Seluruh kegiatan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan. Dengan Sasaran seluruh Kecamatan dikabupaten Bangkalan. Kecuali Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi yang mencakup sasaran Domestik, Regional dan Nasional. Detail rumusan program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan DPMPTSP**	BKL	100%	4.692.661.295	APBD		100%	4.692.661.295
2	18	01	2.01		1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggar**	BKL	100%	**1.000.000**			100%	**1.000.000**

							an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2	18	01	2.01	01		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Bkl			APBD			
2	18	01	2.01	02		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	Bkl	1 dok	250.000	APBD		1 dok	250.000
2	18	01	2.01	03		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	Bkl	1 dok	250.000	APBD		1 dok	250.000
2	18	01	2.01	04		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun	Bkl	1 dok	250.000	APBD		1 dok	250.000

2	18	01	2.01	05		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang Disusun	Bkl	1 Dok	250.000	APBD		1 dok	250.000
2	18	01	2.01	06		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	Bkl	-	-	APBD		1 dok	-
2	18	01	2.01	07		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Bkl	-	-	APBD			-
2	18	01	2.02		**2**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		98%	**4.199.971.795**			98%	**4.199.971.795**

							yang terpenuhi							
2	18	01	2.02	01		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bkl	42 orang/bulan	4.199.411.795	APBD		42 orang/bulan	4.199.411.795
2	18	01	2.02	05		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Bkl	2 Laporan	560.000	APBD		2 Laporan	560.000
2	18	01	2.02	07		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang Tersusun	Bkl	-	-	APBD			
2	18	01	2.03		3	**Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**Bkl**	**100%**	**250.000**	**APBD**	**Bkl**	**100%**	**250.000**

							Perangkat Daerah yang tersusun							
2	18	01	2.03	01		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	Bkl		-	APBD		-	
2	18	01	2.03	05		2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	Bkl	-	-	APBD		-	-
2	18	01	2.03	06		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Bkl	12 Laporan	250.000	APBD		12Laporan	-

							Daerah yang Tersusun							
2	18	01	2.05		**4**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Bkl**	**-**	**250.000**			**-**	**-**
2	18	01	2.05	01		1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bkl	-	-	APBD		-	-
2	18	01	2.05	02		2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bkl	-	-	APBD		-	-

2	18	01	2.05	03		3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun	Bkl	12 Dokumen	250.000	APBD		-	-
2	18	01	2.05	04		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	Bkl	-	-	APBD			-
2	18	01	2.05	05		5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang Tersusun	Bkl	-	-	APBD			-

2	18	01	2.05	09		6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bkl	-	-				-
2	18	01	2.05	10		7	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bkl	-	-				-
2	18	01	2.05	11		8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bkl	-	-				-
2	**18**	**01**	**2.06**		**5**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Penyediaan Umum Perangkat**		**100%**	**14.555.000**			**100%**	**14.555.000**

							Daerah							
2	18	01	2.06	01		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penenranagan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peneranagan Bangunan Kantor	Bkl			APBD			
2	18	01	2.06	02		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bkl	20 Paket	5.055.000	APBD		20 Paket	5.055.000
2	18	01	2.06	03		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bkl	-	-	APBD		-	-
2	18	01	2.06	04		4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Barang Logistik Kantor	Bkl	4 Paket	1.000.000	APBD		4 Paket	1.000.000
2	18	01	2.06	05		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaa	Bkl			APBD			

							n							
2	18	01	2.06	06		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bkl			APBD			
2	18	01	2.06	08		7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bkl	-	-	APBD		-	-
2	18	01	2.06	09		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	Bkl	15 kali	5.500.000	APBD		15 kali	5.500.000
2	**18**	**01**	**2.07**		**6**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**100%**	**-**			**100%**	

							Daerah yang terlaksana							
2	18	01	2.07	01		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Bkl		-				-
2	18	01	2.07	02		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Bkl		-				-
2	18	01	2.07	05		2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Bkl	-	-	APBD		-	-
2	18	01	2.07	09		3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bkl	-	-	APBD			-

							yang diadakan							
2	18	01	2.07	11		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	Bkl	-	-	APBD		-	-
2	**18**	**01**	**2.08**		**7**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**449.834.500**			**100%**	**449.834.500**
2	18	01	2.08	01		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bkl	-	-	APBD		-	-

2	18	01	2.08	02		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bkl	3 jenis	59.254.500	APBD		3 jenis	59.254.500
2	18	01	2.08	03		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bkl	1 Jenis	89.680.000	APBD		1 Jenis	89.680.000
2	18	01	2.08	04		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bkl	5 jenis	300.900.000	APBD		5 jenis	300.900
2	**18**	**01**	**2.09**		**8**	**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**100%**	**26.800.000**			**100%**	**26.000.000**

							Daerah yang terlaksana							
2	18	01	2.09	01		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Bkl	16 unit	22.800.000	APBD		16 unit	22.800.000
2	18	01	2.09	02		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Knedaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Bkl	3 unit	3.000.000	APBD		3 unit	3.000.000

							yang disediakan							
2	18	01	2.09	09		3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direahibiltasi	Bkl	-	-	APBD		-	
2	18	01	2.09	10		4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Bkl	5 jenis	1.000.000	APBD		5 jenis	1.000.000

2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		**Nilai Investasi PMA, PMDN**		**100%**	**3.000.000**			**100%**	**3.000.000**
2	18	02	2.01		1	Penetapan Pemberian Fasilitasi / Insentif dibidng Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Rekomendasi**			**1.500.000**				**1.500.000**
2	18	02	2.01	01		1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Rekomendasi	Bkl	1 Rekom	1.500.000	APBD		1 Rekom	1.500.000
2	18	02	2.01	02		2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Rekomendasi	Bkl			APBD			
2	**18**	**0**	**2.0**		**2**	**Pembuatan Peta**				**1.500.000**				

		2	**2**			**Potensi Investasi Kabupaten / Kota**	**Jumlah Rekomendasi**							**1.500.000**
2	18	02	2.02	01		1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi	Bkl			APBD			
2	18	02	2.02	02		2 Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi	Bkl	1 Dokumen	1.500.000	APBD		1 Dokumen	1.500.000
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**		**Nilai Investasi PMA, PMDN**			**1.500.000**				**1.500.000**
2	18	03	2.01		1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal**		100%	**1.500.000**				**1.500.000**
2	18	03	2.01	01		1 Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Bkl			APBD			

2	18	03	2.01	02		2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Bkl	5 Dokumen	1.500.000	APBD		5 Dokumen	1.500.000
2	18	04			**Program Pelayanan Penanaman Modal**			**Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu**		100%	**183.265.000**			100%	**183.265.000**
2	18	04	2.01		1	**Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu**		**100%**	**183.265.000**			**100%**	**183.265.000**

2	18	04	2.01	01		1	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektonik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Bkl	500 Pelaku Usaha	183.265.000	APBD		500 Pelaku Usaha	183.265.000
2	18	04	2.01	03		2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem	Bkl						

							Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
2	18	04	2.01	04		3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari	Bkl			APBD			

								Pelaku Usaha						
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**			**Persentase Penanaman Modal ynag dibina**		**4,80%**	**397.530.000**			**4,80%**	**397.530.000**
2	18	05	2.01		1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Penanaman Modal yang dipantau, diawasi dan dibina**			**397.530.000**				**397.530.000**
2	18	05	2.01	01		1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang	Bkl	140 Kegiatan Usaha	59.809.000	APBD		140 Kegiatan Usaha	59.809.000

						Usahanya	dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							
2	18	05	2.01	02		2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bkl	20 Pelaku Usaha	218.642.000	APBD		20 Pelaku Usaha	218.642.000
2	18	05	2.01	03		3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang		20 Kegiatan Usaha	119.079.000	APBD		20Kegiatan Usaha	119.079.000

							Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha							
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**		**Jumlah Data PM yang terupdate**			**1.000.000**				**1.000.000**
2	18	06	2.01		1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	**Jumlah Data PM**		1 Data	1.000.000			4 Data	1.000.000

						Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**yang terupdate**							
2	18	06	2.01	01		1 Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data PM yang terupdate	Bkl	1 data	1.000.000	APBD		1 data	1.000.000
										5.278.956.295				**5.278.956.295**

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

RIZAL MORRIS, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740924 199311 1 002

BAB V

PENUTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakaat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavermance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*Trickle down effesct*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan adalah Program tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangakalan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024. Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten

Bangkalan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

RIZAL MORRIS, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740924 199311 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.

Gambar.1.1.

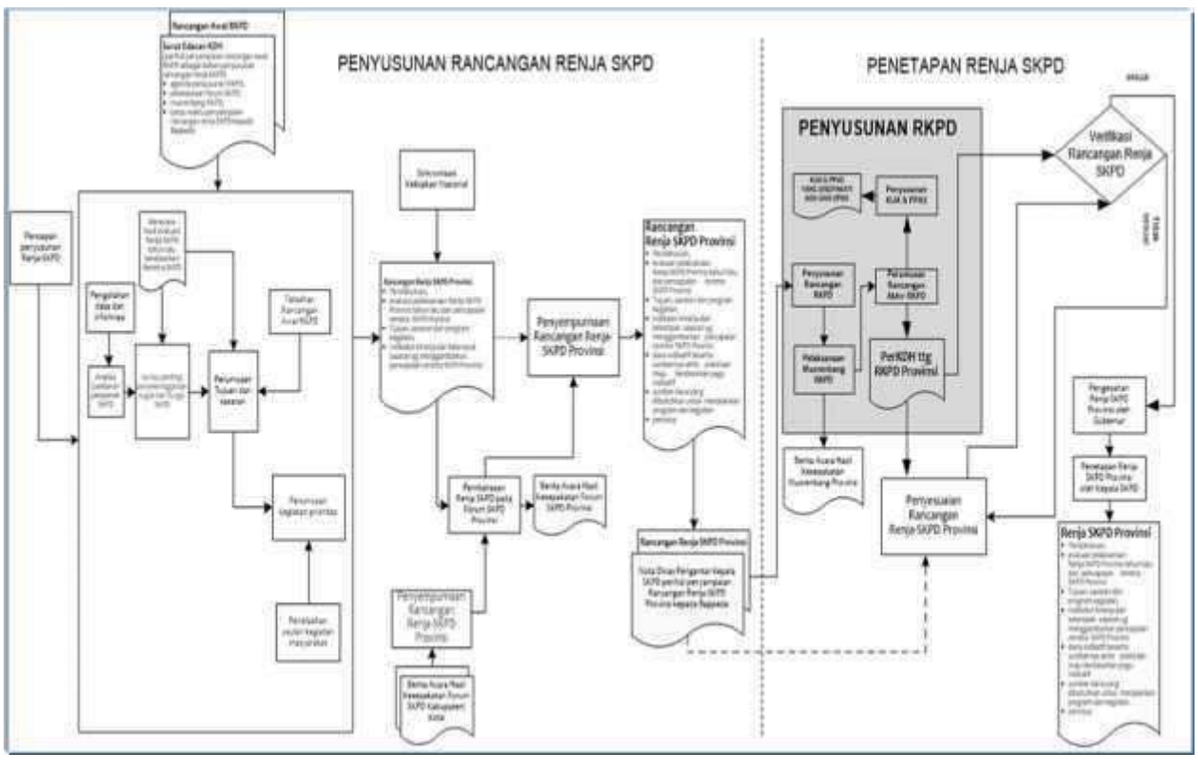

I.2. Landasan Hukum

Landasan hokum Dinas Pemuda, Olahraga Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodeikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kementrisn Pemuda Dan Olahraga Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 1/D, tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 33/E).
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);
17. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangkalan

I.3. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan setelah setengah jalan Tahun Anggaran 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemuda, Olah Raga Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Pemuda, Olah Raga Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
    a. Latarbelakang

b. Landasan Hukum
c. Maksud Tujuan
d. Sistematika Penulisan

2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
   a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
   a. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
4. BAB IV PENUTUP
   a. Kesimpulan

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja pembangunan Pemuda dan Olahraga pada triwulan II tahun berjalan 2024 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA Tahun 2024 dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Adapun pelaksanaan 4 program dan 11 kegiatan di Dispora Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Bangkalan

Dinas Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegatan (*outout*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023									Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
									Target Renja PD Tahun 2023			Realisasi Renja PD Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K			Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)				9			10=(5+7+9)			11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	79	nilai	14,462,773,248	76.74	nilai	12,784,894,796	76	nilai	4,165,687,739	80.41	nilai	4,099,197,984	100	%	98%		77	nilai	4,735,157,716	233.41	nilai	21,619,250,496	295%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	%	24,000,000	100	%	15,692,150	100	%	3,540,200	100	%	3,540,200	100	%	100%		100	%	8,000,000	300	%	27,232,350	300%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	4,500,000	6	Dokumen	3,894,450	8	Dokumen	499,700	8	Dokumen	499,700	100	%	100%		2	Dokumen	1,000,000	16	Dokumen	5,394,150	267%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	3,000,000	3	Dokumen	2,191,950	1	Dokumen	260,200	1	Dokumen	260,200	100	%	100%		1	Dokumen	1,500,000	5	Dokumen	3,952,150	167%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	3,000,000	3	Dokumen	1,233,950	1	Dokumen	260,200	1	Dokumen	260,200	100	%	100%		1	Dokumen	1,000,000	5	Dokumen	2,494,150	167%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	3,000,000	3	Dokumen	1,233,950	1	Dokumen	260,200	1	Dokumen	260,200	100	%	100%		1	Dokumen	1,000,000	5	Dokumen	2,494,150	167%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3	Dokumen	3,000,000	3	Dokumen	1,473,450	1	Dokumen	499,700	1	Dokumen	499,700	100	%	100%		1	Dokumen	1,000,000	5	Dokumen	2,973,150	167%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	4,500,000	3	Laporan	3,472,450	1	Laporan	1,500,000	1	Laporan	1,500,000	100	%	100%	1	Laporan	1,000,000	5	Laporan	5,972,450	167%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3,000,000	3	Laporan	2,191,950	4	Laporan	260,200	4	Laporan	260,200	100	%	100%	1	Laporan	1,500,000	8	Laporan	3,952,150	267%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	11,517,043,248	100	%	10,039,972,173	100	%	3,401,299,039	100	%	3,354,366,594	100	%	99%	100	%	3,748,014,416	300	%	17,142,353,183	300%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	45	Org/Bln	11,503,543,248	42	Org/Bln	10,030,873,873	40	Org/Bln	3,399,128,239	40	Org/Bln	3,352,195,794	100	%	99%	45	Org/Bln	3,743,514,416	127	Org/Bln	17,126,584,083	282%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dokumen	3,000,000	36	Dokumen	2,504,150	12	Dokumen	520,400	12	Dokumen	520,400	100	%	100%	12	Dokumen	1,000,000	60	Dokumen	4,024,550	167%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	Dokumen	1,500,000	3	Dokumen	1,233,950	1	Laporan	260,200	1	Laporan	260,200	100	%	100%	1	Dokumen	500,000	5	Dokumen	1,994,150	167%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	3,000,000	3	Laporan	2,963,650	1	Laporan	999,900	1	Laporan	999,900	100	%	100%	1	Laporan	1,000,000	5	Laporan	4,963,550	167%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54	Laporan	3,000,000	45	Laporan	2,396,550	15	Laporan	390,300	15	Laporan	390,300	100	%	100%	15	Laporan	1,000,000	75	Laporan	3,786,850	139%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	Dokumen	3,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	100	%	0%	1	Dokumen	1,000,000	1	Dokumen	1,000,000	33%

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100	%	6,000,000	100	%	3,440,350	100	%	520,400	100	%	520,400	100	%	100%	100	%	2,000,000	300	%	5,960,750	300%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	3,000,000	3	Dokumen	2,163,950	1	Dokumen	260,200	1	Dokumen	260,200	100	%	100%	3	Dokumen	1,000,000	7	Dokumen	3,424,150	233%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	Laporan	3,000,000	42	Laporan	1,276,400	14	Laporan	260,200	14	Laporan	260,200	100	%	100%	12	Laporan	1,000,000	68	Laporan	2,536,600	189%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	37,313,400	100	%	85,014,900	100	%	759,900	100	%	759,900	100	%	100%	100	%	11,000,000	300	%	96,774,800	300%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	180	Unit	19,313,400	84	Buah	24,780,000	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	60	Unit	5,000,000	144	Unit	29,780,000	80%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180	Paket	3.000.000	71	Buah	43.537.500	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	60	Paket	1.000.000	131	Pake	44.537.500	73%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	Dokumen	3,000,000	2	Dokumen	1,233,950	1	Dokumen	260,200	1	Dokumen	260,200	100	%	100%	1	Dokumen	1,000,000	4	Doku	2,494,150	133%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	3,000,000	2	Dokumen	1,473,450	1	Dokumen	499,700	1	Dokumen	499,700	100	%	100%	1	Dokumen	1,000,000	4	Doku	2,973,150	133%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang	3.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	1	Orang	1.000.000	1	Oran	1.000.000	33%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180	Orang	3.000.000	42	Orang	990.000	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	60	Orang	1.000.000	102	Oran	1.990.000	57%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	3.000.000	2	Orang	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	1	Orang	1.000.000	3	Oran	14.000.000	100%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	144,000,000	100	%	204,872,076	100	%	35,019,900	100	%	34,726,256	100	%	99%	100	%	48,000,000	300	%	287,598,332	300%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1,500,000	2	Paket	22,370,550	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	1	Paket	500,000	3	Pake	22,870,550	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	60,000,000	30	Unit	67,052,400	17	Jenis	18,503,850	17	Jenis	18,503,100	100	%	100%	10	Paket	20,000,000	57	Pake	105,555,500	190%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	1.500.000	1	Paket	2.443.300	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	2	Paket	500.000	3	Pake	2.943.300	50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	18,000,000	9	Jenis	45,277,065	3	Jenis	8,000,000	3	Jenis	8,000,000	100	%	100%	2	Paket	6,000,000	14	Pake	59,277,065	233%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	Paket	6,000,000	12	Jenis	11,948,350	4	Jenis	2,000,000	4	Jenis	2,000,000	100	%	100%	3	Paket	2,000,000	19	Pake	15,948,350	211%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	19,500,000	1	Jenis	13,330,000	1	Jenis	1,516,050	1	Jenis	1,515,000	100	%	100%	1	Dokumen	6,500,000	3	Doku	21,345,000	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Paket	1.500.000	1	Jenis	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	1	Paket	500.000	2	Pake	5.500.000	67%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Laporan	6.000.000	2	Laporan	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	1	Laporan	2.000.000	3	Lapo	6.500.000	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	30,000,000	23	kali	32,950,411	4	Kali	5,000,000	4	Kali	4,708,156	1	%	94%	1	Laporan	10,000,000	28	Lapo	47,658,567	933%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	%	21,000,000	100	%	132,134,259	0	0	0	0	0	0	0	%	0%	100	%	7,000,000	200	%	139,134,259	200%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	Unit	3,000,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	%	0%	1	Unit	1,000,000	1	Unit	1,000,000	33%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	3,000,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	%	0%	1	Unit	1,000,000	1	Unit	1,000,000	33%

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	3,000,000	1	Jenis	5,243,500	0	0	0	0	0	0	0	%	0%	1	Unit	1,000,000	2	Unit	6,243,500	67%
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3,000,000	1	Jenis	43,109,500	0	0	0	0	0	0	0	%	0%	1	Unit	1,000,000	2	Unit	44,109,500	67%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	%	0%	1	Unit	1,000,000	1	Unit	1,000,000	33%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3,000,000	2	Unit	77,909,259	0	0	0	0	0	0	0	%	0%	1	Unit	1,000,000	3	Unit	78,909,259	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3,000,000	2	Unit	5,872,000	0	0	0	0	0	0	0	%	0%	1	Unit	1,000,000	3	Unit	6,872,000	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	2,292,390,000	100	%	2,053,000,550	100	%	680,165,000	100	%	662,276,134	100	%	97%	100	%	774,130,000	300	%	3,489,406,684	300%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Lap	15,000,000	6	Jenis	13,994,000	2	Jenis	6,000,000	2	Jenis	6,000,000	100	%	100%	1	Laporan	5,000,000	9	Lapo	24,994,000	300%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	36	Lap	156,800,000	12	Jenis	169,096,593	4	Jenis	50,600,000	4	Jenis	45,530,392	100	%	90%	12	Laporan	65,600,000	28	Lapo ran	280,226,985	78%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3	lap	600,000,000	5	Jenis	446,011,000	2	Jenis	190,260,000	2	Jenis	190,260,000	100	%	100%	1	Laporan	200,000,000	8	Lapo ran	836,271,000	267%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa umum kantor	36	Lap	1,520,590,000	36	Jenis	1,423,898,957	12	laporan	433,305,000	12	laporan	420,485,742	100	%	97%	12	Laporan	503,530,000	60	Lapo ran	2,347,914,699	167%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	%	421,026,600	100	%	250,768,338	100	%	44,383,300	100	%	43,008,500	100	%	97%	100	%	137,013,300	300	%	430,790,138	300%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	8.900.000	1	Unit	5.926.500	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	1	Unit	7.900.000	2	Unit	13.826.500	67%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	30,000,000	12	Jenis	35,863,600	4	Jenis	8,600,000	4	Jenis	8,599,200	100	%	100%	4	Unit	10,000,000	20	Unit	54,462,800	167%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	30.000.000	2	Unit	16.291.000	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	1	Unit	10.000.000	3	Unit	26.291.000	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	3.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	1	Unit	1.000.000	1	Unit	1.000.000	33%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	63	Unit	349,126,600	23	Unit	192,687,238	23	Unit	35,783,300	23	Unit	34,409,300	100	%	96%	21	Unit	108,113,300	67	Unit	335,209,838	106%

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi Pemuda dalam dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	11	%	430,556,700		-										25	%	128,156,700	24.62	%	128,156,700	224%
		Jumlah Pemuda yang aktif dalam kegiatan ekonomi	-	-		0	Org		50	Org	85,092,500	50	Org	85,092,500	100	%	100%							
		Jumlah Pemuda yang aktif dakam kegiatan sosial kemasyarakatan	-	-		1133	Org		1253	Org	1,644,629,550	1072	Org	1,564,744,690	86	%	95.14%							
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda pengembangan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda	105	org	280,556,700	458	Org	1,599,156,690	300	Org	1,629,722,050	300	Org	1,549,837,190	100	%	95%	30	Org	78,156,700	788	Org	3,227,150,580	750%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	18	Org	15.000.000	0	-	85.092.500	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	6	Org	5.000.000	6	Org	90.092.500	33%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30	Org	27,156,700	0	-	0	50	Org	85,092,500	50	Org	85,092,500	100	%	100%	5	Org	7,156,700	55	Org	92,249,200	183%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	45	Org	15,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	15	Org	5,000,000	15	Org	5,000,000	33%
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dok	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	50.000.000	33%
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta Paskibraka	0	0	0	158	Org	1,411,895,890	150	Org	1,371,979,550	150	Org	1,304,069,190	100	%	95%	0	0	0	308	0	2,715,965,080	#DIV/0!
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	12	Org	38,400,000	300	Orang	185,675,500	100	Org	172,650,000	100	Org	160,675,500	100	%	93%	4	Org	11,000,000	404	Org	357,351,000	3367%

	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang dibinda dan dikembangkan	###	orang	150,000,000	110	Orang	172,000,000	55	Orang	100,000,000	55	Orang	100,000,000	100	%	#######	608	Org	50,000,000	773	Org	322,000,000	42%
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3	Dok	50,000,000	2	Dok	172,000,000	1	Dok	100,000,000	1	Dok	100,000,000	100	%	100.00%	1	Dok	50,000,000	4	Dok	322,000,000	133%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet muda yang berprestasi	25	%	13,707,113,300		-	24,118,350,887	-	-			-		-			30	%	4,522,500,000	30	%	28,640,850,887	120%
		Persentase atlet muda rekreasi yang berprestasi	4	%			-		-	-			-		-			4	%		4	%	0	100%
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	-	-		206	Org		260	Org	10,405,073,014	260	Org	10,155,653,090	100	%	98%							
		Jumlah Atlet Muda yang Berprestasi	-	-		246	Org		60	Org		167	Org		278	%								
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana olahraga yang dipelihara	15	Unit	3,930,000,000	15	Unit	5,058,913,731	5	Unit	2,530,590,050	5	Unit	2,313,890,944	100	%	91%	5	Unit	1,310,000,000	25	Unit	8,682,804,675	167%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	0	0	0			240,988,700	1345	Org	133,630,000	1500	Org	133,629,800	112	%	100%	0	0	0	1500	0	374,618,500	#DIV/0!
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan	15	Unit	3,930,000,000	15	Unit	4,817,925,031	5	Unit	2,396,960,050	5	Unit	2,180,261,144	100	%	91%	5	Unit	1,310,000,000	25	Unit	8,308,186,175	167%
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten yang diselenggarakan	7	Kegiatan	580,713,300	2	Kegiatan	409,378,300	1	Kegiatan	261,228,214	1	Kegiatan	258,034,200	100	%	99%	2	Kegiatan	155,000,000	5	Kegiatan	822,412,500	71%
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single	3	Dok	30,000,000	2	Dokumen	409,378,300	1	Dokumen	261,228,214	1	Dokumen	258,034,200	100	%	99%	1	Dokumen	5,000,000	4	Dokumen	672,412,500	133%
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan pekan Olahraga	1	Dokumen	713,300	0		0	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0%
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	150	Org	550,000,000	0	Org	0	0	Org	0	0	Org	0	0	%	#DIV/0!	50	Org	150,000,000	50	Org	150,000,000	33%

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina, dikirim dan diberikan penghargaan dalam kompetisi olahraga	365	Orang	151,400,000	200	Org	1,016,822,856	150	Org	407,174,750	284	Org	377,647,946	189	%	93%	110	Org	42,500,000	594	Org	1,436,970,802	163%	
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150	Org	45,100,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	50	Org	12,100,000	50	Org	12,100,000	33%	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	3	Pelatda	15,000,000	2	Pelatda	562,411,106	1	Pelatda	72,450,000	1	Pelatda	59,260,696	100	%	82%	1	Pelatda	5,000,000	4	Pelatda	626,671,802	133%	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	170	Org	45.890.000	6	Org	6.802.500	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	50	Org	14.390.000	56	Org	21.192.500	33%	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	45	Org	43,910,000	191	Peserta	286,719,750	80	Org	192,999,750	167	Org	192,669,750	278	%	100%	10	Org	10,510,000	368	Org	489,899,500	818%	
	Koordinasi dan sinkronisasi dan penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	Dok	1,500,000	2	Dok	160,889,500	3	Dokumen	141,725,000	3	Dokumen	125,717,500	100	%	89%	1	Dokumen	500,000	6	Dokumen	287,107,000	200%	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dibina dan dikembangkan	3	Organisasi	9,000,000,000	3	Organisasi	17,550,000,000	1	Organisasi	7,200,000,000	1	Organisasi	7,200,000,000	100	%	100%	1	Organisasi	3,000,000,000	5	Organisasi	############	167%	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	Dok	9,000,000,000	3	Dokumen	17,550,000,000	1	Dokumen	7,200,000,000	1	Dokumen	7,200,000,000	100	%	100%	1	Dokumen	3,000,000,000	5	Dokumen	27,750,000,000	167%	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	75	Orang	45,000,000	75	Orang	83,236,000	1	Dokumen	6,080,000	1	Dokumen	6,080,000	100	%	#######	25	Org	15,000,000	101	Org	104,316,000	135%	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3	Dok	15.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	5.000.000	33%	
	Pemberdavaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3	Lap	15.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	%	#DIV/0!	1	Laporan	5.000.000	1	Laporan	5.000.000	33%	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3	Dok	15,000,000	3	Dokumen	83,236,000	1	Dokumen	6,080,000	1	Dokumen	6,080,000	100	%	100.00%	1	Dokumen	5,000,000	5	Dokumen	94,316,000	167%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase anggota kepramukaan yang	8.4	%	300,000,000													6	%	100,000,000	6	%	100,000,000	71%	
		Jumlah Pemuda yang berperan akif dalam				####	Org	250,000,000	####	Org	100,000,000	14012	Org	100,000,000	100	%	100%								
	Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang	54	Kwarran	300,000,000	18	Kwarran	250,000,000	18	Kwarran	100,000,000	18	Kwarran	100,000,000	100	%	100%	18	Kwarran	100,000,000	54	Kwarran	450,000,000	100%	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3	Organisasi	300,000,000	1	Organisasi	250,000,000	1	Organisasi	100,000,000	1	Organisasi	100,000,000	100	%	100%	1	Organisasi	100,000,000	3	Organisasi	450,000,000	100%	

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I tahun 2024

No	Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Tujuan Dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rensta Dinas Pemuda Dan olahraga. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kualitas pembangunan pemuda dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	44.64	35.73	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	8.34%	8.66%	Penilaian 5 (lima) domain dalam IPP di Bangkalan masih rendah, sehingga diperlukan perubahan target
				Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Peningkatan prestasi olahraga	50 Medali	50 Medali	
					Peningkatan prestasi olahraga rekreasi	1 Medali	1 Medali	
				Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	79	
					Nilai Sakip PD	62,00	62,00	

Dalam merencanakan penganggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan mengacu pada kebutuhan anggaran yang didasarkan pada usulan beberapa sub-kegiatan yang diajukan oleh masing-masing seksi /bidang. Penyerapan anggaran dibagi menjadi 4 triwulan dalam 1 (satu) tahun. Standar penganggaran kedinasan menganut penganggaran yang membagi menjadi 2 (dua) yaitu anggaran rutin dan pembangunan,

Berikut ini Tabel Matrik Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024;

Tabel 4.1 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Dinas Pemuda Dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegatan	Perubahan Renja 2024			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Selisish	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegatan	Lokasi	Target Kinerja		Anggaran	Sumber Dana		Lokasi	Target Kinerja		Sumber Dana		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13=11-6	14
	URUSAN PEMERINTAHAN														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Bangkalan	77	nilai	4,735,157,716	Daum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bangkalan	77	nilai	3,889,744,951	Daum	-845,412,765	Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Bangkalan	100	%	8,000,000	Daum	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	0	%	0	Daum	-8,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	2	Dokumen	1,000,000	Daum	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	1	Dokumen	1,500,000	Daum	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-1,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1	Dokumen	1,000,000	Daum	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-1,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bangkalan	1	Dokumen	1,000,000	Daum	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1	Dokumen	1,000,000	Daum	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Bangkalan	1	Laporan	1,000,000	Daum	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	0	Laporan	0	Daum	-1,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	1	Laporan	1,500,000	Daum	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	0	Laporan	0	Daum	-1,500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	Bangkalan	100	%	3,748,014,416	Daum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bangkalan	100	%	3,531,342,204	Daum	-216,672,212	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bangkalan	45	Org/Bln	3,743,514,416	Daum	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	45	Org/Bln	3,531,342,204	Daum	-212,172,212	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bangkalan	12	Dokumen	1,000,000	Daum	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-1,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Bangkalan	1	Dokumen	500,000	Daum	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bangkalan	1	Laporan	1,000,000	Daum	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	0	Laporan	0	Daum	-1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	15	Laporan	1,000,000	Daum	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bangkalan	0	Laporan	0	Daum	-1,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bangkalan	1	Dokumen	1,000,000	Daum	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-1,000,000	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	Bangkalan	100	%	2,000,000	Daum	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bangkalan	0	%	0	Daum	-2,000,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	3	Dokumen	1,000,000	Daum	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-1,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	12	Laporan	1,000,000	Daum	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	0	Laporan	0	Daum	-1,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Bangkalan	100	%	11,000,000	Daum	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bangkalan	0	%	0	Daum	-11,000,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bangkalan	60	Unit	5,000,000	Daum	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-5,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bangkalan	60	Paket	1,000,000	Daum	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bangkalan	0	Paket	0	Daum	-1,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bangkalan	1	Dokumen	1,000,000	Daum	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-1,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bangkalan	1	Dokumen	1,000,000	Daum	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-1,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bangkalan	1	Orang	1,000,000	Daum	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bangkalan	0	Orang	0	Daum	-1,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	60	Orang	1,000,000	Daum	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	0	Orang	0	Daum	-1,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	1	Orang	1,000,000	Daum	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	0	Orang	0	Daum	-1,000,000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bangkalan	100	%	48,000,000	Daum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bangkalan	0	%	0	Daum	-48,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1	Paket	500,000	Daum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	0	Paket	0	Daum	-500,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	10	Paket	20,000,000	Daum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	0	Paket	0	Daum	-20,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bangkalan	2	Paket	500,000	Daum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bangkalan	0	Paket	0	Daum	-500,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkalan	2	Paket	6,000,000	Daum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	0	Paket	0	Daum	-6,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkalan	3	Paket	2,000,000	Daum	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	0	Paket	0	Daum	-2,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bangkalan	1	Dokumen	6,500,000	Daum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bangkalan	0	Dokumen	0	Daum	-6,500,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bangkalan	1	Paket	500,000	Daum	Penyediaan Bahan/Material	Bangkalan	0	Paket	0	Daum	-500,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	1	Laporan	2,000,000	Daum	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	0	Laporan	0	Daum	-2,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	1	Laporan	10,000,000	Daum	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	0	Laporan	0	Daum	-10,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Bangkalan	100	%	7,000,000	Daum	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bangkalan	0	%	0	Daum	-7,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bangkalan	1	Unit	1,000,000	Daum	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-1,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bangkalan	1	Unit	1,000,000	Daum	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-1,000,000	

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bangkalan	1	Unit	1,000,000	Daum	Pengadaan Mebel	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-1,000,000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	1	Unit	1,000,000	Daum	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-1,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	1	Unit	1,000,000	Daum	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-1,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	1	Unit	1,000,000	Daum	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-1,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	1	Unit	1,000,000	Daum	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-1,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bangkalan	100	%	774,130,000	Daum	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	100	%	348,511,697	Daum	-425,618,303	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	1	Laporan	5,000,000	Daum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	0	Laporan	0	Daum	-5,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bangkalan	12	Laporan	65,600,000	Daum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	12	Laporan	47,578,747	Daum	-18,021,253	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bangkalan	1	Laporan	200,000,000	Daum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	1	Laporan	183,108,950	Daum	-16,891,050	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa umum kantor	Bangkalan	12	Laporan	503,530,000	Daum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	12	Laporan	117,824,000	Daum	-385,706,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Bangkalan	100	%	137,013,300	Daum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	100	%	9,891,050	Daum	-127,122,250	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangkalan	1	Unit	7,900,000	Daum	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-7,900,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangkalan	4	Unit	10,000,000	Daum	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-10,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangkalan	1	Unit	10,000,000	Daum	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-10,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	1	Unit	1,000,000	Daum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	0	Unit	0	Daum	-1,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	Bangkalan	21	Unit	108,113,300	Daum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	1	Unit	9,891,050	Daum	-98,222,250	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi Pemuda dalam dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Bangkalan	9%		128,156,700	Daum	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Bangkalan	**12%**		1,225,682,500	Daum	1,097,525,800	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda	Bangkalan	30	Org	78,156,700	Daum	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Bangkalan	361	Org	1,150,682,500	Daum	1,072,525,800	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Bangkalan	6	Org	5,000,000	Daum	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Bangkalan	6	Org	8,990,000	Daum	3,990,000	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Bangkalan	5	Org	7,156,700	Daum	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Bangkalan	40	Org	73,990,000	Daum	66,833,300	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Bangkalan	15	Org	5,000,000	Daum	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Bangkalan	15	Org	8,990,000	Daum	3,990,000	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Bangkalan	1	Dokumen	50,000,000	Daum	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Bangkalan	1	Dokumen	77,812,500	Daum	27,812,500	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Bangkalan	4	Org	11,000,000	Daum	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Bangkalan	300	Org	980,900,000	Daum	969,900,000	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang dibinda dan dikembangkan	Bangkalan	608	Org	50,000,000	Daum	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bangkalan	650	Org	75,000,000	Daum	25,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Bangkalan	1	Dok	50,000,000	Daum	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Bangkalan	1	Dok	75,000,000	Daum	25,000,000	

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet muda yang berprestasi	Bangkalan	25	%	4,522,500,000	Daum	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Bangkalan	30	%	19,936,734,427	Daum	15,414,234,427	
		Persentase atlet muda rekreasi yang berprestasi	Bangkalan	4	%				Bangkalan	4	%				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana olahraga yang dipelihara	Bangkalan	5	Unit	1,310,000,000	Daum	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bangkalan	6	Unit	9,001,941,427	Daum	7,691,941,427	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Bangkalan	5	Unit	1,310,000,000	Daum	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Bangkalan	6	Unit	9,001,941,427	Daum	7,691,941,427	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten yang diselenggarakan	Bangkalan	2	Kegiatan	155,000,000	Daum	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bangkalan	2	Kegiatan	5,447,842,500	Daum	5,292,842,500	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Bangkalan	1	Dokumen	5,000,000	Daum	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Bangkalan	1	Dokumen	449,500,000	Daum	444,500,000	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Bangkalan	50	Org	150,000,000	Daum	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Bangkalan	1,000	Org	4,998,342,500	Daum	4,848,342,500	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang di bina, dikirim dan diberikan penghargaan dalam kompetisi olahraga	Bangkalan	110	Org	42,500,000	Daum	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Bangkalan	240	Org	2,033,972,000	Daum	1,991,472,000	
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Bangkalan	50	Org	12,100,000	Daum	Seleksi Atlet Daerah	Bangkalan	0	Org	500,000	Daum	-11,600,000	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Bangkalan	1	Pelatda	5,000,000	Daum	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Bangkalan	1	Pelatda	32,442,500	Daum	27,442,500	

	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Bangkalan	50	Org	14,390,000	Daum	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Bangkalan	200	Org	817,613,000	Daum	803,223,000	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Bangkalan	10	Org	10,510,000	Daum	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Bangkalan	40	Org	934,094,000	Daum	923,584,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi dan penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Bangkalan	1	Dokumen	500,000	Daum	Koordinasi dan sinkronisasi dan penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	Bangkalan	1	Dokumen	249,322,500	Daum	248,822,500	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dibina dan dikembangkan	Bangkalan	1	Organisasi	3,000,000,000	Daum	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Bangkalan	1	Organisasi	3,000,000,000	Daum	0	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Bangkalan	1	Dokumen	3,000,000,000	Daum	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Bangkalan	1	Dokumen	3,000,000,000	Daum	0	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Bangkalan	25	Org	15,000,000	Daum	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Bangkalan	100	Org	452,978,500	Daum	437,978,500	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Bangkalan	1	Dokumen	5,000,000	Daum	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Bangkalan	1	Dokumen	134,700,000	Daum	129,700,000	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga	Bangkalan	1	Laporan	5,000,000	Daum	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Bangkalan	1	Laporan	73,990,000	Daum	68,990,000	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Bangkalan	1	Dokumen	5,000,000	Daum	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Bangkalan	1	Dokumen	244,288,500	Daum	239,288,500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase anggota kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Bangkalan	7.6%		100,000,000	Daum	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Bangkalan	6%		75,000,000	Daum	-25,000,000	Anggaran
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka aktif yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	Bangkalan	300	Orang	100,000,000	Daum	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Bangkalan	250	Orang	75,000,000	Daum	-25,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Bangkalan	1	Organisasi	100,000,000	Daum	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Bangkalan	1	Organisasi	75,000,000	Daum	-25,000,000	

BAB IV

P E N U T UP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan Rencana Kerja Perubahan Tahunan berdasarkan Renstra Perubahan OPD Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kabupaten Bangkalan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Rencana Kerja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan Usulan Rencana Kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024. Dengan adanya Rencana Kerja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan Dinas Pemuda dan Olahraga yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangkalan, maka pada Tahun 2024 lebih difokuskan pada Skala Prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Pemuda dan Olahraga yang handal;
2. Mewujudkan sistem Dinas Pemuda dan Olahraga berkelanjutan melalui pendekatan, sumber daya lokal, serta berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang Pemuda dan Olahraga;
4. Mengembangkan potensi dan peran aktif Pemuda;
5. Meningkatkan olah raga yang berkualitas, berprestasi dan bermasyarakat serta mewujudkan insan olah raga yang sejahtera;

Prioritas tersebut diatas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan Dinas Pemuda Olahraga Tahun 2024, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi terhadap peningkatan Produksi dan Produktivitas Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKALAN

AKHMAD AHADIYAN HAMID, S.STP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 198401152003121002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Kami dapat menyusun penetapan **" RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024"** dengan tepat waktu.

Rencana Kerja Perubahan ini kami susun sebagai revisi Rencana Kerja Tahun 2024, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan ini masih belum sempurna, masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh berbagai faktor keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian diharapkan bahwa Rencana Kerja Perubahan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan dan petunjuk yang benar , sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGKALAN

MOCH. MUSLEH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196810261994031005

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang secara struktural adalah sebagai penyelenggara pemerintahan pada daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat daerah otonom menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang berlandaskan peraturan perundang - undangan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan dalam 1 (satu) tahun ke depan dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan.

Untuk menyempurnakan Rencana Kerja awal Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Perubahan yang memasukkan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Disamping itu untuk mengakomodir terhadap Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Tahun 2024 sehingga menyebabkan perubahan capaian kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan.

Rencana Kerja dimaksud haruslah berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi perangkat daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen hasil penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi perangkat daerah pada tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Persyaratan penyusunan Renja melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan antara lain :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atass Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6322)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Th 2011 No. 310) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemda (Berita Negara RI Th 2017 No. 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Th 2020 No 1781)
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Bangkalan.
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan dimaksudkan sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bangkalan, juga dimaksudkan untuk menyiapkan berbagai ukuran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bangkalan untuk satu tahun yang akan datang.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan selama satu tahun anggaran;

2. Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;
3. Sebagai pelaksanaan program kegiatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PD SAMPAI SEMESTER I TH 2024, memuat pelaksanaan Renja tahun 2024 sampai Semester I
BAB III	RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisi Perubahan Program dan Kegiatan tahun 2024
BAB IV	PENUTUP, berisi kesimpulan dari penulisan Renja.

B A B II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi hasil rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan semester I tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perpustakaan									
2.23.2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	88%	86%	-	-	-	-	-	-
		Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	20%	10%	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	40%	15%	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.01 .08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku / bahan bacaan yang dibeli	750 eksp	65 eksp	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.01 .01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	15.500 org	1370 org	-	-	-	-	-	-

		Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	625 kali	100 kali	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.01 .09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diolah	800 buku	250 buku	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.01 .02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan	61 perpus	20 perpus	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.01 .06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya	50 org	30 org	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.01 .10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan data perpustakaan	10 dok	10 dok	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pembudayaan gemar membaca	4 kali	4 kali	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.02 .02	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	100 org	40 org	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.02 .04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	50 org	0	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.02 .05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Duta Baca	10 org	0	-	-	-	-	-	-
X.X.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	87%	84%	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	-

X.X.01.2.08.0.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.08.0.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 jenis	15 jenis	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 unit	7jenis	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 unit	15 jenis	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 unit	11 jenis	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 jenis	3 jenis	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 jenis	5 jenis	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	3 jenis	2 jenis	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 kali	12 paket	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	75 kali	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100%	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-	-	-	-

X.X.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	7 laporan	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	14 unit	14 unit	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 unit	3 unit	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	32 unit	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	3 unit	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	50 unit	0	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	40 unit	5 unit	-	-	-	-	-	-

X.X.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76 buah		-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76 pegawai		-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76 orang	81 orang	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.01	Perencanaan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	-	-

X.X.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	76 org / 12 bln	76 org / 12 bln	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	-	-
X.X.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	66 laporan	66 laporan	-	-	-	-	-	-
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan kearsipan	90%	80%	-	-	-	-	-	-
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang baik	100%	80%	-	-	-	-	-	-
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	30 lembaga	20 Lembaga	-	-	-	-	-	-
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100%	60%	-	-	-	-	-	-
2.24.02.2.01.01	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Peserta Bimtek Pengawasan Arsip Kewenangan Kabupaten Kota	40 orang		-	-	-	-	-	-
		Jumlah PD yang dilakukan pengawasan arsip kewenangan Kabupaten/Kota		10 PD	-	-	-	-	-	-
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	90%	80%	-	-	-	-	-	-
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase jumlah arsip statis yang dibuatkan daftar arsip statis	85%	75%	-	-	-	-	-	-

		Pengumpulan data dari media cetak dalam pertahunnya	20 buku	20 buku	-	-	-	-	-	-
		Persentase jumlah arsip statis yang telah direstorasi.dan diselamatkan	80%	60%	-	-	-	-	-	-
Pemutakhiran sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021										
	Perpustakaan									
2.23.2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	95%	86%	88%	88%	100%	90%	45%	50%
		Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	30%	15%	15%	15%	100%	20%	10%	50%
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	35%	15%	20%	20%	100%	10%	10%	40%
2.23.02.2.01 .09	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	300 eksp	100 eksp	750 eksp	750 eksp	100%	100 eksp	50 eksp	50%
2.23.02.2.01 .09	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : *Information Technology Service Management*)	2 layanan		2 layanan	2 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	50%
		Jumlah kunjungan perpustakaan keliling		600 kali						
2.23.02.2.01 .09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 eksp	775 eksp	800 eksp	800 eksp	100%	150 eksp	150 eksp	60%
2.23.02.2.01 .02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	20 perpus	61 perpus	61 perpus		-	15 perpus	5 perpus	25%
2.23.02.2.01 .06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111 org	50 org	37 org	37 org	100%	37 org	37 org	34%

2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100%	10 dok	10 dok	34%
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pembudayaan gemar membaca	12 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	34%
2.23.02.2.02.02	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 lokus	5 lokus	10 lokus	-	-	5 lokus	5 lokus	34%
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 org							
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	15 perpus	-	10 perpus	-	-	5 perpus	5 perpus	34%
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	120 org	-	30 org	30 org	100%	30 org	30 org	34%
2.23.03	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	15%	-	-	-	-	5%	5%	34%
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang dilestarikan**	15%	-	-	-	-	5%	5%	34%
2.23.03.2.01.02	Pengembangan pengolahan dan pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oelh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	90 eksp	-	-	-	-	30 eksp	30 eksp	34%
X.X.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

X.X.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.X.01.2.08.0.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	3 laporan	34%
X.X.01.2.08.0.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	100%	15 laporan	15 laporan	34%
X.X.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.X.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	34%
X.X.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	6 paket	6 paket	6 paket	100	6 paket	6 paket	34%
X.X.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	34%
X.X.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	34%
X.X.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	6 paket	6 paket	6 paket	100	6 paket	6 paket	34%
X.X.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	34%
X.X.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	34%
X.X.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	34%
X.X.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	50 laporan	75 laporan	25 laporan	34%	50 laporan	50 laporan	34%

X.X.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.X.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	100%	100%
X.X.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	7 laporan	34%
X.X.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.X.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	34%
X.X.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	3 unit	3 unit	-	-	3 unit	3 unit	34%
X.X.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 unit	30unit	30unit	10unit	34%	30unit	30unit	34%
X.X.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	3 unit	3 unit	-	-	3 unit	3 unit	34%
X.X.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	-		100%	100%	100%
X.X.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	1 unit	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	34%

X.X.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	5 unit	5 unit	-		5 unit	5 unit	34%
X.X.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	-	40 unit	-	-	5 unit	5 unit	34%
X.X.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.X.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	228 paket	-	76 paket	76 paket	100%	76 paket	76 paket	34%
X.X.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	228 orang	-	76 paket	-	-	76 paket	76 paket	34%
X.X.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan	228 orang	76 orang	76 orang	76 orang	100%	76 orang	76 orang	34%
X.X.01.2.01	Perencanaan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%			100%	100%	100%
X.X.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	34%
X.X.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	34%
X.X.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	34%
X.X.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	34%
X.X.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	34%
X.X.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	34%

	SKPD									
X.X.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	34%
X.X.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.X.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 orang	76 orang	76 orang	76 orang	100%	76 orang	76 orang	34%
X.X.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	34%
X.X.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	198 laporan	66 laporan	66 laporan	66 laporan	100%	66 laporan	66 laporan	34%
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan kearsipan	80%	65%	70%	70%	100%	70%	40%	50%
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang baik	70%	50%	55%	55%	100%	60%	60%	80%
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	45 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	34%
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	70%	25%	30%	30%	100%	30%	30%	42%
2.24.02.2.01.01	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	34%

2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	75%	60%	65%	65%	100%	65%	65%	87%
2.24.02.2.02 .02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 arsip	100 arsip	150 arsip	150 arsip	100%	50 arsip	50 arsip	50%

Tabel 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian s.d semester I	Proyeksi			Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2024	2025	2026	
I	**TUJUAN**										
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Tingkat Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat, perpustakaan ber- SNP, ketelibatan masyarakat dan anggota perpustakaan	6,8	7	7,4	3	6,8	7	7,4	
2	Kualitas Pengelolaan Arsip			50%	55%	60%	25%	50%	55%	60%	
II	**SASARAN**										
1	Indeks Gemar Membaca		Tingkat kegemaran membaca dengan unsur frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah membaca, frekuensi akses internet dan durasi akses internet	69	71	73	30	69	71	73	
2	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)			80	85	90	40	80	85	90	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			62	63	64	30	62	63	64	
4	Persentase perangkat daerah dengan yang mengelola arsip secara baku			50%	55%	60	25%	50%	55%	60	

B A B III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini akan diuraikan sejumlah program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun.Sebagai informasi lanjutan atas kebijakan yang telah dirumuskan, berikut akan di kembangkan program dan kegiatan pembangunan yang dipandang relevan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	Perubahan			2024	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan akses dan kualitas literasi masyarakat perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,8	6,8					
				Meningkatnya minat baca masyarakat	Pertumbuhan pengunjung perpustakaan	69	69	
				Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	62	
Meningkatkan layanan tata kelola kearsipan	Kualitas Pengelolaan Arsip	50%	50%	Meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan	Persentase perangkat daerah dengan yang mengelola arsip secara baku	50%	50%	

Tabel 3.2

Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KABUPATEN BANGKALAN

Kode Program / Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Renja Awal Tahun 2024				Perubahan Renja Tahun 2024				Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
			Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.23.2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	Bangkalan	90%	23.468.200	APBD	Bangkalan	90%	1.117.530.100	APBD	1.094.061.900	
		Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Bangkalan	20%	85.290.150	APBD	Bangkalan	20%	503.653.812	APBD	418.363.662	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Bangkalan	25%	85.290.150	APBD	Bangkalan	25%	1.521.661.812	APBD	1.436.371.662	
2.23.02.2.01.09	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Bangkalan	100 eksp	8.099.250	APBD	Bangkalan	100 eksp	281.448.900	APBD	273.349.650	
2.23.02.2.01.09	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen	Bangkalan	2 layanan	4.898.400	APBD	Bangkalan	2 layanan	189.654.462	APBD	184.756.062	

		Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : *Information Technology Service Management*)										
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Bangkalan	150 eksp	5.609.150	APBD	Bangkalan	150 eksp	32.550.450	APBD	26.941.300	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Bangkalan	15 perpus	55.328.550	APBD	Bangkalan	15 perpus	77.202.250	APBD	21.873.700	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bangkalan	30 org	6.354.800	APBD	Bangkalan	30 org	933.189.900	APBD	926.835.100	

2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bangkalan	10 dok	5.000.000	APBD	Bangkalan	10 dok	7.615.850	APBD	2.615.850	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pembudayaan gemar membaca	Bangkalan	4 kali	23.468.200	APBD	Bangkalan	4 kali	99.522.100	APBD	76.053.900	
2.23.02.2.02.02	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Bangkalan	5 lokus	10.202.200	APBD	Bangkalan	5 lokus	44.322.100	APBD	34.119.900	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Bangkalan	5 perpustakaan	7.266.000	APBD	Bangkalan	5 perpustakaan	55.200.000	APBD	47.934.000	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Bangkalan	30 org	6.000.000	APBD	Bangkalan	0	0		-6.000.000	
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Bangkalan	5%	5.000.000	APBD	Bangkalan	0	0		-5.000.000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang dilestarikan	Bangkalan	10%	5.000.000	APBD	Bangkalan	0	**0**		-5.000.000	

2.23.03.2.01.02	Pengembangan pengolahan dan pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oelh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Bangkalan	30 eksemplar	5.000.000	APBD	Bangkalan	0	0		-5.000.000	
X.X.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Bangkalan	89 indeks	4.914.545.664	APBD	Bangkalan	89 indeks	3.726.110.007	APBD	-1.188.435.657	
X.X.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	100%	1.044.130.000	APBD	Bangkalan	100%	285.739.600	APBD	-758.390.400	
X.X.01.2.08.0.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bangkalan	3 laporan	59.030.000	APBD	Bangkalan	3 laporan	45.969.500	APBD	-13.060.500	
X.X.01.2.08.0.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	15 laporan	985.100.000	APBD	Bangkalan	15 laporan	239.770.000	APBD	-745.330.000	
X.X.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bangkalan	100%	70.134.750	APBD	Bangkalan	100%	32.308.600	APBD	-37.826.150	
X.X.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	4 paket	1.883.400	APBD	Bangkalan	0	0	APBD	-1.883.400	

X.X.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	6 paket	13.878.500	APBD	Bangkalan	6 paket	16.179.108	APBD	2.300.068	
X.X.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bangkalan	3 paket	1.710.200	APBD	Bangkalan	3 paket	1.916.100	APBD	205.900	
X.X.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkalan	12 paket	3.004.000	APBD	Bangkalan	12 paket	2.262.000	APBD	-742.000	
X.X.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkalan	6 paket	5.900.000	APBD	Bangkalan	6 paket	5.551.392	APBD	-348.608	
X.X.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bangkalan	2 paket	1.731.650	APBD	Bangkalan	0	0	APBD	-1.731.650	
X.X.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	4 laporan	2.100.000	APBD	Bangkalan	4 laporan	1.400.000	Bangkalan	-700.000	
X.X.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	2 dokumen	2.500.000	APBD	Bangkalan	0	0	Bangkalan	-2.500.000	
X.X.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	50 laporan	37.427.000	APBD	Bangkalan	25 laporan	5.000.000	Bangkalan	-32.427.000	
X.X.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bangkalan	100%	203.931.075	APBD	=	0	0	-	0	

		yang terlaksana										
X.X.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bangkalan	1 unit	93.226.866	APBD	Bangkalan	0	0		-93.226.866	
X.X.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bangkalan	5 unit	82.924.000	APBD		0	0		-82.924.000	
X.X.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	5 unit	27.780.209	APBD	Bangkalan	0	0		-27.780.209	
X.X.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Bangkalan	100%	18.420.000	APBD	Bangkalan	100%	3.645.000	Bangkalan	14.775.000	
X.X.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bangkalan	76 paket	10.000.000		Bangkalan	0	0		-10.000.000	
X.X.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bangkalan	76 orang	5.000.000	APBD	Bangkalan	0	0		-5.000.000	
X.X.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	76 orang	3.420.000	APBD	Bangkalan	76 orang	3.645.000	APBD	225.000	

X.X.01.2.01	Perencanaan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	100%	20.385.650	APBD	Bangkalan	100%	3.806.000	APBD	-15.579.650	
X.X.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	4 dokumen	5.340.350	APBD	Bangkalan	4 dokumen	951.500	APBD	-4.388.850	
X.X.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	1 dokumen	2.507.550	APBD	Bangkalan	1 dokumen	0	APBD	-2.507.550	
X.X.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1 dokumen	2.507.550	APBD	Bangkalan	1 dokumen	0	APBD	-2.507.550	
X.X.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bangkalan	1 dokumen	2.507.550	APBD	Bangkalan	1 dokumen	951.500	APBD	-1.556.050	
X.X.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Bangkalan	1 dokumen	2.507.550		Bangkalan	1 dokumen	951.500	APBD	-1.556.050	

		Perubahan DPA-SKPD										
X.X.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	1 dokumen	2.507.550		Bangkalan	1 dokumen	951.500	APBD	-1.556.050	
X.X.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	1 dokumen	2.507.550	APBD	Bangkalan	1 dokumen	0	APBD	-2.507.550	
X.X.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Bangkalan	100%	3.479.574.214	APBD	Bangkalan	100%	3.398.739.407	APBD	-80.834.807	
X.X.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	76 org	3.474.559.114	APBD	Bangkalan	76 org	3.397.787.907	APBD	-76.771.207	
X.X.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	1 laporan	2.507.550	APBD	Bangkalan	1 laporan	951,500	APBD	-1.556.050	
X.X.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Bangkalan	66 laporan	2.507.550	APBD	Bangkalan	66 laporan	0	APBD	-2.507.550	

	teran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
X.X.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Bangkalan	100%	5.015.100	APBD	Bangkalan	100%	1.171.400	APBD	-3.843.700	
X.X.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	2 dokumen	2.507.550	APBD	Bangkalan	2 dokumen	585.700	APBD	-1.921.850	
X.X.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	7 laporan	2.507.550	APBD	Bangkalan	2 dokumen	585.700	APBD	-1.921.850	
X.X.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Bangkalan	100%	72.954.875	APBD	Bangkalan	100%	700.000	APBD	-72.254.875	
X.X.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Bangkalan	14 unit	32.040.000	APBD	Bangkalan	0	0	APBD	-32.040.000	

		Pajaknya										
X.X.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	3 unit	14.127.875	APBD	Bangkalan	0	0	APBD	-14.127.875	
X.X.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bangkalan	30 unit	7.695.000	APBD	Bangkalan	6 unit	700.000	APBD	-6.995.000	
X.X.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangkalan	3 unit	19.092.000	APBD	Bangkalan	0	0	APBD	-19.092.000	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan kearsipan	Bangkalan	70%	88.530.100	APBD	Bangkalan	70%	66.140.100	APBD	-25.217.750	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang baik	Bangkalan	70%	64.322.650	APBD	Bangkalan	70%	46.549.800	APBD	-17.772.850	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Bangkalan	10 Laporan	64.322.650	APBD	Bangkalan	10 Laporan	46.549.800	APBD	-17.772.850	

2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Bangkalan	30%	13.819.850	APBD	Bangkalan	30%	9.590.500	APBD	-4.229.350	
2.24.02.2.01.01	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Bangkalan	10 laporan	13.819.850	APBD	Bangkalan	10 laporan	9.590.500	APBD	-4.229.350	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	90%	75%	10.387.600	APBD	Bangkalan	75%	9.999.800	APBD	-387.800	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	50 arsip	10.387.600	APBD	Bangkalan	50 arsip	9.999.800	APBD	-387.800	
T O T A L					**5.116.834.114**				**5.413.434.019**			

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Perubahan) merupakan wujud dari tindak lanjut pada Permendari No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat tentang rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Berdasarkan isi yang tersaji dalam Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan untuk Tahun Anggaran 2024 mempunyai prioritas pembangunan yang mengacu dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius dengan didukung oleh kualitas pendidikan dan kesehatan yang tinggi;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat serta pelayanan publik yang prima didukung dengan sistem dan prosedur serta proses yang memadai.

Sedangkan dalam skala prioritas terdapat beberapa urusan pemerintahan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam urusan pemerintahan tersebut termasuk dalam urusan pendidikan.

Dengan tersusunnya Renja ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran sebagai umpan balik demi perbaikan kinerja pada waktu mendatang ke arah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat di dalam meningkatkan kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan demi mewujudkan VISI dan MISI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan pada khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGKALAN

MOCH. MUSLEH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196810261994031005

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat kondusif sangat kami harapkan, semoga Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Perikanan pada tahun-tahun berikutnya serta bermanfaat bagi yang membacanya, Aamiin.

Bangkalan, Juli 2024
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PERIKANAN

Drs. Bambang Setyawan, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199201 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Rencana Kerja tahunan SKPD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan SKPD meningat beberapa hal sebagai beriku :

1. RENJA merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Dinas
2. RENJA memuat arahan operasional pelksanaan program dan kegiatan tahunan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
3. RENJA merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan SKPD. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RENSTRA sebagai wujud dari kinerja RENSTRA sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan SKPD

Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun sampai triwulan II tahun 2024 dan kebijakan Pemerintah Pusat seperti :

- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 tahun 2024

tentang Perubahan Atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Selain itu memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, adanya perubahan asumsi pendapatan, serta pemanfaatan SILPA, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian skema Pembangunan Tahun 2024.

Percepatan Perubahan RKPD 2024 dilaksanakan karena adanya kebutuhan daerah sesuai dengan kondisi daerah. Beberapa catatan atas Perubahan RKPD 2024 Kabupaten Bangkalan adalah terjadinya defisit anggaran RKPD 2024 akibat perubahan deficit penurunan Dana bagi Hasil Provinsi dan dari Penurunan Pendapatan Asli Daerah Murni di luar BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Kabupaten Bangkalan.

Kemudian beberapa kegiatan yang potensial untuk diefisiensi harus memenuhi syarat bahwa kegiatan tersbut tidak menyentuk *earmarked*, DBHCHT, dan DBHPR, kegiatan tidak untuk belanja bypass TAPD, kegiatan bukan Belanja Wajib dan Rutin (Eksekusi Tim P-RKPD), serta bukan kegiatan POKIR.

Dinamika pelaksanaan pembangunan inilah yang mendorong perlunya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Mengingat Perubahan Rencana Kerja sangat penting dalam mendukungpenyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang PelaksanaanTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

a. Berpendoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada Rancangan awal SKPD
b. Rumusan program / kegiatan di dalam Renja SKPD di dasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD
c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capain kerja, biaya satuan, total kebutuhan dana.

Penyusunan Perubahan RENJA dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi – asumsi dalam pendapatan, dan belanja yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada Pendapatan dan Belanja Dinas Perikanan Daerah Tahun 2024, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam DPA Dinas Perikanan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

   sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Bangkalan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);

k. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
l. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
m. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);
n. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaen Bangkalan.
o. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/34/Kpts/433.013/2023 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi program dan kegiatan pada tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Tahun 2024 adalah :

- Untuk memberikan penjelasan secara lengkap tentang pelaksanaan kegiatan belanja langsung sampai dengan semester I tahun 2024.
- Untuk menyajikan laporan pelaksanaan monitoring dan bahan evaluasi kegiatan belanja langsung sampai dengan semester I tahun 2024, agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar
- Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan, jumlah dana / biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, output yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut dan sumber pembiayaannya sehingga di dalam pelaksanaannya nanti akan lebih terkendali dan berjalan efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok penjelasan yaitu :

a. Pendahuluan dan Evaluasi Kegiatan Belanja Langsung Tahun 2024; dan
b. Penjelasan tentang Target, Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dalam 4 (empat) Bab yaitu :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

  Pada bab ini menjelaskan tentang Pendahuluan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

- **BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAHTAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

  Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun Lalu dan sampai dengan semester I Tahun 2024, dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- **BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

  Bab ini berisi tentang matrik Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

- **BAB IV: PENUTUP**

  Dalam bab ini menguraikan tentang catatan penting yang

perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi rencana kerja tahun lalu didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut.

Dalam rangka realisasi tugas Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawabmutlak diperlukan peningkatan tertib administrasi dalam perencanaan, pengadaan barang dan jasa Pemerintah baik yang dibiayai dari ABPN/APBD dilaksanakan dengan efektif dan efesien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka serta perlakuan adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai visi dan misi yang diemban Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan.

a. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2024

Dalam tahun 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan telah menetapkan rencana pembangunan sebanyak 13 kegiatan belanja langsung dan 28 sub kegiatan dengan nilai total dana sebesar Rp. 4.930.503.063,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), sampai dengan bulan Juli 2024 dari 15 kegiatan dan 28 sub kegiatan dapat terealisasi sebesar Rp.3.022.642.204,- (Tiga Milyar Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) dengan rata-rata pencapian 61,30%.

Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2023, rencana pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan semuanya dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah anggaran.

Total Anggaran Dinas Perikanan pada Tahun 2023 sebesar sebesar Rp. 5.204.817.558,- (Lima Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan

Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.5.134.126.446,- (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) 98,64%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegia tan pada akhir periode Reenstra Perangkat Daerah Tahun 2019- 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)*100		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)*100
1	**URUSAN : PILIHAN**																
	BIDANG URUSAN : PERIKANAN																
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**90 %**	**4.782.533.795**	**90 %**	**4.722.914.101**	**100 %**	**4.866.204.058**	**100 %**	**4.798.747.923**	**100**	**98,11**	**100 %**	**4.843.254.863**	**100 %**	**2.670.732.440**	**55,84 %**
3.25.01.201	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90 %**	**9.887.500**	**90%**	**9.887.500**	**100 %**	**10.952.805**	**100 %**	**10.952.750**	**100**	**100**	**100 %**	**9.655.450**	**100 %**	**6.931.500**	**70,01 %**
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dok	6.158.600	4 Dok	6.158.600	4 Dok	6.404.000	4 Dok	6.404.000	100	100	4 Dok	5.051.000	8 Dok	2.856.350	46,38 %
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	12 Dok	3.728.900	12 Dok	3.728.900	12 Lap	4.548.805	12 Lap	4.548.750	100	100	2 Lap	4.604.350	12 Lap	4.075.150	109,29 %

3.25.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**90 %**	**3.470.001.984**	**90 %**	**3.436.770.720**	**100 %**	**3.575.771.575**	**100 %**	**3.521.045.313**	**100**	**98.16**	**100 %**	**3.676.955.163**	**100 %**	**1.999.204.149**	**57,61 %**
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	0	0	0	0	128 Lap	1.000.000	128 Lap	1.000.000	100	100	12 Lap	1.000.000	20 Lap	1.000.000	0 %
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	0	0	0	0	2 Lap	2.280.750	2 Lap	2.280.750	100	100	2 Lap	1.819.000	2 Lap	0	0 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	45 org/bln	3.470.001.984	45 org/bln	3.436.770.720	45 Org/Bln	3.572.490.825	45 Org/Bln	3.517.764.563	100	98.16	42 Org/Bln	3.674.135.663	45 Org/Bln	1.998.204.149	57,59 %
3.25.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 %**	**1.000.000**	**100%**	**1.000.000**	**100**	**-**	**100 %**	**1.499.600**	**100 %**	**1.000.000**	**0 %**
	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	7 Lap	1.000.000	7 Lap	1.000.000	100	-	15 Lap	1499.600	7 Lap	1.000.000	0 %
3.25.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**	**32.094.400**	**90 %**	**30.541.650**	**100 %**	**111.459.301**	**100 %**	**110.234.500**	**100**	**94.16**	**100 %**	**67.844.650**	**100 %**	**78.204.350**	**243,67 %**
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0	40 Paket	1.078.000	40 Paket	1.078.000	100	-	40 Paket	2.934.000	40 Paket	636.600	0 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Unit	2.840.000	20 Unit	2.510.000	78 Paket	8.892.000	78 Paket	8.796.000	100	91.02	78 Paket	3.852.000	78 Paket	6.996.000	246,34 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	4.595.800	3 Jenis	4.416.300	3 Paket	7.170.100	3 Paket	7.153.000	100	99.89	3 Paket	4.050.100	3 Paket	2.548.000	55,44 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis	1.335.000	3 Jenis	1.110.000	3 Dokumen	1.880.000	3 Dokumen	1.780.000	100	100	3 Dok	1.620.000	3 Dok	1.310.000	98,13 %
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	9.430.000	25 Kali	9.430.000	50 Kali	42.649.998	50 Kali	42.176.000	100	92.82	70 Lap	39.025.000	150 Lap	21.296.000	225,83 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400 Unit	13.893.600	400 Unit	-	500 Unit	49.789.203	500 Unit	49.251.500	100	96.74	25 Paket	16.363.550	500 Paket	45.417.750	326,90 %
	Sub. Kegiatan	Jumlah Mebel yang diadakan	2	16.98	2 Unit	16.983.	1 Unit	-	1 Unit	-	100	-	0	-	0	0	0 %

	Pengadaan Mebel		Unit	3.000		000										
3.25.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90 %**	**1.180.025.180**	**90 %**	**1.158.955.763**	**100 %**	**1.067.471.300**	**100 %**	**1.057.028.033**	**100**	**98.10**	**100 %**	**1031.260.000**	**100 %**	**518.895.735**	43,97 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	3.520.000	2 Jenis	3.220.000	4 Laporan	2.940.000	2 Laporan	2.610.000	100	100	2 Lap	4.620.000	4 Lap	990.000	28,13 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	48.395.180	3 Jenis	28.860.763	3 Laporan	41.038.800	3 Laporan	39.541.851	100	77.57	3 Lap	41.070.000	3 Lap	20.519.391	42,40 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	102.000.000	2 Jenis	101.640.000	2 Laporan	111.000.000	2 Laporan	110.709.132	100	99.55	3 Lap	63.000.000	2 Lap	42.153.044	41,33 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Jenis	1.026.110.000	7 Jenis	1.025.235.000	7 Laporan	912.492.500	7 Laporan	904.167.050	100	98.93	9 Lap	922.570.000	7 Lap	455.233.300	443,65 %
3.25.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**90 %**	**73.541.731**	**90 %**	**69.775.468**	**100 %**	**86.949.077**	**100 %**	**85.887.327**	**100**	**98.54**	**100 %**	**56.040.000**	**100 %**	**53.896.706**	73,29 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	28 Unit	41.207.731	28 Unit	40.304.768	28 Unit	57.846.777	28 Unit	57.765.527	100	99,31	28 Unit	21.900.000	28 Unit	32.969.406	80 %
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	28 Unit	8.200.000	28 Unit	5.336.700	28 Unit	8.902.300	28 Unit	7.921.800	100	90,44	28 Unit	21.400.000	29 Unit	3.402.300	41,49 %
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 Unit	5.325.000	30 Unit	12.740.000	30 Unit	5.200.000	30 Unit	5.200.000	100	99,59	30 Unit	12.740.000	30 Unit	2.525.000	47,42 %
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**3,08 %**	**110.375.600**	**3,08 %**	**105.380.550**	**3,10 %**	**203.600.000**	**3,10 %**	**200.778.650**	**100**	**40,70**	**26.622 43 ton**	**22.248.200**	**3,10 %**	**32.319.700**	**29,28 %**
3.25.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota**	**prosentase Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang dikelola**	**3,08 %**	**99.450.900**	**3,08 %**	**94.455.850**	**3,10 %**	**1.000.000**	**3, 10 %**	**999.300**	**100**	**98,09**	**26.622 43 ton**	**1.050.000**	**3,10 %**	**0**	**0 %**

	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap	jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan	25 Unit	99.450.900	25 Unit	94.455.850	1 Kecamatan	1.000.000	1 Kecamatan	999.300	100	98,09	1 Kec.	1.050.000	1 Kec.	0	0 %
3.25.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**prosentase nelayan kecil dalam daerah yang dibina**	**3,08 %**	**10.924.700**	**3,08 %**	**10.924.700**	**3,10 %**	**202.600.000**	**3,10 %**	**199.779.350**	**100**	**26,38**	**26.622,43 ton**	**21.198.200**	**3,10 %**	**32.319.700**	**295,84 %**
	Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	jumlah peserta pengendalian dan perlindungan nelayan	35 Org	10.924.700	35 Org	10.924.70	315 Org	201.600.000	315 Org	198.779.400	100	26,23	16 Org	20.000.000	358 Org	32.319.700	295,84 %
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah nelayan penerima pembinaan	0	0	0	0	1 Kecamatan	1.000.000	1 Kecamatan	999.950	100	100	1 Klp	1.198.000	1 Klp	0	0 %
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**prosentase peningkatan produksi PERIKANAN BUDIDAYA**	**25,46 %**	**121.680.000**	**25,46 %**	**117.075.000**	**33,46 %**	**92.000.000**	**33,46 %**	**91.586.423**	**100**	**96.19**	**7,05 ton/hektar**	**50.000.000**	**33,46 %**	**43.749.773**	**35,95 %**
3.25.04.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**prosentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**25,46 %**	**120.010.000**	**25,46 %**	**115.405.000**	**33,46%**	**91.000.000**	**33,46 %**	**90.586.423**	**100**	**96.17**	**7,05 ton/hektar**	**45.000.000**	**33,46 %**	**43.749.773**	**36,46 %**
	Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	15 Paket	100.010.000	15 Paket	95.405.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	89.586.423	100	95.28	10 klp	40.000.000	1 Paket	43.749.773	36,46 %
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan danPengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah peserta pembinaan budidaya ikan dan pembeihan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	4 Kelompok	1.000.000	4 Kelompok	1.000.000	100	100	15 Kelompok	5.000.000	4 Kelompok	0	0 %
3.25.04.2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**prosentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**25,46 %-**	**1.670.000**	**25,46 %-**	**1.670.000**	**33,,46 %**	**1.000.000**	**33,46 %**	**1.000.000**	**100**	**100**	**7,05 ton/hektar**	**5.000.000**	**33,46 %**	**0**	**0 %**
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian lingkungan, kesehatan ikan dan pakan ikan yang tersedia	1 Paket	1.670.000	1 Paket	1.670.000	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.000.000	100	100	1 Dok	5.000.000	1 Dok	0	0 %
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**prosentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan**	**4,99 %**	**20.037.500**	**4,99 %**	**20.037.500**	**5,20 %**	**43.013.500**	**5,20 %**	**43.013.450**	**100**	**97.47**	**50,36kg**	**15.000.000**	**5,20 %**	**24.303.400**	**121,29 %**
3.25.06.2.01	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**	**Prosentase Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil yang diterbitkan**	**4,99 %**	**9.098.500**	**4,99 %**	**9.098.500**	**5,20 %**	**41.013.500**	**5,20 %**	**41.013.500**	**100**	**100**	**50,36kg**	**13.000.000**	**5,20 %**	**24.303.400**	**267,11 %**

	Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi bidang perikanan	1 Dok	9.098.500	1 Dok	9.098.500	1 Dok	41.013.500	1 Dok	41.013.500	100	100	1 Dok	13.000.000	1 Dok	24.303.400	267,11 %
3.25.06.2.02	**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BagiUsahaPengolahandanPemasar anSkala Mikro dan Kecil**	**prosentase kelompok pengolahan dan pemasaran yang dibina**	**4,99 %**	**10.939.000**	**4,99 %**	**10.939.000**	**5,20 %**	**1.000.000**	**5,20%**	**1.000.000**	**100**	**-**	**50,36kg**	**1.000.000**	**5,20 %**	**0**	0 %
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah orang yang difasilitasi untuk medapatkan perizinan usaha	30 Orang	10.939.000	30 Orang	10.939.000	50 Org	1.000.000	50 Org	1.000.000	100	-	1 unit usaha	1.000.000	50 Org	0	0 %
3.25.06.2.03	**Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri PengolahanIkanDalam1(Satu)Daer ah Kabupaten/ Kota**	**Prosentase nelayan yang mendapat pembinaan optimalisasi kelembagaan dan pengellaan TPI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,20 %**	**1.000.000**	**5,20 %**	**999.950**	**100**	**97.23**	**50,36kg**	**1.000.000**	**5,20 %**	**0**	0 %
	Sub. Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang mendapat pembinaan optimalisasi kelembagaan dan pengelolaan TPI	0	0	0	0	4 Kelompok	1.000.000	4 Kelompok	999.950	100	97.23	10 pelaku usaha	1.000.000	4 Klp	0	0 %

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam pelaksanaan tugas. Penyusunan Renja Tahunan yang bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakaan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi. Adapun rencana kerja pembangunan Dinas Perikanan Tahun 2024 adalah sebagai

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sebelum pelaksanaan kegiatan belanja langsung pada tahun 2024, masing – masing Perangkat Daerah harus menetapkan rencana target tiap – tiap kegiatan. Dengan penentuan rencana target, maka tiap kegiatan dapat dilihat seberapa jauh tingkat keberhasilannya. Suatu kegiatan yang dilaksanakan tanpa rencana target akan mengakibatkan kegiatan tersebut tidak terarah dan tidak mempunyai tolok ukur keberhasilan. Adapun rencana pemberian pendanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2024 antara lain :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp.5.051.100,-
      Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 4.604.350,-
      Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.771.326.775,-
      Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD Rp. 1.819.500,-
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 1.000.000,-
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 1.499.600 ,-
Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (DAUM)

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 2.934.000,-
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.16.363.550,-
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 3.852.000,- Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 4.050.100,-
Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (DAUM)

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan Rp. 1.620.000,-
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 39.025.000,-
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 4.620.000,- Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 41.070.800,-
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 63.000.000,-
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rp. 922.570.000,-
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

6. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 21.900.000,-
      Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 21.400.000,-
      Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 12.740.000,-
      Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

7. **Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp. 1.050.000,-

Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (DAUM)

8. **Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**

   a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Rp. 20.000.000,-

      Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Rp. 1.198.200,-

      Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

9. **Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**

   a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Rp. 40.000.000,-

      Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil Rp. 5.000.000,-

      Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

10. **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**

    Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 5.000.000,- Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (DAUM)

11. **Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**

    Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 13.000.000,-

    Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

12. **Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**

    Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan

Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rp. 1.000.000,-

Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (DAUM)

13. **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 1.000.000,-

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAUM)

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 sebesar Rp. 4.930.503.063,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), dengan sumber dari Dana Alokasi Umum (DAUM). Dengan rincian jumalah Program 4 (empat) dan 13 Kegiatan 28 Sub Kegiatan. Adapaun Matrik Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan

Tujuan							Sasaran								
Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi			Target		Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi			Target		Keterangan
		2020	2021	2022	2024	Perubahan			2020	2021	2022	2024	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	4,83	5,21	5,59	5,94	-	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	(1,68%)	2,52 %	(0,12%)	26.622, 43 ton	-	-
							Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya	13,03%	12,63 %	4,70%	7,05 ton/hektar	-	-
							Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun	3,49%	3,69 %	25,64%	50,36	-	-

Tabel 3.2

Matrik Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2024

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kabutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11-6	14
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**4.843.254.863**	**Dana Alokasi Umum**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**4.866.535.818**	**Dana Alokasi Umum**	**23.280.955**	-
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**9.655.450**	**Dana Alokasi Umum**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**6.735.450**	**Dana Alokasi Umum**	**(2.920.000)**	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kabupaten Bangkalan	4 Dokumen	5.051.100	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kabupaten Bangkalan	4 Dokumen	4.041.100	Dana Alokasi Umum	(1.010.000)	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kabupaten Bangkalan	12 Laporan	4.604.350	Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kabupaten Bangkalan	12 Laporan	2.694.350	Dana Alokasi Umum	(1.910.000)	Pemenuhan Kebutuhan Daerah

3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**3.676.955.163**	**Dana Alokasi Umum**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**3.724.727.338**	**Dana Alokasi Umum**	**47.772.175**	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Bangkalan	45 org/bln	3.674.135.663	Dana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Bangkalan	45 org/bln	3.721.907.838	**Dana Alokasi Umum**	47.772.175	Refocusing Anggaran Untuk
													Pemenuhan Belanja **DAU Earmarked**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Kabupaten Bangkalan	2 Laporan	1.819.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Kabupaten Bangkalan	2 Laporan	1.819.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Kabupaten Bangkalan	20 Laporan	1.000.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Kabupaten Bangkalan	20 Laporan	1.000.000	Dana Alokasi Umum	0	-
3.25.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**1.499.600**	**Dana Alokasi Umum**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**1.499.600**	**Dana Alokasi Umum**	**0**	**-**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bangkalan	7 Laporan	1.499.600	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bangkalan	7 Laporan	1.499.600	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**67.844.650**	**Dana Alokasi Umum**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**48.363.430**	**Dana Alokasi Umum**	**(19.481.220)**	-

	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bangkalan	40 Paket	2.934.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bangkalan	40 Paket	2.934.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bangkalan	78 Paket	3.852.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bangkalan	78 Paket	3.852.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bangkalan	3 Paket	4.050.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bangkalan	3 Paket	4.050.000	Dana Alokasi Umum	0	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bangkalan	3 Dokumen	1.620.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bangkalan	3 Dokumen	1.620.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bangkalan	150 Laporan	39.025.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bangkalan	150 Laporan	19.543.780	Dana Alokasi Umum	(19.481.220)	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bangkalan	500 Paket	16.363.550	Dana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bangkalan	500 Paket	16.363.550	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**1.031.260.000**	**Dana Alokasi Umum**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**1.031.260.000**	**Dana Alokasi Umum**	**0**	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bangkalan	4 Laporan	4.620.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bangkalan	4 Laporan	4.620.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bangkalan	3 Laporan	41.070.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bangkalan	3 Laporan	41.070.000	Dana Alokasi Umum	0	Refocusing Anggaran Untuk Pemenuhan Belanja **DAU Earmarked**
	Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bangkalan	2 Laporan	63.000.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bangkalan	2 Laporan	63.000.000	Dana Alokasi Umum	0	-

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bangkalan	7 Laporan	922.571.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bangkalan	7 Laporan	922.570.000	Dana Alokasi Umum	(1.000.000)	Refocusing Anggaran Untuk Pemenuhan Belanja **DAU Earmarked**
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**56.040.000**	**Dana Alokasi Umum**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**Kabupaten Bangkalan**	**100 %**	**53.950.000**	**Dana Alokasi Umum**	**(2.090.000)**	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kabupaten Bangkalan	28 Unit	21.900.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kabupaten Bangkalan	28 Unit	21.900.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kabupaten Bangkalan	29 Unit	21.400.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kabupaten Bangkalan	29 Unit	21.400.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitas i	Kabupaten Bangkalan	30 Unit	12.740.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kabupaten Bangkalan	30 Unit	10.650.000	Dana Alokasi Umum	(2.090.000)	-
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah peningkatan produksi perikanan tangkap**	**Kabupaten Bangkalan**	**26.622,43 ton**	**22.248.200**	**Dana Alokasi Umum**	**prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**Kabupaten Bangkalan**	**26.622,43 ton**	**22.248.200**	**Dana Alokasi Umum**	**0**	-

3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota**	**prosentase Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang dikelola**	**Kabupaten Bangkalan**	**26.622,43 ton**	**1.050.000**	**Dana Alokasi Umum**	**prosentase Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang dikelola**	**Kabupaten Bangkalan**	**26.622,43 ton**	**1.050.000**	**Dana Alokasi Umum**	**0**	-
	Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap	jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan	Kabupaten Bangkalan	1 Kecamatan	1.050.000	Dana Alokasi Umum	jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan	Kabupaten Bangkalan	1 Kecamata n	1.050.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**prosentase nelayan kecil dalam daerah yang dibina**	**Kabupaten Bangkalan**	**26.622,43 ton**	**21.198.200**	**Dana Alokasi Umum**	**prosentase nelayan kecil dalam daerah yang dibina**	**Kabupaten Bangkalan**	**26.622,43 ton**	**21.198.200**	**Dana Alokasi Umum**	0	-
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	jumlah peserta pengendalian dan perlindungan nelayan	Kabupaten Bangkalan	358 Orang	20.000.000	Dana Alokasi Umum	jumlah peserta pengendalian dan perlindungan nelayan	Kabupaten Bangkalan	358 Orang	20.000.000	Dana Alokasi Umum	0	-
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah nelayan penerima pembinaan	Kabupaten Bangkalan	1 Kelompok	1.198.200	Dana Alokasi Umum	Jumlah nelayan penerima pembinaan	Kabupaten Bangkalan	1 Kelompok	1.198.200	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah

3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**peningkatan produktivitas perikanan budidaya**	**Kabupaten Bangkalan**	**7.05 ton/hektar**	**50.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**prosentase peningkatan produksi PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kabupaten Bangkalan**	**7,05 ton/hekta r**	**50.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	0	-
3.25.04.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**prosentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Kabupaten Bangkalan**	**7.05 ton/hektar**	**45.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**prosentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Kabupaten Bangkalan**	**7,05 ton/hekta r**	**45.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	0	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Kabupaten Bangkalan	1 paket	40.000.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Kabupaten Bangkalan	1 paket	40.000.000	Dana Alokasi Umum	0	-

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan danPengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah peserta pembinaan budidaya ikan dan pembeihan	Kabupaten Bangkalan	4 Kelompok	5.000.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah peserta pembinaan budidaya ikan dan pembeihan	Kabupaten Bangkalan	4 Kelompok	5.000.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
3.25.04.2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**prosentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**Kabupaten Bangkalan**	**7.05 ton/hektar**	**5.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**prosentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**Kabupaten Bangkalan**	**7,05 ton/hekta r**	**5.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**0**	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian lingkungan, kesehatan ikan dan pakan ikan yang tersedia	Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah pengendalian lingkungan, kesehatan ikan dan pakan ikan yang tersedia	Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah konsumsi ikan per kapita per tahun**	**Kabupaten Bangkalan**	**50,36 kg**	**15.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**Jumlah konsumsi ikan per kapita per tahun**	**Kabupaten Bangkalan**	**50,36 kg**	**15.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**0**	-
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**	**Prosentase Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil yang diterbitkan**	**Kabupaten Bangkalan**	**50,36 kg**	**13.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**Prosentase Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil yang diterbitkan**	**Kabupaten Bangkalan**	**50,36 kg**	**13.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**0**	-

	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi bidang perikanan	Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	13.000.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah data dan informasi bidang perikanan	Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	13.000.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BagiUsahaPengolahanda nPemasaranSkala Mikro dan Kecil**	**prosentase kelompok pengolahan dan pemasaran yang dibina**	**Kabupaten Bangkalan**	**50,36 kg**	**1.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**prosentase kelompok pengolahan dan pemasaran yang dibina**	**Kabupaten Bangkalan**	**50,36 kg**	**1.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**0**	-
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah orang yang difasilitasi untuk medapatkan perizinan usaha	Kabupaten Bangkalan	50 Orang	1.000.000	Dana Alokasi Umum	Jumlah orang yang difasilitasi untuk medapatkan perizinan usaha	Kabupaten Bangkalan	50 Orang	1.000.000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
3.25.06.2.03	**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri PengolahanIkanDalam1(Satu)Daerah Kabupaten/ Kota**	**Prosentase nelayan yang mendapat pembinaan optimalisasi kelembagaan dan pengelolaan TPI**	**Kabupaten Bangkalan**	**50,36 kg**	**1.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**Prosentase nelayan yang mendapat pembinaan optimalisasi kelembagaan dan pengelolaan TPI**	**Kabupaten Bangkalan**	**50,36 kg**	**1.000.000**	**Dana Alokasi Umum**	**0**	-
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang mendapat pembinaan optimalisasi kelembagaan dan pengelolaan TPI	Kabupaten Bangkalan	4 Kelompok	1.000..000	Dana Alokasi Umum	Jumlah nelayan yang mendapat pembinaan optimalisasi kelembagaan dan pengelolaan TPI	Kabupaten Bangkalan	4 Kelompok	1.000..000	Dana Alokasi Umum	0	Pemenuhan Kebutuhan Daerah
					4.930.503.063					**4.953.784.018**		**23.280.955**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan berdasarkan acuan dokumen – dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi Perangkat Daerah.

Demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan.

Pada akhirnya semoga pelaksanaan kegiatan belanja langsung tahun anggaran 2024 tidak menemui hambatan yang berarti dan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang perikanan di tahun yang akan datang.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.

Gambar.1.1.

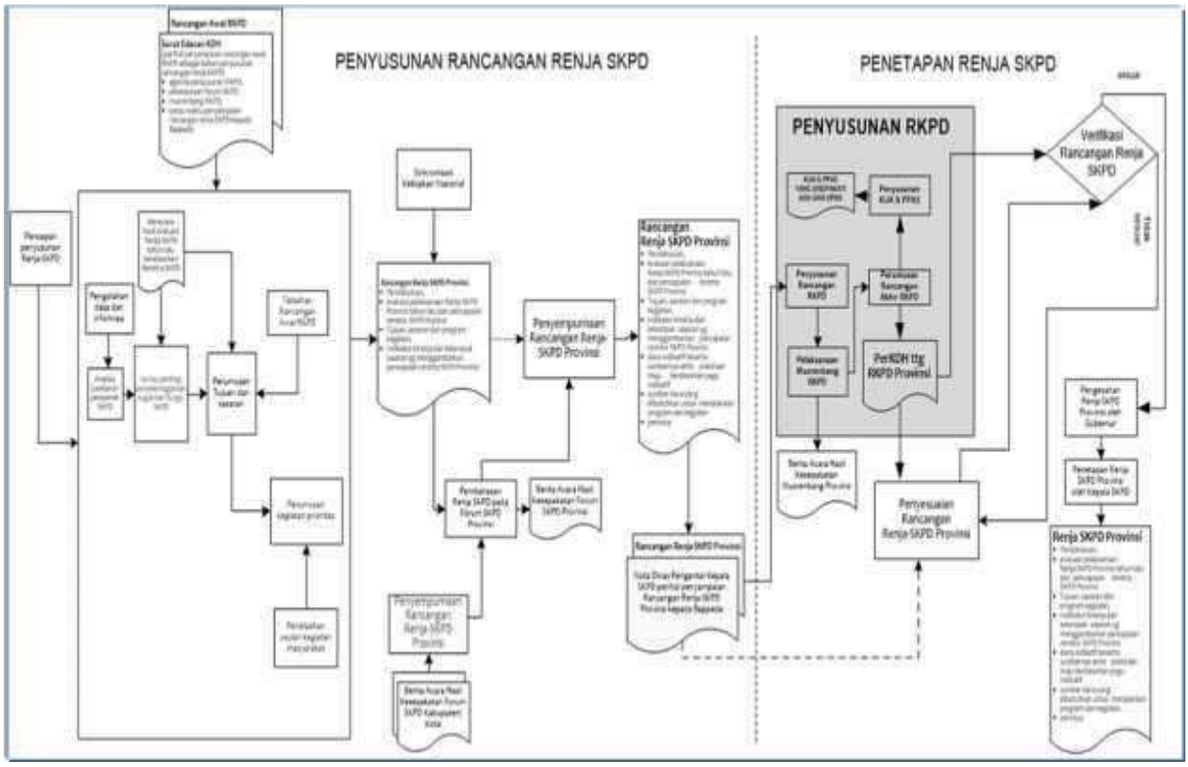

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
b. Undang-Uandang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 nomor 1/D);
j. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
k. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
l. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan ATAS Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan

Tahunn 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);

m. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan;

n. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/34/Kpts/433.013/2024 tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

I.3. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2023 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan.
3. Agar dokumen pada Rencana Kerja (RENJA) yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
   1.1 Latar Belakang
   1.2 Landasan Hukum
   1.3 Maksud Tujuan
   1.4 Sistematika Penulisan
2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN
   2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
   Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2022 dengan Anggaran sebesar Rp6.376.553.017,- Terealisasi sebesar Rp. 5.786.298.972,- Atau 95,38 % program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Adapun pelaksanaan 5 program, 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan di Disbudpar Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	
			JUMLAH	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	398.242.500,00	397.996.100,00	99,94
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	349.000.000,00	348.955.000,00	99,99
1	2.22.02.2.01.01 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	349.000.000,00	348.955.000,00	99,99
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.242.500,00	49.041.100,00	99,59
2	2.22.02.2.03.02 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	49.242.500,00	49.041.100,00	99,59
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	811.866.700,00	703.093.544,00	86,60
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	811.866.700,00	703.093.544,00	86,60
3	2.22.06.2.01.01 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	212.265.000,00	210.735.844,00	99,28
4	2.22.06.2.01.03 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	421.552.250,00	414.478.250,00	98,32
5	2.22.06.2.01.04 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	178.049.450,00	77.879.450,00	43,74
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.182.633.717,00	3.915.943.228,00	93,62
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.787.900,00	30.787.150,00	100,00
6	3.26.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.471.250,00	7.471.000,00	100,00
7	3.26.01.2.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	1.999.900,00	100,00

8	3.26.01.2.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	1.999.950,00	100,00
9	3.26.01.2.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.022.550,00	2.022.350,00	99,99
10	3.26.01.2.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.948.900,00	1.948.850,00	100,00
11	3.26.01.2.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	4.999.900,00	100,00
12	3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.345.200,00	10.345.200,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.010.262.622,00	2.972.455.568,00	98,74
13	3.26.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.996.020.122,00	2.958.213.268,00	98,74
14	3.26.01.2.02.05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.999.900,00	100,00
15	3.26.01.2.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.242.500,00	9.242.400,00	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.143.100,00	4.570.600,00	88,87
16	3.26.01.2.03.01 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.564.050,00	991.550,00	63,40
17	3.26.01.2.03.05 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.579.050,00	3.579.050,00	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
18	3.26.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.135.995,00	137.176.950,00	92,60
19	3.26.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.046.050,00	11.046.050,00	100,00
20	3.26.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.142.150,00	71.297.150,00	98,83
21	3.26.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.167.795,00	26.135.750,00	99,88
22	3.26.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.780.000,00	28.698.000,00	74,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.201.000,00	8.974.000,00	80,12
23	3.26.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.201.000,00	8.974.000,00	80,12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	837.793.100,00	641.132.661,00	76,53
24	3.26.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.849.600,00	74.376.854,00	28,40
25	3.26.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	575.943.500,00	566.755.807,00	98,40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.310.000,00	94.846.299,00	83,71

26	3.26.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.010.000,00	88.546.299,00	82,75
27	3.26.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	291.315.500,00	93.103.000,00	31,96
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	291.315.500,00	93.103.000,00	31,96
28	3.26.02.2.03.03 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	197.532.500,00	0	0,00
29	3.26.02.2.03.04 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	48.532.000,00	47.852.000,00	98,60
30	3.26.02.2.03.06 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	45.251.000,00	45.251.000,00	100,00
V	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	296.514.600,00	284.985.850,00	96,11
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	296.514.600,00	284.985.850,00	96,11
31	3.26.03.2.01.01 - Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	86.321.150,00	84.125.150,00	97,46
32	3.26.03.2.01.02 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	175.517.500,00	167.121.000,00	95,22
33	3.26.03.2.01.04 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	34.675.950,00	33.739.700,00	97,30
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	395.980.000,00	391.177.250,00	98,79
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	395.980.000,00	391.177.250,00	98,79
34	3.26.05.2.01.02 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	395.980.000,00	391.177.250,00	98,79
	TOTAL	6.376.553.017,00	5.786.298.972,00	90,74

Berdasarkan tabel di atas, ada dua program kegiatan yang pagu anggarannya di*recofusing* yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota terdapat dua kegiatan dengan tiga sub kegiatan yang

di*recofusing*, Program Pemasarabn Pariwisata terdapat satu kegiatan dengan satu sub kegiatan yang di*recofusing*, sedangkan pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata juga terdapat satu kegiatan dengan dua sub kegiatan yang di*recofusing*. Kegiatan dan sub kegiatan yang pagu anggarannya di*recofusing* sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program pemasaran pariwisata
   a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
      - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 dapat disimak penjelasan dibawah ini:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
   - Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   - Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
   - Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

4. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
   - Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
   - Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
     Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

6. REALISASI DAN CAPAIAN RENSTRA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

   Realisasi dan capaian kegiatan sesuai pada renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu pagu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.376.553.017,- tetapi yang terealisasi sebesar Rp. 5.786.298.972,- atau 95,38 % program/kegiatan yang terlaksana. Hal ini dikarenakan anggaran dana yang diterima tidak sesuai dengan pagu yang tertera pada renstra sehingga untuk kegiatan pengembangan wisata tidak kebagian anggaran yang seharusnya membutuhkan dana Rp 197.532.500,00 ,-

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kabupaten Bangkalan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/Kegiatan (pada Akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)*100		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)*100
2					URUSAN																
2	22				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN																
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya yang dilestarikan	5%	690.000.000	5%	1.425.715.550	5%	397.996.100	100%	869.879.450	100%	100	5%	230.000.000	100%	181.450.000	26,30
2	22	2	2		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	prosentase objek budaya yang dikembangkan / dikelola	5%	600.000.000	5%	1.376.674.450	5%	348.955.000	100%	839.879.450	100%	100	5%	200.000.000	100%	44.725.000	14,66
Z2	22	2	2	1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan atau dimanfaatkan	9 Event	600.000.000	2 Event	1.316.674.450	1 Event	348.955.000	3 Event	869.879.450	3 Event	100	2 Event	200.000.000	1 Event	44.725.000	14,66
2	22	2	2		Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga/pranata adat yang dibina	38%	90.000.000	37,5%	79.041.100	37,5%	49.041.100	37,5%	30.000.000	37,5%	100	38%	30.000.000	37,5%	136.725.000	151,92

2	22	2	2	2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Tenaga Budaya yang dibina	90 Orang	90.000.000	30 Orang	79.041.100	30 Orang	49.041.100	30 Orang	30.000.000	30 Orang	100	250 Orang	30.000.000	30 Orang	136.725.000	151,92
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	149.092.000	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	5.989.000	0
2	22	5	2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					0				149.092.000						5.989.000	0
2	22	5	2	2	Pengembangan Cagar Budaya					0				149.092.000						5.989.000	0
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan / terkelola dengan baik	1,59%	2.110.517.500	1,59%	703.093.544	1,59%	703.093.544	1,59%	684.877.150	1,59%	100	1,59%	700.000.000	1,59%	94.135.950	1,21
2	22	6	2		Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	prosentase pemeliharaan Permuseuman yang dilaksanakan	1,59%	2.110.517.500	1,59%	1.387.970.694	1,59%	703.093.544	1,59%	684.877.150	1,59%	100	1,59%	700.000.000	1,59%	94.135.950	1,21
2	22	6	2	1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dipelihara	6 Jenis	547.000.000	1 Jenis	416.544.194	2 Jenis	210.735.844	2 Jenis	205.808.350	2 Jenis	100	6 Jenis	180.000.000	2 Jenis	0	0
2	22	6	2	3	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah lomba program publik yang diadakan	81 Kegiatan	1.260.000.000	27 Kegiatan	824.638.250	7 Kegiatan	414.478.250	7 Kegiatan	410.160.000	7 Kegiatan	100	21 Kegiatan	420.000.000	4 Kegiatan	94.135.950	1,91
2	22	6	2	4	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarpras museum yang dipelihara	9 Unit	303.517.500	3 Unit	146.788.250	1 Unit	77.879.450	1 Unit	68.908.800	1 Unit	100	3 Unit	100.000.000	1 Unit	0	0
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya penunjang urusan kepemerintahan	100%	13.420.063.310	100%	3.572.217.001	100%	30.787.150	100%	3.549.751.751	100%	12719	100%	4.290.687.810	100%	1.058.301.010	3,13

3	26	1	2		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	104.000.000	100%	41.757.400	100%	30.787.150	100%	10.970.250	100%	100	100%	33.000.000	100%	1.457.650	1,39
3	26	1	2	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	9 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	13.278.350	2 Dokumen	7.471.000	1 Dokumen	5.807.350	1 Dokumen	100	9 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	760.150	1,84
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0
3	26	1	2	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	2.499.900	1 Dokumen	1.999.900	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	100	3 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	0	0
3	26	1	2	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	2.499.950	1 Dokumen	1.999.950	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	100	3 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	0	0
3	26	1	2	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	2.522.350	1 Dokumen	2.022.350	2 Dokumen	500.000	2 Dokumen	100	3 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	0	0
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0
3	26	1	2	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	6.000.000	0 Dokumen	2.448.850	0 Dokumen	1.948.850	1 Dokumen	2.663.000	1 Dokumen	100	3 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	0	0
3	26	1	2	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen	7.662.900	0 Dokumen	4.999.900	0 Dokumen	499.900		100	10 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	697.500	1,43

3	26	1	2	7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	10.845.100	1 Dokumen	10.345.200		0		100	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	0	0
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0
3	26	1	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	9.714.094.000	100%	5.722.940.349	100%	2.972.455.568		2.746.356.681		100	100%	3.143.698.000	100%	816.018.950	3,63
3	26	1	2	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	9.674.094.000	12 Bulan	5.703.570.149	12 Bulan	2.958.213.268	12 Bulan	2.745.356.881	12 Bulan	100	60 Bulan	3.133.698.000	12 Bulan	816.018.950	4,78
3	26	1	2	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	9 Laporan	15.000.000	3 Laporan	5.499.800	3 Laporan	4.999.900	3 Laporan	499.900	3 Laporan	100	9 Laporan	5.000.000	3 Laporan	-	0
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
3	26	1	2	7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	198 Laporan	25.000.000	66 Laporan	9.742.300	66 Laporan	9.242.400	66 Laporan	499.900	66 Laporan	100	264 Laporan	5.000.000	66 Laporan	-	0
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0

						SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
3	26	1	2		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	100%	15.000.000	100%	6.634.650	100%	4.570.600	100%	2.064.050	100%	100	100%	5.000.000	100%	0	2,73
3	26	1	2	1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4.500.000	0 Laporan	2.555.600	0 Laporan	991.550	1 Laporan	1.564.050	1 Laporan	100	7 Laporan	1.500.000	1 Laporan	0	1,36
3	26	1	2	5	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD	42 Laporan	10.500.000	14 laporan	4.079.050	14 laporan	3.579.050	14 Laporan	500.000	14 Laporan	100	56 Laporan	3.500.000	14 Laporan	0	0
3	26	1	21		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	388.500.000	100%	225.475.200	100%	137.176.950	100%	88.298.250	100%	100	100%	129.500.000	100%	39.638.900	1,38
3	26	1	21	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	39.000.000	2 Unit	23.465.300	2 Unit	11.046.050	2 Unit	12.419.250	2 Unit	100	10 Unit	13.000.000	2 Unit	6.234.750	0,20
3	26	1	21	4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	45 Unit	240.000.000	2 Unit	128.396.400	2 Unit	71.297.150	2 Unit	57.099.250	2 Unit	100	6 Unit	80.000.000	2 Unit	21.248.900	1,52
3	26	1	21	5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 Unit	49.500.000	2 Unit	44.915.500	2 Unit	26.135.750	2 Unit	18.779.750	2 Unit	100	6 Unit	16.500.000	2 Unit	9.951.250	2,22
3	26	1	21	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 Kali	60.000.000	15 Kali	28.698.000	15 Kali	28.698.000	15 Kali	0	15 Kali	100	45 Kali	20.000.000	15 Kali	2.204.000	0

3	26	1	21		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100%	2.668.469.310	100%	1.262.992.912	100%	641.132.661		634.310.251	100%	100	100%	929.489.750	100%	119.843.010	1,79
3	26	1	21	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa akomunikasi sumber daya air dan listrik	3 Unit	888.469.310	1 Unit	182.545.889	1 Unit	74.376.854	1 Unit	108.169.035	1 Unit	100	3 Unit	329.489.750	1 Unit	63.535.510	0,67
3	26	1	21	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 Unit	1.780.000.000	1 Unit	1.080.447.023	1 Unit	566.755.807	1 Unit	526.141.216	1 Unit	100	3 Unit	600.000.000	1 Unit	56.307.500	2,30
3	26	1	21		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terlaksana	100%	30.000.000	100%	8.974.000	0%	8.974.000	100%	0	100%	100	100%	10.000.000	100%	0	0
3	26	1	21	6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	12 Unit	30.000.000	0 Unit	8.974.000	0 Unit	8.974.000	1 Unit	0	1 Unit	100	8 Unit	10.000.000	1 Unit	0	0
3	26	1	21		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100%	285.000.000	100%	162.598.568	100%	94.846.299	100%	67.752.269	100%	100	100%	95.000.000	100%	81.342.500	3,00
3	26	1	21	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan dinas yang disediakan	6 Unit	240.000.000	2 Unit	140.218.568	2 Unit	88.546.299	2 Unit	51.672.269	2 Unit	100	6 Unit	80.000.000	2 Unit	77.102.500	3,53
3	26	1	21	6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	15.000.000	4 Unit	16.380.000	4 Unit	6.300.000	4 Unit	10.080.000	4 Unit	100	12 Unit	5.000.000	4 Unit	4.240.000	0
3	26	1	21	10	Sub Kegiatan Penyediaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	3 Unit	30.000.000	0 Unit	6.000.000	0 Unit	0	0 Unit	6.000.000	0 Unit	0	3 Unit	10.000.000	0 Unit	-	0

					dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau bangunan lainnya yang dipelihara														
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan destinasi wisata yang dikembangkan	3,57%	16.393.500.000	0%	523.860.500	0%	93.103.000	0%	430.757.500	0%	100	3,57%	450.000.000	3,57%	197.433.000	1,20
3	26	2	2		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	prosentase destinasi pariwisata yang dikelola	3,57%	950.000.000	0%	523.860.500	0%	93.103.000	0%	430.757.500	0%	100	3,57%	450.000.000	3,57%	197.433.000	1,20
3	26	2	2		Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kepariwisataan yang disusun	3 Dokumen	30.000.000		0				0				10.000.000			0
3	26	2	2	3	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Jumlah destinasi/objek wisata yang dikembangkan	5 Lokasi	500.000.000	0 Lokasi	394.170.900	1 Lokasi	0	1 Lokasi	394.170.900	1 Lokasi	0	5 Lokasi	50.000.000	1 Lokasi	197.433.000	98,72
3	26	2	2	4	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pariwisata yang dipelihara	3 Lokasi	300.000.000	0 Lokasi	47.852.000	0 Lokasi	47.852.000	1 Lokasi	0	1 Lokasi	100	4 Lokasi	100.000.000	1 Lokasi	0	0
3	26	2	2		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring yang diadakan	3 Kegiatan	30.000.000	0 Kegiatan	0				0				10.000.000			0
3	26	2	2	6	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pokdarwis yang dibina	18 Kelompok	90.000.000	0 Kelompok	81.837.600	6 Kelompok	45.251.000	6 Kelompok	36.586.600	6 Kelompok	100	21 Kelompok	30.000.000	6 Kelompok	0	0
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase jenis media promosi yang digunakan	50%	450.000.000	50%	284.985.850	50%	284.985.850	50%	67.909.717	50%	100	50%	150.000.000	50%	0	0
3	26	3	2		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam	prosentase pemasaran daya tarik,	50%	450.000.000	50%	284.985.850	50%	284.985.850	50%	67.909.717	50%	100	50%	150.000.000	50%	0	0

					dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	destinasi dan kawasan strategis pariwisata															
3	26	3	2	1	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi dan informasi yang dibuat	6 Jenis	120.000.000	9 Jenis	122.844.867	2 Jenis	84.125.150	2 Jenis	38.719.717	2 Jenis	100	9 Jenis	40.000.000	2 Jenis	0	0
3	26	3	2	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata yang diadakan	3 Jenis	240.000.000	0 Jenis	167.121.000	1 Jenis	167.121.000	2 Jenis	0	2 Jenis	100	7 Jenis	80.000.000	2 Jenis	0	0
3	26	3	2	4	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah usaha jasa pariwisata yag dibina	75 Orang	90.000.000	25 Orang	62.929.700	0 Orang	33.739.700	30 Orang	29.190.000	30 Orang	100	125 Orang	30.000.000	30 Orang	0	0
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase objek wisata yang berkembang/aktif	39,28%	381.000.000	39,28%	568.842.000	39,28%	391.177.250	39,28%	177.664.750	39,28%	100	39,28%	127.000.000	39,28%	0	0
3	26	5	2		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan/ dibina	100%	381.000.000	100%	568.842.000	100%	391.177.250	100%	177.664.750	100%	100	100%	127.000.000	100%	0	0
3	26	5	2	2	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM pariwisata yang dibina	375 Orang	381.000.000	125 Orang	568.842.000	30 Orang	391.177.250	300 Orang	177.664.750	300 Orang	100	60 Orang	127.000.000	300 Orang	0	0

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD
sampai dengan Semester I Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program /Kegiatan pada akhir periode renstra PD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perang Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100

NIHIL

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan merupakan aspek operasional yang nyata dari Renstra yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Renstra yang disusun dalam bentuk program dan kegiatan dalam satu tahun yang disertai dengan penetapan indikator keberhasilan pencapaianya.

Sesuai dengan sasaran, tujuan, misi dan visi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan maka rencana program dan kegiatan untuk tahun 2022 direalisasikan dalam 6 Program, 14 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

   Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

   a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

   Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

   a. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

   Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

   a. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu

   b. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum c. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
c. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

6 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Berdasarkan penjelasan di atas Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan				Sasaran				Keterangn
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja Tahun 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Mewujudkan pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata	1.Pertumbuhan jumlah kunjungan Wisatawan	2,91%	2,91%	Meningkatnya Jumlah ODTW	Jumlah ODTW yang dikembangkan	2 lokasi	3 lokasi	
	2. Persentase Seni /bendaCagar Budaya Yang dilestarikan	60,58%	60,58%	Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Seni Dan Budaya Daerah	Persentase Seni /bendaCagar Budaya Yang dilestarikan	60,58%	60,58%	
	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan	100%	100%	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	

Berdasarkan table 3.1 rencana usulan kegiatan prioritas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan yaitu

a) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang terdiri dari dua event yaitu kirab budaya dan kerapan sapi. Anggaran yang dibutuhkan yaitu Rp 200.000.000,-

2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Destinasi wisata yang perlu dikembangkan dan belum tersentuh sama sekali sesuai dengan RIPARPROV yaitu Wisata Religi Makam Syeichona Cholil, dan Makam Aer Mata Ebhu, Wisata Api Abadi, Panti Rongkang, dan Wisata Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Masing-masing wisata membutuhkan anggaran kisaran Rp. 300.000.000,-. Selain itu, wisata lain yang ingin dikembangkan meliputi pengembangan obyek wisata TRK, Lapangan SKEP, dan Wisaibaran (Bancaran) di tahun 2024 dengan anggaran Rp 500.000.000,- pengembangan wisata Bukit Geger tahun 2025 dengan anggaran Rp 100.000.000,- pengembangan wisata long gledek tahun 2026 dengan anggaran Rp 100.000.000,-

3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata, yang terdiri dari satu even yaitu Pemilihan Duta Wisata Kacong Jebing. Anggaran yang dibutuhkan yaitu Rp. 127.000.000,-

Selain itu, ada beberapa kegiatan prioritas dari setiap bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan yang masih banyak membutuhkan tambahan anggaran diantaranya yaitu:

1. Kegiatan prioritas dari Bidang Pemasaran diantaranya yaitu:
   a) Festival 1001 menu bebek anggaran yang dibutuhkan Rp 125.000.000,- kegiatan ini merupakan ikon agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun anggaran 2017 termasuk dalam rangkaian hari jadi kabupaten bangkalan, termasuk dalam kalender event Propinsi Jawa Timur sejak tahun 2019 (dalam rangka sinkronisasi program antara kabupaten dan propinsi jawa timur) dan juga merupakan ajang UMKM yang bergerak di bidang kuliner
   b) Fasilitasi penyusunan kalender event kabupaten Bangkalan anggaran yang dibutuhkan Rp 30.000.000,- tapi selama ini kalender event kabupaten Bangkalan hanya terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan oleh disbudpar, sehingga dibutuhkan fasilitasi untuk mendata semua OPD

yang kegiatannya bisa dilaksanakan dalam bentuk event/pagelaran/festival agar semuanya tercatat dan terpublikasi dengan baik.

c) Penyusunan dan Launching “tourism branding” dengan anggaran yang dibutuhkan Rp 125.000.000,- Tourism branding merupakan tagline dan identitas kabupaten bangkalan yang selalu ditampilkan dalam semua ajang yang membawa nama Bangkalan. Bangkalan merupakan satu-satunya kabupaten di pulau madura yang belum memilik tourism branding.

2. Kegiatan Prioritas dari Bidang Kebudayaan diantarannya yaitu:

a) Pendataan Obyek Pemajuan Kebudayaan anggaran yang dibutuhkan Rp 30.000.000,-

b) Misi Seni Budaya keluar Daerah anggran yang dibutuhkan Rp 250.000.00.-

3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan
						Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11 - 6	14
3					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
-	-				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
3	-	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan destinasi wisata yang dikembangkan	Bangkalan	5,66%	547.900.000	DAUM	Persentase pertumbuhan destinasi wisata yang dikembangkan	Bangkalan	5,66%	407.900.000	DAUM	-140.000.000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Destinasi Wisata yang dikembangkan	Bangkalan	5,66%	547.900.000	DAUM	Persentase Pertumbuhan Destinasi Wisata yang dikembangkan	Bangkalan	5,66%	407.900.000	DAUM	-140.000.000	
3	-	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bangkalan	1 Dokumen	0	DAUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bangkalan	1 Dokumen	0	DAUM	0	

3	-	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Bangkalan	3 Lokasi	300.000.000	DAUM	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Bangkalan	3 Lokasi	160.000.000	DAUM	-140.000.000	
3	-	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bangkalan	6 Laporan	47.900.000	DAK	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bangkalan	6 Laporan	47.900.00	DAK	0	
3	-	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bangkalan	1 Dokumen	0	DAK	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bangkalan	1 Dokumen	10.000.000	DAK	10.000.000	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Bangkalan	1 Unit	200.000.000	DAUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Bangkalan	1 Unit	200.000.000	DAUM	0	
3	-	05			PROGRAM PENGEMBANGA	Persentase Obyek Wisata	Bangkalan	39,28%	798.757.000	DAUM	Persentase Obyek Wisata	Bangkalan	39,28%	798.757.000	DAUM	0	

					N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	yang berkembang aktif					yang berkembang aktif						
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan/dibina	Bangkalan	100%	798.757.000	DAUM	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan/dibina	Bangkalan	100%	798.757.000,	DAUM	0	
3	-	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Bangkalan	150 orang	798.757.000	DAUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Bangkalan	150 orang	798.757.000,	DAUM	0	
3	-	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Jenis Media Promosi yang digunakan	Bangkalan	50%	14.760.000	DAUM	Persentase Jenis Media Promosi yang digunakan	Bangkalan	50%	14.760.000	DAUM	0	
3	-	03	20.1		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Media Promosi yang digunakan	Bangkalan	50%	14.760.000	DAUM	Persentase Jenis Media Promosi yang digunakan	Bangkalan	50%	14.760.000	DAUM	0	
03	-	03	20.1	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata	Bangkalan	30 Dokumen	0	DAUM	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata	Bangkalan	30 Dokumen	0	DAUM	0	

						Dalam dan Luar Negeri					Dalam dan Luar Negeri						
3	-	03	20.1	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Bangkalan	25 Laporan	0	DAUM	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Bangkalan	25 Laporan	0	DAUM	0	
3	-	03	20.1	0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Bangkalan	2 Dokumen	14.760.000	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Bangkalan	2 Dokumen	14.760.00	DAUM	0	
2	-	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase objek budaya yang berkembang	Bangkalan	30%	832.243.000	DAUM	Prosentase objek budaya yang berkembang	Bangkalan	30%	817.243.000	DAUM	-15.000.000	
2	-	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase objek budaya yang dikembangkan / dikelola	Bangkalan	5%	652.243.000	DAUM	Prosentase objek budaya yang dikembangkan / dikelola	Bangkalan	5%	637.243.000	DAUM	-15.000.000	
2	-	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Bangkalan	3 Objek	652.243.000	DAUM	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Bangkalan	3 Objek	637.243.000	DAUM	-15.000.000	
2	-	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya	Prosentase lembaga/pranata adat yang dibina	Bangkalan	30%	180.000.000	DAUM	Prosentase lembaga/pranata adat yang dibina	Bangkalan	30%	180.000.000	DAUM	0	

					dalam Daerah Kabupaten/Kota												
2	-	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Bangkalan	30 Orang	180.000.000	DAUM	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Bangkalan	30 Orang	180.000.000	DAUM	0	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan / terkelola dengan baik	Bangkalan	2,00%	705.000.000	DAK	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan / terkelola dengan baik	Bangkalan	2,00%	705.000.000	DAK	0	
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Prosentase pemeliharaan Permuseuman yang dilaksanakan	Bangkalan	2,00%	705.000.000	DAK	Prosentase pemeliharaan Permuseuman yang dilaksanakan	Bangkalan	2,00%	705.000.000	DAK	0	
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Bangkalan	2 Unit	210.000.000	DAK	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Bangkalan	2 Unit	210.000.000	DAK	0	
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Bangkalan	7 Unit	420.000.000	DAK	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Bangkalan	7 Unit	420.000.000	DAK	0	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarpras museum yang dipelihara	Bangkalan	1 Unit	75.000.000	DAK	Jumlah sarpras museum yang dipelihara	Bangkalan	1 Unit	75.000.000	DAK	0	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN		Bangkalan			DAUM		Bangkalan			DAUM	0	

					PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Bangkalan			DAUM		Bangkalan			DAUM	0	
2	22	05	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangka	Bangkalan	1 Objek		DAUM	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangka	Bangkalan	1 Objek	150.000.000	DAUM	150.000.000	
3	XX				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan kepemerintahan Daerah Nilai Sakip PD	Bangkalan	100 Indeks 6 nilai	3.738.100.941	DAUM	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan kepemerintahan Daerah Nilai Sakip PD	Bangkalan	100 Indeks 6 nilai	3.658.868.160	DAUM	-79.232.781	
3	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bangkalan	100%	6.687.038	DAUM	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bangkalan	100%	5.447.038	DAUM	1.240.000	
3	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	3 Dokumen	1.440.150	DAUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	3 Dokumen	1.440.150	DAUM	0	
3	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	562.188	DAUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	562.188	DAUM	0	

3	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	594.050	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	594.050	DAUM	0	
3	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	596.200	DAUM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	596.200	DAUM	0	
3	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	638.250	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	638.250	DAUM	0	
3	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	2 Laporan	1.941.600	DAUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	2 Laporan	701.600	DAUM	-1.240.000	

3	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bangkalan	1 Laporan	914.600	DAUM	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bangkalan	1 Laporan	914.600	DAUM	0	
3	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Bangkalan	100%	3.206.617.231	DAUM	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Bangkalan	100%	3.207.840.260	DAUM	1.223.029	
3	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	30/12 Orang/bulan	3.203.979.131	DAUM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	30/12 Orang/bulan	3.206.336.160	DAUM	2.357.029	
3	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	3 Laporan	1.914.800	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	3 Laporan	780.800	DAUM	-1.134.000	
3	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	66 laporan	723.300	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	66 laporan	723.300	DAUM	0	
3	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	persentase administrasi milik daerah	Bangkalan	100%	1.702.950	DAUM	persentase administrasi milik daerah	Bangkalan	100%	1.702.950	DAUM	0	

					Perangkat Daerah	pada perangkat daerah yang tersusun					pada perangkat daerah yang tersusun						
3	XX	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	1 laporan	690.250	DAUM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	1 laporan	690.250	DAUM	0	
3	XX	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	14 laporan	1.012.700	DAUM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	14 laporan	1.012.700	DAUM	0	
3	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Bangkalan	100%	0	DAUM	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Bangkalan	100%	0	DAUM	0	
3	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Bangkalan	50 Paket	0	DAUM	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Bangkalan	50 Paket	0	DAUM		
3	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bangkalan	100%	79.713.912	DAUM	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bangkalan	100%	72.637.912	DAUM	-7.076.000	
3	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	12.608.700	DAUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	12.608.700	DAUM	0	
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	42.199.250	DAUM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	39.319.250	DAUM	2.880.000	

X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	19.905.962	DAUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	18.505.962	DAUM	1.400.000	
3	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	15 Laporan	5.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	15 Laporan	2.204.000	DAUM	2.796.000	
3	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terlaksana	Bangkalan	100%	0	DAUM	persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan daerah yang terlaksana	Bangkalan	100%	106.800.000	DAUM	106.800.000	
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	2 Unit	113.200.000	DAUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	2 Unit	106.800.000	DAUM	-6.400.000	
3	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	4 Unit	0	DAUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	4 Unit	0	DAUM	0	
3	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Bangkalan	100%	321.639.810	DAUM	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Bangkalan	100%	255.900.000,	DAUM	-65.739.810	
3	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Bangkalan	1 Laporan	169.489.810	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Bangkalan	1 Laporan	109.650.000	DAUM	-59.839.810	

					Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
3	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Laporan	152.150.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Laporan	146.250.000	DAUM	-5.900.000	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Bangkalan	1 Laporan	121.740.000	DAUM	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Bangkalan	1 Laporan	8.540.000	DAUM	-113.200.000	
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Bangkalan		8.540.000	DAUM	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Bangkalan		8.540.000	DAUM	0	
3	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangkalan	1 Unit	0	DAUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangkalan	1 Unit	0	DAUM	0	
JUMLAH									6.786.760.941					6.552.528.160			

Berdasarkan tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan di atas semua Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan memiliki indikator kinerja yang mencakup capaian kinerja, keluaran sub kegiatan, dan hasil kegiatan, yang memiliki target sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditentukan.

Kemudian dalam tabel Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan juga disebutkan untuk perkiraan rencana kerja pada tahun selanjutnya yaitu pada Tahun 2025 dengan menyebutkan capaian target kinerja serta kebutuhan dana atau pagu indikatif yang dapat dilihat pada tabel di atas.

BAB IV
P E N UTUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Renstra OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan 2019– 2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Rancangan Rencana Kerja OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan Usulan Rencana Kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021. Dengan adanya Rencana Kerja OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, maka pada Tahun 2024 lebih difokuskan pada Skala Prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang handal;
2. Mewujudkan sistem Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan, sumber daya lokal, serta berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Meningkatkan kerjasama antar seniman dan pelestarian serta pengembangan aset seni budaya daerah;
5. Mengembangkan potensi dan meningkatkan daya saing wisata.

Prioritas tersebut diatas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi terhadap peningkatan Produksi dan Produktivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan akan memberikan dampak terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANGKALAN

ACHMAD FAUI, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
IP. 19650716 199703 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat tujuan, sasaran dan arah pembangunan daerah tahunan mengikuti Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebutuhan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pasal 343 dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 pasal 11 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta SE Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, sehingga dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

a. Priontas pembangunan daerah. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Target sasaran pembangunan daerah Rencana Program kegiatan dan sub kegiatan.
b. Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun sampai triwulan II tahun 2024, dan kebijakan pemerintah pusat seperti; Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, PMK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 19 Tahun 2023

tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Selain itu memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan APBD kabupaten Bangkalan Tahun 2023, adanya perubahan asumsi pendapatan, serta pemanfaatan SILPA, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian skema pembangunan Tahun 2024.

Percepatan Perubahan RKPD 2024 dilaksanakan karena adanya kebutuhan daerah sesuai dengan kondisi daerah. Beberapa catatan atas Perubahan RKPD 2024 Kabupaten Bangkalan adalah terjadinya defisit anggaran dari RKPD 2024 karena terjadi perubahan defisit penurunan Dana bagi Hasil Provinsi dan dari penurunan Pendapatan Asli Daerah Murni di luar BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Kabupaten Bangkalan. Kemudian, beberapa kegiatan yang potensial untuk diefisensi harus memenuhi syarat bahwa kegiatan tersebut tidak menyentuh earmark, DBHCHT dan DBHPR, kegiatan tidak untuk belanja bypass TAPD, kegiatan bukan Belanja Wajib dan Rutin (Eksekusi Tim P-RKPD), serta bukan kegiatan Pokir.

Yang menimbulkan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada Perubahan RKPD Tahun 2024, Sehubungan dengan terbitnya beberapa kebijakan-kebijakan. Selanjutnya Perubahan Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (PRKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Penetapan Perubahan Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 484/kpts/RC.020/m/8/2021 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (bagi Perangkat Daerah yang memilki target SPM);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);

k. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
l. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
m. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);
n. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan;
o. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/34/Kpts/433.013/2023 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Penetapan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Akhir Kerja Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya.

Tujuan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan adalah:

1. Menjadi dokumen perencanaan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan;
2. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Penetapan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2. Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian sampai semester tahun berjalan dan capaian Renstra Dinas Pertanian Tahun 2024 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: tidak ada karena secara keseluruhan program dan kegiatan telah mencapai sasaran sesuai target.
b. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja. Sebanyak 5 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
c. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil ukuran yang direncanakan: capaian target kinerja tahun berjalan sebesar 38, 61%
d. Faktor penyebab terpenuhi target yang telah dilaksanakan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring telah dilaksanakan dengan baik.
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra adalah target renstra tahun 2024 sesuai dengan yang direncanakan.

c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapai : penambahan anggaran, saling komunikasi dengan pihak-pihak terkait, pemberian bantuan alsintan, saprodi, bibit, benih, sarana pasca panen, sosialisasi kepada petani cara pasca panen yang benar, saling berkoordinasi dengan pihak terkait dan sosialisasi kepada petani dalam mengolah hasil produksi tanaman pertanian.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 %**	**39.498.615.238**	**100**	**12.213.984.515**	**100 %**	**12.213.984.515**	**100 %**	**12.055.533.590**	**100 %**	**98,70**	**100 %**	**12.665.684.800**	**100 %**	**6.789.144.205**	**17,19**
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**	**100 %**		**100**	**15.178.500**	**100 %**	**15.178.500**	**100 %**	**15.178.500**	**100 %**	**100**	**100 %**	**8.950.000**	**100 %**	**3.320.000**	**100**
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	28.500.000	4 dok	7.250.000	4 Dok	7.250.000	4 dok	7.250.000	4 dok	100	4 dok	1.750.000	12 dok	1.150.000	4,04
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dok	6.615.000	1 dok	325.250	1 Dok	325.250	1 dok	325.250	1 dok	100	1 dok	1.500.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dok	6.615.000	1 dok	325.250	1 Dok	325.250	1 dok	325.250	1 dok	100	1 dok	1.500.000			
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dok	8.115.000	1 dok	325.250	1 Dok	325.250	1 dok	325.250	1 dok	100	1 dok	500.000			
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dok	6.615.000	1 dok	325.250	1 Dok	325.250	1 dok	325.250	1 dok	100,	1 dok	500.000			
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 dok	9.900.000	2 lap	3.307.500	2 lap	3.307.500	2 lap	3.307.500	2 lap	100,00	1 lap	1.500.000	5 lap	1.070.000	10,81

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dok	21.000.000	4 lap	3.320.000	4 Lap	3.320.000	4 lap	3.320.000	4 lap	100	4 lap	1.700.000	lap		
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100 %**	**34.085.095.238**	**100**	**10.720.038.875**	**100**	**10.720.038.875**	**100 %**	**10.569.269.158**	**100 %**	**98,59**	**100**	**11.387.491.890**	**100**	**6.116.158.168**	**17,94**
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 org/bln	34.031.395.238	139 org/bln	10.709.407.725	139 org/bln	10.709.407.725	139 org/bln	10.558.638.008	139 org/bln	98,59	127 org/bln	11.381.941.890	405 org/bln	6.110.390.168	17,96
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dok	9.300.000	1 dok	2.200.500	1 Dok	2.200.500	1 dok	2.200.500	1 dok	100,	1 dok	1.250.000	1 dok	872.000	9,38
3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dok	9.600.000	1 dok	2.213.000	1 Dok	2.213.000	1 dok	2.213.000	1 dok	100	1 dok	1.000.000	1 dok	1.100.000	11,46

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 lap	9.300.000	1 lap	1.041.900	1 Lap	1.041.900	1 lap	1.041.900	1 lap	100	1 lap	1.200.000	3 lap	1.000.000	10,75
3.27.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 dok	6.600.000	1 dok	2.200.000	1 Dok	2.200.000	1 dok	2.200.000	1 dok	100	16 dok	2.100.000	18 dok	1.200.000	18,18
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48 lap	13.500.000	16 lap	1.709.750	16 Lap	1.709.750	16 lap	1.709.750	16 lap	100	0 lap		lap	1.596.000	11,82
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	3 dok	6.000.000	dok 1	1.266.000	1 dok	1.266.000	1 dok	1.266.000	1 dok	100	dok		dok		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
		Realisasi Anggaran															
3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun Tepat Waktu**	**100 %**	**12.000.000**	**100 %**	**2.400.000**	**100**	**2.400.000**	**100 %**	**2.400.000**	**100 %**	**100**	**100 %**	**1.500.000**	**100 %**	**818.750**	**6,82**
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun															
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 lap	12.000.000	6 lap	2.400.000	6 Lap	2.400.000	6 lap	2.400.000	6 lap	100	1 lap	1.500.000	13 lap	1.500.000	12,50
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun															
3.27.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
		yang tersususn															
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu**	**100 %**	**75.000.000**	**100 %**	**3.201.000**	**100 %**	**3.201.000**	**100 %**	**3.166.800**	**100 %**	**98,93**	**100 %**	**1.500.000**	**100 %**		-
3.27.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai															
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	423 unit	30.000.000													-
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian yang tersusun															
3.27.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan SistemInformasi Kepegawaian yang tersusun															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dok	15.000.000	1 dok	3.201.000	1 Dok	3.201.000	1 dok	3.166.800	1 dok	98,93	1 dok	1.500.000			-
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	30.000.000													
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100 %**	**359.580.000**	**100 %**	**59.181.850**	**100**	**59.181.850**	**100 %**	**58.903.928**	**100 %**	**99,53**	**100 %**	**44.565.000**	**100 %**	**41.680.368**	11,59

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor															
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	90.000.000	6 paket	25.721.850	6 Pkt	25.721.850	6 paket	25.721.850	6 pkt	100	2 paket	18.000.000	14 paket	18.000.000	20,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 dok	104.580.000	2 dok	18.335.000	2 Dok	18.335.000	2 dok	18.315.000	2 dok	99,89	3 dok	4.050.000	7 dok	2.430.000	2,32
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material															
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 lap	15.000.000	1 lap	1.840.000	1 Lap	1.840.000	1 lap	1.840.000	1 lap	100	1 lap	2.507.000	3 lap	2.507.000	16,71
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	3 lap	150.000.000	1 lap	13.285.000	1 lap	13.285.000	1 lap	13.027.078	1 lap	98,06	1 lap	20.008.000	3 lap	18.743.368	12,50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
	Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD															
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD yang tersusun															
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yangtersusun															
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana tepat waktu**	**100 %**	**60.000.000**	**100 %**	**21.582.200**	**100**	**21.582.200**	**100 %**	**21.582.200**	**100 %**	**100**	**100 %**	**6.000.000**	**100 %**	**6.000.000**	**10,00**
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	6 unit	30.000.000													
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	30.000.000	5 unit	21.582.200	5 unit	21.582.200	5 unit	21.582.200	5 unit	100	1 unit	6.000.000	11 unit	6.000.000	20,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan															
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi Tepat Waktu**	**100 %**	**3.928.980.000**	**100 %**	**1.196.126.490**	**100**	**1.196.126.490**	**100 %**	**1.189.622.600**	**100 %**	**99,46**	**100 %**	**1.133.830.000**	**100 %**	**558.962.169**	**14,23**
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 lap	15.000.000	1 lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000	1 lap	5.000.000	1 lap	100	1 lap	2.000.000	3 lap	2.000.000	13,33
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 lap	399.600.000	3 lap	119.191.490	3 Lap	119.191.490	3 lap	119.045.997	3 lap	99,88	1 lap	133.200.000	7 lap	69.281.842	17,34
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 lap	3.514.380.000	2 lap	1.071.935.000	2 lap	1.071.935.000	2 lap	1.065.576.603	2 lap	99,41	1 lap	998.630.000	5 lap	487.680.327	13,88

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana tepat waktu**	**100 %**	**890.000.000**	**100 %**	**196.275.600**	**100**	**96.275.600**	**100 %**	**195.410.404**	**100 %**	**99,56**	**100 %**	**81.847.910**	**100 %**	**61.523.500**	**6,91**
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	394.000.000	4 unit	145.500.000	4 unit	145.500.000	4 unit	145.068.004	4 unit	99,70	1 unit	40.610.000	9 unit	27.500.000	6,98
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 unit	66.000.000	25 unit	17.000.000	25 unit	17.000.000	25 unit	16.985.000	25 unit	99,91	27 unit	32.390.000	77 unit	25.188.500	38,16

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
3.27.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara															
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	15.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	100,00	unit		unit		
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangdipelihara/ direhabilitasi	3 unit	355.000.000													
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	60.000.000	2 unit	28.775.600	2 unit	28.775.600	2 unit	28.357.400	2 unit	98,55	1 unit	8.847.910	5 unit	8.835.000	14,73
3.27.02.2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang terpenuhi**	**17 %**	**7.864.594.100**	**17 %**	**4.377.688.550**	**17 %**	**4.377.688.550**	**17 %**	**4.341.351.550**	**17**	**99,17**	**17 %**	**3.869.900.000**	**51 %**	**109.605.000**	**1,39**
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,**	**Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan**											**17**	**650.000.000**	**17**	**94.200.000**	**14,49**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
	Teknologi dan Spesifik Lokasi	**Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**															
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		-									1	650.000.000	1	94.200.000	14,49
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Poktan yang Terfasilitasi Pengelolaan SDG nya**	**22 %**	**7.864.594.100**	**22 %**	**4.377.688.550**	**22 %**	**4.377.688.550**	**22 %**	**4.341.351.550**	**22**	**99,17**	**22 %**	**3.219.900.000**	**66 %**	**15.405.000**	**0,20**
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 VUB	395.000.000	1 VUB	256.902.000	1 VUB	256.902.000	1 VUB	256.563.400	100	99,87	1 VUB	56.000.000	3 VUB	6.000.000	1,52
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 dok	7.094.594.100	1 dok	4.031.664.700	1 Dok	4.031.664.700	1 dok	3.995.866.300	100	99,11	2 dok	3.159.000.000	4 dok	5.605.000	0,08

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 dok	375.000.000	1 dok	89.121.850	1 Dok	89.121.850	1 dok	88.921.850	100	99,78	1 dok	4.900.000	3 dok	3.800.000	1,01
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Kebutuhan Prasarana Pertanian yang terpenuhi**	**24 %**	**30.373.875.700**	**24 %**	**4.360.618.600**	**24 %**	**4.360.618.600**	**24 %**	**4.339.728.959**	**24**	**99,52**	**24 %**	**1.408.120.000**	**72 %**	**129.855.300**	**0,43**
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase LP2B, KP2B, dan LCP2B yang dikelola**	**3 %**	**1.330.000.000**	**3 %**	**352.852.450**	**3 %**	**352.852.450**	**3 %**	**352.211.950**	**3**	**99,82**	**3 %**	**100.000.000**	**9 %**	**88.300.150**	**6,64**
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang Dikelola		-	1 dok	352.852.450	1 Dok	352.852.450	1 dok	352.211.950	1	99,82	1 dok	50.000.000	3 dok	38.500.000	61,00
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B	3 dok	30.000.000									1	50.000.000	1	49.800.150	166,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
	Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun**	**27 %**	**29.043.875.700**	**27 %**	**4.007.766.150**	**27**	**4.007.766.150**	**100 %**	**3.987.517.009**	**100**	**99,49**	**27 %**	**1.308.120.000**	**154 %**	**41.555.150**	**0,14**
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	75 unit	10.516.849.800	7 unit	710.113.900	7 unit	710.113.900	7 unit	704.324.130	7	99,18	1 unit	98.400.000	15 unit	3.160.500	0,03
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	15 unit	3.000.000.000													
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	90 unit	8.947.050.000	24 unit	2.491.980.000	24 unit	2.491.980.000	24 unit	2.480.683.569	24	99,55	6 unit	654.950.000	54 unit	20.676.150	0,23
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun	12 unit	1.650.000.000													
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di	Jumlah BPP yang dibangun/Direhab															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
	Kecamatan serta sarana pendukungnya																
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	42 unit	4.929.975.900	8 unit	805.672.250	8 unit	805.672.250	8 unit	802.509.310	8	99,61	6 unit	554.770.000	22 unit	17.718.500	0,36
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Kebutuhan Pengendalian dan Penanganan Bencana yang Terpenuhi Tepat Waktu**	**100 %**	**225.000.000**	**100 %**	**111.850.000**	**100 %**	**111.850.000**	**100 %**	**111.000.200**	**100**	**99,24**	**100 %**	**14.399.850**	**100 %**	**11.600.000**	**5,16**
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Bencana Pertanian yang Dikendalikan dan Ditanggulangi**	**100 %**	**225.000.000**	**100 %**	**111.850.000**	**100 %**	**111.850.000**	**100 %**	**111.000.200**	**100**	**99,24**	**100 %**	**14.399.850**	**100 %**	**11.600.000**	**5,16**
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300 Ha	75.000.000	100 Ha	75.000.000	100 Ha	75.000.000	100 Ha	74.375.200	100	99,17	50 Ha	4.800.000	250 Ha	3.600.000	4,80

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
		yang Dikendalikan															
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	30 Ha	75.000.000	10 Ha	16.850.000	10 Ha	16.850.000	10 Ha	16.625.000	10	98,66	10 Ha	4.799.850	30 Ha	3.200.000	4,27
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300 Ha	75.000.000	100 Ha	20.000.000	100 Ha	20.000.000	100 Ha	20.000.000	100	100	50 Ha	4.800.000	250 Ha	4.800.000	6,40
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kebutuhan Penyuluhan Pertanian yang terpenuhi**	**50 %**	**3.426.293.010**	**50 %**	**1.828.508.000**	**50 %**	**1.828.508.000**	**50 %**	**1.782.520.687**	**50**	**97,48**	**50 %**	**620.788.000**	**100 %**	**130.140.000**	**3,80**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Poktan Kelas Lanjut**	**30 %**	**3.426.293.010**	**30 %**	**1.828.508.000**	**30 %**	**1.828.508.000**	**50 %**	**1.782.520.687**	**50**	**97,48**	**30 %**	**620.788.000**	**100 %**	**130.140.000**	**3,80**
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	54 unit	60.000.000	18 unit	207.000.000	18 unit	207.000.000	18 unit	207.000.000	18	100	18 unit	261.540.000	54 unit	130.400.000	217,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2024		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realiasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
	Kecamatan dan Desa	yang Ditingkatkan Kapasitasnya															
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 unit	60.000.000	3 unit	245.800.000	3 unit	245.800.000	3 unit	245.800.000	3	100					
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	24 unit	3.306.293.010	87 unit	1.375.708.000	87 unit	1.375.708.000	87 unit	1.329.720.687	87	96,66	91 unit	359.248.000			
				81.388.378.048		**22.892.649.665**		**22.892.649.665**		**22.630.134.986**				**18.578.892.650**		**7.170.344.505**	**17.93**

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/SPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

NO.	Indikator Kinerja		Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Ket
			2020	2021	2022	2023			
Tujuan									
1.	Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan	NA	0,71	0,7	0,72			
		Pertumbuhan PDRB Hortikultura	NA	0,51	0,01	0,52			
		Pertumbuhan PDRB Perkebunan	NA	0,51	-0,04	0,52			
2.	Meningkatnya kinerja urusan pertanian	Persentase ketercapaian kinerja program urusan pertanian (%)	100	100	100	100			
Sasaran									
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produksi Padi (Ton)	250	195	193	204			
		Produksi jagung (Ton)	102	105	95	127			
		Produksi Salak (Ton)	1,504	1,538	1,523	669			
		Produksi Melati (Kg)	286	286	286	267			
		Produksi Mente (Ton)	590	593	595	593			
2.	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan (%)	100	100	100	100			

NO.	Indikator Kinerja		Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Ket
			2020	2021	2022	2023			
Tujuan									
1.	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)					0,4		
Sasaran									
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produksi Padi (Ton)					193.744		
		Produksi jagung (Ton)					96.362		
		Produksi Cabe Rawit (Ton)					754		
		Produksi Melati (Kg)					286.593		
		Produksi Mente (Ton)					597		
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelengaraan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat					81,56		
		Nilai Sakip PD					69,94		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan menetapkan Rancangan Tujuan Daerah Kabupaten Bangkalan adalah Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan dengan indikator tujuan Pertumbuhan Ekonomi dan Rancangan Sasaran Daerah Kabupaten Bangkalan yaitu meningkatnya nilai tambah produksi pertanian dala arti luas.

Rancangan indikator tujuan PD yaitu Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).

Tujuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan Rancangan Rencana Perubahan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan yang telah diurai diatas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memiliki tujuan yaitu **Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)".**

Ketercapaian tujuan tersebut dapat terukur melalui Indikator Tujuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan yaitu **Peningkatan Produktivitas sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).**

Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan adalah kondisi yang diharapkan tercapai jika tujuan yang telah ditetapkan telah berhasil. Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan sekaligus pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang pertama adalah **"Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan".** Untuk mengetahui apakah sasaran-sasaran tersebut tercapai, maka telah ditetapkan indikator kinerja sasaran. Indikator atau ukuran kinerja sasaran yang dimaksud adalah **produksi padi, produksi jagung, produksi cabe rawit, produksi melati dan produksi mete.** Sasaran Dinas Pertanian Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan yang kedua untuk Sekretariat adalah "**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan**

Pemerintahan”. Sasaran tersebut memiliki indikator yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Sakip PD**.

Setiap indikator sasaran telah ditetapkan target capaiannya di masing-masing tahun selama periode 2024 - 2026. Tabel 3.1 Memperlihatkan tujuan dan sasaran, indikator kinerja serta target capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Bangkalan tahun 2024 - 2026.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah						Sasaran Perangkat Daerah					
Uraian	Indikator Kinerja	Target				Uraian	Indikator	Target			
		2024	2025	2026	Transisi 2027			2024	2025	2026	Transisi 2027
Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	0,4	0,52	0,6		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produksi Padi (Ton)	193.744	194.161	194.581	
							Produksi jagung (Ton)	96.362	96.765	97.175	
							Produksi Cabe Rawit (Ton)	754	760	767	
							Produksi Melati (Kg)	286.593	286.736	286.879	
							Produksi Jambu Mete (Ton)	597	599	601	
						Meningkatnya Tata Kelola Penyelengaraan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	81,56	81,66	82	
							Nilai Sakip PD	69,94	69,95	70	

3.2. Matrik Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Matrik Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan 2024 – 2026 dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan arahan Bapak Bupati Bangkalan kegiatan prioritas dan kegiatan utama serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan.

Tabel 3.2

Matrik Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024					Penetapan Perubahan Renja 2024					Selisih	Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13 = 11-6*	*14*
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bangkalan**	**100**	**12.521.439.853**	**DAUM**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bangkalan**	**100**	**12.444.469.438**	**DAUM**		
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**8.915.000**	**DAUM**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**8.915.000**	**DAUM**		
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	4 Dokumen	1.750.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	4 Dokumen	1.750.000	DAUM	-	
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	DAUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	DAUM	-	
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	DAUM	-	
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	465.000	DAUM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	465.000	DAUM	-	
3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	500.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	500.000	DAUM	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024					Penetapan Perubahan Renja 2024					Selisih	Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	1 laporan	1.500.000	DAUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	1 laporan	1.500.000	DAUM	-	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	4 Laporan	1.700.000	DAUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	4 Laporan	1.700.000	DAUM	-	
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**100**	**11.217.676.528**	**DAUM**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**100**	**11.217.676.528**	**DAUM**	-	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	127 Orang/bulan	11.211.026.528	DAUM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	127 Orang/bulan	11.211.026.528	DAUM	-	
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.250.000	DAUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.250.000	DAUM	-	
3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bangkalan		1.100.000	DAUM	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bangkalan		1.100.000	DAUM	-	
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	1 laporan	1.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	1 laporan	1.000.000	DAUM	-	
3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bangkalan	1 Dokumen	1.200.000	DAUM	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bangkalan	1 Dokumen	1.200.000	DAUM	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024					Penetapan Perubahan Renja 2024					Selisih	Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bangkalan	16 Laporan	2.100.000	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	16 Laporan	2.100.000	DAUM	-	
3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-	
3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**1.500.000**	**DAUM**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**1.500.000**	**DAUM**	-	
3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	1 laporan	1.500.000	DAUM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	1 laporan	1.500.000	DAUM	-	
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**1.500.000**	**DAUM**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**1.500.000**	**DAUM**	-	
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					-	
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	DAUM	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	DAUM	-	
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					-	
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum**	**Bangkalan**	**100**	**42.400.000**	**DAUM**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum**	**Bangkalan**	**100**	**42.400.000**	**DAUM**		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024					Penetapan Perubahan Renja 2024					Selisih	Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
		Perangkat Daerah tepat waktu					**Perangkat Daerah tepat waktu**						
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	18.000.000	DAUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	18.000.000	DAUM	-	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bangkalan	3 Dokumen	4.050.000	DAUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bangkalan	3 Dokumen	4.050.000	DAUM	-	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	1 laporan	2.507.000	DAUM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	1 laporan	2.507.000	DAUM	-	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	1 laporan	17.843.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	1 laporan	17.843.000	DAUM	-	
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Bangkalan**	**100**	**6.000.000**	**DAUM**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Bangkalan**	**100**	**6.000.000**	**DAUM**	-	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					-	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	4 unit	6.000.000	DAUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	4 unit	6.000.000	DAUM	-	
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**1.062.059.585**	**DAUM**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**1.084.630.000**	**DAUM**		
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	1 Laporan	2.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	1 Laporan	2.000.000	DAUM	-	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bangkalan	1 Laporan	133.200.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bangkalan	1 Laporan	133.200.000	DAUM	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024					Penetapan Perubahan Renja 2024					Selisih	Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Laporan	926.859.585	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Laporan	949.430.000	DAUM	**22.570.415**	
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**81.847.910**	**DAUM**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**81.847.910**	**DAUM**	-	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bangkalan	4 Unit	40.610.000	DAUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bangkalan	4 Unit	40.610.000	DAUM	-	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	25 Unit	32.390.000	DAUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	25 Unit	32.390.000	DAUM	-	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bangkalan	15 Unit	-	DAUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bangkalan	15 Unit	-	DAUM	-	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					-	
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	8.847.910	DAUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	8.847.910	DAUM	-	
3.27.02	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Persentase kebutuhan sarana pertanian yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**17**	**3.869.900.000**	**DAUM/ DAK**	**Persentase kebutuhan sarana pertanian yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**17**	**3.682.400.000**	**DAUM/ DAK**		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024					Penetapan Perubahan Renja 2024					Selisih	Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi**			**650.000.000**		**Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi**			**650.000.000**		-	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	**Bangkalan**	**1 laporan**	650.000.000	**DAK NF**	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	**Bangkalan**	**1 laporan**	650.000.000	**DAK NF**	-	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Prosentase poktan yang terfasilitasi pengelolaan SDGnya**	**Bangkalan**	**22**	**3.219.900.000**	**DAUM**	**Prosentase poktan yang terfasilitasi pengelolaan SDGnya**	**Bangkalan**	**22**	**3.032.400.000**	**DAUM**	**(187.500.000)**	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bangkalan	1 Dokumen	3.159.000.000	DAUM	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bangkalan	1 Dokumen	3.021.500.000	DAUM	**(137.500.000)**	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bangkalan	1 Dokumen	4.900.000	DAUM	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bangkalan	1 Dokumen	4.900.000	DAUM	-	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Bangkalan	1 VUB	56.000.000	DAUM	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Bangkalan	1 VUB	6.000.000	DAUM	**(50.000.000)**	
3.27.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Prosentase kebutuhan prasarana pertanian yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**24**	**1.408.120.000**	**DAUM**	**Prosentase kebutuhan prasarana pertanian yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**24**	**1.408.120.000**	**DAUM**		
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Prosentase LP2B, KP2B dan LCP2B yang dikelola**	**Bangkalan**	**3**	**100.000.000**	**DAUM**	**Prosentase LP2B, KP2B dan LCP2B yang dikelola**	**Bangkalan**	**3**	**100.000.000**	**DAUM**	-	
3.27.03.2.01.0001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/ Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Bangkalan	1 dokumen	50.000.000	DAUM	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Bangkalan	1 dokumen	50.000.000	DAUM	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024					Penetapan Perubahan Renja 2024					Selisih	Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
3.27.03.2.02.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Bangkalan	1 dokumen	50.000.000	DAUM	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Bangkalan	1 dokumen	50.000.000	DAUM	-	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Prosentase prasarana pertanian yang dibangun**	**Bangkalan**	**25**	**1.308.120.000**	**DAUM**	**Prosentase prasarana pertanian yang dibangun**	**Bangkalan**	**25**	**1.308.120.000**	**DAUM**	-	
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					-	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bangkalan	30 Unit	654.950.000	DAUM	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bangkalan	30 Unit	654.950.000	DAUM	-	
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					-	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bangkalan	14 Unit	554.770.000	DAUM	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bangkalan	14 Unit	554.770.000	DAUM	-	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Bangkalan	25 Unit	98.400.000	DAUM	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Bangkalan	25 Unit	98.400.000	DAUM	-	
3.27.05.	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Prosentase kebutuhan pengendalian dan penanganan bencana yang terpenuhi tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**14.399.850**	**DAUM**	**Prosentase kebutuhan pengendalian dan penanganan bencana yang terpenuhi tepat waktu**	**Bangkalan**	**100**	**14.399.850**	**DAUM**		
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Prosentase bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi**	**Bangkalan**	**100**	14.399.850	**DAUM**	**Prosentase bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi**	**Bangkalan**	**100**	14.399.850	**DAUM**	-	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Bangkalan	100 Ha	4.800.000	DAUM	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Bangkalan	100 Ha	4.800.000	DAUM	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024					Penetapan Perubahan Renja 2024					Selisih	Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Bangkalan	10 Ha	4.799.850	DAUM	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Bangkalan	10 Ha	4.799.850	DAUM	-	
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bangkalan	100 Ha	4.800.000	DAUM	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bangkalan	100 Ha	4.800.000	DAUM	-	
3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Prosentase kebutuhan penyuluhan pertanian yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**50**	**620.788.000**	**DAK**	**Prosentase kebutuhan penyuluhan pertanian yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**50**	**620.788.000**	**DAK**		
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Prosentase poktan kelas lanjut**	**Bangkalan**	**30**	**620.788.000**	**DAK**	**Prosentase poktan kelas lanjut**	**Bangkalan**	**30**	**620.788.000**	**DAK**	-	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bangkalan	18 unit	261.540.000	DAK NF	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bangkalan	18 unit	261.540.000	DAK NF	-	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					-	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Bangkalan	8 Unit	359.248.000	DAK F	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Bangkalan	8 Unit	359.248.000	DAK F	-	
	JUMLAH				**18.357.677.288**					**18.170.177.288**		**(187.500.000)**	

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan merupakan gambaran mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka pengembangan pertanian di Kabupaten Bangkalan. Dokumen ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang akan dilaksanakan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023. Pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024, secara mutlak menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk peran masyarakat maupun instansi terkait sangat diperlukan.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGKALAN

Ir. PUGUH SANTOSO, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650610 198711 1 00

Formulir E.29
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat daerah	V			
2	Pengelolaan data dan informasi	V			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	V			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah	V			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	V			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD	V			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	V			
8	Penelaahan usulan masyarakat	V			
9	Perumusan kegiatan prioritas	V			
10	Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat daerah	V			
10.a	Menyeleraskan program dan kegiatan Perangkat daerah Propinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten	V			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	V			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	V			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif	V			
11	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V			
12	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	V			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan perkiraan maju	V			
14	Dokumen renja perangkat daerah yang telah disahkan	V			

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Ir. PUGUH SANTOSO, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650610 198711 1 001

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun awal perencanaan dan untuk mengoptimalkan rumusan program dan kegiatan baru dalam mempersiapkan kesinambungannya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun lalu. Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Rencana Kerja dan pendanaan beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternkan Tahun 2024 dirumuskan dan disusun secara partisipasif, dengan melihatkan seluruh pejabat dengan pelaku utama dalam pencapaian target – target pembangunan di dalam Rancangan Renja Tahun 2024 ini.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk, kekuatan dan perlindungan, sehingga setiap target yang telah dirumuskan dapat tercapai dan bermanfaat. Amiiin.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN BANGKALAN

AHMAT HAFID, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat kabupaten. Rumusan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan peternakan dalam dokumen Renja juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat peternak. Namun demikian, kondisi saat pelaksanan rencana ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan rencana untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan peternakan yang akan dicapai pada tahun 2024.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalarn perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, tahap perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan awal renja Perangkat

Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang *definitif*.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Pk.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan
i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (bagi Perangkat Daerah yang memiliki target SPM);
j. Peraturan Daerah Kabupaten BangkaJan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan at.as Perdaturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2029 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
m. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/175/Kpts/433.013 /2024 tanggal 14 Agustus 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Perubahan Renja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Memasukkan program/kegiatan yang ada di Perubahan Rencana kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.
2. Memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Peternakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Perubahan Renja Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagi berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

Pada Bagian memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV. PENUTUP

Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Peternakan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Peternakan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan.

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renja tahun ke 1 dalam pelaksanaan rencana strategis Dinas Peternakan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026.

Adapun penyusunan Perubahan (*Renja)* Dinas Peternakan Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang sebagai berikut :

a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai diatas, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas peternakan juga memperhatikan hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan Perubahan APBD Tahun 2024; dan
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Peternakan menurut DPPA Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13.828.900.026,- dari

keseluruhan 5 Program dan kegiatan yang terdiri dari 18 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 terdapat :

1. Secara umum Realisasi anggaran Tahun 2024 sampai dengan Triwulan 2 sebesar Rp. 5.679.349.098,- atau tercapai sebesar 41,07% dari target anggaran sebesar Rp. 13.828.900.026,-.

1. Pencapaian tersebut karena ada beberapa kegiatan yang awalnya ditargetkan pada triwulan 2, bergeser pada triwulan 3, seperti kegiatan dari Pokok Pikiran para anggota dewan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra
   - Tidak tercapainya target capaian kinerja tentunya berimplikasi terhadap target capaian renstra Dinas Peternakan tahun 2018 – 2023.
3. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target sebagai berikut :
   - Kinerja lebih ditingkatkan lagi.

Gambaran lengkap Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023								Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Capaian Program, dan Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan(Tahun 2024 semester II)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4			-5		-6		-7		8=(7/6)*100		-9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang terpenuhi**	**100**	**%**	**16.877.000.000**	**100**	2.570.299.760	19.05	2.098.000.000		1.954.537.000	99,55		**100%**	**4.700.000.000**	0%	**3.506.242.500**	20,78
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Prosentase pengawasan sarana pertanian yg dilakukan**	**100**	**%**	**20.000.000**												**0**	**0,00**
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3	lap	20.000.000												0	0,00
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota**	**Prosentase SDG yang dikelola**	**100**	**%**	**12.521.000.000**	***100***	*2.134.221.090*		1.623.500.000		1.494.035.400	99,6		100%	**3.500.838.000**	0%	**3.500.838.000**	**27,96**
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3	VUB	1.543.000.000	0 ekor					548.436.550	99,72		0		0 ekor	0	0,00
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3	dok	5.260.000.000	34 ekor	715.003.650	30 Ekor	556.000.000		945.598.850	99,54		1 dok	230.000.000	0 ekor	230.000.000	4,37
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3	ekor	5.718.000.000	1250 ekor	1.419.217.440	10 Ekor	1.067.500.000					1 dok	3.270.838.000	0 ekor	3.270.838.000	57,20
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta**	**Persentase sampel pakan ternak yang diuji**	100	%	**28.000.000**	**100**										0%	**0**	**0,00**

	Pakan Dalam Daerah Kab/Kota																	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, BahanPakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	3	lap	14.000.000	0 spl										0 ton	0	0,00
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan,Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	3	lap	14.000.000												0	0,00
3.27.02.2.04	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Prosentase obat hewan yang diperiksa**	**100**	**%**	**15.000.000**												**0**	**0,00**
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	3	lap	15.000.000												0	0,00
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kab/Kota**	**Prosentase benih/bibit/HPT yang dikendalikan dan diawasi**	**100**	**%**	**28.000.000**	100	*20.630.600*		474.500.000		460.501.600	99,37		**100%**	**2.162.000**		**0**	**0,00**
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	150	ekor	14.000.000	36 Zak	20.630.600	40 Peternak	10.000.000		9.996.000	99,96					0	0,00
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	3	ton	14.000.000	0 ekor		113 ekor	464.500.000		450.505.600	99,35		0,5 ton	2.162.000		0	0,00
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Prosentase benih/bibit ternak HPT yang disediakan**	**100**	**%**	**4.265.000.000**	100	*415.448.070*							**100**	**1.197.000.000**	0%	**5.404.500**	**0,13**
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kab/Kota lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	900	ekor	4.205.000.000	26 ekor	415.448.070							500 Ekor	1.197.000.000	0 ekor	5.404.500	0,13
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah kab/Kota lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3	ton	60.000.000	0 Stek											0	0,00
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN**	**Prosentase penyediaan prasarana pertanian**	**100**	**%**	**4.990.700.000**	100	2.550.728.565	13.33	337.500.000		411.039.268			**100**	**12.000.000**	0%	**0**	**0,00**

	PRASARANA PERTANIAN																
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Prosentase Prasarana Peternakan yang dikembangkan**	**100**	**%**	**50.000.000**	100	*2.544.129.365*		330.000.000							**0**	**0,00**
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	3	dok	50.000.000											0	0,00
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Prosentase Prasarana Peternakan yang dikelola**	**100**	**%**	**4.888.200.000**				413.234.250		408.539.268	98,86		**100**	**12.000.000**		**0**	**0,00**
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	unit	1.000.000.000	9 unit	14.223.600									0 unit	0	0,00
		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	unit	1.600.000.000	0 unit											0	0,00
		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9	unit	245.000.000	0 unit		1 unit	80.000.000		161.516.550	98,95		9 unit	12.000.000		0	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	unit	2.000.000.000	**0 Unit**											0	0,00
		Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	unit	-	2 unit											0	0,00
		Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6	unit	43.200.000	4 unit	2.529.905.765	2 unit	250.000.000		247.022.718	98,81					0	0,00
3.27.03.2.03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dlm Daerah Kabupaten/ Kota**	**Prosentase wilayah sumber bibit yang dikelola**	**100**	**%**	**22.500.000**	**100**											**0**	**0,00**
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	3	lap	22.500.000	1 wilayah											0	0,00

3.27.03.2.04	**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	**Prosentase lahan penggem-balaan umum yang dikelola**	**100**	**%**	**30.000.000**	**100**	*6.599.200*		7.500.000		2.500.000	100					**0**	**0,00**
3.27.03.2.04.02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah lahan pengembalaan umum yang dikelola	3	hktar	30.000.000	1 hektar	*6.599.200*	1 ha	7.500.000		2.500.000	100					0	0,00
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Prosentase Peningkatan Kesehatan Hewan**	**100**	**%**	**591.500.000**	**100**	*827.921.040*	100	918.096.850		779.718.200	96,36		**100**	**985.875.000**	0%	**373.452.900**	**63,14**
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota**	**Prosentase hewan yang ditreatmen**	**100**	**%**	**215.000.000**	100	*624.451.640*		51.902.850		2.043.000	95,29					**0**	**0,00**
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3	lap	50.000.000	50 Ekor	1.280.000	340 ekor	2.250.850							0 lap	0 -	0,00
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	lap	80.000.000	460 ekor	42.360.400	1100 ekor	40.252.000							0 lap	0	0,00
35000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	3	lap	85.000.000	323 ekor	580.811.240	662 ekor	9.400.000		2.043.000	95,29				0 lap	0	0,00
3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase hewan /produk hewan yang diperiksa**	**100**	**%**	**65.000.000**	**0**										0%	**0**	**0,00**
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	3	lap	35.000.000	0 ekor										0 lap	0	0,00
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	lap	30.000.000	0 ekor										0 lap	0	0,00

3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota**	**Prosentase pelayanan jasa yang dilakukan**	**100**	**%**	**140.000.000**	100	*177.771.400*		827.563.000		752.850.200	96.28		**100**	**972.875.000**	0%	**371.202.900**	**265,14**
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3	lap	50.000.000	325 sampel	30.534.650	1350 sampel	26.500.000		5.969.525	82,48				0 Lap	0	0,00
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3	lap	90.000.000	300 ekor	147.236.750	400 ekor	801.063.000		746.880.675	96,41		1 lap	972.875.000		371.202.900	412,45
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Prosentase peredaran hewan/produk hewan yang diawasi**	**100**	**%**	**114.500.000**	**100**	*22.698.000*		28.631.000		12.825.000	97,89		100	5.000.000	0%	**2.250.000**	**1,97**
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3	lap	30.000.000	20 Org	17.500.000	30 Org	16.750.000		12.450.000	98,81					0	0,00
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	3	lap	40.000.000	0 sampel	5.198.000	3 unit Ush	11,881,000		375.000	74,7		1 lap	5.000.000	0 lap	2.250.000	5,63
3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	3	lap	17.000.000				12.000.000		12.000.000	100					0	0,00
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	3	dok	27.500.000												0	0,00
3.27.04.2.05.01	**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejah-teraan Hewan**	**Prosentase pelaku usaha yang menerapkan teknis kesrawan**	**100**	**%**	**57.000.000**	**100**	*3.000.000*		10.000.000						**8.000.000**	0%	**0**	**0,00**
3.27.04.2.05.01	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3	lap	42.000.000	150 ekor	3.000.000	100 Ekor	10.000.000						8.000.000		0	0,00
3.27.04.2.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	3	ksus	15.000.000												0	0,00
3.27.07.	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Prosentase kelompok usaha peternak yang dibina/ difasilitasi**	**100**	**%**	**120.000.000**	100	*54.082.650*	20.00	63.265.325		15.382.100	99,16		100	**7.000.000**		0	**0,00**
3.27.07.201	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Prosentase jenis sarana dan prasarana yang disediakan**	**100**	**%**	**120.000.000**	100	*54.082.650*		63.265.325		15.382.100	99,16		**100**	**7.000.000**		0	**0,00**
3.27.07.201.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Peternak di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	unit	50.000.000	2 klp	7.286.000	2 kelpk	6.038.150					1 unit	3.500.000	0 Klpk	0	0,00

3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan	3	unit	70.000.000	2 jenis	9.972.650	2 jenis	30.235.400		14.875.100	99,17		1 unit	3.500.000	0 Jenis	0	0,00
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha yang dibentuk					36.824.000	2 unit bdn ush	26.991.775		507.000	98,81					0	0,00
3.27.06	**PROGRAM PERIJINAN USAHA PERTANIAN**	**Prosentase Rekomendasi yang dikeluarkan**	**100**	**%**	**15.000.000**	**20.00 %**								100	3.000.000	0%	**0**	**0,00**
3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kab/Kota**	**Prosentase rekomendasi izin usaha yg diterbitkan**	**100**	**%**	**15.000.000**	**20.00 %**								100	3.000.000		**0**	**0,00**
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Peternakan	3	dok	15.000.000	5 rekomendasi								1 dok	3.000.000	0 dok	0	0,00
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**%**	**24.278.420.217**	**100%**	7.829.960.156	100	8.376.738.563		7.534.956.985	98,66		**100%**	**8.093.596.203**		**4.542.499.048**	**18,71**
1 3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**72.000.000**	*83,25*	*21.636.700*	100	19.711.275		2.438.900			100%	**2.003.400**	0%	**1.862.050**	**2,59**
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	6.000.000	2 dok	837.700	3 dok	2,236,450		761.700	92,76		3 dok	571.800	0 dok	555.550	9,26
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu-sunan Dokumen RKA-SKPD	3	dok	1.200.000	1 dok	368.400	1 dok	365.550		298.850	100				0 dok	0	0,00
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Lapor-an Hasil Koordina-si Penyusunan Dokumen Perubahan	3	dok	1.200.000	1 dok	368.400	1 dok	365.550		364.650	100				0 dok	0	0,00
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu-sunan Dokumen DPA-SKPD	3	dok	1.200.000	1 dok	368.400	1 dok	368.850					1 dok	400.350	0 lap	396.750	33,06
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Lapor-an Hasil Koordina-si Penyusunan Dokumen Peru-bahan DPA-SKPD	3	dok	1.200.000	1 dok	368.400	1 dok	368.850		367.950	100		1 dok	400.350	0 dok	396.750	33,06

3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lapor-an Hasil Koordina-si Penyusunan Laporan Cpaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	dok	1.200.000	1 dok	370.400	1 Laporan	375.450					1 Laporan	410.350	0 lap	294.250	24,52
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	lap	60.000.000	8 Dok	18.955.000	8 lap	15.630.575		645.750	94,91		8 lap	220.550	0 lap	218.750	0,36
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**		**19.845.437.217**	**100%**	*6.134.198.971*	100	6.496.833.088		6.225.827.293	98,98		**100**	**6.893.534.353**	0%	**3.940.673.057**	**19,86**
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	243	org	19.830.437.217	70 Org	6.129.484.271	88 org	6.491.985.738		6.223.673.893	98,98		83 Orang/bulan	6.892.607.203	0 org/bulan	3.940.673.057	19,87
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu-sunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	lap	10.500.000	2 lap	3.434.800	1 laporan	3.467.850		1.558.400	96,9		2 dok	537.950	0 lap	0	0,00
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan-an/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koor-dinasi Penyusun-an Laporan Ke-uangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	108	lap	4.500.000	128 lap	1.279.900	128 lap	1.379.500		595.000	94,54		128 Lap	389.200	0 lap	0	0,00
3.27.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**4.500.000**	**100%**	*2.143.750*	100	1.935.400		582.750	98,78		**100%**	**880.900**	5	**0**	**0,00**
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	dok	1.500.000	7 lap	447.750	1 Dok	453.350		189.000	98,59		1 Dok	391.750	0 dok	0	0,00
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	lap	3.000.000	7 lap	1.696.000	12 lap	1,482,050		393.750	98,87		12 Lap	489.150	0 lap	0	0,00
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**137.400.000**	0 lap	*1.823.000*	100	1,777,000					**100%**	**724.000**	0%	**0**	**0,00**

3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	pket	132.600.000	**100%**	**1.823.000**	1 Dok									0	0,00
3.27.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	dok	4.800.000	1 lap	1.823.000	1 Dok	1,777,000				1 Dok	724.000	0 dok	0	0,00
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perang-kat Daerah**	**100**	**%**	**421.734.000**	*64,93*	*414.127.273*	100	124.614.900		79.866.800	99,73		**100%**	**57.742.350**	0%	**27.192.400**	**6,45**
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	pket	6.000.000	2 unit	2.002.500	1 Paket	2,083,750		2.083.000	99,96		1 paket	1.716.750	0 paket	649.700	10,83
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	pket	3.000.000	7 unit	1.798.600	1 Paket	1.114.350		1.114.200	99,99		1 paket	995.550	0 paket	529.200	17,64
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	135	pket	44.500.000	2 unit	215.490.000	45 Paket	10.650.000		9.300.000	100		45 paket	5.100.000	0 paket	1.050.000	2,36
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	27	pket	81.600.000	9 jenis	47.649.750	9 Paket	32,479,000		29.331.500	100		9 paket	20.351.000	0 paket	17.625.000	21,60
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	6	dok	24.600.000	2 jenis	19.420.000	2 Dok	11.620.000		4.300.000	100		2 dok	3.800.000	0 dok	1.250.000	5,08
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/material yang Disediakan	78	pket	61.800.000	24 Jenis	43.674.750	26 Paket	21.727.800		19.888.100	98.98		26 Paket	13.579.050	0 paket	6.088.500	9,85
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	lap	200.234.000	46 kali	84.091.673	126 Laporan	44.940.000		13.850.000	100		126 Lap	12.200.000	0 lap	0	0,00
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**543.000.000**	*99,27*	*155.055.000*	100	173.914.900		153.422.000	98,98		**100%**	**164.513.000**	0%	**104.760.000**	**19,29**
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas Jabatan yang Disedikan	3	unit	468.000.000	1 unit	155.055.000	1 unit	156.000.000		148.878.000	99,92		1 unit	152.000.000	0 unit	104.760.000	22,38
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2	unit	30.000.000	0 unit		2 unit	17.914.900					0			0	0,00

3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	unit	45.000.000	0 unit		unit	0		4.544.000	75,73		2 unit	12.513.000	0 unit	0	0,00
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.861.349.000**	*97,36*	*1.046.868.625*	100	1.089.708.000		988.602.900	96,99		**100%**	**101.587.500**	0%	**440.773.937**	**15,40**
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	258.849.000	3 jenis	59.779.831	4 Laporan	86.283.000		84.283.196	99,62		4 lap	105.737.500	0	45.243.990	17,48
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	lap	21.000.000	2 jenis	7.215.000	2 jenis	7.650.000		5.950.000	100		2 lap	4.000.000	0 lap	2.350.000	11,19
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	lap	2.581.500.000	8 jenis	979.873.794	8 Laporan	995,775,000		898.369.704	96,73		8 lap	801.850.000	0 lap	393.179.947	15,23
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**393.000.000**	**100%**	*54.106.837*	100	468.244.000		81.216.342	94,1		**100%**	**62.610.700**	0	**27.237.604**	**6,93**
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	69	unit	240.000.000	17 unit	38.319.857	20 Unit	25.100.000		59.774.468	98,46		23 unit	29.150.000	0 unit	20.458.878	8,52
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84	unit	90.000.000	15 unit	10.474.980	20 unit			19.841.874	82,67		28 unit	10.900.000	0 unit	6.778.726	7,53
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	unit	63.000.000	1 unit	-	1 unit	370.800.000		1.600.000	100		1 unit	22.560.700	0 unit	-	0,00
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit		1 unit	5.512.000									0	0	0,00
Jumlah					**46.872.620.217**		**13.832.992.171**		**11.793.600.738**		**10.695.633.553**				**13.801.471.203**		**8.422.194.448**	**17,97**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja

Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan adalah gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Peternakan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yang akan datang. Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Dinas Peternakan baik dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka Dinas Peternakan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan Rancangan Tujuan yang ke-3, yaitu : **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan.** Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Peternakan melaksanakan Rancangan Sasaran yang ke-1, yaitu : **Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dalam arti luas.**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rancangan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, maka Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan memiliki tujuan yaitu : **Peningkatan Produktifitas Sektor Peternakan (Besar, Kecil, dan Unggas),** dengan indikator tujuan : Prosentase Peningkatan Produktivitas Sektor Peternaan (Besar, Kecil dan Unggas). Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka sasaran yang dimiliki Dinas Peternakan adalah : **Meningkatnya Populasi Peternakan** dengan indikator sasaran : **Jumlah Populasi Peternakan (ekor).**

Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pertanian. Karena itu penyusunan Renstra tahun 2024-2026 juga memperhatikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan instansi teknis baik internal Dinas Peternakan, Dinas Peternakan Provinsi , Kementerian/Lembaga dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Dinas Peternakan

Berikut ini tujuan dan sasaran perubahan renja Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tertuang pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024
Perangkat Daerah*)

Tujuan				**Sasaran**				**Keterangan**
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	Perubahan			2024	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Peningkatan Produktifitas Sektor Peternakan (Besar, Kecil, dan Unggas)	Prosentase Peningkatan Produktivitas Sektor Peternakan (Besar, Kecil, dan Unggas)	1%	-	Meningkatnya Populasi Peternakan	Jumlah populasi ternak (ekor) •sapi potong •Kambing •ayam buras •ayam petelur •Ayam pedaging •Itik	 196.532 80.652 1.641.192 85.119 303.430 86,151	 - - - - - -	
				Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pertanian	Indeks Kepuasan Masayarakat Nilai Sakip PD	78,75 66,54	- -	

3.2 Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Perubahan Rencana Kerja (Renja) termaktub dalam Program dan Kegiatan di Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. **Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   f. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f. Penyediaan Bahan/Material
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
   a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
   b. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
2. **Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

3. **Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota lain.**
    a. Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain

III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. **Pembangunan Prasarana Pertanian**
    a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**
    a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2. **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**
    a. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha.

V. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**
    a. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
    b. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

VI. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

1. **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
    a. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Perubahan rencana kerja (*renja*) diatas merupakan siklus perubahan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Bangkalan yang tertuang pada matrik rancangan perubahan rencana kerja (*renja*) Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024

Kofde	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dna Pagu indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11-6	14
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				13.828.900.026					13.801.471.203		-161.269.723	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				13.828.900.026					13.801.471.203		-161.269.723	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintaha**n		100%	8.171.025.026		**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintaha**n		100%	**7.959.755.303**		-211.269.723	
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		100%	2.003.400		**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		100%	1.862.050		0	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan, Mlajah	3 dok	571.800	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan,	3 dok	571.800	Dana Transfer Umum-DAU	0	

3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu-sunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 dok	400.350	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu-sunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 dok	400.350	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Mlajah	1 dok	400.350	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Mlajah	1 dok	400.350	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	410.350	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Laporan	410.350	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	8 lap	220.550	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	8 lap	220.550	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		100	6.938.713.176	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		100	**6.893.534.353**	Dana Transfer Umum-DAU	-45.178.823	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	83 Orang /bulan	6.937.786.026	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	83 Orang/bulan	6.892.607.203	Dana Transfer Umum-DAU	-45.178.823	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 dok	537.950	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 dok	537.950	Dana Transfer Umum-DAU	0	

3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bula-nan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo-ran Koordinasi Penyusunan La-poran Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	128 Lap	389.200	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Laporan Keuangan Bula-nan/Triwulanan/ SemesteranSKPD dan Laporan Koor-dinasi Penyusun-an Laporan Keu-angan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	128 Lap	389.200	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**		100%	880.900	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**		100%	880.900	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dok	391.750	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dok	391.750	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Lap	489.150	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12 Lap	489.150	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**		100%	724.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**		100%	724.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dok	724.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 Dok	724.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	57.742.350	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	57.742.350	Dana Transfer Umum-DAU	0	

3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 paket	1.716.750	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 paket	1.716.750	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 paket	995.550	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 paket	995.550	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	45 paket	5.100.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	45 paket	5.100.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	9 paket	20.351.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	9 paket	20.351.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 dok	3.800.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 dok	3.800.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/material yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	26 Paket	13.579.050	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Paket Bahan/material yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	26 Paket	13.579.050	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	126 Lap	12.200.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	126 Lap	12.200.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**		100%	160.851.200	Dana Transfer Umum-DAU	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**		100%	168.513.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	

3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 unit	152.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 unit	152.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 unit	8.851.200	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 unit	12.513.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	967.060.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	911.587.500	Dana Transfer Umum-DAU	-165.210.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Ja-sa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	4 lap	83.860.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	4 lap	105.737.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Ja-sa Peralatan dan Perlengkap-an Kantor yang Disediakann	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 lap	4.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakann	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2 lap	4000.000	Dana Transfer Umum-DAU	-1.577.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	8 lap	879.200.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	8 lap	801.850.000	Dana Transfer Umum-DAU	-163.633.000	
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pe-meliharaan Ba-rang Milik Dae-rah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**		**100%**	43.050.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Persentase Pe-meliharaan Ba-rang Milik Daerah Penunjang Urus-an Pemerintahan Daerah yang terlaksana**		**100%**	62.610.700	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kenda-raan Perorangan Dinas atau Ken-daraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	23 unit	29.150.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	23 unit	29.150.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	

3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	28 unit	10.900.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	28 unit	10.900.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 unit	3.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 unit	22.560.700	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Prosentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang terpenuhi**		**100%**	4.650.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang terpenuhi**		**100%**	**4.700.000.000**	Dana Transfer Umum-DAU	50.000.000	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Prosentase SDG yang dikelola**		100%	3.500.838.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase SDG yang dikelola**		100%	**3.500.838.000**	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Kab. Bangkalan, Semua Kec, Semua Kel./Desa	1 dok	230.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Bangkalan, Semua Kec, Semua Kel./Desa	1 dok	230.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	, ,	1 dok	3.270.838.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Bangkalan, Semua Kec, Semua Kel./Desa	1 dok	3.270.838.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase benih/bibit/HPT yang dikendalikan dan diawasi**		100%	**2.162.000**	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase benih/bibit/HPT yang dikendalikan dan diawasi**		100%	**2.162.000**	Dana Transfer Umum-DAU	0	

3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	0,5 ton	Rp2.162.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,5 ton	2.162.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Prosentase benih/bibit ternak HPT yang disediakan**		100	**1.147.000.000**	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase benih/bibit ternak HPT yang disediakan**		100	**1.197.000.000**	Dana Transfer Umum-DAU	**50.000.000**	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kab/Kota Lain	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	500 Ekor	1.147.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	500 Ekor	1.197.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	50.000.000	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Prosentase penyediaan prasarana pertanian**		100	**12.000.000**	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase penyediaan prasarana pertanian**		100	**12.000.000**	Dana Transfer Umum-DAU	**0**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Prosentase Prasarana Peternakan yang dikelola**		100	12.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase Prasarana Peternakan yang dikelola**		100	**12.000.000**	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipeliharaa	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 unit	12.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipeliharaa	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	9 unit	12.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN**	**Prosentase Peningkatan Kesehatan Hewan**		100	985.875.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase Peningkatan Kesehatan Hewan**		100	985.875.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	

	MASYARAKAT VETERINER												
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase pelayanan jasa yang dilakukan**		100	972.875.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase pelayanan jasa yang dilakukan**		100	972.875.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 lap	972.875.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 lap	972.875.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Prosentase peredaran hewan/produk hewan yang diawasi**		100	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase peredaran hewan/produk hewan yang diawasi**		100	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 lap	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 lap	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.04.2.05	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Prosentase pelaku usaha yang menerapkan teknis kesrawan**		100	8.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase pelaku usaha yang menerapkan teknis kesrawan**		100	8.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.04.2.05.01	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 unit	8.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 unit	8.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Prosentase Rekomendasi yang dikeluarkan**		100	3.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase Rekomendasi yang dikeluarkan**		100	**3.000.000**	Dana Transfer Umum-DAU	0	

3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kab/Kota**	**Prosentase rekomendasi izin usaha yg diterbitkan**		100	3.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase rekomendasi izin usaha yg diterbitkan**		100	**3.000.000**	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilai-an Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Peternakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 dok	3.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Peternakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 dok	3.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.07.	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Prosentase kelompok yang diberikan penyuluhan**		100	7.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase kelompok yang diberikan penyuluhan**		100	**7.000.000**	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.07.201	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Prosentase jenis sarana dan prasarana yang disediakan**		100	7.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	**Prosentase jenis sarana dan prasarana yang disediakan**		100	**7.000.000**	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.07.201.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Peternak di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 unit	3.500.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Kelembagaan Peternak di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 unit	3.500.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 unit	3.500.000	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1 unit	3.500.000	Dana Transfer Umum-DAU	0	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Peternakan Kabupaten Bangkalan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, Oleh karena eskalasi permasalahan Peternakan yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan Peternakan Kabupaten Bangkalan, maka pada tahun 2024 lebih difokuskan pada Skala Prioritas sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pengelolaan bibit dan pakan ternak, melalui fasilitasi produksi dan penyebarluasannya serta pembinaan budidaya ternak;
2. Meningkatkan kesehatan hewan melalui tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit ternak;
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner melalui fasilitasi Rumah Potong Hewan dan pengawasan keamanan produk asal hewan;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dalam pengolahan dan pemasaran;

Prioritas tersebut diatas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan Peternakan Tahun 2024, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas hasil peternakan dan akan memberikan dampak terhadap peningkatan Kesejahteraan Peternak di Kabupaten Bangkalan.

Lampiran : Nerita Acara

Formulir E.29
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat daerah	√			
2	Pengelolaan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat daerah	√			
10.a	Menyeleraskan program dan kegiatan Perangkat daerah Propinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif	√			
11	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	√			

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN BANGKALAN

AHMAT HAFID, SE, MM
Pembina Utama Mdda
NIP 19690131 199003 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026. Perubahan Rencanaπ Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh Aparat Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menyusun suatu perencanaan yang baik agar mampu meningkatkan Pelayanan yang Prima terhadap Masyarakat sehingga tercipta Good Governace.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2024 - 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
4. Paraturan dalam negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan.
7. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Bagi Perangkat Daerah yang memiliki Target SPM).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Bangkalan Tahun Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan nomor …….. tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2023 Nomor ……..)
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan nomor …….. tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2023 Nomor ……..)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan adalah suatu dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dan harus sejalan dengan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan periode 3 (Tiga) tahun dengan maksud memberikan arah kebijakan sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah / kebijakan tugas - tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja baik

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Renja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja PERANGKAT DAERAH Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

- Tabel 2.1 (Rekapitulasi Evaluasi Renja Tahun Lalu)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Evaluasi Renstra

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD

- Tabel 2.3 (Review terhadap Perubahan RKPD**)**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

- Tabel 2.4 (Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat)

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja tahun 2024 Perangkat Daerah

3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (renja) Tahun 2024

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

Lampiran – Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan 5 Program yang didalamnya terdapat 13 Kegiatan dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 34.419.108.397,-.

Program dan Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 (Rekapitulasi Evaluasi Tahun Anggaran 2022)
PAGU ANGGARAN BELANJA
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
		JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**33.420.620.503**	**33.085.473.096**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.645.600**	**4.645.550**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	895.600	895.550
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.250.000	1.250.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.250.000	1.250.000
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.250.000	1.250.000
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.384.036.453**	**20.171.884.635**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.382.786.453	20.170.634.635
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.250.000	1.250.000
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0
D	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**159.820.500**	**159.241.250**
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	159.820.500	159.241.250
E	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**159.686.250**	**159.686.250**
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	159.686.250	159.686.250
F	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**147.207.700**	**140.658.361**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.018.600	1.018.600
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.122.400	18.532.400
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.014.200	1.014.200
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.300.000	25.800.000

4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.637.500	15.637.500
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.860.000	4.860.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.255.000	73.795.661
G	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.300.000**	**3.300.000**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.300.000	3.300.000
H	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.334.172.000**	**12.219.877.667**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	542.000.000	460.764.944
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.792.172.000	11.759.112.723
I	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**227.752.000**	**226.179.383**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.600.000	140.152.783
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.850.000	25.850.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.302.000	60.176.600
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**14.548.665.500**	**1.541.478.655**
A	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**14.541.910.750**	**1.534.723.905**
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	13.721.975.000	715.650.800
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	819.935.750	819.073.105
B	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**6.754.750**	**6.754.750**
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6.754.750	6.754.750
III	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**180.607.100**	**180.607.100**
A	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**17.312.700**	**17.312.700**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	17.312.700	17.312.700
B	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**163.294.400**	**163.294.400**
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	18.344.500	18.344.500
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	7.844.800	7.844.800
3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	137.105.100	137.105.100

IV	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**74.782.450**	**74.782.450**
A	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**74.782.450**	**74.782.450**
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	68.010.400	68.010.400
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	6.772.050	6.772.050
	JUMLAH	**48.224.675.553**	**34.882.341.301**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bidang perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri (domestik) dan juga perdagangan luar negeri (ekspor impor) dimana keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi perdagangan

Potensi Perdagangan di Kabupaten Bangkalan bergeliat terjadi di kec kota bangkalan. di kecamatan kota Bangkalan terdapat 3 (tiga) simpul pertumbuhan ekonomi dengan di dominasi .sektor perdagangan yang sangat potensial dan dapat di sebut sebagai kawasan segi tiga emas bangkalan

Simpul pertama adalah kelurahan mlajah .di mana terdapat bangkalan plaza dan pasar ki lemah duwur merupakan pusat nya.

Simpul kedua dikelurahan bancaran dengan pasar sebagai pusatnya sementara simpul ketiga terdapat di desa martajesah dengan pesarean syaichona Muhammad cholil (wisata religi) sebagai pusatnya.

Pengembangan ketiga kawasan ini dimasa yang akan datang tetap harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten bangkalan, tanpa meninggalkan pengembangan kawasan sekitar jembatan suramadu di kecamatan labang, kecamatan tragah, dan kecamatan burneh,

Sub sektor perdagangan terpetakan dalam kategori perdagangan besar, menengah dan kecil. Di kabupaten bangkalan dari ketiga kategori perdagangan kecil selalu mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini wajar mengingat aktivitas perdagangan di bangkalan masih dominan komoditas yang bersifat lokal ,seperti hasil makanan dan minuman olahan pertanian dan kerajinan kecil

Untuk Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pasar; *Pendapatan Retribusi*, Pendapatan sekor pasar Selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 4.401.759.685 menjadi Rp. 6.853.867.214 tahun 2023 hal ini dipengaruhi adanya kenaikan tarif retribusi pasar.

Tabel 2.2 (Pencapaian Kinerja Evaluasi Tahun Anggaran 2022)
PAGU ANGGARAN BELANJA
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINEJRA	REALISASI KINEJRA
1	2	3	4
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**100%**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dok	2 dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	1 dok
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12. bulan	12. bulan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	0	0
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0
D	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 laporan	2 laporan
E	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 orang	250 orang
F	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26 unit	26 unit
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit	3 unit
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44 unit	44 unit
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94,51	94,51
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 jenis	2 jenis
G	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit
H	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis	2 jenis
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 jenis	6 jenis

I	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 unit	12 unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47 unit	47 unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**100%**	**100%**
A	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 lokasi	1 lokasi
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 jenis	3 jenis
B	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**		
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	14 kali	14 kali
III	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**100%**	**100%**
A	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**100%**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	75 orang	75 orang
B	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	10 lokasi	10 lokasi
3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 lokasi	5 lokasi
IV	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**100%**	**100%**
A	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**100%**	**100%**
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1 dok	1 dok
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1 dok	1 dok

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 bahwa ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut :

1. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Perdagangan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai Dinas Perdagagan Kabupaten Bangkalan.

2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya produk unggulan untuk mengembangkan peran dunia usaha dan investasi
3. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk.
5. Pameran yang wajib diikuti, seperti Inacraft, TEI dan Pekan Raya Jakarta pameran-pameran lainnya
6. Penataan toko modern
7. Peningkatan informasi perdagangan
8. Peningkatan pelayanan kemetrologian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal
9. Penataaan Pasar Daerah dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
10. Pemberdayaan Pedagang dangan penataan PKL didalam pasar.
11. Managemen pengelolaan pasar bagi para Kepala Pasar.

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
b. Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Program Kegiatan yang dilaksanakan mengalami perubahan sesuai Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020 dan Perubahan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era Globalisasi dan Transparansi Dinas Perdagangan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2024 - 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD), agar di dalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Perdagangan bertumpu pada keseirnbangan antara pembangunan perdagangan Dalam Negeri, dimana pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kesetabialan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Prioritas Nasional Perdagangan Dalam Negeri adalah :

1. Meningkatkan integritas perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kesetabilan harga dapat terjaga.
2. Meningkatkan iklim usaha perdagangan, melalui persaingan usaha yang sehat dan pengamanan perdagangan, untuk mendorong pengembangan usaha kecil menengah.
3. Mendorong terciptanya pengelolaan transparansi harga dan efisiensi distribusi melalui peningkatan efektivitas perdagangan berjangka, sistem resi gudang dan pasar lelang.
4. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan tensi pasar domestik melalui pemanfaatan daya kreasi bangsa.
5. Memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang mendorong terwujudnya persaingan usaha yang sehat, efektivitas perlindungan konsumen.

Prioritas Perdagangan Luar Negeri diuraikan sebagai berik:ut :

1. Peningkatan Nilai tambah yang tinggi dan peningkatan kwalitas agar lebih kompetitif di pasar Internasional
2. Pengoptimalan upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yang

mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026. Tujuan pembuatan renja Tahun 2024 lebih yaitu untuk **“Meningkatkan Produktivitas perdagangan”**.

3.2.2 Sasaran

Di dalam mewujudkan tujuan dari Dinas Perdagangan, Dinas Perdagangan mempunyai sasaran yaitu **: Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan.**

3.2.3 Strategi

Strategi yang di tempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan pasar
2. Meningkatkan managemen pengelolaan pasar

3.2.4 Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian rencana dan program untuk memperjelas strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan pencapaian sasaran pada misi Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Merevitalisasi Pasar Rakyat
2. Memberikan Keamanan dan kenyamanan baik pedagang maupun pembeli sehingga dapat meningkatkan kepuasan bagi pengunjung pasar

3.3. Program dan Kegiatan

Program Dinas Perdagangan pada Tahun Anggaran 2024 ada 6 Program dan 22 kegiatan

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.**
   a. Kegiatan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Kegiatan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   e. Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah

f. Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
h. Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
i. Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

a. Kegiatan pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
b. Kegiatan pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

3. PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

a. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan merupakan pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 dan ada beberapa

a. catatan penting yang diperhatikan oleh Perangkat Daerah Dinas Perdagangan sebagai berikut :
    1. Revitalisasi Pasar terkait dengan dampak kebakaran yang sudah terjadi pada tahun 2023, dan baru tahun ini bisa terlaksana, dikarenakan baru tersedia anggarannya.
    2. Pemantauan harga dilakukan secara berkala guna untuk mendapatkan informasi terkait dengan harga bahan pokok yang beredar dimasayarakat, hal ini berdampak pada peningkatan dan penurunan Inflasi di Kabupaten Bangkalan.
    3. Pelayanan tera khusus untuk kemetrologian harus dilakukan secara berkala agar memberikan keadilan bagi konsumen terkait.

c. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
    1. Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan, berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
    2. RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan, dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi pelayanan umum, dalam Anggaran Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.

b. Rencana Tindak Lanjut.

    Dinas Perdagangan akan segera menindaklanjuti isu-isu strategis yang sedang menjadi perhatian public terkait dengan kinerja DInas Perdagangan.
    1. terkait dengan Pembangunan/Revitalisasi pasar kamal terdampak dari kebakaran yang terjadi pada tahun 2023, sudah kami laksanakan.
    2. Dinas Perdagangan akan melakukan Pamantauan harga secara berkala setiap harinya.
    3. Dinas Perdagangan akan melaksanakan pelayanan tera sesuai dengan perundang-undangan yag berlaku. Guna untuk keadalilan konsumen.

Akhirnya, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya lapora Renja ini.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : Agustus 2024

Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN

ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19700205 200312 1 004

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020										
3	**Urusan :**									
	Urusan Pemerintahan Pilihan									
3.30	**Bidang Urusan :**									
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan**	100 %	100 %	100	99	0,99 %	100 %	100 %	100 %
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	1,00	100 %	100 %	100 %
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	2 Dok	2 Dok	1,00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	133 %
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100 %
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100 %
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2 Dok	2 Dok	1,00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	133
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	1,00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kineraja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	1,00 laporan	8 laporan	8 laporan	100 %
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	100 %	99 %	100 %	100 %	1,00 %	100 %	100 %	100 %
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	313 orang/bulan	12 orang/bulan	12 bulan	12 bulan	1,00 Bulan	313 orang/bulan	112 orang/bulan	36 %
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1,00 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	24 laporan	24 laporan			#DIV/0! laporan	24 laporan	24 laporan	100 %
3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	100 %	100 %	100 %	100 %	1,00	100 %	100 %	100 %
3.30.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1 laporan	1 laporan			#DIV/0!	1 laporan	1 laporan	100 %
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1,00	4 laporan	3 laporan	75 %
3.30.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah sarana prasarana pengelolaan retribusi pasar yang dilaksanakan	1 paket	34 paket	100 %	100 %	1,00 %	1 paket	45 paket	4500 %
3.30.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	2 laporan	2 laporan	2 dokumen	2 dokumen	1,00 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %
3.30.01.2.05	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	Persetase peserta yang mengikuti relisasi perundangundangan		100	0	0	0,00 %	100 %	67	0

3.30.01.2.05.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan		595			0,00 orang	595 orang	595	0
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	98 %	100 %	99,44 %	0,99 %	100 %	99 %	99 %
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantorn	1 unit	9 unit	4 paket	4 paket	1,00 Unit	1 unit	5 unit	478 %
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit	2 unit	1 paket	1 paket	1,00 Unit	1 unit	1 unit	122 %
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 unit	15 unit	1 paket	1 paket	1,00 Unit	1 unit	6 unit	567 %
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 jenis	2 jenis	1 paket	1 paket	1,00 jenis	2 jenis	2 jenis	83 %
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	2 jenis	1 paket	1 paket	1,00 jenis	2 jenis	2 jenis	83 %
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	3 dok	3 dok	1,00 jenis	1 jenis	2 jenis	167 %
3.30.01.2.06.09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	4 kali	15 laporan	6 laporan	0,40 Jenis	5 kali	5 kali	33 %
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**"Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana"**		100 %			#DIV/0! %	100 %	100 %	#DIV/0! %
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		1 jenis			#DIV/0! unit	1 unit	1 jenis	#DIV/0! %
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	100 %	100 %	100 %	1,00 %	100 %	100 %	100 %
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	2 laporan	2 laporan	1,00 jenis	3 jenis	3 jenis	85 %
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 jenis	6 jenis	9 laporan	9 laporan	1,00 jenis	6 jenis	7 jenis	117 %
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	100 %	100 %	100 %	100 %	1,00 %	100 %	100 %	100 %
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 unit	12 unit	29 unit	29 unit	1,00 unit	12 unit	18 unit	147 %
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	35 unit	27 unit	10 unit	10 unit	1,00 unit	35 unit	24 unit	69 %
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/RehabilitaGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit			0,00 unit	1 unit	1 unit	83 %
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit				1 unit	1 unit	75 %
3.30.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	35 unit	28 unit				35 unit	31 unit	89 %
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase terpenuhinya Pelayanan pasar	82 %	58	6,9 %	6,9 %	1,00 %	82	49	60 %
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase sarana dan prasarana pasar yng dibangun	2 lokasi	1 lokasi	10,34 %	10 %	0,97 %	2 lokasi	4 lokasi	217 %

3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah paar yang direvitalisasi	2 lokasi	2 lokasi	2 unit	2 unit	1,00 %	2 lokasi	2 lokasi	94 %
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana pemeliharaan passr yang dilaksanakan	1 paket	10 paket	29 unit	29 unit	1,00 %	1 paket	13 paket	1344 %
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah operasi penertiban dan pelaksanaan pemutakhiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan	2 paket	35 paket	100 %	100 %	1,00 %	2 paket	46 paket	2278 %
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah operasi penertiban dan pembinaan pedagang di pasar yang dilaksanakan	14 kali	43 kali	1 dok	1 dok	1,00 %	14 kali	19 kali	137 %
3.30.04	**PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	100 %	67 %	100 %	100 %	1,00 %	100 %	89 %	89 %
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penyuluhan dan pemberdayaan konsumen	75 orang	73 orang	100 %	100 %	1,00 %	60 orang	78 orang	104 %
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah penyuluhan dan pemberdayaan konsumen	75 orang	65 orang	1 Laporan	1 Laporan	1,00 %	60 orang	42 orang	56 %
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Jumlah data harga sembako di pasaran	9 lokasi	37 lokasi	100 %	100 %	1,00 %	6 lokasi	48 lokasi	531 %
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah data harga sembako di pasaran	9 paket	4 lokasi	1 laporan	1 laporan	1,00 Laporan	6 lokasi	4 lokasi	42 %
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	jumlah data harga barang penting di pasaran	9 lokasi	6 lokasi	1 laporan	1 laporan	1,00	9 lokasi	5 lokasi	60 %
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah data harga sembako di pasaran pada saat menjelang lebaran natal dan tahun baru	17 lokasi	8 lokasi	1 laporan	1 laporan	1,00	17 lokasi	9 lokasi	50 %
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Pengembangan ekspor yang dilaksanakan**	**100** %	50 %	100 %	100 %		**100** %	83 %	83 %
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pameran yang diikuti tingkat lokal maupun nasional**	**2** kali	0 kali	100 %	100 %		**0** kali	33 kali	1667 %
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan usaha	1 kali	0 kali	20 pelaku Usaha	20 pelaku Usaha		0 kali	7 kali	667 %
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pembinaan pelaku usaha ekspor yang dilaksanakan	1 kali	0 kali				0 kali	0 kali	0 %
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran yang diikuti tingkat lokal maupun nasional	2 kali	1 kali				2 kali	2 kali	75 %
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang diikuti	1 kali	0 kali				0 kali	0 kali	0 %
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang diadakan**	**100** %	**0** %				**0** %	0 %	0 %

3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah promosi Perdagangan Tingkat Regional dan Nasional Terfasilitasi**	**2** kali	**0** kali				**0** kali	0 kali	0 %
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah promosi Penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten yng diadakan	1 kali	0 kali				0 kali	0 kali	0 %
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan pelaku usahan pemasaran dan peningkatan pengunaan produk dalam negeri ditingkat kabupaten/ kota yang diadakan	1 kali	0 kali				0 kali	0 kali	0 %
3.30.07.2.01.03	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	jumlah sistem jaringan informasi perdagangan yang dilaksanakan	1 paket	0 paket				0 paket	0 paket	0 %
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen**	100 %	96 %	100 %	100 %	1,00 %	100 %	99 %	99 %
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan	2 dokumen	35 dokumen	100 %	100 %	1,00 %	2 dokumen	46 dokumen	2278 %
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah sarana prasarana pengelolaan kemetrologian yang dilalaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	250 unit	250 unit	1,00 %	1 dokumen	84 dokumen	8400 %
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan/ penyuluhan metrologi legal yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen			0,00 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
	Indikator Tujuan :												
	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan			5,38	5,50	6,10	6,60	7,20	7,03		6,60	7,20	
	Indikator sasaran :												
	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi			6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90		6,90	6,90	
	Nilai SKM terhadap layanan pasar			80	81	82	83	84	87,75		83	84	
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020													
	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan					**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
2	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD yang disusun					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	
3	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	
4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
5	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
6	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun					8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 Laporan	8 laporan	8 laporan	
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN					313 orang	313 orang	313 orang	313 orang	12 bulan	12 bulan	313 orang	
9	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun					1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
10	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun					24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	
	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun						1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
12	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
13	Jumlah sarana prasarana pengelolaan retribusi pasar yang dilaksanakan					1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	Jumlah sarana prasarana pengelolaan retribusi pasar yang dilaksanakan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun					2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
	Persetase peserta yang mengikuti relisasi perundangundangan									**100%**	**100%**	**100%**	
	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan									595 orang	595 orang	595 orang	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100%	100%	100%	98,99%	95,55%	100%	100%	
15	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantorn					1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	26 unit	1 unit	1 unit	
16	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	1 unit	1 unit	
17	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1 jenis	1 jenis	0	44 jenis	1 jenis	1 jenis	
18	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
19	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan					2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
20	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	
21	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5 kali	15 kali	15 kali	5 kali	2 kali	15 kali	15 kali	
	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana									100 %	100 %	100 %	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan									1 unit	1 unit	1 unit	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	100%	100%	99,91%	99,07%	100%	100%	
22	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	2 Jenis	3 jenis	3 jenis	
23	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana				x	**100%**	**100%**	**100%**	**81,90%**	**99,31%**	**100%**	**100%**	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
24	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan					12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	
25	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara						35 unit	35 unit	0	47 unit	35 unit	35 unit	
26	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						1 unit	1 unit	0	1 unit	1 unit	1 unit	
27	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1 unit			0				
28	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					35 unit			20 unit				
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana						**100%**	**100%**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	
29	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan						1 unit	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	
30	Jumlah Mebel yang diadakan						1 unit	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	
31	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan						5 unit	5 unit	-	-	5 unit	5 unit	
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana						100%	100%	-	-	100%	100%	
32	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						114 buah	150 buah	-	-	114 buah	150 buah	
33	Jumlah peserta yang mengikuti relisasi perundang-undangan								35 orang	0	595 orang	595 orang	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
34	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawa Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2 orang	2 orang	-	-	2 orang	2 orang	
	Jumlah paar yang direvitalisasi					**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**2,65%**	**100%**	**100%**	
36	Jumlah paar yang direvitalisasi					3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi		1 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	
38	Jumlah pasar yang diperbaiki					2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi		1 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	
39	Jumlah sarana kebersihan pasar yang dilaksankan					29 paket	29 paket	29 paket		29 paket	29 paket	29 paket	
42	**Jumlah operasi penertiban dan pelaksanaan pemutakhir an data pedagang di pasar yang dilaksanakan**					**2 paket**	**2 paket**	**2 paket**	**2 paket**	**100%**	**2 paket**	**2 paket**	
43	Jumlah operasi penertiban dan pembinaan pedagang di pasar yang dilaksanakan					14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	100%	14 kali	14 kali	
44	Jumlah pemutakhiran data pedagang pasar yang dilaksanakan					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	
	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting					**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	
	Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen					**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	
46	Jumlah penyuluhan dan pemberdayaan konsumen					60 orang	75 orang	75 orang	-	75 orang	75 orang	75 orang	
	jumlah data harga sembako di pasaran									**100%**	**100%**	**100%**	
49	jumlah data harga sembako di pasaran					6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	1 laporan	6 lokasi	6 lokasi	
	jumlah data harga barang penting di pasaran									10 lokasi			
54	Jumlah data harga sembako di pasaran pada saat menjelang lebaran natal dan tahun baru					9 lokasi	9 lokasi	9 lokasi	-	6 lokasi	9 lokasi	9 lokasi	
	Persentase Pengembangan ekspor yang dilaksanakan						**100%**	**100%**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
56	Jumlah pameran yang diikuti tingkat lokal maupun nasional						**1 kali**	**1 kali**	**-**	**-**	**1 kali**	**1 kali**	
57	Jumlah pembinaan dan pengembangan usaha						1 kali	1 kali	-	-	1 kali	1 kali	
58	Jumlah pembinaan pelaku usaha ekspor yang dilaksanakan						1 kali	1 kali	-	-	1 kali	1 kali	
59	Jumlah pameran yang diikuti tingkat lokal maupun nasional					2 kali	2 kali	2 kali	-	-	2 kali	2 kali	
60	Jumlah pameran dagang lokal yang diikuti						1 kali	1 kali	-	-	1 kali	1 kali	
61	**Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang diadakan**						**100%**	**100%**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	
62	**Jumlah promosi Perdagangan Tingkat Regional dan Nasional Terfasilitasi**						**2 kali**	**2 kali**	**-**	**-**	**2 kali**	**2 kali**	
63	Jumlah promosi Penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten yng diadakan						1 kali	1 kali	-	-	1 kali	1 kali	
64	Jumlah kegiatan pembinaan pelaku usahan pemasaran dan peningkatan pengunaan produk dalam negeri ditingkat kabupaten/ kota yang diadakan						1 kali	1 kali	-	-	1 kali	1 kali	
65	jumlah sistem jaringan informasi perdagangan yang dilaksanakan						1 paket	1 paket	-	-	1 paket	1 paket	
66	Persentase Pengembangan ekspor yang dilaksanakan					100	100	100	-	-	100	100	
67	Jumlah pameran yang diikuti tingkat lokal maupun nasional					2 kali	2 kali	2 kali	-	-	2 kali	2 kali	
68	Jumlah pameran yang diikuti tingkat lokal maupun nasional					2 kali	2 kali	2 kali	-	-	2 kali	2 kali	
69	**Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen**					**100%**	**100%**	**100%**	**89,20%**	**89,20%**	**100%**	**100%**	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
70	**Jumlah pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan**					**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	
71	Jumlah sarana prasarana pengelolaan kemetrologian yang dilalaksanakan					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
72	Jumlah pengawasan/ penyuluhan metrologi legal yang dilaksanakan					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025			2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan melalui peningkatan pelayanan pasar tradisional dan peningkatan ekspor-	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	1,03	1,04	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	55,17	58,62	
				Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indek Kepuasan Masyarakat	84	85	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61	62	

Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Renja 2024					Perubahan Renja 2024					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase ter penuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Perdagangan)**	**100 %**	**32.812.954.694,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase ter penuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Perdagangan)**	**100 %**	**32.834.454.253,00**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**6.250.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.000.000,00**	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1.250.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	500.000,00	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	-	
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	500.000,00	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	500.000,00	
g	Evaluasi Kineraja Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	1.000.000	Evaluasi Kineraja Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	500.000,00	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**20.128.692.690,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**20.912.461.003,00**	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	20.126.192.690	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	20.911.961.003	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	500.000,00	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 laporan	1.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	-	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**1.250.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**-**	
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	laporan	-	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
b	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1.250.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	-	
4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Presentase sarana prasarana pengelolaan retribusi pasar yang dilaksanakan**	**1 paket**	**156.153.750,00**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Presentase sarana prasarana pengelolaan retribusi pasar yang dilaksanakan**	**1 paket**	**166.153.750,00**	
a	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 laporan	156.153.750	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 laporan	166.153.750	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**84.156.300,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**62.214.500,00**	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 unit	1.014.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	unit	-	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 unit	15.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 unit	10.000.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 jenis	1.018.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jenis	-	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 jenis	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 jenis	9.150.000	
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	11.463.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 jenis	1.869.500	
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang Undangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 jenis	4.860.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang Undangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jenis	-	
g	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	30.000.000	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 kali	41.195.000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**100% %**	**12.289.851.954,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana**	**100% %**	**11.476.173.738,00**	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis	542.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 jenis	293.788.738	
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 jenis	11.747.451.954	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 jenis	11.182.385.000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**146.600.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**214.451.262,00**	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 unit	141.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	86.200.000	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	3.251.262	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasai Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasai Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	125.000.000,00	
8	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana**	**100 %**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana**	**100 %**	**-**	
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 unit	-	
b	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	-	
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	
9	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**0 %**	**-**	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 buah	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 buah	-	
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pegawa Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	-	
c	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisas Peraturan Perundang-Undangan	595 orang	-	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisas Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	-	
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase ter penuhinya Pelayanan pasar**	**100 %**	**965.248.800,00**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase ter penuhinya Pelayanan pasar**	**100 %**	**1.097.266.750,00**	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
3	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Kabupaten Bangkalan	**Presentase Sarana kebersihan dan pemeliharaan pasar yang dilaksanakan**	**100 %**	**955.248.800,00**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Kabupaten Bangkalan	**Presentase Sarana kebersihan dan pemeliharaan pasar yang dilaksanakan**	**100 %**	**1.087.266.750,00**	
a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit	200.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	300.000.000	
b	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29 unit	755.248.800	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29 unit	787.266.750	
4	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Kabupaten Bangkalan	**Presentase operasi penertiban & pelaksanaan pemutahiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan**	**100 %**	**10.000.000,00**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Kabupaten Bangkalan	**Presentase operasi penertiban & pelaksanaan pemutahiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan**	**100 %**	**10.000.000,00**	
a	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	10.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	10.000.000	
III	**PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**100 %**	**60.000.000,00**	**PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**100 %**	**20.800.000,00**	
1	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**100 %**	**50.000.000,00**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**100 %**	**18.800.000,00**	
a	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	10.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	12.800.000	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
b	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	10.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	2.000.000	
c	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	30.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	4.000.000	
2	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase penyuluhan dan pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan**	**100 %**	**10.000.000,00**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase penyuluhan dan pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan**	**100 %**	**2.000.000,00**	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	2.000.000	
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Pengembangan ekspor yang dilaksanakan**	**100 %**	**20.000.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase Pengembangan ekspor yang dilaksanakan**	**100 %**	**-**	
1	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bangkalan	**persentase penyelengaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produkunggulan yang terdapat pada 1 daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**20.000.000,00**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bangkalan	**Jumlah pameran yang diikuti tingkat lokal maupun nasional**	**2 kali**	**-**	
a	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina.	20 pelaku usaha	10.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina.	0 pelaku usaha	-	
b	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	0 pelaku usaha		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	0 pelaku usaha		

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
c	Pameran Dagang Nasional	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 pelaku usaha	10.000.000	Pameran Dagang Nasional	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 pelaku usaha	-	
d	Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0 pelaku usaha	-	Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1 pelaku usaha	-	
V	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan**	**100 %**	**10.000.000,00**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang diadakan**	**100 %**	**3.200.000,00**	
1	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Kabupaten Bangkalan	**persentase pelaksanaan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri**	**100 %**	**10.000.000,00**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Kabupaten Bangkalan	**persentase pelaksanaan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri**	**100 %**	**3.200.000,00**	
a	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.	0 UMKM		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.	0 UMKM		
b	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi.	0 UMKM	10.000.000,00	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi.	20 UMKM	3.200.000,00	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
VI	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen**	**100 %**	**51.537.996,00**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Kabupaten Bangkalan	**Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen**	**100 %**	**17.805.000,00**	
1	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Kabupaten Bangkalan**	**Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan**	**100 %**	**51.537.996,00**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Kabupaten Bangkalan**	**Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan**	**100 %**	**17.805.000,00**	
a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	250 unit	43.521.346	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	200 unit	17.805.000	
b	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	23 orang	8.016.650	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0 orang	-	
					33.919.741.490,00					33.973.526.003,00	

Keterangan :

D : Data Renja PD Tahun 2022 sesuai Renstra

Data Renja PD berdasarkan analisis Kebutuhan PD

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD). RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Ranhir Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan Akhir RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta Masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangan-undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang–undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 – 2024;
g. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Renstra K/L Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);
k. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 / E);
l. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 / E);
m. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 43 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.
n. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27 / E)

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan 2024 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Rencana Kerja 2024 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta evaluasi kinerja di Tahun 2023 dapat memicu pada rencana kerja Tahun yang akan datang.

2. Memberikan arah pembangunan di sektor Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) Tahun ke depan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2018 – 2023 dan RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) 2024 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/ Internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan Peluang serta Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan tidak terdapat usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Berisi Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 berdasarkan musrembang Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP,

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUAS RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan tahun 2023 sebesar Rp. 13.025.782.017,- dengan 7 program dan 18 kegiatan serta 42 Sub Kegiatan.

2.1.2 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan usulan sebesar Rp. 26.847.113.540,- terurai dalam 7 program dan 14 kegiatan serta 39 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal tidak sama dengan tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan masih menghadapi hambatan / kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi sehingga kemungkinan dalam melaksanakan visi dan misi menjadi kurang sempurna dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai teknis pelaksana sehingga kurang berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum terakomodir.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaiaan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020									
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Pencaker yang ditempatkan/ Bekerja**	**100 %**	**3,9 %**	**3,7 %**	**19,0 %**	100	3,70 %		
	- **Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**Persentase Pencaker yang bersertifikat (lulus)**	**100 %**	**0 Orang**	**16 Orang**	**16 Orang**	**100**	95 %		
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan berdasarkan unit kompetensi	112 Orang	0 Orang	16 Orang	16 Orang	100	128 Orang	144	1
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit					54 Unit	54	11
	Pembinaan lembaga latihan kerja swasta	**Persentase lebaga pelatihan kerja yang dibina**	**100 %**	**0 Orang**	**22 Orang**	**22 Orang**	**100**			
	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	48 Lembaga	0 Orang	22 Orang	22 Orang	100	0	22	0
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA	**Persentase penempatan tenaga kerja**	**100 %**	**3,9 %**	**3,7 %**	**64,0 %**	100			
	Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelayanan antar kerja**	**100 %**	**0 Orang**	**18 Orang**	**18 Orang**	100			
	Pelayanan antar kerja	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Rias	339 Orang	0 Orang	18 Orang	18 Orang	100	0	18	0
	Pengelolaan informasi pasar kerja	**Persentase Pelayanan antar kerja**	**46,70 %**	**0 Paket**	**8 %**	**16 %**	100			
	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Laporan informasi pasar kerja (IPK)	3 Paket	0 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0	1	0
	Job fair/Bursa kerja	Jumlah Peserta Job Fair	4000 Orang	0 Orang	15 Penyedia	15 Penyedia	100	60 Orang	75	0
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase calon pekerja migran Indonesia (PMI) / Pekerja migran Indonesia (PMI) yang dilindung / dilatih kompetensi**	**4315 Orang**	**0 Orang**	**30 Orang**	**30 Orang**	**100**	**95 %**		
	Peningkatan pelindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/Pekerja migran Indonesia (PMI)	Jumlah Peserta Pelatihan Hidroponik	4315 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	100	25 Orang	55	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020											
	Program Hubungan Industrial	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartit, Struktur sekala Upah dan terdapat peserta BPJS ketenagakerjaan**	**100 %**	**3,9 %**	**3,7 %**	**52,3 %**		51,39 %			
	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja	**Persentase perusahaan yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi**	**3,17 %**	**74,8 %**	**36,2 %**	**49,33 %**		100	%		
	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Pendampingan Peraturan	2 Paket	1 Unit	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3	Perusahaan	7	4
		Jumlah Peserta Pembinaan LKS Bipartit	290 Orang	55 Orang	40 Orang	40 Orang	100	55	Orang	150	1
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama	60 Orang	0	30 Orang	0 Orang	-	50	Orang	50	1
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	70 Orang	240 Orang	105 Orang	105 Orang	100	1	Laporan	346	5
		Jumlah Peserta Sosialisasi UMK						100	Orang		
		Peserta Tim Dewan Sidang Pleno Pembahasan dan Penetapan UMK						13	Orang		
		Posko Pengaduan THR	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	-	1	Dokumen	4	0
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	**Persentase jumlah perusahaan yang berselisih dan perusahaan**		**50,0 %**	**8,6 %**	**3**		100	%		
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisiahan yang dicegah	3 Paket	0 Paket	0 Paket,	0 Paket,	-	2	Perkara	2	1
		Jumlah Peserta Peringatan Hari Buruh Dunia	9 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	57	Orang	57	6
		Jumlah Peserta Sosialisasi	200 Orang	50 Orang	25 Orang	25 Orang	100	0	Orang	75	0
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisiahan yang terselesaikan	4 Kasus	0 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	75	6	Perkara	9	2
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta non afiliasi	Verifikasi Serikat Pekerja	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2	Dokumen	3	3

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	10 Orang	0 Orang	10 Orang	10 Orang	100	4	Lembaga	14	1
		Jumlah peserta pembinaan LKS Bipartit	1 Kali					32	Dokumen	32	32
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Peserta Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKP) dan fasilitas Kesejahteraan	20 Orang	0 Orang	20 Orang	20 Orang	100	55	Orang	75	4
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 Orang					55	Perusahaan	55	-
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100 %**			**31,78**		100	%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3,00 %**		**100 %**	**3,80**	**100**	**100**	**%**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	4	Dokumen	6	2
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100	1	Dokumen	2	2
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100	1	Dokumen	2	2
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100	1	Dokumen	2	2
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100	1	Dokumen	2	2
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100	1	Dokumen	2	2
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12	Dokumen	24	2
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**80,00 %**		**100 %**	**26,67**	**100**				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	36 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	53	Orang / Bulan	65	2
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2	Dokumen	4	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun mingguan / bulanan / triwulan / semesteran	198 Laporan		66 Laporan	66 Laporan	100	4	Laporan	70	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi barang milik daerah pada prangkat daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**47 Dokumen**		**16 Dokumen**	**8,00**	**100**	**100**	**%**		
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	5 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2	Dokumen	4	1
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan milik daerah yang tersusun	42 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	100	18	Laporan	32	1
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**330 Orang**		**15 Lokasi**	**15,00**	**100**				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai	330 Orang		15 Lokasi	15 Lokasi	100			15	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**73,83 %**			**147**	100				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31 Unit		6 Unit	6 Unit	100	4	Paket	10	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	98 Unit		21 Jenis	21 Jenis	100	6	Paket	27	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	55 Unit		6 Jenis	6 Jenis	100	11	Paket	17	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	11 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	100	12	Paket	13	1
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	8 Unit		3 Unit	3 Unit	100	12	Dokumen	15	2
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	240 Kali		110 kali	110 kali	100	60	Laporan	170	1
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Disperinaker)**			**1 paket**	**10**					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah prasarana aparatur yang diadakan	1 Paket		1 paket	1 paket	100	6	Unit	7	7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 Jenis**		**9 Jenis**	**9**	100				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	15 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	100	3	Laporan	6	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	21 Jenis		6 Jenis	6 Jenis	100	7	Laporan	13	1

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**50 Unit**		**13 Unit**	**13**	100			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang disediakan	38 Unit		9 Unit	9 Unit	100	9 Unit	18	0
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	12 Unit		4 Unit	4 Unit	100	Unit	4	0
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020										
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	**Persentase IKM yang mandiri**	**100 %**	**20 %**	**20 %**	**35,25**	**100**	**20 %**		
	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	**Persentase IKM yang dibina**	**112,5 %**	**30,5 %**	**67,0 %**	**35,25**	100	%		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Bimtek Produk IKM	180 Orang	60 Orang	120 Orang	120 Orang	100		180	1
		Jumlah Fasilitasi Promosi, Rakor dan Kegiatan Dekranasda	12 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	100		1	0
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Kegiatan					25 Dokumen	25	2
	- Koordinas, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta Masyararkat	Jumlah Pembinaan / Pelatihan bagi Sentra IKM	30 Kegiatan	0 Kegiatan	10 Kegiatan	9 Kegiatan	100		9	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Sentra IKM	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100		2	1
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30 Kegiatan					9 Dokumen	9	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Pengendali Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	**Persentase Izin Usaha Industri**	**100 %**	**0 %**	**20 %**	**50,0**	**100**			
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri	20 IKM	0 IKM	10 IKM	**0,00**	100			
	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah Rekom IUI	20 IKM	0 IKM	10 IKM	-	100		-	-
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**Persentase izin usaha industri**	2 Dokumen	**0 %**	**20 %**	**100,0**	**100**	**20 %**		
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pencaker yang ditempatkan/ Bekerja	2 Dokumen	0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	16 %		
	- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	2	1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
d. Pengelolaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bupati Bangkalan No. 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi ;
    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Industri Argo, membawahi;
    Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Industri Non Agro, membawahi :
    Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja (PKPTK);
    Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mernbawahi :
   Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
g. UPT.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan didukung oleh 103 orang Pegawai, terdiri dari 55 orang Pegawai Negeri Sipil, 37 orang Pegawai THL. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari 12 orang berpendidikan Magister (S2), 25 orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 orang Diploma D3, 16 orang SLTA, 1 orang SMP. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II sebanyak 1 orang PNS, Eselon III sebanyak 5 orang PNS, dan Eselon IV sebanyak 15 orang PNS dan Staf sebanyak 45 orang PNS.

Pembangunan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja telah membawa perubahan yang positif namun masih kurang memadai sebagai tolok ukur manusia di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pada sisi input dapat ditemukan beberapa persoalan. Pertama, persoalan SDM bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja, pendidikan masih kurang bila dibandingkan terhadap jumlah seluruh pegawai / tenaga harian lepas pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan. Kedua ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya yaitu kecilnya anggaran biaya untuk urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bangkalan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan atau program Perindustrian dan Tenaga Kerja secara keseluruhan, sehingga masih membutuhkan bantuan anggaran dari pusat dan propinsi demi mencapai target SPM.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DISPERINAKER
Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

NIHIL

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

   Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.

2. Fasilitas perkantoran untuk Aparatur masih kurang, sejatinya setiap pegawai memiliki sebuah computer untuk memudahkan pekerjaan mereka. Setiap Pejabat Struktural seharusnya memiliki sebuah laptop agar memudahkan mereka dalam mempersiapkan tugas yang diberikan atasan sehingga tidak ada antrian dalam penyelesaian tugasnya.

3. Sarana prasarana yang masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam setiap penyusunan RENJA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengkomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini di sesuaikan dengan target yang akan dicapai atau di rencanakan sesuai dengan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan periode 2018 – 2023.

Program dan kegiatan yang ada sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD, namun karena adanya keterbatasan Anggaran APBD Kabupaten Bangkalan, kami harus melakukan penyesuain Program dan Kegiatan dengan menganalisis sesuai kebutuhan selanjutnya Program dan Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Bangkalan

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2023					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**Persentase pencaker yang di tempatkan / Bekerja**	**3.7%**	**85,000,000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**Persentase pencaker yang di tempatkan / Bekerja**	**75.00%**	**743,988,000**	
i	***Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi***		***Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi***	***22.67***	***80,000,000***	***Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi***		***Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi***	***53%***	***743,988,000***	
1	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kab. Bangkalan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 orang	75,000,000	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kab. Bangkalan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 orang	693,988,000	
2	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kab Bangkalan	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	-	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kab Bangkalan	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	-	
3	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kab / Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 unit	5,000,000	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kab / Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 unit	50,000,000	
ii	***Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta***		***Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta***		***5,000,000***	***Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta***		***Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta***	***48 Lembaga***	-	
4	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Kab Bangkalan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	5,000,000	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Kab. Bangkalan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	48 Lembaga	-	
II	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**Persentase penempatan tenaga kerja**	**3.70%**	**91,000,000**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**Persentase penempatan tenaga kerja**	**45.16%**	**42,621,250**	
iii	***Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten / kota***		***Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten / kota***		***25,000,000***	***Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten / kota***		***Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten / kota***	***100%***	***4,621,250***	
5	Pelayanan antar kerja	Kab. Bangkalan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20 orang	25,000,000	Pelayanan antar kerja	Kab. Bangkalan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	32 orang	4,621,250	
IV	***Pengelolaan informasi pasar kerja***		***Pengelolaan informasi pasar kerja***	***7.33%***	***51,000,000***	***Pengelolaan informasi pasar kerja***		***Pengelolaan informasi pasar kerja***	***90.30%***	***26,000,000***	
6	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Kab Bangkalan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja ***Online***	dokumen	-	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Kab. Bangkalan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja ***Online***	dokumen	-	
7	Pelayanan dan penyediaan pasar kerja online	Kab. Bangkalan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem ***Online*** (Karir Hub)	1 dokumen	1,000,000	Pelayanan dan penyediaan pasar kerja online	Kab. Bangkalan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem ***Online*** (Karir Hub)	500 Orang	1,000,000	
8	Job fair/ Bursa kerja	Kab. Bangkalan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui ***Job Fair*** / Bursa Kerja	20 Orang	50,000,000	Job fair/ Bursa kerja	Kab. Bangkalan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui ***Job Fair*** / Bursa Kerja	400 Orang	25,000,000	Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati
V	***Pelindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota***		***Pelindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota***	***30 orang***	***15,000,000***	***Pelindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota***		***Pelindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota***	***15 orang***	***12,000,000***	
9	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (CPMI) / Pekerja migran indonesia (PMI)	Kab. Bangkalan	Jumlah CPMI/PMI yang Diindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 orang	15,000,000	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (CPMI) / Pekerja migran indonesia (PMI)	Kab. Bangkalan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	15 orang	12,000,000	
III	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartit, Struktur sekala Upah dan terdapat peserta BPJS ketenagakerjaan**	**51.39%**	**360,000,000**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartit, Struktur sekala Upah dan terdapat peserta BPJS ketenagakerjaan**	**75.17%**	**3,836,847,000**	
VI	***Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***		***Persentase perusahaan yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi***	***63.00***	***93,000,000***	***Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***		***Persentase perusahaan yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi***	***66%***	***35,000,000***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2023					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
10	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab Bangkalan	Jumlah Perusahaanyang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	30,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab Bangkalan	Jumlah Perusahaanyang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	4 Perusahaan	5,000,000	
11	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Bangkalan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30 Orang	13,000,000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Bangkalan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4 Perusahaan	-	
12	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bangkalan	Jumlah Data dan Informasi sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	50,000,000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bangkalan	Jumlah Data dan Informasi sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	30,000,000	
VII	***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***		***Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***	***34.00***	***267,000,000***	***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***		***Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***	***85%***	***3,801,847,000***	
13	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah Perselisiahan yang Dicegah	7 Perkara	40,000,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah Perselisiahan yang Dicegah	4 Perkara	-	
14	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah Perkara Perselisiahan yang terselesaikan	7 Dokumen	7,000,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah Perkara Perselisiahan yang terselesaikan	4 Perkara	5,000,000	
15	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bangkalan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Sertivikan Perkerja yang Diverivikasi	2 Dokumen	10,000,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bangkalan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Sertivikan Perkerja yang Diverivikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	
16	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	2 Dokumen	10,000,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	4 Lembaga	-	
17	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bangkalan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	200,000,000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bangkalan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	18000 Orang	3,796,847,000	
IV	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**20%**	**6,433,832,316**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100 Indek**	**7,019,950,574**	
VIII	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan***	***95%***	***20,000,000***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan***	***100%***	***3,000,000***	
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	3,100,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	-	
19	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2,720,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
20	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2,365,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
21	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2,720,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
22	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	2,365,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2023					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dok	3,730,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	-	
IX	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi***	***95%***	***4,704,503,316***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi***	***100%***	***4,937,237,384***	
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4,699,503,316	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang / Bulan	4,935,237,384	
26	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verfikasi Keuangan SKPD		-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	
27	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1,000,000	
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	66 Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	66 Laporan	1,000,000	
X	***Administrasi barang milik daerah pada parangkat daerah***		***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun***	***95%***	***5,000,000***	***Administrasi barang milik daerah pada parangkat daerah***		***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun***	***100%***	***2,000,000***	
30	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	2,000,000	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1,000,000	
31	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	
32	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		-	
33	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		-	
34	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Dok	3,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,000,000	
35	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	
36	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		-	
XI	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***	***95%***	***-***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***	***100%***	***-***	
37	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	
38	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Orang	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	-	
39	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	
40	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	
41	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	
42	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangkalan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangkalan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	-	
43	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Lokasi	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	700 Orang	-	
44	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	
XII	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***95%***	***103,614,000***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***55,803,190***	
45	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Unit	4,432,350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,529,020	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2023					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Unit	19,688,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14,772,750	
47	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	
48	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Unit	19,931,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,280,000	
49	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	4 Jenis	3,669,750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	8 Paket	1,601,420	
50	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Unit	1,620,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	1,620,000	
51	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		-	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		-	
52	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	
53	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Kali	54,272,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	30,000,000	
54	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	
56	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	
XIII	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana***	***95%***	***5,419,000***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana***	***100%***	***-***	
57	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
58	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
59	Pengadaan Alat Besar	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			Pengadaan Alat Besar	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			
60	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan			
61	Pengadaan Mebel	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Mebel	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
62	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
63	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			
64	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			
65	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
66	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	5,419,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	
67	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
XIV	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kab. Bangkalan***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***95%***	***1,515,526,000***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kab. Bangkalan***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***1,994,260,000***	
68	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	
69	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Jenis	250,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	718,000,000	
70	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
71	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Jenis	1,265,526,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	1,276,260,000	
XV	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***	***95%***	***79,770,000***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***	***100%***	***27,650,000***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2023					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	67,060,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	23,400,000	
73	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangkalan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangkalan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	
74	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Bangkalan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	12 Kendaraan	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Bangkalan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		-	
75	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Bangkalan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Bangkalan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		-	
76	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bangkalan	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bangkalan	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	
77	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	
78	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		-	
79	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bangkalan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bangkalan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		-	
80	Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelhara / Direhabilitasi	4 Unit	12,710,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12 Unit	4,250,000	
81	Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	
82	Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	
83	Pemeliharaan/Rehabiltasi Tanah	Kab. Bangkalan	Luas Tanah yang Dilakukan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Bangkalan	Luas Tanah yang Dilakukan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi		-	
V	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase IKM yang mandiri**	**20%**	**19,812,335,000**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase IKM yang mandiri**	**75.73%**	**6,976,503,500**	
XVI	***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota***		***Persentase IKM yang dibina***	***41.13%***	***19,812,335,000***	***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota***		***Persentase IKM yang dibina***	***75.73%***	***6,976,503,500***	
84	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	680,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	50,000,000	
85	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Kegiatan 1 Paket	19,132,335,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13 Dokumen	6,926,503,500	
VI	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA**		**Persentase izin usaha industri**	**20%**	**55,000,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA**		**Persentase izin usaha industri**	**100%**	**7,500,000**	
XVII	***Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenagan Kabupaten / Kota***		***Persentase penerbitan izin usaha industri***	***1 Dokumen***	***55,000,000***	***Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenagan Kabupaten / Kota***		***Persentase penerbitan izin usaha industri***	***100%***	***7,500,000***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2023					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verfikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	10 IKM	55,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	-	
87	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	55,000,000	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7,500,000	
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase data IKM berlegalitas**	**20%**	**10,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase data IKM berlegalitas**	**20%**	-	
XVIII	***Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota***		***Persentase informasi industri***	***1 Dokumen***	***10,000,000***	***Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota***		***Persentase informasi industri***	***32%***	-	
88	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10,000,000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	-	
	TOTAL				**26,847,167,316**	**TOTAL**				**18,627,410,324**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan tidak ada telaahan terhadap kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD 2018 – 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan misi ke 3 adalah Meningkatkan tata kelola potensi ekonomi Sosial dan Budaya untuk meningkatkan daya saing produk dan selanjutnya di tuangkan dalam program Pembangunan yaitu ‘ Program Pelatihan kerja dan Penempatan tenaga kerja .

Indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan oleh karena itu dalam upaya pencapaian target kinerja ditetapkan tujuan dan sasaran Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja
2. Meningkatkan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja
3. Meningkatkan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah :

a. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja
b. Peningkatan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja
c. Peningkatan pembinaan HI
d. Terciptanya peningkatan kwalitas dan perlindungan bagi tenaga kerja
e. Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja pada sektor ekonomi berbasis lokal
f. Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan
g. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan BLK

Misi Mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif dan efisien serta berorientasi pada layanan Publik

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah:

- Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif sebagai bentuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

TUJUAN				SASARAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KET
		Renstra 2024	Perubahan Renja Th 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja Th 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) Menurunnya Pengangguran	**(1) Persentase Penurunan Jumlah Pengangguran**	**3,98%**	**4,48%**	*Meningkatnya Keterampilan /Kompetensi Tenaga Kerja*	*Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan*	75%	75%	-
(4) Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	**(1) Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kategori Industri Pengolahan**	**1,65%**	**1,8%**	*Meningkatnya Jumlah IKM yang dibina*	*Pertumbahan Jumlah Industri Kecil dan menengah*	20%	20%	-

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di sektor Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

Tabel 3.2

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di sektor Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas. Rencana Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Urusan yang dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Urusan Perindustrian

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

C. Urusan Tenaga Kerja

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
   a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
      - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
      - Sub Kegaiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
   a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
      - Sub Kegiatan Job Fair / Bursa Kerja
   b. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota
      - Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)
4. Program Hubungan Industrial
   a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
      - Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
      - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
   b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat DaerahTahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pencaker yang ditempatkan/ Bekerja**		**75.00%**	**743,988,000**			**56.67%**	**85,000,000**
2	***07***	***03***	***2.01***		***Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi***	***Persentase Pencaker yang bersertifikat (lulus)***		***75%***	***743,988,000***			***80%***	***80,000,000***
2	07	03	2.01	01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Bangkalan	16 Orang	693,988,000	DAUM		16 Orang	75,000,000
2	07	03	2.01	03	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kab / Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Bangkalan	2 Unit	50,000,000			2 Unit	5,000,000
2	***07***	***03***	***2.02***		***Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta***	***Persentase lebaga pelatihan kerja yang dibina***						***48 Lembaga***	***5,000,000***
2	07	03	2.02	01	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Bangkalan					48 Lembaga	5,000,000
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase penempatan tenaga kerja**		**45.16%**	**42,621,250**				**91,000,000**
2	***07***	***04***	***2.01***		***Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten / kota***	***Persentase Pelayanan antar kerja***		***100%***	***4,621,250***				***25,000,000***
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Bangkalan	32 Orang	4,621,250			339 Orang	25,000,000
2	***07***	***04***	***2.03***		***Pengelolaan informasi pasar kerja***	***Persentase Pengelolaan informasi pasar kerja***		***90.30%***	***26,000,000***			***100%***	***51,000,000***
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan penyediaan pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem ***Online*** (Karir Hub)	Kab. Bangkalan	500 Orang	1,000,000			500 Orang	1,000,000
2	07	04	2.03	03	Job fair/ Bursa kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui ***Job Fair*** / Bursa Kerja	Kab. Bangkalan	400 Orang	25,000,000	DAUM		400 Orang	50,000,000
2	***07***	***04***	***2.03***	***02***	***Pelindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota***	***Persentase calon pekerja migran Indonesia (PMI)/Pekerja migran Indonesia (PMI) yang dilindung / dilatih kompetensi***			***12,000,000***			***100%***	***15,000,000***
2	07	04	2.04	01	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kab. Bangkalan	15 Orang	12,000,000			15 Orang	15,000,000
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartit, Struktur sekala Upah dan terdapat peserta BPJS ketenagakerjaan**		**75.17%**	**3,836,847,000**			**53.30%**	**360,000,000**
2	***07***	***05***	***2.01***		***Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase perusahaan yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi***		***66%***	***35,000,000***			***66%***	***93,000,000***

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Bangkalan	4 Perusahaan	5,000,000	DAUM		4 Perusahaan	30,000,000
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Bangkalan					4 Perusahaan	13,000,000
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bangkalan	10 Laporan	30,000,000	DAUM		10 Laporan	50,000,000
2	***07***	***05***	***2.02***		***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Kondisi hubungan Industrial yang Kondusif***		***53%***	***3,801,847,000***			***53,00***	***267,000,000***
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisiahan yang Dicegah	Kab. Bangkalan					4 Perkara	40,000,000
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisiahan yang terselesaikan	Kab. Bangkalan	4 Perkara	5,000,000	DAUM		4 Perkara	7,000,000
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Sertivikan Perkerja yang Diverivikasi	Kab. Bangkalan					4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10,000,000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina						4 Lembaga	10,000,000
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bangkalan	18000 Orang	3,796,847,000	DAUM		18000 Orang	200,000,000
3	***31***	***01***			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**		**100**	**7,019,950,574**			**20%**	**6,519,412,999**
3	***31***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***100%***	***3,000,000***			***100%***	***20,000,000***
3	***31***	***01***	**2.01**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan					3 Dokumen	3,100,000
3	***31***	***01***	**2.01**	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan					1 dokumen	2,720,000
3	***31***	***01***	**2.01**	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan					1 dokumen	2,365,000
3	***31***	***01***	**2.01**	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan					1 dokumen	2,720,000
3	***31***	***01***	**2.01**	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan					1 dokumen	2,365,000

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	5 Laporan	3,000,000	DAUM		5 Laporan	3,000,000
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan					10 Laporan	3,730,000
3	31	01	2.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi***		***100%***	***4,937,237,384***			***100%***	***4,795,503,316***
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	52 Orang / Bulan	4,935,237,384	DAUM		55 Orang / Bulan	4,790,503,316
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	6 Laporan	1,000,000	DAUM		6 Laporan	3,000,000
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	66 Laporan	1,000,000	DAUM		66 Laporan	2,000,000
3	31	01	2.03		***Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun***		***100%***	***2,000,000***			***100%***	***5,000,000***
					Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan	2 Dokumen	1,000,000	DAUM		2 Dokumen	2,000,000
2	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	12 Laporan	1,000,000	DAUM		12 Laporan	3,000,000
3	31	01	2.05		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***		***100%***	***-***			***100%***	***-***
3	31	01	2.06		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***100%***	***55,803,190***			***100%***	***103,613,329***
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	4 Paket	2,529,020	DAUM		4 Paket	4,432,350
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	5 Paket	14,772,750	DAUM		5 Paket	19,688,900
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	5 Paket	5,280,000	DAUM		5 Paket	19,931,000
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Kab. Bangkalan	8 Paket	1,601,420	DAUM		8 Paket	3,669,079
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	8 Dokumen	1,620,000	DAUM		8 Dokumen	1,620,000
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	120 Laporan	30,000,000	DAUM		120 Laporan	54,272,000
3	31	01	2.07		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana***		***100%***	***-***			***100%***	***-***
3	31	01	2.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***100%***	***1,994,260,000***			***100%***	***1,515,526,354***

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan	15 Laporan	718,000,000	DAUM		15 Laporan	250,000,000
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	21 Laporan	1,276,260,000	DAUM		21 Laporan	1,265,526,354
3	***31***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***		***100%***	***27,650,000***			***100%***	***79,770,000***
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan	12 Unit	23,400,000	DAUM		12 Unit	67,060,000
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bangkalan	12 Unit	4,250,000	DAUM		12 Unit	12,710,000
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase IKM yang mandiri**		**75.73%**	**6,976,503,500**			**100%**	**19,982,915,992**
3	***31***	***02***	***2.01***		***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***	***Persentase IKM yang dibina***		***75.73%***	**6,976,503,500**			***75.73%***	**19,982,915,992**
3	31	02	2.01	03	Koordinasi Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Bangkalan	4 Dokumen	50,000,000	DAUM		4 Dokumen	225,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Bangkalan	13 Dokumen	6,926,503,500	DAK/DAUM		13 Dokumen	19,757,915,992
3	**31**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA**	**Persentase izin usaha industri**		**100%**	**7,500,000**			**100%**	**-**
3	***31***	***03***	***2.01***		***Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota***	***Persentase penerbitan izin usaha industri***		***100%***	**7,500,000**			***100%***	**-**
3	31	04	2.01	03	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1 dokumen	7,500,000			60 Orang, 2 Dokumen	-
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase data IKM berlegalitas**		**32%**	**-**			**32%**	**55,000,000**
3	***31***	***04***	***2.01***		***Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota***	***Persentase informasi industri***						***85%***	**55,000,000**
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Bangkalan			DAUM		1 Dokumen	**55,000,000**
3													
TOTAL									**18,627,410,324**				**27,093,328,991**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance*.

Output Rencana Kerja adalah **Program Tahunan** Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja sehingga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 16 Januari 2023

Plt. **KEPALA**
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

QORRY YUNIASTUTI, ST., MM.
Pembina
NIP. 19750621 200112 2 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Kabupaten Bangkalan tahun 2024 merupakan dokumen pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang pemerintahan daerah. Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Kegiatan Perangkat Daerah, rencana kerja memuat beberapa prioritas pembangunan/ Kegiatan yang dituangkan dalam program/ kegiatan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unsur Unit yang ada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Inspektorat, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki peran penting untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pemerintahan

daerah serta mempunyai peran yang strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang komprehensif, terukur serta berkesinambungan, agar tercapai pengawasan yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah ini pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat didasarkan kepada Rencana Strategis 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, agar dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di tingkat Pemerintah Daerah, karena memuat kebijakan teknis Operasional;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan DPA, karena memuat arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dalam satu tahun;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Pemerintah Daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar Fungsi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mengoptimalkan partisipasi Seluruh Unit dalam Jajaran pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan dari pemikiran tersebut, Inspektorat Kabupaten Bangkalan, sebagai salah satu Perangkat Daerah, tentunya memiliki kewajiban yang sama sebagaimana diisyaratkan dalam peraturan perundangan. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Bangkalan bersama segenap komponen pelaksana pembangunan lainnya, melakukan langkah – langkah sistematis guna menyusun dokumen perencanaan tahunan berupa Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 yang merupakan penjelasan dari tujuan Inspektorat Kabupaten Bangkalan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar pelaksanaan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Kabupaten Bangkalan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);

15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18/E);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 adalah sebagai penyesuaian terhadap skema pembangunan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mempertajam skala prioritas pembangunan di Bidang Pengawasan yang dibiayai dari sumber dana APBD Kabupaten, tujuan konkritnya adalah :

1. Mengetahui hasil dan manfaat terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan ;

2. Agar seluruh Program /kegiatan dapat sejalan dengan target kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Khususnya dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat .

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Semester 1 Tahun berjalan dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD Sampai Semester 1 Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tujuan dan sasaran perubahan renja tahun 2024 dan matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa: catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Sampai Semester 1 Tahun berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan Program/Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran) tertanggal 08 Maret 2024. Program kegiatan secara keseluruhan sesuai dengan yang diuraikan dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran) tahun 2024 meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Ketiga program tersebut terdiri dari sebelas kegiatan dan 37 Sub kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 10.590.998.307,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp.5.667.130.981,00 atau 53,51%.

Pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diuraikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Pada Inspektorat Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
6	Urusan Pemerintahan Pengawasan															
6.01	**Pengawasan**															
		Tingkat kapabilitas APIP	Level 3		Level 3		Level 3		Level 2 (skor 2.9)		96.67	Level 3				
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi yang diselesaikan dari hasil pengawasan yang ditindaklanjuti**	**100**	**%**	92	%	**100**	**%**	91.06	%	91.1	**100**	**%**	97.40	%	97.40
6.01.02.1.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Laporan Pengawasan Internal**	**270**	**Laporan**	162	Laporan	**111**	**Laporan**	**111**	**Laporan**	100.0	88	**Laporan**	**17**	**Laporan**	6.3
6.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			94	LHP										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	**144**	Laporan			49	Laporan	**49**	Laporan	100.0	48	Laporan	**7**	Laporan	4.9

6.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			21	LHP										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	**33**	Laporan			10	Laporan	**10**	Laporan	100.0	11	Laporan	**0**	Laporan	0.0
6.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR Kinerja Pemerintah Daerah			4	LHP										
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	**6**	Laporan			2	Laporan	**2**	Laporan	100.0	2	Laporan	**2**	Laporan	33.3
6.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR Laporan Keuangan			18	LHP										
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	**30**	Laporan			10	Laporan	**10**	Laporan	100.0	10	Laporan	**4**	Laporan	13.3
6.01.02.1.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			15	LHP										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	**24**	Laporan			30	Laporan	**30**	Laporan	100.0	8	Laporan	**1**	Laporan	4.2
6.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal			6	Laporan										
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	**12**	Kesepkatan			4	Kesepakatan	**4**	Kesepakatan	100.0	4	Kesepakatan	**2**	Kesepakatan	16.7
6.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			14	Laporan										

		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	**21**	Dokumen			5	Dokumen	**5**	Dokumen	100.0	5	Dokumen	**1**	Dokumen	4.8
		Jumlah dokumen hasil inventarisasi			2	Dokumen	1	Dokumen	**1**	Dokumen	100.0					
6.01.02.1.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**162**	**Laporan**	154	Laporan	**80**	**Laporan**	**78**	**Laporan**	97.5	54	Laporan	**28**	**Laporan**	17.3
6.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah			4	Laporan										
		Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	12	Laporan			2	Laporan	**1**	Laporan	50.0	4	Laporan	0	Laporan	0.0
6.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			150	LHP										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	150	Laporan			78	Laporan	**77**	Laporan	98.7	50	Laporan	28	Laporan	18.7
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase PD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B**	**67.3**	**%**	**65.38**	**%**	**71.15**	**%**	**65.38**	**%**	91.9	63.46	%	0.00	**%**	0

6.01.03.1.01	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**6**	**Dokumen**	**4**	Laporan	**2**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	100.0	2	Dokumen	0	**Dokumen**	0
6.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			**2**	Dok										
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3	Rekomendasi			1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100.0	1	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0
6.01.03.1.01.02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			2											
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3	Rekomendasi			1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100.0	1	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0
6.01.03.1.02	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Laporan atas Pendampingan dan Asistensi**	**63**	**Laporan**	**25**	**Laporan**	**15**	**Laporan**	**13**	**Laporan**	86.7	24	Laporan	2	**Laporan**	3.17
6.01.03.1.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang didampingi			**52**	PD										
		Jumlah peserta workshop/sosialisasi penguatan kapasitas satgas SPIP-PD			**80**	Org				0%						
		Jumlah dokumen permintaan Pengawas Eksternal dan Internal			**4**	Berkas			0	0%	#DIV/0!					

		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52	PD			52	Perangkat Daerah	52	Perangkat Daerah	100.0	52	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0
6.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan			4	LHP										
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Perangkat Daerah			10	Perangkat Daerah	10	Perangkat Daerah	100.0	10	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0
6.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan			10	LHP										
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	Kegiatan			5	Kegiatan	3	Kegiatan	60.0	3	Kegiatan	1	Kegiatan	16.67
6.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan			4	LHP			0	0%	#DIV/0!					
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	Perangkat Daerah			5	Perangkat Daerah	5	Perangkat Daerah	100.0	5	perangkat daerah	0	Perangkat Daerah	0

6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**			**70.00**		74.38	**%**	78.65	**%**	105.7					
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	**%**								86	%	0.00	**%**	0
6.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	%	**100**	**%**	100	**%**	100.0	100	%	60.714286	**%**	60.71
6.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun			8	Dok										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok			4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	3	Dokumen	25
6.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran SKPD yang disusun			12	Dok										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok			1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	0	Dokumen	0
6.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	0	0	3	Dokumen	3	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	33.33

6.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	33.33
6.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dok	0	0	3	Dokumen	3	Dokumen	100	1	Dokumen	0	Dokumen	0
6.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun			2	Dok			0							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan			1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	33.33
6.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			16	Laporan										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan			8	Laporan	8	Laporan	100	8	Laporan	4	Laporan	16.67
6.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi**	**80**	**%**	**79.5**	**%**	**80**	**%**	78.9	**%**	98.6	80	%	40	**%**	50
6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN			148	orang/bulan										

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222	orang/bulan			71	Orang/bulan	70	Orang/bulan	98.6	71	Orang/bulan	71	Orang/bulan	31.98
6.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun			2	Dok										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan			1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	33.33
6.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun							0		#DIV/0!					
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					18	Laporan								
6.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**100**	%	**100**	**%**	100.0	**%**	100.0	**100**	**%**	75.00	**%**	75
6.01.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	33.33

6.01.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			28	Laporan										
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan			14	Laporan	14	Laporan	100.00	14	Laporan	7	Laporan	16.67
6.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**80**	**%**	**64.017 85714**	%	80	%	80.0	%	100.0	**80**	**%**	20.00	%	25
6.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			10	Orang										
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	Pegawai			0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	0	Pegawai	0	Pegawai	0
6.01.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			400	Orang										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450	orang			152	Orang	152	Orang	100	152	orang	76	Orang	16.89
6.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

		Jumlah Orang yang	684	orang			152	Orang	152	Orang	100	152	orang	0	Orang	0
6.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**70**	**%**	**68.132 35294**	%	70	%	73.3	%	104.8	**70**	**%**	13.07	%	18.67
6.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1	Jenis										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket			4	Paket	4	Paket	100	4	Paket	2	Paket	16.67
6.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2	Jenis										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket			4	Paket	4	Paket	100.0	4	Paket	2	Paket	16.67
6.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1	Jenis										
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket			4	Paket	4	Paket	100.0	4	Paket	2	Paket	16.67
6.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1	Jenis										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket			4	Paket	4	Paket	100.0		Paket	0	Paket	0

6.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3	Jenis										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket			4	Paket	4	Paket	100.0	4	Paket	2	Paket	16.67
6.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen			4	Dokumen	4	Dokumen	100		Paket	0	Paket	0
6.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu			40	Kali										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	90	Laporan			30	Laporan	35	Laporan	116.6666667	25	Laporan	15	Laporan	16.67
6.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			131	Kali										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330	kali			12	Laporan	12	Laporan	100	18	kali	14	Laporan	4.24
6.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**10**	**%**	**0**	0	10	%	0.0	%	0					

6.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit			0	Unit	0	Unit	#DIV/0!					
6.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan/Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit												
6.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85**	**%**	**78.35**	%	85	%	85.0	%	100.00	**85**	**%**	53.125	%	62.5
6.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2	Jenis										
		jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan			4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	2	Laporan	16.67
6.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4	Jenis										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	6	Laporan	16.67
6.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1	0										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan			1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	50

6.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6	Jenis										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100.00	12	Laporan	6	Laporan	16.67
6.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**70**	**%**	**38.281 25**	%	40	%	33.3	%	83.33	**40**	**%**	34.423077	%	59.87
6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan			18	Unit										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	unit			18	Unit	18	Unit	100	18	unit	18	Unit	100
6.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50	unit	71	0	26	Unit	26	Unit	100	26	unit	19	Unit	73.08
6.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi							0.0		#DIV/0!					

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Inspektorat sebagaimana tugas dan wewenangnya mengampu urusan pengawasan melalui program dan kegiatannya. Pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Pengawasan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akan mampu mendeteksi penyimpangan yang mungkin terjadi.

Indikator Kinerja Kunci urusan pengawasan yang ada pada Inspektorat Bangkalan diuraikan pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Indikator Kunci Sampai dengan Semester I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika ada Perubahan Target
		2020	2021	2022	2023			
1	Level maturitas sistem pengendalian internal Pemerintah	Level 2 (2.9625)	Level 2 (2.919)	Level 2 (2.9761)	Level 3 (3.149)	Level 3	Level 3	
2	Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3 (3.00)	Level 2 (2.900)	Level 3	Level 3	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan/ dicapai dalam jangka waktu 2024-2026. Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Bangkalan sesuai dengan sasaran RPD adalah **Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan melalui pembinaan dan pengawasan.**

Sasaran strategis Inspektorat dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target dari masing-masing indikator diuraikan pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah				Sasaran Perangkat Daerah				Keterangan
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja Th. 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja Th. 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan melalui Pembinaan dan Pengawasan	Level maturitas sistem pengendalian internal Pemerintah	Level 3	Level 3	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	
				Meningkatnya tata kelola urusan Pengawasan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.1	81.1	
					2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.5	71.5	

3.2 Program dan Kegiatan

Rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024 pada program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam tabel yang berisikan matrik rancangan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dibawah ini :

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Tahun 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
					Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11-6	14
				INSPEKTORAT				**11,497,893,264.00**								
6				**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**463,302,500.00**							**(463,302,500)**	
6	**1**			**INSPEKTORAT DAERAH**				**463,302,500.00**					**10,365,935,325.00**		**9,902,632,825**	
6	1	2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi dari hasil pengawasan yang ditindaklanjuti**		**100 %**	**378,019,500.00**		**Persentase Rekomendasi dari hasil pengawasan yang ditindaklanjuti**		**100 %**	**91,555,250.00**		**(286,464,250)**	
6	1	2	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan internal yang dilakukan		90 Laporan	281,764,500.00		Jumlah Laporan Pengawasan internal yang dilakukan		88 Laporan	82,885,250.00		(198,879,250)	

6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	117,282,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	12,927,750.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(104,354,250)	- Efisiensi pada Perjalanan Dinas - Penghapusan Honor Bupati sesuai rekomendasi BPK
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	18,260,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	1,330,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(16,930,000)	Efisiensi pada Perjalanan Dinas
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2,710,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	569,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(2,140,500)	Efisiensi pada Perjalanan Dinas
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	13,695,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	1,320,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(12,374,500)	Efisiensi pada Perjalanan Dinas
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	12,340,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	1,500,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(10,840,000)	Efisiensi pada Perjalanan Dinas
6	1	2	2.01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kesepakatan	78,627,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kesepakatan	60,827,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(17,800,000)	Efisiensi Rompi Saber Pungli

6	1		2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	38,850,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	4,410,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(34,440,000)	Efisiensi Kegiatan dan Mamin
6	1		2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		54 Laporan	96,255,000.00		Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		54 Laporan	8,670,000.00		(87,585,000)	
6	1		2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	11,760,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2,300,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(9,460,000)	Efisiensi pada Perjalanan Dinas
6	1		2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64 Laporan	84,495,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	6,370,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(78,125,000)	Efisiensi pada Perjalanan Dinas
6	1		3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B		63.46 %	85,283,000.00		Persentase PD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B		63.46 %	357,340,500.00		272,057,500	

6	1		3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasiltasi Pengawasan		2 Dokumen	6,300,000.00		Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasiltasi Pengawasan		2 Dokumen	1,050,000.00		(5,250,000)	
6	1		3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi	6,300,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi	1,050,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(5,250,000)	Efisiensi Mamin
6	1		3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		24 Laporan	78,983,000.00		Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		21 Laporan	356,290,500.00		277,307,500	
6	1		3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52 perangkat daerah	52,828,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52 perangkat daerah	352,360,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	299,532,000	Penambahan Anggaran untuk Honor Narasumber Kemendagri dalam Evalusi Pj. Bupati
6	1		3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 perangkat daerah	5,420,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 perangkat daerah	1,139,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(4,281,000)	Efisiensi

6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kegiatan	18,025,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kegiatan	2,250,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(15,775,000)	Efisiensi Kegiatan dan Mamin
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 perangkat daerah	2,710,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 perangkat daerah	541,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(2,168,500)	Efisiensi
X					**NON URUSAN**				**11,034,590,764.00**								
X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**11,034,590,764.00**								
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86 indeks	11,034,590,764.00		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86 indeks	9,917,039,575.00		(1,117,551,189)	
X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	15,493,850.00		Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	7,049,050.00		(8,444,800)	-

X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	11,516,850.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	3,811,650.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(7,705,200)	Efisiensi Lembur dan Mamin
X	XX	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	800,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	731,700.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(68,300)	Efisiensi
X	XX	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	800,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	731,700.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(68,300)	Efisiensi
X	XX	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	275,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	327,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	52,800	
X	XX	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	300,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	441,700.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	141,700	

						Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD					
X	XX	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	937,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	505,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(431,400)	Efisiensi pada Mamin
X	XX	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	865,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	498,900.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(366,100)	-
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yag terpenuhi		80 %	8,763,243,264.00		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yag terpenuhi		80 %	9,098,689,560.00		335,446,296	-
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 Orang/bulan	8,762,193,264.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 Orang/bulan	9,097,689,560.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	335,496,296	Penambahan Anggaran untuk Tunjangan Fungsional Pengawas

X	XX	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1,050,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(50,000)	-
X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun		100 %	2,000,000.00		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun		100 %	1,500,000.00		(500,000)	-
X	XX	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-
X	XX	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	1,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(500,000)	Efisiensi
X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		80 %	148,517,600.00		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		80 %	49,855,200.00		(98,662,400)	-

X	XX	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Orang	58,984,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(58,984,000)	Refocussing
X	XX	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	5,080,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	2,280,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(2,800,000)	Efisiensi Makmin dan pengurangan honor narasumber internal
X	XX	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228 Orang	84,453,600.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228 Orang	47,575,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(36,878,400)	Efisiensi - Jumlah Bimtek dan pengurangan honor narasumber internal
(	XX	I	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Admiistrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		70 %	134,337,000.00		Persentase Penyediaan Admiistrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		70 %	86,400,000.00		(47,937,000)	-
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	2,339,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	2,314,900.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(24,900)	-

X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	26,194,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	23,941,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(2,252,500)	Efisiensi
X	XX	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	1,970,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	1,969,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(1,500)	-
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	3,300,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(3,300,000)	Refocussing
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	20,923,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	9,369,300.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(11,554,100)	Refocussing
X	XX	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4,860,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(4,860,000)	Refocussing

X	XX	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	9,095,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	6,775,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(2,320,000)	Efisiensi
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	65,654,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	42,030,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(23,624,000)	Refocussing
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		10 %	1,300,000,000.00		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		0 %	0.00		(1,300,000,000)	-
X	XX	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1,300,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(1,300,000,000)	Refocussing
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85 %	575,279,800.00		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85 %	561,145,765.00		(14,134,035)	-

X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4,450,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	3,940,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(510,000)	-
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	102,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	72,605,765.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(29,394,235)	Efisiensi
X	XX	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	52,789,800.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	89,880,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	37,090,200	-
X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	416,040,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	394,720,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(21,320,000)	Penyesuaian jumlah THL
X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana		40 %	95,719,250.00		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana		40 %	112,400,000.00		16,680,750	-

X	XX	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	79,499,250.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	100,320,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20,820,750	Penambahan untuk Pemenuhan kebutuhan operasional kendaraan dinas
X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	16,220,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	12,080,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	(4,140,000)	Refocussing

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bupati Bangkalan Nomor 100.3.4.2/2549/433.201/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 dan Peruahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 yang merupakan penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

a) Prioritas Pembangunan Daerah, target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan
b) Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan sehingga menimbulkkan penambahan kegiatan/ sub kegiatan baru pada paerubahan RKPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai Kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten, karena

akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan Inspektorat yang telah disusun.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2024 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Kabupaten Bangkalan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintah yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Bangkalan. Sehingga dapat lebih akuntabel dan transparansi dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 15 Agustus 2024

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN BANGKALAN

AHMAD HAFID, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690131 199003 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Pasal 343 serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 pasal 11 yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan P-Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan yang meliputi: prioritas pembangunan daerah, target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah; target sasaran pembangunan daerah; rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyusunan P-Renja Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Bappeda Kabupaten Bangkalan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan- Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18/E);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan P-Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah:

Maksud:

Untuk merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen P-Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan periode 1 (satu) tahun.

Tujuan:

a. Sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
b. Sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan P-Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Tujuan dan Sasaran P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

3.2 Matrik Rancangan P-Renja Tahun 2024

Bab 4 Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah dengan memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses penyusunan perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi yang berhubungan dengan pencapaian kinerja perangkat daerah untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Pelaksanaan evaluasi ini sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk:

1. Mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Mengetahui program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Mengetahui implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2024-2026 tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Bangkalan

OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENSTRA BAPPEDA 2024-2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023									Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)											
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)*100			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
	Urusan Pemerintahan																								
	Bidang Urusan Perencanaan				27.694.613.603															8.145.632.212			4.145.563.400		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	88		21.854.613.603													86		7.178.375.612	-		3.903.746.100	0,00%	17,86%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		59.437.050													100%		4.785.200	0	%	1.847.700	0,00%	3,11%
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	14.104.350													2	Dok	1.496.450	0	Dok	629.500	0,00%	4,46%
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokume RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	6.409.800													1	Dok	724.950	0	Dok	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	6.259.800													1	Dok	643.300	0	Dok	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	7.694.850													1	Dok	268.300	1	Dok	263.500	33,33%	3,42%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023								Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp		K	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)			K	Rp		K	Rp			
				K	Rp		K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)*100		9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
5.01.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dok	4.500.000												1	Dok	893.300	0	Dok	235.500	0,00%	5,23%
5.01.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Lap	9.076.500												1	Lap	358.300	1	Lap	325.200	33,33%	3,58%
5.01.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Lap	11.391.750												8	Lap	400.800	4	Lap	394.000	16,67%	3,46%
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**		**16.506.737.283**												**100%**		**5.844.693.316**	**0**	**%**	**3.346.260.831**	**0,00%**	**20,27%**
5.01.01.2.02.00 01	Penyedaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	O/B	16.489.637.283												57	O/B	5.843.588.366	57	O/B	3.345.302.631	100,00%	20,29%
5.01.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Lap	9.600.000												1	Lap	961.650	1	Lap	958.200	33,33%	9,98%
5.01.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54	Lap	7.500.000												18	Lap	143.300	9	Lap	-	16,67%	0,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023								Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)										
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)*100			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**		**14.100.000**													**100%**		**991.500**	**0**	**%**	**200.050**	**0,00%**	**1,42%**
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dok	3.600.000													-	Dok	-	0	Dok	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Lap	10.500.000													14	Lap	991.500	6	Lap	200.050	14,29%	1,91%
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**		**177.500.000**													**100%**		**20.234.150**	**0**	**%**	**1.480.000**	**0,00%**	**0,83%**
5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	Unit	21.000.000													-	Unit	-	0	Unit	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80	Paket	85.500.000													-	Paket	-	0	Paket	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dok	11.000.000													1	Dok	10.099.150	0	Dok	1.480.000	0,00%	13,45%
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	Org	25.000.000													1	Org	2.500.000	0	Org	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	80	Org	15.000.000													-	Org	-	0	Org	-	0,00%	0,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023								Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)												
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4			5			6		7		8=(7/6)*100				9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Org	20.000.000												63	Org	7.635.000	0	Org	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**766.883.820**												**100%**		**282.682.446**	**0**	**%**	**111.093.586**	**0,00%**	**14,49%**
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	43.317.750												7	Paket	6.584.510	6	Paket	1.280.000	60,00%	2,95%
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	194.998.800												8	Paket	48.376.450	7	Paket	24.296.500	87,50%	12,46%
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	54.000.000												4	Paket	10.718.000	2	Paket	2.762.000	50,00%	5,11%
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	59.206.270												7	Paket	45.883.486	1	Paket	1.255.750	10,00%	2,12%
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dok	19.620.000												12	Dok	2.820.000	6	Dok	675.000	16,67%	3,44%
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Lap	24.400.000												1	Lap	9.850.000	0	Lap	2.158.000	0,00%	8,84%
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Lap	371.341.000												12	Lap	158.450.000	6	Lap	78.666.336	16,67%	21,18%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023									Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)											
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)*100			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**		**91.350.000**													**100%**		**20.103.850**	**0**	**%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
5.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	91.350.000													4	Unit	20.103.850	0	Unit	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**3.025.525.450**													**100%**		**877.765.150**	**0**	**%**	**415.664.219**	**0,00%**	**13,74%**
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Lap	1.800.000													-	Lap	-	0	Lap	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Lap	416.077.450													12	Lap	139.359.150	6	Lap	45.176.265	16,67%	10,81%
5.01.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Lap	470.040.000													1	Lap	110.680.000	1	Lap	101.980.000	33,33%	21,70%
5.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Lap	2.135.608.000													12	Lap	627.726.000	6	Lap	268.507.954	16,67%	12,57%
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100%**		**1.213.080.000**													**100%**		**127.120.000**	**0**	**%**	**27.199.714**	**0,00%**	**2,24%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023								Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)										
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)*100			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
5.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	Unit	788.282.000												27	Unit	55.250.000	27	Unit	17.382.714	100,00%	2,21%
5.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	64.638.000												1	Unit	31.750.000	1	Unit	4.800.000	100,00%	7,43%
5.01.01.2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	11.000.000												-	Unit	-	0	Unit	-	0,00%	0,00%
5.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	230	Unit	148.300.000												27	Unit	10.120.000	8	Unit	2.150.000	3,48%	1,45%
5.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	200.850.000												1	Unit	30.000.000	0	Unit	2.867.000	0,00%	1,43%
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase konsistensi Penganggaran dengan Perencanaan**	**100%**		**4.392.000.000**												**100%**		**794.171.800**	**-**		**222.970.750**	**0,00%**	**5,08%**
		Persentase indikator kinerja program PD dengan capaian minimal 80%	**90%**		**120.000.000**												**86%**		**18.530.750**	**-**		**412.800**	**0,00%**	**0,34%**
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan**	**100%**		**3.702.000.000**												**100%**		**742.058.250**	**0**	**%**	**192.112.450**	**0,00%**	**5,19%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023									Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)											
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)*100			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3	Dok	36.000.000												-	Dok	-	0	Dok	-	0,00%	0,00%
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	BA	195.000.000												2	BA	56.414.550	2	BA	48.218.000	40,00%	24,73%
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12	BA	450.000.000												3	BA	92.968.550	3	BA	48.059.000	25,00%	10,68%
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	BA	405.000.000												2	BA	124.174.200	2	BA	68.153.750	40,00%	16,83%
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4200	Usulan	66.000.000												800	Usulan	21.379.950	587	Usulan	20.848.300	13,98%	31,59%
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	10	Dok	2.550.000.000												5	Dok	447.121.000	1	Dok	6.833.400	10,00%	0,27%
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan data informasi perencanaan pembangunan daerah**	**100%**		**690.000.000**												**100%**		**52.113.550**	**0**	**%**	**30.858.300**	**0,00%**	**4,47%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023								Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)										
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)*100			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dok	110.000.000												-	Dok	-	0	Org	-	0,00%	0,00%
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	449	Org	100.000.000												299	Org	49.104.950	269	Org	30.858.300	59,91%	30,86%
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3	Buku	480.000.000												1	Buku	3.008.600	0	Buku	-	0,00%	0,00%
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan**	**1**		**120.000.000**												**100,0%**		**18.530.750**	**0**	**%**	**412.800**	**0,00%**	**0,34%**
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3	Lap	15.000.000												1	Lap	1.119.950	0	Lap	-	0,00%	0,00%
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	48	Lap	105.000.000												12	Lap	17.410.800	6	Lap	412.800	12,50%	0,39%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023								Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)									
			K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp			K	Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4		5			6			7			8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)					11=(10/4)*100	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang Berkualitas Baik	100%	585.000.000												100%	86.581.650	-		6.005.000	0,00%	1,03%
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang Berkualitas Baik	100%	312.000.000												100%	20.943.350	-		5.913.750	0,00%	1,90%
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang Berkualitas Baik	100%	431.000.000												100%	47.029.050	-		6.515.000	0,00%	1,51%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	585.000.000												100%	86.581.650	0	%	6.005.000	0,00%	1,03%
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dok 23.500.000												2	Dok 2.261.100	0	Dok	-	0,00%	0,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023									Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)											
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K	Rp
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)*100			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	11	Lap	25.500.000													2	Lap	1.953.950	0	Lap	585.000	0,00%	2,29%
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	Lap	6.000.000													1	Lap	2.161.650	0	Lap	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	9	Lap	96.000.000													3	Lap	7.455.050	0	Lap	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dok	24.000.000													2	Dok	1.696.700	0	Dok	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11	Lap	26.000.000													2	Lap	1.538.400	0	Lap	480.000	0,00%	1,85%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023								Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)										
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)*100			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13	Lap	384.000.000												5	Lap	69.514.800	0	Lap	4.940.000	0,00%	1,29%
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**		**312.000.000**												**100%**		**20.943.350**	**0**	**%**	**5.913.750**	**0,00%**	**1,90%**
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dok	25.500.000												2	Dok	1.845.050	0	Dok	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11	Lap	26.500.000												2	Lap	1.615.900	0	Lap	521.250	0,00%	1,97%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023									Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)											
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)*100			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	Lap	125.000.000													1	Lap	6.358.900	0	Lap	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dok	20.000.000													2	Dok	1.657.050	0	Dok	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11	Lap	24.000.000													2	Lap	1.470.400	0	Lap	455.000	0,00%	1,90%
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3	Lap	91.000.000													1	Lap	7.996.050	0	Lap	4.937.500	0,00%	5,43%
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**		**431.000.000**													**100%**		**47.029.050**	**0**	**%**	**6.515.000**	**0,00%**	**1,51%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023									Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)											
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				K		Rp	K	Rp
1	2	3	4			5			6			7			8=(7/6)*100			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)*100	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dok	25.500.000													2	Dok	2.055.600	0	Dok	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11	Lap	27.000.000													2	Lap	1.605.600	0	Lap	385.000	0,00%	1,43%
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	Lap	195.000.000													1	Lap	24.617.200	0	Lap	4.600.000	0,00%	2,36%
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dok	24.500.000													2	Dok	1.825.050	0	Dok	-	0,00%	0,00%
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11	Lap	27.000.000													2	Lap	1.648.400	0	Lap	505.000	0,00%	1,87%
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3	Lap	132.000.000													1	Lap	15.277.200	0	Lap	1.025.000	0,00%	0,78%

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2024, yaitu:

1. Realisasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 s/d tahun 2023 tidak bisa disandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan perbedaan renstra;
2. Realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan semester I tahun 2024 masih rendah dikarenakan kebanyakan outputnya di triwulan III dan IV.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/ NSPK/ IKK/ IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

Analisis kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bangkalan didasarkan pada pencapaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

No	Indikator Tujuan dan Sasaran	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika ada perubahan target)
		2020	2021	2022	2023			
1	**Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP**	21,50	21,40	22,20	22,41	-	-	
1	Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja Program	88,98%	79,37%	86,32%	91,68%	-	-	
2	Persentase indicator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80%	67,50%	76,19%	85,71%	80,49%	-	-	
3	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	78,17	78,60	85,44	89,35	-	-	
1	**Indeks Kualitas Perencanaan**	-	-	-	-	85	85	
1	Persentase indikator kinerja daerah dengan capaian minimal 80%	-	-	-	-	86%	86%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	82	100	Karena realisasi semester I sudah mencapai 84% dan indeks kepuasan masyarakat tidak dapat diprediksi
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	71	71	

Berdasarkan pada tabel diatas, terdapat 2 periode Renstra yaitu Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra Tahun 2024-2026 dimana ada perbedaan indikator kinerja yang digunakan sehingga tidak bisa disandingkan. Realisasi indikator kinerja Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi indikator tujuan "Nilai Perencanaan Kinerja Daerah dalam mendukung Nilai SAKIP" dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan. Hal ini disebabkan karena komponen Nilai SAKIP dalam perencanaan telah dilakukan perbaikan atas hasil evaluasi dari KemenpanRB.
2. Realisasi indikator sasaran "Rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja program" dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan terlaksananya asistensi dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan monitoring atas evaluasi kinerja triwulan yang telah disampaikan.
3. Realisasi indikator sasaran "Persentase indikator kinerja RPJMD dengan capaian hasil minimal 80% dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 realisasi sebesar 67,5% dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan refocusing anggaran sehingga beberapa kegiatan di semua Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan tidak dilaksanakan sehingga berpengaruh pada penurunan kinerja indikator daerah, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 realisasinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini secara umum telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik atas realisasi capaian indicator kinerja daerah. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan beberapa indikator kinerja RPJMD tidak mencapai target.
4. Realisasi indikator sasaran "Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan" dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena upaya pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 mengenai apa yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Bappeda Kabupaten Bangkalan mendukung Tujuan RPD ke-4 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra	P-Renja Tahun 2024			Renstra	P- Renja Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perencanaan yang berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan	85	85	Meningkatnya capaian kinerja strategis daerah	Persentase indikator kinerja daerah dengan capaian minimal 80%	86%	86%	
				Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan perencanaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	100	Karena realisasi semester I sudah mencapai 84% dan indeks kepuasan masyarakat tidak dapat diprediksi
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	71	

3.2 Matrik Rancangan P-Renja Tahun 2024

Bappeda Kabupaten Bangkalan berdasarkan tugas dan fungsinya melakukan penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan. Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:

1. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
2. Terlaksananya asistensi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan semua Perangkat Daerah untuk

menciptakan perencanaan pembangunan yang berdaya guna dan bermanfaat.

3. Tersedianya sarana dan prasana dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan Bappeda Kabupaten Bangkalan.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.7.802.467.108,- dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matrik Rancangan P- Renja Tahun 2024

Nama PD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024						Perubahan Renja Tahun 2024							Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	PERENCANAAN					**9.239.831.161**						**7.802.467.108**		**1.437.164.053**	
5.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**86 Indeks**		**7.300.131.161**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**86 Indeks**		**7.118.852.058**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**181.279.103**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**19.362.350**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**3.285.200**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**16.077.150**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Dok	4.251.450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Dok	746.450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3.505.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokume RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	2.136.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	349.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.786.650	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	2.066.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	268.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.818.300	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	2.564.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	268.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2.296.650	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	1.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	893.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	606.700	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	3.025.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	358.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2.667.200	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	8	Lap	3.797.250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	8	Lap	400.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3.396.650	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**5.441.414.521**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**5.832.536.432**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**(391.121.911)**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	57	O/B	5.435.714.521	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	57	O/B	5.831.431.482	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(395.716.961)	Kenaikan gaji
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	3.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	961.650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2.238.350	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	18	Lap	2.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	18	Lap	143.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2.356.700	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**4.700.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**791.500**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**3.908.500**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024						Perubahan Renja Tahun 2024							Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	1.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0	Dok	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.200.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	14	Lap	3.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	14	Lap	791.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2.708.500	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**92.507.800**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**15.099.150**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**77.408.650**	
5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Unit	4.507.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0	Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4.507.800	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	10.099.150	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(7.099.150)	Menambah rapat
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	15	Org	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Org	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	70.000.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	80	Org	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0	Org	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5.000.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Org	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0	Org	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5.000.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**241.770.240**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**306.394.196**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**(63.623.956)**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	10	Paket	14.439.250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	7	Paket	6.584.510	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7.854.740	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	8	Paket	64.999.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	8	Paket	51.562.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	13.437.400	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	4	Paket	18.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	4	Paket	9.318.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8.682.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ksb. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	10	Paket	21.461.390	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	7	Paket	45.883.486	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(24.422.096)	Pengurangan paket namun komponen fotocopy dalam paket bertambah
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12	Dok	6.540.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12	Dok	1.620.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4.920.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	6.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	11.950.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(5.250.000)	Menambah fasilitasi kunjungan tamu
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12	Lap	109.630.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12	Lap	178.476.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(68.846.000)	Menambah anggaran perjadin keperluan evaluasi Pj. Bupati Bangkalan triwulan
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**117.575.100**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**31.500.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**86.075.100**	
5.01.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	18	Unit	117.575.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Unit	31.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	86.075.100	Efisiensi anggaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024						Perubahan Renja Tahun 2024						Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**993.678.150**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**777.915.580**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**215.762.570**	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0	Lap	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	600.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12	Lap	139.359.150	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12	Lap	95.195.580	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	44.163.570	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	156.680.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	101.980.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	54.700.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12	Lap	697.039.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12	Lap	580.740.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	116.299.000	Efisiensi anggaran dan pengurangan THL
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**389.123.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**152.330.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**236.793.000**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	27	Unit	201.182.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	27	Unit	89.760.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	111.422.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Unit	21.546.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Unit	15.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5.946.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	5	Unit	5.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0	Unit	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5.500.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	80	Unit	50.255.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	29	Unit	16.970.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	33.285.000	Efisiensi anggaran
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Unit	110.640.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	80.640.000	Efisiensi anggaran
5.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase konsistensi Penganggaran dengan Perencanaan**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**1.504.080.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase konsistensi Penganggaran dengan Perencanaan**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**529.521.050**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**974.478.950**	
		Persentase indikator kinerja program PD dengan capaian minimal 80%	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**86%**			**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase indikator kinerja program PD dengan capaian minimal 80%**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**86%**			**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**		
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**1.234.000.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**493.432.050**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**740.567.950**	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Dok	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	0	Dok	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12.000.000	Efisiensi anggaran
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	BA	65.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	BA	48.218.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	16.782.000	Efisiensi anggaran
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	BA	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	BA	48.059.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	101.941.000	Efisiensi anggaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024						Perubahan Renja Tahun 2024						Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	BA	135.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	BA	68.153.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	66.846.250	Efisiensi anggaran
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1400	Usulan	22.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	587	Usulan	20.848.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.151.700	Efisiensi anggaran
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	5	Dok	850.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	5	Dok	308.153.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	541.847.000	Efisiensi anggaran
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan data informasi perencanaan pembangunan daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**230.000.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase ketersediaan data informasi perencanaan pembangunan daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**32.963.550**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**197.036.450**	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	349	Org	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	269	Org	32.204.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	37.795.050	Efisiensi anggaran dan target menyesuaikan realisasi
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Buku	160.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Buku	758.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	159.241.400	Efisiensi anggaran
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**40.000.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**3.125.450**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**36.874.550**	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	1.119.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3.880.050	Efisiensi anggaran
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	16	Lap	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	12	Lap	2.005.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32.994.500	Efisiensi anggaran
5.01.03	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang Berkualitas Baik**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**193.000.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang Berkualitas Baik**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**85.486.650**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**107.513.350**	
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang Berkualitas Baik	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**101.000.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang Berkualitas Baik**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**14.783.300**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**86.216.700**	
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang Berkualitas Baik	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**141.500.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang Berkualitas Baik**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**53.824.050**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**87.675.950**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**193.000.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**85.486.650**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**107.513.350**	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Dok	7.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Dok	1.616.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5.883.900	Efisiensi anggaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024						Perubahan Renja Tahun 2024							Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Lap	8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Lap	1.953.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.046.050	Efisiensi anggaran, laporan asistensi rancangan dan rankhir renja mumi disusun menjadi 1 laporan
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	2.161.650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(161.650)	Efisiensi anggaran
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Lap	32.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Lap	7.455.050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	24.544.950	Efisiensi anggaran
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Dok	7.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Dok	1.246.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.253.300	Efisiensi anggaran
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Lap	8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Lap	1.538.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.461.600	Efisiensi anggaran, laporan asistensi rancangan dan rankhir renja mumi disusun menjadi 1 laporan
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	5	Lap	128.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	5	Lap	69.514.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	58.485.200	Efisiensi anggaran
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**101.000.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**14.783.300**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**86.216.700**	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Dok	8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Dok	889.450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7.110.550	Efisiensi anggaran
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Lap	8.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Lap	1.615.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.884.100	Efisiensi anggaran, laporan asistensi rancangan dan rankhir renja mumi disusun menjadi 1 laporan
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	2.058.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	37.941.100	Efisiensi anggaran
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Dok	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Dok	1.165.050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4.834.950	Efisiensi anggaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024						Perubahan Renja Tahun 2024						Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Lap	7.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Lap	1.470.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.029.600	Efisiensi anggaran, laporan asistensi rancangan dan rankhir renja murni disusun menjadi 1 laporan
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	31.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	7.583.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23.416.400	Efisiensi anggaran
6.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**141.500.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah**	**100%**		**53.824.050**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**87.675.950**	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Dok	8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Dok	1.605.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.394.400	Efisiensi anggaran
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Lap	8.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Lap	1.605.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.894.400	Efisiensi anggaran, laporan asistensi rancangan dan rankhir renja murni disusun menjadi 1 laporan
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	65.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	32.117.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32.882.800	Efisiensi anggaran
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Dok	7.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Dok	1.570.050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5.929.950	Efisiensi anggaran
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	3	Lap	8.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	2	Lap	1.648.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6.851.600	Efisiensi anggaran, laporan asistensi rancangan dan rankhir renja murni disusun menjadi 1 laporan
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	44.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	1	Lap	15.277.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	28.722.800	Efisiensi anggaran

BAB IV
PENUTUP

P-Renja Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 disebabkan karena dalam tahun berjalan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi: prioritas pembangunan daerah, target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dalam P-Renja Tahun 2024, Bappeda melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bangkalan, diharapkan seluruh pegawai dapat melaksanakan P-Renja Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, P-Renja dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dilakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan P-Renja Tahun 2024.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANGKALAN

EKO SETIAWAN, S.Si., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19751121 200312 1 003

KATA
PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana kami dapat menyelesaikan penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini. Rencana Kerja dibuat untuk periode satu tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, dimana dalam Rencana Kerja (Renja) tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun. Dalam pelaksanakan Rencana Kerja (Renja) diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Pemerintah bertanggung-jawab dalam keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Selain diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Tahun 2024, mencakup pula pelaksanaan kegiatan, tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan. Analisis dilakukan secara mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, kami berharap agar Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dra. R. AMINA RACHMAWATI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670713 198809 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan perubahan atas Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b. Target sasaran pembangunan daerah;
c. Prioritas pembangunan daerah;
d. Penambahan /pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;

e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun Tahapan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
c. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penetapan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah.

Dokumen RENJA Perubahan Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Adapun ya ındasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D)
10. Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah No 76)
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Tahun 2019

tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47 Seri E)

12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 33 Seri E)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi, dan kebutuhan yang telah dijabarkan lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) sehingga perencanaan semakin terintegrasi dan komprehensif serta mampu mendorong komitmen dalam mencapai target realisasi yang telah diprioritaskan. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) juga bermanfaat sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKA dan DPA dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur dan menjadi alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Kabupaten Bangkalan mempunyai tujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas kegiatan dan menyalurkan aspirasi bidang

dan bagian dalam perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka ikut memajukan pembangunan Kabupaten Bangkalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri No. 86 Th. 2017 pasal 361 ayat 3, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER II TAHUN BERJALAN

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester II Tahun berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran serta Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB IV : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester II Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan apa saja yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan - kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pelaksanaan Renja tahun lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk Renja tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan ditunjang dengan Belanja yang anggarannya dianggarkan sebesar Rp. 9.402.187.206,- dirinci menjadi 2 program dan 9 kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaan kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sejumlah 8 kegiatan. Anggaran yang dianggarkan untuk program ini yaitu sebesar Rp. 8.581.187.206,-. Berikut ini rincian dari kegiatan dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.300.000,- dan terdapat 7 sub kegiatan. Berikut ini rincian sub kegiatan dari kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

kinerja perangkat daerah.

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah dokumen perencanaan yang disusun sebanyak 2 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 1 dokumen perencanaan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 dokumen

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 dokumen

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 1 dokumen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 dokumen.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah dokumen laporan kinerja dan realisasi kinerja yang disusun sebanyak 4

laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 2 laporan.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sebanyak 11 laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 2 laporan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yaitu sebesar Rp. 7.031.016.806,-. Terdapat 5 sub kegiatan yang dilaksanakan, berikut ini rincian sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.027.416.806,- dengan indikator jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 70 orang/bulan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.986.375.998,- dengan keluaran yaitu 70 orang/bulan penyedian gaji dan tunjangan ASN.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah bahan penatausahaan yang tersusun sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 dokumen.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah dokumen yang tersusun sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 dokumen.

d. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah laporan yang tersusun

sebanyak 2 laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 laporan.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah laporan keuangan yang tersusun sebanyak 18 laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 8 laporan.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 1.800.000,-. Berikut ini rincian 2 sub kegiatan pada kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah dokumen yang tersusun sebanyak 2 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 dokumen.

b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah laporan keuangan yang tersusun sebanyak 14 laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 laporan.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdapat 4 sub kegiatan dalam kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.850.000,-. Berikut rincian sub kegiatan yaitu.

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan indikator jumlah pengadaan pakaian dinas sebanyak 16 Paket. Realisasi

keuangan sebesar Rp. 4.975.000,- dengan keluaran 14 paket pakaian dinas.

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah dokumen yang tersusun sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 dokumen.

c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah laporan yang tersusun sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 dokumen.

d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.050.000,- dengan indikator jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 25 orang. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 orang.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah memiliki 8 sub kegiatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.172.020,-. Berikut ini rincian sub kegiatannya, yaitu.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.727.200,- dengan indikator jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 2 paket. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 paket.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.698.400,- dengan indikator jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 2 paket. Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.925.400,- dengan keluaran sebanyak 0 paket.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.744.300,- dengan indikator jumlah penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.292.600,- dengan keluaran 0 paket.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.505.000,- dengan indikator jumlah penyediaan bahan logistic kantor sebanyak 2 paket. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran sebanyak 0 paket.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.426.120,- dengan indikator jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 2 paket. Realisasi keuangan sebesar Rp. 7.094.500,- dengan keluaran 1 paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

f. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.240.000,- dengan indikator jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 0 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- dengan keluaran 0 dokumen.

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 37.931.000,- dengan indikator jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 20.924.252,- dengan keluaran 0 laporan.

h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dengan indikator jumlah laporan yang tersusun

sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 dokumen.

6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah memiliki 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.249.980,-. Berikut ini rincian dari sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

      Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.249.980,- dengan indikator jumlah laporan yang tersusun sebanyak 3 unit. Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dengan keluaran 0 unit.

7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Anggaran yang disediakan untuk kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu sebesar Rp. 1.303.974.400,-. Berikut rincian dari sub kegiatan dalam kegiatan ini.

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.810.000,- dengan indikator jumlah penyediaan jasa surat-menyurat sebanyak .1 laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan keluaran 0 laporan.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 181.399.400,- dengan indikator jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak .1 laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp.13.366.931,- dengan keluaran 1 laporan.

   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,- dengan indikator jumlah laporan

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 89.650.000,- dengan keluaran 1 laporan.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.026.765.000,- dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 1 laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 324.808.900,- dengan keluaran 1 laporan.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah anggaran kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu sebesar Rp. 126.824.000,-. Berikut rincian sub kegiatan dalam kegiatan ini.

a. Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.000.000,- dengan indikator jumlah pemeliharaan barang milik daerah sebanyak.1 unit. Realisasi keuangan sebesar Rp. 19.414.696,- dengan keluaran yaitu 0 unit.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.56.774.000,- dengan indikator yaitu jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas sebanyak 32 unit. Realisasi keuangan sebesar Rp. 14.295.799,- dengan keluaran 5 unit.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- dengan indikator jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan sebanyak 1 unit.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 24.997.200,- dengan keluaran 1 unit.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.050.000,- dengan indikator jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan sebanyak .49 unit. Realisasi keuangan sebesar Rp. 875.000,- dengan keluaran 0 unit.

II. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program kedua yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan yaitu pengelolaan pendapatan daerah. Program ini melaksanakan 1 kegiatan dan di dalamnya terdapat 9 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 821.000.000,-. Berikut rincian kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan dalam 9 sub kegiatan. Anggaran pagu dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yaitu sebesar Rp. 821.000.000,-. Berikut rincian sub kegiatan dalam program pengelolaan pendapatan daerah.

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.750.000,- dengan indikator jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah yang disusun sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 7.568.000,- dengan keluaran 0 dokumen.

b. Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 57.000.000,- dengan indikator jumlah dokumenhasil analisis pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 52.141.300,- dengan keluaran 0 dokumen.

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 403.000.000,- dengan indikator jumlah sarana dan prasarana yang disediakan sebanyak 8 unit. Realisasi keuangan sebesar Rp. 391.639.950,- dengan keluaran 6 unit.

d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 37.000.000,- dengan indikator jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran pajak daerah sebanyak 2 laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 15.522.250,- dengan keluaran 2 laporan.

e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dengan indikator jumlah laporan sebanyak 1 laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp.462.500,- dengan keluaran 0 laporan.

f. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.000.000,- dengan indikator jumlah dokumen ketetapan pajak sebanyak 2 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 8.670.450,- dengan keluaran 0 dokumen.

g. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.250.000,- dengan indikator data pelaporan pajak daerah sebanyak 1 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.450.000,- dengan keluaran sebesar 0 dokumen.

h. Penagihan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan indikator jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah. Realisasi

keuangan sebesar Rp. 27.100.750,- dengan keluaran 0 dokumen.

i. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 87.000.000,- dengan indikator jumlah dokumen hasil pemeriksaan, pengendalian, dan pengawasan pajak daerah sebanyak 3 dokumen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 23.302.000,- dengan keluaran 0 dokumen.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024 Semester II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase terpennhinya penunjang urusan pemerintah**	**79,50**					**78,5**		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**29%**	**29%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	14%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	33%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinera dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	17%

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	33 laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100%	11 Laporan	2 Laporan	6%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**85%**	**85%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulam	72 orang/bulan	72 orang/bulan	72 orang/bulan	100%	70 Orang/Bulan	72 Orang/bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	- Laporan	33%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keunagan bulanan/triwulanan/semeste ran SKPD	54 laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	8 Laporan	15%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	- Laporan	0%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	- Dokumen	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**76%**	**100%**	**28%**	**28%**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 paket	16 Paket	16 Paket	16 Paket	100%	16 Paket	14 Paket	88%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 orang	1 Orang	33 Orang	1 Orang	3%	32 Orang	- Orang	0%

	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**8%**	**8%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	- Paket	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	- Paket	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	- Paket	0%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	1 Paket	50%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	- Dokumen	0%
	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Laporan	- Laporan	0%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	- Paket	0%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	0%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	-	-	-	-	-	-		

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	- Unit	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**75%**	**75%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	- Laporan	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**7%**	**7%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	- Unit	0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	100%	32 Unit	5 Unit	16%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	33%

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangu Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	49 unit	49 Unit	49 Unit	49 Unit	100%	49 Unit	- Unit	0%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Tingkat Akurasi dalam penetapan target PAD**	**100%**					**100,00%**	**50,3%**	**50%**
		Kontribusi pajak dan retribusi I terhadap PAD	**6,3%**					**7,00%**	**2,1%**	**2%**
		Kontribusi pajak dan retribusi II terhadap PAD	**10,5%**					**12,60%**	**5,3%**	**5%**
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Nilai Target PAD**	**382.350.007.568,72**	**368.389.690.149**	**344.447.290.766**	**368.389.690.149**	**107%**	**318.692.927.219**	**160.343.860.461**	**42%**
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	3 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Analisa dan Pengembanga n Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	3 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah sektor bumi dan bangunan	4 unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	3 Unit	75%
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah sektor usaha	4 unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	3 Unit	75%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah sektor bumi dan bangunan	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	- Laporan	0%
		Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah sektor usaha	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	- Laporan	0%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	- Laporan	0%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah sektor bumi dan bangunan	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%

		Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah sektor usaha	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Penagihan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah sektor bumi dan bangunan	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
		jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah sektor usaha	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%
		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	- Dokumen	0%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan antara lain dengan cara mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemungutan pendapatan daerah guna menunjang pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian tentunya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Pada dokumen Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 telah menguraikan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Menurunkan angka kemiskinan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan mendukung Misi yang ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah menetapkan **Tujuan** yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan daerah dengan **Indikator Tujuan** adalah Pertumbuhan PAD. Sedangkan **Sasaran** Badan Pendapatan Daerah adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dengan **Indikator Sasaran** yaitu Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Pendapatan Daerah terkait dengan eksistensinya merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa penerimaan daerah.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Pendapatan mempunyai fungsi:

a) Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan

Tujuan				Sasaran			
Uraian	**Indikator Kinerja**	**Target**		**Uraian**	**Indikator Kinerja**	**Target**	
		Renstra 2024	**Perubahan Renja 2024**			**Renstra 2024**	**Perubahan Renja 2024**
1	2	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	14,40%	14,40%	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan PAD	6,10%	6,10%
				Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,75	83,75
					Nilai Sakip PD	62,75	62,75

3.2. Program dan Kegiatan

Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan seperti yang telah disebutkan diatas maka rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2023 di realisasikan dalam 2 (empat) program dan 9 kegiatan yang mana rinciannya adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinera dan Ikhtisar Realisasi
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester
d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
e. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

b. Pendidkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
d. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g. Penyediaan Peralatan RUmah Tangga
h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
   a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
   b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
   c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
   d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
   e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
   f. Penetapan Wajib Pajak Daerah
   g. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak
   h. Penagihan Pajak Daerah
   i. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Program dan kegiatan beserta pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 disajikan berikut ini:

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA 2024					Perubahan RENJA Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keuangan				9.185.625.345					9.497.178.870			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah**	**Bangkalan**	**78,5**	**8.585.625.345**	**APBD**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah**	**Bangkalan**	**78,5**	**8.676.178.870**	**APBD**	**90.553.525**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bangkalan**	**100%**	10.500.000	**APBD**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**6.300.000**	**APBD**	**(4.200.000)**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	2 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	2 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA 2024					Perubahan RENJA Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinera dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	4 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinera dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	4 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	11 Laporan	1.500.000	APBD	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	11 Laporan	900.000	APBD	(600.000)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**Bangkalan**	**100%**	**6.818.694.345**	**APBD**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**Bangkalan**	**100%**	**7.126.008.470**	**APBD**	**307.314.125**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	70 Orang/Bulan	6.812.694.345	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	70 Orang/Bulan	7.122.408.470	APBD	309.714.125	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bangkalan	1 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keunagan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keunagan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bangkalan	1 Laporan	1.500.000	APBD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bangkalan	1 Laporan	900.000	APBD	(600.000)	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bangkalan	18 Laporan	1.500.000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bangkalan	18 Laporan	900.000	APBD	(600.000)	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**3.000.000**	**APBD**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**1.800.000**	**APBD**	**(1.200.000)**	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA 2024					Perubahan RENJA Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	2 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	2 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bangkalan	14 Laporan	1.500.000	APBD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bangkalan	14 Laporan	900.000	APBD	(600.000)	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Bangkalan**	**100%**	**23.000.000**	**APBD**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Bangkalan**	**100%**	**8.850.000**	**APBD**	**(14.150.000)**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bangkalan	16 Paket	5.000.000	APBD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bangkalan	16 Paket	5.000.000	APBD	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bangkalan	1 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bangkalan	1 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bangkalan	25 Orang	15.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bangkalan	25 Orang	2.050.000	APBD	(12.950.000)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**157.232.600**	**APBD**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**80.172.020**	**APBD**	**(77.060.580)**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	6.212.000	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	3.727.200	APBD	(2.484.800)	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	61.616.000	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	14.698.400	APBD	(46.917.600)	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	6.241.150	APBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	5.505.000	APBD	(736.150)	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA 2024					Perubahan RENJA Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	9.170.000	APBD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	10.426.120	APBD	1.256.120	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	23.153.450	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bangkalan	2 Paket	3.240.000	APBD	(19.913.450)	
Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	3.240.000	APBD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	37.931.000	APBD	34.691.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bangkalan	1 Laporan	46.100.000	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bangkalan	1 Laporan	3.744.300	APBD	(42.355.700)	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	1.500.000	APBD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bangkalan	1 Dokumen	900.000	APBD	(600.000)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Bangkalan**	**100%**	**38.489.200**	**APBD**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Bangkalan**	**100%**	**17.249.980**	**APBD**	**(21.239.220)**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Bangkalan	-	-	APBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Bangkalan	-	-	APBD	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Bangkalan	3 Unit	38.489.200	APBD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Bangkalan	3 Unit	17.249.980	APBD	(21.239.220)	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**1.329.099.200**	**APBD**	**Persentase Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**1.303.974.400**	**APBD**	**(25.124.800)**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	1 laporan	9.670.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	1 laporan	5.810.000	APBD	(3.860.000)	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA 2024					Perubahan RENJA Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bangkalan	1 Laporan	199.989.200	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bangkalan	1 Laporan	181.399.400	APBD	(18.589.800)	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bangkalan	1 Laporan	8.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bangkalan	1 Laporan	90.000.000	APBD	82.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Laporan	1.111.440.000	APBD	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Laporan	1.026.765.000	APBD	(84.675.000)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**205.610.000**	**APBD**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**131.824.000**	**APBD**	**(73.786.000)**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bangkalan	1 Unit	42.610.000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bangkalan	1 Unit	39.000.000	APBD	(3.610.000)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	32 Unit	81.850.000	APBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	32 Unit	56.774.000	APBD	(25.076.000)	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangkalan	1 Unit	25.000.000	APBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangkalan	1 Unit	25.000.000	APBD	-	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangu Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bangkalan	49 Unit	56.150.000	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangu Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bangkalan	49 Unit	11.050.000	APBD	(45.100.000)	
				600.000.000					**821.000.000**		**221.000.000**	
	Tingkat Akurasi dalam penetapan target PAD	**Bangkalan**	**100,00%**	**260.000.000**	**APBD**	**Tingkat Akurasi dalam penetapan target PAD**	**Bangkalan**	**100,00%**	**199.000.000**	**APBD**	**(61.000.000)**	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA 2024					Perubahan RENJA Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Kontribusi pajak dan retribusi I terhadap PAD**	**Bangkalan**	**7,00%**	**195.000.000**	**APBD**	**Kontribusi pajak dan retribusi I terhadap PAD**	**Bangkalan**	**7,00%**	**311.000.000**	**APBD**	**116.000.000**	
	Kontribusi pajak dan retribusi II terhadap PAD	**Bangkalan**	**12,60%**	**145.000.000**	**APBD**	**Kontribusi pajak dan retribusi II terhadap PAD**	**Bangkalan**	**12,60%**	**311.000.000**	**APBD**	**166.000.000**	
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Nilai Target PAD**	**Bangkalan**	**318.692.927.219**	**600.000.000**	**APBD**	**Nilai Target PAD**	**Bangkalan**	**353.064.954.785**	**821.000.000**	**APBD**	**221.000.000**	
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Bangkalan	1 Dokumen	30.000.000	APBD	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Bangkalan	1 Dokumen	27.750.000	APBD	(2.250.000)	
Analisa dan Pengembanga n Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Bangkalan	1 Dokumen	30.000.000	APBD	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Bangkalan	1 Dokumen	57.000.000	APBD	27.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah sektor bumi dan bangunan	Bangkalan	4 Unit	75.000.000	APBD	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah sektor bumi dan bangunan	Bangkalan	4 Unit	201.500.000	APBD	126.500.000	
	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah sektor usaha	Bangkalan	4 Unit	25.000.000	APBD	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah sektor usaha	Bangkalan	4 Unit	201.500.000	APBD	176.500.000	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah sektor bumi dan bangunan	Bangkalan	1 Laporan	30.000.000	APBD	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah sektor bumi dan bangunan	Bangkalan	1 Laporan	18.500.000	APBD	(11.500.000)	
	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah sektor usaha	Bangkalan	1 Laporan	30.000.000	APBD	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah sektor usaha	Bangkalan	1 Laporan	18.500.000	APBD	(11.500.000)	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Bangkalan	1 Laporan	140.000.000	APBD	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Bangkalan	1 Laporan	75.000.000	APBD	(65.000.000)	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah sektor bumi dan bangunan	Bangkalan	1 Dokumen	30.000.000	APBD	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah sektor bumi dan bangunan	Bangkalan	1 Dokumen	12.000.000	APBD	(18.000.000)	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA 2024					Perubahan RENJA Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah sektor usaha	Bangkalan	1 Dokumen	30.000.000	APBD	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah sektor usaha	Bangkalan	1 Dokumen	12.000.000	APBD	(18.000.000)	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Bangkalan	1 Dokumen	30.000.000	APBD	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Bangkalan	1 Dokumen	10.250.000	APBD	(19.750.000)	
Penagihan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah sektor bumi dan bangunan	Bangkalan	1 Dokumen	30.000.000	APBD	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah sektor bumi dan bangunan	Bangkalan	1 Dokumen	50.000.000	APBD	20.000.000	
	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah sektor usaha	Bangkalan	1 Dokumen	30.000.000	APBD	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah sektor usaha	Bangkalan	1 Dokumen	50.000.000	APBD	20.000.000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Bangkalan	1 Dokumen	30.000.000	APBD	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Bangkalan	1 Dokumen	29.000.000	APBD	(1.000.000)	
	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Bangkalan	1 Dokumen	30.000.000	APBD	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Bangkalan	1 Dokumen	29.000.000	APBD	(1.000.000)	
	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Bangkalan	1 Dokumen	30.000.000	APBD	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Bangkalan	1 Dokumen	29.000.000	APBD	(1.000.000)	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Isi dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pendapatan Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2024 sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan diperlukan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini disusun dan semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Bangkalan, Agustus 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dra. R. AMINA RACHMAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670713 198809 2 001

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirimuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BPKAD, evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun lalu dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2024-2025.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2024 ini, disamping sebagai Dokumen Rencana Kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan BPKAD sebagai perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA BPKAD
KABUPATENBANGKALAN

ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis antara lain :

1. Menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
3. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.
4. Dan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, penyusnan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Keterkaitan Renja BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1 :

Gambar 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan

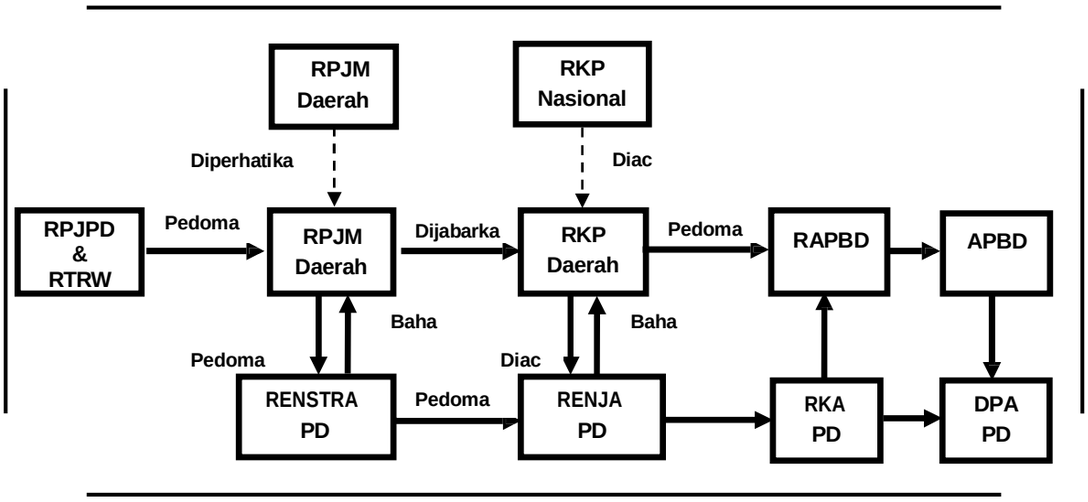

RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 merupakan tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025. RPJMD tahap ketiga melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2018 - 2023 untuk jangka waktu 5 tahun sesuai tugas dan tupoksi BPKAD dan lebih didetailkan lagi melalui Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Selanjutnya Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan RKA - PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
h. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587) Perubahan terahir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
i. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga (renstra k/l) 2015-2019
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

o. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupate Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);

s. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

t. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);

u. Surat Edaran Bupati Nomor 000.7.2.4/795/433.201/2023 tentang Pedoman penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

v. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)

w. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)

x. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab.

Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/ E)

y. Surat Edaran Bupati Nomor : 100.3.4.2/2549/433.201/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, antara lain :

a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan, perencanaan, target capaian dengan pelaksanaannya;
b. Meningkatkan peran partisipasi aktif pemangku kepentingan dan stake holder dalam proses penyusunan program kegiatan dan perencanaan anggaran;
c. Menyelaraskan program, kegiatan dengan anggaran;
d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya;
e. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang terukur sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan, tujuannya adalah :

a. Sinkronisasi dan menjabarkan Rencana Strategis - Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran;
b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD;
c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per Bab. sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Bab 5 Penutup

BAB II
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Dari hasil evaluasi dimaksud sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Pengelolaan Aset dan Akuntansi Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengeloaan keuangan dan aset daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi pembangunan di Bidang Pemerintahan dan otonomi daerah, pada Tahun 2023 di titik beratkan pada program utama pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi 3 (tiga) Program dan 13 (dua belas) Kegiatan dengan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dari program-program diatas, realisasi Belanja Operasi BPKAD pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 34.789.064.881,- atau 93,87%, Belanja Modal BPKAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 567.479.679,- atau 87,81%, Belanja Tidak Terduga BPKAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 823.475.000,- atau 41,73% dan Belanja Transfer BPKAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 447.840.774.290,- atau 99,97% dengan rincian program dan kegiatan antara lain :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pagu Program ini sebesar Rp. 34.679.437.975,00 dan terealisasi sebesar Rp. 32.343.294.947,00 atau 93,26% yang diterjemahkan melalui kegiatan

:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 75.852.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.020.650,- atau 92,31% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut :
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.331.250,- atau 99,34%
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.857.800,- atau 92,86%
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.769.900,- atau 98,56%%
   d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2309000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1577050,- atau 68,30%
   e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.239.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.213.000,- atau 99,20%
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.082.650,- atau 77,85%
   g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.189.000,- atau 94,90%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 29.909.980.980,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.155.693.442,- atau 94,13% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut :
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.842.861.380,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.088.794.392,- atau 94,12%
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.032.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.912.300,- atau 99,65%
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33087300,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.986.750,- atau 99,70%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 25.881.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.951.400 atau 96,41% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut:
   a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.682.700,- atau 93,65%
   b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.881.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.268.700,- atau 97,06%

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 612.476.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 515.689.939,- atau 84,20% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.770.000,- atau 87,70%
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.885.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.636.050,- atau 94,95%
   c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.266.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.557.500,- atau 75,25%
   d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.570.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 165.197.000,- atau 82,36%
   e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.555.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.465.000,- atau 98,63%
   f) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.461.000,- atau 99,78%
   g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 230.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 186.603.389,- atau 80,89%
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 306.512.830,- dan terealisasi sebesar Rp. 254.842.624,- atau 83,14% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a) Pengadaan Aset Tetap Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 266.507.830,- dan terealisasi sebesar Rp. 214.877.629,- atau 80,63%
   b) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.194.000 dan terealisasi sebesar Rp. 38.377.925 atau 90,96%
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 3.135.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.031.421.008,- atau 96,69% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.944.500,- atau 38,74%
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 269.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.7240.653,- atau 87,92%

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.860.390.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.792.235.855,- atau 97,62%

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 603.473.615,- dan terealisasi sebesar Rp. 474.453.884,- atau 78,62% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.902.281,- atau 78,76%

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.982.995,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.072.603,- atau 45,27%

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 157.551.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 148.701.000,- atau 94,38%

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 221.449.620,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.778.000,- atau 82,99%

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Pagu Program ini sebesar Rp. 452.262.153.771,- dan terealisasi sebesar Rp. 450.807.455.053,- atau 99,68% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 1.794.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.680.736.000,- atau 93,66% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.639.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.585.500,- atau 95,29%

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.639.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.989.100,- atau 96,22%

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.581.600,- atau 96,97%

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.113.200,- atau 98,78%

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.350.000,- atau 99,45%

f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.560.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.240.000,- atau 99,50%

g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 535.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 513.547.200,- atau 95,89%

h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 526.089.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 520.079.800,- atau 98,86%

i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 473.692.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 394.672.300,- atau 83,32%

j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.705.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.479.100,- atau 96,75%

k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.115.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.781.100,- atau 96,34%

l. Koordinasi Perencanaan Pembiayaan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.317.100,- atau 90,89%

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 249.825.625,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.5781.351,- atau 94,38% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.935.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.035.250,- atau 96,89%

b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.334.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.028.000,- atau 93,47%

c. Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.745.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.215.250,- atau 93,27%

d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 54.591.025,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.991.000,- atau 93,41%

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK) , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.630.000,- atau 100%

f. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.009.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.910.100,- atau 95,05%

g. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.400.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.521.751,- atau 95,11%

h. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.

66.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.450.000,- atau 94,36%

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 261.148.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 226.688.412,- atau 86,80% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut:
   a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.711.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.552.160,- atau 87,21%
   b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.131.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.557.398,- atau 83,93%
   c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 88.127.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.339.544,- atau 91,16%
   d. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.177.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.239.310,- atau 84,64%
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 449.956.579.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 448.664.249.290,- atau 99,71% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
   a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 440.307.596.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 440.165.145.170,- atau 99,97%
   b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.973.353.876,- dan terealisasi sebesar Rp. 823.475.000,- atau 41,73%
   c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.675.629.120,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.675.629.120,- atau 100%

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pagu Program ini sebesar Rp. 721.899.136,- dan terealisasi sebesar Rp. 686.265.850,- atau 95,06% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 721.899.136,- dan terealisasi sebesar Rp. 686.265.850,- atau 95,06% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyusunan Standar Harga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 225.848.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 223.597.300,- atau 99,00%
   b. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 379.761.636,- dan terealisasi sebesar Rp. 352.602.050,- atau 92,85%
   c. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.342.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.514.000,- atau 94,68%
   d. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.946.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.552.500,- atau 94,64%

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020										
5.02	**KEUANGAN**									
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100,00%**	**21,43%**	**25,01%**	**25,01%**	**100,00%**	**27,64%**	**74,08%**	**74,08%**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu**	**100,00%**	**19,40%**	**35,82%**	**35,82%**	**100,00%**	**34,33%**	**89,55%**	**89,55%**
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100,00%	4 Dok	12 Dok	100,00%
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	4 Dok	66,67%

5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dok	3 Dok	4 Dok	4 Dok	100,00%	3 Dok	10 Dok	142,86%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	100,00%	8 Laporan	16 Laporan	66,67%
5.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi keuanagn PD terlayani tepat waktu**	**100,00%**	**33,33%**	**33,33%**	**33,33%**	**100,00%**	**33,3%**	**100%**	**100,00%**
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100,00%	4 Dok	12 Dok	100,00%
5.02.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik**	**100,00%**	**29,17%**	**12,50%**	**12,50%**	**100,00%**	**31,25%**	**72,92%**	**72,92%**
5.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Dok	14 Dok	5 Dok	5 Dok	100,00%	14 Dok	33 Dok	78,57%
5.02.01.02.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok		1 Dok	-	-			
5.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani**	**100,00%**	**0,09%**	**8,34%**	**7,39%**	**88,64%**	**6,73%**	**14,22%**	**14,22%**
5.02.01.02.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	210 Buah		70 Buah	63 Buah	90%	-	63 Buah	30,00%
5.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210 Buah		70 Buah	-	-	-	-	
5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	2 Laporan	66,67%

5.02.01.02.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan		1 Laporan	-	-		-	
5.02.01.02.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	140 Orang		70 Orang	-	-		-	
5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210 Orang		18 Orang	15 Orang	83%	2 Orang	17 Orang	8,10%
5.02.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang		70 Orang	-	-	67 Orang	67 Orang	47,86%
5.02.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang		70 Orang	-				
5.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan**	**100,00%**	**25,06%**	**36,77%**	**36,77%**	**100,00%**	**37,94%**	**99,77%**	**99,77%**
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	100,00%	50 Unit	150 Unit	100,00%
5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100,00%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00%	2 Jenis	6 Jenis	100,00%
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100,00%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%
5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100,00%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%
5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	100,00%
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kali	50 Kali	100 Kali	100 Kali	100,00%	100 Kali	250 Kali	100,00%
5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Laporan		2 Laporan		-	6 Laporan	6 Laporan	100,00%
5.02.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	100,00%		2 Sistem	66,67%

5.02.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Persentase BMD yang terpenuhi**	**100,00%**	**0,00%**	**15,79%**	**15,79%**	**100,00%**	**13,16%**	**28,95%**	**28,95%**
5.02.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		10 Unit	10 Unit	100,00%	-	10 Unit	50,00%
5.02.01.02.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	48 Unit		16 Unit	-	-	10 Unit	10 Unit	20,83%
5.02.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Jenis		1 Jenis			-	-	
5.02.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	2 Unit	100,00%	-	2 Unit	50,00%
5.02.01.02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	-		-	-	
5.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100,00%**	**35,29%**	**29,41%**	**29,41%**	**100,00%**	**35.29%**	**100,00%**	**100,00%**
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100,00%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00%	3 Jenis	8 Jenis	100,00%
5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00%	2 Unit	6 Unit	100,00%
5.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**	**29,07%**	**29,07%**	**29,07%**	**100,00%**	**29,07%**	**87,22%**	**87,22%**
5.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100,00%	14 Unit	42 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100,00%	51 Unit	51 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		25 Unit					
5.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100,00%	100 Unit	300 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Jenis		1 Jenis					

5.02.01.02.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Jenis		1 Jenis					
5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	3 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	-		-		
5.02.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis		1 Jenis	-		-	-	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan**	**100,00%**	**19,44%**	**24,65%**	**24,65%**	**100,00%**	**25,28%**	**69,37%**	**69,37%**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan**	**100,00%**	**27,08%**	**29,17%**	**29,17%**	**100,00%**	**33,33%**	**91,67%**	**91,67%**
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Kali		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Kali	66,67%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Kali		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Kali	66,67%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	3 Kali		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Kali	66,67%
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%

5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	3 Dok	1 Dok	2 Dok	-	-	1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**	**100%**	**16,67%**	**33,33%**	**33,33%**	100,00%	**33,33%**	**83,33%**	**83,33%**
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	4 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	4 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan PenempatanUang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Dok	66,67%

5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	4 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**	**100,00%**	**0,67%**	**0,67%**	**0,67%**	**100,00%**	**1,12%**	**1,12%**	**2,47%**
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dok		1 Dok	-	-	-	-	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dok		1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	33,33%
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok		1 Dok	-		-	-	

5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok		1 Dok	-		-	-	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dok		1 Dok	-		1 Dok	1 Dok	33,33%
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dok		1 Dok	-		-	-	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	421 Orang		141 Orang	-		-	-	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan**	**100,00%**	**33,33%**	**33,33%**	**33,33%**	**100,00%**	**33,33%**	**100,00%**	**100,00%**
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100,00%**	**14,90%**	**15,14%**	**15,14%**	**100,00%**	**15,14%**	**45,18%**	**45,18%**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Laporan BMD yang tersusun**	**100,00%**	**14,90%**	**15,14%**	**15,14%**	**100,00%**	**15,14%**	**45,18%**	**45,18%**
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	5 Dok	100,00%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	14 Dok & 568 Sertifikat	4 Dok	5 Dok & 284 Sertifikat	5 Dok & 49 Sertifikat	100,00%	5 Dok	14 Dok	100,00%
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	42 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	100,00%	14 Dok	42 Dok	100,00%

5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100,00%	4 Dok	12 Dok	100,00%
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1179 Orang	164 Orang	164 Orang	164 Orang	100,00%	164 Orang	492 Orang	41,73%
Jumlah			**100,00%**	**18,59%**		**21,60%**		**22,69%**	**62,88%**	**62,88%**

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK//IKD

No	Indikator	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Ket
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	
1	APM							
2	SD							
3	SMP							
4	RLS							
5	HLS							
6	DLL							

BAB III
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bangkalan, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kaulitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan pada BPKAD Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2		4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD tepat waktu	100%	100%	
					Penyampaian LKPD tepat waktu	100%	100%	
					Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2.83	2.83	
				Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	65.00	65.00	
					Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	90.00	90.00	

Tabel 3.2 Matrix Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Kerja Tahun 2024				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024					Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Laporan Keuangan yang sesuai ketentuan Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu**	**Bangkalan**	**100% 100%**	**419.805.137.207**	**DAUM**	**Persentase Laporan Keuangan yang sesuai ketentuan Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu**	**Bangkalan**	**100% 100%**	**432.421.009.776**	**DAUM**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan**	**Bangkalan**	**100%**	**2.014.000.000**	**DAUM**	**Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan**	**Bangkalan**	**100%**	**1.245.300.000**	**DAUM**	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Bangkalan	2 Dok	53.139.000	DAUM	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Bangkalan	2 Dok	20.965.000	DAUM	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Bangkalan	2 Dok	53.139.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Bangkalan	2 Dok	20.965.000	DAUM	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	17.750.000	DAUM	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	22.500.000	DAUM	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	17.750.000	DAUM	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	13.500.000	DAUM	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	38.915.000	DAUM	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	20.000.000	DAUM	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	38.915.000	DAUM	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	0	DAUM	

5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bangkalan	2 Dok	621.303.000	DAUM	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bangkalan	2 Dok	427.032.000	DAUM	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bangkalan	2 Dok	597.166.000	DAUM	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bangkalan	2 Dok	406.074.500	DAUM	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bangkalan	1 Dok	522.690.000	DAUM	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bangkalan	1 Dok	314.263.500	DAUM	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bangkalan	1 Dok	37.368.000	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bangkalan	1 Dok	0	DAUM	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bangkalan	1 Dok	10.115.000	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bangkalan	1 Dok	0	DAUM	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bangkalan	1 Dok	5.750.000	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bangkalan	1 Dok	0	DAUM	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku**	**Bangkalan**	**100%**	**149.788.750**	**DAUM**	**Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku**	**Bangkalan**	**100%**	**72.000.000**	**DAUM**	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bangkalan	2 Dok	18.061.000	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bangkalan	2 Dok	13.850.000	DAUM	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan	Bangkalan	2 Dok	7.843.650	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan	Bangkalan	2 Dok	24.836.000	DAUM	

	Kas dan SPD	SPD					SPD					
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bangkalan	2 Dok	1.063.550	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bangkalan	2 Dok	0	DAUM	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bangkalan	2 Dok	26.115.250	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bangkalan	2 Dok	18.770.000	DAUM	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoto ngan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bangkalan	1 Laporan	1.054.100	DAUM	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bangkalan	1 Laporan	14.544.000	DAUM	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bangkalan	1 Dok	1.049.900	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bangkalan	1 Dok	0	DAUM	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Bangkalan	2 Dok	13.520.450	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Bangkalan	2 Dok	0	DAUM	

	Terkait	Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bangkalan	2 Dok	81.080.850	DAUM	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bangkalan	2 Dok	0	DAUM	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu**	**Bangkalan**	**100%**	**312.683.500**	**DAUM**	**Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu**	**Bangkalan**	**100%**	**58.566.650**	**DAUM**	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bangkalan	1 Dok	21.065.100	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bangkalan	1 Dok	0	DAUM	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bangkalan	1 Laporan	33.841.950	DAUM	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bangkalan	1 Laporan	3.022.150	DAUM	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Bangkalan	1 Laporan	131.779.650	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Bangkalan	1 Laporan	19.487.500	DAUM	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	Bangkalan	1 Dok	119.026.000	DAUM	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	Bangkalan	1 Dok	36.057.000	DAUM	

	Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bangkalan	1 Dok	6.970.800	DAUM	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bangkalan	1 Dok	0	DAUM	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan**	**Bangkalan**	**100%**	**417.328.664.957**	**DAUM**	**Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan**	**Bangkalan**	**100%**	**431.045.143.126**	**DAUM**	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan	Bangkalan	4 Laporan	406.666.376.000	DAUM	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan	Bangkalan	4 Laporan	421.161.416.700	DAUM	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bangkalan	2 Laporan	3.000.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bangkalan	2 Laporan	804.657.000	DAUM	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagiHasil Kabupaten/Kota	Bangkalan	4 Laporan	7.662.288.957	DAUM	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagiHasil Kabupaten/Kota	Bangkalan	4 Laporan	9.079.069.426	DAUM	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**2.040.120.194**	**DAUM**	**Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**Bangkalan**	**100%**	**803.035.850**	**DAUM**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun**	**Bangkalan**	**100%**	**2.040.120.194**	**DAUM**	**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun**	**Bangkalan**	**100%**	**803.035.850**	**DAUM**	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Bangkalan	2 Dok	273.442.750	DAUM	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Bangkalan	2 Dok	235.240.400	DAUM	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlag Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Bangkalan	14 Laporan	18.507.500	DAUM	Jumlag Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Bangkalan	14 Laporan	0	DAUM	

5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bangkalan	5 Dok	1.620.120.194	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bangkalan	5 Dok	480.240.750	DAUM	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	4 Laporan	28.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	4 Laporan	87.554.700	DAUM	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Bangkalan	4 Laporan	77.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Bangkalan	4 Laporan	0	DAUM	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangkalan	164 Org	23.049.750	DAUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangkalan	164 Org	0	DAUM	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Bangkalan**	**82.00 Indeks**	**37.639.257.885**	**DAUM**	**Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Bangkalan**	**82.00 Indeks**	**37.328.153.836**	**DAUM**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu**	**Bangkalan**	**100%**	**92.400.000**	**DAUM**	**Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu**	**Bangkalan**	**100%**	**6.606.600**	**DAUM**	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	2 Dok	12.400.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	2 Dok	2.277.650	DAUM	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Bangkalan	1 Dok	17.000.000	DAUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Bangkalan	1 Dok	1.215.850	DAUM	

		SKPD					SKPD					
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	17.000.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	1.086.700	DAUM	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	7.000.000	DAUM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	0	DAUM	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	7.000.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	0	DAUM	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	6 Laporan	15.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	6 Laporan	2.026.400	DAUM	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	8 Laporan	17.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	8 Laporan	0	DAUM	
5.02.01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu**	**Bangkalan**	**100%**	**32.771.580.135**	**DAUM**	**Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu**	**Bangkalan**	**100%**	**32.714.823.588**	**DAUM**	
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	51 Orang/b ulan	32.747.580.135	DAUM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	51 Orang/b ulan	32.695.897.788	DAUM	

5.02.01.02.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	2 Laporan	12.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	2 Laporan	13.776.850	DAUM	
5.02.01.02.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bangkalan	4 Laporan	12.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bangkalan	4 Laporan	5.148.950	DAUM	
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik**	**Bangkalan**	**100%**	**14.000.000**	**DAUM**	**Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik**	**Bangkalan**	**100%**	**1.951.200**	**DAUM**	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	1 Dok	7.000.000	DAUM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	1 Dok	0	DAUM	
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	14 Laporan	7.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	14 Laporan	1.951.200	DAUM	
5.02.01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani**	**Bangkalan**	**100%**	**25.000.000**	**DAUM**	**Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani**	**Bangkalan**	**100%**	**12.928.363**	**DAUM**	
5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	1 Dok	7.000.000	DAUM	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	1 Dok	12.928.363	DAUM	
5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Bangkalan	2 org	11.000.000	DAUM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Bangkalan	2 org	0	DAUM	

		Pelatihan					Pelatihan					
5.02.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bangkalan	67 org	7.000.000	DAUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bangkalan	67 org	0	DAUM	
5.02.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan**	**Bangkalan**	**100%**	**418.813.650**	**DAUM**	**Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan**	**Bangkalan**	**100%**	**385.866.585**	**DAUM**	
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	4 Paket	13.000.000	DAUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	4 Paket	5.614.200	DAUM	
5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	18 Paket	80.116.250	DAUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	18 Paket	60.829.385	DAUM	
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	35.500.000	DAUM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	12.204.000	DAUM	
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	130.960.400	DAUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	79.821.000	DAUM	
5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	Bangkalan	1 Dok	8.300.000	DAUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	Bangkalan	1 Dok	4.860.000	DAUM	
5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	4 Laporan	11.550.000	DAUM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	4 Laporan	10.500.000	DAUM	
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	4 Laporan	135.827.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	4 Laporan	212.038.000	DAUM	

5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	2 Dok	3.560.000	DAUM	Jumlah Dokumen Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	2 Dok	0	DAUM	
5.02.01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**100%**	**131.714.100**	**DAUM**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**100%**	**0**	**DAUM**	
5.02.01.02.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	10 Unit	131.714.100	DAUM	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	10 Unit	0	DAUM	
5.02.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**100%**	**3.555.470.000**	**DAUM**	**Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**Bangkalan**	**100%**	**3.986.595.000**	**DAUM**	
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	4 Laporan	7.020.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	4 Laporan	1.500.000	DAUM	
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bangkalan	4 Laporan	269.850.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bangkalan	4 Laporan	237.250.000	DAUM	
5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	4 Laporan	3.278.600.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	4 Laporan	3.747.845.000	DAUM	
5.02.01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**Bangkalan**	**100%**	**630.280.000**	**DAUM**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**Bangkalan**	**100%**	**219.382.500**	**DAUM**	
5.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bangkalan	22 Unit	120.000.000	DAUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bangkalan	22 Unit	95.490.000	DAUM	
5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang yang Dipelihara dan Dibayarakan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	51 Unit	140.150.000	DAUM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang yang Dipelihara dan Dibayarakan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	51 Unit	87.892.500	DAUM	

5.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bangkalan	167 Unit	105.030.000	DAUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bangkalan	167 Unit	31.000.000	DAUM	
5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Bangkalan	1 Unit	265.100.000	DAUM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Bangkalan	1 Unit	5.000.000	DAUM	
Jumlah					**459.484.515.286**		**Jumlah**			**470.552.199.462**		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis BPKAD Tahun 2024-2028, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangkalan 2024- 2028, sehingga tahun ini merupakan awal perencanaan target kinerja.

Target kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja yang ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program PD secara umum dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Penetapan Perubahan Renja PD yang berada dipertengahan tahun anggaran memiliki rentang waktu yg cukup lama dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal ini tentunya memberikan peluang adanya pergeseran atau perubahan rencana yang akan dilakukan pada proses penganggaran dalam RAPBD. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal di Kabupaten Bangkalan, antara lain :

a. Perubahan kebijakan atau Peraturan dan Perundangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
b. Perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat;
c. Ketersediaan anggaran yang tersedia;
d. Dan beberapa hal lain yang mempengaruhi kebijakan penganggaran. Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan

Perubahan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktruktif sangat kami harapkan dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Bangkalan tahun 2024, kami sampaikan banyak terima kasih semoga dokumen rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 bermanfaat sebagaimana mestinya

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA BPKAD
KABUPATENBANGKALAN

ABDUL AZIZ, S.Si
NIP. 19740729 200312 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahi Wataala pada akhirnya Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Namun menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan dalam penyusunan Rencana Kerja ini oleh karena berbagai keterbatasan yang ada, untuk itu saran perbaikan sangat kami harapkan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh baik dari dalam maupun dari organisasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu organisasi pemerintah daerah berusaha meningkatkan kinerja sumberdaya organisasi dengan langkah-langkah yang tertuang dalam Perubahan RENJA sebagaimana tersaji. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak terutama Bapak Bupati Bangkalan dan DPRD Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan Tujuan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR KABUPATEN BANGKALAN

ARI MURFIANTO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790416 199711 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Proses penyusunan Renja PD terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap pelaksanaan forum PD, tahap perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan renja PD. Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penctapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ini kemudian dijabarkan menjadi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk untuk dijadikan pedoman dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap Perangkat Daerah (PD) yang merupakan bagian terintegrasi dari pemerintah daerah juga wajib untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis rencana pembangunan daerah (RPD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan. Renja PD digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Dalam proses penyusunannya, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan tahun 2024 merupakan penjabaran tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang kemudian juga akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahanan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan- Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 81/Kep/2020 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E)
15. eraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026
20. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung

oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan pada tahun anggaran 2024.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan perubahan RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2024
2. Memasukkan program dan kegiatan pada perubahan renja ini ke dalam KUPA-PAS tahun 2024
3. Sebagai panduan mengevaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah 2024
- 3.3. Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu pada proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun yang akan datang, yang dalam hal ini adalah Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024, maka harus terlebih dahulu melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Aparatur Kabupaten Bangkalan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perubahan Perencanaan Strategis (P-Renstra) PD Semester 1 Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**		***100%***	**100%**	**97,09%**	**97,09%**			

5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		***100%***	**100%**	**100%**	**100%**			
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan LaporanHasil		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			

		Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD								
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			

5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16 laporan	8 laporan	8 laporan	100%			
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		69 Org/Bln	69 Org/Bln	69 Org/Bln	100%			

5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 laporan	18 laporan	18 laporan	100%			
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

		RealisasiAnggaran								
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD		28 laporan	14 laporan	14 laporan	100%			
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan Administrasi Umum**		**98.70%**	**90%**	**89%**	**98%**			

		Perangkat Daerah								
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan		76 Paket	26 Paket	26 Paket	100%			
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		17 jenis	4 Paket	4 Paket	100%			
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 jenis	2 Paket	2 Paket	100%			
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		10 jenis	4 paket	4 paket	100%			
5.03.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		9 jenis	3 dokumen	3 dokumen	100%			

		Undangan yang Disediakan								
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		6 kali	4 laporan	4 laporan	100%			
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD		25 kali	10 Laporan	15 Laporan	130%			
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**			
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan		38 unit	0 Unit	0 Unit	0%			

5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**95%**	**95%**	**100%**			
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5 Jenis	2 laporan	2 laporan	100%			
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan		6 Jenis	12 laporan	12 laporan	100%			
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan		20 Jenis	12 laporan	12 laporan	100%			
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**100%**	**80%**	**80%**	**100%**			

	Pemerintahan Daerah	**Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**								
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		40 unit	20 unit	20 unit	100%			
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 unit	1 unit	1 unit	100%			
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		46 unit	17 Unit	17 Unit	100%			

5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	1 unit	1 unit	100%			
5:03:02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi data dan informasi kepegawaian**		**90%**	**90%**	**90%**	**100%**			
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi yang dilaksanakan**		**5 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**100%**			
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%			

5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan		3 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1 kegiatan	0 lembaga	0 lembaga	0%			
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 aplikasi	0 dokumen	0 dokumen	100%			
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		92 orang	1 dokumen	` dokumen	100%			
5:03:02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu**		**85%**	**85%**	**85%**	**100%**			

5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Administrasi kepegawaian yang terlayani**		**3385 data**	**2700 data**	**2381 data**	**88,18%**			
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		1222 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2896 lembar	2 dokumen	2 dokumen	100%			
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		15 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			

5:03:02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional, sosiokultural, dan pengembangan kompetensi lainnya serta penilaian / evaluasi kompetensi**		**100%**	**9%**	**9%**	**100%**			
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensinya**		**200 orang**	**23 Orang**	**23 Orang**	**100%**			
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya		89 orang	0 Orang	0 Orang	0%			
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		111 orang	0 Orang	0 Orang	0%			

5.03.02.2.03.06	Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan			23 orang	23 orang	100%			
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase ASN yang memenuhi kriteria penilaian, penghargaan, dan hukuman disiplin**		**90%**	**88%**	**88%**	**100%**			
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Peserta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur**		**414 orang**	**290 orang**	**290 orang**	**100%**			
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		142 orang	1 dokumen	1 dokumen	100%			

5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		130 orang	1 laporan	1 laporan	100%			
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		442 orang	100 orang	100 orang	100%			
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		200 orang	60 orang	60 orang	100%			
5.04	**Urusan Pendidikan dan Pelatihan**									
5:04:02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase PNS yang mengikuti latsar, sertifikasi, kelembagaan serta pengembangan kompetensi**		**97,9%**	**7%**	**7%**	**100%**			

		manajerial dan kompetensi teknis								
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensi teknisnya**		**60 orang**	**30 orang**	**30 orang**	**100%**			
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		60 Orang	30 orang	30 orang	100%			

5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**466 orang**	**1 orang**	**1 orang**	**100%**			
5.04.02.2.02.01	Penyusunan kebijakan Teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi, pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,		466 orang	1 dokumen	1 dokumen	100%			

	dan prajabatan, serta jabatan fungsional	Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun								
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**87**					**85**	**0**	**97,70%**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**					**100%**	**46.67%**	**100%**
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen					2 dokumen	1 dokumen	33,33%

5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen					1 dokumen	0 dokumen	33,33%
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen					1 dokumen	0 dokumen	33,33%
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen					1 dokumen	1 dokumen	33,33%

5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen					1 dokumen	0 dokumen	33,33%
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan					1 laporan	1 laporan	33,33%
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	24 Laporan					8 laporan	4 laporan	33,33%

		Kinerja Perangkat Daerah								
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**					**100%**	**88.30%**	**100%**
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	207 Org/Bln					74 Org/Bln	74 Org/Bln	35,74%
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	33,33%

5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	54 Laporan					18 laporan	9 laporan	33,33%
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 dokumen					1 dokumen	0 dokumen	33,33%
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat**	**100%**					**100%**	**53%**	**100%**

		daerah yang tersusun								
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	33,33%
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Laporan					14 Laporan	7 laporan	33,33%
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**90%**					0%	0%	**0%**
5.03.01.2.05.03	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	5 Orang					0 orang	0 orang	0%

		Pendidikan dan Pelatihan								
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95%**					**100%**	**63.46%**	**100%**
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	78 Paket					25 Paket	15 Paket	32,05%
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket					4 Paket	2 Paket	33,33%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket					2 Paket	1 Paket	33,33%

5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket					4 Paket	2 Paket	33,33%
5.03.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen					3 dokumen	3 dokumen	33,33%
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan					4 laporan	0 laporan	33,33%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan					10 Laporan	10 Laporan	33,33%
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**80%**					**0**	**0**	**0%**

	Pemerintahan Daerah	**Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**								
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit					0	0	0%
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**					**100%**	**80.22%**	**100%**
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan					2 laporan	2 laporan	33,33%
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan					12 laporan	6 laporan	33,33%

5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 laporan					12 laporan	6 laporan	33,33%
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**90%**					**100%**	**50.91%**	**100%**
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit					28 Unit	20 Unit	46,67%

5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit					1 Unit	1 unit	33,33%
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit					25 Unit	7 Unit	64,10%
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit					1 unit	0 unit	33,33%
5:03:02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Updating Data Kepegawaian**	**95%**					**91%**	**0%**	**95,78%**
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Capaian Kebutuhan ASN Sesuai Formasi**	**94%**					**90%**	**30%**	**95,74%**

5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan RencanaKebutuhan,Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen					0 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen KegiatanKoordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen					1 Dokumen	0 Dokumen	33,33%
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga					1 Lembaga	1 Lembaga	33,33%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen					0 Dokumen	0 Dokumen	0%

5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	6 Dokumen					1 Dokumen	0 Dokumen	16,67%
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	3 laporan					0 Laporan	0 Laporan	0%
5:03:02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**97%**					**95%**	**0%**	**97,93%**
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase JabatanStruktural yang terisi**	**100%**					**90%**	**54%**	**90%**
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%

		Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah								
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen					3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
5:03:02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP**	**25%**					**15%**	**0%**	**60%**
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensinya dan Dievaluasi**	**273 Orang**					**12 Orang**	**0 Orang**	**4,39%**

5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9 Orang					0 Orang	0 Orang	0%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	18 Orang					0 Orang	0 Orang	0%
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	Jumlah aparatur peserta sertifikasi jabatan ASN	216 Orang					12 Orang	0 orang	5,55%
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	30 Orang					0 Orang	0 Orang	0%
5:03:02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase ASN yang memiliki Predikat Kinerja Baik**	**68%**					**64%**	**0%**	**94,11%**
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dan Proses Ijin Perceraian**	**100%**					**100%**	**63%**	**96%**

5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	33,33%
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang					100 Orang	100 Orang	33,33%
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300 Orang					60 Orang	0 Orang	20%
5.04	**Urusan Pendidikan dan Pelatihan**									

5:04:02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**25%**					**15%**	**0%**	**60%**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Teknisnya**	**90 Orang**					**2 Orang**	**0 Orang**	**2,22%**
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Orang					2 Orang	0 Orang	2,22%

5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**188 Orang**					**2 Orang**	**2 Orang**	**1,06%**
5.04.02.2.02.01	Penyusunan kebijakan Teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi, pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, TenagaPengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%

	dan prajabatan, serta jabatan fungsional	Kepemimpinan dan prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun								

Dari tabel 2.1. diatas menunjukkan bahwa evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun 2024 yang merupakan tahun awal dari Renstra 2024-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan tahun 2024 masih rendah dikarenakan hal ini masih dalam tahap awal dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan pada Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA)
Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Tujuan				**Sasaran**				
Uraian	**Indikator Kinerja**	**Target**		**Uraian**	**Indikator Kinerja**	**Target**		Ket.
		Renstra 2024	**Perubahan Renja Th 2024**			**Renstra 2024**	**Peruabahan Renja Th 2024**	
Meningkatnya Kualitas (Profesionalitas) Sumber Daya Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Indeks Profesionalitas ASN	62	62	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara ASN	Persentase ASN yang Meningkat Predikat Keprofesionalannya	55%	55%	
					Persentase ASN yang Mengikuti Pengembang	12%	12%	

					an Kompetensi			
				Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Nilai SAKIP BKPSDA	64	64	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	85	85	

3.2. Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024

Adapun Matrik program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan pada Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024

Nama PD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJA 2024					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024						CATATAN PENTING
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11-6	14
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR				**10,165,652,685.00**					**8,986,417,791.00**		**-1,179,234,894.00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**10,165,652,685.00**					**8,986,417,791.00**		**-1,179,234,894.00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**8,670,652,685.00**					**8,788,417,791.00**		**117,765,106.00**	

5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**85 Indeks**	**7,325,652,685.00**	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**85 Indeks**	**7,622,917,791.00**	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**297,265,106.00**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		**100 %**	**10,000,000.00**	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	***Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		**100 %**	**4,000,000.00**	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**-6,000,000.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**

5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2 Dokumen	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		1 Dokumen	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.01.0003	. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*		1 Dokumen	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												

		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*		1 Dokumen	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*		1 Dokumen	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	2,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		1 Laporan	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Laporan	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		8 Laporan	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi***		**100 %**	**6,301,852,685.00**		***Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi***		**100 %**	**6,980,951,568.00**		**679,098,883.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		69 Orang/bulan	6,298,852,685.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		74 Orang/bulan	6,979,451,568.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	680,598,883.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		18 Laporan	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*		18 Laporan	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis		1 Dokumen	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis*		1 Dokumen	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

		Realisasi Anggaran				ALOKASI UMUM	*Realisasi Anggaran*				ALOKASI UMUM		SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun***		**100 %**	**2,000,000.00**		***Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun***		**100 %**	**1,000,000.00**		**-1,000,000.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**
5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*		1 Dokumen	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

						UMUM				UMUM		APARATUR
5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		14 Laporan	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*		14 Laporan	500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***		**100 %**	**10,000,000.00**		***Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***		**100 %**	**0.00**		**-10,000,000.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**

5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*		0 Orang	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-10,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**95 %**	**61,458,400.00**		***Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**95 %**	**62,047,500.00**		**589,100.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		26 Paket	20,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		25 Paket	10,525,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10,525,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		4 Paket	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	4,860,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		2 Paket	4,860,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4,860,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	1,294,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		4 Paket	1,358,500.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1,358,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	4,020,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		3 Dokumen	4,020,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4,020,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	1,340,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*		4 Laporan	1,340,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1,340,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10 Laporan	19,944,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		14 Laporan	29,944,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	29,944,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***		**80 %**	**5,757,400.00**		***Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***		**0 %**	**0.00**		**-5,757,400.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**

5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	5,757,400.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*		0 Unit	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-5,757,400.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**100 %**	**754,584,200.00**		***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**100 %**	**518,132,223.00**		**-236,451,977.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**

5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	7,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		2 Laporan	7,590,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7,590,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	171,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		12 Laporan	139,207,223.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-31,792,777.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	576,584,200.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		12 Laporan	371335000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-205,249,200.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***		**90 %**	**180,000,000.00**		***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***		**90 %**	**56,786,500.00**		**-123,213,500.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
		Jumlah Kendaraan Perorangan		20 Unit	155,000,000.00	DANA TRANSFER	*Jumlah Kendaraan Perorangan*		28 Unit	35,286,500.00	DANA TRANSFER	35,286,500.00	BADAN KEPEGAWAIAN

		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				UMUM-DANA ALOKASI UMUM		DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*		1 Unit	5,500,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5,500,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		13 Unit	5,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*		25 Unit	6,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		1 Unit	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-5,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAW**	**Persentase Updating Data**		**91 %**	**1,345,000,000.00**		**Persentase Updating Data**		**91 %**	**1,165,500,000.00**		**-179,500,000.00**	

	AIAN DAERAH	**Kepegawaian**					**Kepegawaian**						
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	***Persentase Capaian Kebutuhan ASN Sesuai Formasi***		**90 %**	**305,000,000.00**		***Persentase Capaian Kebutuhan ASN Sesuai Formasi***		**90 %**	**508,000,000.00**		**203,000,000.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN												
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana		1 Dokumen	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana*		0 Dokumen	0.00	DANA TRANSFER UMUM-	-10,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEM

		Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				DANA ALOKASI UMUM	*Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN*				DANA ALOKASI UMUM		BANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK												
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen	250,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*		1 Dokumen	495,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	245,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN												
		Jumlah Lembaga Profesi ASN		1 Lembaga	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM	*Jumlah Lembaga Profesi ASN*		1 Lembaga	1,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM	-14,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

		yang Difasilitasi				M-DANA ALOKASI UMUM	*yang Difasilitasi*				M-DANA ALOKASI UMUM		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian												
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*		0 Dokumen	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-10,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian												
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data		2 Dokumen	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data*		1 Dokumen	12,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	2,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

		Kepegawaian				ALOKASI UMUM	*Kepegawaian*				ALOKASI UMUM		SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian												
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Laporan	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian*		0 Laporan	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-10,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	***Persentase Jabatan Struktural Yang Terisi***		**90 %**	**245,000,000.00**		***Persentase Jabatan Struktural Yang Terisi***		**90 %**	**350,000,000.00**		**105,000,000.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEM**

													BANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN												
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		1 Dokumen	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*		1 Dokumen	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-5,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN												

		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2 Dokumen	30,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*		1 Dokumen	15,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-15,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN												
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 Dokumen	200,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*		3 Dokumen	325,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	125,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	***Jumlah ASN Yang Dikembangkan***		**91 Orang**	**725,000,000.00**		***Jumlah ASN Yang Dikembangkan***		**40 Orang**	**267,000,000.00**		**-458,000,000.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**

		Kompetensinya dan Dievaluasi					***Kompetensinya dan Dievaluasi***						**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN												
		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya		3 Orang	25,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya*		0 Orang	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-25,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN												
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		6 Orang	25,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*		0 Orang	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-25,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

						ALOKASI UMUM					ALOKASI UMUM		SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN												
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan		72 Orang	650,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan*		40 Orang	267,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-383,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN												
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		1 Laporan	25,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN*		0 Laporan	0.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-25,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

						UMUM				UMUM		APARATUR
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	***Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dan Proses Izin Perceraian***		**96 %**	**70,000,000.00**		***Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dan Proses Izin Perceraian***		**96 %**	**40,500,000.00**		**-29,500,000.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	20,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*		1 Dokumen	12,220,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-7,780,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Laporan	20,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*		1 Laporan	10,770,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-9,230,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai											
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		100 Orang	10,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*		100 Orang	7,674,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-2,326,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN											

		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		100 Orang	20,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*		60 Orang	9,836,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-10,164,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1,495,000,000.00**					**198,000,000.00**		**-1,297,000,000.00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang Melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**15 %**	**1,495,000,000.00**		**Persentase ASN yang Melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**15 %**	**198,000,000.00**		**-1,297,000,000.00**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	***Jumlah ASN yang dikembangkan***		**30 Orang**	**95,000,000.00**		***Jumlah ASN yang dikembangkan***		**2 Orang**	**25,000,000.00**		**-70,000,000.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEM**

		kompetensi teknisnya					***kompetensi teknisnya***						**BANGAN SUMBER DAYA APARATUR**
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum												
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		30 Orang	95,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*		2 Orang	25,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-70,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial**	***Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi***		**61 Orang**	**1,400,000,000.00**		***Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi***		**3 Orang**	**173,000,000.00**		**-1,227,000,000.00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

	dan Fungsional	***Manajerial dan Fungsional***					***Manajerial dan Fungsional***						**APARATUR**
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional												
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan		1 Dokumen	1,400,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan*		1 Dokumen	173,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-1,227,000,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

		Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun					*Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun*					
J U M L A H					**10,165,652,685.00**				**8,986,417,791.00**		**-1,179,234,894.00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini yang berisi prioritas program dan kegiatan akan membantu dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026, serta guna mencapai target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024.

Sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah P-RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan perlu turut menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2024. Dalam proses penyusunannya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini tetap berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan 2024-2026 yang kemudian juga akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024.

Bangkalan, Agustus 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Aparatur Kabupaten Bangkalan

ARI MURFIANTO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790416 199711 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga **"Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan"** Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun.

Melalui penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan akan diperoleh secara jelas dan rinci gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam perubahan kelembagaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan tahun anggaran 2024, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun – tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kita semua.

Plt. KEPALA BALITBANGDA
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. DAMBANG BUDI MUSTIKA, SPd. Mpd
NIP. 19670601 198603 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Rencana Kerja (Renja) PD dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan menjadi Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD. Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tersebut meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

4. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Renja PD Tahun 2024.

Pada perkembangannya beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan Balitbangda pada Tahun 2024 harus dilakukan penyesuaian dan pergeseran pagu, hal ini dikarenakan antara lain perubahan kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga dan beberapa kegiatan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Dengan adanya perkembangan tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Balitbangda Tahun 2024 yang dituangkan ke dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Balitbangda Tahun 2024.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis antara lain:

1. Menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
3. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
4. Dan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya

dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Proses Penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD, Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tahapan dan skala prioritas yang

ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan.

RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Strategis Balitbangda Tahun 2024 - 2026 untuk jangka waktu 3 tahun sesuai tugas dan tupoksi Balitbangda dan lebih didetailkan lagi melalui Rencana Kerja Balitbangda setiap tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Selanjutnya Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan RKA - PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Depdagri Dan Pemda;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-444 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020-2024
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah:

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Balitbangda pada setiap tahun anggaran;
b. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Balitbangda Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab 4 PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh PD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Pelaksanaan rencana pembangunan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2024 ini dititikberatkan pada program utama yang meliputi :

A. Program Penelitian dan Pengembangan ;
B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;

Dari program-program diatas, Belanja pembangunan Balitbangda pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.193.037.443 mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 3.891.760.501, dan pada triwulan II telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.228.801.555,- atau sebesar 35,68 % dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan :

A. Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan :
   1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan sub kegiatan :
      a) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil

Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan target 1 laporan. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 2.460.000,-

b) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,- Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa dengan target 1 laporan. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 8.970.000,-

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan :
   a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 4.498.850,-
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan :
   a) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.542.200,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dengan target 1 dokumen.
   b) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.155.300,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan target 1 dokumen.
   c) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.155.600,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah

Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 1.350.000,-

d) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.146.900,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 61.496.900,-

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan sub kegiatan :

a) Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 256.206.950,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 112.755.450,-

b) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan alokasi dana sebesar Rp. 43.768.050,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan target 1 laporan. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 1.230.000,-

c) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.025.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan target 1 laporan.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan dukungan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.000.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 2 dokumen. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 1.798.500,-

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target 1 dokumen.

c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yaitu dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 225.000,-

d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target 1 dokumen.

e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen.

f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.290.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 3 laporan. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 1.850.700,-.

g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.500.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 4 laporan. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 622.200,-

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.043.368.483,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 30 org/ bulan. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 1.539.837.153,-
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.000.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 3 dokumen. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 1.999.800,-
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.500.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan target 6 laporan. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 847.200,-
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
   a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 131.700,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi 100% sebesar Rp. 131.700,-

b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.135.850,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 14 laporan. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi 100% sebesar Rp. 1.135.850,-

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 533.500,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 4 paket. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi 100% yaitu sebesar Rp. 533.500,-

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.737.800,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 4 paket. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi 2 paket yaitu sebesar Rp. 3.776.950,-

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.046.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target 4 paket. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi 2 paket yaitu sebesar Rp. 1.302.000,-.

d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.429.610,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 4 paket. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi 2 paket yaitu sebesar Rp 2.740.750,-.

e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.090.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan

target 25 laporan. Sampai dengan Triwulan II sudah terealisasi 15 laporan yaitu sebesar Rp. 7.870.000,-

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
   a) Pengadaan Mebel dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.336.000,-. Output sub kegiatan ini Jumlah unit Mebel yang Disediakan dengan target 1 unit.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan
   a) Penyediaan Jasa Surat- Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.430.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat dengan target 4 laporan. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi 2 laporan yaitu sebesar Rp. 3.800.000,-,-
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 36.600.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 4 laporan. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi 2 laporan yaitu sebesar Rp. 10.929.665,-
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 309.765.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 4 laporan. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi 2 laporan yaitu sebesar Rp. 173.809.844,-
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.650.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya dengan target 8 unit. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi 7 unit yaitu sebesar Rp. 2.892.800,-

b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 900.000,-. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan target 12 unit. Sampai dengan triwulan II sudah terealisasi 100% yaitu sebesar Rp. 900.000,-

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1 Berikut

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Balitbangda Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6 x100		9		10=(5 +7+9)		11=(5+7 +10/4)
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**30%**	**305.913.332**									**30%**	**240.000.000**	**30%**	**240.000.000**	**33,33**
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yg disusun**	**4 dokumen**	**103.386.666**									**2 dokumen**	**190.000.000**	**2 dokumen**	**190.000.000**	**50,00**
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah laporan Hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan											1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	0,00
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 laporan	52.526.666													0,00
5.05.02.2.01.09	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 laporan	25.430.000									1 laporan	90.000.000	1 laporan	90.000.000	100,00
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 laporan	25.430.000													0,00
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**5 dokumen**	**202.526.666**									**1 dokumen**	**50.000.000**	**1 dokumen**	**50.000.000**	**20,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6 x100		9		10=(5 +7+9)		11=(5+7 +10/4)
		yg disusun															
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 dokumen	150.000.000									1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	33,33
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 dokumen	52.526.666									0 dokumen	0	0	0	0,00
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**30%**	**155.913.335**									**30%**	**200.000.000**	**30%**	**200.000.000**	**33,33**
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yg disusun**	**9 dokumen**	**155.913.335**									**4 dokumen**	**200.000.000**	**4 dokumen**	**200.000.000**	**44,44**
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	3 dokumen	51.971.112									0 dokumen	0	0 dokumen	0	0,00
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0 dokumen	0									1 dokumen	1.542.200	1 dokumen	1.542.200	0,00
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Perkebunan,dan Pangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	3 dokumen	51.971.112									1 dokumen	66.155.300	1 dokumen	66.155.300	33,33
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 dokumen	0									1 dokumen	66.155.600	1 dokumen	66.155.600	0,00
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 dokumen	0									1 dokumen	66.146.900	1 dokumen	66.146.900	0,00
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	3 dokumen	51.971.112									0 dokumen	0	0 dokumen	0	0,00
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase inovasi dan teknologi yang**	**88%**	**131.913.336**									**84%**	**310.000.000**	**84%**	**310.000.000**	**31,82**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6 x100		9		10=(5+7+9)		11=(5+7+10/4)
		termanfaatkan dalam pembangunan															
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Inovasi yang terdaftar dalam IGA dan teknologi yang terfasilitasi HKI**	**3 inovasi**	**131.913.336**									**1 inovasi**	**310.000.000**	**1 inovasi**	**310.000.000**	**33,33**
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 dokumen	74.913.336									1 dokumen	256.206.950	1 dokumen	256.206.950	**33,33**
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	3 laporan	36.000.000									1 laporan	43.768.050	1 laporan	43.768.050	**33,33**
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 laporan	21.000.000									1 laporan	10.025.000	1 laporan	10.025.000	**33,33**
5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83,5**	**11.030.747.663**									**82,5**	**3.443.037.443**	**82,5**	**3.443.037.443**	**32,93**
5.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**42.500.000**									**100 %**	**8.790.000**	**100 %**	**8.790.000**	**33,33**
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	20.000.000									2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	3.000.000	28,57
5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	1.500.000									1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	33,33
5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	1.500.000									1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	33,33
5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 doku	1.500.000									1 dokum	500.000	1 doku	500.000	33,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6 x100		9		10=(5 +7+9)		11=(5+7 +10/4)
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	men										en		men		
5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	1.500.000									1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	33,33
5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	15.000.000									3 dokumen	2.290.000	3 dokumen	2.290.000	33,33
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	1.500.000									4 laporan	1.500.000	4 laporan	1.500.000	33,33
5.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**9.198.549.663**									**100 %**	**3.046.868.483**	**100 %**	**3.046.868.483**	**33,33**
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Org/ bln	9.188.679.663									30 Org/ bln	3.043.368.483	30 Org/ bln	3.043.368.483	33,33
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 laporan	8.370.000									3 laporan	2.000.000	3 laporan	2.000.000	33,33
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	1.500.000									6 laporan	1.500.000	6 laporan	1.500.000	33,33
5.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**5.286.450**									**100 %**	**1.267.550**	**100 %**	**1.267.550**	**33,33**
5.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 doku	295.650									1 dokum	131.700	1 doku	131.700	33,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6 x100		9		10=(5 +7+9)		11=(5+7 +10/4)
	Daerah SKPD		men										en		men		
5.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 laporan	4.990.800									14 laporan	1.135.850	14 laporan	1.135.850	33,33
5.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**91.200.000**									**0 %**	**0**	**0 %**	**0**	**0,00**
5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 paket	16.200.000									0 paket	0	0 paket	0	0,00
5.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 orang	75.000.000									0 orang	0	0 orang	0	0,00
5.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**134.663.550**									**100 %**	**23.836.910**	**100 %**	**23.836.910**	**33,33**
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	3.124.800									4 paket	533.500	4 paket	533.500	33,33
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	35.746.200									4 paket	8.737.800	4 paket	8.737.800	33,33
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	17.952.000									4 paket	2.046.000	4 paket	2.046.000	33,33
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	25.490.550									4 paket	4.429.610	4 paket	4.429.610	33,33
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	4.860.000									0 dokumen	0	0 dokumen	0	0,00
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 laporan	47.490.000									25 laporan	8.090.000	25 laporan	8.090.000	33,33
5.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik**	**Persentase Pengadaan**	**100**	**65.500.000**									**100**	**929.500**	**100**	**929.500**	**33,33**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6 x100		9		10=(5 +7+9)		11=(5+7 +10/4)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**%**										**%**		**%**		
5.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	6.000.000									1 unit	929.500	1 unit	929.500	33,33
5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	59.500.000									0 unit	0	0 unit	0	0,00
5.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1.472.748.000**									**100 %**	**350.795.000**	**100 %**	**350.795.000**	**33,33**
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	11.508.000									4 laporan	4.430.000	4 laporan	4.430.000	33,33
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	109.800.000									4 laporan	36.600.000	4 laporan	36.600.000	33,33
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.351.440.000									4 laporan	309.765.000	4 laporan	309.765.000	33,33
5.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**20.300.000**									**100 %**	**10.550.000**	**100 %**	**10.550.000**	**33,33**
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit	18.000.000									8 unit	9.650.000	8 unit	9.650.000	33,33
5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	2.300.000									1 unit	900.000	1 unit	900.000	8,33

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian / pengkajian dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Dan sebagai salah satu upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangkalan 2024 terdiri dari :

A. Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan sub kegiatan :
   a) Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
   b) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan :
   a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan :

a) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
b) Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Perkebunan,dan Pangan
c) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
d) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan sub kegiatan :
   a) Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
   b) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
   c) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan dukungan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan

a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan
   a) Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 memuat uraian, indikator kinerja, target, perubahan target pada rancangan akhir dapat dilihat pada tabel 3.1.

Matriks rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja Balitbangda tahun 2024 Kabupaten Bangkalan secara detail dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Balitbangda

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	Perubahan			2024	Perubahan	
1	2	6	7	8	9	13	14	15
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi derah	Indeks Inovasi Derah	54	54	Meningkatnya kualitas inovasi serta hasil penelitian dan pengembangan daerah	Persentase inovasi serta hasil penelitian dan pengembangan daerah yang termanfaatkan dalam pembangunan	75%	75%	
				Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraan urusan bidang penelitian dan pengembangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	82,5	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	62	

Tabel 3.2 Matriks Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Balitbangda

		Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.01	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**Balitbangda**	**30%**	**240.000.000**		**Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**Balitbangda**	**30%**	**142.460.000**		**-97.540.000**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yg disusun**		**2 dokumen**	**190.000.000**	**DAUM**	**Jumlah penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yg disusun**		**2 dokumen**	**92.460.000**	**DAUM**	**-97.540.000**	
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		1 laporan	100.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		1 laporan	2.460.000	DAUM	-97.540.000	
5.05.02.2.01.09	Fasilitasi,Pelaksanaan dan	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan		1 laporan	90.000.000	DAUM	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan		1 laporan	90.000.000	DAUM		

		Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Anggaran (Rp)**	**Sumber Dana**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**	**Selisih**	**Catatan Penting (Alasan Perubahan)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa						
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yg disusun**		**100%**	**50.000.000**		**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yg disusun**		**100%**	**50.000.000**			
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		1 dokumen	50.000.000	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		1 dokumen	50.000.000	DAUM		
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**Balitbangda**	**30%**	**200.000.000**		**Prosentase Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**Balitbangda**	**30%**	**198.770.000**		**-1.230.000**	

		Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yg disusun**		**4 dokumen**	**200.000.000**		**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yg disusun**		**4 dokumen**	**198.770.000**		**-1.230.000**	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		1 dokumen	1.542.200	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		1 dokumen	1.542.200	DAUM		
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1 dokumen	66.155.300	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1 dokumen	64.925.300	DAUM	-1.230.000	
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		1 dokumen	66.155.600	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		1 dokumen	66.155.600	DAUM		
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		1 dokumen	66.146.900	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		1 dokumen	66.146.900	DAUM		

		Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Anggaran (Rp)**	**Sumber Dana**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**	**Selisih**	**Catatan Penting (Alasan Perubahan)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase inovasi dan teknologi yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**Balitbangda**	**84 %**	**310.000.000**		**Persentase inovasi dan teknologi yang termanfaatkan dalam pembangunan**	**Balitbangda**	**84 %**	**308.770.000**		**-1.230.000**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Inovasi yang terdaftar dalam IGA dan teknologi yang terfasilitasi HKI**		**1 inovasi**	**310.000.000**		**Jumlah Inovasi yang terdaftar dalam IGA dan teknologi yang terfasilitasi HKI**		**1 inovasi**	**308.770.000**		-1.230.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		1 dokumen	256.206.950	DAUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		1 dokumen	254.976.950	DAUM	-1.230.000	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1 laporan	43.768.050	DAUM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1 laporan	43.768.050	DAUM		

		Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Anggaran (Rp)**	**Sumber Dana**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**	**Selisih**	**Catatan Penting (Alasan Perubahan)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		1 laporan	10.025.000	DAUM	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		1 laporan	10.025.000	DAUM		
5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balitbangda**	**82,5**	**3.443.037.443**		**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balitbangda**	**82,5**	**3.241.760.501**		**-201.276.942**	
5.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**8.790.000**		**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**8.115.000**		-675.000	
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	3.000.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	3.000.000	DAUM		
5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	500.000	DAUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	275.000	DAUM	-225.000	

		Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	500.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	500.000	DAUM		
5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	500.000	DAUM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	275.000	DAUM	-225.000	
5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusunJumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	500.000	DAUM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusunJumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	275.000	DAUM	-225.000	
5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		3 laporan	2.290.000	DAUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan		3 laporan	2.290.000	DAUM		

		Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	1.500.000	DAUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	1.500.000	DAUM		
5.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**3.046.868.483**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**2.861.923.105**		**-184.945.378**	
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Org/ bln	3.043.368.483	DAUM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Org/ bln	2.858.423.105	DAUM	-184.945.378	
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3 laporan	2.000.000	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3 laporan	2.000.000	DAUM		
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/		6 laporan	1.500.000	DAUM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/		6 laporan	1.500.000	DAUM		

		Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
5.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**		**100%**	**1.267.550**		**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**		**100%**	**1.267.550**			
5.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	131.700	DAUM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	131.700	DAUM		
5.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		14 laporan	1.135.850	DAUM	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		14 laporan	1.135.850	DAUM		
5.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi**		**100%**	**23.836.910**		**Persentase Penyediaan Administrasi**		**100%**	**21.160.550**		**-2.676.360**	

		Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Anggaran (Rp)**	**Sumber Dana**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**	**Selisih**	**Catatan Penting (Alasan Perubahan)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
		Umum Perangkat Daerah					**Umum Perangkat Daerah**						
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 paket	533.500	DAUM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 paket	533.500	DAUM		
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 paket	8.737.800	DAUM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 paket	7.577.100	DAUM	-1.160.700	
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 paket	2.046.000	DAUM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 paket	2.046.000	DAUM		
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	4.429.610	DAUM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	3.133.950	DAUM	-1.295.660	
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 laporan	8.090.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 laporan	7.870.000	DAUM	-220.000	
5.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**100%**	**929.500,00**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**100%**	**0**		-929.500	

		Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Anggaran (Rp)**	**Sumber Dana**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**	**Selisih**	**Catatan Penting (Alasan Perubahan)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Pemerintah Daerah	**Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**					**Daerah yang terlaksana**						
5.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 paket	929.500		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 paket	0		-929.500	
5.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**350.795.000**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**340.298.296**		**-10.496.704**	
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat		4 laporan	4.430.000	DAUM	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat		4 laporan	4.430.000	DAUM		
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 laporan	36.600.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 laporan	22.953.296	DAUM	-13.646.704	
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 laporan	309.765.000	DAUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 laporan	312.915.000	DAUM	3.150.000	
5.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik**		**100%**	**10.550.000**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik**		**100%**	**8.996.000**		**-1.554.000**	

		Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Anggaran (Rp)**	**Sumber Dana**	**Indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**	**Selisih**	**Catatan Penting (Alasan Perubahan)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**					**Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**						
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 unit	9.650.000	DAUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 unit	8.096.000	DAUM	-1.554.000	
5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	900.000	DAUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	900.000	DAUM		
JUMLAH					**4.193.037.443,00**					**3.891.760.501**		**-301.276.942**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output **Rencana Kerja** Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan adalah **Program Tahunan** Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan

Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Bangkalan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Institusi baik Pemerintah maupun Mitra Kerja.

Bangkalan, Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. IRMAN GUNADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650918 198602 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). Dokumen perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah ini kemudian dijabarkan menjadi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk dijadikan pedoman dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Setiap Perangkat Daerah (PD) yang merupakan bagian terintegrasi dari pemerintah daerah juga wajib untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah Dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten. Renja PD digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam proses penyusunannya, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 yang kemudian juga akan

dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 mendatang.

Proses penyusunan Renja juga didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 2/D);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah memberikan gambaran Strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pengendali kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan agar terarah dan sesuai dengan rancangan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran di tahun 2024;

3. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Rencana Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj PD). Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan pada Akhir Tahun 2023 dan pelaksanaan sampai Semester 1 Tahun 2024.

Pada tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan melaksanakan 3 (tiga) pada program, yaitu :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Program Perekonomian dan Pembangunan.
c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Tahun 2023 pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 40.115.376.833,-.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah pada akhir Tahun 2023 dan Realisasi sampai dengan Semester 1 Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		100 %	123.464.586.318	0	-	0	-	0	-	0	-	100 %	43.877.119.535	68,85 %	30.208.925.873	68,85%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Laporan Peny elenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan (Bagian Pemerintaha)	100 %	1.141.422.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100 %	277.471.000	43,29 %	120.124.650	43,29%
		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan (Bagia Kesra)	100 %	20.655.312.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100 %	9.740.793.518	87,64 %	8.537.100.868	87,64%
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan (Bagian Hukum)	100 %	589.839.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100 %	277.281.000	57,74 %	160.111.000	57,74%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.03.2.01	**KEGIATAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN**	**Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah**	**100 %**	**1.141.422.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**277.471.000**	**43,29 %**	**120.124.650**	**43,29%**
4.01.02.02.01.01	Sub Kegiatan Penataan Aministrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	15	463.535.850	0	-	0	-	0	-	0	-	4	144.694.450	3	46.190.800	20%
4.01.02.02.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	379.890.450	0	-	0	-	0	-	0	-	3	48.820.850	3	44.911.850	33,33%
4.01.02.02.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12	297.995.700	0	-	0	-	0	-	0	-	3	83.955.700	2	29.022.000	16,67%
4.01.02.2.02	**KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan**	**100 %**	**20.655.312.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**9.740.793.518**	**87,64 %**	**8.537.100.868**	**87,64%**
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	31	4.312.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	8	9.275.793.518	2	8.291.700.868	6,45%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejah teraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administra si Kependu dukan dan Pencatatan Sipil, Pemberda yaan Masyarakat dan Desa, Pengen dalian Penduduk dan KB	6	8.280.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	219.950.000	1	4.800.000	16,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.02.2.02.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas	44	8.062.812.000	0	-	0	-	0	-	0	-	2	245.050.000	2	240.600.000	4,55%
4.01.02.2.03	**KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100 %**	**589.839.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**277.281.000**	**57,74 %**	**160.111.000**	**57,74%**
4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	9	247.839.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3	18.871.000	3	9.286.000	33,33%
4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	9	192.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	10	250.150.000	6	150.150.000	66,67%
4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	12	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	4	8.260.000	4	675.000	33,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang Tersusun (Bagian Perekonomian dan SDA)**	**80%**	**362.859.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**80%**	**411.729.000**	**12,93 %**	**53.223.719**	**16,16%**
		Persentase Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan)	**100 %**	**544.764.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**55.872.000**	**19,45 %**	**10.868.000**	**19,45%**
		Indeks Kepua san Pemerin tah Daerah terhadap Pelayanan Pe lelangan PBJ	**100 %**	**3.433.788.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**588.555.000**	**45,67 %**	**268.802.900**	**45,67%**
4.01.03.2.01	**KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN**	**Jumlah Dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun**	**1**	**257.859.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**1**	**38.000.000**	**0**	**12.525.000**	**0,00%**
4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3	152.859.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	14.000.000	0	3.352.500	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3	90.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	24.000.000	0	9.172.500	0,00%
4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawa san Ekonomi Mikro Kecil	3	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%
4.01.03.2.04	**PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM**	**Jumlah Dokumen Bidang Sumber Daya Alam Yang Tersusun**	**1**	**105.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**1**	**373.729.000**	**0**	**40.698.719**	**0,00%**
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	366.729.000	0	38.168.719	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	3.000.000	0	450.000	0,00%
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permu kiman, Pertanahan	3	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	4.000.000	0	2.080.000	0,00%
4.01.03.2.02	**KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang Difasilitasi**	**100 %**	**544.764.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**55.872.000**	**19,45 %**	**10.868.000**	**19,45%**
4.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100,00%	8.712.000	63,91 %	5.568.000	21,30%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	16.310.000	0	-	0,00%
4.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	54	244.764.000	0	-	0	-	0	-	0	-	18	30.850.000	9	5.300.000	16,67%
4.01.03.2.03	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Persentase pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi**	**100 %**	**3.433.788.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**588.555.000**	**45,67 %**	**268.802.900**	**45,67%**
4.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5	990.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	5	189.840.000	3	75.250.000	60%
4.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	1.448.595.000	0	-	0	-	0	-	0	-	5	293.388.000	3	165.186.900	60%
4.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	68	995.193.000	0	-	0	-	0	-	0	-	68	105.327.000	68	28.366.000	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian Perencanaan dan Bagian Umum)**	**100**	**95.241.456.318**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100**	**32.062.001.017**	**100**	**20.773.592.043**	**100%**
		Prosentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi (Bag. Organisasi)	**100 %**	**780.018.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**211.102.000**	**76,83 %**	**162.197.827**	**76,83%**
		Persentase pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi (Bag.Prokopim)	**84%**	**715.128.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**81%**	**252.315.000**	**48,71 %**	**122.904.866**	**57,99%**
4.01.01.2.03	**KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**48.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00%**	**-**	0,00%
4.01.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01.2.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendali an Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%
4.01.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusu nan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lapor an Rekonsiliasi dan Penyusu nan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%
4.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%
4.01.01.2.05	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**600.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**308.700.000**	**24,13 %**	**74.500.000**	**24,13%**
4.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24	450.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	16	303.700.000	5	74.500.000	20,83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01.2.05.11	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.000.000	0	-	0,00%
4.01.01.2.06	**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.084.175.440**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**1.234.464.900**	**61,77 %**	**762.517.523**	**61,77%**
4.01.01.2.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	10	467.242.900	9	436.808.214	30%
4.01.01.2.06.04	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	555.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	8	71.010.000	2	11.288.000	6,67%
4.01.01.2.06.05	Sub kegiatan Penyedi aan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetaka n dan Penggan daan yang Disediakan	15	95.250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	18	139.500.000	18	139.500.000	120%
4.01.01.2.06.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	108.720.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12	19.440.000	5	7.950.000	13,89%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapora n Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	725.205.440	0	-	0	-	0	-	0	-	295	537.272.000	75	166.971.309	16,67%
4.01.01.2.07	**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**600.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**167.273.500**	**91,06 %**	**152.320.000**	**91,06%**
4.01.01.2.07.02	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	2	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%
4.01.01.2.07.05	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%
4.01.01.2.07.10	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	20	167.273.500	7	152.320.000	15,56%
4.01.01.2.08	**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**19.279.800.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**5.551.327.697**	**53,19 %**	**2.952.795.189**	**53,19%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	24	29.000.000	6	660.000	8,33%
4.01.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	3.300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	36	1.060.072.697	15	438.992.305	13,89%
4.01.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33	4.053.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	7	1.541.500.000	4	1.033.008.000	12,12%
4.01.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	123	11.806.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	44	2.920.755.000	21	1.480.134.884	17,07%
4.01.01.2.09	**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**2.626.420.419**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**1.063.908.253**	**41,71 %**	**443.727.898**	**41,71%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01.2.09.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	585.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	67	423.659.853	15	93.062.956	25%
4.01.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	853.420.419	0	-	0	-	0	-	0	-	37	414.160.000	17	184.187.942	51,52%
4.01.01.2.09.09	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9	591.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%
4.01.01.2.09.10	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	300	597.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	262	226.088.400	193	166.477.000	64,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01.2.11	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**2.756.846.790**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**918.948.930**	**32,65 %**	**300.000.000**	**32,65%**
4.01.01.2.11.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	956.846.790	0	-	0	-	0	-	0	-	2	318.948.930	0	-	0,00%
4.01.01.2.11.04	Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	1.800.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	2	600.000.000	1	300.000.000	16,67%
4.01.01.2.12	**KEGIATAN FASILITASI KERUMAH TANGGAAN SEKRETA RIAT DAERAH**	**Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi**	**100 %**	**7.939.431.351**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**2.611.441.720**	**33,17 %**	**866.227.805**	**33,17%**
4.01.01.2.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutu han RumahTangga Kepala Daerah yang Disediakan	54	5.319.431.351	0	-	0	-	0	-	0	-	14	2.396.067.250	5	778.292.655	9,26%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01.2.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36	1.800.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%
4.01.01.2.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	33	820.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	4	215.374.470	2	87.935.150	6,06%
4.01.01.2.13	**KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI**	**Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun**	**100 %**	**780.018.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100 %**	**211.102.000**	**76,83 %**	**162.197.827**	**76,83%**
4.01.01.2.13.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3	170.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	128.269.000	-	104.082.327	0,00%
4.01.01.2.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	111.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%
4.01.01.2.13.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9.203.000	1	920.000	16,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01.2.13.04	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	68.012.000	0	-	0	-	0	-	0	-	2	20.630.000	-	7.045.000	0,00%
4.01.01.2.13.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3	351.006.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	53.000.000	1	50.150.500	33,33%
4.01.01.2.14	**KEGIATAN PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNI KASI PIMPINAN**	**Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan**	**84%**	**715.128.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**81%**	**252.315.000**	**48,71 %**	**122.904.866**	**57,99%**
4.01.01.2.14.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	144	413.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	92	193.815.000	30	100.904.866	20,83%
4.01.01.2.14.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Lapor an Hasil Fasili tasi Komuni kasi Pimpinan	54	92.128.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	8.500.000	0	-	0,00%
4.01.01.2.14.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Lapor an Pendokume ntasian Tugas Pimpinan	15	210.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	13	50.000.000	5	22.000.000	33,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01.2.01	**KEGIATAN PERENCANAAN PENGANGGARAN, DAN EVALU ASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**80,50%**	**292.840.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**80,50%**	**15.215.098**	**20,18%**	**3.071.000**	**25,07%**
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	97.763.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3	10.000.000	1	846.500	11,11%
4.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordi nasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	31.692.500	0	-	0	-	0	-	0	-	1	271.650	1	271.000	33,33%
4.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	22.879.800	0	-	0	-	0	-	0	-	1	212.800	0	-	0,00%
4.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	35.651.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	298.900	1	298.900	33,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	20.625.900	0	-	0	-	0	-	0	-	1	225.148	0	-	0,00%
4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	38.577.700	0	-	0	-	0	-	0	-	2	510.700	2	510.700	33,33%
4.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	45.650.100	0	-	0	-	0	-	0	-	4	3.695.900	2	1.143.900	16,67%
4.01.01.2.02	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**80,50%**	**59.013.942.318**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**80,50%**	**20.190.720.919**	**75,37%**	**15.218.432.628**	**93,63%**
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	664	58.827.398.517	0	-	0	-	0	-	0	-	210	20.183.926.119	210	15.217.373.728	31,63%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada Akhir Periode Rentsra Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keua ngan SKPD	3	47.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	400.600	0	-	0,00%
4.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	26.325.301	0	-	0	-	0	-	0	-	1	310.300	0	-	0,00%
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapor an Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	73.788.500	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.680.000	0	800.000	0,00%
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dn Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36	39.380.000	0	-	0	-	0	-	0	-	12	403.900	6	258.900	16,67%

Dari tabel 2.1. diatas menunjukkan bahwa Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 dan Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2024 Semester 1) sudah cukup baik dalam pencapaian kinerja pada Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

a. Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
d. Pelayanan Administratif Dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Daerah;
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan fungsinya.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan terdiri atas :

A. Sekretaris Daerah;

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
   1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
      Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
   2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
   3. Bagian Hukum, membawahi :
      Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
   1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
      Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
   2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
      Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
   3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
      Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

D. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Umum, membawahi :
   Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Organisasi, membawahi:
   Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
   a) Subbagian Protokol;
   b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
   Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

E. Staf Ahli Bupati;
   Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022:

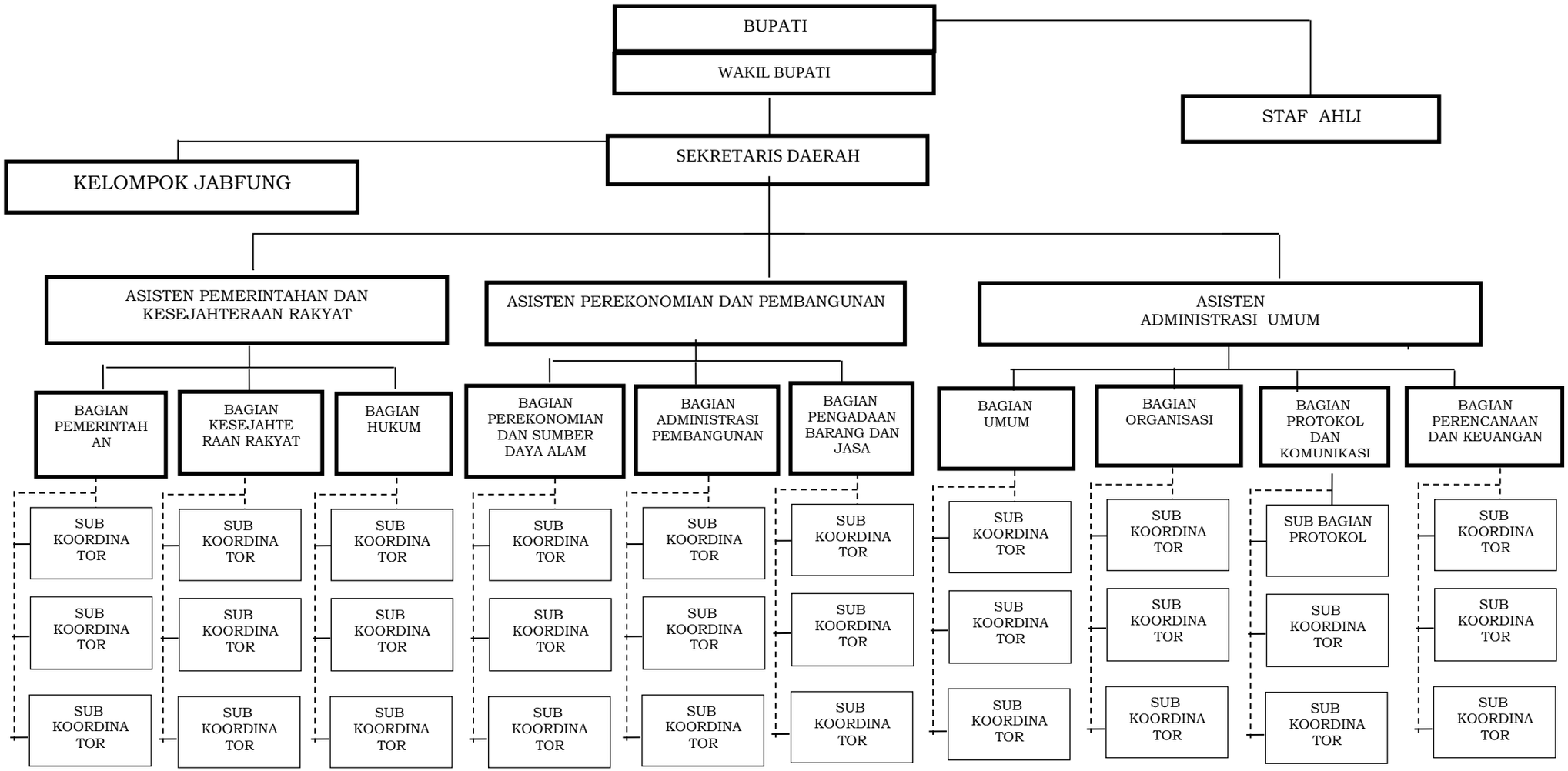

Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan meliputi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Sekretariat Daerah didukung oleh kekuatan personil sebanyak 322 orang, dengan rincian kekuatan personil PNS sebanyak 178 orang PPPK sebanyak 16 orang dan THL sebanyak 129 orang. Secara spesifik dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

A. Jumlah aparat dalam Jabatan Struktural
   a. Pejabat Eselon II/a = 1 orang
   b. Pejabat Eselon II/b = 6 orang
   c. Pejabat Eselon III/a = 10 orang
   d. Pejabat Eselon IV/a = 1 orang
   e. Jabatan Fungsional = 29 Orang

B. Jumlah aparat ditinjau dari Golongan Ruang
   a. Golongan IV = 31 orang
   b. Golongan III = 135 orang
   c. Golongan II = 28 orang
   d. Golongan I = 0 orang

2. Sumber Daya Aset

No	Nama Barang	Jumlah
1	Gedung kantor	26
2	Alat-alat angkutan darat bermotor sedan	2
3	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	23
4	Alat-alat angkutan darat bermotor bus	1
5	Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	2
6	Alat-alat angkutan darat bermotor truck	1
7	Alat-alat angkutan darat bermotor pick up	1
8	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	337
9	Mesin ketik	25
10	Mesin hitung	16
11	Mesin fotocopy	4
12	Mesin penghancur kertas	17
13	Tabung pemadam kebakaran	15

No	Nama Barang	Jumlah
14	Peralatan kantor lainnya	34
15	Papan data / reklame dan peta	15
16	Almari	32
17	Brankas	46
18	Filling kabinet	56
19	Rak	18
20	Peralatan industri rumah tangga	57
21	Pigura/gambar presiden dan wapres/lambang garuda	57
22	Papan nama/papan tulis	55
23	Vacum cleaner	13
24	Air conditioner	211
25	Kipas angin	44
26	Televisi	43
27	Genset	5
28	Peralatan rumah tangga	1048
29	Mesin potong rumput	6
30	Komputer/PC	146
31	Komputer notebook	124
32	Printer	153
33	Scanner	8
34	Monitor/display	12
35	UPS/stabilizer	52
36	Peralatan jaringan komputer	30
37	Meja kerja	346
38	Meja rapat	44
39	Meja makan	59
40	Kursi kerja	100
41	Kursi rapat	1268
42	Sofa / kursi tamu	61
43	Tabung gas	10
44	Kompor gas	18
45	Dispenser	17
46	Kulkas	16
47	Kamera	33

No	Nama Barang	Jumlah
48	Handycam	3
49	LCD	8
50	Alat-alat studio lainnya	54
51	Telepon	32
52	Faximili	32
53	Radio HF/FM (handly talkie)	25
54	Alat-alat komunikasi lainnya	18
55	Karpet	16
56	Kompresor	1
57	Server	1

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan Semester 1 Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

No	Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Peubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan jika ada Perubahan Target)
		2020	2021	2022	2023			
1.	Indikator Tujuan:							
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	61,96	61,18	63,01	63,87	70,23 (BB)	70,23 (BB)	
	Status Kinerja LPPD					ST	ST	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,92	80,95	82,78	82,52	84,45	84,45	
2.	Indikator Sasaran:							
	Prosentase Rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah	-	-	-	-	100%	100%	
	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah					64,32 (B)	64,32 (B)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah					85	85	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berkualitas	(1) Nilai SAKIP	(BB) 70.23	(BB) 70.23	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah	100%	100%	
	(2) Status Kinerja LPPD;	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah urusan Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Sekretariat Daerah	64,32 (B)	64,32 (B)	
	(9) Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	84,45	84,45		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	85	85	

Pada Perubahan Anggaran Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan melaksanakan 3 (tiga) pada program, yaitu :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Program Perekonomian dan Pembangunan;
c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun pada tahun 2024, pagu Perubahan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 43.877.119.535,- .

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
   a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
   b. Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
   c. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

2. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
   a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
   b. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
   c. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
   c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

B. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
   a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
   b. Sub Kegiatan Pengendalian dan distribusi perekonomian

c. Sub Kegiatan Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil

2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
   b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program
   c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
   c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
   a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
   b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
   c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

10. Kegiatan Penataan Organisasi

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
d. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

11. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
    a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
    b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
       Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya :

1. Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
2. Tuntutan implementasi berbagai peraturan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan;
4. Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan;
5. Peningkatan Peran Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan
6. Mewujudkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Secara garis besar, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan melaksanakan 3 (tiga) buah Program, yang terjabar dalam 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 70 (tujuh puluh) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Bagian.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Nama PD : Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH												
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		Kab. Bangkalan		42.029.211.005			Kab. Bangkalan		43.877.119.535		1.847.908.530	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan (Bagian Pemerintahan)	Kab. Bangkalan	100%	9.053.401.000		Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan (Bagian Pemerintahan)	Kab. Bangkalan	100%	10.295.545.518		1.242.144.518	
		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan & Keagamaan (Bagian Kesra)		100%			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan & Keagamaan (Bagian Kesra)		100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan (Bagian Hukum)		**100%**			**Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan (Bagian Hukum)**		**100%**				
4.01.03.2.01	**KEGIATAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN**	**Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**342.974.000**		**Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**277.471.000**		**-65.503.000**	Bag. Pemerintahan
4.01.02.02.01.01	Sub Kegiatan Penataan Aministrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penata an Administrasi Pemerintahan	Kab. Bangkalan	5 Dokumen	130.291.350	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Penata an Administrasi Pemerintahan	Kab. Bangkalan	5 dokumen	144.694.450	DAU	14.403.100	Pergeseran Anggaran
4.01.02.02.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelo laan Administrasi Kewilayahan	Kab. Bangkalan	3 Dokumen	126.630.150	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelol aan Administrasi Kewilayahan	Kab. Bangkalan	3 dokumen	48.820.850	DAU	-77.809.300	Efisiensi
4.01.02.02.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bangkalan	4 Dokumen	86.052.500	DAU/ DBKP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bangkalan	4 dokumen	83.955.700	DAU/ DBKP	-2.096.800	Efisiensi
4.01.02.2.02	**KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**8.551.314.000**		**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**9.740.793.518**		**1.189.479.518**	Bag. Kesra
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bangkalan	31 Dokumen	2.297.895.500	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bangkalan	8 Dokumen	9.275.793.518	DAU	6.977.898.018	Penambahan Belanja Hibah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Bangkalan	6 Dokumen	2.377.680.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	219.950.000	DAU	-2.157.730.000	Efisiensi
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas	Kab. Bangkalan	44 Dokumen	3.875.738.500	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas	Kab. Bangkalan	2 Dokumen	245.050.000	DAU	-3.630.688.500	Efisiensi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.02.2.03	**KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kab. Bangkalan**	100%	**159.113.000**		**Persentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kab. Bangkalan**	100%	**277.281.000**		**118.168.000**	Bag. Hukum
4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Bangkalan	3 Dokumen	59.113.000	DAU	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Bangkalan	3 dokumen	18.871.000	DAU	-40.242.000	Efisiensi
4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bangkalan	3 Kasus	50.000.000	DAU	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bangkalan	6 Kasus	250.150.000	DAU	200.150.000	Penanganan PTUN dan Kadarkum
4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Bangkalan	4 Dokumen	50.000.000	DAU	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Bangkalan	4 dokumen	8.260.000	DAU	-41.740.000	Efisiensi
04.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang Tersusun (Bagian Perekonomian dan SDA)**	**Kab. Bangkalan**	**80%**	**1.334.637.000**		**Persentase Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang Tersusun (Bagian Perekonomian dan SDA)**	**Kab. Bangkalan**	**80%**	**1.056.156.000**		**-278.481.000**	
		Persentase Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan)		**100%**			**Persentase Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan)**		**100%**				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
		Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ		**100 indeks**			**Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ**		**100 indeks**				
4.01.03.2.01	**KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN**	**Jumlah Dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun**	**Kab. Bangkalan**	**3**	**58.453.000**		**Jumlah Dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun**	**Kab. Bangkalan**	**2**	**38.000.000**		**-20.453.000**	**Bag. Perekonomian dan SDA**
4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bangkalan	1	33.453.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bangkalan	1 dokumen	14.000.000	DAU	-19.453.000	Efisiensi
4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bangkalan	1	20.000.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bangkalan	1 Laporan	24.000.000	DAU	4.000.000	Pergeseran Anggaran
4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Bangkalan	1	5.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Bangkalan	0	0		-5.000.000	Efisiensi
4.01.03.2.04	**PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM**	**Jumlah Dokumen Bidang Sumber Daya Alam Yang Tersusun**	**Kab. Bangkalan**	**3**	**25.000.000**		**Jumlah Dokumen Bidang Sumber Daya Alam Yang Tersusun**	**Kab. Bangkalan**	**3**	**373.729.000**		**348.729.000**	**Bag. Perekonomian dan SDA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Bangkalan	1	15.000.000	DAU/ DBHCHT	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Bangkalan	1 dokumen	366.729.000	DAU/ DBHCHT	351.729.000	Tambahan Dana Bagi Hasil (DBHCHT)
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Bangkalan	1	5.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Bangkalan	1 dokumen	3.000.000	DAU	-2.000.000	Efisiensi
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permu kiman, Pertanahan	Kab. Bangkalan	1	5.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permu kiman, Pertanahan	Kab. Bangkalan	1 dokumen	4.000.000	DAU	-1.000.000	Efisiensi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.03.2.02	**KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang Difasilitasi**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**144.088.000**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang Difasilitasi**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**55.872.000**		**-88.216.000**	**Bag. Adbang**
4.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Bangkalan	1 Laporan	40.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Bangkalan	1 dokumen	8.712.000	DAU	-31.288.000	Efisiensi
4.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Bangkalan	1 Laporan	40.000.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Bangkalan	1 Laporan	16.310.000	DAU	-23.690.000	Efisiensi
4.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bangkalan	18 Laporan	64.088.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bangkalan	18 Laporan	30.850.000	DAU	-33.238.000	Efisiensi
4.01.03.2.03	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Persentase pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi**	**Kab. Bangkalan**	**77%**	**1.107.096.000**		**Persentase pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi**	**Kab. Bangkalan**	**77%**	**588.555.000**		**-518.541.000**	**Bag. PBJ**
4.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bangkalan	5 Dokumen	330.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bangkalan	5 Dokumen	189.840.000	DAU	-140.160.000	Efisiensi
4.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Bangkalan	5 Dokumen	482.865.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Bangkalan	5 Dokumen	293.388.000	DAU	-189.477.000	Efisiensi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bangkalan	68 Orang	294.231.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bangkalan	68 Orang	105.327.000	DAU	-188.904.000	Efisiensi
04.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bag. Perencana & Bag. Umum)**	**Kab. Bangkalan**	**100 indeks**	**31.641.173.005**		**Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bag. Perencana & Bag. Umum)**	**Kab. Bangkalan**	**100 indeks**	**32.525.418.017**		**884.245.012**	
		Prosentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi (Bag. Organisasi)		**100%**			**Prosentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi (Bag. Organisasi)**		**100%**				
		Persentase pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi (Bag.Prokopim)		**100%**			**Persentase pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi (Bag.Prokopim)**		**100%**				
4.01.01.2.03	**KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**16.000.000**		**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**0**		**-16.000.000**	**Bag. Umum**
4.01.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan	2 dokumen	4.000.000	DAU	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bangkalan	0 dokumen	0		-4.000.000	Efisiensi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.01.2.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	1 Laporan	4.000.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	0 Laporan	0		-4.000.000	Efisiensi
4.01.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	4 dokumen	4.000.000	DAU	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	0 dokumen	0		-4.000.000	Efisiensi
4.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	1 dokumen	4.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	0 dokumen	0		-4.000.000	Efisiensi
4.01.01.2.05	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**180.000.000**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**308.700.000**		**128.700.000**	Bag. Umum
4.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keleng kapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangkalan	8 Paket	150.000.000	DAU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bangkalan	16 Paket	303.700.000	DAU	153.700.000	Pakaian Dinas KDH/ WKDH
4.01.01.2.05.11	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan	10 Orang	30.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangkalan	1 Orang	5.000.000	DAU	-25.000.000	Efisiensi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.01.2.06	**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**600.490.000**		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**1.234.464.900**		**633.974.900**	Bag. Umum
4.01.01.2.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Bangkalan	10 Paket	200.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Bangkalan	10 Paket	467.242.900	DAU	267.242.900	Belanja Perlengkapan Kantor dan ATK
4.01.01.2.06.04	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	10 Paket	144.500.000	DAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	8 Paket	71.010.000	DAU	-73.490.000	Efisiensi
4.01.01.2.06.05	Sub kegiatan Penyedi aan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetaka n dan Penggan daan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	5 Paket	31.750.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetaka n dan Penggan daan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	18 Paket	139.500.000	DAU	107.750.000	Bahan Cetakan
4.01.01.2.06.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Dok	24.240.000	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Dok	19.440.000	DAU	-4.800.000	Efisiensi
4.01.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	200 Laporan	200.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	295 Laporan	537.272.000	DAU	337.272.000	Tambahan Belanja Perjalanan Dinas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.01.2.07	**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**128.703.000**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**167.273.500**		**38.570.500**	Bag. Umum
4.01.01.2.07.05	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Unit	53.703.000	DAU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bangkalan	0 Unit	0		-53.703.000	Efisiensi
4.01.01.2.07.10	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan	15 Unit	75.000.000	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan	20 Unit	167.273.500	DAU	92.273.500	
4.01.01.2.08	**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**6.971.596.930**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**5.551.327.697**		**-1.420.269.233**	Bag. Umum
4.01.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	24 Laporan	36.075.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	24 Laporan	29.000.000	DAU	-7.075.000	Efisiensi
4.01.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan	36 Laporan	1.169.621.930	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan	36 Laporan	1.060.072.697	DAU	-109.549.233	Efisiensi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	11 Laporan	1.851.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	7 Laporan	1.541.500.000	DAU	-309.500.000	Efisiensi
4.01.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lapo ran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	41 Laporan	3.914.900.000	DAU	Jumlah Lapo ran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	44 Laporan	2.920.755.000	DAU	-994.145.000	Efisiensi
4.01.01.2.09	**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUN JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**875.473.473**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**1.063.908.253**		**188.434.780**	Bag. Umum
4.01.01.2.09.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendara an Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan	20 Unit	195.000.000	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan	67 Unit	423.659.853	DAU	228.659.853	Pemeliharaan Kend Dinas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasio nal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangkalan	10 Unit	284.473.473	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangkalan	37 Unit	414.160.000	DAU	129.686.527	Pajak Kendaraan Dinas Bermotor
4.01.01.2.09.09	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bangkalan	3 Unit	197.000.000	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bangkalan	0 Unit	0	DAU	-197.000.000	Efisiensi
4.01.01.2.09.10	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bangkalan	100 Unit	199.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bangkalan	262 Unit	226.088.400	DAU	27.088.400	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor
4.01.01.2.11	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUA NGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**918.948.930**		**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**918.948.930**		**0**	Bag. Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.01.2.11.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangkalan	2 Orang / Bulan	318.948.930	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangkalan	2 Orang/ Bulan	318.948.930	DAU	0	
4.01.01.2.11.04	Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangkalan	2 Orang / Bulan	600.000.000	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangkalan	2 Orang/ Bulan	600.000.000	DAU	0	
4.01.01.2.12	**KEGIATAN FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH**	**Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**2.453.531.597**		**Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi**	**Kab. Bangkalan**	**100%**	**2.611.441.720**		**157.910.123**	Bag. Umum
4.01.01.2.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan RumahTangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Bangkalan	18 Paket	1.733.531.597	DAU	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Bangkalan	14 Paket	2.396.067.250	DAU	662.535.653	Penambahan Belanja Kebutuhan RT
4.01.01.2.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Paket	500.000.000	DAU	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Bangkalan	0 Paket	0		-500.000.000	Efisiensi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.01.2.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tang ga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Bangkalan	11 Paket	220.000.000	DAU	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Bangkalan	4 Paket	215.374.470	DAU	-4.625.530	Efisiensi
4.01.01.2.13	**KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI**	**Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun**	**Kab. Bangkalan**	100%	**222.506.000**		**Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun**	**Kab. Bangkalan**	100%	**211.102.000**		**-11.404.000**	Bag. Organisasi
4.01.01.2.13.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Bangkalan	1 dokumen	50.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Bangkalan	3 dokumen	128.269.000	DAU	78.269.000	Kajian Penyederhanaan Birokrasi
4.01.01.2.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bangkalan	1 laporan	22.000.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bangkalan	0 laporan	0		-22.000.000	Efisiensi
4.01.01.2.13.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Bangkalan	2 dokumen	22.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Bangkalan	2 dokumen	9.203.000	DAU	-12.797.000	Efisiensi
4.01.01.2.13.04	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bangkalan	1 dokumen	22.506.000	DAU	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bangkalan	1 dokumen	20.630.000	DAU	-1.876.000	Efisiensi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.01.2.13.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	1 dokumen	106.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	1 dokumen	53.000.000	DAU	-53.000.000	Efisiensi
4.01.01.2.14	**KEGIATAN PELAKSANAAN PROTO KOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	**Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan**	**Kab. Bangkalan**	81%	**200.876.000**		**Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan**	**Kab. Bangkalan**	81%	**252.315.000**		**51.439.000**	Bag. Protokol & Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bangkalan	127 Laporan	100.000.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bangkalan	91 Laporan	193.815.000	DAU	93.815.000	Biaya Pengawalan Pj. Bupati
4.01.01.2.14.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Bangkalan	2 Laporan	30.876.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Bangkalan	1 Laporan	8.500.000	DAU	-22.376.000	Efisiensi
4.01.01.2.14.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Bangkalan	4 Laporan	70.000.000	DAU	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Bangkalan	13 Laporan	50.000.000	DAU	-20.000.000	Efisiensi
4.01.01.2.01	**KEGIATAN PERENCANAAN PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bangkalan**	**80,50 %**	**74.280.000**		**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bangkalan**	**80,50 %**	**15.215.098**		**-59.064.902**	**Bag. Perenc dan Keu**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	3 Dokumen	25.921.000	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	3 Dokumen	10.000.000	DAU	-15.921.000	Efisiensi
4.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordi nasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	7.897.500	DAU	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordi nasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	271.650	DAU	-7.625.850	Efisiensi
4.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	5.626.600	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	212.800	DAU	-5.413.800	Efisiensi
4.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	9.217.000	DAU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	298.900	DAU	-8.918.100	Efisiensi
4.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	4.875.300	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	225.148	DAU	-4.650.152	Efisiensi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	2 Laporan	9.525.900	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	2 Laporan	510.700	DAU	-9.015.200	Efisiensi
4.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kiner ja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	4 Laporan	11.216.700	DAU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	4 Laporan	3.695.900	DAU	-7.520.800	Efisiensi
4.01.01.2.02	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kab. Bangkalan**	80,50 %	**18.998.767.075**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kab. Bangkalan**	80,50 %	**20.190.720.919**		**1.191.953.844**	Bag. Perenc dan Keu
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	210 Org/ Bulan	18.950.752.446	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	210 Org/ Bulan	20.183.926.119	DAU	1.233.173.673	Gaji/Tunj ASN, Gaji/Tunj P3K dan TPP P3K
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	12.350.000	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	400.600	DAU	-11.949.400	Efisiensi
4.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	6.775.129	DAU	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	310.300	DAU	-6.464.829	Efisiensi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11-6)	14
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	1 Laporan	19.929.500	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	1 Laporan	5.680.000	DAU	-14.249.500	Efisiensi
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dn Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	12 Laporan	8.960.000	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dn Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	12 Laporan	403.900	DAU	-8.556.100	Efisiensi

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan Tahun 2024 ini yang berisi Prioritas Program dan Kegiatan akan membantu dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan Tahun 2024 - 2026, serta guna mencapai target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Bangkalan tahun 2024. Rencana Kerja ini juga akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam Pengambilan Keputusan dan Penyusunan Rencana di masa mendatang oleh para Pembuat Keputusan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan di Tahun 2024.

Bangkalan, Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. IRMAN GUNADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650918 198602 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Rumusan sasaran, program , kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam Renja juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat agi masyarakat. Namun demikian, kondisi saat pelaksanan rencana ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan rencana untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun sampai triwulan II tahun 2024, dan kebijakan pemerintah pusat seperti; Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, PMK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Selain itu memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanan APBD kabupaten Bangkalan Tahun 2023, adanya perubahan asumsi pendapatan, serta pemanfaatan SILPA, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian skema pembangunan Tahun 2024.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023.

Lebih lanjut, setiap Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun (Renstra-PD) sebagai pedoman perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD. Renstra-PD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-PD tersebut, setiap PD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 tahun.

Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan PD. Selain itu, juga perlu disesuaikan dengan kondisi, permasalahan, kebutuhan, aspirasi, serta potensi yang ada. Sebagai dokumen rencana tahunan PD, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan mempunyai arti penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :
   a. Kerangka Ekonomi dan Keuangan daerah;
   b. Target sasaran pembangunan Daerah;
   c. Prioritas Pembangunan Daerah;

d. Penambahan / Pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;

e. Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD (Berdasarkan Hasil Masukan dan Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur).

3. Penetapan Perubahan RKPD dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 355 paling lambat minggu Ketiga bulan Juli.

4. Dalam menyesuaikan rencana Anggaran di setiap Kegiatan / Sub Kegiatan dimohon untuk memperhatikan ketercapaian target kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja-PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Maka dari itu, penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 (P-RKPD).

2. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*), serta pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

4. Perubahan Renja-PD yang telah tercantum dalam Perubahan KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P- RKA-SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) ;
4. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil

verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 5/D);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 42/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan;
16. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18/ E);
18. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 27/ E);
19. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan adalah mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan, dan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman, dan landasan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan yang akan dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset selama 1 tahun. Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan perkembangan kondisi lingkungan strategis daerah pada tahun berjalan.

1. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

a. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
b. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024
c. Menetapkan arah program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja;
d. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
e. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pembangunan melalui pencapaian indikator kinerja utama dan daerah sampai dengan tahun berjalan;
f. Mengarahkan dan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bangkalan;
g. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Pada bab 1 ini berisi mengenai penjelasan umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, serta hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya yang tersusun secara sistematik.

Bab II: Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2024 Sampai Triwulan II Tahun Berjalan

Pada bab 2 menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 dan capaian target yang telah di raih dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 sekaligus dilengkapi dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan yang telah dicapai pada tahun 2022. Selain itu, juga dibahas mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan.

Bab III: Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya pada bab 3, membahas mengenai matrik rancangan perubahan Renja Sekretariat DPRD pada tahun 2024.

Bab IV: Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGKALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan Sampai Semester Tahun Berjalan dan Capaian Renstra PD

Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Sekretariat DPRD merupakan unsur Pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Bangkalan, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan Tugasnya secara teknis Operasional berada dibawah dan Bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan sebagai penunjang pelaksanaan tugasnya, meliputi:

a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sedangkan mengenai struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum, membawahi:
    1) Kepala Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    2) Analis Kebijakan Ahli Muda;
    3) Analis Protokol dan Hubungan Masyarakat Ahli Muda.
3. Bagian Keuangan, membawahi:
    1) Perencana Ahli Muda;
    2) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
    3) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda.
4. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi:
    1) Perancang Perundang – Undangan Ahli Muda;
    2) Perisalah Legislatif Ahli Muda;
    3) Analis Pemantauan Peraturan Perundang – Undangan Legislatif Ahli Muda.
5. Bagian Penganggaran dan Pengawasan, membawahi:
    1) Analis Anggaran Ahli Muda;
    2) Analis Kebijakan Ahli Muda;
    3) Analis Kebijakan Ahli Muda.
6. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja

program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 2 program dan 18 kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024 di triwulan II dapat terealisasi rata-rata 31% sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka ***Tujuan*** yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026 adalah **"Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Fasilitasi Anggota DPRD ".**

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kesekretariatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral, dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Untuk lebih jelasnya, rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan dan capaian target Perubahan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan dan Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2024

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Kabupaten Bangkalan.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**									
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**85%**	**85%**
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dok	8 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dok	3 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dok	3 Dokumen	100%

4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dok	2 Dokumen	67%
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dok	2 Dokumen	67%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	5 Laporan	83%
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	36 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	30 Laporan	83%
4.02.01.02.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan PD Terlayani Tepat Waktu**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 orang/Bulan	39 orang/Bulan	36 orang/Bulan	36 orang/Bulan	100%	36 orang/Bulan	111 orang/Bulan	100%
4.02.01.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%
4.02.01.02.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%

4.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	198 Laporan	66 Laporan	66 Laporan	66 Laporan	100%	66 Laporan	198 Laporan	100%
4.02.01.02.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 Dokumen	100%
4.02.01.02.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani**	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
4.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	17 Paket	17 Paket	17 Paket	100%	-	34 Paket	100%
4.02.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	225 Orang	99 Orang	99 Orang	99 Orang	100%	27 Orang	225 Orang	100%
4.02.01.02.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
4.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	100%
4.02.01.02.06.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	100%
4.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%

4.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	100%
4.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134 Laporan	61 Laporan	61 Laporan	61 Laporan	100%	12 Laporan	134 Laporan	100%
4.02.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.02.01.02.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.01.02.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	91 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	83 Unit	91 Unit	100%
4.02.01.02.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	12 Laporan	16 Laporan	100%
4.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	19 Laporan	100%
4.02.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	12 Laporan	17 Laporan	100%

4.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	7 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%
4.02.01.02.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	60 Unit	100%
4.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	42 Unit	100%
4.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	6 Unit	100%
4.02.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	50 Unit	56 Unit	100%
4.02.01.02.14	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Kebutuhan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai ketentuan/tepat waktu**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%
4.02.01.02.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	33 Laporan	92%
4.02.01.02.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	33 Laporan	92%
4.02.01.02.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	36 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	33 Laporan	92%

4.02.01.02.15	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Kebutuhan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlayani sesuai ketentuan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%
4.02.01.02.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	153 Orang/Bulan	51 Orang/Bulan	51 Orang/Bulan	51 Orang/Bulan	100%	51 Orang/Bulan	153 Orang/Bulan	100%
4.02.01.02.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	126 Paket	60 Paket	58 Paket	58 Paket	100%	8 Paket	126 Paket	100%
4.02.01.02.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	50 Orang	-	-	-	-	50 orang	0%	0%
4.02.01.02.16	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52%	52%
4.02.01.02.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	18 Laporan	6 Laporan	-	-	-	12 Laporan	6 Laporan	33%
4.02.01.02.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	32 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	12 Laporan	20 Laporan	63%
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Prosentase Fasilitasi Pembahasan Hasil Rapat yang ditindak lanjuti**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.01	**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
5.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
5.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

5.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02	**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Prosentase Fasilitasi Pembahasan Hasil Rapat yang ditindak lanjuti**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	67%
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
4.02.02.2.03	**Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Prosentase Fasilitasi Rapat dan Koordinasi hasil Pengawasan laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	50%
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.02.02.2.04	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Prosentase Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Cetak Buku Kedewanan yang disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	89%
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	80%	5 Dokumen	14 Dokumen	93%

4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	11 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	6 Dokumen	6 Dokumen	55%
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	90 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	76 Orang	84%
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
4.02.02.2.05	**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Prosentase Fasilitasi Rapat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat melalui DPRD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	86%
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	72 Laporan	-	36 laporan	-	0%	36 Laporan	36 Laporan	50%
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	67%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	450 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	100%	150 Dokumen	400 Dokumen	89%
4.02.02.2.06	**Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Prosentase Fasilitasi Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik DPRD**	100%	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.08	**Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	**Prosentase Laporan fasilitasi Kunjungan Kerja, Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD**	100%	54%	100%	94%	94%	100%	83%	83%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	226 Dokumen	74 Dokumen	78 Dokumen	78 Dokumen	100%	74 Dokumen	189 Dokumen	84%
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-	-	-	-	-	-	-	-

4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50%

Bangkalan, Agustus 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

AKHMAD RONIYUN HAMID, ST.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196106081981031002

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan Program itu sendiri merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil guna menjalankan misi dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, adapun program di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

A. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dijabarkan dalam bentuk Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
   - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ;
   - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
   - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   - Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;

- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
   - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
   - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   - Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
   - Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;

- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
- Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
- Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;

9. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan ;
   - Sub. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
   - Sub. Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
   - Sub. Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
10. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD ;
   - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
   - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
11. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD ;
   - Sub. Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD
   - Sub. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dijabarkan dalam bentuk Kegiatan dan Sub. Kegiatan :
1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD ;
   - Sub. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
   - Sub. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
   - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
   - Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
   - Sub. Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD.
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran ;
   - Sub. Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
   - Sub. Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
   - Sub. Kegiatan Pembahasan APBD
   - Sub. Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
   - Sub. Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ;

- Sub. Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- Sub. Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD ;
   - Sub. Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
   - Sub. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
   - Sub. Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
   - Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
   - Sub. Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat ;
   - Sub. Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
   - Sub. Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
   - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Reses
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD ;
   - Sub. Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
   - Sub. Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD ;
   - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
   - Sub. Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan kata lain merupakan fenomena atau gejala petunjuk dari suatu variable yang sedang diamati, dipelajari atau diteliti. Jadi manakala kita ingin mengetahui intensitas suatu kegiatan, maka cukup kiranya kita ukur beberapa gejala petunjuk yang terkandung dalam kegiatan itu. Demikian pula ketika kita ingin mengetahui intensitas kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD kabupaten Bangkalan selama 3 (Tiga) tahun, dari tahun 2024 – 2026, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah menetapkan gejala petunjuk atau indikator kinerja dari setiap kegiatan pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

Perangkat Daerah

Tujuan							*Sasaran*							*Ket.*
Uraian	**Indikator Kinerja**	**Realisasi**			**Target**		**Uraian**	**Indikator Kinerja**	**Realisasi**			**Target**		
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**Perubahan**			**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Perubahan**	
1	**2**	**3**	**4**	**4**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**8**	**7**	**8**	**9**
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sektetariat DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	99%	94%	94%	100%	100%	
							Meningkatnya Pembahasan Raperda yang ditetapkan dan hasil kesepakatan Rapat yang ditindak lanjuti DPRD	Prosentase Raperda yang ditetapkan dan Hasil Kesepakatan Rapat Yang ditindaklanjuti DPRD	100%	97%	90%	100%	100%	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

AKHMAD RONIYUN HAMID, ST.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196106081981031002

Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7		8	10	11			12
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**												
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**42.268.840.130**	**DDI**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**	**Sekretariat DPRD**	100%	**42.591.133.388**	**DDI**	**1.157.850.210**	
4.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**68.146.700**	**DDI**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu**	**Sekretariat DPRD**	100%	**58.558.900**	**DDI**	-9.587.800	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	3 Dok	22.691.800	DDI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	3 Dok	19.101.450	DDI	-3.590.350	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dok	13.170.450	DDI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dok	10.441.900	DDI	-2.728.550	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dok	13.284.450	DDI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dok	10.015.550	DDI	-3.268.900	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dok	4.000.000	DDI	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dok	4.000.000	DDI	0	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dok	4.000.000	DDI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dok	4.000.000	DDI	0	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	2 Laporan	6.100.000	DDI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	2 Laporan	6.100.000	DDI	0	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Sekretariat DPRD	12 Laporan	4.900.000	DDI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Sekretariat DPRD	12 Laporan	4.900.000	DDI	0	
4.02.01.02.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan PD Terlayani Tepat Waktu**	**Sekretariat DPRD**	100%	**3.817.965.379**	**DDI**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan PD Terlayani Tepat Waktu**	**Sekretariat DPRD**	100%	**4.393.308.895**	**DDI**	########	
4.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	39 orang/Bulan	3.776.875.379	DDI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	39 orang/Bulan	4.357.978.945	DDI	########	
4.02.01.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	5.000.000	DDI	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Sekretariat	1 Dokume	4.750.000	DDI	- 250.000	

	SKPD	Keuangan SKPD					Keuangan SKPD	DPRD	n			
4.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat DPRD	1 Laporan	7.500.000	DDI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat DPRD	1 Laporan	6.000.000	DDI	-1.500.000	
4.02.01.02.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sekretariat DPRD	1 Dok	5.020.000	DDI	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	5.000.000	DDI	- 20.000	
4.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sekretariat DPRD	66 Laporan	23.570.000	DDI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sekretariat DPRD	66 Laporan	19.579.950	DDI	-3.990.050	
4.02.01.02.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**5.000.000**	**DDI**	**Persentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**5.000.000**	**DDI**	**-**	
4.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dok	5.000.000	DDI	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dok	5.000.000	DDI	-	
4.02.01.02.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**292.970.000**	**DDI**	**Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**140.088.000**	**DDI**	-152.882.000	
4.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sekretariat DPRD	79 Paket	21.860.000	DDI	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sekretariat DPRD	73 Paket	18.360.000	DDI	-3.500.000	
4.02.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	20 Orang	271.110.000	DDI	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	12 Orang	121.728.000	DDI	-149.382.000	
4.02.01.02.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**496.070.650**	**DDI**	**Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**316.035.600**	**DDI**	- 180.035.050	
4.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 Paket	24.458.750	DDI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 Paket	24.458.750	DDI	-	
4.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	3 Paket	84.574.750	DDI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	3 Paket	54.541.550	DDI	- 30.033.200	
4.02.01.02.06.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sekretariat DPRD	2 Paket	42.696.650	DDI	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sekretariat DPRD	2 Paket	22.694.800	DDI	- 20.001.850	
4.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 Paket	1.000.000	DDI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 Paket	1.000.000	DDI	0	
4.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 Paket	83.764.500	DDI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 Paket	53.764.500	DDI	- 30.000.000	

4.02.01.02.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	32.400.000	DDl	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	32.400.000	DDl	0	
4.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	20 Laporan	197.176.000	DDl	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	20 Laporan	97.176.000	DDl	-100.000.000	
4.02.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	30.000.000	DDl	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	30.000.000	DDl	0	
4.02.01.02.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**140.041.550**	**DDl**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**94.668.900**	**DDl**	- 45.372.650	
4.02.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sekretariat DPRD	63 Unit	140.041.550	DDl	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sekretariat DPRD	22 Unit	94.668.900	DDl	- 45.372.650	
4.02.01.02.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**2.509.303.700**	**DDl**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**2.300.819.148**	**DDl**	- 208.484.552	
4.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	12 Laporan	33.100.000	DDl	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	12 Laporan	15.100.000	DDl	- 18.000.000	
4.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	448.803.700	DDl	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	430.769.148	DDl	- 18.034.552	
4.02.01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	117.400.000	DDl	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	47.400.000	DDl	- 70.000.000	
4.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	1.910.000.000	DDl	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	1.807.550.000	DDl	- 102.450.000	
4.02.01.02.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**1.157.111.646**	**DDl**	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**966.898.000**	**DDl**	- 190.213.646	
4.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekretariat DPRD	20 unit	581.108.000	DDl	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekretariat DPRD	20 unit	581.108.000	DDl	-	
4.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sekretariat DPRD	14 Unit	190.010.000	DDl	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sekretariat DPRD	14 Unit	175.410.000	DDl	- 14.600.000	
4.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	2 Unit	81.176.200	DDl	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	2 Unit	40.180.000	DDl	- 40.996.200	
4.02.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	91 Unit	304.817.446	DDl	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	59 Unit	170.200.000	DDl	- 134.617.446	
4.02.01.02.14	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol**	**Persentase Kebutuhan protokol**		**100%**	**526.996.000**	**DDl**	**Persentase Kebutuhan protokol**		**100%**	**417.632.000**	**DDl**	- 109.364.000	

	dan Komunikasi Pimpinan	**dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai ketentuan/tepat waktu**	**Sekretariat DPRD**				**dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai ketentuan/tepat waktu**	**Sekretariat DPRD**				
4.02.01.02.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	140.961.000	DDI	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	95.632.000	DDI	- 45.329.000	
4.02.01.02.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat DPRD	1 laporan	81.035.000	DDI	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sekretariat DPRD	1 laporan	67.000.000	DDI	- 14.035.000	
4.02.01.02.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	305.000.000	DDI	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	255.000.000	DDI	- 50.000.000	
4.02.01.02.15	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Kebutuhan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlayani sesuai ketentuan?**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**32.776.579.545**	**DDI**	**Persentase Kebutuhan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlayani sesuai ketentuan?**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**33.787.514.245**	**DDI**	1.010.934.700	
4.02.01.02.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	51 orang/Bulan	32.671.657.045	DDI	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	51 orang/Bulan	33.249.157.045	DDI	577.500.000	
4.02.01.02.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	4 Paket	54.922.500	DDI	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	4 Paket	488.357.200	DDI	433.434.700	
4.02.01.02.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	Sekretariat DPRD	50 orang	50.000.000	DDI	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	Sekretariat DPRD	50 orang	50.000.000	DDI	-	
4.02.01.02.16	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**151.169.850**	**DDI**	**Persentase Layanan Administrasi DPRD**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**110.609.700**	**DDI**	- 40.560.150	
4.02.01.02.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	12 Laporan	15.780.000	DDI	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	12 Laporan	779.850	DDI	- 15.000.150	
4.02.01.02.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	12 Laporan	135.389.850	DDI	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		12 Laporan	109.829.850	DDI	- 25.560.000	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Prosentase Fasilitasi Pembahasan Hasil Rapat yang ditindak lanjuti**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**17.893.039.552**	**DDI**	**Prosentase Fasilitasi Pembahasan Hasil Rapat yang ditindak lanjuti**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**17.601.351.550**	**DDI**	- 291.688.002	
4.02.02.2.01	**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**1.404.724.700**	**DDI**	**Jumlah Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**1.167.506.300**	**DDI**	- 237.218.400	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	43.727.250	DDI	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	21.727.250	DDI	- 22.000.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	1.143.516.900	DDI	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	1.143.516.900	DDI	-	
5.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	44.930.000	DDI	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	844.150	DDI	- 44.085.850	
5.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	7.322.550	DDI	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau	Sekretariat	1 Dokume	703.950	DDI	- 6.618.600	

	Naskah Akademik	Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi					Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	DPRD	n				
5.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	165.228.000	DDI	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	714.050	DDI	- 164.513.950	
4.02.02.2.02	**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Prosentase Fasilitasi Pembahasan Hasil Rapat yang ditindak lanjuti**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**275.647.750**	**DDI**	**Prosentase Fasilitasi Pembahasan Hasil Rapat yang ditindak lanjuti**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**198.547.750**	**DDI**	- 77.100.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	32.424.550	DDI	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	21.324.550	DDI	- 11.100.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	21.762.050	DDI	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	16.037.050	DDI	- 5.725.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	100.447.050	DDI	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	65.072.050	DDI	- 35.375.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	60.507.050	DDI	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	48.057.050	DDI	- 12.450.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	60.507.050	DDI	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	48.057.050	DDI	- 12.450.000	
4.02.02.2.03	**Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Prosentase Fasilitasi Rapat dan Koordinasi hasil Pengawasan laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**524.984.500**	**DDI**	**Prosentase Fasilitasi Rapat dan Koordinasi hasil Pengawasan laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**457.984.500**	**DDI**	- 67.000.000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	59.117.000	DDI	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.117.000	DDI	- 55.000.000	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	465.867.500	DDI	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	453.867.500	DDI	- 12.000.000	
4.02.02.2.04	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Prosentase Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Cetak Buku Kedewanan yang disediakan**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**2.980.126.800**	**DDI**	**Prosentase Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Cetak Buku Kedewanan yang disediakan**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**3.300.490.800**	**DDI**	320.364.000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	2.113.401.650	DDI	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	2.399.605.650	DDI	286.204.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	94.777.850	DDI	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	347.937.850	DDI	253.160.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	30 Orang	632.174.900	DDI	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	30 Orang	457.174.900	DDI	- 175.000.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	121.118.800	DDI	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan	Sekretariat	1 Dokume	77.118.800	DDI	- 44.000.000	

		Masyarakat					Masyarakat	DPRD	n			
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	18.653.600	DDl	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	18.653.600	DDl	-
4.02.02.2.05	**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Prosentase Fasilitasi Rapat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat melalui DPRD**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**1.660.422.500**	**DDl**	**Prosentase Fasilitasi Rapat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat melalui DPRD**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**1.491.358.500**	**DDl**	- 169.064.000
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	12 Laporan	18.331.900	DDl	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	12 Laporan	1.331.900	DDl	- 17.000.000
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	47.200.300	DDl	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	7.200.300	DDl	- 40.000.000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	100 Dokumen	1.594.890.300	DDl	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	100 Dokumen	1.482.826.300	DDl	- 112.064.000
4.02.02.2.06	**Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Prosentase Fasilitasi Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik DPRD**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**21.605.400**	**DDl**	**Prosentase Fasilitasi Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik DPRD**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**864.250**	**DDl**	- 20.741.150
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	7.622.400	DDl	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	519.750	DDl	- 7.102.650
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	1 Laporan	13.983.000	DDl	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	1 Laporan	344.500	DDl	- 13.638.500
4.02.02.2.08	**Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	**Prosentase Laporan fasilitasi Kunjungan Kerja, Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**10.880.999.254**	**DDl**	**Prosentase Laporan fasilitasi Kunjungan Kerja, Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD**	**Sekretariat DPRD**	**100%**	**10.984.599.450**	**DDl**	103.600.196
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	10.620.049.254	DDl	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	10.800.837.050	DDl	180.787.796
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	12 Laporan	67.373.750	DDl	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	12 Laporan	524.950	DDl	- 66.848.800
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	193.576.250	DDl	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		1 Dokumen	183.237.450	DDl	- 10.338.800
	Jumlah Total				**59.689.865.924**					**60.185.284.938**		**3.344.390.960**

Bangkalan, Agustus 2024
Sekretaris DPRD Kab. Bangkalan

AKHMAD RONIYUN HAMID, S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197311302002121005

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat kondisi terkini kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat. Perubahan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini tetap mengacu pada target-target kinerja pada RENJA Tahun 2024 yang menjabarkan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan 2024-2026.

Pelaksanaan seluruh kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada PD di Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, Perubahan RENJA ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mengakomodir beberapa kebijakan terkini yang berdampak pada perubahan program dan kegiatan serta pendanaannya. Adanya perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan kebijakan program dan kegiatan serta kerangka pendanaannya, telah dijelaskan pada Bab 1, Bab 3, dan Bab 5 dalam dokumen Perubahan RENJA ini.

Dokumen Perubahan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan bagian penting dari rangkaian perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD, StakeHolder maupun Masyarakat untuk merumuskan Perubahan Rencana Kerja sehingga tercapai sinergi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pembangunan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan Renja ini masih sangat sederhana, sehingga senantiasa mengharapkan adanya saran ataupun kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaannya di masa depan.

Demikian Perubahan Renja ini dibuat, kami harap dokumen ini dapat memberikan manfaat serta berkontribusi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang ***good governance and good government***.

Bangkalan, Agustus 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

AKHMAD RONIYUN HAMID, ST.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196106081981031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan perubahan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai wujud dari kinerja 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Perubahan Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang.
4. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (outcome), indicator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar.1

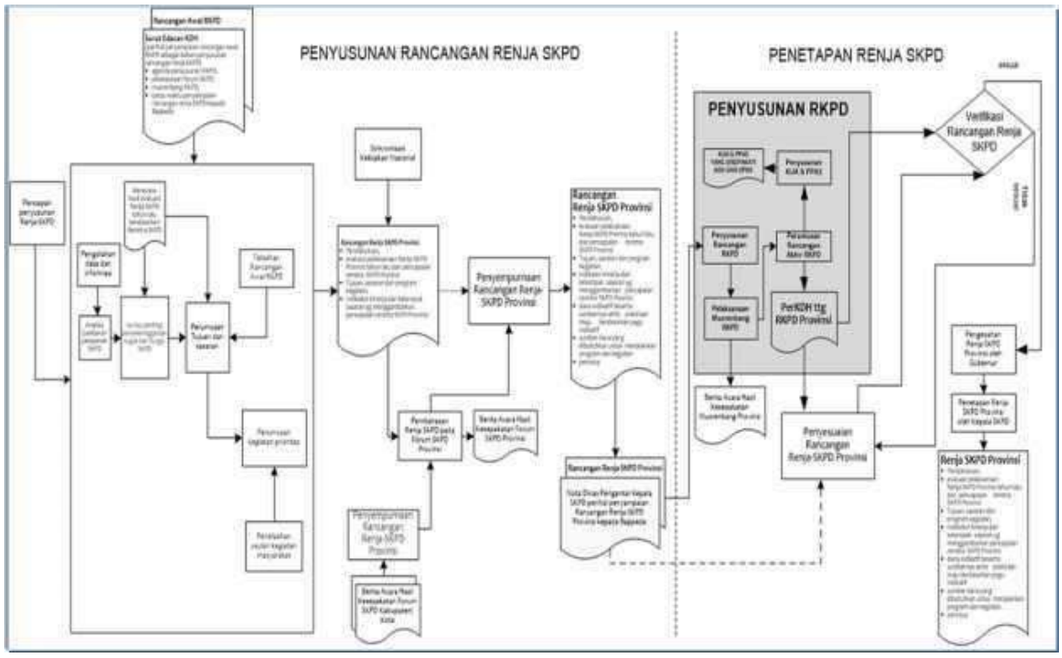

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hokum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahnan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daearah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renjana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D)
9. Peraturan Bupati bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2006 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahu 2023 Nomor 14 Seri E)
10. Peraturan Bupati bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2006 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahu 2023 Nomor 18 Seri E)
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)
12. Peraturan Bupati bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah(RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024n (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahu 2023 Nomor 27/E)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E)
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 8/D).

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan perubahan pagu program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besarisi dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagi berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN LALU
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan semester I tahun 2024
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah
  - 3.2 Matriks Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
- BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capain Renstra Perangkat

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dapat dilihat dari capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan pada tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan, Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD Pada Semester I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat terealisasi sesuai dengan rencana dan realisasi mencapai 92,72 %.

6 Program, 10 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat terdapat capaian Realisasi yaitu :

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan rata–rata telah mencapai angka 100% yang meliputi 6 program.

Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan disebabkan antara lain karena adanya kebijakan penguatan program/kegiatan/sub kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, seluruh program/kegiatan/sub kegiatan mengacu kepada DPA tahun berjalan, dalam implementasinya mengacu kepada Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dengan menggunakan indicator capaian program dalam Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024–2026. Dengan terpenuhinya target Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan maka menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai mekanisme Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 tahun berjalan dan Capain Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tertera dalam lampiran Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Perangkat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan Kluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun2023		Tingkat Realisasi (%)			RealisasiCapaian Program,Kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan(tahun 2024Semester 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI			100%	2.725.912.000	100%	2.725.912.000							
8.01.01.2.01	***Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Jumlah Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi			100%	14.000.000	100%	14.000.000							
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peragkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 dok	2.000.000	1 dok	4.000.000	1 dok	4.000.000	3 dok	1.463.550	0,37	2 dok	275.000	5.738.550	3
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Peyusunan PDA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	1 dok	2.000.000	4 dok	3.000.000	4 dok	3.000.000	1 dok	1.073.300	0,36	1 dok	375.000	4.448.300	2
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian inerja dan Ikhtisasr Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisasr Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	2.000.000	8 dok	3.500.000	8 dok	3.500.000	4 lap	1.295.350	0,37			4.795.350	2
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 lap	2.000.000	8 lap	3.500.000	8 lap	3.500.000		-	0,00			3.500.000	2
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia**													

8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 asn	3.946.240.631	45 ASN	3.725.941.604	45 ASN	3.725.941.604	45 orang	3.483.598.555	0,93	45 orang	2.076.267.342	9.285.807.501	2
8.01.01.2.02.05	Koordinasi da nPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	4 lap	2.500.000	4 Dok	3.500.000	4 Dok	3.500.000	4 lap	2.650.850	0,76	2 lap	630.000	6.780.850	3
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	8 lap	1.500.000	8 Dok	3.500.000	8 Dok	3.500.000	8 lap	2.546.550	0,73	4 lap	786.500	6.833.050	5
8.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia**			100%	16.000.000	100%	16.000.000			0,00			16.000.000	
8.01.01.2.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7 dok	2.000.000	7 Laporan	16.000.000	7 Laporan	16.000.000	7 dok	1.070.450	0,07			17.070.450	9
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia**			100%	100.000.000	100%	100.000.000			0,00			100.000.000	
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dab Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dab Fungsi			79 Orang	100.000.000	79 Orang	100.000.000			0,00			100.000.000	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**													
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	39.000.000	14 Jenis	10.000.000	14 Jenis	10.000.000	4 paket	9.617.500	0,96			19.617.500	1
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	40.000.000	4 Jenis	40.000.000	4 Jenis	40.000.000	4 paket	44.167.950	1,10	3 paket	15.563.800	99.731.750	2
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	20.000.000	3 Jenis	25.000.000	3 Jenis	25.000.000	3 paket	12.770.800	0,51	1 paket	1.276.000	39.046.800	2
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	34.000.000	2 Jenis	36.000.000	2 Jenis	36.000.000	2 paket	47.918.000	1,33	1 paket	19.807.250	103.725.250	3
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 dok	7.128.000	5 Jenis	7.128.000	5 Jenis	7.128.000	5 dok	6.695.000	0,94	2 dok	2.180.000	16.003.000	2

8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 lap	30.000.000	189 Kali	25.000.000	189 Kali	25.000.000	47 lap	52.701.183	2,11	7 lap	1.625.000	79.326.183	3
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**													
8.01.01.2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 unit	14.172.835	80 Unit	20.000.000	80 Unit	20.000.000	6 unit	43.310.000	2,17			63.310.000	4
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**			100%	2.396.252.000	100%	2.396.252.000			0,00			2.396.252.000	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	5.995.000	3 Jenis	6.000.000	3 Jenis	6.000.000	1 lap	4.710.000	0,79		1.310.000	12.020.000	2
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 lap	39.000.000	4 Jenis	39.000.000	4 Jenis	39.000.000	4 lap	45.570.050	1,17	3 lap	26.999.012	111.569.062	3
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 lap	1.419.407.614	19 Jenis	2.351.252.000	19 Jenis	2.351.252.000	12 lap	2.830.832.703	1,20	6 lap	1.010.565.225	6.192.649.928	4
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang terpenuhi**			100%	199.660.000	100%	199.660.000			0,00			199.660.000	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19 unit	109.310.500	16 Unit	146.660.000	16 Unit	146.660.000	19 unit	125.003.282	0,85	10 unit	4.072.250	275.735.532	3
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	2 unit	6.505.465	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	2 unit	14.050.500	1,41			24.050.500	4
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	47 unit	10.000.000	45 Unit	15.000.000	45 Unit	15.000.000	47 unit	14.245.000	0,95			29.245.000	3

0.00.01.2.05.02	Peningkatan disiplin Pegawai	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				28.000.000	78 orang	28.000.000			0,00			28.000.000	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			100%	73.766.850	100%	73.766.850			0,00			73.766.850	
8.01.02.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***			100%		100%							-	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	1 dok	2.500.000	2 dok	3.170.400	2 dok	3.170.400			0,00			3.170.400	1
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	1 dok	2.000.000	2 dok	4.475.750	2 dok	4.475.750			0,00		11.448.475	15.924.225	8
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah	20 or	25.000.000	500 orang	36.322.500	500 orang	36.322.500	30 orang	556.500	0,02			36.879.000	1
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	30 or	3.000.000	50 orang	25.772.700	50 orang	25.772.700			0,00			25.772.700	9

8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	30 or	1.500.000	25 orang	4.025.500	25 orang	4.025.500			0,00			4.025.500	3
08:01:05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				100%	146.293.150	100%	146.293.150			0,00			146.293.150	
8.01.05.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	***Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***			100%		100%							-	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yg tersusun	**2 dok**	1.500.000	2 dok	8.255.000	2 dok	8.255.000			0,00			8.255.000	6
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	1 dok	1.500.000	2 dok	16.110.700	2 dok	16.110.700			0,00			16.110.700	11

8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	133 or 1 lembaga	132.266.850	350 orang	108.021.950	350 orang	108.021.950	1 lembaga	99.965.000	0,93			207.986.950	2
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	20 or	3.500.000	50 orang	8.255.000	50 orang	8.255.000			0,00			8.255.000	2
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	20 or 1 lap	2.000.000	25 orang	5.650.500	25 orang	5.650.500			0,00			5.650.500	3
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			100%	7.090.894.100	100%	7.090.894.100			0,00			7.090.894.100	

8.01.03.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser***	Jumlah perumusan kebijakan yang tersusun			100%		100%							-	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan yang tersusun		1.000.000	1 keg	5.000.000	1 keg	5.000.000			0,00			5.000.000	5
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	2 keg	3.527.000.000	2 keg	7.075.894.100	2 keg	7.075.894.100	2 keg	35.834.331.750	5,06	100 orang	50.264.541.301	93.174.767.151	26

8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan		1.000.000	2 keg	5.000.000	2 keg	5.000.000			0,00			5.000.000	5
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Jumlah penerima hibah yang di Monev		1.000.000	1 keg	5.000.000	1 keg	5.000.000			0,00			5.000.000	5
08:01:04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			100%	55.000.000	100%	55.000.000			0,00			55.000.000	
8.01.04.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***			100%		100%							-	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun		1.000.000	1 keg	5.000.000	1 keg	5.000.000			0,00			5.000.000	5

8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 keg	25.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	40.000.000			0,00			40.000.000	2
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 2. Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan		2.000.000	1 keg	5.000.000	1 keg	5.000.000			0,00			5.000.000	3
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah penerima hibah yang di Monev		2.500.000	1 keg	5.000.000	1 keg	5.000.000	1 keg	6.661.900	1,33			11.661.900	5
08:01:06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI**			100%	509.500.000	100%	509.500.000			0,00			509.500.000	
8.01.06.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***			100%		100%				#DIV/0!			-	

8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfli	Jumlah masyarakat/aparatur yang mengikuti sosialisasi		1.500.000	40 orang	3.000.000	40 orang	3.000.000			0,00			3.000.000	2
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi	12 or	1.500.000	30 orang	2.000.000	30 orang	2.000.000			0,00			2.000.000	1
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	10 or	2.000.000	35 orang	1.500.000	35 orang	1.500.000			0,00			1.500.000	1

8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, s	1. Jumlah masyarakat/orang asing yang terpantau 2. Jumlah pemantauan terkait pemilihan umum		3.000.000	1. 15 orang 2. 30 orang	3.000.000	1. 15 orang 2. 30 orang	3.000.000	7 orang	1.775.000	0,59			4.775.000	2
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda		400.000.000	20 orang	500.000.000	20 orang	500.000.000	22 orang	377.968.291	0,76		56.778.000	934.746.291	2

Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/SPK/IKK/IKD Sampai dengan Semester 1 tahun 2024 Perangkat Daerah sebagaimana tertera dalam lampiran Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Evaluasi Pelaksanaan Indikator SMPM/NSPK/IKK/IKD Sampai dengan Semester I tahun 2024

No	Indikator	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika Ada Perubahan Target
		2020	2021	2022	2023			
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase masyarakat / pemuda yg sadar akan wawasan kebangsaan	100%	100%	96%	92%	100%	100%	
2	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah, ormas, LSM dan Parpol	97%	77%	94%	100%	100%	100%	
3	Persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dlm masyarakat	100%	98%	98%	99%	100%	100%	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja tahun 2024 Perangkat Daerah

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan suatu bagian dari pembangunan secara menyeluruh dimana adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan politik yang wujudnya tidak kelihatan, namun dampaknya begitu dominan di masyarakat. Partisiapasi politik merupakan suatu masalah yang dianggap penting pada akhir-akhir ini, banyak dipelajari orang terutama dalam kaitannya dengan perkembangan suatu daerah / negara. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrassi, secara konseptual, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang / sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, selain itu tingkat partisipasi masyarakat berbeda – beda hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : Umur, Jenis kelamin, Status ekonomi dan sosial, Pendidikan dan pekerjaan.

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja tahun 2024 Perangkat Daerah sebagaimana tertera dalam Lampiran Tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat daerah

Tujuan				Sasaran				Ket
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025			2024	2025	
Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat	Rata-Rata persentase pencegahan dan penanganan konflik SARA /Politik/Bela Negara	100%	100%	Meningkatnya masyarakat /pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan dan pemahaman P4GN	Persentase masyarakat / pemuda yg sadar akan wawasan kebangsaan	0,15%	0,16%	
				Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kerjasama pemerintah,Ormas,LSM,dan Parpol	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah, ormas, LSM dan Parpol	54%	69%	

				Penyelenggaraan, koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	Persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dlm masyarakat	63%	63%	
				Terpenuhinya tata kelola penyelenggara urusan bidang badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Nilai SAKIP Perangkat daerah	65%	65%	
					2. IKM	85,16%	85%	

3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Maksud penyusunan rencana kerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2024 adalah sebagai pedoman penetapan kerja bagi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten yang erat kaitannya dengan pemerintah, masyarakat dan pihak – pihak terkait untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan yang sinergis dengan pembangunan secara nasional.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan digunakan sebaagai instrumen dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan selama 1 tahun kedepan, dimana arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan tersebut untuk jangka waktu 1 tahun kedepan telah memenuhi target dan sasaran baik waktu dan sasaran yang dituju.

Dengan adanya Renja Perangkat Daerah kita akan tahu sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan yang sudah direncanakan itu Berhasil atau tidak dan sebagai review untuk tahun berikutnya agar program dan kegiatan yang direncanakan lebih berhasil dan secara langsung menyentuh dan dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya yang membutuhkan.

Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagaimana tertera dalam Lampiran Tabel 3.2

Tabel 3.2
Matriks rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024						
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11-6	14
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI	Bakesbangpol			APBD	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI	Bakesbangpol			APBD		
8.01.01.2.01	***Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Jumlah Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	Bakesbangpol			APBD	Jumlah Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	Bakesbangpol			APBD		
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peragkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Bakesbangpol	3 dok	500.000	APBD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Bakesbangpol	3 dok	500.000	APBD	-	
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Peyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	Bakesbangpol	1 dok	375.000	APBD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	Bakesbangpol	1 dok	375.000	APBD	-	
8.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia**	Bakesbangpol			APBD	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia**	Bakesbangpol		-	APBD		
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol	45 orang	4.160.514.681	APBD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol	45 orang	3.832.344.342	APBD	- 328.170.339	Penyesuain kebutuhan
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Bakesbangpol	4 lap	1.530.750	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Bakesbangpol	4 lap	1.530.750	APBD	-	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	Bakesbangpol	4 lap	1.238.150	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	Bakesbangpol	4 lap	1.238.150	APBD	-	
8.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	Bakesbangpol			APBD	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	Bakesbangpol			APBD	-	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bakesbangpol	4 paket	23.887.000	APBD	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bakesbangpol	4 paket	23.887.000	APBD	-	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bakesbangpol	3 paket	4.119.000	APBD	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bakesbangpol	3 paket	4.119.000	APBD	-	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bakesbangpol	2 paket	24.167.700	APBD	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bakesbangpol	2 paket	24.167.700	APBD	-	

8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bakesbangpol	5 dok	5.702.400	APBD	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bakesbangpol	5 dok	5.702.400	APBD	-	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpol	47 lap	6.916.000	APBD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpol	47 lap	6.916.000	APBD	-	
8.01.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	Bakesbangpol			APBD	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	Bakesbangpol			APBD	-	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bakesbangpol	1 lap	4.570.000	APBD	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bakesbangpol	1 lap	4.570.000	APBD	-	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bakesbangpol	4 lap	34.800.000	APBD	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bakesbangpol	4 lap	34.800.000	APBD	-	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bakesbangpol	12 lap	1.572.455.000	APBD	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bakesbangpol	12 lap	1.572.455.000	APBD	-	
8.01.01.2.09	***Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	Bakesbangpol			APBD	**Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	Bakesbangpol			APBD	-	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bakesbangpol	19 unit	8.000.000	APBD	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bakesbangpol	19 unit	8.000.000	APBD	-	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Bakesbangpol			APBD	**PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Bakesbangpol			APBD	-	
8.01.02.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	Bakesbangpol			APBD	***Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	Bakesbangpol			APBD	-	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah	Bakesbangpol	20 orang	408.185.000	APBD	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah	Bakesbangpol	20 orang	408.185.000	APBD	-	

8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**PERSENTASE LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DILAKUKAN PENINGKATAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Bakesbangpol			APBD	**PERSENTASE LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DILAKUKAN PENINGKATAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Bakesbangpol			APBD	-	
8.01.03.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***	***Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser***	Bakesbangpol			APBD	***Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser***	Bakesbangpol			APBD	-	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pololitik di daerah	1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Bakesbangpol	100 orang	51.559.100.000	APBD	1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Bakesbangpol	100 orang	51.559.100.000	APBD	-	
08:01:04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Bakesbangpol			APBD	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Bakesbangpol			APBD	-	
8.01.04.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	Bakesbangpol			APBD	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	Bakesbangpol		-	APBD	-	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah penerima hibah yang di Monev	Bakesbangpol	12 orang	8.990.000	APBD	Jumlah penerima hibah yang di Monev	Bakesbangpol	12 orang	8.990.000	APBD	-	
08:01:05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		Bakesbangpol			APBD		Bakesbangpol			APBD	-	

8.01.05.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	***Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	Bakesbangpol			APBD	***Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	Bakesbangpol			APBD		
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	Bakesbangpol		50.000.000	APBD	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	Bakesbangpol		50.000.000	APBD	-	
08:01:06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI**	Bakesbangpol			APBD	**PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI**	Bakesbangpol			APBD	-	
8.01.06.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	Bakesbangpol			APBD	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	Bakesbangpol			APBD	-	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda	Bakesbangpol	133 orang	150.000.000	APBD	Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda	Bakesbangpol	133 orang	150.000.000	APBD	-	
	JUMLAH				**58.025.050.681**					**57.696.880.342**		**- 328.170.339**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi da Misi Bupati Bangkalan, serta target dan sasaran pembangunan yang di operasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena itu ada 6 Program prioritas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
4. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Program tersebut diatas penting untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024, karena program tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran Pembangunan Bangkalan tahun 2024.

Bangkalan, Juli 2024

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

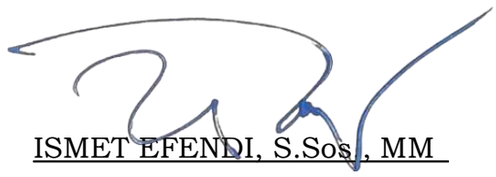

ISMET EFENDI, S.Sos , MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681220 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan BangkalanTahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. P Renja Tahun 2024 disebabkan karena dalam tahun berjalan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi: prioritas pembangunan daerah, target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

P-Renja Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan berbagai dokumen perencanaan bagi penentu kebijakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih *(good governance and clean government)* serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah turut aktif memberi masukan dalam menyusun, memproses dan menguraikan indikator kinerja serta perubahan anggaran atas penyusunan P-Renja Kecamatan BangkalanTahun 2024 sehingga publikasi ini dapat terwujud.

Bangkalan, Juli 2024

CAMAT BANGKALAN

CICIK HIDIAH, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197708092003122005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Pasal 343 serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 pasal 11 yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan P-Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan yang meliputi: prioritas pembangunan daerah, target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah; target sasaran pembangunan daerah; rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyusunan P-Renja Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Bappeda Kabupaten Bangkalan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan- Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan**;**
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18/E);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan P-Renja Kecamatan BangkalanTahun 2024 adalah:

Maksud:

Untuk merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen P-Renja Kecamatan Bangkalanperiode 1 (satu) tahun.

Tujuan:

a. Sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
b. Sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan P-Renja Kecamatan BangkalanTahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

Bab 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 3.1 Tujuan dan Sasaran P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

3.2 Matrik Rancangan P-Renja Tahun 2024

Bab 4 Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah dengan memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses penyusunan perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi yang berhubungan dengan pencapaian kinerja perangkat daerah untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Pelaksanaan evaluasi ini sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk:

1. Mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Mengetahui program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Mengetahui implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2024-2026 tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini:

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2024, yaitu:

1. Realisasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 s/d tahun 2023 tidak bisa disandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan perbedaan renstra;
2. Realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan semester I tahun 2024 masih rendah dikarenakan kebanyakan outputnya di triwulan III dan IV.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/ NSPK/ IKK/ IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

Analisis kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bangkalan didasarkan pada pencapaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

No	Indikator Tujuan dan Sasaran	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika ada perubahan target)
		2020	2021	2022	2023			
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90				
	Meningkatnya aparatur desa yang dibina	Prosentase aparatur/perangkat desa yang terbina	80%	75%				
	Meningkatnya Pelayanan Internal Kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	90	85				
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan				86,79	87,78	87,78	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Socah				51,55	60,41	60,41	

Berdasarkan pada tabel diatas, terdapat 2 periode Renstra yaitu Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra Tahun 2024-2026 dimana ada perbedaan indikator kinerja yang digunakan sehingga tidak bisa disandingkan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 mengenai apa yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Bappeda Kabupaten Bangkalan mendukung Tujuan RPD ke-4 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra	P-Renja Tahun 2024			Renstra	P- Renja Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Bangkalan	87,78	87,78	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	87,78	87,78	
				Nilai SAKIP Kecamatan Socah	Nilai SAKIP Kecamatan Socah	60,41	60,41	Karena realisasi semester I sudah mencapai 84% dan indeks kepuasan masyarakat tidak dapat diprediksi

3.2 Matrik Rancangan P-Renja Tahun 2024

Bappeda Kabupaten Bangkalan berdasarkan tugas dan fungsinya melakukan penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan. Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:

1. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
2. Terlaksananya asistensi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan semua Perangkat Daerah untuk

menciptakan perencanaan pembangunan yang berdaya guna dan bermanfaat.

3. Tersedianya sarana dan prasana dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan Bappeda Kabupaten Bangkalan.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 13,572,184,993,- dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	ANGGARAN
1	2	3	4
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	24.940.365
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	. 7.487.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	. 2.562.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	2.375.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	2.625.000

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	2.709.250
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	2.056.115
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun	. 5.125.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**ersentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterpenuhi**	. 8.277.709.207
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.269.406.782
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah LaporanPelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2.562.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	. 3.139.925
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusun	2.600.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penyedia Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.568.577
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor kec. Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.312.650
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.212.250

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	. 3.300.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.093.677
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	1.125.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.458.800
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bnagunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27.458.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintatahan (Kec. Bangkalan)**	2.021.365.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48.925.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Pangeranan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.457.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Demangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.457.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.457.500

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Kemayoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.457.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Bancaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.457.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Mlajah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.457.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kel. Pejagan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.457.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.972.440.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Pangeranan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	287.920.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Demangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	. 161.177.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	208.177.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Kemayoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	161.177.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Bancaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	172.920.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Mlajah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	256.021.175

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Pejagan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	295.377.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.919.998
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	.24.709.998
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	. 5.210.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	. 25.000.000
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	10.000.000
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Presentase Penyeleglaraan Pemerintahan dan Pelayann Publik yang terpenuhi	
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000
	Penyelengalaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah di unit Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.000
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000

	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		. 11.950.000
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa		. 11.950.000
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	. 11.950.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlajah	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	200.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bancaran	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	333.463.971
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pejagan	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	200.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemayoran	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	200.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demangan	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	200.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kraton	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	200.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pangeranan	Terlaksananya KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Keluraha	200.000.000

	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyeleglaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
	Fasilitasi, Remomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BANGKALAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BANGKALAN							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.700.000,00**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 indeks**	**100 indeks**	**12.144.702.035,00**	**12.239.345.895,00**	**12.165.991.275,00**	**871.249.969,00**							**13.015.952.004,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Penyedia Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	220.906.500,00	26.740.650,00	19.568.577,00	-201.337.923,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kecamatan Bangkalan		116.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11.700.000,00	0,00	0,00	-11.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terpenuhinya tersusunnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	14.500.000,00	24.940.365,00	24.940.365,00	10.440.365,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kecamatan Bangkalan		21.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	7.487.500,00	7.487.500,00	7.487.500,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			12.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.562.500,00	2.562.500,00	2.562.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.709.250,00	2.709.250,00	2.709.250,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	2.056.115,00	2.056.115,00	2.056.115,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	7.913.232.505,00	8.419.984.080,00	8.426.929.460,00	513.696.955,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kecamatan Bangkalan		8.803.793.504,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				109 Orang/ bulan	109 Orang/ bulan	0,00	8.411.681.655,00	8.418.627.035,00	8.418.627.035,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			8.799.293.504,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.562.500,00	2.562.500,00	2.562.500,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	3.139.925,00	3.139.925,00	3.139.925,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase Terpenuhinya Administrasi Barang milik Daerah pada PD*				100 %	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Penyedia Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	220.906.500,00	26.740.650,00	19.568.577,00	-201.337.923,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kecamatan Bangkalan		116.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	1.703.400,00	1.312.650,00	1.312.650,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	15.037.250,00	12.212.250,00	12.212.250,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			35.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			8.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	1.005.000,00	1.093.677,00	1.093.677,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			35.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	0,00	2.275.000,00	525.000,00	525.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	3.420.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			35.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 % 1 Unit	60.000.000,00	27.458.800,00	27.458.800,00	-32.541.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kecamatan Bangkalan		150.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	27.458.800,00	27.458.800,00	27.458.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			150.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintatahan (Kec. Bangkalan)*				100 %	100 %	3.711.371.000,00	3.656.897.000,00	3.612.174.075,00	-99.196.925,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		3.685.158.500,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	54.029.500,00	48.925.400,00	48.925.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			70.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	2.082.825.000,00	1.972.440.000,00	1.972.440.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			2.010.044.500,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	213.692.030,00	83.325.000,00	54.919.998,00	-158.772.032,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		240.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	48.150.000,00	24.709.998,00	24.709.998,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			60.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	10.175.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			30.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			150.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**NON URUSAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	50.000.010,00	0,00	0,00	-50.000.010,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.170.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**12.830.000,00**							**14.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana*				100 %	1 Koordinasi	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kecamatan Bangkalan		8.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			8.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				1 laporan	100 % 1 laporan	170.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.830.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kecamatan Bangkalan		6.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	170.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.830.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			6.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**1.763.800.000,00**	**1.415.000.000,00**	**1.545.413.971,00**	**-201.800.000,00**							**1.562.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				12 Koordinasi	12 Koordinasi	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana*				100 %	100 %	10.000.000,00	1.415.000.000,00	1.545.413.971,00	1.535.413.971,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kecamatan Bangkalan		1.562.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	15.000.000,00	11.950.000,00	1.950.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			12.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**				**100 %**	**100 %**	**7.288.300,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**4.711.700,00**							**12.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* *Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				12 Koordinasi	12 koordinasi	7.288.300,00	5.000.000,00	0,00	-7.288.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kecamatan Bangkalan		12.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.288.300,00	5.000.000,00	0,00	-7.288.300,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			12.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**100 %**	**-**	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**-7.000.000,00**							**8.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				90 %	1 Dokumen	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kecamatan Bangkalan		8.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			8.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
		KELURAHAN MLAJAH							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 indeks**	**100 indeks**	**12.144.702.035,00**	**12.239.345.895,00**	**12.165.991.275,00**	**871.249.969,00**							**13.015.952.004,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Penyedia Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	220.906.500,00	26.740.650,00	19.568.577,00	-201.337.923,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		116.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.752.000,00	0,00	0,00	-4.752.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.308.000,00	0,00	0,00	-5.308.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7	**NON URUSAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.850.000,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.920.000,00	0,00	0,00	-7.920.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.711.371.000,00	3.656.897.000,00	3.612.174.075,00	-99.196.925,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		3.685.158.500,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.457.500,00	6.901.175,00	6.901.175,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			8.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	251.520.000,00	249.120.000,00	249.120.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			200.789.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	213.692.030,00	83.325.000,00	54.919.998,00	-158.772.032,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		240.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	3.950.000,00	0,00	0,00	-3.950.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7	**NON URUSAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.763.800.000,00**	**1.415.000.000,00**	**1.545.413.971,00**	**-201.800.000,00**							**1.562.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	10.000.000,00	1.415.000.000,00	1.545.413.971,00	1.535.413.971,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.562.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	2 Pokmas / Ormas	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			250.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-						1.748.800.000,00	0,00	0,00	-1.748.800.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05.0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
		KELURAHAN PANGERANAN							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 indeks**	**100 indeks**	**12.144.702.035,00**	**12.239.345.895,00**	**12.165.991.275,00**	**871.249.969,00**							**13.015.952.004,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	220.906.500,00	26.740.650,00	19.568.577,00	-201.337.923,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		116.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.399.000,00	0,00	0,00	-1.399.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pangeranan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.900.000,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pangeranan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Mlajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pangeranan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pangeranan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.711.371.000,00	3.656.897.000,00	3.612.174.075,00	-99.196.925,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		3.685.158.500,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.457.500,00	8.180.000,00	8.180.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pangeranan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			8.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	283.320.000,00	280.920.000,00	280.920.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pangeranan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				289.905.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	213.692.030,00	83.325.000,00	54.919.998,00	-158.772.032,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		240.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	3.950.000,00	0,00	0,00	-3.950.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pangeranan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pangeranan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pangeranan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.763.800.000,00**	**1.415.000.000,00**	**1.545.413.971,00**	**-201.800.000,00**							**1.562.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	10.000.000,00	1.415.000.000,00	1.545.413.971,00	1.535.413.971,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.562.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	0 Pokmas / Ormas	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pangeranan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				210.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	1.748.800.000,00	0,00	0,00	-1.748.800.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05.0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	259.200.000,00	0,00	0,00	-259.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
		KELURAHAN DEMANGAN							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 indeks**	**100 indeks**	**12.144.702.035,00**	**12.239.345.895,00**	**12.165.991.275,00**	**871.249.969,00**							**13.015.952.004,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	220.906.500,00	26.740.650,00	19.568.577,00	-201.337.923,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		116.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.711.371.000,00	3.656.897.000,00	3.612.174.075,00	-99.196.925,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		3.685.158.500,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.457.500,00	7.457.500,00	7.457.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			12.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	195.120.000,00	193.120.000,00	193.120.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			202.005.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	213.692.030,00	83.325.000,00	54.919.998,00	-158.772.032,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		240.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	3.950.000,00	0,00	0,00	-3.950.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7	**NON URUSAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.763.800.000,00**	**1.415.000.000,00**	**1.545.413.971,00**	**-201.800.000,00**							**1.562.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	10.000.000,00	1.415.000.000,00	1.545.413.971,00	1.535.413.971,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.562.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	0 Pokmas / Ormas	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Demangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			210.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	1.748.800.000,00	0,00	0,00	-1.748.800.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05.0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
		KELURAHAN KRATON							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 indeks**	**100 indeks**	**12.144.702.035,00**	**12.239.345.895,00**	**12.165.991.275,00**	**871.249.969,00**							**13.015.952.004,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	220.906.500,00	26.740.650,00	19.568.577,00	-201.337.923,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		116.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	968.000,00	0,00	0,00	-968.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.711.371.000,00	3.656.897.000,00	3.612.174.075,00	-99.196.925,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		3.685.158.500,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.457.500,00	7.457.500,00	7.457.500,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				8.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	202.920.000,00	200.720.000,00	200.720.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				209.505.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	213.692.030,00	83.325.000,00	54.919.998,00	-158.772.032,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		240.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.763.800.000,00**	**1.415.000.000,00**	**1.545.413.971,00**	**-201.800.000,00**							**1.562.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	10.000.000,00	1.415.000.000,00	1.545.413.971,00	1.535.413.971,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.562.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	0 Pokmas / Ormas	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				210.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	1.748.800.000,00	0,00	0,00	-1.748.800.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05.0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
		KELURAHAN KEMAYORAN							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 indeks**	**100 indeks**	**12.144.702.035,00**	**12.239.345.895,00**	**12.165.991.275,00**	**871.249.969,00**							**13.015.952.004,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	220.906.500,00	26.740.650,00	19.568.577,00	-201.337.923,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		116.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kemayoran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kemayoran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kemayoran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kemayoran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kemayoran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.711.371.000,00	3.656.897.000,00	3.612.174.075,00	-99.196.925,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	kelurahan kemayoran		3.685.158.500,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.457.500,00	7.457.500,00	7.457.500,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kemayoran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	156.120.000,00	153.720.000,00	153.720.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			165.005.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	213.692.030,00	83.325.000,00	54.919.998,00	-158.772.032,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		240.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kemayoran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kemayoran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kemayoran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.763.800.000,00**	**1.415.000.000,00**	**1.545.413.971,00**	**-201.800.000,00**							**1.562.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	10.000.000,00	1.415.000.000,00	1.545.413.971,00	1.535.413.971,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	kelurahan kemayoran		1.562.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	2 Pokmas / Ormas	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kemayoran	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			250.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	1.748.800.000,00	0,00	0,00	-1.748.800.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05.0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Kemayoran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
		KELURAHAN PEJAGAN							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 indeks**	**100 indeks**	**12.144.702.035,00**	**12.239.345.895,00**	**12.165.991.275,00**	**871.249.969,00**							**13.015.952.004,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	220.906.500,00	26.740.650,00	19.568.577,00	-201.337.923,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		116.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	988.000,00	0,00	0,00	-988.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	3.711.371.000,00	3.656.897.000,00	3.612.174.075,00	-99.196.925,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	KELURAHAN PEJAGAN		3.685.158.500,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.457.500,00	7.457.500,00	7.457.500,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			9.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	205.920.000,00	287.920.000,00	287.920.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			300.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	213.692.030,00	83.325.000,00	54.919.998,00	-158.772.032,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		240.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.763.800.000,00**	**1.415.000.000,00**	**1.545.413.971,00**	**-201.800.000,00**							**1.562.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	10.000.000,00	1.415.000.000,00	1.545.413.971,00	1.535.413.971,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	KELURAHAN PEJAGAN		1.562.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	0 Pokmas / Ormas	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			210.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	1.748.800.000,00	0,00	0,00	-1.748.800.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05.0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Pejagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
		KELURAHAN BANCARAN							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.920.260.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-198.855.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 indeks**	**100 indeks**	**12.144.702.035,00**	**12.239.345.895,00**	**12.165.991.275,00**	**871.249.969,00**							**13.015.952.004,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	220.906.500,00	26.740.650,00	19.568.577,00	-201.337.923,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		116.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.040.000,00	0,00	0,00	-1.040.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	616.000,00	0,00	0,00	-616.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.560.000,00	0,00	0,00	-2.560.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.575.000,00	0,00	0,00	-1.575.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintatahan (Kec. Bangkalan) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 % 1 Dokumen	3.711.371.000,00	3.656.897.000,00	3.612.174.075,00	-99.196.925,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	KELURAHAN BANCARAN		3.685.158.500,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.457.500,00	7.457.500,00	7.457.500,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			9.500.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	172.920.000,00	172.920.000,00	172.920.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			181.905.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	213.692.030,00	83.325.000,00	54.919.998,00	-158.772.032,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		240.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01	**KECAMATAN**							**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**-210.555.089,00**							**14.611.952.004,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.763.800.000,00**	**1.415.000.000,00**	**1.545.413.971,00**	**-201.800.000,00**							**1.562.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	10.000.000,00	1.415.000.000,00	1.545.413.971,00	1.535.413.971,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	KELURAHAN BANCARAN		1.562.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	0 Pokmas / Ormas	0,00	200.000.000,00	333.463.971,00	333.463.971,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			210.000.000,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	1.748.800.000,00	0,00	0,00	-1.748.800.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	7.01.03.2.05.0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	189.600.000,00	0,00	0,00	-189.600.000,00	Kab. Bangkalan, Bangkalan, Bancaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum 4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BANGKALAN
	J U M L A H								**13.931.960.335,00**	**13.674.345.895,00**	**13.721.405.246,00**	**276.961.968.621,00**							**14.611.952.004,00**	

BAB V
PENUTUP

P-Renja Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 disebabkan karena dalam tahun berjalan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi: prioritas pembangunan daerah, target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dalam P-Renja Tahun 2024, Kecamatan Bangkalan melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bangkalan, diharapkan seluruh pegawai dapat melaksanakan P-Renja Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, P-Renja dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dilakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan P-Renja Tahun 2024.

Bangkalan, Juli 2024

CAMAT BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN KECAMATAN BANGKALAN

CICIK FIDIAH, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197708092003122009

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA OPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Socah dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Socah Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Socah tahun 2024, capaian pembangunan Kecamatan Socah tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan usulan kegiatan di Kecamatan Socah pada Tahun 2024 yang memuat prioritas pembangunan Kecamatan Socah yang dijabarkan dalam program dan target pencapaian program untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan Kecamatan Socah di Kabupaten Bangkalan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Socah Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Socah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA OPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024 Kecamatan Socah didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku,yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Rrepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2014 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37)
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18/E);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD 3 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

Adapun Tujuan penyusunan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.

3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah–langkah/ kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun Berjalan

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
  - Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024)

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah
  - Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 PD
- 3.2 Program dan Kegiatan
  - Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024

BAB IV. Penutup

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan (2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan 2024-2026, dimana tetap memperhatikan isu-isu yang berkembang di Kecamatan Socah.

Dengan adanya Rencana Kerja tersebut kita dapat menentukan arah Tahun 2024 dimana ada 5 Program dan 12 Kegiatan serta 27 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
e. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari program-program diatas, Belanja Pembangunan Kecamatan Socah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.025.675.535,- dan sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.651.839.596,- atau terealisir 54,59% dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan, dengan rincian program dan kegiatan antara lain :

I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

a). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 1.900.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 1.044.700,- .Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 733.000,- atau sebesar 70,16%.

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan :

a). Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 6.850.000,-. setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 2.500.000. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.500.000,- atau sebesar 100%.

b) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan SDM yang berkualitas dan Berdaya saing dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.007.950,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 0,. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang mengikutu peningkatan kesdaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan SDm yang berkualitas dan berdaya saing. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.

III. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan Kegiatan :

c). Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah dengan alokasi dana sebesar Rp 1.100.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 0,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan sinergistas yang dilaksanakan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan dengan Kegiatan :

d). Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan dengan Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan alokasi dan sebesar Rp. 1.500.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.0,-.Keluaran kegiatan adalah Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan alokasi awal sebesar Rp. 5.000.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 0,-Keluaran kegiatan adalah Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mengikuti diklat/bimtek. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan Kegiatan :

e). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 1.096.550,-, setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 392.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 392.000,- atau sebesar 100%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000, setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 0,- Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000, setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 0,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 468.700,- setelah adanya rekorfusing atau

pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 256.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 256.000,- atau sebesar 100%.

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 0, setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 0,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 0, setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 0,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

f). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 2.341.150.535,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 2.293.263.861,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.310.997.498,- atau sebesar 56.54%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 719.500,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 719.500,- .Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 719.500,- atau sebesar 100%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 0,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 0,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/semester. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

g). Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 0,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 0,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

h). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 650.800,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 650.800,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 650.800,- atau sebesar 100%.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.085.756,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 10.085.756,-. Keluaran kegiatan ini Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.522.000,- atau sebesar 54.75%.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.526.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 5.639.300,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.899.000,- atau sebesar 29,99%.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.500.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 1.750.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 970.000,- atau sebesar 38,88%.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinassi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 750.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi

sebesar Rp. 0,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

i). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 0,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 35.794.744,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 35.794.744,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 35.794.744,- atau sebesar 100%.

j). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 23.000.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 23.000.000,-.Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.452.715,- atau sebesar 45,86%.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 535.230.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 531.655.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 247.532.859,- atau sebesar 46.25%.

k). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 29.205.000,- setelah adanya recorfusing berubah menjadi sebesar Rp. 26.705.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.929.480,- atau sebesar 40,85%.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 20.000.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 100%.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukng Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 5.940.000,-. Setelah adanya recorfusing berubah menjadi sebesar Rp. 5.640.000,-Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.490.000,- atau sebesar 54,86%.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Socah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020																	
7	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan																
7.01	Urusan Kecamatan																
7.01.02	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI	**100%**	**13,500,000**	-	**2,155,400**	-	**2,155,400**	-	**2,155,400**	-	-	**90%**	**1,900,000**	**90%**	**6,210,800**	66.67
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	**30 Layanan**	**13,500,000**	-	**2,155,400**	**10 Layanan**	**2,155,400**	**10 Layanan**	**2,155,400**	-	-	**10 Layanan**	**1,900,000**	**20 Layanan**	**6,210,800**	66.67
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 Lap	13,500,000	16 Lap	2,155,400	16 Lap	2,155,400	16 Lap	2,155,400	100.00	100.00	16 Lap	1,900,000	22 Lap	6,210,800	66.67
7.01.03	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI	**100%**	**40,500,000**	-	**9,000,000**	-	**9,000,000**	-	**9,000,000**	-	-	**90%**	**7,857,950**	**90%**	**25,857,950**	**100.00**

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**3 Koordinasi**	**27,000,000**	-	**9,000,000**	**1 Koordinasi**	**9,000,000**	**1 Koordinasi**	**9,000,000**	-	-	**1 Koordinasi**	**6,850,000**	**2 Koordinasi**	**24,850,000**	**66.67**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	66 Lembaga	27,000,000	22 Lembaga	9,000,000	22 Lembaga	9,000,000	22 Lembaga	9,000,000	100.00	100.00	22 Lembaga	6,850,000	44Lembaga	24,850,000	66.67
7.01.03.2.01.03	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**3 Keg**	**13,500,000**		**-**	Keg	**-**	Keg	-	-	-	**1 Keg**	**1,007,950**	**Keg**	**1,007,950**	33.33
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 Keluarga	13,500,000	Lembaga	-	Lembaga	-	Lembaga	-	-	-	20 Keluarga	1,007,950	20 Keluarga	1,007,950	33.33
7.01.04	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	**100%**	**13,500,000**		**-**		**-**		**-**			**100%**	**1,100,000**		**1,100,000**	
7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	*Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	**3 Koordinasi**	**13,500,000**		**-**	**Koordinasi**	**-**	**Koordinasi**	**-**			**1 Koordinasi**	**1,100,000**	**Koordinasi**	**1,100,000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Lap	13,500,000	Lembaga	-	Lap	-	Lap	-	-	-	1 Lap	1,100,000	1 Lap	1,100,000	33.33
7.01.06	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**100%**	**21,000,000**		**667,050**		**667,050**		**667,050**			**100%**	**1,500,000**		**2,834,100**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	**100%**	**21,000,000**		**667,050**		**667,050**		**667,050**			**100%**	**1,500,000**		**2,834,100**	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	3 Dok	6,000,000	1 Dok	667,050	1 Dok	667,050	1 Dok	667,050	100.00	100.00	1 Dok	1,500,000	2 Dok	2,834,100	66.67

		Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3 Dok	15,000,000	Dok	-	Dok	-	Dok	-	-	-	1 Dok	-	Dok	-	
7.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**100**	**9,420,011,690**		**3,070,693,396**		**3,128,530,582**		**3,070,693,396**			***100%***	**3,013,317,585**		**9,154,704,377**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**21,000,000**		**1,970,100**		**1,974,600**		**1,970,100**			***100%***	**1,765,250**		**5,705,450**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dok	6,000,000	3 Dok	970,600	3 Dok	975,100	3 Dok	970,600	100	99.54	3 Dok	1,096,550	6 Dok	3,037,750	66.67
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dok	3,000,000	1 Dok	639,000	1 Dok	639,000	1 Dok	639,000	100	100.00	1 Dok	100,000	2 Dok	1,378,000	66.67
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dok	3,000,000	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	1 Dok	100,000	1 Dok	100,000	33.33
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dok	3,000,000	1 Dok	360,500	1 Dok	360,500	1 Dok	360,500	100	100.00	1 Dok	468,700	2 Dok	1,189,700	66.67
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	Dok	-	Dok	-	Dok	-	-	-	Dok	-	1 Dok	-	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lap	3,000,000	Lap	-	Lap	-	Lap	-	-	-	4 Lap	-	Lap	-	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	24 Lap	3,000,000	Lap	-	Lap	-	Lap	-	-	-	2 Lap	-	Lap	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	**100%**	**7,105,611,690**		**2,263,108,324**		**2,297,331,532**		**2,263,108,324**			**100%**	**2,341,870,035**		**6,868,086,683**	

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Bln	7,099,611,690	12 bulan	2,262,190,824	12 bulan	2,296,414,032	12 bulan	2,262,190,824	100	98.51	12 Bln	2,341,150,535	24 bulan	6,865,532,183	66.67
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Lap	3,000,000	1 Lap	636,000	1 Lap	636,000	1 Lap	636,000	100	100.00	1 Lap	719,500	2 Lap	1,991,500	66.67
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Lap	3,000,000	18 Lap	281,500	18 Lap	281,500	18 Lap	281,500	100	100.00	18 Lap	-	36 Lap	563,000	66.67
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	**100%**	**4,500,000**		**-**		**-**		**-**			***100%***	**-**		**-**	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Lap	4,500,000	Lap	-	Lap	-	Lap	-	-	-	Lap	-	Lap	-	
7.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana*		-		-		-		-				-		-	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelenglapannya	Buah	-	Buah	-	Buah	-	-	-		-	Buah	-	Buah	-	0
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun		-	Lap	-	Lap	-	-	-		-	Lap	-	Lap	-	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun		-	Lap	-	Lap	-	-	-		-	Lap	-	Lap	-	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya		-	Lap	-	Lap	-	-	-		-	Lap	-	Lap	-	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/seminar	Org	-	Org	-	Org	-	-	-		-	Org	-	Org	-	0

7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		-	Org	-	Org	-	-	-		-	Org	-	Org	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**109,753,800**		**14,444,350**		**14,514,650**		**14,444,350**			***100%***	**20,512,556**		**49,401,256**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,950,400	1 Paket	922,400	1 Paket	922,400	1 Paket	922,400	100	100.00	1 Paket	650,800	2 Paket	2,495,600	66.67
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	39,263,400	10 Paket	8,484,950	10 Paket	8,555,250	10 Paket	8,484,950	100	99.18	10 Paket	10,085,756	20 Paket	27,055,656	66.67
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	40,470,000	6 Paket	3,450,000	6 Paket	3,450,000	6 Paket	3,450,000	100	100.00	6 Paket	6,526,000	12 Paket	13,426,000	40.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	7,500,000	1 Paket	1,307,000	1 Paket	1,307,000	1 Paket	1,307,000	100	100.00	1 Paket	2,500,000	2 Paket	5,114,000	33.33
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinassi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap	15,570,000	1 Laporan	280,000	1 Laporan	280,000	1 Laporan	280,000	100	100.00	1 Lap	750,000	2 Laporan	1,310,000	6.67
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	**100%**	**108,875,800**		**17,430,000**		**17,441,950**		**17,430,000**			***100%***	**35,794,744**		**70,654,744**	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-								-		-		-	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeler	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Unit	-	Unit	-	Unit	-		-	Unit	-		-	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	-								-		-		-	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25,000,000								-		-		-	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	73,875,800	3 Unit	17,430,000	3 Unit	17,441,950	3 Unit	17,430,000	100	99.93	4 Unit	35,794,744	6 Unit	70,654,744	50.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**1,884,030,000**		**592,867,787**		**615,705,550**		**592,867,787**			***100%***	**558,230,000**		**1,743,965,574**	

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	54,000,000	12 Lap	11,243,136.00	12 Lap	11,438,050	12 Lap	11,243,136	100	98.30	12 Lap	23,000,000	24 Lap	45,486,272	66.67
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Lap	1,830,030,000	12 Lap	581,624,651.00	12 Lap	604,267,500	12 Lap	581,624,651.00	100	96.25	12 Lap	535,230,000	24 Lap	1,698,479,302	66.67
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	**100%**	**186,240,400**		**180,872,835**	**100%**	**181,562,300**	99.62	**180,872,835**		99.62	***100%***	**55,145,000**		**416,890,670**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	87,615,000	3 Unit	27,986,870	3 Unit	28,197,300	3 Unit	27,986,870		99.25	3 Unit	29,205,000	6 Unit	85,178,740	66.67
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-									Unit	-		-	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	64,185,400	3 Unit	149,120,965	3 Unit	149,550,000	3 Unit	149,120,965		99.71	2 Unit	20,000,000	4 Unit	318,241,930	50.00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	105 Unit	34,440,000	24 Unit	3,765,000	24 Unit	3,815,000	24 Unit	3,765,000		98.69	24 Unit	5,940,000	48 Unit	13,470,000	45.71
	JUMLAH			9,508,511,690		3,082,515,846		3,140,353,032		3,082,515,846				3,025,675,535		9,190,707,227	

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

NO.	Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD	REALISASI				TARGET RENSTRA TAHUN 2024	TARGET RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KET.
		2020	2021	2022	2023			
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	80	82	83	85,32	87,37	87,37	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Socah				48,36	60	60	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Untuk mengimplementasikan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, maka tujuan dan sasaran perubahan perlu dijabarkan sebagai berikut :

Lihat Table 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024
Kecamatan Socah

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Socah	87,37	87,37	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Socah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Socah	87,37	87,37	
					Nilai SAKIP Kecamatan Socah	60	60	

3.2 Program dan Kegiatan

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja tersebut kita dapat menentukan arah Tahun 2024 dimana ada 5 Program dan 12 Kegiatan serta 27 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
e. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mengimplementasikan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, maka matrik rancangan perubahan Renja Tahun 2024 perlu dijabarkan sebagai berikut:
Lihat Tabel 3.2

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Socah

Kode Program / Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	APBD Tahun 2024				Perubahan Renja Akhir Tahun 2024				Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
			Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	**Urusan Unsu Kewilayahan**											
7.01	**Bidang Urusan Kecamatan**											
7.01.02	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**Kec. Scah**	**100%**	**1,900,000**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**1,044,700**	**APBD**	**855,300**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**Kec. Scah**	**100%**	**1,900,000**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**1,044,700**	**APBD**	**855,300**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi	Kec. Scah	1 Dok	1,900,000	APBD	Kec. Scah	1 Dok	1,044,700	APBD	855,300	
7.01.03	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**Kec. Scah**	**100%**	**7,857,950**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**2,500,000**	**APBD**	**5,357,950**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Scah**	**100%**	**6,850,000**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**2,500,000**	**APBD**	**4,350,000**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kec. Scah	1 Kegiatan	6,850,000	APBD	Kec. Scah	1 Kegiatan	2,500,000	APBD	4,350,000	

7.01.03.2.01	**Permberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Permberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Kec. Scah**	**100%**	**1,007,950**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**-**	**APBD**	**1,007,950**	
7.01.03.2.01.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Scah	20 Keluarga	1,007,950	APBD	Kec. Scah	-	-	APBD	1,007,950	
7.01.04	**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**Kec. Scah**	**100%**	**1,100,000**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**-**	**APBD**	**1,100,000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Scah**	**100%**	**1,100,000**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**-**	**APBD**	**1,100,000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergistas yang dilaksanakan	Kec. Scah	1 Keg	1,100,000	APBD	Kec. Scah	-	-	APBD	1,100,000	
7.01.06	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Scah**	**100%**	**1,500,000**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**-**	**APBD**	**1,500,000**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Kec. Scah**	**100%**	**1,500,000**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**-**	**APBD**	**1,500,000**	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Scah	11 Desa	1,500,000	APBD	Kec. Scah	11 Desa	-	APBD	1,500,000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mengikuti diklat/bimtek	Kec. Scah	22 Orang	-	APBD	Kec. Scah	Orang	-	APBD	0	
7.01.01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Scah**	**100%**	**3,013,317,585**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**2,955,551,961**	**APBD**	**57,765,624**	

7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Scah**	**100%**	**1,765,250**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**648,000**	**APBD**	**1,117,250**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		3 Dok	1,096,550	APBD	Kec. Scah	3 Dok	392,000		704,550	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kec. Scah	1 Dok	100,000	APBD	Kec. Scah	1 Dok	-	APBD	100,000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1 Dok	100,000	APBD	Kec. Scah	1 Dok	-		100,000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kec. Scah	1 Dok	468,700	APBD	Kec. Scah	1 Dok	256,000	APBD	212,700	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Kec. Scah	Dok	-			-	-	APBD	-	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kec. Scah	4 Lap	-	APBD	Kec. Scah	Lap	-	APBD	0	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kec. Scah	2 Lap	-	APBD	Kec. Scah	Lap	-	APBD	0	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kec. Scah**	**100%**	**2,341,870,035**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**2,293,983,361**	**APBD**	**47,886,674**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Scah	12 Bln	2,341,150,535	APBD	Kec. Scah	12 Bln	2,293,263,861	APBD	47,886,674	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun		1 Lap	719,500	APBD	Kec. Scah	1 Lap	719,500		0	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan /bulanan /triwulanan/semesteran		18 Lap	-	APBD	Kec. Scah	18 Lap	-		0	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang**	**Kec. Scah**	**100%**	**-**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**-**		**-**	

		tersusun										
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		14 Lap	-	APBD	Kec. Scah	14 Lap	-		0	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Kec. Scah**	**100%**	**-**			**100%**	**-**		**0**	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelenglapannya		Buah	-			Buah	-		0	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/seminar		Org	-			Org	-		0	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan									0	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Scah**	**100%**	**20,512,556**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**18,125,856**		**2,386,700**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	650,800	APBD	Kec. Scah	1 Paket	650,800		0	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 Paket	10,085,756	APBD	Kec. Scah	10 Paket	10,085,756		0	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6 Paket	6,526,000	APBD	Kec. Scah	6 Paket	5,639,300		886,700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	2,500,000	APBD	Kec. Scah	1 Paket	1,750,000		750,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinassi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Lap	750,000	APBD	Kec. Scah	1 Lap	-		750,000	

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Kec. Scah**	**100%**	**35,794,744**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**35,794,744**		**-**	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		Unit	-	APBD	Kec. Scah	Unit	-		0	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan Mebeler yang diadakan		1 Unit	-			Unit	-		0	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Unit	-			Unit	-		0	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		2 Unit	35,794,744	APBD	Kec. Scah	2 Unit	35,794,744		0	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Scah**	**100%**	**558,230,000**	**APBD**	**Kec. Scah**	**100%**	**554,655,000**		**3,575,000**	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Lap	23,000,000	APBD	Kec. Scah	1 Lap	23,000,000		0	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Lap	535,230,000	APBD	Kec. Scah	1 Lap	531,655,000		3,575,000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**Kec. Scah**	***100%***	**55,145,000**	APBD	Kec. Scah	***100%***	**52,345,000**		2,800,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		3 Unit	29,205,000	APBD	Kec. Scah	3 Unit	26,705,000		2,500,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		Unit	-			-	-		0	

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 Unit	20,000,000	APBD	Kec. Scah	2 Unit	20,000,000		0	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		24 Unit	5,940,000	APBD	Kec. Scah	24 Unit	5,640,000		300,000	
T O T A L					**3,025,675,535**				**2,959,096,661**		**66,578,874**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Socah merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Socah selama jangka waktu 1(satu) tahun yaitu tahun 2024, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Socah menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program walaupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Renja Kecamatan Socah ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA OPD Kecamatan Socah diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bangkalan serta adanya dukungan dari semua pihak,kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dipundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kehilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Socah, Agustus 2024

CAMAT SOCAH

Drs. ABD. ROHMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196611301992021001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Kamal yang selanjutnya disebut (RENJA) Perubahan adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD Kecamatan Kamal dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang akan dicapai pada masa 1 (satu) tahun.

Renja Perubahan Kecamatan Kamal tahun 2024 merupakan penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang berisi program dan kegiatan prioritas yang akan ditaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kamal untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024.

Penyusunan Renja tahun 2024 didasarkan pada Renstra 2024 - 2026 dan mengacu pada RPD tahun 2024 - 2026 Kabupaten Bangkalan.

Renja Perubahan Kecamatan Kamal Tahun 2024 disamping berfungsi sebagai Pedoman Kerja juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat Kecamatan Kamal dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri dan sebagai evaluasi kinerja OPD ditahun tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD Kecamatan Kamal.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Kamal Tahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat 1.

Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan maka tujuan Perencanaan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran

pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan, akan bersinergi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 OPD Kecamatan Kamal memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kamal serta kerangka pendanaan daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses Perencanaan Pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus berjenjang memperhatikan program-program pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom – Up (Bawah – Atas), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder/pemerintah dibawahnya.

   Pendekatan Top – Down dan Bottom – Up diselaraskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

   Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Kamal Tahun 2024 disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Renstra OPD tahun 2024 - 2026 Kecamatan Kamal dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);

13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 32/D).
14. Surat Edaran Bupati Bangkalan Nomor : 100.3.4.2/2549/433.201/2024 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kamal Tahun 2024 adalah perubahan perencanaan OPD tahun berjalan yang ditetapkan dalam RENSTRA 2024 – 2026 Kecamatan Kamal dalam 3 (tiga) tahun ke depan, apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, disamping itu juga memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Renja Kecamatan Kamal Sampai Semester I Tahun Berjalan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kamal

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Kecamatan Kamal

3.2. Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 Kecamatan Kamal

BAB IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KAMAL SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KAMAL SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KAMAL

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2024 OPD Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026 dan Renstra Kecamatan Kamal tahun 2024 – 2026 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Kamal.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 ini adalah bentuk penyesuaian dari Program dan Kegiatan dalam tahun berjalan sebagaimana yang sudah dijabarkan pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, adapun program tersebut adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 3.462.143.091,- namun demikian pada APBD (DPA awal) tahun 2024 ini total pagu menjadi Rp. 3.537.771.095,- namum seiring waktu berjalan terdapat pergeseran APBD sehingga pagu menjadi Rp. 3.555.278.082,- hingga triwulan ke 2 (Semester I) tahun 2024 anggaran yang terserap hanya Rp. 1.928.963.358,- atau sekitar 54 % dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Dari lima Program di Renja Perubahan Tahun 2024 hanya 1 (satu) Program yang belum terlaksana yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sedangkan 4 (empat) Program lainnya sudah terlaksana.

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat direaliasikan sampai dengan semester I adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD pencapaian target 66% renja atau 22% dari target renstra.
b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD pencapaian target 100% renja atau 33% dari target renstra.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pencapaian target 100% renja atau 33% dari target renstra

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pencapaian target 50% renja atau 17% dari target renstra.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100% renja atau 33% dari target renstra

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD, Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD pencapaian target 50% renja atau 17% dari target renstra.

g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Umum PD, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pencapaian target 50% renja atau 17% dari target renstra.

h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Umum PD, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pencapaian target 8% renja atau 3% dari target renstra.

i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pencapaian target 60% renja atau 25% dari target renstra.

j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pencapaian target 50% renja atau 17% dari target renstra.

k. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pencapaian target 50% renja atau 17% dari target renstra.

l. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Prorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pencapaian target 50% atau 17% dari target renstra.

m. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya pencapaian target 100% renja atau 33% dari target renstra

n. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya pencapaian target 22% renja atau 7% dari target renstra

o. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan didesa pencapaian target 100% renja atau 100% dari tingkat capaian realisasi target renstra.

p. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas pencapaian target 100% renja atau 33% dari target renstra

q. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan pencapaian target 100% renja atau 33% dari target renstra

Dari 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan serta 24 (dua puluh empat) sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 (dua) telah dicapai 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang terealisasi, sisanya belum terealisasi secara optimal dan akan direalisasikan pada triwulan berikutnya dalam tahun berjalan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kamal
dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kamal s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (semester 1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
7.01	KECAMATAN																
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase penyelenggaraan dan pelayanan publik yang terpenuhi sesuai standar pelayanan**			100%	4.718.800	100%	1.244.100	100%	1.243.950	100	100			100%	5.962.750	0
		Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	**100%**	3.600.000									**100%**	**1.200.000**	**100%**	1.200.000	100
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase kegiatan koordinasi penyelenggaraan peemrintahan yang terlaksana			100%	4.718.800	-		-		-	-			100%	4.718.800	0
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana			1 kegiatan	475.000	-		-		-	-			1 kegiatan	475.000	0
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3 Laporan	3.600.000	3 Laporan	4.243.800	1 Laporan	1.244.100	1 Laporan	1.243.950	100	100	1 Laporan	1.200.000	5 Laporan	6.687.750	166.7

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	3 Laporan	3.600.000	3 Laporan	4.243.800	1 Laporan	1.244.100	1 Laporan	1.243.950	100	100	1 Laporan	1.200.000	5 Laporan	6.687.750	166.7
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana**			90%	39.049.550	90%	13.900.000	90%	13.899.850	100	100			90%	52.949.400	0
		Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**100%**	41.700.000									100%	13.900.000	100%	13.900.000	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi			90%	39.049.550	90%	13.900.000	90%	13.899.850	100	100			90%	52.949.400	0
		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**3 koordinasi**	25.950.000									**1 koordinasi**	8.650.000	**1 koordinasi**	8.650.000	33
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan			2 kegiatan	14.649.900									2 kegiatan	14.649.900	0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	25.950.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.649.950	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.650.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.649.950	100	100	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.650.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	25.949.900	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin yang terlaksana			1 kegiatan	5.249.900									1 kegiatan	5.249.900	0
		2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terbina			10 organisasi	5.249.900									10 organisasi	5.249.900	0
		Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 laporan	5.249.900	1 laporan	5.250.000	1 laporan	5.249.900	100	100			2 laporan	10.499.800	0

7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 kegiatan	15.750.000								1 kegiatan	5.250.000	1 kegiatan	5.250.000	33
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90 keluarga	15.750.000								30 keluarga	5.250.000	30 keluarga	5.250.000	33
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**			90%	10.899.850	90%	5.200.000	90%	5.199.850	100	100			90%	16.099.700	0
		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	**100%**	15.600.000								**100%**	5.200.000	**100%**	5.200.000	100
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Persentase kegiatan sinergistas yang difasilitasi			90%	10.899.850	90%	5.200.000	90%	5.199.850	100	100				16.099.700	
		jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**3 koordinasi**	15.600.000								**1 koordinasi**	5.200.000	**1 koordinasi**	5.200.000	33
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan			40 orang	5.700.000									40 orang	5.700.000	0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	15.600.000	1 Laporan	5.199.850	1 Laporan	5.200.000	1 Laporan	5.199.850	100	100	1 Laporan	5.200.000	3 Laporan	15.599.700	100

07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**100%**	13.950.000	90%	14.849.750	90%	4.650.000	90%	4.649.950	100	100	**100%**	4.650.000	**100%**	24.149.700	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa, kepala desa dan perangkat desa yang terbina			90%	14.849.750	90%	4.650.000	90%	4.649.950	100	100			90%	19.499.700	0
		Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100%**	13.950.000									**100%**	4.650.000	**100%**	4.650.000	100
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa			35 orang	5.999.850									35 orang	5.999.850	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya			10 desa	4.199.950									10 desa	4.199.950	0
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	13.950.000	1 dokumen	4.649.950	1 dokumen	4.650.000	1 dokumen	4.649.950	100	100	1 Dokumen	4.650.000	3 dokumen	13.949.900	100
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan**			100%	10.004.865.390	100%	3.191.681.615	100%	3.152.285.407	100	99			100%	13.157.140.797	0
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100										100	3.437.193.091	100	3.437.193.091	100

7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	13.425.000	100%	**12.740.000**	100%	525.300	100%	525.100	**100**	100	100%	**4.475.000**	100%	17.740.100	**100**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			5 dokumen	7.724.950									5 dokumen	7.724.950	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	7.650.000	3 dokumen	525.100	3 dokumen	525.300	3 dokumen	525.100	100	100	3 dokumen	2.550.000	9 dokumen	3.600.200	100
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun			2 dokumen	585.000									2 dokumen	585.000	0
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 dokumen	975.000	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	100		1 dokumen	325.000	3 dokumen	325.000	100
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun			2 dokumen	585.000									2 dokumen	585.000	0
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	975.000	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	100		1 dokumen	325.000	3 dokumen	325.000	100
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun			2 dokumen	585.000									2 dokumen	585.000	0
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	975.000	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	100		1 dokumen	325.000	3 dokumen	325.000	100
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun			2 dokumen	585.000									2 dokumen	585.000	0
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	975.000	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	100		1 dokumen	325.000	3 dokumen	325.000	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun			4 dokumen	624.950									4 dokumen	624.950	0

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	975.000	2 laporan	0	2 laporan	0	2 laporan	0	100		2 laporan	325.000	6 laporan	325.000	100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			16 laporan	1.525.000									16 laporan	1.525.000	0
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	900.000	8 laporan	0	8 laporan	0	8 laporan	0	100		8 laporan	300.000	24 laporan	300.000	100
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	100%	7.628.135.712	100%	7.376.249.344	100%	2;375.286.715	100%	2.356.129.210	100	99	100%	2.542.711.904	100%	12;275.090.458	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/12 bulan	7.625.960.712	36 Orang/12 bulan	7.373.949.744	36 Orang/12 bulan	2;375.286.715	36 Orang/12 bulan	2.356.129.210	100	99	36 Orang/12 bulan	2.541.896.904	36 Orang/36 bulan	12;271.975.858	100
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun			2 laporan	749.800									2 laporan	749.800	0
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	1.275.000	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	100		1 laporan	425.000	3 laporan	425.000	100
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan /bulanan /triwulanan/semesteran			132 laporan	1.549.800									132 laporan	1.549.800	0

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	198 laporan	900.000	19 laporan	0	19 laporan	0	19 laporan	0	100		66 laporan	300.000	104 laporan	300.000	52,5
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	100%	900.000	100%	650.000	100%		100%		100		100%	300.000	100%	950.000	100
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 laporan	900.000	28 laporan	650.000	14 laporan	0	14 laporan	0	100		14 laporan	300.000	56 laporan	950.000	133,3
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	100%	35.000.000	-	3.799.900	100%		100%		100		100%	100.000	100%	3.899.900	100
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 buah	35.000.000	-		-		-				-	0		-	0
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/seminar			66 orang	3.799.900	-		-				-	0	66 orang	3.799.900	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	198.754.500	100%	107.566.850	100%	8.590.100	100%	8.590.100	100	100	100%	66.747.600	100%	182.904.550	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8 unit	3.064.600									8 unit	3.064.600	0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.504.400			-		-				1 Paket	1.067.100	1 Paket	1.067.100	33
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8 unit	15.486.150									8 unit	15.486.150	0

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	106.975.800	4 Paket	5.890.100	4 Paket	5.890.100	4 Paket	5.890.100	100	100	4 Paket	35.769.000	12 Paket	47.549.200	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6 unit	30.353.000									6 unit	30.353.000	0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	78.606.000	12 Paket	2.700.000	12 Paket	2.700.000	12 Paket	2.700.000	100	100	12 Paket	26.202.000	36 Paket	31.602.000	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6 jenis	31.953.000									6 jenis	31.953.000	0
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	5.628.300			-		-				2 Paket	2.029.300		2.029.300	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			44 kali	18.120.000									44 kali	18.120.000	0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.040.000			-		-				4 Laporan	1.680.000	4 Laporan	1.680.000	33
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	100%	112.700.000	100%	30.307.100	100%	3.300.000	100%	3.300.000	100	100	100%	53.919.700	100%	87.526.800	100
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan			7 unit	27.007.100									7 unit	27.007.100	0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	112.700.000	1 unit	3.300.000	1 unit	3.300.000	1 unit	3.300.000	100	100	5 unit	53.919.700	7 unit	60.519.700	58,3
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	2.461.987.500	100%	2.373.492.967	100%	778.087.500	100%	758.664.197	100	98	100%	794.200.000	100%	3.926.357.164	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4 jenis	37.825.500									4 jenis	37.825.500	0

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	61.800.000	12 Laporan	20.378.100	12 Laporan	20.600.000	12 Laporan	20.378.100	100	99	12 Laporan	20.600.000	36 Laporan	61.356.200	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 jenis	1.577.003.270									12 jenis	1.577.003.270	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	2.400.187.500	12 Laporan	738.286.097	12 Laporan	778.087.500	12 Laporan	738.286.097	100	95	12 Laporan	773.600.000	36 Laporan	2.250.172.194	100
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	100%	133.488.000	100%	100.049.229	100%	25.892.000	100%	25.601.900	100	99	100%	51.882.700	100%	177.533.829	100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan			4 unit	46.131.829									4 unit	46.131.829	0
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	80.700.000	2 unit	25.601.900	2 unit	25.892.000	2 unit	25.601.900	100	99	2 unit	21.860.000	6 unit	73.063.800	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	38.988.000	1 unit	16.870.500	–		–				1 unit	18.302.700	2 unit	35.173.200	66
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	54 unit	13.800.000	20 unit	11.445.000	–		–				18 unit	6.680.000	38 unit	18.125.000	70,0

Tabel 2.
Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD
sampai dengan Semester 1 Tahun 2024
Kecamatan Kamal

No.	Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan jika ada perubahan target
		2020	2021	2022	2023			
NIHIL								

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KAMAL

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024 KECAMATAN KAMAL

TUJUAN :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik yang berkualitas di tingkat kecamatan

SASARAN :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 KECAMATAN KAMAL

Atas dasar pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020, Rencana Pembangunan Daerah (RDP) 2024-2026 Kabupaten Bangkalan serta Renstra 2024-2026 Kecamatan Kamal maka Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, terdiri dari kegiatan :
   - 1.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, terdiri dari sub kegiatan :
     - 1.1.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, terdiri dari kegiatan :
   - 2.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari sub kegiatan :
     - 2.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, terdiri dari kegiatan
   - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari sub kegiatan :
     - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   - 3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari sub kegiatan :
     - 3.2.1 Penumbuhan dan Peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, terdiri dari kegiatan :
   - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari sub kegiatan :
     - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, terdiri dari kegiatan :
   5.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
      5.1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik
      5.1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   5.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
      5.2.1 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
      5.2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      5.2.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
      5.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
   5.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
      5.4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      5.4.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      5.4.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
   5.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
      5.5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
   5.6 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
      5.6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      5.6.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
      5.6.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
      5.6.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
      5.6.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
      5.6.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      5.6.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   5.7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
      5.7.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD
      5.7.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      5.7.3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Besaran pagu dari masing – masing sub kegiatan terlihat dalam table

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja tahun 2024
Kecamatan Kamal
Kabupaten Bangkalan

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja Tahun 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Kamal	82,10	82,10	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kamal	1. Nilai Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Kamal	82,10	82,10	
					2. Nilai SAKIP Kecamatan Kamal	60	60	

Tabel 3.2
Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Kecamatan Kamal

Kode Program / Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Renja Tahun 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	Kec Kamal	**100%**	**1.200.000**	DAU APBD Kabupaten	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	Kec Kamal	**100%**	**1.409.400**	DAU APBD Kabupaten	209.400	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec Kamal	1 Laporan	1.200.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec Kamal	1 Laporan	1.409.400	DAU APBD Kabupaten	209.400	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Kamal	1 Laporan	1.200.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Kamal	1 Laporan	1.409.400	DAU APBD Kabupaten	209.400	Memaksimalkan sisa pagu
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec Kamal	**100%**	**13.900.000**	DAU APBD Kabupaten	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec Kamal	**100%**	**10.650.000**	DAU APBD Kabupaten	-3.250.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Kamal	1 kegiatan	8.650.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Kamal	1 kegiatan	5.400.000	DAU APBD Kabupaten	-3.250.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Kamal	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.650.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Kamal	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.000	DAU APBD Kabupaten	-3.250.000	Kebijakan Refocusing Anggaran
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec Kamal	1 kegiatan	5.250.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec Kamal	1 kegiatan	5.250.000	DAU APBD Kabupaten	0	
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec Kamal	30 keluarga	5.250.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec Kamal	30 keluarga	5.250.000	DAU APBD Kabupaten	0	
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Kec Kamal	**100%**	**5.200.000**	DAU APBD Kabupaten	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Kec Kamal	**100%**	**5.200.000**	DAU APBD Kabupaten	0	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Kamal	1 kegiatan	5.200.000	DAU APBD Kabupaten	jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Kamal	1 kegiatan	5.200.000	DAU APBD Kabupaten	0	

7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Kamal	1 Laporan	5.200.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Kamal	1 Laporan	5.200.000	DAU APBD Kabupaten	0	
07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec Kamal	**100%**	**4.650.000**	DAU APBD Kabupaten	Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec Kamal	**100%**	**0**	DAU APBD Kabupaten	-4.650.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Kamal	100%	4.650.000	DAU APBD Kabupaten	Persentase desa yang mendapat Fasiiitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Kamal	100%	0	DAU APBD Kabupaten	-4.650.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Kamal	1 Dokumen	4.650.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Kamal	1 Dokumen	-	DAU APBD Kabupaten	-4.650.000	Kebijakan Refocusing Anggaran
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Kamal	100	**3.437.193.091**	DAU APBD Kabupaten	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Kamal	100	**3.444.651.946**	DAU APBD Kabupaten	**11.281.555**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec Kamal	100%	4.475.000	DAU APBD Kabupaten	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec Kamal	100%	2.325.000	DAU APBD Kabupaten	-2.150.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Kamal	3 dokumen	2.550.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Kamal	3 dokumen	650.000	DAU APBD Kabupaten	-1.900.000	Menyesuaikan pagu
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Kamal	1 dokumen	325.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Kamal	1 dokumen	325.000	DAU APBD Kabupaten	0	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Kamal	1 dokumen	325.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Kamal	1 dokumen	325.000	DAU APBD Kabupaten	0	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec Kamal	1 dokumen	325.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec Kamal	1 dokumen	350.000	DAU APBD Kabupaten	25.000	Memaksimalkan sisa pagu
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec Kamal	1 dokumen	325.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec Kamal	1 dokumen	350.000	DAU APBD Kabupaten	25.000	Memaksimalkan sisa pagu
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Kamal	2 laporan	325.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Kamal	2 laporan	325.000	DAU APBD Kabupaten	0	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Kamal	8 laporan	300.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Kamal	8 laporan	0	DAU APBD Kabupaten	-300.000	Menyesuaikan pagu

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kec Kamal	100%	2.465.688.091	DAU APBD Kabupaten	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kec Kamal	100%	2.562.562.146	DAU APBD Kabupaten	96.894.055	Kebijakan Refocusing Anggaran
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan dan Tunjangan ASN	Kec Kamal	36 Orang/12 bulan	2.464.943.091	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan dan Tunjangan ASN	Kec Kamal	36 Orang/12 bulan	2.562.111.396	DAU APBD Kabupaten	97.168.305	Kebijakan Refocusing Anggaran
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Kamal	1 laporan	425.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Kamal	1 laporan	450.750	DAU APBD Kabupaten	25.750	Menyesuaikan pagu
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Kamal	66 laporan	300.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Kamal	66 laporan	0	DAU APBD Kabupaten	-300.000	Menyesuaikan pagu
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	Kec Kamal	100%	300.000	DAU APBD Kabupaten	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	Kec Kamal	100%	300.000	DAU APBD Kabupaten	0	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Kamal	14 laporan	300.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Kamal	14 laporan	300.000	DAU APBD Kabupaten	0	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kec Kamal	100%	-	DAU APBD Kabupaten	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kec Kamal	100%		DAU APBD Kabupaten	0	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec Kamal	-	-	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec Kamal	-	0	DAU APBD Kabupaten	0	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec Kamal	100%	66.747.600	DAU APBD Kabupaten	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec Kamal	100%	16.489.800	DAU APBD Kabupaten	-50.257.800	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Kamal	1 Paket	1.067.100	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Kamal	1 Paket	533.550	DAU APBD Kabupaten	-533.550	Menyesuaikan pagu
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Kamal	4 Paket	35.739.200	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec Kamal	4 Paket	10.556.250	DAU APBD Kabupaten	-25.212.950	Kebijakan Refocusing Anggaran
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Kamal	12 Paket	26.202.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Kamal	6 Paket	5.400.000	DAU APBD Kabupaten	-20.802.000	Menyesuaikan pagu
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Kamal	2 Paket	2.029.300	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec Kamal	0 Paket	0	DAU APBD Kabupaten	-2.029.300	Menyesuaikan pagu
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Kamal	4 Laporan	1.680.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Kamal	0 Laporan	0	DAU APBD Kabupaten	-1.680.000	Menyesuaikan pagu
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	Kec Kamal	100%	53.919.700	DAU APBD Kabupaten	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	Kec Kamal	100%	18.420.000	DAU APBD Kabupaten	-35.499.700	

7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec Kamal	5 unit	53.919.700	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec Kamal	3 unit	18.420.000	DAU APBD Kabupaten	-35.499.700	Kebijakan Refocusing Anggaran
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Kamal	100%	794.200.000	DAU APBD Kabupaten	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Kamal	100%	796.495.000	DAU APBD Kabupaten	2.295.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Kamal	12 Laporan	20.600.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Kamal	12 Laporan	25.040.000	DAU APBD Kabupaten	4.440.000	Menyesuaikan pagu
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Kamal	12 Laporan	773.600.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Kamal	12 Laporan	771.455.000	DAU APBD Kabupaten	-2.145.000	Kebijakan Refocusing Anggaran
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	Kec Kamal	100%	51.882.700	DAU APBD Kabupaten	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daersh Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	Kec Kamal	100%	48.060.000	DAU APBD Kabupaten		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec Kamal	2 unit	26.900.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec Kamal	2 unit	21.860.000	DAU APBD Kabupaten	-5.040.000	Menyesuaikan pagu
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Kamal	1 unit	18.302.700	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Kamal	1 unit	25.000.000	DAU APBD Kabupaten	6.697.300	Prioritas Kabupaten
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec Kamal	18 unit	6.680.000	DAU APBD Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec Kamal	4 unit	1.200.000	DAU APBD Kabupaten	-5.480.000	Menyesuaikan pagu
					3.462.143.091					**3.461.911.346**		-231.745	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN KAMAL KAB. BANGKALAN

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN KAMAL							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
	7	01				KECAMATAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 Indeks	-	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00							3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			100 %	-	4.475.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		4.175.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	650.000,00	650.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			2.550.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7					NON URUSAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
2	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 Indeks	-	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00							3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			100 %	-	4.475.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		4.175.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	±25.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN KAMAL
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
	7	01				KECAMATAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 Indeks	-	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00							3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			100 %	-	4.475.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		4.175.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	325.000,00	325.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			325.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7					NON URUSAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
4	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 Indeks	-	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00							3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			100 %	-	4.475.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		4.175.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	325.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN KAMAL
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
	7	01				KECAMATAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
5	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 indeks	-	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00							3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		100 %	-	4.475.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		4.175.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	350.000,00	350.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			325.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7					NON URUSAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 indeks	-	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00							3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		100 %	-	4.475.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		4.175.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																			
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	325.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN KAMAL
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
	7	01				KECAMATAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 indeks	-	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00							3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		100 %	-	4.475.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		4.175.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
	7					NON URUSAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	
8	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 indeks	-	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00							3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		100 %	-	4.475.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		4.175.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		-		100 %	100 %	2.455.668.091,00	2.606.221.845,00	2.606.221.845,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		2.542.412.904,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/Bulan	36 Orang/bulan	2.464.943.091,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN KAMAL
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											
	7	01				KECAMATAN						3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00									3.502.930.804,00		
9	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			100 Indeks	-	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00									3.502.930.804,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	2.465.668.091,00	2.606.221.845,00	2.606.221.845,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-				3.477.980.804,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	2.542.411.904,00	KECAMATAN KAMAL	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	450.750,00	450.750,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			425.500,00	KECAMATAN KAMAL	
	7					NON URUSAN						3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00									3.502.930.804,00		
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			100 Indeks	-	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00									3.502.930.804,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-		100 %	100 %	2.465.668.091,00	2.606.221.845,00	2.606.221.845,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-				3.477.980.804,00		
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	2.542.411.904,00	KECAMATAN KAMAL	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				66 Laporan	66 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN KAMAL	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											
	7	01				KECAMATAN						3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00									3.502.930.804,00		
11	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			100 Indeks	100 Indeks	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00									3.502.930.804,00		
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	-		100 %	100 %	300.000,00	300.000,00	300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-				3.477.980.804,00		
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	300.000,00	KECAMATAN KAMAL	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	0,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Kamal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			300.300,00	KECAMATAN KAMAL	
	7					NON URUSAN						3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00									3.502.930.804,00		
12	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			100 Indeks	100 Indeks	3.437.193.091,00	3.512.681.645,00	3.444.651.946,00									3.502.930.804,00		
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	-		100 %	100 %	300.000,00	300.000,00	300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-				3.477.980.804,00		
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	300.000,00	KECAMATAN KAMAL	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	66.747.600,00	25.189.800,00	25.189.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-				62.635.400,00	KECAMATAN KAMAL	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.067.100,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN KAMAL
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00									
	7	01				KECAMATAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00								3.502.930.804,00	
13	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 indeks	100 indeks	3.437.193.091,00	3.512.683.645,00	3.444.651.946,00								3.502.930.804,00 3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	66.747.600,00	25.189.600,00	25.189.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		62.635.400,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	19.256.250,00	16.556.250,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			35.598.600,00	KECAMATAN KAMAL
	7					NON URUSAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00									
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00								3.502.930.804,00	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 indeks	100 indeks	3.437.193.091,00	3.512.683.645,00	3.444.651.946,00								3.502.930.804,00 3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	66.747.600,00	25.189.600,00	25.189.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		62.635.400,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00									
	7	01				KECAMATAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00								3.502.930.804,00	
15	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 indeks	100 indeks	3.437.193.091,00	3.512.683.645,00	3.444.651.946,00								3.502.930.804,00 3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	66.747.600,00	25.189.600,00	25.189.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		62.635.400,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			26.202.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7					NON URUSAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00									
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00								3.502.930.804,00	
16	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 indeks	100 indeks	3.437.193.091,00	3.512.683.645,00	3.444.651.946,00								3.502.930.804,00 3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	66.747.600,00	25.189.600,00	25.189.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		62.635.400,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.029.300,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.680.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN KAMAL
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00								3.502.930.804,00	

	7	01				KECAMATAN								3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											3.502.930.804,00		
17	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Indeks	100 Indeks	3.437.193.091,00	3.512.661.645,00	3.444.651.946,00											3.477.980.804,00		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	53.919.700,00	30.840.000,00	30.840.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-			3.300.000,00	KECAMATAN KAMAL	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	4 Unit	0,00	30.840.000,00	18.420.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				3.300.000,00	KECAMATAN KAMAL	
	7					NON URUSAN								3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											3.502.930.804,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											3.502.930.804,00		
18	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Indeks	100 Indeks	3.437.193.091,00	3.512.661.645,00	3.444.651.946,00											3.477.980.804,00		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	53.919.700,00	30.840.000,00	30.840.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-			3.300.000,00	KECAMATAN KAMAL	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											3.502.930.804,00		
	7	01				KECAMATAN								3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											3.502.930.804,00		
19	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Indeks	100 Indeks	3.437.193.091,00	3.512.661.645,00	3.444.651.946,00											3.477.980.804,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	794.200.000,00	799.745.000,00	799.745.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-			820.662.500,00	KECAMATAN KAMAL	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	25.040.000,00	25.040.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				20.600.000,00	KECAMATAN KAMAL	
	7					NON URUSAN								3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											3.502.930.804,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											3.502.930.804,00		
20	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Indeks	100 Indeks	3.437.193.091,00	3.512.661.645,00	3.444.651.946,00											3.477.980.804,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	794.200.000,00	799.745.000,00	799.745.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-			820.662.500,00	KECAMATAN KAMAL	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											3.502.930.804,00		
	7	01				KECAMATAN								3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											3.502.930.804,00		
21	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Indeks	100 Indeks	3.437.193.091,00	3.512.661.645,00	3.444.651.946,00											3.477.980.804,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	794.200.000,00	799.745.000,00	799.745.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-			820.662.500,00	KECAMATAN KAMAL	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	774.705.000,00	771.455.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				800.062.500,00	KECAMATAN KAMAL	
	7					NON URUSAN								3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											3.502.930.804,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00											3.502.930.804,00		
22	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Indeks	100 Indeks	3.437.193.091,00	3.512.661.645,00	3.444.651.946,00											3.477.980.804,00		

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	794.200.000,00	799.745.000,00	799.745.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-			821.662.500,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	51.882.700,00	48.060.000,00	48.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-			44.496.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan D nas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	26.930.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN KAMAL
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00								3.502.930.804,00	
	7	01				KECAMATAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00								3.502.930.804,00	
23	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 indeks	100 indeks	3.437.193.091,00	3.512.661.645,00	3.444.651.946,00								3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	51.882.700,00	48.060.000,00	48.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-			44.496.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan D nas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			12.996.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7					NON URUSAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00								3.502.930.804,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00								3.502.930.804,00	
24	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 indeks	100 indeks	3.437.193.091,00	3.512.661.645,00	3.444.651.946,00								3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	51.882.700,00	48.060.000,00	48.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-			44.496.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	4 Unit	6.630.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN KAMAL
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00								3.502.930.804,00	
	7	01				KECAMATAN							3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00								3.502.930.804,00	
25	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 indeks	100 indeks	3.437.193.091,00	3.512.661.645,00	3.444.651.946,00								3.477.980.804,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	51.882.700,00	48.060.000,00	48.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-			44.496.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
26	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi				100 %	100 %	1.200.000,00	1.339.450,00	1.409.400,00								1.202.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			1 laporan	1 laporan	1.200.000,00	1.339.450,00	1.339.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-			1.202.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.339.450,00	1.409.400,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.200.000,00	KECAMATAN KAMAL
27	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				100 %	-	13.900.000,00	13.900.000,00	10.650.000,00							13.900.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			1 kegiatan	1 kegiatan	8.650.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		8.650.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.650.000,00	8.650.000,00	5.400.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			8.650.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			1 kegiatan	-	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		5.250.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				30 Keluarga	30 Keluarga	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			5.250.000,00	KECAMATAN KAMAL
28	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani				100 %	100 %	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00							5.200.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 kegiatan	1 kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		5.200.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			5.200.000,00	KECAMATAN KAMAL
29	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00							4.650.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PPersentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desaasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	100 %	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		4.650.000,00	KECAMATAN KAMAL
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	Kab. Bangkalan, Kamal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			4.650.000,00	KECAMATAN KAMAL
													JUMLAH	3.462.143.091,00	3.537.771.095,00	3.461.911.346,00							3.502.930.804,00	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Kamal merupakan penyesuaian terhadap perubahan keadaan dari Rencana Kerja (RENJA) yang sudah tersusun sebelumnya, yang digunakan sebagai dasar pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun berjalan yaitu tahun 2024. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Kamal selalu mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Kamal disusun secara sistematis berdasarkan Surat Edaran Bupati Bangkalan Nomor : 100.3.4.2/2549/433.201/2024 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024, yang mengacu pada Landasan Hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 1.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Kamal tahun 2024 disusun yang secara umum sudah mencakup program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Namum demikian dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian Data, oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaanya.

Kamal, Juli 2024

CAMAT KAMAL

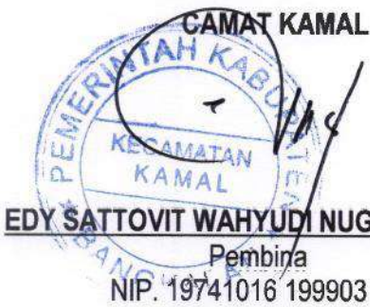

EDY SATTOVIT WAHYUDI NUGROHO, SH. MM
Pembina
NIP. 19741016 199903 1 004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas Rahmat serta Hidayahnya, maka pada akhirnya kami Tim Penyusunan Renja Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Rencana Kerja ini akan senantiasa dimanfaatkan sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan harapan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan masih banyak terdapat kekurangan/kelemahan disana-sini, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk pebaikan dan kesempurnaan sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya Renja ini.

Bangkalan, Agustus 2024

CAMAT LABANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN LABANG

FACHROZY CHOIRIL ZAMZAM,S.STP.MM
Pembina
NIP. 19870709 200602 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA OPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Labang dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Labang Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Labang tahun 2024, capaian pembangunan Kecamatan Labang tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan usulan kegiatan di Kecamatan Labang pada Tahun 2024 yang memuat prioritas pembangunan Kecamatan Labang yang dijabarkan dalam program dan target pencapaian program untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan Kecamatan Labang di Kabupaten Bangkalan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Labang Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Labang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA OPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024 Kecamatan Labang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku,yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Rrepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan

Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2014 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37)
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18/E);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD 3 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

Adapun Tujuan penyusunan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah–

langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun Berjalan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/ IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024)

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 PD

3.2 Program dan Kegiatan

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024

BAB IV. Penutup

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan (2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan 2024-2026, dimana tetap memperhatikan isu-isu yang berkembang di Kecamatan Labang.

Dengan adanya Rencana Kerja tersebut kita dapat menentukan arah Tahun 2024 dimana ada 3 Program dan 10 Kegiatan serta 23 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
c. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari program-program diatas, Belanja Pembangunan Kecamatan Labang pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.560.074.992,- dan sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp.975.740.362,- atau terealisir 38,11% dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan, dengan rincian program dan kegiatan antara lain :

I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

a). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 1.500.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi. Pada kegiatan ini belum direalisasi.

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan :

a). Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 6.500.000,-. setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 5.600.000. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.600.000,- atau sebesar 100%.

III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan Kegiatan :

e). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.1.500.000,-, setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.1.050.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.050.000,- atau sebesar 100%
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.1.000.000, setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.499.900,- Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.1.000.000, Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.000.000,- atau sebesar 100%.
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.1000.000, setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.550.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

f). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana awal sebesar Rp.2.002.185.950,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.1.970.587.617,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.843.615.262,- atau sebesar 42.13%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana awal sebesar Rp.1.500.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.1.495.000,- .Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.495.000,- atau sebesar 100%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana awal sebesar Rp.1.500.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.1.495.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/semester. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.495.000,- atau sebesar 100%.

g). Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.1.500.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.1.495.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.495.000,- atau sebesar 100%.

h). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.500.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.1.500.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.

i). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.1.323.900,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.383.800,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 383.800,- atau sebesar 100%.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.8.064.600,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah mengalami penambahan sesuai kebutuhan menjadi sebesar Rp.9.815.700,-. Keluaran kegiatan ini Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.4.555.300,- atau sebesar 46.41%.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.4.950.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah mengalami penambahan sesuai kebutuhan menjadi sebesar Rp.6.450.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.500.000,- atau sebesar 69,77%.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.125.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.1.955.400,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.767.500,- atau sebesar 39,25%.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinassi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.1.050.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.900.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

j). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana awal sebesar Rp.44.838.344,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana mengalami penambahan berubah menjadi sebesar Rp. 53.858.344,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.44.814.100,- atau sebesar 83,21%.

k). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp.2.000.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.1.240.000,- Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.780.000,- atau sebesar 62,90%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp.15.240.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.21.748.490,-.Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.15.821.100,- atau sebesar 72,75%.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.412.027.500,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp.413.747.500,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.300.678.950,- atau sebesar 72.67%.

l). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana awal sebesar Rp.25.349.698,- setelah adanya recorfusing berubah menjadi sebesar Rp.25.938.298,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan yang disediakan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.16.332.000,- atau sebesar 62,96%.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana awal sebesar Rp.2.460.000,-. setelah adanya recorfusing berubah menjadi sebesar Rp.4.475.000,- Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.811.000,- atau sebesar 40.47%.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana awal sebesar Rp.19.960.000,-. Setelah adanya recorfusing tidak mengalami. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.19.960.000,- atau sebesar 100%.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Labang dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7.01	**KECAMATAN**									
07.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Indeks**							
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90%**	**90%**	**87%**	**85%**	**98%**	**90%**	**75%**	**60%**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	60%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	60%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	6	Laporan	60%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**90%**		**90%**		**87%**		**85%**	**98%**		**90%**		**265%**	**60%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*12*	Bulan	*12*	Bulan	*12*	Bulan	*12*	Bulan	98,03%	*12*	Bulan	*12*	Bulan	60%

| | | |

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	100%	4	Paket	4	Paket	65%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	99,99%	4	Paket	4	Paket	60%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	100%	6	Jenis	6	Jenis	65%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	100%	4	Paket	4	Paket	60%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Laporan	60	Laporan	60	Laporan	60	Laporan	100%	60	Laporan	180	Laporan	60%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90%**		**20%**		**87%**		**87%**		**45%**	**80%**		**45%**		**45%**
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21	Unit	2	Unit	6	Unit	6	Unit	100%	1	Unit	9	Unit	43%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**		**30%**		**87%**		**85%**		**98%**	**90%**		**50%**		**50%**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	30	Laporan	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	30	Laporan	50%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	30	Laporan	50%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**90%**		**90%**		**87%**		**85%**		**98%**	**90%**		**60%**		**60%**

| | | |

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	Lembaga Kemasyarakatan	13	Lembaga Kemasyarakatan	13	Lembaga Kemasyarakatan	13	Lembaga Kemasyarakatan	100%	13	Lembaga Kemasyarakatan	39	Lembaga Kemasyarakatan	50%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	0		3	Laporan	75%
67.01.03.2.01	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**26**	**Keluarga**	**0**		**0**		**0**		0%	**13**	**Keluarga**	**0**	**Keluarga**	**0%**
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	26	Keluarga	0		0		0		0%	13	Keluarga	0	Keluarga	0%
07.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**90%**		**90%**		**87%**		**85%**		**98%**	**90%**		**65%**		**60%**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**2**	**Koordinasi**	**2**	**Koordinasi**	**2**	**Koordinasi**	**2**	**Koordinasi**	98%	**2**	**Koordinasi**	**6**	**Koordinasi**	**60%**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	98%	1	Laporan	3	Laporan	75%

Tabel 2.2

07.01.06	**Progrsm Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**90%**	**90%**	**87%**	**85%**	**98%**	**90%**	**65%**	**66%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**90%**	**90%**	**87%**	**85%**	**98%**	**90%**	**65%**	**66%**
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%

Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

NO.	Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD	REALISASI				TARGET RENSTRA TAHUN 2024	TARGET RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KET.
		2020	2021	2022	2023			
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	80	82	83	85,32	87,37	87,37	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Labang				48,36	60	60	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Untuk mengimplementasikan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, maka tujuan dan sasaran perubahan perlu dijabarkan sebagai berikut :

Lihat Table 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024
Kecamatan Labang

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Labang	87,37	87,37	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Labang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Labang	87,37	87,37	
					Nilai SAKIP Kecamatan Labang	60	60	

3.2 Program dan Kegiatan

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja tersebut kita dapat menentukan arah Tahun 2024 dimana ada 3 Program dan 10 Kegiatan serta 23 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
c. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mengimplementasikan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, maka matrik rancangan perubahan Renja Tahun 2024 perlu dijabarkan sebagai berikut:
Lihat Tabel 3.2

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Labang

Kode Program / Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	APBD Tahun 2024				Perubahan Renja Akhir Tahun 2024				Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
			Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	**Urusan Unsu Kewilayahan**											
07.01	**Bidang Urusan Kecamatan**											
07.01.02	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**Kec.Labang**	**100%**	**1.500.000**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**499.900**	**APBD**	**- 1.000.100**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**Kec.Labang**	**100%**	**1.500.000**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**499.900**	**APBD**	**- 1.000.100**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi	Kec.Labang	1 Lap	1.500.000	APBD	Kec.Labang	1 Lap	499.900	APBD	**- 1.000.100**	
07.01.03	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**Kec.Labang**	**100%**	**6.500.000**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**5.600.000**	**APBD**	**- 900.000**	

7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec.Labang**	**100%**	**6.500.000**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**5.600.000**	**APBD**	**- 900.000**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kec.Labang	13 Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000	APBD	Kec.Labang	13 Lembaga Kemasyarakatan	5.600.000	APBD	**- 900.000**	
7.01.03.2.01	**Permberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Permberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**Kec.Labang**	**100%**	**-**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**-**	**APBD**	**-**	
7.01.03.2.01.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Labang	13 Keluarga	-	APBD	Kec.Labang	-	-	APBD	-	
07.01.04	**KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**Kec.Labang**	**100%**	**-**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**-**	**APBD**	**-**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec.Labang**	**100%**	**-**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**-**	**APBD**	**-**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergistas yang dilaksanakan	Kec.Labang	1 Lap	-	APBD	Kec.Labang	-	-	APBD	-	

07.01.06	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Labang**	**100%**	**-**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**-**	**APBD**	**-**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Kec.Labang**	**100%**	**-**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**-**	**APBD**	**-**	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mengikuti diklat/bimtek	Kec.Labang	1 Dok	-	APBD	Kec.Labang	-	-	APBD	**-**	
07.01.01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec.Labang**	**100%**	**2.552.074.992**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**2.486.286.705**	**APBD**	**-65.788.287**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec.Labang**	**100%**	**4.500.000**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**3.099.900**	**APBD**	**- 1.400.100**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Labang	3 Dok	1.500.000	APBD	Kec.Labang	3 Dok	1.050.000		**- 450.000**	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kec.Labang	1 Dok	1.000.000	APBD	Kec.Labang	1 Dok	499.900	APBD	**- 500.100**	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kec.Labang	1 Dok	-	APBD	Kec.Labang	1 Dok	-	APBD	**-**	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kec.Labang	1 Dok	-	APBD	Kec.Labang	1 Dok	-	APBD	**-**	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Kec.Labang	1 Dok	-	APBD	Kec.Labang	1 Dok	-	APBD	**-**	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kec.Labang	4 Lap	1.000.000	APBD	Kec.Labang	4 Lap	1.000.000	APBD	-	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Labang	4 Lap	1.000.000	APBD	Kec.Labang	4 Lap	550.000	APBD	- **450.000**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kec.Labang**	**100%**	**2.005.185.950**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**1.973.577.617**	**APBD**	**-31.608.333**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Labang	12 Bln	2.002.185.950	APBD	Kec.Labang	12 Bln	1.970.587.617	APBD	**-31.598.333**	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Kec.Labang	3 Lap	1.500.000	APBD	Kec.Labang	3 Lap	1.495.000	APBD	- **5.000**	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan /bulanan /triwulanan/semesteran	Kec.Labang	18 Lap	1.500.000	APBD	Kec.Labang	18 Lap	1.495.000	APBD	- **5.000**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kec.Labang**	**100%**	**1.500.000**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**1.495.000**	**APBD**	- **5.000**	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Labang	16 Lap	1.500.000	APBD	Kec.Labang	16 Lap	1.495.000	APBD	- **5.000**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**Kec.Labang**	**100%**	**1.500.000**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**1.500.000**	**APBD**	-	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Labang	35 Org	1.500.000	APBD	Kec.Labang	30 Org	1.500.000	APBD	-	

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec.Labang**	**100%**	**17.513.500**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**19.504.900**	**APBD**	**1.991.400**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Labang	4 Paket	1.323.900	APBD	Kec.Labang	4 Paket	383.800	APBD	- 940.100	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Labang	4 Paket	8.064.600	APBD	Kec.Labang	4 Paket	9.815.700	APBD	1.751.100	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Labang	6 Paket	4.950.000	APBD	Kec.Labang	6 Paket	6.450.000	APBD	1.500.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Labang	2 Paket	2.125.000	APBD	Kec.Labang	2 Paket	1.955.400	APBD	- 169.600	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinassi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Labang	14 Lap	1.050.000	APBD	Kec.Labang	12 Lap	900.000	APBD	- 150.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Kec.Labang**	**100%**	**44.838.344**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**-**	**APBD**	**-44.838.344**	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Kec.Labang	Unit	-	APBD	Kec.Labang	Unit	-	APBD	-	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan Mebeler yang diadakan	Kec.Labang	Unit	-	APBD	Kec.Labang	Unit	-	APBD	-	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec.Labang	6 Unit	44.838.344	APBD	Kec.Labang	Unit	7 53858344	APBD	**#VALUE!**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Labang**	**100%**	**429.267.500**	**APBD**	**Kec.Labang**	**100%**	**436.735.990**	**APBD**	**7.468.490**	

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Labang	12 Lap	2.000.000	APBD	Kec.Labang	12 Lap	1.240.000	APBD	- 760.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Labang	12 Lap	15.240.000	APBD	Kec.Labang	12 Lap	21.748.490	APBD	6.508.490	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Labang	12 Lap	412.027.500	APBD	Kec.Labang	12 Lap	413.747.500	APBD	1.720.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**Kec.Labang**	***100%***	**47.769.698**	APBD	Kec.Labang	***100%***	**50.373.298**	APBD	**2.603.600**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kedaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Labang	2 Unit	25.349.698	APBD	Kec.Labang	2 Unit	25.938.298	APBD	**588.600**	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec.Labang	14 Unit	2.460.000	APBD	Kec.Labang	14 Unit	4.475.000	APBD	**2.015.000**	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec.Labang	2 Unit	19.960.000	APBD	Kec.Labang	2 Unit	19.960.000	APBD	**-**	
T O T A L					**2.560.074.992**				**2.492.386.605**		**-67.688.387**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Labang merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Labang selama jangka waktu 1(satu) tahun yaitu tahun 2024, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Labang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program walaupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Renja Kecamatan Labang ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA OPD Kecamatan Labang diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bangkalan serta adanya dukungan dari semua pihak,kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dipundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kehilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Labang, Agustus 2024

CAMAT LABANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN KECAMATAN LABANG

FACHROZY CHOIRIL ZAMZAM,S.STP.MM

Pembina

NIP.198707092006021001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmad dan hidayahNya telah tersusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) perubahan OPD Kecamatan Modung Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Modung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian Data, oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaanya.

Terima kasih atas kerjasama dari semua unsur di Kantor Kecamatan Modung mulai dari Pimpinan (Camat) pejabat struktural dan semua staf sehingga laporan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 dapat tersusun

Modung, Agustus 2024

CAMAT MODUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN MODUNG

DEDDY SUHERMAN ARIF,SH,S.Sos,Msi

NIP. 196804141992031014

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Proses penyusunan Renja PD terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap pelaksanaan forum PD, tahap perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan renja PD. Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan.

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) PerubahanPerangkatDaerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Sebagai dokumen perencanaan tahunan dokumen ini mempunyaiartiyang strategisdalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Modung, mengingat beberapahalsebagaiberikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Dokumen Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA danPPAS dalam perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat DaerahTahun 2024-2026.

Renja Perubahan Kecamatan Modung tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Modung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024.

Renja Perubahan Kecamatan ModungTahun 2024 disamping berfungsi sebagai Pedoman Kerja juga diharapkan menyatukan persepsi dan strategi seluruh aparat Kecamatan Modungdalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri dan sebagai evaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD Kecamatan Modung.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perubahanKecamatan ModungTahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat 1.

Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan maka tujuan Perencanaan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan, akan bersinergi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 OPD Kecamatan Modungmemuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Modungserta kerangka pendanaan daerah yang secara substansial sesuai denganagenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPD dan RENSTRA) sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses Perencanaan Pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.

4. Pendekatan Top–Down (Atas–Bawah), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus berjenjang memperhatikan program-program pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom–Up (Bawah–Atas), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder/pemerintah dibawahnya.

   Pendekatan Top-Down dan Bottom–Up diselaraskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

   Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan ModungTahun 2024 disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang mengacu pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Renstra OPD Kecamatan Modungdan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah();
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun

2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)

13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Modungadalah perencanaan OPD dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD Tiga tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu - isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Rewiew terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

BAB V. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 OPD Kecamatan ModungKabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026 dan Renstra OPD Kecamatan Modung tahun 2024 – 2026 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan ModungDengan adanya Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Modungselama1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Modung tahun 2024 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2024-2026. Terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terdiri dari 5 Program dan 10 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 2.755.214.735,00namun demikian hingga triwulan ke 2 tahun 2024 anggaran yang terserap hanya Rp. 1.509.496.801,00,- atau sekitar 17,39%dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Adapun rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

1	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**
1.1	**7.01.01.2.01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.5	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.6	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	**7.01.02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
2.1	**7.01.02.2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
3.1	**7.01.03.2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan keluaran Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
4.1	**7.01.04.2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**

		Ketentraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
5.1	**7.01.06.2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dari 5 (lima) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 15 (Lima belas) sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 (satu) hanya 4 program, 8 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang terealisasi, 4 sub kegiatan lainnya belum terealisasi dan akan direalisasikan pada triwulan berikutnya dalam tahun berjalan.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table 2.1 terlampir.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kecamatan Modung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %		
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		100 %	100 %	100 %	100 %		90 %		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dokumen	2	50,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dokumen	3	33,33
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dokumen	3	33,33
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dokumen	3	33,33

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	2 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	0 Dokumen	1	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dokumen	3	33,33
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	8 Laporan	10	33,33
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							90 %		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	96,06	12 Bulan	36	33,33
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3	33,33
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	54 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100,00	18 Laporan	54	33,33
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100,00	14 Laporan	42	33,33
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		100 %	0 %	0 %	0 %	0	90 %		

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70 Buah	0 Buah	0 Buah	0 Buah	0	35 Buah	35	50,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	3 Orang	3	50,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100 %	100 %	100 %	100 %	100	90 %		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	2	33,33
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100,00	3 Jenis	21	33,33
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00	1 Jenis	5	33,33
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100,00	6 Jenis	18	33,33
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Kali	0 Kali	2 Kali	2 Kali	92,27	0 Kali	2	0,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	2	50,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Lainnya	Jumalh Pengadaan Peralatan dan Lainnya yang diadakan	2 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	2	50,00

7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	0 Unit	3	0,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							90 %		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00	2 Jenis	6	33,33
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	59,29	2 Jenis	6	33,33
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	98,97	14 Jenis	42	33,33
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100 %	100 %	100 %	100 %		90 %		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50,00	2 Unit	5	33,33

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	6	33,33
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	10 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00	5 Unit	10	50,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	4	33,33
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**100 %**		
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**							90 %		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	3 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dokumen	2	33,33

7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**	100 %	100 %	100 %	100 %		90 %		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dokumen	3	33,33
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		**90 %**		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							90 %		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	3	33,33
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	2	25,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		**100 %**		
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**		90 %		

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	0 Kegiatan	1	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**100 %**	**100 %**	**100 %**		**100 %**		
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**100 %**	**100 %**	**100 %**		90 %		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	36 Desa	0 Desa	1 Desa	1 Desa	100,00	0 Desa	1	0,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	72 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0,00	0 Peserta	0	0,00

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN INDIKATOR SPM/NSPK/IKK/IKD SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2024

Dalam analisis kinerja pelayanan perangkat daerah ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji sesuai dengan tugas dan fungsi PD Kecamatan Modung. Kinerja Pelayanan Kecamatan Modung merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja PD.Kinerja Pelayanan di Kecamatan Modung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam pencapian kinerja pelayanan di Kecamatan Modung antara lain :

1. Indeks kepuasan masyarakat kecamatan Modung
2. Nilai SAKIP Kecamatan Modung

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Modung

No	Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika ada Perubahan Target
		2020	2021	2022	2023			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	90	80	100	90	90	90
2	Nilai SAKIP Kecamatan	52	55	56	59	63	63	63

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN :

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat kecamatan (Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Modun)

SASARAN :

Meingkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Modung (Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Modung dan Nilai SAKIP)

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 3.1 terlampir.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah 2024
KECAMATAN MODUNG
KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025			2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Modung	90	95	Meingkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Modung	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Modung	90	95	
					Nilai SAKIP PD	63	67	

Tabel 3.2 Matriks Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Catatan Penting (Alasan Perubahan
		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	UNSUR KEWILAYAHAN											
1	**KECAMATAN MODUNG**				**2.792.496.767**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**2.755.214.735**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	
01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kec. Modung**	**90 %**	**2.765.506.767**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kec. Modung**	**90 %**	**2.736.594.735**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	
01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**90%**	**3.600.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**90%**	**909.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		1 Dokumen	900.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		0 Dokumen	0		Refocusing Anggaran
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	900.000		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		0 Dokumen	0		Refocusing Anggaran
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		1 Dokumen	900.00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		0 Dokumen	0		Refocusing Anggaran

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		1 Dokumen	900.00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		0 Dokumen	909.500		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**90%**	**2.238.976.517**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**90%**	**2.224.682.485**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	2.237.106.767		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	2.223.712.735		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	900.000		Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun		0 Dokumen	0		Refocusing Anggaran
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteranJumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran		24 Laporan	969.750		Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteranJumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran		0 Laporan	969.750		
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Lapaoran Barang Milik Daerah Yang tersusun**		**90%**	**900.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Lapaoran Barang Milik Daerah Yang tersusun**		**90%**	**0**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun		42 Lap	900.000		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun		0 Lap	0		Refocusing Anggaran
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia**		**90%**	**25.370.750**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia**		**90%**	**23.258.250**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9 jenis	18.726.750		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9 jenis	18.614.250		Refocusing Anggaran

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 ls	6.344.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 ls	4.344.000		Refocusing Anggaran
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6 jenis	300.000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 jenis	300.000		
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Prasarana Aparatur yang diadakan**		**90%**	**30.281.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Prasarana Aparatur yang diadakan**		**90%**	**24.281.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		6 unit	30.281.000		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		1 unit	24.281.000		Refocusing Anggaran
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang tersedia**		**90%**	**429.318.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang tersedia**		**90%**	**426.418.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		9 jenis	8.478.500		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		9 jenis	8.478.500		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		48 jenis	420.840.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		40 jenis	417.940.000		Refocusing Anggaran
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara**		**90%**	**37.060.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara**		**90%**	**37.045.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara		6 Unit	23.360.000		Jumlah Kendaraan yang dipelihara		3 Unit	23.360.000		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	13.700.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	13.685.000		Refocusing Anggaran

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**Kec. Modung**	**90%**	**4.150.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**Kec. Modung**	**90%**	**3.700.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Refocusing Anggaran**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Tersedianya Dokumen Monografi yang tersusun**		**90%**	**4.150.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Tersedianya Dokumen Monografi yang tersusun**		**90%**	**3.700.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	Refocusing Anggaran
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya dokumen monografi yang tersusun		1 Dokumen	4.150.000		Tersedianya dokumen monografi yang tersusun		1 Dokumen	3.700.000		Refocusing Anggaran
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa Yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Modung**	**90%**	**8.700.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Persentase Desa Yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Modung**	**90%**	**6.800.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Refocusing Anggaran**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Mayarakat yang terbina**		**90%**	**8.700.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Mayarakat yang terbina**		**90%**	**6.800.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	Refocusing Anggaran
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan		1 Kegiatan	8.700.000		Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan		1 Kegiatan	6.800.000		Refocusing Anggaran
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**Kec. Modung**	**90%**	**3.900.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**Kec. Modung**	**90%**	**3.900.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan/sosialisasi**		**90%**	**3.900.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan/sosialisasi**		**90%**	**3.900.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	3.900.000		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	3.900.000		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dan Kelurahan yang mengikuti Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**	**Kec. Modung**	**90%**	**10.240.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Persentase Desa dan Kelurahan yang mengikuti Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**	**Kec. Modung**	**90%**	**4.220.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Refocusing Anggaran**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Terdmpingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya,**		**90%**	**10.240.000**	**Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum**	**Jumlah Desa Yang Terdmpingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya,**		**90%**	**4.220.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	Refocusing Anggaran
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah peserta yang mengukuti bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa		34 peserta	5.120.000		Jumlah peserta yang mengukuti bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa		0 peserta	0		Refocusing Anggaran
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengukuti bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa		34 peserta	5.120.000		Jumlah peserta yang mengukuti bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa		34 peserta	4.220.000		Refocusing Anggaran
					2.792.496.767					**2.755.214.735**		

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Modung merupakan dasar pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2024. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Modungselalu mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Modung tahun 2024 disusun yang secara umum sudah mencakup program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Namum demikian dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian Data, oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaanya.

Modung, Agustus 2024

CAMAT MODUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN MODUNG

DEDDY SUHERMAN ARIF, S.H., S.Sos., M.Si

NIP. 196804141992031014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024, telah selesai disusun.

Renja perubahan ini memuat tentang Rencana Kinerja Kecamatan Kwanyar yang diusulkan berdasarkan Kebijakan, Program, Sasaran dan Kegiatan, untuk menjadi pedoman kegiatan Tahun Anggaran 2024 Perubahan yang telah disesuaikan dengan rencana strategis dari Kecamatan Kwanyar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyadari benar bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon untuk dapat dimaklumi, adapun baik keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan program Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024, dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam SAKIP tahun 2024 nanti.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menerima pengabdian kita sekecil apapun untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya dan umumnya untuk Negara dan Bangsa Indonesia, serta mengampuni segala kesalahan kita semua, Amiin Ya Rabbal Alamin.

Bangkalan, 15 Agustus 2024

Plt. CAMAT KWANYAR

KUSPRIYANTO, SE., MM.
Penata Tk. I
NIP. 19740425 200701 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aaspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Kecamatan Kwanyar yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kwanyar.

Kecamatan Kwanyar merupakan pelaksana otonomi daerah dimana berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi juga sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan, meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan, Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat

Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut diatas, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah.

Dengan diberlakukannya Pasal 2 Paraturan Bupati Bangkalan nomor 65 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Paraturan Bupati Bangkalan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

- Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat;
- Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/ Walikota;

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja / penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga. Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai Perangkat Daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lebaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D). Sehingga struktur Kecamatan Kwanyar terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretaris Camat, yang membawahi :
    1. Subbag Perencanaan dan Keuangan
    2. Subbag Umum dan Kepegawaian
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
g. Seksi Pelayanan Masyarakat

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kwanyar Tahun 2024 adalah :

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
c. Landasan Operasional :
    1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
    2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
    3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27/E)
12. Peraturan Bupati Nomor 175 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD :

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Kwanyar adalah perencanaan dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perubahan Tiga tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sangat strategis di Kecamatan Kwanyar.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Renja Perubahan adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan/sub kegiatan selama 1 tahun oleh Kecamatan Kwanyar.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja PD Sampai Semester I Tahun Berjalan

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Samapai Semester Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat daerah

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

BAB IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERNGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026 dan Renstra Kecamatan Kwanyar tahun 2024 – 2026 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Kwanyar.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kwanyar selama1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Kwanyar tahun 2024 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2024-2026 Terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdiri dari 4 Program dan 10 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 2.244.122.503,- namun demikian hingga Semester I tahun 2024 anggaran yang terserap Rp. 1.143.554.565,- atau sekitar 51,01 % dari total anggaran per 30 Juni 2024 (sumber : SIPD/SP2D).

Adapun rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

1	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**
1.1	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.2	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.3	**7.01.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.5	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.6	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
3.1	**7.01.03.2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan keluaran Kegiatan Musrenbang
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
4.1	**7.01.04.2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
5.1	**7.01.06.2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dari 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 sampai dengan Semester 1 (satu) ada 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang terealisasi, 7 sub kegiatan lainnya belum terealisasi dikarenakan baru terlaksana atas pencairan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table 2.1 terlampir.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kecamatan Kwanyar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program / Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 Semester 1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100 %**	**7.236.034.091**	**100 %**	**1.793.779.012**	**95 %**	**1.925.211.482**	**98 %**	**1.886.628.443**	**103**	**98,00**	**100 %**	**2.165.376.754**	**100 %**	**1.067.285.465**	100,00
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**31.500.000**	**100 %**	**14.000.000**	**95 %**	**6.000.000**	**100 %**	**6.000.000**	**105**	**100**	**100 %**	**1.556.000**	**28,57 %**	**-**	28,57
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	4.500.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	100	100	1 Dok	778.000	1 Dok	-	33,33
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 Dokumen	4.500.000	1 Dok	2.000.000	0 Dok	0	0 Dok	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0 Dok	-	- Dok	-	0,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3 Dokumen	4.500.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	100	100	0 Dok	-	1 Dok	-	33,33
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3 Dokumen	4.500.000	1 Dok	2.000.000	0 Dok	0	0 Dok	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1 Dok	778.000	- Dok	-	0,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	3 Dokumen	4.500.000	1 Dok	2.000.000	0 Dok	0	0 Dok	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0 Dok	-	- Dok	-	0,00

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dokumen	4.500.000	1	Dok	2.000.000	1	Dok	2.000.000	1	Dok	2.000.000	100	100	0	Dok	-	-	Dok	-	0,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Laporan	4.500.000	1	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Dok	-	-	Laporan	-	0,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**5.308.423.541**	**100**	**%**	**1.729.314.512**	**100**	**%**	**1.796.678.882**	**100**	**%**	**1.758.396.061**	100	97,87	**100**	**%**	**1.586.819.954**	**100**	**%**	**779.504.657**	100,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	63	Orang	5.299.423.541	12	Bln	1.725.314.512	12	Bln	1.794.678.882	12	Bln	1.756.396.061	100	97,87	12	Bln	1.586.122.504	6	Bln	778.807.207	9,52
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	4.500.000	1	Laporan	2.000.000	1	Laporan	2.000.000	0	Laporan	2.000.000	0	100,00	1	Laporan	697.450	2	Laporan	697.450	66,67
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	4.500.000	18	Laporan	2.000.000	18	Laporan	-	0	Laporan	-	0	#DIV/0!	0	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**7.500.000**	**100**	**%**	**2.500.000**	**100**	**%**	**2.500.000**	**100**	**%**	**2.500.000**	100	100	**100**	**%**	**680.000**	**0**	**%**	**-**	**0,00**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	7.500.000	1	Laporan	2.500.000	1	Laporan	2.500.000	1	Laporan	2.500.000	100	100	1	Laporan	680.000	-	Laporan	-	0,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**49.350.000**	**100**	**%**	**12.000.000**	**100**	**%**	**2.000.000**	**100**	**%**	**2.000.000**	100	100	**100**	**%**	**-**		**%**	**-**	**0,00**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	103	Buah	28.350.000	0	Buah	-	0	Buah	-	0	Buah	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Buah	-	-	Buah	-	0,00
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Laporan	6.000.000	1	Laporan	2.000.000	1	Laporan	2.000.000	1	Laporan	2.000.000	100	100	0	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Orang	15.000.000	2	Orang	10.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Orang	-	-	Orang	-	0,00

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**25.702.050**	**100**	**%**	**26.044.500**	**100**	**%**	**14.736.000**	**100**	**%**	**14.736.000**	**100**	**100**	**100**	**%**	**15.950.800**	**31,18**	**%**	**4.973.950**	**31,18**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Unit	1.247.250	1	Unit	4.498.400	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Unit	604.500	-	Unit	-	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Unit	6.196.800	3	Unit	9.969.450	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3	Unit	5.892.800	6	Unit	3.170.450	66,67
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Unit	5.391.000	1	Unit	7.050.000	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Unit	7.650.000	-	Unit	-	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Jenis	5.367.000	0	Jenis	3.026.650	0	Jenis	-	0	Jenis	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Jenis	1.803.500	2	Jenis	1.803.500	33,33
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Kali	7.500.000	0	Kali	1.500.000	15	Kali	14.736.000	15	Kali	14.736.000	100	100	0	Kali	-	15	Kali	-	25,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**41.968.500**	**100**	**%**	**6.000.000**	**0**	**%**	**56.188.400**	**0**	**%**	**56.002.437**	#DIV/0!	100	**100**	**%**	**554.450.000**	**100**	**%**	**282.276.858**	100
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	Unit	28.468.500	2	Unit	6.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Unit	30.000.000	2	Unit	30.000.000	25,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	Unit	13.500.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Unit	-	-	Unit	-	0,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.632.390.000**	**100**	**%**	**536.790.000**	**100**	**%**	**56.188.400**	**100**	**%**	**56.002.437**	**100**	**100**	**100**	**%**	**524.450.000**	**100**	**%**	**252.276.858**	**100,00**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9	Jenis	5.280.000	3	Jenis	1.620.000	100	%	47.108.200	100	%	46.993.945	100	100	3	Jenis	3.620.000	3	Jenis	530.000	**33,33**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	Jenis	44.400.000	3	Jenis	14.800.000	1	Jenis	1.000.000	1	Jenis	1.000.000	100	100	3	Jenis	10.000.000	3	Jenis	1.956.608	33,33
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Jenis	1.582.710.000	12	Jenis	520.370.000	1	Jenis	8.080.200	1	Jenis	8.008.492	100	99,11	12	Jenis	510.830.000	2	Jenis	249.790.250	5,56

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**148.740.000**	**100**	**%**	**31.733.050**	**100**	**%**	**38.028.000**	**100**	**%**	**37.985.453**	**100**	**100**	**100**	**%**	**68.401.649**	**100**	**%**	**63.485.000**	**100,00**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	Unit	6.900.000	1	Unit	2.300.000	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Unit	2.300.000	0	Unit	-	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	Unit	100.800.000	1	Unit	26.250.100	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Unit	38.611.649	1	Unit	38.485.000	16,67
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6	Unit	9.540.000	2	Unit	2.950	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Unit	2.490.000	-	Unit	-	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	Unit	31.500.000	1	Unit	3.180.000	1	Unit	38.028.000	1	Unit	37.985.453	100	100	1	Unit	25.000.000	1	Unit	25.000.000	33,33
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**9.000.000**	**100**	**%**	**-**	**95**	**%**	**4.350.250**	**100**	**%**	**4.350.250**	**105**	**100**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0,00**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**100**	**%**	**4.500.000**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	#DIV/0!	#DIV/0!	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	0,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	3	Dokumen	4.500.000	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Dok	-	-	Dok	-	0,00

7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**	**100**	**%**	**4.500.000**	**100**	**%**	**-**	**95**	**%**	**4.350.250**	**95**	**%**	**4.350.250**	**100**	**100**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3	Dokumen	4.500.000	0	Dok	-	1	Dok	4.350.250	1	Dok	4.350.250	100	100	0	Dok	-	-	Dok	-	0,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**54.000.000**	**100**	**%**	**11.750.000**	**95**	**%**	**12.000.000**	**95**	**%**	**12.000.000**	**100**	**100**	**100**	**%**	**9.884.850**	**100**	**%**	**6.934.850**	100,00
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana**	**100**	**%**	**54.000.000**	**100**	**%**	**11.750.000**	**95**	**%**	**12.000.000**	**95**	**%**	**12.000.000**	100	100	**100**	**%**	**9.884.850**	**100**	**%**	**6.934.850**	100,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	Kegiatan	34.000.000	1	Kegiatan	11.750.000	1	Kegiatan	12.000.000	1	Kegiatan	12.000.000	100	100	1	Kegiatan	9.884.850	1	Kegiatan	6.934.850	33,33
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	4	Kegiatan	20.000.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**31.400.000**	**0**	**%**	**-**	**95**	**%**	**3.900.000**	**100**	**%**	**3.900.000**	**105**	**100**	**100**	**%**	**3.619.100**	100	**%**	**3.619.100**	100,00
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100	%	31.400.000	0	%	-	95	%	3.900.000	100	%	3.900.000	105	100	100	%	3.619.100	100	%	3.619.100	100,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	4	Kegiatan	31.400.000	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	3.900.000	1	Kegiatan	3.900.000	100	100	1	Kegiatan	3.619.100	1	Kegiatan	3.619.100	25,00

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**3.900.000**	**0**	**%**	**-**	**95**	**%**	**4.325.300**	**100**	**%**	**4.325.300**	**105**	**100**	**0**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	3.900.000	0	%	-	95	%	4.325.300	95	%	4.325.300	100	100	0	%	-	-	%	-	0,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2	Kegiatan	3.900.000	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	4.325.300	1	Kegiatan	4.325.300	100	100	0	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**55.009.050**	**100**	**%**	**7.543.300**	**95**	**%**	**4.350.000**	**100**	**%**	**4.350.000**	**105**	**100**	**100**	**%**	**2.760.150**	**100**	**%**	**2.760.150**	100,00
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	100	%	55.009.050	100	%	7.543.300	95	%	4.350.000	100	%	4.350.000	105	100	100	%	2.760.150	100	%	2.760.150	100,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	48	Desa	27.659.050	16	Desa	3.193.300	0	Desa	-	0	Desa	-	#DIV/0!	#DIV/0!	16	Desa	2.760.150	32	Desa	2.760.150	66,67
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	96	Peserta	27.350.000	32	Peserta	4.350.000	32	Peserta	4.350.000	32	Peserta	4.350.000	100	100	0	Peserta	-	-	Peserta	-	0,00

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Kecamatan Kwanyar mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kwanyar dalam menjalankan tugasnya guna mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akanmemberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kinerja Unsur Kewilayahan

SASARAN :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat
2. Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina
3. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 3.1 terlampir.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

Kecamatan Kwanyar

Tujuan							Sasaran							Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi			Target		Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi			Target		
		2021	2022	2023	2024	Perubahan			2021	2022	2023	2024	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	90	95	100	100	100	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik terhadap masyarakat	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	90	95	100	100	100	
							Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina	Prosentase aparatur / perangkat desa yang terbina				90%	90%	
Meningkatnya Kinerja Urusan Unsur Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Unsur Kewilayahan	85	90	95	95	95	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indek Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	85	90	95	95	95	

3.2. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Perubahan pada Kecamatan Kwanyar tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan. Selanjutnya pada program, kegiatan dan sub kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran Perubahan Renja pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerahdengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerahdengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerahdengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahdengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahdengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahdengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desadengan rincian subkegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

III. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rincian subkegiatan sebagai berikut :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desadengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 3.2 terlampir.

.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja Tahun 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Bangkalan	1 Dokumen	778.000	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Bangkalan	0 Dokumen	-	APBD	(778.000)	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Bangkalan	0 Dokumen	-	APBD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Bangkalan	0 Dokumen	-	APBD	-	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Bangkalan	1 Dokumen	778.000	APBD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Bangkalan	0 Dokumen	-	APBD	(778.000)	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Bangkalan	0 Dokumen	-	APBD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Bangkalan	0 Dokumen	-	APBD	-	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	Bangkalan	0 Dokumen	-	APBD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	Bangkalan	0 Dokumen	-	APBD	-	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Bangkalan	0 Laporan	-	APBD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Bangkalan	0 Laporan	-	APBD	-	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Bangkalan	0 Laporan	-	APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Bangkalan	0 Laporan	-	APBD	-	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**					**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**					-	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Bangkalan	12 Org/bulan	1.586.122.504	APBD	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Bangkalan	12 Org/bulan	1.409.547.384	APBD	(176.575.120)	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Bangkalan	1 Laporan	697.450	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Bangkalan	1 Laporan	697.450	APBD	-	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Bangkalan	18 Laporan	-	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Bangkalan	0 Laporan	-	APBD	-	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	Bangkalan				**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	Bangkalan					
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	1 Laporan	680.000	APBD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	0 Laporan	-	APBD	(680.000)	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**					**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**						
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bangkalan	0 Paket	-	APBD	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bangkalan	0 Paket	-	APBD	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	0 Dokumen	-	APBD	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	0 Dokumen	-	APBD	-	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	0 Orang	-	APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	0 Orang	-	APBD	-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**						

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	2	Paket	604.500	APBD	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	0	Paket	-	APBD	(604.500)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	3	Paket	5.892.800	APBD	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	3	Paket	5.066.200	APBD	(826.600)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	1	Paket	7.650.000	APBD	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	1	Paket	7.650.000	APBD	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	2	Paket	1.803.500	APBD	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	2	Paket	1.803.500	APBD	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	0	Laporan	-	APBD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	0	Laporan	-	APBD	-
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**						**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**						
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Bangkalan	0	Paket	-	APBD	Jumlah Mebel yang diadakan	Bangkalan	0	Paket	-	APBD	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Bangkalan	2	Unit	30.000.000	APBD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Bangkalan	2	Unit	30.000.000	APBD	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Bangkalan	0	Unit	-	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Bangkalan	0	Unit	-	APBD	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	2	Laporan	3.620.000	APBD	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	2	Laporan	2.110.000	APBD	(1.510.000)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	2	Laporan	10.000.000	APBD	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	2	Laporan	10.000.000	APBD	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	12	Laporan	510.830.000	APBD	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	12	Laporan	499.920.000	APBD	(10.910.000)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**						**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**						
7.01.01.2.09.01	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Bangkalan	2	Unit	2.300.000	APBD	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Bangkalan	0	Unit	-	APBD	(2.300.000)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Bangkalan	2	Unit	38.611.649	APBD	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Bangkalan	2	Unit	38.784.899	APBD	173.250
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Bangkalan	2	Unit	2.490.000	APBD	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Bangkalan	2	Unit	-	APBD	(2.490.000)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Bangkalan	1	Unit	25.000.000	APBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Bangkalan	1	Unit	25.000.000	APBD	-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**						**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**						
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**						**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**						
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	Bangkalan	0	Laporan	-	APBD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	Bangkalan	0	Laporan	-	APBD	-

7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**						**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	Bangkalan	0	Laporan	-	APBD	Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	Bangkalan	0	Laporan	-	APBD	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**						**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI**							
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana						Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana							
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Bangkalan	1	Lembaga Kemasyarakatan	9.884.850	APBD	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Bangkalan	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.934.850	APBD	(2.950.000)	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Bangkalan	0	Laporan	-	APBD	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Bangkalan	0	Laporan	-	APBD	-	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**						**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**							
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Bangkalan	1	Laporan	3.619.100	APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Bangkalan	1	Laporan	3.619.100	APBD	-	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**						**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**							
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa	Bangkalan	1	Dokumen	2.760.150	APBD	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa	Bangkalan	1	Dokumen	2.760.150	APBD	-	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bangkalan	0	Dokumen	-	APBD	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bangkalan	0	Dokumen	-	APBD	-	
TOTAL						**2.244.122.503**						**2.043.893.533**			

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan implementasi dan operasionalisasi dari program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi dalam mencapai tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis PD. Rencana kerja Perubahan dibuat berdasarkan visi dan misi organisasi guna mencapai target kinerja program dan kegiatan PD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 juga bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas program kerja Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan selama Tahun Anggaran 2024, serta sebagai alat pengukur pencapaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan oleh tim, individu, dan institusi organisasi dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Selain itu, RENJA ini juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dalam melaksanakan tugas dengan disiplin.

Rencana Kerja Kecamatan Kwanyar Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangkalan dan Renstra Kecamatan Kwanyar Tahun 2024–2026. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Output dari RENJA Perubahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan adalah program tahunan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan sasaran yang telah ditentukan. RENJA Perubahan ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024, yang telah disesuaikan dengan pagu indikatif. Dengan adanya RENJA Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 15 Agustus 2024

Plt. CAMAT KWANYAR

KUSPRIYANTO, SE., MM.
Penata Tk. I
NIP. 197404252007011010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana starategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu. Hasil dari proses tersebut berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menyusun suatu perencanaan yang baik agar mampu meningkatkan Pelayanan yang Prima terhadap Masyarakat sehingga tercipta Good Governace.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tragah Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Tragah Tahun 2018 - 2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tragah Tahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat 1.

Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam

pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan maka tujuan Perencanaan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan, akan bersinergi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 OPD Kecamatan Tragah memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tragah serta kerangka pendanaan daerah yang secara substansial sesuai dengan visi, misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan RENSTRA) sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses Perencanaan Pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top–Down (Atas–Bawah), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus berjenjang memperhatikan program-program pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom–Up (Bawah–Atas), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder/pemerintah dibawahnya.

   Pendekatan Top-Down dan Bottom–Up diselaraskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

   Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Tragah Tahun 2024 disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang mengacu pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Renstra OPD Kecamatan

Tragah dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tragah Tahun 2024 adalah :

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 202'l tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bangkalan tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomer I tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan
18. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomer 54 fahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomer 33 seri E)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Tragah adalah perencanaan OPD dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD Lima tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.

4. sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tragah

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

BAB IV. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN INI DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 OPD Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2018 - 2024 dan Renstra OPD Kecamatan Tragah tahun 2018 – 2024 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Tragah.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Tragah selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Tragah tahun 2024 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2018-2024 Terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 2.746.243.515,- namun demikian hingga triwulan ke 2 tahun 2024 anggaran yang terserap hanya Rp. 1.444.774.731,- atau sekitar 52,61 % dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Adapun rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

1	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**
1.1	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

		Kinerja Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terserap sebesar Rp. 0 atau 0%
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terserap sebesar Rp. 0 atau 0%
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD terserap sebesar Rp.0 atau 0%
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan keluaran Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN yang terserap sebesar Rp. 1.170.909.482 atau 53,63%
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.3	**7.01.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	**7.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.5	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terserap sebesar Rp.0 atau 0%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangterserap sebesar Rp.1.247.400 atau 5,86%
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terserap sebesar Rp. 831.000 atau 22,01 %
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terserap sebesar Rp. 0 atau 0%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terserab sebesar Rp. 0 atau 0%
1.6	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terserab sebesar Rp. 0 atau 0%
1.7	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terserap sebesar Rp. 350.000 atau 21,60%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terserap sebesar Rp. 4.371.207 atau 34,28%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan keluaran Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

		Kantor yang terserap Rp. 131.807.759 atau 42,64%
1.8	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terserap Rp. 7.356.572atau 23,54%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terserap sebesar Rp. 0 atau 0%
2	**7.01.02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
2.2	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
3.1	**7.01.03.2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan keluaran Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan terserap sebesar Rp. 12.500.000,- atau 100%
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
4.1	**7.01.04.2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
5.1	**7.01.06.2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dari 5 (lima) program, 14 (Empat belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh emapat) sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 (dua) hanya 3 program, 9 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang terealisasi, 20 sub kegiatan lainnya belum terealisasi dan akan direalisasikan pada triwulan berikutnya dalam tahun berjalan.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table terlampir.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kecamatan Tragah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		100	%	100	%	100	%	100	%		100	%		
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		100	%	100	%	100	%	100	%		90	%		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	Dok	0	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dokumen	2	50
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dokumen	3	33,33
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dokumen	3	33,33
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dokumen	3	33,33
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	2	Dok	0	Dok	1	Dok	1	Dok	100	0	Dokumen	1	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dokumen	3	33,33

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	8	Laporan	10	33,33
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											90	%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	96,06	12	Bulan	36	33,33
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	33,33
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100	18	Laporan	54	33,33
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		100	%	100	%	100	%	100	%		100	%		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	100	14	Laporan	42	33,33
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		100	%	0	%	0	%	0	%	0	90	%		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0	35	Buah	35	50
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	3	Orang	3	50
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100	%	100	%	100	%	100	%	100	90	%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	2	33,33
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Jenis	9	Jenis	9	Jenis	9	Jenis	100	3	Jenis	21	33,33
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100	1	Jenis	5	33,33
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	100	6	Jenis	18	33,33

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Kali	0	Kali	2	Kali	2	Kali	92,27	0	Kali	2	0
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		100	%	100	%	100	%	100	%		100	%		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1	Unit	2	50
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Lainnya	Jumalh Pengadaan Peralatan dan Lainnya yang diadakan	2	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	2	50
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	Unit	0	Unit	3	Unit	3	Unit	100	0	Unit	3	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											90	%		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100	2	Jenis	6	33,33
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	59,29	2	Jenis	6	33,33
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42	Jenis	14	Jenis	14	Jenis	14	Jenis	98,97	14	Jenis	42	33,33
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100	%	100	%	100	%	100	%		90	%		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	Unit	2	Unit	2	Unit	1	Unit	50	2	Unit	5	33,33
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100	2	Unit	6	33,33
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	10	Unit	0	Unit	5	Unit	5	Unit	100	5	Unit	10	50

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	4	33,33
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**100**	**%**		
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**											90	%		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	3	Dok	0	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dokumen	2	33,33
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**	100	%	100	%	100	%	100	%		90	%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	Dokumen	3	33,33
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**		**90**	**%**		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											90	%		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	1	Kegiatan	3	33,33
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	4	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	0	1	Kegiatan	2	25

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**		**100**	**%**		
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**		90	%		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	4	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	0	Kegiatan	1	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**		**100**	**%**		
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**		90	%		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	54	Desa	0	Desa	1	Desa	1	Desa	100	0	Desa	1	0
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	108	Peserta	0	Peserta	0	Peserta	0	Peserta	0	0	Peserta	0	0

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tragah

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan

		Standar Nasional		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Analisis
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan			80	100			95	100			-
	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Tragah					90	95			90	95	
2	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan			85	90			85	90			-
	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tragah					90	95			90	95	
3	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan			95	100			90	95			-
	Nilai SAKIP PD			56	59	63	67	53,79	52	63	67	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kinerja Unsur Kewilayahan

SASARAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat
2. Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina
3. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table terlampir.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah
KECAMATAN TRAGAH
KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025			2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Tragah	90	95	Meingkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tragah	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tragah	90	95	
					Nilai SAKIP PD	63	67	

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan
		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11-6	14
	UNSUR KEWILAYAHAN												
1	**KECAMATAN TRAGAH**				**2.810.825.498**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**2.654.609.756**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-156.215.742**	**Refocusing Anggaran**
01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kec. Tragah**	**100 %**	**2.797.487.498**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kec. Tragah**	**100 %**	**2.647.738.256**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-149.749.242**	**Refocusing Anggaran**
01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**2.154.800**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**807.300**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-1.347.500**	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		1 Dokumen	560.500		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		Dokumen	0		-560.500	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		Dokumen	0		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		Dokumen	0		0	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	507.300		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	507.300		0	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		Dokumen	0		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		Dokumen	0		0	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	300.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	300.000		0	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		1 Dokumen	405.000		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		Dokumen	0		-405.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		1 Dokumen	382.000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		Dokumen	0		-382.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**2.283.114.498**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**2.149.467.306**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-133.647.192**	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	2.282.375.498		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	2.148.938.306		**-133.437.192**	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	520.000		Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	310.000		-210.000	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteranJumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran		18 Laporan	219.000		Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteranJumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran		18 Laporan	219.000		0	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Lapaoran Barang Milik Daerah Yang tersusun**		**100%**	**300.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Lapaoran Barang Milik Daerah Yang tersusun**		**100%**	**0**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-300.000**	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun		14 Dokumen	300.000		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun		Dokumen	0		-300.000	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur yng Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Seminar**		**100%**	**446100**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Aparatur yng Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Seminar**		**100%**	**446100**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**0**	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0 Buah	0		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0 Buah	0		**0**	

7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2 Laporan	446100		Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2 Laporan	446100		**0**	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar		orang	0		Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar		orang	0		**0**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia**		**100%**	**25.162.100**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia**		**100%**	**16.310.050**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-8.852.050**	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	380.250		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	0		-380.250	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		18 Paket	18.694.350		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		18 Paket	14.395.050		-4.299.300	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		24 Paket	2.172.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		24 Paket	396.000		-1.776.000	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		20 Paket	2.363.500		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		20 Paket	1.519.000		-844.500	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		9 Laporan	1.552.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	0		-1.552.000	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Prasarana Aparatur yang diadakan**		**100%**	**30.840.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Prasarana Aparatur yang diadakan**		**100%**	**30.840.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**0**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		Jenis	0		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		Jenis	0		0	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		Jenis	0		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		Jenis	0		0	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		4 Unit	30.840.000		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		4 Unit	30.840.000		0	

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang tersedia**		**100%**	**322.675.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang tersedia**		**100%**	**317.972.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-4.702.500**	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.825.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.825.000		0	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	16.170.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	17.790.000		1.620.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	304.680.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	298.357.500		-6.322.500	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara**		**100%**	**132.795.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara**		**100%**	**131.895.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-900.000**	Refocusing Anggaran
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa perijinan kendaraan		2 Unit	2.400.000		Jumlah jasa perijinan kendaraan		2 Unit	2.400.000		0	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara		2 Unit	28.895.000		Jumlah Kendaraan yang dipelihara		2 Unit	28.895.000		0	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		5 Jenis	1.500.000		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		5 Jenis	600.000		-900.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	100.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	100.000.000		0	Refocusing Anggaran
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**Kec. Tragah**	**100%**	**1.341.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**Kec. Tragah**	**100%**	**600.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi**	**-741.500**	**Refocusing Anggaran**

						Umum					**Umum**		
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Tersedianya Dokumen Monografi yang tersusun**		**100%**	**441.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Tersedianya Dokumen Monografi yang tersusun**		**100%**	**0**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-441.500**	Refocusing Anggaran
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya dokumen monografi yang tersusun		1 Dokumen	441.500		Tersedianya dokumen monografi yang tersusun		Dokumen	0		-441.500	Refocusing Anggaran
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat**		**100%**	**900.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat**		**100%**	**600.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-300.000**	Refocusing Anggaran
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat yang tersusun		1 Dokumen	900.000		Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat yang tersusun		1 Dokumen	600.000		-300.000	Refocusing Anggaran
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa Yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Tragah**	**100%**	**7.500.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Persentase Desa Yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Tragah**	**100%**	**4.600.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-2.900.000**	**Refocusing Anggaran**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Mayarakat yang terbina**		**100%**	**7.500.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Mayarakat yang terbina**		**100%**	**4.600.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-2.900.000**	Refocusing Anggaran
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan		1 Kegiatan	7.500.000		Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan		1 Kegiatan	4.600.000		-2.900.000	

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina		organisasi	0		Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina		organisasi	0		0	Refocusing Anggaran
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**Kec. Tragah**	**100%**	**2.617.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**Kec. Tragah**	**100%**	**1.067.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-1.550.000**	**Refocusing Anggaran**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan/sosialisasi**		**100%**	**2.617.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan/sosialisasi**		**100%**	**1.067.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-1.550.000**	Refocusing Anggaran
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	2.617.000		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1.067.000		-1.550.000	Refocusing Anggaran
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dan Kelurahan yang mengikuti Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**	**Kec. Tragah**	**80 %**	**1.879.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Persentase Desa dan Kelurahan yang mengikuti Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**	**Kec. Tragah**	**80 %**	**604.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-1.275.000**	**Refocusing Anggaran**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Terdmpingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya,**		**80 %**	**1.879.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**Jumlah Desa Yang Terdmpingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya,**		**80 %**	**604.500**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**	**-1.275.000**	Refocusing Anggaran
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi perencanaan dan pelaksanaan APBDesnya		18 Desa	1.260.000		Jumlah desa yang terdampingi perencanaan dan pelaksanaan APBDesnya		18 Desa	360.000		-900.000	Refocusing Anggaran
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengukuti bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa		36 peserta	619.500		Jumlah peserta yang mengukuti bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa		36 peserta	244.500		-375.000	Refocusing Anggaran
					2.810.825.498					**2.654.609.756**		**-156.215.742**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Tragah merupakan dasar pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk 1 (satu) Semester ke depan yaitu tahun 2024. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Tragah selalu mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Tragah tahun 2024 disusun yang secara umum sudah mencakup program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Namum demikian dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian Data, oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaanya.

Tragah, 2024

CAMAT TRAGAH

IRISU UD, SAP

NIP.197405152003121006

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas Rahmat serta Hidayatnya, maka pada akhirnya kami Tim Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024.

Perencanaan Kerja ini akan senantiasa dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan yang merupakan pendukung Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bangkalan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan masih banyak terdapat kekurangan/kelemahan disana-sini, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya Renja ini.

Blega, Agustus 2024
CAMAT BLEGA

MUHAMMAD KOMARI,SAP
Pembina
NIP. 19770317 200212 2 009

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana starategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu. Hasil dari proses tersebut berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2024. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Blega Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahahan Rencana Kerja (RENJA) disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh Aparat Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan

datang, terutama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menyusun suatu perencanaan yang baik agar mampu meningkatkan Pelayanan yang Prima terhadap Masyarakat sehingga tercipta *Good Governance*.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Blega Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Blega Tahun 2018 - 2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 104,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali,terakhir dengan Undang – Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679) ;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6322);

d. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahankedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 nomor 4/E);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D) ;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembaentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
h. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan 2024-2026(Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 seri E);
i. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 (Berita Daerah kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E) ;
j. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);
k. Peraturan Bupati nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Blega).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan adalah suatu dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dan harus sejalan dengan Renstra Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan periode 5 (lima) tahunan dengan maksud memberikan arah kebijakan sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis dan agar dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang lebih terarah dan terpadu guna mewujudkan keinginan Pemerintah Kecamatan dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran. pada Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renja PD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama 1 tahun Perangkat Daerah
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.
5. Untuk dipakai sebagai pedoman pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan dapat lebih terarah, terencana dan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan;
6. Untuk terlaksananya tertib penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan;
7. Untuk dapat dipakai sebagai tolak ukur sejauh mana Rencana Kerja tersebut dilaksanakan atau belum keberhasilannya, sehingga dapat ditemukan berbagai umpan balik untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya baik terhadap penyempurnaan program, permasalahan-permasalahan yang

dijumpai maupun pendukung pelaksanaan kegiatan, dengan demikian kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Renja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 OPD Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2018 - 2024 dan Renstra OPD Kecamatan Blega tahun 2018 – 2024 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Blega.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Blega selama 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Blega tahun 2024 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2018-2024 Terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 terdiri dari 5 Program dan 12 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 3.286.282.206,00 namun demikian hingga Semester 1 tahun 2024 anggaran yang terserap hanya Rp. 1.823.736.437,00 atau sekitar 55,50 % dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja capaian Program (Pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023									Target Program,Kegiatan (renja PD tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun Berjalan			
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja PD Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)						Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub.Kegiatan sd Tahun Berjalan (Tahun 2024 TW 2)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
(1)	(2)	(3)	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	Rp
			(4)			(5)			(6)			(7)			(8=7/6)*100			(9)			(10=5+7+9)			11=(10/4) *100
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**85**	**%**	**9.312.926.872**	**84**	**%**	**3.001.018.085**	**84**	**%**	**3.030.658.015**	**84**	**%**	**3.001.018.085**	**100**	**%**	**99**	**98**	**%**	**3.210.372.206**	**26,8**	**%**	**9.212.408.376**	**98,92**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**14.750.000**	**100**	**%**	**7.511.400**	**84**	**%**	**3.740.000**	**84**	**%**	**7.511.400**	**100**	**%**	**201**	**100**	**%**	**4.280.000**	**1,5**	**%**	**19.302.800**	**131**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun																				-	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dok	5.250.000	3	Dok	3.317.000	3	Dok	1.540.000	3	Dok	1.540.000	100	%	100	2	Dok	2.130.000	8	Dok	**6.987.000**	**133,09**
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun																				-	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	1.500.000																	-	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun																				-	

		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	1.500.000																	-	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun																				-	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	3	Dok	1.500.000	1	Dok	1.123.600	1	Dok	700.000	1	Dok	700.000	100	%	100	1	Dok	690.000			**2.513.600**	**167,57**
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun																				-	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	1.500.000			1.075.400										1	Dok	705.000			**1.780.400**	**118,69**
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun																				-	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dok	1.500.000			925.000															**925.000**	**61,67**
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun																				-	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	lap	2.000.000	1	lap	1.070.400	1	lap	1.500.000	1	lap	1.500.000	100	%	100	1	lap	755.000	1	lap	**3.325.400**	**166,27**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**97**	**%**	**7.289.769.372**	**100**	**%**	**2.362.475.110**	**84**	**%**	**2.439.651.713**	**83**	**%**	**2.362.475.110**	**99**	**%**	**97**	**95**	**%**	**2.636.212.206**	**80,3**	**%**	**7.361.162.426**	**100,98**

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															-	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1224 org	7.283.769.372	391 org	2.360.737.360	384 org	2.439.110.713	381 org	2.404.971.831	99 %	99	396 org	2.634.682.206	240 org		**7.400.391.397**	**101,60**
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun															-	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Lap	3.000.000	1 Lap	907.750	1 Lap	181.000	1 Lap	181.000	100 %	100	1 Lap	775.000	1 Lap		**1.863.750**	**62,13**
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun															-	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 lap	3.000.000	18 lap	830.000	18 lap	360.000	18 lap	360.000	100 %	100	1 Lap	755.000	0	0	**1.945.000**	**64,83**
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**4.500.000**	**100 %**	**1.500.000**	**84 %**	**360.000**	**84 %**	**1.500.000**	**100 %**	**417**	**100 %**	1.150.000	0	0	**4.150.000**	**92,22**
7.01.01.2.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														0	0	-	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 lap	4.500.000	14 lap	1.500.000	14 lap	360.000	14 lap	360.000	100 %	100	14 lap	1.150.000	0	0	**3.010.000**	**66,89**
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**15.000.000**	**100 %**	**12.500.000**											**12.500.000**	**83,33**

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																					-	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	pkt	15.000.000	50	bh	12.500.000															**12.500.000**	**83,33**
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																					-	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																					-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**103.602.000**	**84**	**%**	**59.434.550**	**84**	**%**	**10.600.000**	**84**	**%**	**59.434.550**	**100**	**%**	**561**	**98**	**%**	**21.654.500**	**1,67**	**%**	**140.523.600**	**135,64**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																					-	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	3.000.000	5	paket	1.996.300															**1.996.300**	**66,54**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					-	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	22.500.000	28	paket	15.258.550	9	paket	7.978.000	9	paket	7.978.000	100	%	100	2	paket	5.872.000	1	paket	**29.108.550**	**129,37**
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					-	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	paket	45.852.000	8	paket	26.946.000	3	paket	2.622.000	3	paket	2.622.000	100	%	100	12	paket	15.405.000	5	paket	**44.973.000**	**98,08**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan																					-	

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	paket	2.250.000	5	paket	5.250.000										12	paket	377.500	4	paket	**5.627.500**	**250,11**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan																					-	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Lap	30.000.000	26	Lap	17.230.000															**17.230.000**	**57,43**
	Jumlah Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang																						-	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																					-	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100**	**%**	**77.217.000**	**100**	**%**	**24.840.000**										**1,33**		**29.198.000**	**100**	**%**	**54.038.000**	**69,98**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan																					-	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				1	unit	24.840.000													1	unit	**24.840.000**	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	4	unit	30.739.000																		-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah Perallatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	1	unit	46.478.000													4	unit	29.198.000	4	unit	**29.198.000**	**62,82**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.732.740.000**	**84**	**%**	**552.432.725**	**84**	**%**	**554.517.500**	**82**	**%**	**552.432.725**	**98**	**%**	**100**	**97**	**%**	**517.877.500**	**3,5**	**%**	**1.622.742.950**	**93,65**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					-	

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Lap	12.000.000	2 Lap	4.200.000	4 Lap	1.500.000	4 Lap	1.500.000	100	%	100	6 Lap	3.000.000	3 Lap	**8.700.000**	**72,50**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															-	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 lap	49.500.000	24 lap	15.916.194	24 lap	16.500.000	24 lap	14.021.682	100	%	85	24 lap	16.497.500	11 lap	**46.435.376**	**93,81**
	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																-	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 lap	75.000.000	2 lap	12.200.000	3 lap	9.500.000	2 lap	7.000.000	67	%	74	3 lap	11.500.000	lap	**30.700.000**	**40,93**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															-	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 lap	1.596.240.000	13 lap	520.116.531	13 lap	527.017.500	13 lap	512.545.631	100	%	97	13 lap	486.880.000	lap	**1.519.542.162**	**95,20**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**		**75.348.500**	**84**	**%**	**17.664.300**	**84**	**%**	**21.788.802**	**82**	**%**	**21.207.161**	**98**	**%**	**97**	**95**	**%**	49.080.000	**4**	**%**	**87.951.461**	**116,73**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan															-	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	47.348.500	1 unit	17.664.300	1	unit	15.095.091	1 unit	14.513.450	100	%	96	1	unit	20.480.000	1	unit	**52.657.750**	**111,21**

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi																					-	
		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipellihara/Rehabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	19.000.000	0	0	20.500.000	0	0	-	0	0	-				1	unit	25.000.000	1	unit	**45.500.000**	**239,47**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi																					-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	unit	9.000.000	2	unit		2	unit	6.693.711	2	unit	6.693.711	100	%	100	14	unit	3.600.000	10	unit	**10.293.711**	**114,37**
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**			**4.500.000**			**1.023.000**	**84**	**%**	1.786.000	0	0	-	**-**		**-**	**100**	**%**	**1.425.000**			**2.448.000**	**54,40**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**				0	0	-	0	0	-	0	0	-									-	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Database Monografi Kecamatan yang tersusun																					-	

		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0	0	-	0	0	-	0	0	-									-	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang terlaksana**			**4.500.000**	100	%	1.023.000	**84**	**%**	**1.786.000**	0	0	-	**-**					1.425.000			**2.448.000**	**54,40**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun				0	0	-	0	0	-	0	0	-									-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Koordinasi	4.500.000	1	Koordinasi	1.023.000	1	Koordinasi	1.786.000	0	0	-	**-**		**-**	1	Koordinasi	1.425.000			**2.448.000**	**54,40**
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**			**36.000.000**	**84**	**%**	**6.025.000**	**84**	**%**	**10.000.000**	**84**	**%**	**6.025.000**	**100**	**%**	**60**	**100**	**%**	**12.325.000**			**24.375.000**	**67,71**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**			**36.000.000**	**84**	**%**	**6.025.000**	**84**	**%**	**10.000.000**	**84**	**%**		**100**	**%**	**-**	**100**	**%**	**12.325.000**	**6**	**%**	**18.350.000**	**50,97**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan																					-	

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	12	Lembaga Kemasyarakatan	6.025.000	12	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	12	Lemb	10.000.000	100	—	100	12	Lembaga Kemasyarakatan	10.950.000	12	Lembaga Kemasyarakatan	**26.975.000**	**89,92**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terbina																					-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	lap	6.000.000	0	0	-	0	0	-	0	0	-				1	lap	1.375.000			**1.375.000**	**22,92**
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**			**10.500.000**	100	%	4.268.500	0	0	-	0	0	-				**100**	**%**	2.615.000			**6.883.500**	**65,56**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**			**10.500.000**	0	0	4.268.500	0	0	-	0	0	-				**100**	**%**	2.615.000			**6.883.500**	**65,56**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan				0	0		0	0	-	0	0	-									-	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	lap	10.500.000	0	0	4.268.500	0	0	-	0	0	-				1	lap	2.615.000			**6.883.500**	**65,56**

07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**			**25.942.500**	0	0	6.785.500	0	0	-	0	0	-				**100**	**%**	7.700.000			**14.485.500**	**55,84**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**25.942.500**	0	0	6.785.500	0	0	-	0	0	-				**100**	**%**	7.700.000			**14.485.500**	**55,84**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes																					-	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	Dok	10.942.500	0	0	1.960.500	0	0	-	0	0	-									**1.960.500**	**17,92**
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa																					-	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	dok	15.000.000	0	0	4.825.000	0	0	-	0	0	-				3	dok	**7.700.000**			**12.525.000**	**83,50**

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Blega

No	Indikator	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Blega	100	100	100	74	90,83	90	-
2	Nilai SAKIP Kecamatan Blega	70	75	80	80	55	50	-

BAB. III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Tujuan dan sasaran dari Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Blega sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah
KECAMATAN BLEGA
KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	REALISASI		
		Renstra 2024	Perubahan Renja			Renstra 2024	Perubahan Renja	
1	2		4	5	6			9
MeningkatkanKinerja Penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Blega	90.83	85,83	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilits Kinerja Kecamatan Blega	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.83	85,83	
					Nilai SAKIP Kecamatan Blega	55	55	

Tabel. 3.2

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BLEGA KAB. BANGKALAN
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN BLEGA							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.920.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		5.200.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.130.000,00	1.185.000,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			3.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
2	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.920.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		5.200.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.920.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		5.200.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan			0,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
4	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.920.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		5.200.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-				1 Dokumen	0 Dokumen	770.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban			0,00	KECAMATAN BLEGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	

5	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.920.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		5.200.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	690.000,00	0,00	Kab. Bangkalan, Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan			1.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.920.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		5.200.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.920.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		5.200.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	705.000,00	390.000,00	Kab. Bangkalan, Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban			1.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
8	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.920.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		5.200.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				1 Laporan	0 Laporan	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
9	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.920.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		5.200.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	755.000,00	755.000,00	Kab. Bangkalan, Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan			200.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	

10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	7.920.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		5.200.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
11	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			95 %	95 %	2.490.840.366,00	2.693.804.178,00	2.693.804.178,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan	-		2.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	0,00	2.692.274.178,00	2.572.081.093,00	Kab. Bangkalan, Blega,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik,			0,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
12	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			95 %	95 %	2.490.840.366,00	2.693.804.178,00	2.693.804.178,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan	-		2.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
13	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			95 %	95 %	2.490.840.366,00	2.693.804.178,00	2.693.804.178,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan	-		2.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	775.000,00	775.000,00	Kab. Bangkalan, Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			95 %	95 %	2.490.840.366,00	2.693.804.178,00	2.693.804.178,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan	-		2.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
15	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			95 %	95 %	2.490.840.366,00	2.693.804.178,00	2.693.804.178,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan	-		2.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana				1 Laporan	1 Laporan	0,00	755.000,00	695.000,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00								719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00								719.124.000,0	
16	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Indeks	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00								689.624.000,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			95 %	95 %	2.490.840.366,00	2.693.804.178,00	2.693.804.178,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		2.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00								719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00								719.124.000,0	
17	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00								689.624.000,00	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	-			-	100 %	2.228.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		1.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada				14 Laporan	14 Laporan	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan			1.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00								719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00								719.124.000,0	
18	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00								689.624.000,00	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	-			-	100 %	2.228.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		1.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	31.500.000,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik ,	-		0,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut				50 Paket	00 Paket	31.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan , Blega,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik ,			0,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	98 %	47.358.400,00	23.654.500,00	23.654.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		35.534.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	2.566.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan			0,00	KECAMATAN BLEGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00								719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00								719.124.000,0	
19	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00								689.624.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	98 %	47.358.400,00	23.654.500,00	23.654.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		35.534.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	0,00	5.872.000,00	6.229.700,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan			7.500.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00								719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00								719.124.000,0	

20	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	98 %	47.358.400,00	23.654.500,00	23.654.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		35.534.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
21	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	98 %	47.358.400,00	23.654.500,00	23.654.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		35.534.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	15.405.000,00	10.065.000,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan			15.284.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
22	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	98 %	47.358.400,00	23.654.500,00	23.654.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		35.534.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
23	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	98 %	47.358.400,00	23.654.500,00	23.654.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		35.534.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	377.500,00	470.500,00	Kab. Bangkalan , Bangkalan , Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan			750.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
24	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	98 %	47.358.400,00	23.654.500,00	23.654.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		35.534.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
25	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	98 %	47.358.400,00	23.654.500,00	23.654.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		35.534.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	0 Laporan	0,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan			12.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	

26	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	98 %	47.358.400,00	23.654.500,00	23.654.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan	-		35.534.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			-	100 %	29.963.000,00	29.963.000,00	29.963.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		29.963.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan			0,00	KECAMATAN BLEGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
27	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			-	100 %	29.963.000,00	29.963.000,00	29.963.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		29.963.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	29.963.000,00	29.198.000,00	Kab. Bangkalan, Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan			29.963.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGXX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
28	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			-	100 %	29.963.000,00	29.963.000,00	29.963.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		29.963.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
29	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			-	97 %	563.480.000,00	517.877.500,00	517.877.500,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi	-		577.580.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi			4.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGXX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
30	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			-	97 %	563.480.000,00	517.877.500,00	517.877.500,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi	-		577.580.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
31	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			-	97 %	563.480.000,00	517.877.500,00	517.877.500,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi	-		577.580.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				24 Laporan	24 Laporan	0,00	16.497.500,00	18.537.500,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan			16.500.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
32	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,0	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			-	97 %	563.480.000,00	517.877.500,00	517.877.500,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi	-		577.580.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
33	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,0	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			-	97 %	563.480.000,00	517.877.500,00	517.877.500,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi	-		577.580.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				3 Laporan	3 Laporan	0,00	11.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan			25.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
34	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,0	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			-	97 %	563.480.000,00	517.877.500,00	517.877.500,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi	-		577.580.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
35	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,0	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			-	97 %	563.480.000,00	517.877.500,00	517.877.500,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi	-		577.580.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	0,00	486.880.000,00	471.620.000,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan			532.080.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
36	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,0	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			-	97 %	563.480.000,00	517.877.500,00	517.877.500,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi	-		577.580.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
37	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,0	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			-	95 %	47.300.000,00	49.080.000,00	49.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		38.347.000,00	KECAMATAN BLEGA

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan				3 Unit	1 Unit	0,00	20.480.000,00	19.599.000,00	Kab. Bangkalan, Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman			18.347.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
38	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			-	95 %	47.300.000,00	49.080.000,00	49.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		38.347.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
39	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			-	95 %	47.300.000,00	49.080.000,00	49.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		38.347.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi				1 Unit	1 Unit	0,00	25.000.000,00	24.996.149,00	Kab. Bangkalan, Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman			15.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
40	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			-	95 %	47.300.000,00	49.080.000,00	49.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		38.347.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				KECAMATAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
41	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			-	95 %	47.300.000,00	49.080.000,00	49.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		38.347.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi				3 Unit	14 Unit	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Bangkalan, Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban			5.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7					NON URUSAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	
42	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	98 Indeks	3.220.589.766,00	3.319.809.178,00	3.171.846.942,00							689.624.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			-	95 %	47.300.000,00	49.080.000,00	49.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		38.347.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00							719.124.000,0	

	7	01				KECAMATAN	3.255.870.366,00	3.343.874.178,00	3.187.546.942,00			719.124.000,0	

43	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG				100 %	100 %	4.400.000,00	1.425.000,00	525.000,00							2.500.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan	-			1 koordinasi	1 koordinasi	2.075.000,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		0,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi				1 Laporan	0 Laporan	2.075.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	-			10 Layanan 1 koordinasi	10 Layanan	2.325.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	1		2.500.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.325.000,00	1.425.000,00	525.000,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban			2.500.000,00	KECAMATAN BLEGA
44	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100 %	100 %	15.135.000,00	12.325.000,00	11.155.000,00							14.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			1 Koordinasi	1 Koordinasi	15.135.000,00	12.325.000,00	12.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		14.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12.850.000,00	10.950.000,00	10.005.000,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban			12.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.285.000,00	1.375.000,00	1.150.000,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman			2.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
45	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG				100 %	100 %	3.535.000,00	2.615.000,00	620.000,00							5.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			1 Koordinasi	1 Koordinasi	3.535.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan	-		5.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah				1 Laporan	1 Laporan	3.535.000,00	2.615.000,00	620.000,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			5.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
46	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN				100 %	100 %	12.210.600,00	7.700.000,00	3.400.000,00							8.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi,Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	-			100 %	100 %	12.210.600,00	7.700.000,00	7.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban	-		8.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	2.260.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban			0,00	KECAMATAN BLEGA
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9.950.600,00	7.700.000,00	3.400.000,00	Kab. Bangkalan , Blega, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan			8.000.000,00	KECAMATAN BLEGA
											JUMLAH		**3.255.870.366,00**	**3.343.874.178,00**	**3.187.546.942,00**							**719.124.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini sebagai landasan bagi Pemerintah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun 2024. Program kegiatan berdasarkan pada Renstra serta aspirasi dan situasi kondisi yang menjadi kebutuhan di Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Blega merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Blega selama jangka waktu 1 (satu) semester yaitu semester 2 tahun 2024.

Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Perubahan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Blega diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kecamatan Blega serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami.

Semoga Perubahan Rencana kerja ini menjamin kesinambungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kecamatan Blega.

Blega, Agustus 2024
CAMAT BLEGA

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN BLEGA BANGKALAN

MUHAMMAD KOMARI,SAP
Pembina
NIP. 19770317 200212 1 009

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Rumusan sasaran, program , kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam RKPD juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat agi masyarakat. Namun demikian, kondisi saat pelaksanan rencana ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan rencana untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kokop Tahun 2023 adalah :

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/RW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2009 Nomor 4/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 seri E Tambahan Lembaran Daerah no.76);
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Dearah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47 sei E);
16. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Seri E);
17. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Konang);

18. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
19. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Konang adalah perencanaan OPD dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD Lima tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Renja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 OPD Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dan Renstra OPD Kecamatan Konang tahun 2024-2026 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Konang.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Konang selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Konang tahun 2024 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2024-2026 Terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 2.638.729.872,- namun demikian hingga triwulan ke 1 tahun 2024 anggaran yang terserap hanya Rp. 1.618.559.783,- atau sekitar 61,34 % dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Evaluasi Renja OPD Kecamatan Konang selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja OPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

OPD : KECAMATAN KONANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja capaian Program (Pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2024 Semester I)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100 %**	**420.192.049**	**99 %**	**487.475.820**	**90**	**1.963.963.357**	**90 %**	**1.904.820.069**	**100**	**96,99**	**85 %**	**2.591.146.872**		**1.548.957.783**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**-**	**86 %**	**-**	**87**	**4.600.000**	**87 %**	**-**	**100**	**-**	**100 %**	**2.500.100**		**645.000**	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun												**-**		-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	-	3 Dokumen	4.600.000	3 Dokumen	-	100	0,00	3 Dokumen	1.500.100	1 Dokumen	295.000	4
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun														-	-
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1.500.000													
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun															
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1.500.000									1 Dokumen	350.000			

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun																							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	1.500.000													1	Dokumen	350.000	1		350.000		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun																							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	1.500.000																-			-		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun																							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dokumen	1.500.000																					
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun																							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	1.500.000													1	Laporan	300.000					
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**%**	**-**		**0**	**%**	**-**	**84**	**1.897.238.707**	**84**	**%**	**1.872.366.449**	100	**98,69**	**90**	**%**	**2.026.118.722**			**1.276.323.323**	**-**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN																							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1050	org	5.882.214.126		350	org	1.872.366.449	350	org	1.897.238.707	350	org	1.872.366.449	100	98,69	350	org	2.025.268.722	240	org	1.275.974.323	21,69	

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun																							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	4.500.000												1	Laporan	500.000	1	Laporan	349.000	7,76
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun																							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	54	Laporan	1.500.000												18	Laporan	350.000			-	#DIV/0!
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**-**	**80**	**%**	**-**	**87**	**%**	**-**	**87**	**%**	**-**	**100**	**#DIV/0!**	**90**	**%**	**780.000**			**-**	**-**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	4.500.000												14	Laporan	780.000			-	#DIV/0!
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**15.000.000**	**0**	**%**	**-**	**84**	**%**	**-**	**84**	**%**	**-**			**90**	**%**		**-**		**-**	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	15.000.000																				

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**85.595.000**	**0 %**	**13.005.500**	**87**	**13.456.000**	**87 %**	**13.005.500**	100	**96,65**	**90 %**	**20.492.400**		**2.189.500**	**#DIV/0!**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.000.000													
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.000.000	4 Paket	6.880.500	4 Paket	7.036.000	4 Paket	6.880.500	100	97,79	4 Paket	5.184.900	2 Paket	1.538.500	16,67
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	49.595.000	12 Paket	4.675.000	12 Paket	4.770.000	12 Paket	4.675.000	100	98,01	12 Paket	14.930.000	6 Paket	3.333.000	16,67
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	6.000.000	12 paket	1.450.000	12 paket	1.650.000	12 paket	1.450.000	100	87,88	12 paket	377.500	2 paket	82.000	5,56
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	30.000.000													
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100 %**	**121.500.000**	**0 %**	**-**	**84**	**-**	**84 %**	**-**	**100**	**#DIV/0!**		**-**		-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	8	Unit	75.000.000										3	unit	29.963.000	3	unit	29.963.000	37,50
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	Unit	46.500.000																
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**112.483.450**	**0**	**%**	**474.470.320**	**87**		**26.461.150**	**87**	**%**	**19.448.120**	**100**	**73,50**	**90**	**%**	**492.041.150**		**258.176.560**	-
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18	Laporan	4.000.000	3	Paket	1.000.000	3	laporan	1.000.000	3	laporan	1.000.000	100	100,00	6	Laporan	1.500.000	3 Laporan	750.000	16,67
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	48.483.450	12	laporan	14.348.120	12	laporan	16.161.150	12	laporan	14.348.120	100	88,78	24	Laporan	19.581.150	20 Laporan	10.702.110	27,78
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Laporan	60.000.000	3	Laporan	4.100.000	3	Laporan	9.300.000	3	Laporan	4.100.000	100	44,09	3	Laporan	8.500.000		-	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39	Laporan	1.494.810.000	13	laporan	455.022.200	13	laporan	467.520.000	13	laporan	455.022.200	100	97,33	13	laporan	462.460.000	8 laporan	246.724.450	20,51
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**85.613.599**	**0**	**%**	**-**	**87**		**22.207.500**	**87**	**%**	**-**	**100**	**-**	**90**	**%**	**49.214.500**		11.623.400	-

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan																			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	62.495.000	7	unit	17.647.438	7	unit	22.207.500	7	unit	17.647.438	100	79,47	7	unit	20.284.500	4	unit	11.623.400	19,05
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi																			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	15.500.000												1	Unit	25.000.000	1	Unit	25.000.000	16,67
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	21	Unit	9.000.000	7	unit	1.365.000	7	unit	1.500.000	7	unit	1.365.000	100	91,00	7	unit	3.930.000	3	unit	1.065.000	14,29
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100**	**%**	**7.500.000**	0	%	-	**84**		**-**	**84**	**%**	**-**	**100**	**#DIV/0!**	**100**	**%**	**900.000**			-	-
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**	**100**	**%**	**7.500.000**	0	%	-	**84**		**-**	**84**	**%**	**-**	**100**	**#DIV/0!**	**85**	**%**	**-**			-	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Database Monografi Kecamatan yang tersusun																			

		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	Laporan	7.500.000															
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan**	**100**	**%**	**-**	100	**%**	**-**	**100**		**-**	**100**	**%**	**-**	**100**	**#DIV/0!**	**100**	**%**	**900.000**		**-**	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun																				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	4.500.000	1	laporan	822.250	1	laporan	825.000	1	laporan	822.250	100	99,67	1	laporan	900.000			
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**85**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**80**		**-**	**80**	**%**	**-**	**100**	**#DIV/0!**	**85**	**%**	**11.960.000**		**11.160.000**	-
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**	**85**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**80**		**-**	**80**	**%**	**-**	**100**	**#DIV/0!**	**85**	**%**	**11.960.000**		**11.160.000**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan																				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39	Lembaga Kemasyarakatan	36.000.000	13	Lembaga Kemasyarakatan	11.250.000	13	Lembaga Kemasyarakatan	11.250.000	13	Lembaga Kemasyarakatan	11.250.000	100	100,00	13	Lembaga Kemasyarakatan	11.160.000	13	Lembaga Kemasyarakatan	11.160.000	33,33
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terbina																				

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	5.000.000									1	laporan	800.000			
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**-**	0	**%**	-	**84**	**-**	**84**	**%**	**-**	**100**	**#DIV/0!**	**85**	**%**	**1.660.000**		0	-
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**-**	0	**%**	-	**84**	**-**	**84**	**%**	**-**	**100**	**#DIV/0!**	**85**	**%**	**1.660.000**		0	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan																			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	11.000.000									#DIV/0!	#DIV/0!	1	laporan	1.660.000			
07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100**	**%**	**15.000.000**	0	**%**	**-**	**80**	**-**	**80**	**%**	**-**	**100**	**#DIV/0!**	**85**	**%**	**6.200.000**			-
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100**	**%**	**15.000.000**	0	**%**	**-**	**80**	**-**	**80**	**%**	**-**	**100**	**#DIV/0!**	**85**	**%**	**6.200.000**		-	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya																			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	Dokumen	15.000.000											2	dokumen	3.100.000		-	#DIV/0!

7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa															
		~~Jumlah Dokumen~~	~~3 Dokumen~~										~~1 dokumen~~				~~#DIV/0!~~
		Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		13.000.000										3.100.000			
		442.692.049				487.475.820		1.963.963.357		1.904.820.069				2.611.866.872		1.560.117.783	

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Konang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat			82,00	82,00	85,00	85,00	93,00	85,00	42,98	95,00	98,00	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Konang			83,00	87,00	90,00	90,00	50,00	90,00	42,98	50,00	65,00	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) PD KECAMATAN KONANG

3.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Tujuan Kecamatan Konang yang termuat pada RENSTRA Kecamatan Konang tahun 2024-2026 adalah: "***Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan"*** dengan indicator Tujuan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Konang.** IKM diukur berdasarkan survey terhadap pelayanan Kecamatan Konang yang sudah diterima oleh masyarakat, melalui aplikasi e-Sukma Jawa Timur.

3.1.2. Sasaran

Adapun sasaran atas tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran: ***"Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Konang"*** dengan indicator Nilai Indeks kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Kecamatan Konang.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table berikut :

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2024
KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	PERUBAHAN			2024	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Konang	95%	93%	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Konang	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	95%	93%	
					Nilai SAKIP Kecamatan Konang	50	50	

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						KECAMATAN KONANG						2.746.739.800,00							2.726.459.800,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.746.739.800,00							2.726.459.800,00	
	7	01				KECAMATAN						2.746.739.800,00							2.726.459.800,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	98 Indeks			98 Indeks	2.714.209.800,00						98 Indeks	2.692.459.800,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			100 %	6.399.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	100%	9.250.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	4.238.100,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	3 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	325.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	1 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 2. Pembangunan Pelayanan Dasar Berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-	1 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	475.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	1 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	325.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	1 Dokumen	750.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	616.500,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	420.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN KONANG

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%			100 %	2.071.578.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	100%	2.034.278.650,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			25 Orang/bulan	2.069.278.650,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	25 Orang/bulan	2.030.278.650,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	1.100.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	1 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			18 Laporan	1.200.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	18 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%			95 %	1.376.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	100%	2.500.000,00	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan			14 Laporan	1.376.300,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	14 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			100 %	40.933.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	100%	43.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	1.870.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	2 Paket	1.500.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	11.503.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	4 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	16.730.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	12 Paket	17.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	1.000.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 2. Pembangunan Pelayanan Dasar Berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-	12 Paket	2.500.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan			21 Laporan	9.830.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	21 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%			100 %	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 2. Pembangunan Pelayanan Dasar Berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-	100%	30.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			2 Unit	0,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 2. Pembangunan Pelayanan Dasar Berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-	1 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN KONANG

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100 %	511.811.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	100%	535.431.150,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan			6 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	6 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			36 Laporan	22.161.150,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	24 Laporan	19.161.150,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			3 Laporan	19.700.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	3 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	468.450.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	12 Laporan	489.270.000,00	KECAMATAN KONANG

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100%			100 %	82.111.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	100%	38.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit			7 Unit	58.830.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	7 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	16.621.100,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	2 Unit	8.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	6.660.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-		5.000.000,00	KECAMATAN KONANG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI	100 %			100 %	4.070.000,00						100 %	4.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	-			100 %	2.870.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	Masyarakat Kecamatan Konang	-	2.500.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	2.870.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	Masyarakat Kecamatan Konang		2.500.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	10Layanan			100 %	1.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	10Layanan	1.500.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN KONANG
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %			100 %	14.360.000,00							100 %	15.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana	2Koordinasi			2 Koordinasi	14.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa 6. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, BUMDes dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Masyarakat Kecamatan Konang	2Koordinasi	15.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13 Lembaga Kemasyarakatan	11.160.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa 6. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, BUMDes dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Masyarakat Kecamatan Konang		13.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	3.200.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa 6. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, BUMDes dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Masyarakat Kecamatan Konang	1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN KONANG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI	100 %			100 %	2.750.000,00						100 %	4.000.000,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1Koordinasi			100 %	2.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	Masyarakat Kecamatan Konang	1Koordinasi	4.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	2.750.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	Masyarakat Kecamatan Konang	1 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN KONANG
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %			100 %	11.350.000,00						100 %	11.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Mendapat Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%			100 %	11.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	100%	11.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen			2 Dokumen	2.300.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	2 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN KONANG
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen			1 Dokumen	9.050.000,00	Kab. Bangkalan, Konang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Melayani	-	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KONANG
											JUMLAH	**2.746.739.800,00**						**2.726.459.800,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 Hal ini sebagai landasan bagi Pemerintah Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun 2024. Program kegiatan berdasarkan pada Renstra serta aspirasi dan situasi kondisi yang menjadi kebutuhan di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Konang tahun 2024 disusun yang secara umum sudah mencakup program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Namum demikian dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian Data, oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaanya.

Ditetapkan di : Konang
Pada Tanggal : Agustus 2024

CAMAT KONANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN KONANG

SUJARWO, SH. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680314 199202 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas Rahmat serta Hidayatnya, maka pada akhirnya kami Tim Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024.

Perencanaan Kerja ini akan senantiasa dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan yang merupakan pendukung Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bangkalan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan masih banyak terdapat kekurangan/kelemahan disana-sini, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya Renja ini.

GALIS, Agustus 2024

CAMAT GALIS

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN GALIS

MAHSUS,SAP

Pembina

NIP. 19710708 200212 1 007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana starategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu. Hasil dari proses tersebut berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan GALIS Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahahan Rencana Kerja (RENJA) disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh Aparat Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menyusun suatu perencanaan

yang baik agar mampu meningkatkan Pelayanan yang Prima terhadap Masyarakat sehingga tercipta *Good Governance*.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan GALIS Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Kecamatan GALIS Tahun 2018 - 2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
k. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
l. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);

m. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);
n. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 32/D);
o. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.5/11759/112.3/2024 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pagu Difinitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan adalah suatu dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dan harus sejalan dengan Renstra Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan periode 5 (lima) tahunan dengan maksud memberikan arah kebijakan sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis dan agar dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang lebih terarah dan terpadu guna mewujudkan keinginan Pemerintah Kecamatan dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran. pada Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan. Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renja PD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama 1 tahun Perangkat Daerah
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

5. Untuk dipakai sebagai pedoman pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan dapat lebih terarah, terencana dan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan;
6. Untuk terlaksananya tertib penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan;
7. Untuk dapat dipakai sebagai tolak ukur sejauh mana Rencana Kerja tersebut dilaksanakan atau belum keberhasilannya, sehingga dapat ditemukan berbagai umpan balik untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya baik terhadap penyempurnaan program, permasalahan-permasalahan yang dijumpai maupun pendukung pelaksanaan kegiatan, dengan demikian kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Renja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 OPD Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026 dan Renstra OPD Kecamatan GALIS tahun 2024 – 2026 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan GALIS.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan GALIS selama 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan GALIS tahun 2024 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2024-2029 terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keputusan Menteri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 terdiri dari 5 Program dan 12 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 3.251.808.918,00 namun demikian hingga triwulan ke 2 tahun 2024 anggaran yang terserap hanya Rp. 1.838.425.004,00 atau sekitar 56,54 % dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kecamatan Galis

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9			10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PERSENTASE TERPENUHINYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100 %	9.370.843.876	100 %	2.938.840.403	100 %	2.963.362.449	100 %	2.938.840.403	99,17	100 %	3.251.808.918	300	1.838.425.009	19,62

7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	47.625.000	100 %	6.535.300	100 %	6.535.300	100 %	6.535.300	100,00	90 %	6.065.400	1	736.605	2%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9 Dok	10.125.000	1 Dok	2.785.300	1 Dok	2.785.300	1 Dok	2.785.300	100,00	1 Dok	1.987.200		0	0%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	4 Dok	5.000.000	1 Dok	1.250.000	1 Dok	1.250.000	1 Dok	1.250.000	100,00	1 Dok	736.600		-	0%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4 Dok	5.000.000	1 Dok	1.250.000	1 Dok	1.250.000	1 Dok	1.250.000	100,00	1 Dok	620.000		-	0%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	4 Dok	5.000.000	1 Dok		0 Dok		0 Dok		#DIV/0!	1 Dok	736.600	1	736.600	15%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	4 Dok	5.000.000	0 Dok		0 Dok		0 Dok		#DIV/0!	1 Dok	620.000		-	0%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 Dok	10.000.000	1 Dok	1.250.000	1 Dok	1.250.000	1 Dok	1.250.000	100,00	1 Dok	745.000		3	0%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Laporan	7.500.000	1 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		#DIV/0!	1 Laporan	620.000		2	0%

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	7.078.943.876	100 %	2.410.034.416	98 %	2.428.048.199	100 %	2.410.034.416	102,0408	90 %	2.545.268.918	3	1.449.567.780	20,48
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	102 0rg	7.056.443.876	34 0rg	2.408.009.616	34 0rg	2.426.023.399	34 0rg	2.408.009.616	99,26	34 0rg	2.543.028.918		1.449.067.780	20,54
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3 Laporan	7.500.000	1 Laporan	1.524.800	1 Lap	1.524.800	1 Lap	1.524.800	100,00	1 Laporan	1.240.000			0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	15.000.000	6 Laporan	500.000	6 Lap	500.000	6 Lap	500.000	100,00	6 Laporan	1.000.000	3	500.000	3,33
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	9.915.000	100 %	-	100 %		100 %	-		100 %	1.240.000	1	1.240.000	12,51
7.01.01.2.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	9.915.000	7 Laporan	-	7 Laporan		7 Laporan	-	100,00	3 Lap	1.240.000	1	1.240.000	12,51
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	68.800.000	0 %	-	0 %		0 %	-	0	90 %	665.000	1	665.000	0,97

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102	Paket	58.800.000	0	Paket	-	0	Paket		0	Paket	-	0	0	Paket			-	0,00
7.01.01.2.05.12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	4	dok	10.000.000	0	Orang	-	1	Orang		0	Orang	-	0	1	Dok	665.000	1	**665.000**	6,65
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	202.216.500	100	%	20.635.650	100	%	22.646.650	100	%	20.635.650	100	90	%	44.725.100	1	8.316.100	4,11
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	Paket	5.137.500	0	Unit		2	Paket		0	Unit		0,00	3	Paket	1.137.500		-	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	120.000.000	4	Jenis	15.699.650	4	Paket	17.710.650	4	Jenis	15.699.650	100,00	4	Paket	12.068.850	1	3.411.100	2,84
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38	Paket	55.000.000	12	Jenis	3.720.000	12	Paket	3.720.000	12	Jenis	3.720.000	100,00	12	Paket	28.825.000		4.905.000	8,92
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22	Paket	8.579.000	1	Jenis	1.216.000	1	Paket	1.216.000	1	Jenis	1.216.000	100,00	1	Paket	693.750		-	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	Laporan	13.500.000	1	Kali	-	1	Kali		1	Kali	-	92,27	20	Kali	2.000.000		0	0,00

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	105.000.000	100 %		100 %		100 %			100 %	29.963.000	4	29.158.000	27,77
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5 Unit	60.000.000	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0 Unit			-	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Lainnya	Jumalh Pengadaan Peralatan dan Lainnya yang diadakan	6 Unit	45.000.000	0 Unit		0 Unit		0 Unit		#DIV/0!	4 Unit	29.963.000	4	29158000	64,80
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Unit		0 Unit		2 Unit		0 Unit		0,00	Unit				#DIV/0!
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.349.570.000	100 %	467.677.737	100 %	471.545.000	100 %	467.677.737	99,18	100 %	483.760.000	6	225.495.474,00	16,71
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Lap	10.670.000	2 Laporan	1.100.000	2 Laporan	1.100.000	2 Laporan	1.100.000	100,00	2 Laporan	2.620.000		0	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Lap	45.000.000	12 Laporan	14.385.000	12 Laporan	14.460.000	12 Laporan	14.385.000	99,48	12 Laporan	17.880.000	6	7.192.213,00	15,98
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Lap	1.293.900.000	12 Laporan	452.192.737	12 Laporan	455.985.000	12 Laporan	452.192.737	99,17	12 Laporan	463.260.000		218.303.261	16,87

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	329.733.500	100 %	23.957.300	100 %	24.587.300	100 %	23.957.300	97,44	90 %	123.300.000		111.769.550,00	33,90
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6 Unit	6.233.500	1 Unit	1.178.300	2 Unit	1.700.000	1 Unit	1.178.300	69,31	2 Unit	2.300.000	1	1.428.300,00	22,91
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 Unit	125.000.000	2 Unit		2 Unit		2 Unit		#DIV/0!	2 Unit	16.800.000	2	9.600.000	7,68
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	20 Unit	18.500.000	6 Unit	16.860.000	5 Unit	16.894.800	6 Unit	16.860.000	99,79	5 Unit	4.200.000	2	Rp 1.200.000	6,49
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	180.000.000	1 Unit	5.919.000	1 Unit	5.992.500	1 Unit	5.919.000	98,77	1 Unit	100.000.000	1	99.541.250	55,30

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**	**100 %**	**13.530.000**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		100	**90 %**	**2.750.000**	1,00	705.000,00	5,21
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang terlaksana**	**100 %**	6.450.000									1.250.000		-	0,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	4 Laporan	6.450.000	0 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		0,00	1 Laporan	1.250.000		-	0,00
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**	100 %	7.080.000	100 %		100 %		100 %		100	100 %	1.500.000		-	0,00

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3 Lembaga Kemasyarakatan	7.080.000	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00	1 Laporan	1.500.000	1	705.000,00	9,96
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100 %**	**57.390.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	100	**100 %**	**10.821.500**	1	9.521.500	16,59
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**57.390.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	100	**100 %**	**10.821.500**	1	9.521.500	16,59

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	100,00	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.821.500	1	9.521.500	21,16
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	3	Laporan	12.390.000	0	Laporan		1	Laporan		0	Laporan		0	1	Laporan	0	0	0	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**	**100**	**%**	**7.500.000**	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		100	**100**	**%**	**1.000.000**	-	-	0,00
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**%**	**7.500.000**	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		100	100	%	1.000.000		0	0,00

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	3 Laporan	7.500.000	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00	1 Laporan	1.000.000		0	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG MENINDAK LANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100 %**	**15.750.000**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		100	**100 %**	**2.250.000**	1	1.250.000,00	7,94
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi,Rekomendasi,dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**15.750.000**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		100	100 %	2.250.000		1.250.000,00	7,94
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	6 Dok	7.500.000	0 Dok		1 Dok		0 Dok		0,00	1 Dok	1.000.000			0,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	3 Dok	8.250.000	0 Dok		0 Dok		0 Dok		0,00	1 Dok	1.250.000	1	1.250.000,00	15,15

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Tujuan dan sasaran dari Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan GALIS sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2024
KECAMATAN GALIS
KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025			2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	85	90	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik terhadap	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	85	90	
				Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina	Prosentase aparatur / perangkat desa	85	90	
Meningkatnya Kinerja Unsur Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program	45	50	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indek Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	45	50	

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Nama PD: KECAMATAN GALIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Renja 2024						Perubahan Renja 2024						Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja		Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13=11-6	14
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7,1	**KECAMATAN**														
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**		**100**	**%**	**2.750.000**		**PERSENTASE PENYELENGGARAAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI**		**100**	**%**	**2.000.000**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**
7.1.2.2	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**100**	**%**	**1.250.000**		**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		100	%	500.000			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**

7.1.2.2.3	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Wilayah Kecamatan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	1	lap	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Wilayah Kecamatan**	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	10	Layanan	500.000		750.000	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**		**100**	**%**	1.500.000		Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun		**100**	**%**	1.500.000			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	1	lap	1.500.000		Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun		1	lap	1.500.000			
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100**	**%**	**10.821.500**		**PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100**	**%**	**9.521.500**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**

7.1.3.2	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**1**	**Koordinasi**	%	**10.821.500**		**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**1**	**Koordinasi**	**9.521.500**			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.1.3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	1	lembaga kemasyarakatan	10.821.500		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	12	lembaga kemasyarakatan	9.521.500			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.1.3.2.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	0	Lap	-		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	0	Lap	-			

7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KERERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**		**100**	**%**	**1.000.000**		**PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KERERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI**		**100**	**%**	**-**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**
7.1.4.2	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**100**	**%**	**1.000.000**		**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**1**	**Koordinasi**	**-**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**
7.1.4.2.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	1	Lap	1.000.000		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	0	Lap	-			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.1.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASEDESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100**	**%**	**2.250.000**		**PERSENTASEDESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100**	**%**	**1.250.000**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**

7.1.6.2	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang mendapat Fasilitasi,Rekeomendasi,dan Kordinasi nPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**100**	**%**	**2.250.000**		**Persentase Desa yang mendapat Fasilitasi,Rekeomendasi,dan Kordinasi nPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**100**	**%**	**1.250.000**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**
7.1.6.2.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	1	Dok	1.000.000		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	0	Dok	-			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa		1	Dok	1.250.000			Kec.Galis,Kab.Bangkalan	1	Dok	1.250.000			

7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEK KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		98	%	**3.234.987.418**		**INDEK KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**3.210.299.321**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**
7.1.1.2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencnaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PD**		**100**	%	**6.065.400**		**Persentase tersusunnya Perencnaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PD**				**6.065.400**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Glais, Kab.Bangkalan	1	Dok	1.987.200		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Glais,Kab.Bangkalan	2	Dok	1.987.200			
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kec.Glais, Kab.Bangkalan	1	Dok	736.600		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kec.Glais,Kab.Bangkalan			736.600			

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kec.Glais, Kab.Bangkalan	1	Dok	620.000		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kec.Glais,Kab.Bangkalan	1	Dok	620.000			
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kec.Glais, Kab.Bangkalan	1	Lap	736.600		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kec.Glais,Kab.Bangkalan	1	Lap	736.600			
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	Kec.Glais, Kab.Bangkalan	1	Lap	620.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	Kec.Glais,Kab.Bangkalan			620.000			
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kec.Glais, Kab.Bangkalan	1	Lap	745.000		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kec.Glais,Kab.Bangkalan			745.000			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Glais, Kab.Bangkalan	1	Lap	620.000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Glais,Kab.Bangkalan			620.000			
7.1.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi**		**95**	**%**	**2.545.268.918**		**Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi**		**95**	**%**	**2.538.388.721**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**

7.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	34	org/th	2.543.028.918		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	396	org/th	2.536.148.721			
7.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	1	Lap	1.240.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	1	Lap	1.240.000			
7.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	1	Lap	1.000.000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	1	Lap	1.000.000			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.

7.1.1.2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Barang Milik Daerah pada PD yang tersusun**		**100**	**%**	**1.240.000**		**PersentaseAdministrasi Barang Milik Daerah pada PD yang tersusun**		**100**	**%**	**1.240.000**			
7.1.1.2.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	14	Lap	1.240.000		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	14	Lap	1.240.000			
7.1.1.2.1	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**		100	%	665.000		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**		100	%	665.000			
7.1.1.2.1.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	0	0%	-		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	0	0				
7.01.01.2.05.12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	1	dok	665.000		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	1	dok	665.000			

7.1.1.2.1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		98	%	**44.725.100**		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		98	%	**30.365.200**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	3	paket	1.137.500		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	3	paket	707.100			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	4	paket	12.068.850		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	4	paket	6.788.350			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.1.1.2.1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	12	paket	28.825.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	12	paket	22.170.000			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.

7.1.1.2.1.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	1	paket	693.750		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	12	paket	699.750			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.1.1.2.1.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	20	paket	2.000.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	0	paket	-			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.1.1.2.1	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**		100	%	**29.963.000**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**		95	%	**29.198.000**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**
7.1.1.2.1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	5	unit	29.963.000		Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	5	unit	29.198.000			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.

7.1.1.2.1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa PenunjangUruan Pemerintah Daerah yang terlaksana**		**97**	**%**	**483.760.000**		**Persentase Penyediaan Jasa PenunjangUruan Pemerintah Daerah yang terlaksana**		**97**	**%**	**481.405.000**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**
7.1.1.2.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	6	paket	2.620.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	6	paket	2.220.000			
7.1.1.2.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	24	paket	17.880.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	24	paket	19.500.000			
7.1.1.2.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	3	paket	-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	3	paket	-			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.

7.1.1.2.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	12	paket	463.260.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	13	paket	459.685.000			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.1.1.2.1	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BarangMilik Daera Pennjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**		**97**	**%**	**123.300.000**		**Persentase Pemeliharaan BarangMilik Daera Pennjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**		**95**	%	**122.972.000**			**Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	2	unit	2.300.000		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	2	unit	2.300.000			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	2	unit	16.800.000		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	1	unit	17.472.000			

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	5	unit	4.200.000		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	5	unit	3.200.000			Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec.Galis, Kab.Bangkalan	1	unit	100.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec.Galis,Kab.Bangkalan	1	unit	100.000.000			
TOTAL						**3.251.808.918**						**3.223.070.821**			

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini sebagai landasan bagi Pemerintah Kecamatan GALIS Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan GALIS Tahun 2024 menjadi bahan evaluasi kinerja Kecamatan Galis di semeseter 1 sehingga menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di semester selanjutnya. Berdasarkan serapan realisasi anggaran pada semester 1 sebesar 56,54% dengan capaian kinerja sebagian besar masih dibawah 50%. Masih rendahnya capaian kinerja ini dikarenakan masih banyaknya kegiatan yang belum dilaksanakan di semester 1 ini sehingga akan di optimalkan di semester yang akan datang.

Kecamatan Galis berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bangkalan khususnya di Kecamatan GALIS. Langkah yang dilakukan diantaranya bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam meningkatkan kemandirian desa dengan menggali potensi yang ada.

Untuk mewujudkan program kerja yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Perubahan RENJA ini diharapkan dapat mensinergikan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kecamatan GALIS.

GALIS, Agustus 2024

CAMAT GALIS

MAHSUS,SAP

Pembina

NIP. 19710708 200212 1 007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas Rahmat serta Hidayahnya, maka pada akhirnya kami Tim Penyusunan Renja Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja ini akan senantiasa dimanfaatkan sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan harapan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan masih banyak terdapat kekurangan/kelemahan disana-sini, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk pebaikan dan kesempurnaan sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya Renja ini.

Tanah Merah, Agustus 2024

CAMAT TANAH MERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN TANAHMERAH

HERI ARIFIN, SH
Pembina
NIP. 19671223 200112 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana starategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu. Hasil dari proses tersebut berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menyusun suatu perencanaan yang baik agar mampu meningkatkan Pelayanan yang Prima terhadap Masyarakat sehingga tercipta Good Governace.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanah Merah Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Tanah Merah Tahun 2024 - 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanah Merah Tahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat 1.

Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam

pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan maka tujuan Perencanaan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan, akan bersinergi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 OPD Kecamatan Tanah Merah memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tanah Merah serta kerangka pendanaan daerah yang secara substansial sesuai dengan visi, misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan RENSTRA) sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses Perencanaan Pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top–Down (Atas–Bawah), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus berjenjang memperhatikan program-program pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom–Up (Bawah–Atas), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder/pemerintah dibawahnya.

   Pendekatan Top-Down dan Bottom–Up diselaraskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

   Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Tanah Merah Tahun 2024 disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Renstra 2024-

2026 Kecamatan Tanah Merah dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanah Merah Tahun 2024 adalah :

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1D);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);

14. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Tanah Merah).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Tanah Merah adalah perencanaan OPD dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD Lima tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

BAB IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 OPD Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Tanah Merah Tahun 2024 - 2026 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Tanah Merah.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Tanah Merah selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Tanah Merah tahun 2024 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2024-2026 terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Keputusan Menteri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 2.513.815.031,- namun demikian hingga triwulan ke 2 tahun 2024 anggaran yang terserap hanya Rp. 1.322.174.249,- atau sekitar 52,60 % dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kecamatan Tanah Merah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4) *100
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**8,769,114,202**	**27.23**	**2,387,566,189**	**100**	**2,496,413,681**	**95.64**	**2,387,566,189**	**100**	**95.64**	**100**	**2,540,730,112**	**52,41**	**7,315,862,490**	**83.43**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**193,305,950**	**1.10**	**2,128,400**	**100**	**3,570,100**	**59.62**	**2,128,400**	**100**	**59.62**	**100**	**1,868,850**	**59,62**	**6,125,650**	**3.17**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dok	40,000,000	**1.72**	687,800	1 Dok	688,000	**99.97**	687,800	**100**	**99.97**	1 Dok	622,950	1 Dok	1,998,550	5.00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	31,158,300	**1.54**	480,200	1 Dok	480,350	**99.97**	480,200	**100**	**99.97**	1 Dok	207,650	1 Dok	1,168,050	3.75
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dok	31,213,450	**0.00**	0	1 Dok	480,350	**0.00**	0	**100**	-	1 Dok	207,650	1 Dok	207,650	0.67

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dok	30,000,000	**1.60**	480,200	1 Dok	480,350	**99.97**	480,200	**100**	**99.97**	1 Dok	207,650	1 Dok	1,168,050	3.89
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dok	30,000,000	**0.00**	0	1 Dok	480,350	**0.00**	0	**100**	**-**	1 Dok	207,650	1 Dok	207,650	0.69
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	30,934,200	**1.55**	480,200	1 Laporan	480,350	**99.97**	480,200	**100**	**99.97**	1 Laporan	207,650	1 Laporan	1,168,050	3.78
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	31,007,500	**0.00**	0	1 Laporan	480,350	**0.00**	0	**100**	**-**	1 Laporan	207,650	1 Laporan	207,650	0.67
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**6,571,001,702**	**31.15**	**2,047,133,627**		**2,135,611,281**	**95.86**	**2,047,133,627**	**100**	**95.86**		**2,141,763,812**		**6,236,031,066**	**94.90**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Bulan	6,508,978,802	**31.44**	2,046,662,227	27 orang/bulan	2,134,668,181	**95.88**	2,046,662,227	**100**	**95.88**	27 orang/bulan	2,141,200,812	27 orang/bulan	6,234,525,266	95.78
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	31,004,850	**1.52**	471,400	1 Laporan	471,550	**99.97**	471,400	**100**	**99.97**	1 Laporan	281,500	1 Laporan	1,224,300	3.95
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	3 Laporan	31,018,050	**0.00**	0	18 Laporan	471,550	**0.00**	0	**100**	**-**	18 Laporan	281,500	18 Laporan	281,500	0.91
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**		**32,500,000**	**0.64**	**207,600**		**207,650**	**99.98**	**207,600**	**100**	**99.98**		**207,650**		**622,850**	**1.92**

7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Dok	32,500,000	**0.64**	207,600	2 Laporan	207,650	**99.98**	207,600	**100**	**99.98**	2 Laporan	207,650	2 Laporan	622,850	1.92
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**		**84,761,450**		**0**		**0**		**0**	**100**	**#DIV/0!**		**0**		-	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	93 Buah	50,006,450	**0.00**	-	0 Buah	0	**0.00**	-	**100**	**#VALUE!**	0 Buah	0	0 Buah	#VALUE!	#VALUE!
7.01.01.2.05.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	34,755,000		-	0 Orang	0	**0.00**	-	**100**	**#VALUE!**	0 Orang	0	0 Orang	#VALUE!	#VALUE!
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**341,735,100**	**8.28**	**28,293,750**		**36,208,550**	**78.14**	**28,293,750**	**100**	**78.14**		**19,655,450**		**76,242,950**	**22.31**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Unit	30,746,500	**0.00**	0	2 Paket	654,750	**0.00**	0	**100**	-	2 Paket	320,000.00	2 Paket	320,000	1.04
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1500 Unit	227,292,650	**4.00**	9,103,000	2 Paket	9,822,500	**92.67**	9,103,000	**100**	**92.67**	2 Paket	8,503,500.00	2 Paket	26,709,500	11.75
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	51,797,550	**28.21**	14,610,000	2 Paket	14,610,000	**100.00**	14,610,000	**100**	**100.00**	2 Paket	6,750,000.00	2 Paket	35,970,000	69.44
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis	31,898,400	**14.36**	4,580,750	2 Paket	5,561,300	**82.37**	4,580,750	**100**	**82.37**	2 Paket	4,081,950.00	2 Paket	13,243,450	41.52
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Kali	44,970,000	**0.00**	-	1 Laporan	5,560,000	**0.00**	-	**100**	**#VALUE!**	1 Laporan		1 Laporan	#VALUE!	#VALUE!

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terpenuhi (Kec. Sepulu)**		**1,300,000,000**	**0.00**	**0**		**5,459,250**	**0.00**	**0**	**100**	**-**		**42,687,500**		**42,687,500**	**3.28**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 Unit	100,000,000		-	0 Unit	-	-	-	**100**	**#VALUE!**	0 Unit	-	0 Unit	#VALUE!	#VALUE!
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	600,000,000		-	0 Unit	-	-	-	**100**	**#VALUE!**	0 Unit	-		#VALUE!	#VALUE!
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	600,000,000	**0.00**	0	0 Unit	5,459,250	**0.00**	0	**100**	**-**	0 Unit	42,687,500.00	1 Unit	42,687,500	7.11
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**54,500,000**	**490.35**	**267,241,812**		**276,306,850**	**96.72**	**267,241,812**	**100**	**96.72**		**278,546,850**		**813,030,474**	**1,491.80**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21 Jenis	25,300,000	**11.86**	3,000,000	3 Laporan	4,000,000	**75.00**	3,000,000	**100**	**75.00**	3 Laporan	3,000,000.00	3 Laporan	9,000,000	35.57
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bulan	29,200,000	**38.62**	11,276,683	12 Laporan	11,321,850	**99.60**	11,276,683	**100**	**99.60**	12 Laporan	14,741,850.00	12 Laporan	37,295,216	127.72
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Bulan	997,700,000	**25.35**	252,965,129	12 Laporan	260,985,000	**96.93**	252,965,129	**100**	**96.93**	12 Laporan	260,805,000.00	12 Laporan	766,735,258	76.85
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**		**191,310,000**	**98.86**	**42,561,000**		**39,050,000**	**98.86**	**42,561,000**	**100**	**108.99**		**56,000,000**		**141,122,000**	**73.77**

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	71,310,000	**54.08**	38,561,000	2 Unit	39,050,000	**98.75**	38,561,000	**100**	**98.75**	2 Unit	31,000,000.00	2 Unit	108,122,000	151.62
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	120,000,000	**100.00**	4,000,000.00	0	0	**100.00**	4,000,000.00	**100**	**#DIV/0!**	0	25,000,000		33,000,000	27.50
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**JUMLAH KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN**		**#REF!**	**#REF!**	**887,000**	**#######**	**1,277,100**	**69.45**	**887,000**	**100**	**69.45**	**100**	**1,294,500**		**3,068,500**	**#REF!**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan yang diselenggarakan**		**#REF!**		**0**	0%	**0**		**0**	**100**	**#DIV/0!**	0%	**0**		**-**	**#REF!**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	3 Dok	35,309,000	**0.00**	-	0 Laporan	0	**0.00**	-	**100**	**#VALUE!**	0 Laporan	0	0 Laporan	#VALUE!	#VALUE!
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**		**#REF!**	**#REF!**	**887,000**		**1,277,100**	**69.45**	**887,000**	**100**	**69.45**		**1,294,500**		**3,068,500**	**#REF!**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Dok	31,680,500	**2.80**	887,000	1 Laporan	1,277,100	**69.45**	887,000	**100**	**69.45**	1 Laporan	1,294,500.00	1 Laporan	3,068,500	9.69

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**JUMLAH PROGRAM YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA**		**42,127,400**	**33.01**	**13,908,350**		**14,088,400**	**98.72**	**13,908,350**	**100**	**98.72**	**100**	**16,893,400**		**44,710,100**	**106.13**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**		**42,127,400**	**33.01**	**13,908,350**		**14,088,400**	**98.72**	**13,908,350**	**100**	**98.72**		**16,893,400**		**44,710,100**	**106.13**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Kegiatan	42,127,400	**33.01**	13,908,350	4 Lembaga Kemasyarakatan	14,088,400	**98.72**	13,908,350	**100**	**98.72**	4 Lembaga Kemasyarakatan	16,893,400.00	4 Lembaga Kemasyarakatan	44,710,100	106.13
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	41,030,400		-	0	0		-	**100**	**#VALUE!**	0	0		#VALUE!	#VALUE!
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**JUMLAH PROGRAM YANG DILAKUKAN**		**43,742,100**	**0.00**	0		**1,080,800**	**0.00**	0	**100**	-	**100**	**944,800**		**944,800**	**2.16**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Program yang dilakukan**		**43,742,100**	**0.00**	**0**		**1,080,800**	**0.00**	**0**	**100**	-		**944,800**		**944,800**	**2.16**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	43,742,100	**0.00**	0	0 Laporan	1,080,800	**0.00**	0	**100**	-	0 Laporan	944,800.00	0 Laporan	944,800	2.16
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**JUMLAH PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN**		**35,439,500**	**0.00**	0		**955,050**	**0.00**	0	**100**	-	**100**	**1,259,850**		**1,259,850**	**3.55**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**		**35,439,500**		**0**		**0**		**0**	**100**	**#DIV/0!**		**0**		**-**	**-**

	Pemerintahan Desa															
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	39 Desa	35,439,500	**0.00**		0 Dok	955,050	**0.00**		**100**	**-**	0 Dok	1,259,850.00	1 Kegiatan	1,259,850	3.55
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	117 Peserta	35,145,000	**0.00**	-	0 Dok	-	**0.00**	-	**100**	**#VALUE!**	0 Dok	-	0 Dok	#VALUE!	#VALUE!

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Indikator Sampai dengan Semester I 2024
KECAMATAN TANAH MERAH

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Ket(Penjelasan Jika Ada Perubahan Target
		2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanah Merah	19,999,800	19,131,650	63,266,300	14,795,350	95%	95%	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Tanah Merah	2,133,521,529	2,365,299,521	2,270,227,085	2,387,566,189	95%	95%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Pelayanan Publik Berkualitas di Tingkat Kecamatan.

SASARAN :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table terlampir.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah
KECAMATAN TANAH MERAH

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Pelayanan Publik Berkualitas di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanah Merah	95%	95%	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanah Merah	Indeks Kepuasan Msyarakat Kecamatan Tanah Merah	95%	95%	
					Nilai SAKIP Kecamatan Tanah Merah	95%	95%	

Tabel 3.2

Matriks Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah
Kecamatan Tanah Merah Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN TANAH MERAH							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

						TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah															
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	622.950,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			5.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
2	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

						TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah															
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	207.650,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					NON URUSAN									2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
4	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00									2.350.223.260,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
5	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

						TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah															
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	207.650,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

						TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah															
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	207.650,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
8	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	885.350,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
9	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

						TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah															
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				1 Laporan	1 Laporan	885.350,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua	Dana Transfer Um	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	4. Peningkatan Pelayanan			0,00	KECAMATAN TANAH MERA

							Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Kecamatan, Semua Kel/Desa	um-Dana Alokasi Umum	m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				H
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00						2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00						2.383.223.260,00	
11	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00						2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	4. Peningkatan Pelayanan	Masyarakat Kecamatan		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERA

						Perangkat Daerah	Perangkat Daerah											m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Tanah Merah			H
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	0,00	207.650,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Um	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																esa	um		dan Ketentraman Ketertiban Umum				
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
12	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	11.343.100,00	1.868.850,00	1.868.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		11.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																			dan Ketentraman Ketertiban Umum				
	7	01	01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	2.083.454.551,00	2.135.629.670,00	2.135.629.670,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.907.601.410,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

				2	01																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/ bulan	27 Orang/ bulan	2.081.701.451,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
13	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

						KABUPATEN/KOTA																
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	2.083.454.551,00	2.135.629.670,00	2.135.629.670,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.907.601.410,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	

14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	2.083.454.551,00	2.135.629.670,00	2.135.629.670,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.907.601.410,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	876.550,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
15	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	2.083.454.551,00	2.135.629.670,00	2.135.629.670,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.907.601.410,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
16	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

						TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah																
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	2.083.454.551,00	2.135.629.670,00	2.135.629.670,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.907.601.410,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	876.550,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
17	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	2.083.454.551,00	2.135.629.670,00	2.135.629.670,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.907.601.410,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
18	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

						TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah																
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	-			100 %	100 %	207.650,00	207.650,00	207.650,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		500.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	207.650,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua	Dana Transfer Um	-	4. Peningkatan Pelayanan			0,00	KECAMATAN TANAH MERA

																Kecamatan, Semua Kel/Desa	um-Dana Alokasi Umum		Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			H
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN						2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
19	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang	-			100 %	100 %	207.650,00	207.650,00	207.650,00			-	4. Peningkatan Pelayanan	-		500.000,00	KECAMATAN TANAH MERA

						Perangkat Daerah	tersusun													Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				H
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	38.085.000,00	19.655.450,00	19.655.450,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		27.750.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																			Ketertiban Umum				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	320.000,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			2.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					NON URUSAN								2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	

20	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	38.085.000,00	19.655.450,00	19.655.450,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.750.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
21	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	38.085.000,00	19.655.450,00	19.655.450,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.750.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

	7	01	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	8.503.500,00	8.373.400,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			10.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
22	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

						TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah																
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	38.085.000,00	19.655.450,00	19.655.450,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.750.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.710.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
23	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	38.085.000,00	19.655.450,00	19.655.450,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.750.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
24	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

						TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah																
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	38.085.000,00	19.655.450,00	19.655.450,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.750.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.579.500,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua	Dana Transfer Um	-	4. Peningkatan Pelayanan			0,00	KECAMATAN TANAH MERA

																Kecamatan, Semua Kel/Desa	um-Dana Alokasi Umum		Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			H
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN						2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
25	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	38.085.000,00	19.655.450,00	19.655.450,00			-	4. Peningkatan Pelayanan	-		27.750.000,00	KECAMATAN TANAH MERA

																			Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum					H
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00						2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00						2.383.223.260,00	
26	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00						2.350.223.260,00	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	38.085.000,00	19.655.450,00	19.655.450,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.750.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.115.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semu	Dana Transfer Umum-Dana Alo	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi			0,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																a Kel/Desa	kasi Umum		Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN						2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
27	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00						2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	45.176.000,00	42.687.500,00	42.687.500,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																			Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	42.687.500,00	42.687.500,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			10.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00								2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00								2.383.223.260,00	
28	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00								2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	45.176.000,00	42.687.500,00	42.687.500,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		10.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN						2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
29	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	277.641.850,00	278.546.850,00	278.546.850,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		309.321.850,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																			Ketertiban Umum				
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.000.000,00	2.100.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			3.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	

30	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	277.641.850,00	278.546.850,00	278.546.850,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		309.321.850,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
31	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	277.641.850,00	278.546.850,00	278.546.850,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		309.321.850,00	KECAMATAN TANAH MERAH

	7	01	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.741.850,00	15.821.850,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			11.321.850,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					NON URUSAN								2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00						2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00						2.383.223.260,00	
32	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

						TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah															
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	277.641.850,00	278.546.850,00	278.546.850,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		309.321.850,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	262.320.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
33	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	277.641.850,00	278.546.850,00	278.546.850,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		309.321.850,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			100 %	100 %	61.350.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi	-		84.050.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																			Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum					
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	0,00	31.000.000,00	29.900.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			39.050.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
34	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			100 %	100 %	61.350.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		84.050.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00								2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00								2.383.223.260,00	
35	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00								2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			100 %	100 %	61.350.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	-		84.050.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																			Ketertiban Umum				
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			45.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7					NON URUSAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	

36	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				95 Indeks	95 Indeks	2.517.258.151,00	2.534.595.970,00	2.486.583.485,00							2.350.223.260,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			100 %	100 %	61.350.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		84.050.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
	7	01				KECAMATAN							2.576.623.301,00	2.554.988.520,00	2.499.548.685,00							2.383.223.260,00	
37	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi				100 %	100 %	4.114.200,00	1.294.500,00	462.050,00							3.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	-			1 Koordinasi	1 Koordinasi	2.057.100,00	0,00	0,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umu	-		0,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																			m				
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	2.057.100,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangkalan, Tanah Merah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN TANAH MERAH

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan yang terlaksana	-			10 Layanan	10 Layanan	2.057.100,00	1.294.500,00	1.294.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		3.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.057.100,00	1.294.500,00	462.050,00	Kab. Bangkalan, Tanah Merah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alo	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelaya	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi			3.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																Kel/Desa	kasi Umum	nan Publik	Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			
38	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100 %	100 %	26.163.450,00	16.893.400,00	11.558.350,00							20.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana	-			2 Koordinasi	2 Koordinasi	26.163.450,00	16.893.400,00	16.893.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentrama	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		20.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																			n Ketertiban Umum				
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	16.893.400,00	16.893.400,00	11.558.350,00	Kab. Bangkalan, Tanah Merah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			20.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	03	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

				1	03																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	9.270.050,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Tanah Merah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN TANAH MERAH
39	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI				100 %	100 %	9.485.800,00	944.800,00	944.800,00							5.000.000,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			1 Koordinasi	1 Koordinasi	9.485.800,00	944.800,00	944.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kecamatan Tanah Merah		5.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal				1 Laporan	1 Laporan	9.485.800,00	944.800,00	944.800,00	Kab. Bangkalan, Tanah Merah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alo	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelaya	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi			5.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

							di Wilayah Kecamatan									Kel/Desa	kasi Umum	nan Publik	Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum				
40	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100 %	100 %	19.601.700,00	1.259.850,00	0,00							5.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Mendapat Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	100 %	19.601.700,00	1.259.850,00	1.259.850,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentrama	-		5.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

																			n Ketertiban Umum				
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9.800.850,00	1.259.850,00	0,00	Kab. Bangkalan, Tanah Merah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			5.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																	

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9.800.850,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Tanah Merah, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	JUMLAH												**2.576.623.301,00**	**2.554.988.520,00**	**2.499.548.685,00**							**2.383.223.260,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini sebagai landasan bagi Pemerintah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Tanah Merah Tahun 2024 menjadi bahan evaluasi kinerja Kecamatan Tanah Merah di semeseter 1 sehingga menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di semester selanjutnya. Berdasarkan serapan realisasi anggaran pada semester 1 sebesar 52,60% dengan capaian kinerja sebagian besar masih dibawah 50%. Masih rendahnya capaian kinerja ini dikarenakan masih banyaknya kegiatan yang belum dilaksanakan di semester 1 ini sehingga akan di optimalkan di semester yang akan datang.

Kecamatan Tanah Merah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bangkalan khususnya di Kecamatan Tanah Merah. Langkah yang dilakukan diantaranya bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam meningkatkan kemandirian desa dengan menggali potensi yang ada.

Untuk mewujudkan program kerja yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Perubahan RENJA ini diharapkan dapat mensinergikan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kecamatan Tanah Merah.

T

Tanah Merah, Agustus 2024
CAMAT TANAH MERAH

HERI ARIFIN, SH
Pembina
NIP. 19671223 200112 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Burneh yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD Kecamatan Burneh dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang akan dicapai jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renja Perubahan Kecamatan Burneh tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Burneh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024.

Renja Perubahan Kecamatan Burneh Tahun 2024 disamping berfungsi sebagai Pedoman Kerja juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat Kecamatan Burneh dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri dan sebagai evaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD Kecamatan Burneh.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Burneh Tahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat 1.

Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan maka tujuan Perencanaan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan

yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan, akan bersinergi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 OPD Kecamatan Burneh memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Burneh serta kerangka pendanaan daerah yang secara substansial sesuai dengan visi, misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan RENSTRA) sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses Perencanaan Pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top–Down (Atas–Bawah), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus berjenjang memperhatikan program-program pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom–Up (Bawah–Atas), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder/pemerintah dibawahnya.

   Pendekatan Top-Down dan Bottom–Up diselaraskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

   Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Burneh Tahun 2024 disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang mengacu pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Renstra OPD Kecamatan Burneh dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Burneh Tahun 2024 adalah :

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
   Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 tentang tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1/D)
10. Peraturan Daerah Kabupaten bangkalan Nomo 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1 / D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang RencanaPembangan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 / E):
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten BangkalanTahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 / E):
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/ E)
15. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 65 tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Burneh.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah:

MAKSUD :

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Burneh adalah perencanaan OPD dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD Lima tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.

2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

2.1. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Rencana Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Perrangkat Daerah. pelaksanaan Renja Perangkat Daerah .

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun2024 Perangkat Daerah

3.2 Matriks Rancangan Perubahan Rencanaq Kerja (Renja) Tahun 2024

BAB IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja tahun 2024 OPD Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2018 - 2023 dan Renstra OPD Kecamatan Burneh tahun 2018 – 2023 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Burneh.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Burneh selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Burneh Tahun 2023 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2018-2023 Terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah :

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 4.758.645.438,- hingga triwulan ke IV tahun 2023 anggaran tersebut terserap Rp. 4.698.402.152,- (100 %) Desember 2023 .

Adapun rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

		KECAMATAN BURNEH
1	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**
1.1	**7.01.01.2.01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan keluaran Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN,-
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.3	**7.01.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	**7.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.5	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.6	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.7	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	**7.01.02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
2.1	**7.01.02.2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.2	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
3.1	**7.01.03.2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan keluaran
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3.2	**7.01.03.2.02**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
4.1	**7.01.04.2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
5.1	**7.01.06.2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
6	**7.01.01**	**KELURAHAN TUNJUNG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
6.1	**7.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6.2	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.3	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
6.4	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.5	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
7.1	**7.01.03.2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.2	**7.01.03.2.05**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**
	7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Dari 5 (lima) program, 13 (Tiga belas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 (dua) Terealisasi sebesar Rp.2,684.344,202 (55,58 %)

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel terlampir.

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja capaian Program (Pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022									Target Program,Kegiatan (renja PD tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun Berjalan			
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Renja PD Tahun 2023			Tingkat Realisasi (%)						Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub.Kegiatan sd Tahun Berjalan (Tahun 2024 TW 2)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8=7/6)*100			(9)			(10=5+7+9)			11=(10/4)*100
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	85	%	730.312.377.722	84	%	2.976.487.305	84	%	3.030.658.015	84	%	2.976.487.305,00	100	%	98	98	%	3.210.372.206	12,5	%	1.813.731.437	0,25
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	14.750.000	84	%	3.740.000	84	%	3.740.000	84	%	3.740.000,00	100	%	100	100	%	4.280.000	0,33	%	1.025.000	6,95

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun																						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dok	5.250.000	3	Dok	1.540.000	3	Dok	1.540.000	3	Dok	1.540.000,00	100	%	100	2	Dok	2.130.000	1	Dok	270.000	**5,14**
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun														-								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	1.500.000																			-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun																						
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	1.500.000																			-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun																						

		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dok	1.500.000	1	Dok	700.000	1	Dok	700.000	1	Dok	700.000,00	100	%	100	1	Dok	690.000				-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun																						
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	1.500.000												1	Dok	705.000				-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun																					

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dok	1.500.000																			-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun																						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	lap	2.000.000	1	lap	1.500.000	1	lap	1.500.000	1	lap	1.500.000,00	100	%	100	1	lap	755.000	1	lap	755.000	**37,75**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**97**	**%**	**728.382.937.222**	**83**	**%**	**2.405.512.831**	**84**	**%**	**2.439.651.713**	**83**	**%**	**2.405.512.831,00**	**99**	**%**	**99**	**95**	**%**	**2.636.212.206**	**80,3**	**%**	**1.508.091.537**	**0,21**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																						

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	####	org	728.376.937.222	381	org	2.404.971.831	384	org	2.439.110.713	381	org	2.404.971.831,00	99	%	99	396	org	2.634.682.206	240	org	1.507.946.537	**0,21**
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun																						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Lap	3.000.000	1	Lap	181.000	1	Lap	181.000	1	Lap	181.000,00	100	%	100	1	Lap	775.000	1	Lap	145.000	**4,83**
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun																						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	3	lap	3.000.000	18	lap	360.000	18	lap	360.000	18	lap	360.000,00	100	%	100	1	Lap	755.000	0	0	-	-

		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																					
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**3.000.000**	**84**	**%**	**360.000**	**84**	**%**	**360.000**	**84**	**%**	**360.000**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	1.150.000	0	0	-	-
7.01.01.2.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			0	0	-	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	lap	3.000.000	14	lap	360.000	14	lap	360.000	14	lap	360.000,00	100	%	100	14	lap	1.150.000	0	0	-	-
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**																					
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan																					

		nya																						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan																						
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																						
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**103.602.000**	**84**	**%**	**10.600.000**	**84**	**%**	**10.600.000**	**84**	**%**	**10.600.000,00**	**100**	**%**	**100**	**98**	**%**	**21.654.500**	**1,67**	**%**	**5.912.950**	**5,71**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																						

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	3.000.000																		-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	22.500.000	9	paket	7.978.000	9	paket	7.978.000	9	paket	7.978.000,00	100	%	100	2	paket	5.872.000	1	paket	1.656.450	**7,36**
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	paket	45.852.000	3	paket	2.622.000	3	paket	2.622.000	3	paket	2.622.000	100	%	100	12	paket	15.405.000	5	paket	4.185.000	**9,13**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan																					

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	paket	2.250.000													12	paket	377.500	4	paket	71.500	**3,18**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan																						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Lap	30.000.000																			-
	Jumlah Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang																							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																						
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**																**1,3**		**29.198.000**	**1**		**29.198.000**	

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan																						
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan																						
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan																						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah Perallatan dan Mesin Lainnya yang diadakan															4	unit	29.198.000	4	unit	29.198.000		
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.732.740.000**	**82**	**%**	**535.067.313**	**84**	**%**	**554.517.500**	**82**	**%**	**535.067.313,00**	**98**	**%**	**96**	**97**	**%**	**517.877.500**	**3,5**	**%**	**232.523.801**	**13,42**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat																						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16	Lap	12.000.000	4	Lap	1.500.000	4	Lap	1.500.000	4	Lap	1.500.000,00	100	%	100	6	Lap	3.000.000	3	Lap	630.000	**5,25**

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	lap	49.500.000	24	lap	14.021.682	24	lap	16.500.000	24	lap	14.021.682,00	100	%	85	24	lap	16.497.500	11	lap	6.298.801	**12,72**
	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	lap	75.000.000	2	lap	7.000.000	3	lap	9.500.000	2	lap	7.000.000,00	67	%	74	3	lap	11.500.000		lap	-	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39	lap	1.596.240.000	13	lap	512.545.631	13	lap	527.017.500	13	lap	512.545.631,00	100	%	97	13	lap	486.880.000		lap	225.595.000	**14,13**

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**			**75.348.500**	**82**	**%**	**21.207.161**	**84**	**%**	**21.788.802**	**82**	**%**	**21.207.161,00**	**98**	**%**	**97**	**95**	**%**	49.080.000	**4**	**%**	36.980.149	**49,08**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan																						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	47.348.500	1	unit	14.513.450	1	unit	15.095.091	1	unit	14.513.450	100	%	96	1	unit	20.480.000	1	unit	9.584.000	**20,24**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi																						

		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipellihara/Rehabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	19.000.000	0	0	-	0	0	-	0	0	-				1	unit	25.000.000	1	unit	24.996.149	**131,56**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi																						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	unit	9.000.000	2	unit	6.693.711	2	unit	6.693.711	2	unit	6.693.711,00	100	~~%~~	100	14	unit	3.600.000	10	unit	2.400.000	**26,67**
07:01:02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**			**4.500.000**			-	**84**	**%**	1.786.000	0	0	-	-		-	**100**	**%**	**1.425.000**				-

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana**				0	0	-	0	0	-	0	0	-										
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Database Monografi Kecamatan yang tersusun																						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0	0	-	0	0	-	0	0	-										
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang**			**4.500.000**	0	0	-	**84**	**%**	**1.786.000**	0	0	-	-					1.425.000				-

		ada di Kecamatan yang terlaksana																					
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun				0	0	-	0	0	-	0	0	-									
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Koordinasi	4.500.000	0	0	-	1	Koordinasi	1.786.000	0	0	-	-		-	1	Koordinasi	1.425.000			-
07:01:03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**			**36.000.000**	**84**	**%**	**10.000.000**	**84**	**%**	**10.000.000**	**84**	**%**	**10.000.000,00**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	**12.325.000**			**10.005.000**	**27,79**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**			**36.000.000**	**84**	**%**	**10.000.000**	**84**	**%**	**10.000.000**	**84**	**%**		**100**	**%**	**-**	**100**	**%**	**12.325.000**	**6**	**%**	**10.005.000**	**27,79**

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan																				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	12	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	12	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	12	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	100	%	100	12	Lembaga Kemasyarakatan	10.950.000	12	Lembaga Kemasyarakatan	10.005.000	**33,35**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terbina																				

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	l a p	6.000.000	0	0	-	0	0	-	0	0	-				1	lap	1.375.000				-
07:01:04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**			**10.500.000**	0	0	-	0	0	-	0	0	-				**100**	**%**	2.615.000				-
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**			**10.500.000**	0	0	-	0	0	-	0	0	-				**100**	**%**	2.615.000				-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan				0	0	-	0	0	-	0	0	-										

		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	l a p	10.500.000	0	0	-	0	0	-	0	0	-				1	lap	2.615.000				-
07:01:06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**			**25.942.500**	0	0	-	0	0	-	0	0	-				**100**	**%**	7.700.000				-
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**25.942.500**	0	0	-	0	0	-	0	0	-				**100**	**%**	7.700.000				-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes																						

		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	Dok	10.942.500	0	0	-	0	0	-	0	0	-										-
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa																						
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	dok	15.000.000	0	0	-	0	0	-	0	0	-				3	dok	**7.700.000**				-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam analisis kinerja pelayanan perangkat daerah ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK.

Jenis indikator yang dikaji sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Burneh. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Burneh merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja OPD.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Burneh dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan antara lain :

1 Jumlah Jenis barang dan jasa perkantoran yang disediakan
2 Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah dan dinas luar daerah yang dilaksanakan
3 Jumlah Laporan administrasi barang milik daerah yang tersusun
4 Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara
5 Jumlah prasarana aparatur yang diadakan
6 Seragam batik aparatur
7 Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar Keikutsertaan Bimtek
8 Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
9 Jumlah Laporan Kinerja PD yang tersusun
10 Jumlah Laporan Keuangan Akhir than yang tersusun
11 Peringatan hari jadi Bangkalan
12 Jumlah Dokumen indeks kepuasan masyarakat yang tersusun
13 Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa
14 Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin yang terlaksana
15 Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya
16 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan
17 Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun
18 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terbina
19 Kegiatan Musrenbag yang dilaksanakan
20 Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan / sosialisasi

Adapun indikator dalam pencapian kinerja pelayanan di Kecamatan Burneh antara lain :

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
2. Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
3. Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel terlampir.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu – isu penting dan permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Burneh adalah sebagai berikut :

Isu – isu penting :

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang pelayanan termasuk system/prosedur baku pelayanan.
2. Keterbatasan kompetensi (kualitas) sumber daya aparatur kecamatan maupun desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih rendah.
4. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan yang ada di kecamatan

Permasalahan yang dihadapi :

1. Sarana dan prasarana kurang memadai untuk memberikan Pelayanan Umum yang optimal pada masyarakat (Pelayanan Prima).
2. Menurunnya semangat masyarakat sebagai dampak dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil musrenbang desa dan musrenbang kecamatan.
3. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
4. Kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terbatas.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada review ini terdapat perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan OPD.

Proses awal dilakukan melalui Musrenbang di tingkat Desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten, sehingga muncul skala prioritas Pembangunan di bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana Tabel Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja OPD tahun 2024.

Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat di tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program dan kegiatan usulan masyarakat yang prioritas dan mendesak sedangkan program kegiatan yang tidak mendesak akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD didasarkan pada besarnya anggaran yang sudah ditetapkan pada pagu indikatif sedangkan program kegiatan pada hasil analisis kebutuhan OPD adalah riil kebutuhan yang direncanakan oleh OPD Kecamatan Burneh untuk penyelenggaraan Pemerintahan di tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel terlampir.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

No	Rancangan Awal RKPD dari data Renstra					Hasil Analisis Kebutuhan dari data RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN BURNEH										
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dok	2,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dok	2,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	2,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	2,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dok	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dok	2,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	1 Dok	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	1 Dok	2,000,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dok	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dok	2,500,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1	Laporan	3,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1	Laporan	3,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	3,410,529,980	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	3,410,529,980	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Laporan	2,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	18	Laporan	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	18	Laporan	2,500,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bangkalan					**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Bangkalan					
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	3,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	3,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bangkalan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72	Buah	23,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bangkalan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72	Buah	23,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	10,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	10,000,000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Unit	2,448,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Unit	2,448,400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Unit	15,834,275	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Unit	15,834,275	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	Unit	12,905,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	Unit	12,905,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Jenis	23,042,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Jenis	23,042,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Kali	9,100,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Kali	9,100,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Pengadaan Mebel	Bangkalan	Jumlah Mebel yang diadakan	5	Unit	-	Pengadaan Mebel	Bangkalan	Jumlah Mebel yang diadakan	5	Unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Jenis	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Jenis	37,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	37,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Jenis	686,962,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Jenis	686,962,500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3	Unit	2,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 Unit	2,300,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	Unit	37,880,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 Unit	37,880,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	34,539,575	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	34,539,575	

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan					**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bangkalan	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	1 Dok	7,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bangkalan	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	1 Dok	7,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bangkalan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 Dok	7,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bangkalan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 Dok	7,000,000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bangkalan	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1	Kegiatan	12,366,850	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bangkalan	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1	Kegiatan	12,366,850	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bangkalan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	2	Kegiatan	6,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bangkalan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	2	Kegiatan	6,500,000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**							
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Bangkalan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	2	Kegiatan	7,225,250	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Bangkalan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	2	Kegiatan	7,225,250	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**							

						Desa					
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Bangkalan	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	12	Desa	5,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Bangkalan	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	12 Desa	5,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bangkalan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	14	Peserta	5,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bangkalan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	14 Peserta	5,000,000	
	KELURAHAN TUNJUNG											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bangkalan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		13,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bangkalan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		13,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor		634.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor		634.500	
	Penyediaan Peralatan dan Pengadaan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4.073.850	Penyediaan Peralatan dan Pengadaan Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4.073.850	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.750.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.750.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		511.850	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		511.850	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		750.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		750.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan		5.291.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan		5.291.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik		5.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik		5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		273.217.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		273.217.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		2.120.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		2.120.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi		2.588.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi		2.588.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Desa					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Desa**					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Bangkalan	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan		8.796.350	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Bangkalan	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan		8.796.350	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**					
	Pembinaan Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Penaganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		67.231.150	Pembinaan Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Penaganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		67.231.150	
	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Bangkalan	Jumlah Pengadaan Pendukung Penangana Covid-19 di Tingkat Desa		288.711.350	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Bangkalan	Jumlah Pengadaan Pendukung Penangana Covid-19 di Tingkat Desa		288.711.350	
T O T A L					**5.110.629.980**					**5.110.629.980**	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada proses penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat sebenarnya dilakukan melalui Musrenbang di tingkat Desa, kemudian dilanjutkan pada Musrenbang di tingkat Kecamatan. Usulan-usulan dari tokoh masyarakat desa dan pemangku adat sebenarnya banyak, namun karena adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat pada forum musyawarah baik dari tingkat desa dan kecamatan serta tingkat kabupaten sehingga usulan tersebut ditiadakan.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Taahun 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

5 (lima) Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2024 adalah :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektifitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Burneh adalah :

Semua program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Burneh tahun 2024 merupakan implementasi dari prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021, sebagai contoh yaitu kegiatan – kegiatan yang ada pada Program Koordinasi, Pembinaan, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antara lain kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di tingkat Desa dan Kecamatan. Kegiatan ini merupakan media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginannya, semua aspirasi pembangunan di desa mulai dari peningkatan infrastruktur, perbaikan ekonomi masyarakat hingga pada kegiatan sosial budaya yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diusulkan melalui kegiatan ini.

Kegiatan Sosialisasi Ketertiban dan Keamanan tingkat Kecamatan dan Kegiatan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyakakat adalah merupakan bentuk dari OPD Kecamatan Burneh untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di lingkungan masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin merupakan bentuk dari OPD Kecamatan Burneh untuk membantu masyarakat miskin agar memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Kegiatan Pendampingan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes adalah upaya dari OPD Kecamatan Burneh untuk mengawal pelaksanaan Pembangunan dari semua desa di wilayah Kecamatan Burneh agar dana yang diterima baik dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dari Pemerintah Pusat dapat tepat sasaran sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan.

SASARAN :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat
2. Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina
3. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table 3.1 terlampir.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2023

KECAMATAN BLEGA

KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan							Sasaran							Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	REALISASI			Target		Uraian	Indikator Kinerja	REALISASI			Target		
		2021	2022	2023	2024	PERUBAHAN			2021	2022	2023	2024	PERUBAHAN	
1	2				3	4	5	6				7	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	82	83	84			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik terhadap masyarakat	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	83	83	84			
							Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina	Prosentase aparatur / perangkat desa yang terbina	83	82,5	85			
Meningkatnya Kinerja Unsur Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Unsur Kewilayahan	83	81,09	84			Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indek Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	83	81,09	85			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan							
1					2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**				**5.167.797.768**	**4.436.954.430**	**4.032.006.908**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.		**5.069.111.699**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Burneh)	100 %	100 %	**4.742.797.768**	**4.386.862.330**	**4.009.065.058**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**4.680.709.218**	
7	**1**	**1**	2		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	**15.500.000**	**15.500.000**	**11.000.000**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**17.242.500**	
7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh		1 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen		

7	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Dokumen RKS-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen		
7	1	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh		1 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh		1 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh		1 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen		
7	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Laporan	2.742.500	KECAMATAN BURNEH

					SKPD												
7	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh		1 Dokumen	3.500.000	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**1**	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	**3.472.197.768**	**3.415.029.980**	**3.236.297.114**				Adanya penyesuaian kebutuhan	100 %	**3.328.975.518**	
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang /bulan	44 Orang /bulan	3.467.697.768	3.410.529.980	3.232.877.114		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Burneh	Adanya penyesuaian kebutuhan	44 Orang/bulan	3.324.475.518	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			12 Bulan		
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Burneh		1 Laporan	2.000.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan		

						Akhir Tahun SKPD yang tersusun											
7	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	2.500.000	2.500.000	1.420.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	18 Laporan	2.500.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	18 Laporan								18 Laporan		
7	**1**	**1**	2		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**4.284.300**	
7	1	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Kecamatan dan Kelurahan	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Laporan	4.284.300	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan								4 Laporan		

7	**1**	**1**	2, 1		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	**31.600.000**	**33.000.000**	**0**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**40.400.000**	
7	1	1	2, 1	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	21.600.000	23.000.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Paket	32.400.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72 Buah	72 Buah								72 Buah		
7	1	1	2, 1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	10.000.000	10.000.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	2 Orang	8.000.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Peserta Bimtek yang ikut Pelatihan	2 Orang	2 Orang								2 Orang		
7	**1**	**1**	2, 1		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	**70.938.900**	**63.567.825**	**38.138.250**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**69.489.100**	

7	1	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.511.500	2.448.400	1.481.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	2 Paket	1.269.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Unit	1 Unit								1 Unit		
7	1	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	18.019.900	16.072.425	13.500.250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	6 Paket	19.610.100	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	3 Unit					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			3 Unit		
7	1	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	16.065.000	12.905.000	6.115.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	4 Paket	15.125.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	2 Unit	2 Unit								2 Unit		

7	1	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24.242.500	23.042.000	17.042.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	2 Paket	24.242.500	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis								2 Jenis		
7	1	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	9.100.000	9.100.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	2 Laporan	9.242.500	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Kali	30 Kali								30 Kali		
7	**1**	**1**	2,1		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**64.212.500**	**49.882.450**	**2.639.394**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**88.729.850**	
7	1	1	2,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kaatot atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit	2 Unit	64.212.500	49.882.450	2.639.394		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	2 Unit	79.741.250	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	10 Unit	10 Unit								10 Unit		

						Lainnya yang Disediakan											
7	**1**	**1**	2,1		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	**1.004.420.000**	**734.462.500**	**659.745.000**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**1.047.142.500**	
7	1	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Laporan	1.500.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	3 Jenis								3 Jenis		
7	1	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.000.000	37.000.000	24.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	12 Laporan	42.000.000	KECAMATAN BURNEH
						JUmlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis								3 Jenis		
7	1	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	960.920.000	695.962.500	635.745.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Penyesuaian kebutuhan anggaran	12 Laporan	1.003.642.500	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Penyediaan Jasa	12 Jenis	12 Jenis								12 Jenis		

						Pelayanan Umum Kantor												
7	**1**	**1**	2,1		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**80.928.600**	**72.419.575**	**61.245.300**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**84.445.450**	
7	1	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 Unit	43.790.000	37.880.000	37.880.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	3 Unit	47.130.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit								3 Unit		
7	1	1	2,1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	37.138.600	34.539.575	23.365.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Unit	37.315.450	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhbilitasi	1 Unit	1 Unit								1 Unit		

7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Burneh)	100 %	100 %	**28.500.000**	**14.000.000**	**875.000**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**23.352.700**	
7	**1**	**2**	2		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan yang terlaksana	100 %	100 %	**14.500.000**	**7.000.000**	**0**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**15.000.000**	
7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	14.500.000	7.000.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**2**	2		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi sesuai standart pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	**14.000.000**	**7.000.000**	**875.000**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Dokumen	**8.352.700**	
7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen IKM yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000	7.000.000	875.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Dokumen	8.352.700	KECAMATAN BURNEH

7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Burneh)	100 %	100 %	**29.500.000**	**18.866.850**	**12.066.850**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**30.100.000**	
7	**1**	**3**	2		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	**29.500.000**	**18.866.850**	**12.066.850**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**30.100.000**	
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23.000.000	12.366.850	12.066.850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Kegiatan	24.000.000	KECAMATAN BURNEH
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	6.500.000	6.500.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Laporan	6.100.000	KECAMATAN BURNEH
						Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan								2 Kegiatan		
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Burneh)	100 %	100 %	**357.000.000**	**7.225.250**	**0**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**324.949.781**	

7	**1**	**4**	2		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	**357.000.000**	**7.225.250**	**0**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**324.949.781**	
7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	357.000.000	7.225.250	0	Kab. Bangkalan, Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Se Kecamatan Burneh	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	2 Laporan	324.949.781	KECAMATAN BURNEH
						Kegiatan Sinergisitas Polri, TNI, dan Instansi Kecamatan dalam pembinaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan							2 Kegiatan		
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Burneh)	100 %	100 %	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**					100 %	**10.000.000**	
7	**1**	**6**	2		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	100 %	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**					100 %	**10.000.000**	

7	1	6	2	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	12 Desa	12 Desa	5.000.000	5.000.000	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh		12 Desa	5.000.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
7	1	6	2	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh		1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah peserta yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	14 Peserta	14 Peserta								14 Peserta		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**				**0**	**673.675.550**	**641.763.350**				Penyesuaian pagu anggaran		**0**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**				**0**	**308.936.700**	**285.820.850**				Penyesuaian pagu anggaran		**0**	
7	**1**	**1**	2, 1		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**	**13.000.000**	**0**				Penyesuaian pagu anggaran		**0**	

7	1	1	2,1	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0	13.000.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyesuaian pagu anggaran	0 Paket	0	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**1**	2,1		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**0**	**7.720.200**	**5.483.350**				Penyesuaian pagu anggaran		**0**	
7	1	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0	634.500	634.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyesuaian pagu anggaran	2 Paket	0	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	4.073.850	4.073.850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyesuaian pagu anggaran	1 Paket	0	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	0	1.750.000	525.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyesuaian pagu anggaran	12 Paket	0	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	511.850	250.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyesuaian pagu anggaran	1 Paket	0	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	750.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyesuaian pagu anggaran	1 Laporan	0	KECAMATAN BURNEH

7	**1**	**1**	2,1		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**5.291.000**	**0**				Penyesuaian pagu anggaran		**0**	
7	1	1	2,1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	5.291.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyesuaian pagu anggaran	1 Unit	0	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**1**	2,1		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**0**	**278.217.500**	**278.217.500**				Penyesuaian pagu anggaran		**0**	
7	1	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0	5.000.000	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyesuaian pagu anggaran	12 Laporan	0	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0	273.217.500	273.217.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyesuaian pagu anggaran	12 Laporan	0	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**1**	2,1		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**0**	**4.708.000**	**2.120.000**				Penyesuaian pagu anggaran		**0**	

7	1	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	0	2.120.000	2.120.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyesuaian pagu anggaran	0 Unit	0	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2,1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	2.588.000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyesuaian pagu anggaran	1 Unit	0	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**0**	**364.738.850**	**355.942.500**				Penyesuaian pagu anggaran		**0**	
7	**1**	**3**	2		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**0**	**8.796.350**	**0**				Penyesuaian pagu anggaran		**0**	
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	0	8.796.350	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Adanya penyesuaian kebutuhan anggaran dan refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	10 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN BURNEH

7	**1**	**3**	2,1		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**				**0**	**355.942.500**	**355.942.500**				Adanya penyesuaian kebutuhan anggaran		**0**	
7	1	3	2,1	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	67.231.150	67.231.150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Adanya penyesuaian kebutuhan anggaran	1 Dokumen	0	KECAMATAN BURNEH
						Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen		
7	1	3	2,1	4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	288.711.350	288.711.350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Adanya penyesuaian kebutuhan anggaran	1 Dokumen	0	KECAMATAN BURNEH

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program prioritas Bupati Bangkalan untuk Kecamatan Burneh mendukung program prioritas Bupati ke 22 (dua puluh dua) yaitu "Memfasilitasi penguatan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tertuang dalam *Program Prioritas* yang ada pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Burneh yaitu Program Koordinasi, Pembinaan, Penyelenggaraan, Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan 2 (dua) subkegiatan Prioritas yaitu :

1. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangjkat Desa
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Ditunjang dengan 4 (empat) subkegiatan lainnya sebagai wujud dari arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kecamatan Burneh yaitu " Mengoptimalkan sumber daya kelembagaan", adapun 4 (empat) kegiatan tersebut yaitu :

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sehingga dari paparan visi dan misi tersebut diatas kecamatan Burneh merencanakan program kerja pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) program dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan yang tersebar di wilayah kecamatan Burneh dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 5.110629.980,- (Lima milyar seratus sepuluh enam ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Program dan Kegiatan dari Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 OPD Kecamatan Burneh adalah :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Pengadaan Mebel

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Degan rincian kegiatan sebagai berikut :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Degan rincian kegiatan sebagai berikut :

A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Degan rincian kegiatan sebagai berikut :

A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Bangkalan	1 Dok	2,000,000	DAUM		1 Dok	2,000,000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Bangkalan	1 Dok	2,000,000	DAUM		1 Dok	2,000,000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Bangkalan	1 Dok	2,000,000	DAUM		1 Dok	2,000,000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Bangkalan	1 Dok	2,000,000	DAUM		1 Dok	2,000,000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	Bangkalan	1 Dok	2,000,000	DAUM		1 Dok	2,000,000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Bangkalan	1 Dok	2,500,000	DAUM		1 Dok	2,500,000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Bangkalan	1 Laporan	3,000,000	DAUM		1 Laporan	3,000,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Bangkalan	12 Bln	3,410,529,980	DAUM		12 Bln	3.451.689.981
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Bangkalan	1 Laporan	2,000,000	DAUM		1 Laporan	2.000.000

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Bangkalan	18	Laporan	2,500,000	DAUM		18	Laporan	2.500.000
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Bangkalan								
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	1	Laporan	3,000,000	DAUM		1	Laporan	6.000.000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bangkalan	48	Buah	23,000,000	DAUM		48	Buah	0
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	2	Orang	10,000,000	DAUM		2	Orang	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	1	Unit	2,448,400	DAUM		1	Unit	2.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	3	Unit	15,834,275	DAUM		3	Unit	20.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	2	Unit	12,905,000	DAUM		2	Unit	13.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	2	Jenis	23,042,000	DAUM		2	Jenis	3.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	30	Kali	9,100,000	DAUM		20	Kali	7.500.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Bangkalan	0	Unit	-			3	Unit	17.250.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Bangkalan	2	Unit	-	DAUM		1	Unit	6.750.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	3	Jenis	1,500,000	DAUM		3	Jenis	1.250.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	3	Jenis	37,000,000	DAUM		3	Jenis	37.000.000

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	12 Jenis	686,962,500	DAUM		16 Jenis	695.962.500
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Bangkalan	2 Unit	2,300,000	DAUM		2 Unit	1.700.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Bangkalan	0 Unit	37,880,000	DAUM		0 Unit	29.800.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	Bangkalan	0 Unit	-	DAUM		10 Unit	4.880.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Bangkalan	1 Unit	34,539,575	DAUM		1 Unit	15.000.0000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**								
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	Bangkalan	1 Dok	7,000,000	DAUM		1 Dok	2.500.000
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	Bangkalan	1 Dok	7,000,000	DAUM		1 Dok	2.500.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Bangkalan	1 Kegiatan	12,366,850	DAUM		1 Kegiatan	50.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Bangkalan	2 Kegiatan	6,500,000	DAUM		2 Kegiatan	20.000.000
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	Bangkalan	0 Unit	-	DAUM		2 Unit	184.780.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan Tunjung	Bangkalan	0 Peserta	-	DAUM		26 Peserta	52.500.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**								
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	Bangkalan	1 Kegiatan	7,225,250			2 Kegiatan	20.000.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	Bangkalan	12 Desa	5,000,000	DAUM		12 Desa	20.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	Bangkalan	14 Peserta	5,000,000	DAUM		14 Peserta	10.000.000
	KELURAHAN TUNJUNG								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bangkalan		13,000,000	DAUM			10.000.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	Bangkalan		634.500	DAUM			600.000
	Penyediaan Peralatan dan Pengadaan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan		4.073.850	DAUM			3.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan		1.750.000	DAUM			1.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan		511.850	DAUM			500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan		750.000	DAUM			750.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan			5.291.000	DAUM			5.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Bangkalan		5.000.000	DAUM			5.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan		273.217.500	DAUM			256.377.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Bangkalan		2.120.000	DAUM			2.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Bangkalan		2.588.000	DAUM			2.500.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Pemberdayaan Desa								
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Bangkalan		8.796.350	DAUM			9.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								

	Pembinaan Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penaganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Bangkalan		67.231.150	DAUM			-
	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pendukung Penangana Covid-19 di Tingkat Desa	Bangkalan		288.711.350	DAUM			-
T O T A L					**5.110.629.980**				**4.946.289.981**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Burneh merupakan dasar pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2024. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Burneh selalu mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan, dan Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Administrasi Publik terhadap Masyarakat, Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Masyarakat desa yang dibina serta Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Burneh tahun 2024 disusun yang secara umum sudah mencakup program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Namum demikian dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian Data, oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaanya.

Burneh, 2024
CAMAT BURNEH

HOSUN,SPd, MM
Pembina Tk. I
NIP. 197108032003121004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Arosbaya yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan Arosbaya dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan PD yang akan dicapai jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renja Kecamatan Arosbaya tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Arosbaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024.

Renja Kecamatan Arosbaya Tahun 2024 disamping berfungsi sebagai Pedoman Kerja juga diharapkan menyatukan persepsi dan strategi seluruh aparat Kecamatan Arosbaya dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri dan sebagai evaluasi kinerja PD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PD Kecamatan Arosbaya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Arosbaya Tahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat 1. Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan maka tujuan

Perencanaan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan, akan bersinergi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 PD Kecamatan Arosbaya memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Arosbaya serta kerangka pendanaan daerah yang secara substansial sesuai dengan agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan RENSTRA) sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses Perencanaan Pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top□Down (Atas□Bawah), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus berjenjang memperhatikan program-program pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom□Up (Bawah□Atas), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder/pemerintah dibawahnya. Pendekatan Top-Down dan Bottom□Up diselaraskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

   Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Arosbaya Tahun 2024 disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang mengacu pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Renstra OPD Kecamatan Arosbaya dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Arosbaya Tahun 2024 adalah :

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2009 Nomor 4/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1/D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1D);

11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);

12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E);

14. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan AROSBAYA).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Arosbaya adalah perencanaan OPD dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD Lima tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat daerah

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2. Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

BAB IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja tahun 2024 Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Arosbaya tahun 2024-2026 dimana tetap memperhatikan isu isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Arosbaya.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Arosbaya selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Arosbaya tahun 2023 terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan adapun Program program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 2.533.990.951,- namun demikian hingga triwulan ke 1 tahun 2023 anggaran yang terserap hanya Rp. ,- atau sekitar 93,88 % dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Adapun rincian program dan kegiatan serta penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan kegiatan :
   - Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana yang terserap 91,63%.
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana yang terserap 75,95%.

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi dana yang terserap 99,74%
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi dana yang terserap 100%
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Alokasi dana Terserap
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Degan alokasi dana Terserap
- Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Alokasi dana terserap
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Alokasi dana terserap

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK dengan kegiatan :
   - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan masih 0%
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN dengan kegiatan :
   - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, alokasi dana yang terserap sebesar 100%.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM dengan Kegiatan :
   - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, alokasi dana yang terserap sebesar
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA dengan kegiatan :
   - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, alokasi dana yang terserap sebesar

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table terlampir.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kecamatan Arosbaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**8.735.700.702**	**24,20**	**2.113.728.714**	**100**	**2.496.413.681**	**84,67**	**2.113.728.714**	**100**	**84,67**	**100**	**2.310.512.730**	52,41	**6.537.970.158**	**74,84**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**159.892.450**	**0,00**	**0**	**100**	**3.570.100**	**0,00**	**0**	**100**	-	**100**	**1.085.100**	**59,62**	**1.085.100**	**0,68**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dok	6.586.500	**0,00**		1 Dok	688.000	**0,00**		**100**	-	1 Dok		1 Dok	-	0,00

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	31.158.300	**0,00**		1 Dok	480.350	**0,00**		**100**	-	1 Dok	680.100	1 Dok	680.100	2,18
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dok	31.213.450	**0,00**	0	1 Dok	480.350	**0,00**		**100**	-	1 Dok		1 Dok	-	0,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dok	30.000.000	**0,00**		1 Dok	480.350	**0,00**		**100**	-	1 Dok		1 Dok	-	0,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dok	30.000.000	**0,00**	0	1 Dok	480.350	**0,00**		**100**	-	1 Dok		1 Dok	-	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	30.934.200	**0,00**		1 Laporan	480.350	**0,00**		**100**	-	1 Laporan		1 Laporan	-	0,00

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	31.007.500	**0,00**	0	1 Laporan	480.350	**0,00**	0	**100**	-	1 Laporan	405.000	1 Laporan	405.000	1,31
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**6.571.001.702**	**26,11**	**1.715.463.536**		**2.135.611.281**	**80,33**	**1.715.463.536**	**100**	**80,33**		**1.881.301.530**		**5.312.228.602**	**80,84**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Bulan	6.508.978.802	**26,33**	1.713.721.036	27 orang/bulan	2.134.668.181	**80,28**	1.713.721.036	**100**	**80,28**	27 orang/bulan	1.881.301.530	27 orang/bulan	**5.308.743.602**	81,56
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	31.004.850	**5,62**	1.742.500	1 Laporan	471.550	**369,53**	1.742.500	**100**	**369,53**	1 Laporan		1 Laporan	**3.485.000**	11,24
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	3 Laporan	31.018.050	**0,00**	0	18 Laporan	471.550	**0,00**	0	**100**	-	18 Laporan		18 Laporan	-	0,00
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**		**32.500.000**	**0,00**	**0**		**207.650**	**0,00**	**0**	**100**	-		**0**		-	-

7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Dok	32.500.000	**0,00**		2 Laporan	207.650	**0,00**		**100**	-	2 Laporan		2 Laporan	-	0,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**		**84.761.450**		**0**		**0**		**0**	**100**	**#DIV/0!**		**0**		-	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	93 Buah	50.006.450	**0,00**	-	0 Buah	0	**0,00**	-	**100**	**#VALUE!**	0 Buah	0	0 Buah	#VALUE!	#VALUE!
7.01.01.2.05.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	34.755.000		-	0 Orang	0	**0,00**	-	**100**	**#VALUE!**	0 Orang	0	0 Orang	#VALUE!	#VALUE!
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**341.735.100**	**4,06**	**13.860.000**		**36.208.550**	**38,28**	**13.860.000**	**100**	**38,28**		**60.818.000**		**88.538.000**	**25,91**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Unit	30.746.500	**0,00**	10.155.000	2 Paket	654.750	**0,00**	10.155.000	**100**	**1.550,97**	2 Paket		2 Paket	20.310.000	66,06
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1500 Unit	227.292.650	**0,00**		2 Paket	9.822.500	**0,00**		**100**	-	2 Paket	56.398.000,00	2 Paket	56.398.000	24,81

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	51.797.550	**0,00**		2 Paket	14.610.000	**0,00**		**100**	-	2 Paket		2 Paket	227.292.650	438,81
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis	31.898.400	**11,62**	3.705.000	2 Paket	5.561.300	**66,62**	3.705.000	**100**	**66,62**	2 Paket	4.420.000,00	2 Paket	11.830.000	37,09
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Kali	44.970.000	**0,00**	-	1 Laporan	5.560.000	**0,00**	-	**100**	**#VALUE!**	1 Laporan		1 Laporan	#VALUE!	#VALUE!
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terpenuhi (Kec. Sepulu)**		**1.300.000.000**	**0,00**	**0**		**5.459.250**	**0,00**	**0**	**100**	-		**0**		-	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 Unit	100.000.000		-	0 Unit	-	-	-	**100**	**#VALUE!**	0 Unit	-	0 Unit	#VALUE!	#VALUE!
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	600.000.000		-	0 Unit	-	-	-	**100**	**#VALUE!**	0 Unit	-		#VALUE!	#VALUE!
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	600.000.000	**0,00**	0	0 Unit	5.459.250	**0,00**	0	**100**	-	0 Unit		1 Unit	-	0,00

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**54.500.000**	**639,39**	**348.466.428**		**276.306.850**	**126,12**	**348.466.428**	**100**	**126,12**		**333.493.350**		**1.030.426.206**	**1.890,69**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21 Jenis	25.300.000	**11,86**	3.000.000	3 Laporan	4.000.000	**75,00**	3.000.000	**100**	**75,00**	3 Laporan	1.670.350,00	3 Laporan	7.670.350	30,32
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bulan	29.200.000	**27,62**	8.063.702	12 Laporan	11.321.850	**71,22**	8.063.702	**100**	**71,22**	12 Laporan	12.288.000,00	12 Laporan	28.415.404	97,31
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Bulan	997.700.000	**33,82**	337.402.726	12 Laporan	260.985.000	**129,28**	337.402.726	**100**	**129,28**	12 Laporan	319.535.000,00	12 Laporan	994.340.452	99,66
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**		**191.310.000**	**98,86**	**35.938.750**		**39.050.000**	**98,86**	**35.938.750**	**100**	**92,03**		**33.814.750**		**105.692.250**	**55,25**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	71.310.000	**50,40**	35.938.750	2 Unit	39.050.000	**92,03**	35.938.750	**100**	**92,03**	2 Unit	33.814.750,00	2 Unit	105.692.250	148,22

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	120.000.000	**100,00**		0	0	**100,00**		**100**	**#DIV/0!**	0			-	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**JUMLAH KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN**		**#REF!**	**#REF!**	**0**	**1.277.100**	**1.277.100**	**0,00**	**0**	**100**	**-**	**100**	**0**		**-**	**#REF!**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan yang diselenggarakan**		**#REF!**		**0**	0%	**0**		**0**	**100**	**#DIV/0!**	0%	**0**		-	**#REF!**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	3 Dok	35.309.000	**0,00**	-	0 Laporan	0	**0,00**	-	**100**	**#VALUE!**	0 Laporan	0	0 Laporan	#VALUE!	#VALUE!
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**		**#REF!**	**#REF!**	**0**		**1.277.100**	**0,00**	**0**	**100**	**-**		**0**		**-**	**#REF!**

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Dok	31.680.500	**0,00**		1 Laporan	1.277.100	**0,00**		**100**	-	1 Laporan		1 Laporan	-	0,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**JUMLAH PROGRAM YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA**		**42.127.400**	**43,72**	**18.417.500**		**14.088.400**	**130,73**	**18.417.500**	**100**	**130,73**	**100**	**9.170.250**		**46.005.250**	**109,21**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**		**42.127.400**	**43,72**	**18.417.500**		**14.088.400**	**130,73**	**18.417.500**	**100**	**130,73**		**9.170.250**		**46.005.250**	**109,21**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Kegiatan	42.127.400	**20,80**	8.762.500	4 Lembaga Kemasyarakatan	14.088.400	**62,20**	8.762.500	**100**	**62,20**	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.170.250,00	4 Lembaga Kemasyarakatan	26.695.250	63,37
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	41.030.400		9.655.000	0	0		9.655.000	**100**	**#DIV/0!**	0	0		19.310.000	47,06266573

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**JUMLAH PROGRAM YANG DILAKUKAN**		**43.742.100**	**0,00**	0		**1.080.800**	**0,00**	0	**100**	-	**100**	**0**		**-**	**-**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Program yang dilakukan**		**43.742.100**	**0,00**	**0**		**1.080.800**	**0,00**	**0**	**100**	-		**0**		**-**	**-**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	43.742.100	**0,00**	0	0 Laporan	1.080.800	**0,00**	0	**100**	-	0 Laporan		0 Laporan	-	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**JUMLAH PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN**		**35.439.500**	**0,00**	0		**955.050**	**0,00**	0	**100**	-	**100**	**11.340.000**		**11.340.000**	**32,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**		**35.439.500**		**0**		**0**		**0**	**100**	**#DIV/0!**		**0**		**-**	**-**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	39 Desa	35.439.500	**0,00**		0 Dok	955.050	**0,00**		**100**	-	0 Dok	11.340.000,00	1 Kegiatan	11.340.000	32,00

7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	117 Peserta	35.145.000	**0,00**	-	0 Dok	-	**0,00**	-	**100**	**#VALUE!**	0 Dok	-	0 Dok	#VALUE!	#VALUE!

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam analisis kinerja pelayanan perangkat daerah ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK.

Jenis indikator yang dikaji sesuai dengan tugas dan fungsi PD Kecamatan Arosbaya. Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Arosbaya merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja PD.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Arosbaya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan antara lain :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD
3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD
5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD
6. Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
9. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
11. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
12. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
13. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
14. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
15. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
16. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
17. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
18. Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

19. Jumlah Mebel yang disediakan
20. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
21. Jumlah Laoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
23. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
24. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
25. Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan
26. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
27. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
28. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
29. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
30. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
31. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
32. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
33. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Adapun indikator dalam pencapian kinerja pelayanan di Kecamatan Arosbaya antara lain :

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
2. Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
3. Persentase aparatur dan masyarakat desa yang terbina
4. Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table terlampir.

Tabel 2.2

Evaluasi Pelaksanaan Indikator Sampai dengan Semester I 2024

KECAMATAN AROSBAYA

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Ket(Penjelasan Jika Ada Perubahan Target
		2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Arosbaya		15.943.350	36.432.350	18.417.500	95%	95%	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Arosbaya		2.265.900.592	2.654.230.107	2.113.728.714	95%	95%	

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu isu penting dan permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Arosbaya adalah sebagai berikut :

Isu isu penting :

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang pelayanan termasuk system/prosedur baku pelayanan.
2. Keterbatasan kompetensi (kualitas) sumber daya aparatur kecamatan maupun desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih rendah.
4. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan yang ada di kecamatan.
5. Terjadinya banjir apabila musim hujan.
6. Masih terdapat kasus stunting pada anak

Permasalahan yang dihadapi :

1. Sarana dan prasarana kurang memadai untuk memberikan Pelayanan Umum yang optimal pada masyarakat (Pelayanan Prima).
2. Menurunnya semangat masyarakat sebagai dampak dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil musrenbang desa dan musrenbang kecamatan.
3. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
4. Kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terbatas.
5. Banyaknya saluran air dan sungai yang dangkal dan buntu sehingga sangat diperlukan normalisasi.
6. Kurangnya penyuluhan tentang kesehatan dan pendidikan yang rendah di desa terpencil.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada review ini terdapat perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan PD.

Proses awal dilakukan melalui Musrenbang di tingkat Desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten, sehingga muncul skala prioritas Pembangunan di bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana Tabel Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja PD tahun 2024.

Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat di tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program dan kegiatan usulan masyarakat yang prioritas dan mendesak sedangkan program kegiatan yang tidak mendesak akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD didasarkan pada besarnya anggaran yang sudah ditetapkan pada pagu indikatif sedangkan program kegiatan pada hasil analisis kebutuhan PD adalah riil kebutuhan yang direncanakan oleh PD Kecamatan Arosbaya untuk penyelenggaraan Pemerintahan di tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel terlampir.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD dari data Renstra					Hasil Analisis Kebutuhan dari data RKPD					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bangkalan**	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Indeks	**2.445.385.377**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bangkalan**	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Indeks	**3.088.462.304**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.181.310	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Bangkalan	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	70.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	2.113.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2.005.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	1.249.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	1.345.050	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	10.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	1.239.950	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.316.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	10.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	911.460	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	1.852.819.203	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bangkalan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	2.220.696.804	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	1.848.419.453	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	2.210.696.804	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.012.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.387.350	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	3.302.500	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Bangkalan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	10.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	2.080.700	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	5.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	1.221.800	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	16.531.250	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Bangkalan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	30.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bangkalan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 stel	12.541.250	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bangkalan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	25.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	3.990.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	42.067.240	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bangkalan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	93.265.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 jenis	1.930.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	10 jenis	20.137.240	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	10 Paket	60.000.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	3	jenis	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	3	Paket	18.265.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Kegiatan	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	10.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bangkalan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%		22.575.750	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Bangkalan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%		180.000.000	
	Pengadaan Mebel	Bangkalan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	22.575.750	Pengadaan Mebel	Bangkalan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	jenis	40.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	40.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		318.097.200	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bangkalan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		374.500.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	1.905.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Jenis	9.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	9.575.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Jenis	10.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	306.616.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	355.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	179.810.924	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bangkalan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	110.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	79.810.924	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Bangkalan**	**Persentase Penyeleggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	100%	**9.955.200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Bangkalan**	**Persentase Penyeleggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi**	100%	**20.000.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Bangkalan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan yang terlaksana	1Koordinasi	5.000.000	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	Bangkalan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan yang terlaksana	1Koordinasi	10.000.000	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bangkalan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bangkalan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	10.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Bangkalan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	10Layanan	4.955.200	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Bangkalan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	10Layanan	10.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bangkalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	1 Laporan	4.955.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bangkalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	1 Dok	10.000.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Bangkalan**	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	100%	**19.783.800**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Bangkalan**	**Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	100%	**21.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Bangkalan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2Koordinasi	19.783.800	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Bangkalan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2Koordinasi	21.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bangkalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	18 lembaga	19.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bangkalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	11.000.000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bangkalan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	783.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bangkalan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	10.000.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Bangkalan**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	100%	**5.103.900**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Bangkalan**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani**	100%	**10.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bangkalan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1Koordinasi	5.103.900	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Bangkalan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1Koordinasi	10.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	1 Laporan	5.103.900	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	1 Kegiatan	10.000.000	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Bangkalan**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan & pengawasan pemerintahan desa**	100%	**13.279.526**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Bangkalan**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan & pengawasan pemerintahan desa**	100%	**30.000.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bangkalan	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	13.279.526	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Bangkalan	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	30.000.000	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Bangkalan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa	1 dok	5.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Bangkalan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa	18 Desa	10.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Bangkalan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa	1 dok	3.279.526	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Bangkalan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa	18 Desa	10.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bangkalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dok	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bangkalan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	36 Peserta	10.000.000	
T O T A L					**2.493.507.803**					**3.169.462.304**	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada proses penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat sebenarnya dilakukan melalui Musrenbang di tingkat Desa, kemudian dilanjutkan pada Musrenbang di tingkat Kecamatan. Usulan-usulan dari tokoh masyarakat desa dan pemangku adat sebenarnya banyak, namun karena adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat pada forum musyawarah baik dari tingkat desa dan kecamatan serta tingkat kabupaten sehingga usulan tersebut ditiadakan.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2024

KECAMATAN AROSBAYA

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

---NIHIL---

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2024 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dam pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Arosbaya adalah program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Arosbaya tahun 2024 merupakan implementasi dari prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, sebagai contoh yaitu kegiatan kegiatan yang ada pada Program Koordinasi, Pembinaan, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antara lain kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di tingkat Desa dan Kecamatan. Kegiatan ini merupakan media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginannya, semua aspirasi pembangunan di desa mulai dari peningkatan infrastruktur, perbaikan ekonomi masyarakat hingga pada kegiatan sosial budaya yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diusulkan melalui kegiatan ini.

Kegiatan Sosialisasi Ketertiban dan Keamanan tingkat Kecamatan dan Kegiatan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyakakat merupakan bentuk dari Kecamatan Arosbaya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di lingkungan masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin merupakan bentuk dari OPD Kecamatan Arosbaya untuk membantu masyarakat miskin agar memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Kegiatan Pendampingan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes adalah upaya dari OPD Kecamatan Arosbaya untuk mengawal pelaksanaan Pembangunan dari semua desa di wilayah Kecamatan Arosbaya agar dana yang diterima baik dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dari Pemerintah Pusat dapat tepat sasaran sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN :

- ✓ Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat Kecamatan

INDIKATOR TUJUAN

- ✓ Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Arosbaya

SASARAN :

- ✓ Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Arosbaya.
- ✓

INDIKATOR SASARAN

- ✓ Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Arosbaya dan Nilai SAKIP

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table terlampir.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2024

KECAMATAN AROSBAYA

KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025			2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan public berkualitas di tig kat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Arosbaya	82	82.5	Meningkatnya pelayan public dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Arosbaya	Nilai Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Arosbaya	82	82.5	
					Nilai SAKIP Kecamatan Arosbaya	50	55	

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rencana kerja (Renja) Kecamatan Tragah tahun 2024 mengacu terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman terhadap Renstra dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Pada Renja tahun 2024 Program tersebut terdapat 8 kegiatan;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Pada Program dimaksud terdiri dari 2 kegiatan;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di didukung oleh 1 kegiatan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Untuk program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di didukung oleh 1 kegiatan;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   Untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di didukung oleh 1 kegiatan.

No.	Program Prioritas			Keterangan
	Kabupaten	Provinsi	Nasional	
1,	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Program dan Kegiatan dari Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 OPD Kecamatan Arosbaya adalah :

I. PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum

V. PROGRAM DAN PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN AROSBAYA							2.346.994.492,00	2.396.206.658,00	2.331.022.980,00							2.219.173.449,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.346.994.492,00	2.396.206.658,00	2.331.022.980,00							2.219.173.449,00	
	7	01				KECAMATAN							2.346.994.492,00	2.396.206.658,00	2.331.022.980,00							2.219.173.449,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah				90 100 % Indeks	100 90 Indeks %	2.299.982.022,00	2.373.155.408,00	2.310.512.730,00							2.205.042.223,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	10.223.760,00	1.085.100,00	1.085.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kec. Arosbaya		2.721.850,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.666.060,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.346.600,00	680.100,00	680.100,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.346.600,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.810.200,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.257.700,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.510.250,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.257.700,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.375.250,00	405.000,00	405.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.375.250,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	1.806.305.892,00	1.916.941.858,00	1.916.941.858,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kec. Arosbaya		1.851.509.053,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.803.244.492,00	1.916.056.658,00	1.881.301.530,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.849.757.803,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.751.250,00	885.200,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.751.250,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.310.150,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	-			100 %	100 %	2.027.950,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kec. Arosbaya		0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	

							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.105.300,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	922.650,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	15.816.500,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kec. Arosbaya		0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	12.475.250,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	3.341.250,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	-			100 %	100 %	48.454.820,00	62.955.000,00	62.955.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kec. Arosbaya		11.231.920,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	32.868.500,00	58.398.000,00	56.398.000,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			2.945.600,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.286.320,00	4.557.000,00	4.420.000,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			8.286.320,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	22.575.750,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kec. Arosbaya		0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	22.575.750,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	356.457.200,00	358.358.700,00	358.358.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kec. Arosbaya		298.097.200,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	3.330.000,00	4.310.700,00	1.670.350,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			3.330.000,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	8.367.200,00	12.288.000,00	12.288.000,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			8.367.200,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	344.760.000,00	341.760.000,00	319.535.000,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			286.400.000,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	38.120.150,00	33.814.750,00	33.814.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Kec. Arosbaya		41.482.200,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	38.120.150,00	33.814.750,00	33.814.750,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			41.482.200,00	KECAMATAN AROSBAYA
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyeleggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi				100 %	100 %	9.955.200,00	0,00	0,00							0,00	

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan yang terlaksana	-			1 Koordinasi	1 Koordinasi	5.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kec. Arosbaya		0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			10 Layanan	10 Layanan	4.955.200,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kec. Arosbaya		0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.955.200,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang mengikuti pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	18.674.444,00	9.170.250,00	9.170.250,00							9.630.900,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			2 Koordinasi	2 Koordinasi	18.674.444,00	9.170.250,00	9.170.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kec. Arosbaya		9.630.900,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	0	0	2.0	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															

		1	3	1	01																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.630.900,00	9.170.250,00	9.170.250,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			9.630.900,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	9.043.544,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani				100 %	100 %	5.103.300,00	0,00	0,00							0,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			1 Koordinasi	1 Koordinasi	5.103.300,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kec. Arosbaya		0,00	KECAMATAN AROSBAYA

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	5.103.300,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Arosbaya, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan & pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	13.279.526,00	13.881.000,00	11.340.000,00							4.500.326,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	100 %	13.279.526,00	13.881.000,00	13.881.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Masyarakat Kec. Arosbaya		4.500.326,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	4.319.700,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiba			0,00	KECAMATAN AROSBAYA

																		n Umum				
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	4.500.326,00	13.881.000,00	11.340.000,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			4.500.326,00	KECAMATAN AROSBAYA
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	4.459.500,00	0,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			0,00	KECAMATAN AROSBAYA
	JUMLAH												**2.346.994.492,00**	**2.396.206.658,00**	**2.331.022.980,00**							**2.219.173.449,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Arosbaya merupakan dasar pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2024. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Arosbaya selalu mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Arosbaya tahun 2024 disusun yang secara umum sudah mencakup program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Namum demikian dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian Data, oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaanya.

Arosbaya, Juli 2024

CAMAT AROSBAYA

AGUNG PIRMANSYAH,ST,.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 198112012003121003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana starategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu. Hasil dari proses tersebut berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menyusun suatu perencanaan yang baik agar mampu meningkatkan Pelayanan yang Prima terhadap Masyarakat sehingga tercipta Good Governace.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Geger Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Geger Tahun 2024 - 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Geger Tahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat 1.

Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah

mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan maka tujuan Perencanaan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan, akan bersinergi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 OPD Kecamatan Geger memuat tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Geger serta kerangka pendanaan daerah yang secara substansial sesuai dengan visi, misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan RENSTRA) sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses Perencanaan Pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top–Down (Atas–Bawah), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus berjenjang memperhatikan program-program pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom–Up (Bawah–Atas), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder/pemerintah dibawahnya.

   Pendekatan Top-Down dan Bottom–Up diselaraskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

   Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Geger Tahun 2024 disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang

mengacu pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Renstra OPD Kecamatan Geger dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Geger Tahun 2024 adalah :

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bangkalan tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Geger adalah perencanaan OPD dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD Lima tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
BAB IV. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN INI DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 OPD Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026 dan Renstra OPD Kecamatan Geger tahun 2024 – 2026 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Geger.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Geger selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Geger tahun 2024 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2024 - 2026 Terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 2.392.278.123,- namun demikian hingga triwulan ke 2 tahun 2024 anggaran yang terserap hanya Rp. 1.505.931.117.,- atau sekitar 17,38 % dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Adapun rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
1.1	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terserap sebesar Rp. 0 atau 0%
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terserap sebesar Rp. 0 atau 0%
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD terserap sebesar Rp.0 atau 0%
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan keluaran Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN yang terserap sebesar Rp. 914.295.810 atau 16,52%
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.3	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.5	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terserap sebesar Rp.0 atau 0%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangterserap sebesar Rp.0 atau 0 %
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terserap sebesar Rp. 22.062.000 atau 10,10 %
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terserap sebesar Rp. 0 atau 0%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terserab sebesar Rp.

		6.000.000 atau 55,00%
1.6	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terserab sebesar Rp. 0 atau 0%
1.7	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terserap sebesar Rp. 0 atau 0 %
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terserap sebesar Rp. 12.365.000 atau 7,88%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan keluaran Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terserap Rp. 187.230.00 atau 15,49%
1.8	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terserap Rp. 32.00.700 atau 14,87%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terserap sebesar Rp. 0 atau 0%
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2.2	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3.1	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan keluaran Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan terserap sebesar Rp. 12.500.000,- atau 100%
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4.1	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
5.1	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dari 5 (lima) program, 14 (Empat belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh emapat) sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 (dua) hanya 3 program, 9 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang terealisasi, 20 sub kegiatan lainnya belum terealisasi dan akan direalisasikan pada triwulan berikutnya dalam tahun berjalan.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table terlampir.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kecamatan Geger

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7			8=(7/6)*100	9			10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7.01.03.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM	Prosentase Pelayanan umum yang terpenuhi	100%	15.000.000	100%	5.500.000		0		0		0		0	100%	5.500.000	36,67
7.01.03.02.01	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	5 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	5.500.000		0		0		0		0	2 Dokumen	5.500.000	36,67
7.01.03.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana	100%	398.500.000	100%	92.495.000		0		0		0		0	100%	92.495.000	23,21
7.01.03.03.05	Database Monografi Kecamatan	Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun	5 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	10.000.000		0		0		0		0	1 Dokumen	10.000.000	47,62

7.01.03.03.07	Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Desa dan Kecamatan	Kegiatan Musrenbag yang dilaksanakan	5 Kegiatan	42.500.000	1 Kegiatan	10.000.000		0		0		0		0	1 Kegiatan	10.000.000	23,53
7.01.03.03.02	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin	Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin yang terlaksana	5 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	10.000.000		0		0		0		0	1 Kegiatan	10.000.000	14,29
7.01.03.03.06	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terbina	36 Organisasi	50.000.000	72 Organisasi	20.000.000		0		0		0		0	72 Organisasi	20.000.000	40,00
7.01.03.03.04	Sosialisasi Ketertiban dan Keamanan tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan	180 Orang	60.000.000	36 Orang	5.000.000		0		0		0		0	36 Orang	5.000.000	8,33
7.01.03.03.08	Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan / sosialisasi	180 Orang	50.000.000	36 Orang	10.000.000		0		0		0		0	36 Orang	10.000.000	20,00
7.01.03.03.03	Pendampingan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	90 Desa	50.000.000	36 Desa	17.500.000		0		0		0		0	36 Desa	17.500.000	35,00
7.01.03.03.01	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Kelurahan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	180 Orang	55.000.000	36 Orang	10.000.000		0		0		0		0	36 Orang	10.000.000	18,18
0.00.16	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	100%	4.566.562.841	100%	1.044.899.628		0		0		0		0	100%	1.044.899.628	22,88
0.00.16.01	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	35 Jenis	1.127.545.041	12 Jenis	125.834.779		0		0		0		0	12 Jenis	125.834.779	11,16
		Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	25 Jenis	2.054.500.000	13 Jenis	482.256.600		0		0		0		0	13 Jenis	482.256.600	23,47
0.00.16.02	Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	71 Kali	11.900.000	27 Kali	3.760.000		0		0		0		0	27 Kali	3.760.000	31,60

		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	4 Kali	9.000.000	18Kali	7.275.000		0		0		0		0	18Kali	7.275.000	80,83
0.00.16.03	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	70 Laporan	12.500.000	28 Laporan	5.000.000		0		0		0		0	28 Laporan	5.000.000	40,00
0.00.16.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang Dipelihara	45 Jenis	118.250.000	18 Jenis	33.198.449		0		0		0		0	18 Jenis	33.198.449	28,07
		Jumlah Prasarana Aparatur yang Dipelihara	15 Unit	145.500.000	6 Unit	28.857.000		0		0		0		0	6 Unit	28.857.000	19,83
0.00.16.05	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang Diadakan	6 Jenis	132.500.000	Jenis	0		0		0		0		0	Jenis	0	0,00
		Jumlah Prasarana Aparatur yang diadakan	40 Unit	572.367.800	8 Unit	77.317.800		0		0		0		0	8 Unit	77.317.800	13,51
0.00.16.06	Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Aparatur yang Diadakan	143 Buah	88.750.000	68Buah	20.900.000		0		0		0		0	68Buah	20.900.000	23,55
0.00.16.07	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Keikutsertaan Peserta Bimtek	123 Orang	47.750.000	3 Orang	10.500.000		0		0		0		0	3 Orang	10.500.000	21,99
0.00.16.08	Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	16 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	2.000.000		0		0		0		0	2 Dokumen	2.000.000	15,38
		Jumlah Data dan Informasi Perangkat Daerah	16 Data	14.000.000	2 Data	4.000.000		0		0		0		0	2 Data	4.000.000	28,57
		Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	13 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	4.000.000		0		0		0		0	2 Dokumen	4.000.000	22,22
0.00.16.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulan dan Semesteran Monev Perangkat Daerah yang tersusun (APBD, Renja / RKPD)	20 Laporan	8.500.000	16 Laporan	2.500.000		0		0		0		0	16 Laporan	2.500.000	29,41
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perangkat Daerah yang Tersusun	5 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	2.500.000		0		0		0		0	2 Dokumen	2.500.000	50,00

0.00.16.10	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun Mingguan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran	90 Laporan	5.000.000	16 Laporan	5.000.000		0		0		0		0	16 Laporan	5.000.000	100,00
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	7.500.000	Dokumen	0		0		0		0		0	Dokumen	0	0,00
0.00.16.11	Fasilitasi Peringatan hari Jadi Kabupaten/Provinsi	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi dan Hari Besar Yang difasilitasi	10 Kegiatan	175.000.000	2 Kegiatan	30.000.000		0		0		0		0	2 Kegiatan	30.000.000	17,14
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	7.869.682.287	98,26	2.386.920.303	100	2.523.635.994	100	2.453.941.678	100	97,24	100	2.081.443.937		6.922.305.918	87,96
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	24.165.300	100	4.560.300	100	8.300.000	100	8.300.000	100	100	100	7.184.150		20.044.450	82,95
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	3.000.000	Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1.502.250		4.502.250	150,08
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 Dokumen	4.665.300	1 Dokumen	390.300	1 Dokumen	1.350.000	1 Dokumen	1.350.000	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1.498.800		3.239.100	69,43
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	420.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1.498.800		3.118.800	69,31
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1.261.900		2.761.900	78,91

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	3 Dokumen	2.500.000	Dokumen	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1.422.400		2.422.400	96,90
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0		2.000.000	66,67
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24 Laporan	3.000.000	8 Laporan	1.000.000	8 Laporan	1.000.000	8 Laporan	1.000.000	8 Laporan	100	8 Laporan	0		2.000.000	66,67
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	6.356.600.583	100	2.015.815.190	100	2.067.353.294	100	2.012.686.933	100	97,36	100	1.760.224.737		5.788.726.860	91,07
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36 Bulan	6.350.600.583	12 Bulan	2.013.815.190	12 Bulan	2.065.353.294	12 Bulan	2.010.686.933	12 Bulan	97,35	36 Bulan	1.755.583.537		5.780.085.660	91,02
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3 Laporan	3.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	100,00	3 Laporan	2.445.800		4.445.800	148,19
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	54 Laporan	3.000.000	18Laporan	1.000.000	18Laporan	1.000.000	18Laporan	1.000.000	18Laporan	100,00	54 Laporan	2.195.400		4.195.400	139,85
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	3.100.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	100	100	2.157.400		4.157.400	134,11
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Laporan	3.100.000	14 Laporan	1.000.000	14 Laporan	1.000.000	14 Laporan	1.000.000	14 Laporan	100,00	42 Laporan	2.157.400		4.157.400	134,11
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	45675000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	31.150.000		31.150.000	68,20
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70 Buah	3367500	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0,00	70 Buah	21.150.000		21.150.000	62,81

7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Org	12000000	Org	0	Org	0	Org	0	Org	0,00	9 Org	10.000.000		10.000.000	83,33
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	106.306.550	100	11.894.500	100	49.870.450	100	47.301.050	100	94,85	100	29.839.800		89.035.350	83,75
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Ls	3.079.100	Ls	0	1 Ls	1.324.100	1 Ls	1.324.100	1 Ls	100,00	3 Ls	1.088.500		2.412.600	78,35
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	36.271.350	3 Jenis	7.574.300	3 Jenis	26.105.450	3 Jenis	24.915.250	3 Jenis	95,44	9 Jenis	5.800.000		38.289.550	105,56
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Ls	22.062.000	1 Ls	2.030.000	1 Ls	6.146.400	1 Ls	6.035.000	1 Ls	98,19	3 Ls	16.791.300		24.856.300	112,67
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis	38.894.100	2 Jenis	2.290.200	2 Jenis	1.658.500	2 Jenis	1.521.700	2 Jenis	91,75	6 Jenis	0		3.811.900	9,80
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Kali	6.000.000	Kali	0	36 Kali	14.636.000	36 Kali	13.505.000	36 Kali	92,27	114 Kali	6.160.000		19.665.000	327,75
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	115.412.550	100	4.111.400	100	55.428.250	100	55.428.250	100	100,00	100	0		59.539.650	51,59
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1 Unit	3101400	Unit	3101400	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	Unit	0		3.101.400	100,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Lainnya	Jumalh Pengadaan Peralatan dan Lainnya yang diadakan	3 unit	25528000	unit	0	1 unit	5.249.250	1 unit	5249250	1 unit	100,00	unit	0		5.249.250	20,56
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	9 Jenis	86783150	3 Jenis	1010000	3 Jenis	50.179.000	3 Jenis	50179000	3 Jenis	100,00	Jenis	0		51.189.000	58,98
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100	1.082.312.955	100	327.175.364	100	303.405.000	100	295.235.555	100	97,31	100	204.031.700		826.442.619	76,36

	Daerah																
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Jenis	5.240.000	3 Jenis	1.820.000	3 Jenis	1.620.000	3 Jenis	1.620.000	3 Jenis	100,00	9 Jenis	0		3.440.000	65,65
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 Jenis	38.250.000	3 Jenis	7.282.014	3 Jenis	12.750.000	3 Jenis	7.559.453	3 Jenis	59,29	9 Jenis	7.259.200		22.100.667	57,78
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 Jenis	1.038.822.955	12 Jenis	318.073.350	12 Jenis	289.035.000	12 Jenis	286.056.102	12 Jenis	98,97	48 Jenis	196.772.500		800.901.952	77,10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	136.109.349	100	22.363.549	100	38.279.000	100	33.989.890	100	88,80	100	46.856.150		103.209.589	75,83
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6 unit	6.500.000	2 unit	1.082.800	2 unit	2.400.000	2 unit	1.127.500	2 unit	46,98	6 unit	36.900.000		39.110.300	601,70
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 unit	93.627.749	2 unit	11.827.749	2 unit	21.584.000	2 unit	18.913.390	2 unit	87,63	unit	0		30.741.139	32,83
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	10 unit	4.587.600	unit	0	3 unit	1.200.000	3 unit	1.190.000	3 unit	99,17	10 unit	0		1.190.000	25,94
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6 unit	31.394.000	2 unit	9.453.000	2 unit	13.095.000	2 unit	12.759.000	2 unit	97,43	2 unit	9.956.150		32.168.150	102,47

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	8.600.000	100	1.250.000	100	3.686.550	100	3.686.550	100	100,00	0	5.839.150		10.775.700	125,30
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan		100	4.200.000	0	0	100	2.000.000	100	2.000.000	100	100,00	0	5.839.150		7.839.150	186,65
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	3 Dokumen	4.200.000	Dokumen	0	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	100,00	Dokumen	5.839.150		7.839.150	186,65
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	100	4.400.000	100	1.250.000	100	1.686.550	100	1.686.550	100	100,00	0	0		2.936.550	66,74
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3 Dokumen	4.400.000	1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	1.686.550	1 Dokumen	1.686.550	1 Dokumen	100,00	Dokumen	0		2.936.550	66,74
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	42.000.000	100	4.000.000	100	10.650.000	100	10.650.000	100	100,00	100	17.020.500		31.670.500	75,41
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan			42.000.000		4.000.000		10.650.000		10.650.000		100,00		17.020.500		31.670.500	75,41

	Desa															
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3 Kegiatan	21.500.000	1 Kegiatan	4.000.000	3 Kegiatan	7.500.000	3 Kegiatan	7.500.000	3 Kegiatan	100,00	3 Kegiatan	12.230.500		23.730.500	110,37
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	6 Kegiatan	20.500.000	Kegiatan	0	6 Kegiatan	3.150.000	6 Kegiatan	3.150.000	6 Kegiatan	100,00	Kegiatan	4.790.000		7.940.000	38,73
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100	27.000.000	0	0	100	5.000.000	100	5.000.000	100	100,00	0	11.610.000		16.610.000	61,52
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	27.000.000	0	0	100	5.000.000	100	5.000.000	100	100,00	0	11.610.000		16.610.000	61,52
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	27.000.000	Kegiatan	0	2 Kegiatan	5.000.000	2 Kegiatan	5.000.000	2 Kegiatan	100,00	Kegiatan	11.610.000		16.610.000	61,52
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	16.800.000	0	0	100	2.625.000	100	2.625.000	100	100,00	0	6.369.950		8.994.950	53,54
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	16.800.000	0	0	100	2.625.000	100	2.625.000	100	100,00	0	6.369.950		8.994.950	53,54

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	54 Desa	8.400.000	Desa	0	18 Desa	2.625.000	18 Desa	2.625.000	18 Desa	100,00	Desa	6.369.950		8.994.950	107,08
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	108 Peserta	8.400.000	Peserta	0	Peserta	0	Peserta	0	Peserta	0,00	Peserta	0		0	0,00
				7.964.082.287		2.392.170.303		2.545.597.544		2.475.903.228		97,26		2.122.283.537		6.990.357.068	87,77

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Geger								
No	**Indikator**	**SPM/ Standar Nasional**	**IKK**	**Realisasi Capaian**		**Target Renstra**	**Target P-Renja 2024**	**Ket**
				2022	**2023**			
1	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Geger			95	100	90	95	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Geger			56	59	64	68	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kinerja Unsur Kewilayahan

SASARAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat
2. Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina
3. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table terlampir.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah
KECAMATAN GEGER
KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025			2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Geger	90	95	Meingkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Geger	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Geger	90	95	
					Nilai SAKIP PD	64	68	

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan
		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11-6	14
	UNSUR KEWILAYAHAN												
1	KECAMATAN GEGER				2.392.278.123	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.361.979.455	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-54.269.595	
01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Geger	100 %	2.348.008.673	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Geger	100 %	2.319.310.005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	609.996.150	
01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	6.790.600	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	6.850.600	Dana Transfer Umum-Dana	-2.049.400	

						Alokasi Umum					Alokasi Umum		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		1 Dokumen	1.452.800		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		1 Dokumen	1.452.800		0	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	1.316.400		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	0		0	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	1.380.300		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	0		0	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	1.380.300		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	1.380.300		0	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	1.260.800		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	1.320.800		0	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		Dokumen	0		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		Dokumen	0		0	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		Dokumen	0		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		Dokumen	0		0	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	2.045.207.273	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	2.039.660.705	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.546.568	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	2.042.011.673		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	2.037.470.405		4.541.268	

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	2.190.300		Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	0		0	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteranJumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran		18 Laporan	1.005.300		Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteranJumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran		18 Laporan	0		0	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Lapaoran Barang Milik Daerah Yang tersusun		100%	1.466.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lapaoran Barang Milik Daerah Yang tersusun		100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun		14 Dokumen	1.466.300		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun		14 Dokumen	0		0	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yng Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Seminar		100%	11.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Aparatur yng Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Seminar		100%	11.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-11.250.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0 Buah	11.250.000		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0 Buah	0		0	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Laporan	0		Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Laporan	0		0	

7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar		1 orang	0		Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar		1 orang	0		0	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia		100%	23.881.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia		100%	14.042.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-11.957.900	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	839.000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	0		0	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		13 Paket	0		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		13 Paket	0		0	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	19.202.100		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	13.202.100		-6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	0		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	0		0	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		9 Laporan	3.840.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		9 Laporan	0		0	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Prasarana Aparatur yang diadakan		100%	27.911.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Prasarana Aparatur yang diadakan		100%	27.911.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27.911.600	

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		Jenis	0		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		Jenis	0		0	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		1 Jenis	27.911.600		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		1 Jenis	27.911.600		27.911.600	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		3 Jenis	0		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		3 Jenis	0		0	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang tersedia		100%	199.495.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang tersedia		100%	195.095.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-14.771.450	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	0		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	0		0	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	12.265.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	12.265.000		0	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		14 Laporan	187.230.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		14 Laporan	0		0	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara		100%	32.006.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang dipelihara		100%	24.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-7.506.700	

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa perijinan kendaraan		2 Unit	24.500.000		Jumlah jasa perijinan kendaraan		2 Unit	24.500.000		0	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara		Unit	0		Jumlah Kendaraan yang dipelihara		Unit	0		0	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Jenia	0		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Jenia	0		0	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	7.506.700		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	0		0	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi	Kec. Gegar	100%	13.250.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi	Kec. Gegar	100%	12.800.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-2.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Dokumen Monografi yang tersusun		100%	7.099.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Dokumen Monografi yang tersusun		100%	6.649.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.649.250	

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya dokumen monografi yang tersusun		1 Laporan	7.099.250		Tersedianya dokumen monografi yang tersusun		1 Laporan	6.649.250		3.649.250	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	6.151.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat yang tersusun		1 Dokumen	6.151.300		Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat yang tersusun		1 Dokumen	6.151.300		0	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Gegar	100%	12.332.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Gegar	100%	11.182.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-1.150.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Mayarakat yang terbina		100%	12.332.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Mayarakat yang terbina		100%	11.182.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-1.150.000	

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan		1 lembaga kemasyarakatan	12.332.900		Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan		1 lembaga kemasyarakatan	11.182.900		-1.150.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina		6 organisasi	0		Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina		6 organisasi	4.790.000		0	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Kec. Gegar	100%	11.521.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Kec. Gegar	100%	11.521.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan/sosialisasi		100%	11.521.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan/sosialisasi		100%	11.521.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		2 koordinasi	11.521.200		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		2 koordinasi	11.521.200		0	

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dan Kelurahan yang mengikuti Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kec. Gegar	80 %	7.164.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa dan Kelurahan yang mengikuti Pembinaan dan Pengawan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kec. Gegar	80 %	7.164.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terdmpingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya,		80 %	7.164.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Desa Yang Terdmpingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya,		80 %	7.164.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi perencanaan dan pelaksanaan APBDesnya		13 Desa	7.164.800		Jumlah desa yang terdampingi perencanaan dan pelaksanaan APBDesnya		13 Desa	7.164.800		0	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengukuti bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa		52 peserta	7.164.800		Jumlah peserta yang mengukuti bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa		52 peserta	0		0	
					2.392.278.123					2.361.979.455			

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Geger merupakan dasar pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk 1 (satu) Semester ke depan yaitu tahun 2024. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Geger selalu mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Geger tahun 2024 disusun yang secara umum sudah mencakup program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Namum demikian dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian Data, oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaanya.

Geger, 09 Agustus 2024

CAMAT GEGER

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN GEGER

FUADI ASYADAN, SH
NIP. 196805292006041003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas Rahmat serta Hidayahnya, maka pada akhirnya kami Tim Penyusunan Renja Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Rencana Kerja ini akan senantiasa dimanfaatkan sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Klampis Kabupaten BangkalanTahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan harapan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan masih banyak terdapat kekurangan/kelemahan disana-sini, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk pebaikan dan kesempurnaan sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya Renja ini.

Bangkalan, Juli 2024

CAMAT KLAMPIS

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN KLAMPIS

[redacted]DI PERDHANA PUTRA, S.IP

NIP. 198810122007011O

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana starategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu. Hasil dari proses tersebut berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menyusun suatu perencanaan yang baik agar mampu meningkatkan Pelayanan yang Prima terhadap Masyarakat sehingga tercipta Good Governace.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Klampis Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Klampis Tahun 2024 - 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rankhil RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Klampis Tahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah di mana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat 1.

Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan maka tujuan Perencanaan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan,

akan bersinergi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 OPD Kecamatan Klampis memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Klampis serta kerangka pendanaan daerah yang secara substansial sesuai dengan visi, misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan RENSTRA) sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses Perencanaan Pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top–Down (Atas–Bawah), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus berjenjang memperhatikan program-program pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Bottom–Up (Bawah–Atas), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder/pemerintah dibawahnya.

   Pendekatan Top-Down dan Bottom–Up diselaraskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

   Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Klampis Tahun 2023 disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang mengacu pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, Renstra OPD Kecamatan Klampis dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Klampis Tahun 2024 adalah :

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
c. Landasan Operasional :

   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (bagi Perangkat Daerah yang memilki target SPM)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
8. Peraturan Menteri …….. Tentang Renstra K/L (Sesuai Kementerian masing-masing Perangkat Daerah)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/RW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2009 Nomor 4/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1D);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Klampis adalah perencanaan OPD dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD Lima tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sampai Semister I Tahun Berjalan.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

BAB IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 OPD Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026 dan Renstra OPD Kecamatan Klampis 2024 – 2026 di mana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Klampis.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Klampis selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Klampis 2024 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2024-2026 Terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keputusan Menteri 050- 3708 Tahun 2020 terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 2.334.416.802 Namun demikian hingga triwulan ke 2 tahun 2024 anggaran yang terserap hanya Rp. 1.325.949.172,- atau sekitar 56,02% dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Adapun rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

1	**7.01.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**
1.1	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terserap sebesar Rp. 900.000 atau 0%
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD terserap sebesar Rp. 651.850 atau 0%
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Belum Terserap sebesar Rp. 651.850 atau 0%
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terserap sebesar Rp. 604.500 atau 0%
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Belum Terserap sebesar Rp. 604.500 atau 0%
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD terserap sebesar Rp. 604.500 atau 0%
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terserap sebesar Rp.0 atau 0%
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terserap sebesar Rp.0 atau 0%.
1.2	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan keluaran Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN yang terserap sebesar Rp. 1.916.660.702, atau 55,59%.
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp.0 Belum Terserap 0%
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 747.850, terserap 100%.
1.3	**7.01.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 0, Terserap 0%.
1.4	**7.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.5	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terserap sebesar Rp.1.004.700 atau 100%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terserap sebesar Rp. 7.944.750, Terserap 44,78%
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 9.000.000,terserap 50%
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terserap sebesar Rp. 0 atau0.
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD belum terserab sebesar 0%
1.6	**7.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 29.749.400 Terserap 85.75%.
1.7	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Rp. 14.240.000 Terserap 22.35%.
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan keluaran Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terserap Rp. 190.280.000 atau 43.35%

1.8	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terserap Rp. 32.314.600 atau 44.34%
	7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.910.000 Terserap 100%.
	7.01.01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 116.709.700Terserap 99.61%.
2	**7.01.02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
2.2	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp. 1.980.000 Belum Terserap 0%.
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
3.1	**7.01.03.2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan keluaran Kegiatan Musrembang yang dilaksanakan terserap sebesar Rp. 5.918.000,- Terserap 74.27%.
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp. 1.468.200 Belum Terserap 0%.
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
4.1	**7.01.04.2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Rp.2.076.200 Terserap 100%.
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
5.1	**7.01.06.2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa Rp. 0 Belum Terserap.
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 0 Belum Terserap.

Dari 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh lima) sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 sampai dengan triwulan 2 (dua) hanya 2 program, 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang terealisasi, 10 sub kegiatan lainnya belum terealisasi dan akan direalisasikan pada triwulan berikutnya dalam tahun berjalan.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel terlampir.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Kecamatan Klampis

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun		Tingkat Capaian Realisasi Target
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**9.525.971.938**		**2.097.791.966**		**2.097.791.966**		**2.061.852.954**			**85%**	**2.322.974.402**		**6.482.619.322**	**68,05**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**80.750.000**		**15.950.000**		**15.950.000**		**15.950.000**			**100**	**3.412.700**		**35.312.700**	**43,73**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dok	14.650.000	0 Dok	2.650.000	1 Dok	2.650.000	1 Dok	2.650.000	100	100,00	1Dok	900.000		6.200.000	42,32081911
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	9.200.000	0 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	100	100,00	1Dok	651.850		4.651.850	50,56358696
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dok	9.200.000	0 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	100	100,00	1Dok	651.850		4.651.850	50,56358696
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 Dok	9.200.000	0 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	100	100,00	1Dok	604.500		4.604.500	50,04891304
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dok	9.200.000	0 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	100	100,00	1Dok	604.500		4.604.500	50,04891304

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	14.650.000	0 Laporan	2.650.000	1 Laporan	2.650.000	1 Laporan	2.650.000	100	100,00	2Lap	-		5.300.000	36,1774744
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	14.650.000	0 Laporan	2.650.000	1 Laporan	2.650.000	1 Laporan	2.650.000	100	100,00	4Lap	-		5.300.000	36,1774744
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**8.064.607.038**		**1.837.739.666**		**1.837.739.666**		**1.807.819.996**			100%	**1.917.408.552**		**5.562.968.214**	**68,98**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Bulan	8.049.354.938	12 Bulan	1.837.739.666	12 Bulan	1.837.739.666	12 Bulan	1.804.327.496	100	98,18	29 Org/12 Bln	1.916.660.702		5.558.727.864	69,06
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	7.752.100	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	2.750.000	100	#DIV/0!	1Lap	-			-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	3 Laporan	7.500.000	0 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	742.500	100	#VALUE!	18Lap	747.850		#VALUE!	#VALUE!
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**		**7.800.000**		**630.000**		630.000		630.000		100,00	100%	**0**		**1.260.000**	**16,15**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Dok	7.800.000	0 Laporan	630.000	14 Laporan	630.000	14 Laporan	630.000		100,00		-		1.260.000	16,15384615
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**		**21.600.000**									100%	**0**		-	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut		21.600.000													
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**118.159.900**		**14.982.300**		**14.982.300**		**14.591.100**			100%	**17.949.450**		**47.522.850**	**40,22**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Unit	5.155.100	0 jenis	322.450	1 Unit	322.450	1 Unit	322.300	100	99,95	10 pket	1.004.700		1.649.450	31,99646952

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1500 Unit	47.813.300	3 Buah	8.418.350	2 Buah	8.418.350	2 Buah	8.027.300	100	93,88	135 paket	7.944.750		24.390.400	51,01
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		51.900.000		4.950.000		4.950.000		4.950.000			35 Paket	9.000.000	730 Pak	18.900.000	39,52875037
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8.291.500		1.291.500		1.291.500		1.291.500			4 Paket	-	8 Pak	2.583.000	#REF!
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5.000.000													
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terpenuhi (Kec. Sepulu)**		**126.289.500**				-		-	**100**	**100,00**		**29.749.400**		**29.749.400**	**23,56**
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan															
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		126.289.500				-		-		-		29.749.400		29.749.400	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**		**849.007.500**		**207.520.000**		**207.520.000**		**202.140.558**	**100**	**100,00**	**100%**	**204.520.000**		**614.180.558**	**72,34**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bulan	44.800.000	12 Bulan	11.200.000	12 Bulan	11.200.000	12 Bulan	6.728.058	100	65,07	12 Lap	14.240.000		32.168.058	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Bulan	804.207.500	12 Bulan	196.320.000	12 Bulan	196.320.000	12 Bulan	195.412.500	100	94,23	9 Lap	190.280.000		582.012.500	72,37
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**		**257.758.000**		**20.970.000**		**20.970.000**		**20.721.300**	**100**	**88,69**	**100%**	**149.934.300**		**191.625.600**	**74,34**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	138.812.000	2 Unit	20.970.000	2 Unit	20.970.000	2 Unit	20.721.300	100	87,56	2 Unit	32.314.600		74.005.900	53,31

7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	6.000.000	0 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	100	100	5 unit	910.000		#VALUE!	#VALUE!
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		112.946.000		0	2 unit		2 unit		100		1 unit	116.709.700		99.609.700	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**JUMLAH KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN**		**16.000.000**		**534.100**		**534.100**		**530.000**	**100**	**100,00**		**1.980.000**		**3.044.100**	**19,03**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan yang diselenggarakan**		**0**				-		-			0%	**0**		-	**#DIV/0!**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal															
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**		**16.000.000**		**534.100**		**534.100**		**530.000**	**100**	**100,00**		**1.980.000**		**3.044.100**	**19,03**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Dok	16.000.000	3 Dok	534.100	1 Dok	534.100	1 Dok	530.000	100	99	1 Lap	1.980.000		3.044.100	19,025625
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**JUMLAH PROGRAM YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA**		**68.650.000**		**14.650.000**		**14.650.000**		**14.650.000**	**100**	**100,00**		**7.386.200**		**36.686.200**	**53,44**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**		**68.650.000**		**14.650.000**		**14.650.000**		**14.650.000**	**100**	**100,00**		**7.386.200**		**36.686.200**	**53,44**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Kegiatan	55.650.000	1 Kegiatan	14.650.000	1 Kegiatan	14.650.000	1 Kegiatan	14.650.000	100	100	22 lembaga kemasyarakatan	5.918.000		35.218.000	63,28

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	13.000.000	0 Kegiatan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	100	#DIV/0!	1 Lap	1.468.200		1.468.200	11,29384615
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**JUMLAH PROGRAM YANG DILAKUKAN**		**14.083.000**		**2.216.500**		**2.216.500**		**2.216.500**	**100**	**100,00**		**2.076.200**		**6.509.200**	**46,22**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Program yang dilakukan**		**14.083.000**		**2.216.500**		**2.216.500**		**2.216.500**	**100**	**100,00**		**2.076.200**		**6.509.200**	**46,22**
7.01.06.2.01.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	14.083.000	0 Kegiatan	2.216.500	1 Kegiatan	2.216.500	1 Kegiatan	2.216.500	100	100	1 Lap	2.076.200		6.509.200	46,22026557
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**JUMLAH PEMBINAAN YANG DILAKSANAKAN**		**24.000.000**				**-**		**-**	**100**	**100,00**		**0**		**-**	**-**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan**		**24.000.000**				**-**		**-**	**100**	**100,00**		**0**		**-**	**-**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	22 Desa	13.500.000	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	100	#DIV/0!	22 Dok	-		-	-
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	117 Peserta	10.500.000	0 Kegiatan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	100	#DIV/0!	22 Lap	-		-	-
	JUMLAH			**9.648.704.938**		**2.115.192.566**		**2.115.192.566**		**2.079.249.454**		**98**		**2.334.416.802**		**6.528.858.822**	**68**

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD Sampai Dengan Semester I Tahun 2024

No	Indikator	Realisasi				Target Renstra 2024	Target Perubahan Renja 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023			
1	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Klampis							
2	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Klampis							
3	Nilai SAKIP Kecamatan Klampis							

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TUJUAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kinerja Unsur Kewilayahan

SASARAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat
2. Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina
3. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table terlampir.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah
KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN

TUJUAN				SASARAN				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat kecamatan klampis	85		Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan klampis	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klampis	85		
					Nilai SAKIP Kecamatan Klampis	48,72		

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLAMPIS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN KLAMPIS							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

		1	1	01	001																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.019.500,00	1.564.500,00	Kab. Bangkalan, Klampis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			4.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
2	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.190.000,00	740.000,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			2.400.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
4	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
5	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.190.000,00	740.000,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			2.400.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.190.000,00	965.000,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			2.400.000,00	KECAMATAN KLAMPIS

	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
8	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
9	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.190.000,00	965.000,00	Kab. Bangkalan, Klampis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			2.400.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
11	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	1.425.600,00	0,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			4.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
12	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
13	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	1.200.150,00	0,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			4.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	21.600.100,00	9.405.250,00	9.405.250,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		21.600.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
15	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			85 %	85 %	1.980.308.574,00	1.940.735.465,00	1.940.735.465,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.979.690.150,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	0,00	1.938.854.715,00	1.939.336.845,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.975.690.150,00	KECAMATAN KLAMPIS

	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
16	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			85 %	85 %	1.980.308.574,00	1.940.735.465,00	1.940.735.465,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.979.690.150,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
17	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			85 %	85 %	1.980.308.574,00	1.940.735.465,00	1.940.735.465,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.979.690.150,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.132.900,00	0,00	Kab. Bangkalan, Klampis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			2.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
18	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			85 %	85 %	1.980.308.574,00	1.940.735.465,00	1.940.735.465,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.979.690.150,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
19	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			85 %	85 %	1.980.308.574,00	1.940.735.465,00	1.940.735.465,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.979.690.150,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	747.850,00	747.850,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			2.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
20	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			85 %	85 %	1.980.308.574,00	1.940.735.465,00	1.940.735.465,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		1.979.690.150,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
21	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	-			85 %	85 %	2.000.000,00	1.838.700,00	1.838.700,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		2.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	0,00	1.838.700,00	0,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			2.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
22	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	

	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	-			85 %	85 %	2.000.000,00	1.838.700,00	1.838.700,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		2.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
23	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	15.290.750,00	18.563.100,00	18.563.100,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.100.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	1.004.700,00	1.004.700,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS

	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
24	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	15.290.750,00	18.563.100,00	18.563.100,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.100.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
25	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	15.290.750,00	18.563.100,00	18.563.100,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.100.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				135 Paket	135 Paket	0,00	8.558.400,00	7.944.750,00	Kab. Bangkalan, Klampis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			12.100.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
26	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	15.290.750,00	18.563.100,00	18.563.100,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.100.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
27	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	15.290.750,00	18.563.100,00	18.563.100,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.100.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			14.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
28	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			85 %	85 %	15.290.750,00	18.563.100,00	18.563.100,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		27.100.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
29	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			85 %	85 %	27.800.000,00	26.999.400,00	26.999.400,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		57.800.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	26.999.400,00	29.749.400,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			57.800.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
30	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			85 %	85 %	27.800.000,00	26.999.400,00	26.999.400,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		57.800.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
31	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			85 %	85 %	209.110.000,00	215.950.000,00	215.950.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		209.087.500,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	16.240.000,00	14.240.000,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			11.200.000,00	KECAMATAN KLAMPIS

	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
32	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			85 %	85 %	209.110.000,00	215.950.000,00	215.950.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		209.087.500,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
33	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			85 %	85 %	209.110.000,00	215.950.000,00	215.950.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		209.087.500,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	0,00	199.710.000,00	188.587.500,00	Kab. Bangkalan, Klampis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			197.887.500,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
34	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			85 %	85 %	209.110.000,00	215.950.000,00	215.950.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		209.087.500,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
35	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			85 %	85 %	30.710.959,00	129.285.000,00	129.285.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		90.300.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	28.375.000,00	48.535.000,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			39.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
36	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			85 %	85 %	30.710.959,00	129.285.000,00	129.285.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		90.300.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
37	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			85 %	85 %	30.710.959,00	129.285.000,00	129.285.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		90.300.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	910.000,00	1.530.000,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			1.300.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
38	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			85 %	85 %	30.710.959,00	129.285.000,00	129.285.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		90.300.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
39	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			85 %	85 %	30.710.959,00	129.285.000,00	129.285.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		90.300.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			50.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS

	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
40	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				85 Indeks	85 Indeks	2.286.820.383,00	2.342.776.915,00	2.345.650.545,00							2.387.577.650,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	-			85 %	85 %	30.710.959,00	129.285.000,00	129.285.000,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		90.300.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	7	01				KECAMATAN							2.309.121.883,00	2.361.654.715,00	2.357.092.945,00							2.421.577.650,00	
41	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi				100 %	100 %	4.000.000,00	2.321.600,00	1.980.000,00							4.500.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan yang terlaksana	-			10 Layanan	10 Layanan	4.000.000,00	2.321.600,00	2.321.600,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		4.500.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	2.321.600,00	1.980.000,00	Kab. Bangkalan, Klampis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			4.500.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
42	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE DESA YANG MENGIKUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100 %	100 %	8.935.000,00	9.436.200,00	7.386.200,00							18.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana	-			2 Koordinasi	2 Koordinasi	8.935.000,00	9.436.200,00	9.436.200,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		18.500.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				22 Lembaga Kemasyarakatan	22 Lembaga Kemasyarakatan	4.935.000,00	7.968.000,00	5.918.000,00	Kab. Bangkalan, Klampis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			14.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	1.468.200,00	1.468.200,00	Kab. Bangkalan, Klampis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			4.500.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
43	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERTANGANI				100 %	100 %	3.366.500,00	2.076.200,00	2.076.200,00							4.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			1 Koordinasi	1 Koordinasi	3.366.500,00	2.076.200,00	2.076.200,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		4.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.366.500,00	2.076.200,00	2.076.200,00	Kab. Bangkalan, Klampis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			4.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
44	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MENINDAKLANJUTI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100 %	100 %	6.000.000,00	5.043.800,00	0,00							7.000.000,00	

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Mendapat Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	100 %	6.000.000,00	5.043.800,00	5.043.800,00			-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum	-		7.000.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				22 Dokumen	22 Dokumen	3.000.000,00	2.581.000,00	0,00	Kab. Bangkalan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			3.500.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				22 Dokumen	22 Dokumen	3.000.000,00	2.462.800,00	0,00	Kab. Bangkalan, Klampis , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Pelayanan Publik , Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum			3.500.000,00	KECAMATAN KLAMPIS
	JUMLAH												**2.309.121.883,00**	**2.361.654.715,00**	**2.357.092.945,00**							**2.421.577.650,00**	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Klampis merupakan dasar pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk 1 (satu) Semester ke depan yaitu tahun 2024. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Klampis selalu mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Klampis tahun 2024 disusun yang secara umum sudah mencakup program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Namum demikian dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian Data, oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk kesempurnaan laporan dan Pelaksanaanya.

Klampis, Juli 2024
CAMAT KLAMPIS

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN KLAMPIS

ARDI PERDHANA PUTRA, S.IP
Pemata tingkat l
NIP.198810122007011002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan Tahun 2024. Perubahan Renja Kecamatan Tanjungbumi tahun 2024 ini merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan untuk periode 1 (satt) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 2018 - 2023 yang telah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjungbumi Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan. Harapan kami, semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya para aparatur di Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bangkalan.

Tanjungbumi, 10 September 2024

CAMAT TANJUNG BUMI

IMAM MAHFUD, SH, MM
Pembina Tk-I (IV/b)
NIP.197307062006041011

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana starategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu. Hasil dari proses tersebut berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menyusun suatu perencanaan yang baik agar mampu meningkatkan Pelayanan yang Prima terhadap Masyarakat sehingga tercipta Good Governace.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjungbumi Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Kecamatan Tanjungbumi Tahun 2018 - 2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanjungbumi Tahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat 1.

Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan maka tujuan Perencanaan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan, akan bersinergi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 OPD Kecamatan Tanjungbumi memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tanjungbumi serta kerangka pendanaan daerah yang secara substansial sesuai dengan visi, misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan RENSTRA) sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses Perencanaan Pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top–Down (Atas–Bawah), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus berjenjang memperhatikan program-program pemerintah di atasnya.

5. Pendekatan Bottom–Up (Bawah–Atas), bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder/pemerintah dibawahnya.

   Pendekatan Top-Down dan Bottom–Up diselaraskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

   Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanjungbumi Tahun 2024 disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang mengacu pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Renstra Kecamatan Tanjungbumi dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanjungbumi Tahun 2022 adalah :

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
c. Landasan Operasional :
   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
   2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
   3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/RW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2009 Nomor 4/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 seri E Tambahan Lembaran Daerah no.76);
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Dearah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47 sei E);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Seri E);
12. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Tanjungbumi);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Tanjungbumi adalah perencanaan OPD dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD Lima tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN INI DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 OPD Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2023 - 2028 dan Renstra OPD Kecamatan Tanjungbumi tahun 2023 – 2028 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Tanjungbumi.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Tanjungbumi selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Tanjungbumi tahun 2024 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2023-2028 Terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 2.575.843.312,- namun demikian hingga akhir triwulan ke 3 tahun 2024 anggaran yang terserap hanya Rp. 1.981.850.561,- atau sekitar 76,94 % dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Evaluasi Renja OPD Kecamatan Tanjungbumi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja OPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Tanjungbumi

3.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Tanjungbumi tahun 2023-2028 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Tanjungbumi yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah

"***Meningkatkan kualitas pelayanan publik ditingkat Kecamatan***"

3.1.2. Sasaran

Adapun sasaran atas tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat
2. Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina
3. Terpenuhinya pelayanan Kesekretariatan

Untuk lebih jelasnya terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan				Sasaran				Keterangan
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator	Target		
		2023	Perubahan			2023	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	85	85	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	85%	85%	
				Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat desa yang dibina	Prosentase aparatur dan masyarakat desa yang terbina	80%	85%	
				Terpenuhinya pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan pelayanan Internal Kesekretariatan	90%	90%	

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan							
1					2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	1				**KECAMATAN**				**2.564.487.702**	**2.564.487.702**	**2.575.843.312**						**2.892.768.774**	
7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Tanjungbumi)	100 %	100 %	**2.531.612.452**	**2.531.612.452**	**2.546.118.062**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**2.833.983.774**	
7	1	1	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	90 %	**3.345.150**	**3.345.150**	**0**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	90 %	**14.061.650**	
7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	**3.345.150**	**3.345.150**	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Dokumen	2.840.300	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	1	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Dokumen	2.787.800	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	1	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Dokumen	2.867.900	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	1	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Dokumen	2.597.750	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	1	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Dokumen	2.967.900	KECAMATAN TANJUNGBUMI
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen								0 Dokumen		

7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Dokumen	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan							0 Laporan		
7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Laporan	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	0 Laporan	0 Laporan								0 Laporan		
7	**1**	**1**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	90 %	90 %	**1.993.589.856**	**1.982.417.263**	**1.982.417.263**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	90 %	**2.192.924.464**	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24 Orang/bulan	2.081.487.702	2.081.487.702	2.107.966.836	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Adanya penyesuaian kebutuhan	24 Orang/bulan	2.189.593.573	KECAMATAN TANJUNGBUMI
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Laporan	3.330.891	KECAMATAN TANJUNGBUMI
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen								0 Dokumen		
7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Laporan	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	0 Laporan	0 Laporan								0 Laporan		
7	**1**	**1**	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	0 %	0 %	**00**	**0**	**0**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**0**	

7	1	1	2,03	5	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Laporan	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
						Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan								0 Laporan		
7	**1**	**1**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat DAerah yang tersusun	0 %	0 %	**0**	**0**	**0**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	90 %	**0**	
7	1	1	2,05	05	Monitoring, Evaluasi & Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi & Penilaian Kinerja Pegawai	0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Paket	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
						Jumlah Monitoring, Evaluasi & Penilaian Kinerja Pegawai	0 Paket	0 Paket								0 Paket		
7	1	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Paket	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
						Jumlah Paket Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Paket	0 Paket										
7	**1**	**1**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	**2.563.024**	**2.563.024**	**2.400.000**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	90 %	**25.684.800**	
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Paket	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
						Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket	0 Paket								0 Paket		
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	**2.563.024**	**2.563.024**	**2.400.000**	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Paket	25.684.800	KECAMATAN TANJUNGBUMI
						Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	8 Paket								8 Paket		
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Paket	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI

						Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0 Paket	0 Paket								3 Paket		
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	3 Paket	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Laporan	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	**1**	**1**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	90 %	90 %	**55.000.000**	**55.000.000**	**53.090.000**							
7	**1**	**1**	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	**55.000.000**	**55.000.000**	**53.090.000**	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Laporan	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	**1**	**1**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 %	90 %	**358.409.576**	**358.409.576**	**347.434.226**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	90 %	**291.924.254**	
7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8 Laporan	3.457.076	3.457.076	2.759.226	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	8 Laporan	8.264.690	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	9.600.000	9.600.000	11.600.000	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi		12 Laporan	16.712.064	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	345.352.500	345.352.500	333.075.000	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	48 Laporan	266.947.500	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	**1**	**1**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	90 %	90 %	**30.807.000**	**30.807.000**	**35.227.000**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	90 %	**324.640.855**	
7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.807.000	30.807.000	35.277.000	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	2 Unit	74.640.855	KECAMATAN TANJUNGBUMI

7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Unit	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Unit	250.000.000	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Tanjungbumi)	85 %	85 %	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**					85 %	**36.349.700**	
7	**1**	**2**	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	85 %	85 %	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**					85 %	**36.349.700**	
7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0 Laporan	4.200.000	4.200.000	4.200.000	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi		0 Laporan	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	1	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Tanjungbumi		14 Dokumen	36.349.700	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	**1**	**2**	2,02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	100 %	**0**	
7	1	2	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	1 Laporan	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kec. Tanjungbumi)	0 %	0 %	**9.775.250**	**9.775.250**	**6.625.250**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 %	**10.407.850**	
7	**1**	**3**	2,01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana	85 %	85 %	**9.775.250**	**9.775.250**	**6.625.250**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	85 %	**10.407.850**	

7	1	3	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9.775.250	9.775.250	6.625.250	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Desa di Kecamatan Tanjungbumi		1 Kegiatan	10.407.850	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	1	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Desa di Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	2 Laporan	7.000.000	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	0 %	0 %	**0**	**0**	**0**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	90 %	**18.000.000**	
7	**1**	**4**	2,01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	0 %	0 %	**0**	**0**	**0**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	90 %	**18.000.000**	
7	1	4	2,01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	12 Laporan	18.000.000	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kec. Tanjungbumi)	0 %	0 %	**18.900.000**	**18.900.000**	**18.900.000**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 %	**22.400.000**	
7	**1**	**6**	2,01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	85 %	85 %	**18.900.000**	**18.900.000**	**18.900.000**				Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	85 %	**22.400.000**	
7	1	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	18.900.000	18.900.000	18.900.000	Kab. Bangkalan, Tanjungbumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Desa di Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Dokumen	22.400.000	KECAMATAN TANJUNGBUMI
7	1	6	2,01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Desa di Kecamatan Tanjungbumi	Refocusing anggaran untuk pemenuhan belanja DAU Earmarked.	0 Dokumen	0	KECAMATAN TANJUNGBUMI

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini merupakan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 Hal ini sebagai landasan bagi Pemerintah Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun 2024. Program kegiatan berdasarkan pada Renstra serta aspirasi dan situasi kondisi yang menjadi kebutuhan di Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Tanjungbumi tahun 2024 disusun yang secara umum sudah mencakup program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Namum demikian dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian Data, oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaanya.

Ditetapkan di : T A N J U N G B U M I
Pada Tanggal : 10 September 2024

CAMAT TANJUNG BUMI

IMAM MAHFUD, SH, MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP.197307062006041011

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Proses penyusunan Renja PD terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap pelaksanaan forum PD, tahap perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan Renja PD. Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan sifatnya lebih operasional.

Selanjutnya Renja PD dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sepulu Tahun 2024adalah :

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan
   Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

   Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) yang telah dimuktahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor1/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengeloalaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27/E);
18. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 32 Seri D)
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)
20. Perbup Tupoksi PD;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sepulu adalah Perencanaan dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

TUJUAN :

Adapun Tujuan penyusunan Renja PD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan

1.4. SISTEMATIKA RANCANGAN AKHIR KERJA

Penyempurnaan rancangan Renja PD, bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang tertuang dalam RKPD dengan sistematika rancangan akhir Renja PD sebagai Berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/ NSPK/ IKK/ IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024

3.2. Matriks Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

BAB IV. Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER 1 TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja tahun 2024 OPD Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026 dan Renstra OPD Kecamatan Sepulu tahun 2024 – 2026 dimana tetap memperhatikan isu –isu dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Sepulu.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sepulu selama1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Sepulu Tahun 2024 menyesuaikan dengan Program/Kegiatan pada Renstra PD Tahun 2024-2026 Terhadap pemutakhiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keputusan Menteri 050-3708 Tahun 2020 terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan, adapun Program – program tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari semua program yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 tersebut tersedia anggaran sebesar Rp. 2.590.871.367,- namun demikian hingga triwulan ke II tahun 2024 anggaran yang terserap hanya Rp. 1.457.047.758,- atau sekitar 56,24 % dari total anggaran dan sisa anggaran akan dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Adapun rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

1	**7.01.01**	**Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**
1.1	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang terserap Rp. 783.200 atau 100%
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan keluaran Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN yang terserap sebesar Rp. 1.197.442.662,- atau 57,10%
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.3	**7.01.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD
	7.01.01.2.03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terserap sebesar Rp. 719.350,- atau 100%
1.4	**7.01.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.5	**7.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terserap Rp. 587.400 atau 100%
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terserap Rp. 1.723.500 atau 33,81%
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.6	**7.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terserap Rp. 810.000,- atau 22,50%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terserap Rp. 5.533.696,- atau 41,92%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan keluaran Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terserap Rp. 162.372.500,- atau 47,00%
1.7	**7.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terserap Rp. 14.634.500,- atau 49,84%
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terserap Rp. 24.778.000,- atau 99,11%
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terserap Rp. 31.770.150,- atau 100%
2	**7.01.02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
2.1	**7.01.02.2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.2	**7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
3.1	**7.01.03.2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang terserap Rp. 11.550.000,- atau 100%
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

4.1	**7.01.04.2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
5.1	**7.01.06.2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terserap Rp. 4.342.800,- atau 100%

Dari 5 (Lima) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 sampai dengan triwulan 2 (Dua) hanya 3 program, 8 kegiatan dan 12 sub kegiatan yang terealisasi, sedangkan sub kegiatan lainnya belum terealisasi dan akan direalisasikan pada triwulan berikutnya dalam tahun berjalan.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel terlampir.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Bangkalan

Perangkat Daerah : Kecamatan Sepulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program / Kegiatan pada akhir periode Renstra PD Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja PD tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100%		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)* 100
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.1.01	KECAMATAN																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.071.054.067	99,29 %	2.410.470.735	100 %	2.427.691.647	99,29 %	2.410.470.735	99,29%	99,29 %	Indeks	2.567.405.967	Indeks	7.388.347.437	91,54

7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**51.000.000**	**100 %**	**5.675.400**	**100 %**	**5.675.400**	**100 %**	**5.675.400**	**100%**	**100%**	**100 %**	**6.845.900**	**100 %**	**18.196.700**	**35,68**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	15.000.000	1 Dok	2.488.400	2 Dok	2.488.400	1 Dok	2.488.400	1 Dok	100%	1 Dok	2.382.400	1 Dok	7.359.200	49,06
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dok	6.000.000	1 Dok	1.667.000	1 Dok	1.667.000	1 Dok	1.667.000	1 Dok	100%	1 Dok	783.200	1 Dok	4.117.200	68,62
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dok	6.000.000	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	#DIV/0!	1 Dok	883.400	1 Dok	883.400	14,72
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dok	6.000.000	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	#DIV/0!	1 Dok	709.300	1 Dok	709.300	11,82
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dok	6.000.000	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	#DIV/0!	1 Dok	754.600	1 Dok	754.600	12,58
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dok	6.000.000	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	#DIV/0!	1 Dok	745.600	1 Dok	745.600	12,43

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	6.000.000	1 Lap	1.520.000	1 Lap	1.520.000	1 Lap	1.520.000	1 Lap	100%	2 Lap	587.400	2 Lap	3.627.400	60,46
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**6.556.154.067**	**99,44 %**	**1.998.164.313**	**100 %**	**2.009.444.257**	**99,44 %**	**1.998.164.313**	**99,44%**	**99%**	**100 %**	**2.099.957.967**	**100 %**	**6.096.286.593**	**92,99**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Org	6.538.154.067	26 Org	1.997.170.913	27 Org	2.008.450.857	26 Org	1.997.170.913	26 Org	99%	26 Org	2.097.071.367	26 Org	6.091.413.193	93,17
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Lap	6.000.000	1 Lap	993.400	1 Lap	993.400	1 Lap	993.400	1 Lap	100%	1 Lap	695.600	1 Lap	2.682.400	44,71
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Lap	6.000.000	18 Lap	-	18 Lap	-	18 Lap	-	18 Lap	#DIV/0!	18 Lap	1.408.400	18 Lap	1.408.400	23,47
7.01.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	3 Dok	6.000.000	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	#DIV/0!	1 Dok	782.600	1 Dok	782.600	13,04
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**9.000.000**	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100 %**	**1.887.750**	**100 %**	**1.887.750**	**20,98**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuha Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	6 Lap	4.500.000	3 Lap	-	3 Lap	-	3 Lap	-	3 Lap	#DIV/0!	2 Lap	1.168.400	2 Lap	1.168.400	25,96

7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	4.500.000	4 Lap	-	4 Lap	-	4 Lap	-	4 Lap	#DIV/0!	4 Lap	719.350	4 Lap	719.350	15,99
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**100 %**	**23.000.000**	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48 Pak	23.000.000	16 Pak	-	16 Pak	-	16 Pak	-	16 Pak	#DIV/0!	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**151.542.000**	**100 %**	**1.904.490**	**100 %**	**1.904.490**	**100 %**	**1.904.490**	**100%**	**100%**	**100 %**	**9.519.200**	**100 %**	**13.328.180**	**8,80**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30 Pak	9.000.000	10 Pak	963.290	10 Pak	963.290	10 Pak	963.290	10 Pak	**100%**	10 Pak	587.400	10 Pak	2.513.980	27,93
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Pak	69.200.000	10 Pak	-	10 Pak	-	10 Pak	-	10 Pak	#DIV/0!	10 Pak	5.097.000	10 Pak	5.097.000	7,37
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45 Pak	13.000.000	15 Pak	941.200	15 Pak	941.200	15 Pak	941.200	15 Pak	100%	15 Pak	639.800	15 Pak	2.522.200	19,40
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Pak	9.000.000	2 Pak	-	2 Pak	-	2 Pak	-	2 Pak	#DIV/0!	2 Pak	1.800.000	2 Pak	1.800.000	20,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Pak	13.692.000	2 Pak	-	2 Pak	-	2 Pak	-	2 Pak	#DIV/0!	2 Pak	1.395.000	2 Pak	1.395.000	10,19
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Lap	7.650.000	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	#DIV/0!	1 Lap	-	1 Lap	-	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Lap	30.000.000	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	#DIV/0!	1 Lap	-	1 Lap	-	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1.035.710.000**	**98,82 %**	**378.894.532**	**100 %**	**383.412.500**	**98,82 %**	**378.894.532**	**99%**	**99%**		**361.920.000**		**1.119.709.064**	**108,11**

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Lap	15.000.000	3 Lap	2.500.000	3 Lap	3.050.000	3 Lap	2.500.000	3 Lap	82%	3 Lap	3.600.000	3 Lap	8.600.000	57,33
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Lap	39.600.000	1 Lap	11.405.629	1 Lap	13.200.000	1 Lap	11.405.629	1 Lap	86%	12 Lap	13.200.000	12 Lap	36.011.258	90,94
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Lap	981.110.000	1 Lap	364.988.903	1 Lap	367.162.500	1 Lap	364.988.903	1 Lap	99%	12 Lap	345.120.000	12 Lap	1.075.097.806	109,58
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**100 %**	**244.648.000**	**94,78 %**	**25.832.000**	**100 %**	**27.255.000**	**94,78 %**	**25.832.000**	**95%**	**95%**		**87.275.150**		**138.939.150**	**56,79**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	21 Unit	92.000.000	7 Unit	24.232.000	7 Unit	25.655.000	7 Unit	24.232.000	7 Unit	94%	7 Unit	29.305.000	7 Unit	77.769.000	84,53
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	3 Unit	2.250.000	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	#DIV/0!	6 Unit	1.200.000	6 Unit	1.200.000	53,33
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 Unit	89.500.000	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	#DIV/0!	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	27,93
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	60.898.000	1 Unit	1.600.000	1 Unit	1.600.000	1 Unit	1.600.000	1 Unit	100%	1 Unit	31.770.150	1 Unit	34.970.150	57,42

7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**100 %**	**36.000.000**	**100 %**	**628.500**	**100 %**	**628.500**	**100 %**	**628.500**	**100%**	**100%**	**100 %**	**2.504.800**	**100 %**	**3.761.800**	**10,45**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang terlaksana**	**100 %**	**21.000.000**	**1 Koord**	**-**	**1 Koord**	**-**	**1 Koord**	**-**	**1 Koord**	**#DIV/0!**	**1 Koord**	**1.287.800**	**1 Koord**	**1.287.800**	**6,13**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Lap	21.000.000	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	#DIV/0!	1 Lap	1.287.800	1 Lap	1.287.800	6,13
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100 %**	**15.000.000**	**1 Lay**	**628.500**	**1 Lay**	**628.500**	**1 Lay**	**628.500**	**#VALUE!**	**100%**	**100 %**	**1.217.000**	**100 %**	**2.474.000**	**16,49**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Lap	15.000.000	1 Lap	628.500	1 Lap	628.500	1 Lap	628.500	1 Lap	**100%**	1 Lap	1.217.000	1 Lap	2.474.000	16,49
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Desa yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 %**	**69.000.000**	**100 %**	**10.317.800**	**100 %**	**10.317.800**	**100 %**	**10.317.800**	**100%**	**100%**	**100 %**	**11.550.000**	**100 %**	**32.185.600**	**46,65**

7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**69.000.000**	**100 %**	**10.317.800**	**100 %**	**10.317.800**	**100 %**	**10.317.800**	**100%**	**100%**	**100 %**	**11.550.000**	**100 %**	**32.185.600**	**46,65**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lmbg Kmasy	45.000.000	4 Koord	10.317.800	4 Koord	10.317.800	4 Koord	10.317.800	4 Koord	**100%**	4 Koord	11.550.000	4 Koord	32.185.600	71,52
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Lap	24.000.000	3 Lap	-	3 Lap	-	3 Lap	-	3 Lap	#DIV/0!	-	-	-	-	-
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**100 %**	**54.000.000**	**100 %**	**8.616.400**	**100 %**	**8.616.400**	**100 %**	**8.616.400**	**100%**	**100%**	**100 %**	**5.067.800**	**100 %**	**22.300.600**	**41,30**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**54.000.000**	**100 %**	**8.616.400**	**100 %**	**8.616.400**	**100 %**	**8.616.400**	**100%**	**100%**	**100 %**	**5.067.800**	**100 %**	**22.300.600**	**41,30**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Lap	30.000.000	1 Lap	8.616.400	1 Lap	8.616.400	1 Lap	8.616.400	1 Lap	100%	1 Lap	5.067.800	1 Lap	22.300.600	74,34
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat yang terbina	3 Lap	24.000.000	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	#DIV/0!	1 Lap	-	1 Lap	-	-

7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 %**	**30.000.000**	**100 %**	**7.672.800**	**100 %**	**7.672.800**	**100 %**	**7.672.800**	**100%**	**100%**	**100 %**	**4.342.800**	**100 %**	**19.688.400**	**65,63**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**30.000.000**	**100 %**	**7.672.800**	**100 %**	**7.672.800**	**100 %**	**7.672.800**	**100%**	**100%**	**100 %**	**4.342.800**	**100 %**	**19.688.400**	**65,63**
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dok	30.000.000	1 Dok	7.672.800	1 Dok	7.672.800	1 Dok	7.672.800	1 Dok	100%	1 Dok	4.342.800	1 Dok	19.688.400	65,63
				8.260.054.067	**99,30 %**	**2.437.706.235**		**2.454.927.147**	**99,30 %**	**2.437.706.235**		**99,30 %**		**2.590.871.367**		**7.466.283.837**	**255,56**

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN INDIKATOR SPM/NSPK/IKK/IKD SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2024

Dalam analisis kinerja pelayanan perangkat daerah ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK.

Jenis indikator yang dikaji sesuai dengan tugas dan fungsi PD Kecamatan Sepulu. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepulu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja PD.Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sepulu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam pencapian kinerja pelayanan di Kecamatan Sepulu antara lain :

1. Indeks kepuasan masyarakat kecamatan Sepulu
2. Nilai SAKIP Kecamatan Sepulu

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Sepulu

No	Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD	Realisasi				Target Renstra Tahun 2024	Target Perubahan Renja Tahun 2024	Keterangan (Penjelasan Jika ada Perubahan Target
		2020	2021	2022	2023			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sepulu	27.500.000	10.310.000	51.476.850	27.235.500	100%	100%	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Sepulu	2.626.012.155	2.415.249.025	2.690.883.726	2.410.470.735	90%	90%	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, berpijak pada dua hal penting yaitu keselarasan dengan kebijakan pusat termasuk provinsi dan kondisi lokal yang sedang dihadapi. Kondisi lokal yang dimaksud adalah tantangan dan permasalahan pembangunan di tingkat lokal.

Keselarasan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dengan kebijakan pusat terdiri dari kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi, dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan pemerintah pusat tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. Tema RKP tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Kemudian kebijakan RKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan

Berakhlak". Selanjutnya, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan dan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yaitu :

1. Pemulihan ekonomi berkualitas melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan iklim investasi dan kemandirian pangan serta perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan layanan infrastruktur, pengembangan wilayah berwawasan lingkungan dan ketahanan bencana;
3. Penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, layanan sosial serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum.

Semua program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sepulu tahun 2024 merupakan implementasi dari prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, sebagai contoh yaitu kegiatan–kegiatan yang ada pada Program Koordinasi, Pembinaan, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antara lain kegiatanFasilitasiPenyelenggaraanMusrenbang RKPD di Tingkat

Desa dan Kecamatan. Kegiatan ini merupakan media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginannya, semua aspirasi pembangunan di desa mulai dari peningkatan infrastruktur, perbaikan ekonomi masyarakat hingga pada kegiatan sosial budaya yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diusulkan melalui kegiatan ini.

Kegiatan Sosialisasi Ketertiban dan Keamanan Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat adalah merupakan bentuk dari OPD Kecamatan Sepulu untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di lingkungan masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin merupakan bentuk dari OPD Kecamatan Sepulu untuk membantu masyarakat miskin agar memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Kegiatan Pendampingan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes adalah upaya dari OPD Kecamatan Sepulu untuk mengawal pelaksanaan Pembangunan dari semua desa di wilayah Kecamatan Sepulu agar dana yang diterima baik dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun dari Pemerintah Pusat dapat tepat sasaran sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		Renstra 2024	Perubahan Renja Th. 2024			Renstra 2024	Perubahan Renja Th. 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Pelayanan Publik Berkualitas di Tingkat Kecamatan	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sepulu**	93%	96%	**Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sepulu**	**Indeks Kepuasan Msyarakat Kecamatan Sepulu**	93%	96%	
					Nilai SAKIP Kecamatan Sepulu	65%	70%	

3.2 MATRIK RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH

Untuk mengimplementasikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah, Untuk lebih jelasnya terlihat pada table terlampir

Lihat Tabel 3.2

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Sepulu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11-6	14
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7.1.01	**KECAMATAN**												
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kec. Sepulu**	**90 Indeks**	**2.567.405.967**	**DAU**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kec. Sepulu**	**90 Indeks**	**2.571.087.502**	**DAU**	**3.681.535**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Sepulu**	**90%**	**6.845.900**	**DAU**	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Sepulu**	**90%**	**4.865.000**	**DAU**	**(1.980.900)**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sepulu	1 Dok	2.382.400	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sepulu	1 Dok	1.615.600	DAU	(766.800)	Efisiens Anggaran

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sepulu	1 Dok	783.200	DAU	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sepulu	1 Dok	783.200	DAU	-	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sepulu	1 Dok	883.400	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sepulu	1 Dok	500.000	DAU	(383.400)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Sepulu	1 Dok	709.300	DAU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Sepulu	1 Dok	517.600	DAU	(191.700)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sepulu	1 Dok	754.600	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sepulu	1 Dok	499.000	DAU	(255.600)	Efisiens Anggaran

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sepulu	1 Lap	745.600	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sepulu	1 Lap	490.000	DAU	(255.600)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sepulu	2 Lap	587.400	DAU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sepulu	2 Lap	459.600	DAU	(127.800)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kec. Sepulu**	**95%**	**2.099.957.967**	**DAU**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kec. Sepulu**	**95%**	**2.122.319.102**	**DAU**	**22.361.135**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sepulu	26 Org/Bln	2.097.071.367	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sepulu	26 Org/Bln	2.121.294.102	DAU	24.222.735	Kenaikan Gaji 8% dan Rapelan Kekurangan Gaji 2024
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sepulu	1 Lap	695.600	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sepulu	1 Lap	-	DAU	(695.600)	Efisiens Anggaran

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Sepulu	18 Lap	1.408.400	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Sepulu	18 Lap	1.025.000	DAU	(383.400)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Kec. Sepulu	1 Dok	782.600	DAU	Jumlah pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Kec. Sepulu	1 Dok	-	DAU	(782.600)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kec. Sepulu**	**87%**	**1.887.750**	**DAU**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kec. Sepulu**	**87%**	**719.350**	**DAU**	**(1.168.400)**	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuha Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kec. Sepulu	2 Dok	1.168.400	DAU	Jumlah Laporan penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kec. Sepulu	2 Dok	-	DAU	(1.168.400)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sepulu	4 Lap	719.350	DAU	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sepulu	4 Lap	719.350	DAU	-	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kec. Sepulu**	**97%**	**-**	**DAU**	**PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kec. Sepulu**	**97%**	**-**	**DAU**	**-**	

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sepulu	30 Paket	-	DAU	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sepulu	30 Paket	-	DAU	-	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Sepulu**	**87%**	**9.519.200**	**DAU**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Sepulu**	**87%**	**5.760.900**	**DAU**	**(3.758.300)**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sepulu	10 Paket	587.400	DAU	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sepulu	10 Paket	587.400	DAU	-	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sepulu	10 Paket	5.097.000	DAU	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sepulu	10 Paket	3.373.500	DAU	(1.723.500)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sepulu	15 Paket	639.800	DAU	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sepulu	15 Paket	-	DAU	(639.800)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sepulu	2 Paket	1.800.000	DAU	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sepulu	2 Paket	1.800.000	DAU	-	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sepulu	2 Paket	1.395.000	DAU	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sepulu	2 Paket	-	DAU	(1.395.000)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sepulu	1 Laporan	-	DAU	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sepulu	1 Laporan	-	DAU	-	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sepulu	1 Laporan	-	DAU	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sepulu	1 Laporan	-	DAU	-	

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Sepulu**	**90%**	**361.920.000**	**DAU**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Sepulu**	**90%**	**350.770.000**	**DAU**	**(11.150.000)**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sepulu	3 Laporan	3.600.000	DAU	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sepulu	3 Laporan	2.600.000	DAU	(1.000.000)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sepulu	12 Laporan	13.200.000	DAU	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sepulu	12 Laporan	13.200.000	DAU	-	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sepulu	12 Laporan	345.120.000	DAU	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sepulu	12 Laporan	334.970.000	DAU	(10.150.000)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**Kec. Sepulu**	**90%**	**87.275.150**	**DAU**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	**Kec. Sepulu**	**90%**	**86.653.150**	**DAU**	**(622.000)**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kec. Sepulu	7 unit	29.305.000	DAU	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kec. Sepulu	7 unit	29.305.000	DAU	-	

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	Kec. Sepulu	1 unit	1.200.000	DAU	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	Kec. Sepulu	1 unit	800.000	DAU	(400.000)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec. Sepulu	6 unit	25.000.000	DAU	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec. Sepulu	6 unit	24.778.000	DAU	(222.000)	Efisiens Anggaran
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec. Sepulu	1 unit	31.770.150	DAU	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec. Sepulu	1 unit	31.770.150	DAU	-	
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**Kec. Sepulu**	**100%**	**2.504.800**	**DAU**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi**	**Kec. Sepulu**	**100%**	**-**	**DAU**	**(2.504.800)**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang terlaksana**	**Kec. Sepulu**	**1 Koordinasi**	**1.287.800**	**DAU**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang terlaksana**	**Kec. Sepulu**	**1 Koordinasi**	**-**	**DAU**	**(1.287.800)**	

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sepulu	1 Laporan	1.287.800	DAU	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sepulu	1 Laporan	-	DAU	(1.287.800)	Efisiens Anggaran
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kec. Sepulu**	**1 Laporan**	**1.217.000**	DAU	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kec. Sepulu**	**1 Laporan**	-	DAU	**(1.217.000)**	Efisiens Anggaran
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepulu	1 Laporan	1.217.000	DAU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepulu	1 Laporan	-	DAU	(1.217.000)	Efisiens Anggaran
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Desa yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Sepulu**	**100%**	**11.550.000**	**DAU**	**Persentase Desa yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Sepulu**	**100%**	**11.550.000**	**DAU**	-	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Sepulu**	**2 Koordinasi**	**11.550.000**	**DAU**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Sepulu**	**2 Koordinasi**	**11.550.000**	**DAU**	-	

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sepulu	4 Lembaga	11.550.000	DAU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sepulu	4 Lembaga	11.550.000	DAU	-	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepulu	1 Laporan	0	DAU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepulu	1 Laporan	0	DAU	-	
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**Kec. Sepulu**	**100%**	**5.067.800**	**DAU**	**Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**Kec. Sepulu**	**100%**	**5.067.800**	**DAU**	-	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Sepulu**	**1 Laporan**	**5.067.800**	**DAU**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Sepulu**	**1 Laporan**	**5.067.800**	**DAU**	-	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepulu	1 Laporan	5.067.800	DAU	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepulu	1 Laporan	5.067.800	DAU	-	

7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat yang terbina	Kec. Sepulu	1 Laporan	0	DAU	Jumlah Laporan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat yang terbina	Kec. Sepulu	1 Laporan	0	DAU	-	
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec. Sepulu**	**100%**	**4.342.800**	**DAU**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kec. Sepulu**	**100%**	**4.342.800**	**DAU**	-	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Sepulu**	**1 Dokumen**	**4.342.800**	**DAU**	**Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Sepulu**	**1 Dokumen**	**4.342.800**	**DAU**	-	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sepulu	1 Dokumen	4.342.800	DAU	Persentase desa yang mendapat Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sepulu	1 Dokumen	4.342.800	DAU	-	
					2.590.871.367					**2.592.048.102**		**1.176.735**	

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat kondisi terkini kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Sepulu maupun partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Sepulu merupakan Dasar Pedoman Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun 2024. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Sepulu selalu mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Sepulu tahun 2024 disusun yang secara umum sudah mencakup Program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Sepulu Tahun 2024 merupakan bagian penting dari serangkaian perencanaan kegiatan untuk dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dan Stakeholder maupun masyarakat untuk merumuskan perubahan rencana kerja sehingga tercapai sinergi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan. Untuk itu dibutuhkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh OPD Kecamatan Sepulu, Stakehlder maupun masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan serta mendukung program-program dalam perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya
2. Menjaga efektifitas pelaksanaan Program dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Rencana Tindak Lanjut dalam pelaksanaan Program dari serangkaian perencanaan kegiatan untuk mencapai arah tujuan dan

sasaran dibutuhkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaanya.

Sepulu, Agustus 2024

CAMAT SEPULU

ABUDUL HADI, SE.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196804131996021002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas Rahmat serta Hidayahnya, maka pada akhirnya kami Tim Penyusunan Renja Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Rencana Kerja ini akan senantiasa dimanfaatkan sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan harapan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan masih banyak terdapat kekurangan/kelemahan disana-sini, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk pebaikan dan kesempurnaan sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya Renja ini.

Agustus 2024

CAMAT KOKOP

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN KOKOP

URIP RIYANTO, S.SOS
Pembina
NIP. 19730704 200801 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA OPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kokop dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kokop Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kokop tahun 2024, capaian pembangunan Kecamatan Kokop tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan usulan kegiatan di Kecamatan Kokop pada Tahun 2024 yang memuat prioritas pembangunan Kecamatan Kokop yang dijabarkan dalam program dan target pencapaian program untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan Kecamatan Kokop di Kabupaten Bangkalan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kokop Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang

akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kokop untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA OPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024 Kecamatan Kokop didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku,yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Rrepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2014 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37)
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18/E);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)

13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD 3 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

Adapun Tujuan penyusunan Renja OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah– langkah/ kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.2. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun Berjalan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024)

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024 PD

3.2 Program dan Kegiatan

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024

BAB IV. Penutup

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI SEMESTER I TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester I Tahun Berjalan (2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan tetap mengacu pada RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024- 2026 dan Renstra Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan 2024-2026, dimana tetap memperhatikan isu-isu yang berkembang di Kecamatan Kokop.

Dengan adanya Rencana Kerja tersebut kita dapat menentukan arah Tahun 2024 dimana ada 5 Program dan 13 Kegiatan serta 30 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
e. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari program-program diatas, Belanja Pembangunan Kecamatan Kokop pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.564.105.251,- dan sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.409.248.548,- atau terealisir 54,61% dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan, dengan rincian program dan kegiatan antara lain :

I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

a). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 3.044.800,- .Keluaran kegiatan ini

adalah Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.044.800,- atau sebesar 100%.

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan :

a). Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 6.642.700,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.642.700,- atau sebesar 100%.

b) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan SDM yang berkualitas dan Berdaya saing dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.022.400,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 2.572.400,. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang mengikutu peningkatan kesdaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan SDm yang berkualitas dan berdaya saing. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.572.400,- atau sebesar 100%.

III. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan Kegiatan :

c). Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah dengan alokasi dana sebesar Rp 3.074.800,- Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan sinergistas yang dilaksanakan. Realisasi dari kegiatan

ini adalah sebesar Rp. 3.074.800,- atau sebesar 100%.

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan dengan Kegiatan :

d). Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan dengan Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan alokasi dan sebesar Rp. 3.053.350,- setelah adanya Keluaran kegiatan adalah Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.053.350,- atau sebesar 100%
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan alokasi awal sebesar Rp. 0,- Keluaran kegiatan adalah Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mengikuti diklat/bimtek. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

dengan Kegiatan :

e). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 1.612.350,-, Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.612.350,- atau sebesar 100%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 1.612.500, Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.612.500,- atau sebesar 100%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 1.462.500, Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.462.500,- atau sebesar 100%.

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 1.392.600,-Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.392.600,- atau sebesar 100%.
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 1.458.600,-Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.458.600,- atau sebesar 100%.
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 1.555.150, Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.555.150,- atau sebesar 100%.
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 1.342.750, Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.342.750,- atau sebesar 100%.

f). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 2.109.847.392,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 2.095.240.251,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.195.041.763,- atau sebesar 56.64%.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 1.026.300,-.Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.026.300,- atau sebesar 100%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 1.104.750,- Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/semester. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.104.750,- atau sebesar 100%.

g). Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.862.900,- Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.862.900,- atau sebesar 100%.

h). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.434.500,- Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.434.500,- atau sebesar 100%.

i). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.687.750,- Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.687.750,- atau sebesar 100%.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.605.950,- Keluaran kegiatan ini Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.605.950,- atau sebesar 100%.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.800.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 525.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Realisasi dari

kegiatan ini adalah sebesar Rp. 525.000,- atau sebesar 100%.

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.632.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 2.132.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp2.132.000,- atau sebesar 100%.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinassi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.000.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 0,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

j). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 44.100.600,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 40.484.600,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.484.600,- atau sebesar 100%.

k). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.810.000,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 1.800.000,-Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.800.000,- atau sebesar 100%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.840.000,- setelah adanya penambahan anggaran alokasi dana

berubah menjadi sebesar Rp. 25.140.000,-Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.119.017,- atau sebesar 43.09%.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 245.227.500,- setelah adanya rekorfusing atau pengurangan anggaran alokasi dana berubah menjadi sebesar Rp. 241.327.500,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 102.925.268,- atau sebesar 41.97%.

l). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 1.800.000,- Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.800.000,- atau sebesar 100%.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 30.593.250,-. Setelah adanya Penambahan berubah menjadi sebesar Rp. 34.209.250,-Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 34.209.250,- atau sebesar 100%.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 1.900.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.900.000,- atau sebesar 100%.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana awal sebesar

Rp. 80.000.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Realisasi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 80.000.000,- atau sebesar 100%.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kabupaten Bangkalan

Nama PD : KECAMATAN KOKOP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Program/ Kegiatan pada akhir periode Renstra Perangkat Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Progr Perangkat D	a
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (0%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)		
7.01.03.16.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Survey Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	100 %	100 %	100%	100 %	100		
7.01.03.16.01	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	30 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6	
		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	100 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100	20	
7.01.03.16.02	Kegiatan Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	140 Kali	28 Kali	28 Kali	28 Kali	100	28	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	50 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100	10	
7.01.03.16.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah yang tersusun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1	
7.01.03.16.04	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	15 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	3	
		Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	50 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1	
7.01.03.16.05	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	
		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	15 Jenis	0 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6	

7.01.03.16.06	Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan Kelengkapan yang diadakan	175	Buah	35	Buah	35	Buah	35	Buah	100	35
7.01.03.16.07	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar Keikutsertaan Bimtek	20	Orang	3	Orang	3	Orang	3	Orang	100	3
7.01.03.16.08	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD	Jumlah Data dan Informasi Perangkat Daerah	20	Data	1	Data	1	Data	1	Data	100	1
		Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3
		Jumlah Dokumen Pengangaran PD yang tersusun	20	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4
7.01.03.16.09	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja DP	Jumlah Laporan Triwulan & Semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)	40	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100	8
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja PD yang TersusunPD yang tersusun	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1
7.01.03.16.10	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan PD yang tersusun per semester / prognosisi / akhir tahun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0
		Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1
		Jumlah Laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran	90	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100	18
7.01.03.16.10	Kegiatan Fasilitasi Peringatan hari Jadi Nasional/Provinsi/ Kabupaten	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	10	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	2
01.03.02	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Persentase pelayanan umum yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%		100,00	
01.03.02.01	Kegiatan Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang Tersusun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1

01.03.03	Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana	100%		100%		100%		100%		100,00	
01.03.02.01	Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Kelurahan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	180	Peserta	36	Peserta	36	Peserta	36	Peserta	100,00	36
01.03.03.02	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin	Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin yang terlaksana	6	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00	1
01.03.03.03	Kegiatan Pendampingan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesa	Jumlah desa yang terdampingi perencanaan dan pelaksanaan APBDesnya	65	Desa	13	Desa	13	Desa	13	Desa	100,00	13
01.03.03.04	Kegiatan Sosialisasi Ketertiban dan Keamanan tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan	260	Peserta	52	Peserta	52	Peserta	52	Peserta	100,00	52
01.03.03.05	Kegiatan Database Monografi Kecamatan	Dokumen Monografi Kecamatan yang tersusun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1
01.03.03.06	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	65	Organisasi	13	Organisasi	13	Organisasi	13	Organisasi	100,00	13
01.03.03.07	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	5	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100,00	1
01.03.03.08	Kegiatan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan/sosialisasi	260	Orang	52	Orang	52	Orang	52	Orang	100,00	52
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020												
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	42	Bln	14	Bln	14	Bln	14	Bln	100	14
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100	18
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0	26

7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Laporan	3	Laporan	3	laporan	3	Laporan	100	3
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100	5
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27	Unit	9	Unit	0	Unit	9	Unit	100	9
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16	Unit	4	Unit	0	Unit	4	Unit	100	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100	3
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Kali	10	Kali	10	Kali	10	Kali	100	10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	3
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	18	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100	6
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100	2
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100	2
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Jenis	12	Jenis	12	Jenis	12	Jenis	100	12
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100	2
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100	2
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100	2
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan											
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	0	Dok	0	Dok	0	Dok	0	Dok	0	0
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun										
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	100	1
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	0
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	KegiatanPemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan										CAMAT KO
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran keluarga dalam penngkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kegiatan Peningkatan Kesadaran keluarga dalam penngkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang dilaksanakan	3	kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	1
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											URIP RIYA Pembina
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											NIP. 19730
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	3	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	1
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	39	Desa	13	Desa	12	Desa	13	Desa	100	13
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	78	Peserta	0	Peserta	0	Peserta	0	Peserta	0	26

Kokop, A

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN KOKOP

Tabel
2.2

Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester I Tahun 2024

NO.	Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD	REALISASI				TARGET RENSTRA TAHUN 2024	TARGET RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KET.
		2020	2021	2022	2023			
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	80	82	83	85,32	87,37	87,37	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Kokop				45,95	60	60	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Untuk mengimplementasikan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024, maka tujuan dan sasaran perubahan perlu dijabarkan sebagai berikut :

Lihat Table 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2024
Kecamatan Kokop

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Target Perubahan Renja 2024	Uraian	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Target Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik berkualitas di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Kokop	87,37	87,37	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kokop	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kokop	87,37	87,37	
					Nilai SAKIP Kecamatan Kokop	60	60	

3.2 Program dan Kegiatan

Adapun Perubahan Rencana Kerja 2024 pada Kantor Kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan akan menjalankan 5 Program, 13 Kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Kokop Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

c). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

e). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

f). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian sub

kegiatan sebagai berikut :

a). Penyediaan Gaji dan Tunjangan

b). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerahdengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a). Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a). Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c). Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahdengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a). Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c). Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahdengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

d). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan dengan rincian sub Kegiatan sebagai berikut : 22

a) Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada

Masyarakat di wilayah kecamatan.

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan rincian sebagai berikut :

a). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

a). Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a). Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

a). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kokop pada Tahun 2024 harus sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Kesesuaian tersebut sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Nama PD : KECAMATAN KOKOP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Renja 2024					Perubahan Renja Tahun 2024					Selisih
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 11-
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Kokop**	**Kec. Kokop**	**100%**	**2,561,709,342**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Kokop**	**Kec. Kokop**	**100%**	**2,545,717,201**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**-15,992,1**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Kokop**	**Kec. Kokop**	**100%**	**10,436,450**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Kokop**	**Kec. Kokop**	**100%**	**10,436,450**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,612,350	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,612,350	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,612,500	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,612,500	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,462,500	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,462,500	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,392,600	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,392,600	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,458,600	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,458,600	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,555,150	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	1,555,150	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kec. Kokop	1 Laporan	1,342,750	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kec. Kokop	1 Laporan	1,342,750	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kec. Kokop**	**100%**	**2,111,978,442**	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kec. Kokop**	**100%**	**2,097,371,301**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**-14,607,1**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kokop	12 Bulan	2,109,847,392	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kokop	12 Bulan	2,095,240,251	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	-14,607,1
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Kec. Kokop	1 Laporan	1,026,300	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Kec. Kokop	1 Laporan	1,026,300	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Kec. Kokop	18 Laporan	1,104,750	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Kec. Kokop	18 Laporan	1,104,750	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kec. Kokop**	**100%**	**1,862,900**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kec. Kokop**	**100%**	**1,862,900**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kec. Kokop	1 Laporan	1,862,900	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kec. Kokop	1 Laporan	1,862,900	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kec. Kokop**	**100%**	**2,434,500**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	**Kec. Kokop**	**100%**	**2,434,500**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kokop			Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kokop			Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Kokop	1 Kegiatan	2,434,500	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Kokop	1 Kegiatan	2,434,500	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Kokop**	**90%**	**10,725,700**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Kokop**	**90%**	**6,950,700**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**-3,775,0**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kokop	1 Unit	1,687,750	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kokop	1 Unit	1,687,750	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kokop	3 unit	2,605,950	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kokop	3 unit	2,605,950	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Kec. Kokop	2 Jenis	1,800,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Kec. Kokop	2 Jenis	525,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	-1,275,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Kokop	3 Jenis	2,632,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Kokop	3 Jenis	2,132,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	-500,0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kokop	1 Jenis	2,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kokop	1 Jenis	-	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	-2,000,0
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**100%**	**44,100,600**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Persentase Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**0%**	**40,484,600**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**-3,616,0**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kec. Kokop			Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Mebel yang diadakan	Kec. Kokop	-	0	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Kokop	6 Unit	44,100,600	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Kokop	5 Unit	40,484,600	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	-3,616,0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**Kec. Kokop**	**90%**	**265,877,500**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**Kec. Kokop**	**90%**	268,267,500	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	2,390,0
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Kec. Kokop	2 Jenis	1,810,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Kec. Kokop	2 Jenis	1,800,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	-10,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Kokop	2 Jenis	18,840,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Kokop	1 Jenis	25,140,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	6,300,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Kec. Kokop	12 Jenis	245,227,500	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Kec. Kokop	12 Jenis	241,327,500	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	-3,900,0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**100%**	**114,293,250**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**100%**	**117,909,250**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**3,616,000**

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kec. Kokop	2 Unit	1,800,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kec. Kokop	2 Unit	1,800,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kec. Kokop	2 Unit	30,593,250	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kec. Kokop	2 Unit	34,209,250	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	3,616,0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec. Kokop	6 Unit	1,900,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec. Kokop	6 Unit	1,900,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec. Kokop	1 Unit	80,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec. Kokop	1 Unit	80,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, pemerintahan, pembanguunan dan kemasayarakatan (Kecamatan Kokop)	**Kec. Kokop**	**90%**	**3,044,800**	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Prosentase koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, pemerintahan, pembanguunan dan kemasayarakatan (Kecamatan Kokop)	**Kec. Kokop**	**90%**	**3,044,800**	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, pemerintahan, pembanguunan dan kemasayarakatan (Kecamatan Kokop)**	**Kec. Kokop**		**-**	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	**Prosentase koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan (Kecamatan Kokop)**	**Kec. Kokop**		**-**	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	Kec. Kokop			Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	Kec. Kokop			Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**	**Kec. Kokop**	**90%**	**3,044,800**	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	**Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun**	**Kec. Kokop**	**90%**	**3,044,800**	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	3,044,800	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	Kec. Kokop	1 Dokumen	3,044,800	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**95%**	**9,665,100**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**95%**	**9,215,100**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	- 450,000.
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**95%**	**6,642,700**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**95%**	**6,642,700**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kec. Kokop	1 Kegiatan	6,642,700	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kec. Kokop	1 Kegiatan	6,642,700	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.03.2.06.	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Prosentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**95%**	**3,022,400**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Prosentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**95%**	**2,572,400**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	

7.01.03.2.06.06	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kegiatan Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang dilaksanakan	Kec. Kokop	1 Kegiatan	3,022,400	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Kegiatan Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang dilaksanakan	Kec. Kokop	1 Kegiatan	2,572,400	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	450,000.
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**95%**	**3,074,800**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**95%**	**3,074,800**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**95%**	**3,074,800**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**95%**	**3,074,800**	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	Kec. Kokop	1 Kegiatan	3,074,800	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	Kec. Kokop	1 Kegiatan	3,074,800	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**90%**	3,053,350	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**90%**	3,053,350	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	

7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**90%**	3,053,350	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	**Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana**	**Kec. Kokop**	**90%**	3,053,350	**Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum**	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	Kec. Kokop	13 Desa	3,053,350	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	Kec. Kokop	13 Desa	3,053,350	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	Kec. Kokop			Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	Kec. Kokop			Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum	
JUMLAH					**2,580,547,392**					**2,564,105,251**		**16,442,1**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Kokop merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kokop selama jangka waktu 1(satu) tahun yaitu tahun 2024, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Kokop menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program walaupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Renja Kecamatan Kokop ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA OPD Kecamatan Kokop diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bangkalan serta adanya dukungan dari semua pihak,kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dipundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kehilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.